PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

LKJIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kabupaten Nganjuk



2024

Telp/Fax: (0358) 3550320
Email: diskominfo@nganjukkab.go.id
https://diskominfo.nganjukkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2024. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. LKjIP sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dalam penyusunan LKjIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di tahun berikutnya. Semoga LKjIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Nganjuk, 7 Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SUKONO, S.Kom
Pembina
NIP 19761128 200604 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LKjIP. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik *(good governance)* memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.

Dalam mencapai target yang dtetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk melakukan upaya dan langkah-langkah antara lain :

1. Mengembangkan aplikasi dalam rangka mewujudkan *e-goverment*;
2. Pengadaan sarana dan prasarana TIK untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik;
3. Menyusun data statistik sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan;
4. Optimalisasi fungsi PPID Kabupaten dan PPID Pembantu sebagai *Goverment Public Relation* dalam pengelolaan komunikasi publik dan meningkatkan pelayanan publik yang prima;
5. Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat sebagai media komunikasi antara warga masyarakat dan pemerintah Kabupaten;
6. Penyampaian informasi pembangunnan beserta hasil-hasilnya melalui media cetak dan elektronik.

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024 dengan alat ukur 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis					
No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target 2024**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Terselenggaranya layanan SPBE Daerah secara Optimal	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	7%	7%	100%

Hasil Capaian Kinerja Dinas Kominfo tahun 2024 adalah :

Capaian kinerja sasaran " Terselenggaranya layanan SPBE Daerah secara Optimal" hasil capaian indikator Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang mencapai 100%.

Keseluruhan anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 23.930.065.845 telah terserap sebesar 94,89% atau sejumlah Rp. 22.706.725.441 .

Melalui LKjIP Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 5

BAB I PENDAHULUAN 8
A Latar Belakang 8
B Landasan Hukum 9
C Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 10
D Isu-isu Strategis (*strategic issued)* yang sedang dihadapi Organisasi 19
E Sistematika Penulisan..... 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
A Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2024 21
B Perjanjian Kinerja Tahun 2024 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 26
A Capaian Kinerja Organisasi 26
A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024……. 27
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya…….. 30
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstara…… 32
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standard Nasional …….. 33
A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja…… 34
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…….. 36
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja…….. 37
B Realisasi Anggaran 43

BAB IV P E N U T U P 48
A Kesimpulan 48
B Rekomendasi..... 48
LAMPIRAN – LAMPIRAN :……..

DAFTAR GAMBAR

1.1 Komposisi Pegawai..... 17
1.2 Komposisi Pendidikan Pegawai..... 18

DAFTAR TABEL

1	Sasaran Strategis	4
1.1	Komposisi Kepegawaian berdasarkan Eselon	16
1.2	Kondisi Kepegawaian berdasarkan pendidikan.....	17
2.1	Indikator Kinerja Utama…….....	22
2.2	Tujuan, sasaran dan Arah Kebijakan.....	22
2.3	Target Kinerja Tahun 2024.....	24
3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	26
3.1.1	Realisasi Kinerja Tahun 2024	28
3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021	30
3.1.3.1	Target Kinerja Renstra.....	32
3.1.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra.....	32
3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standard Nasional.....	33
3.1.5	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja.....	34
3.1.6	Efisiensi Penggunanaan Sumber Daya	36
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	37
3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2024…….	43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota/Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 39 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 08 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.

2. Fungsi

Dinas Komunikasi dan informatika menyelenggarakan fungsi:

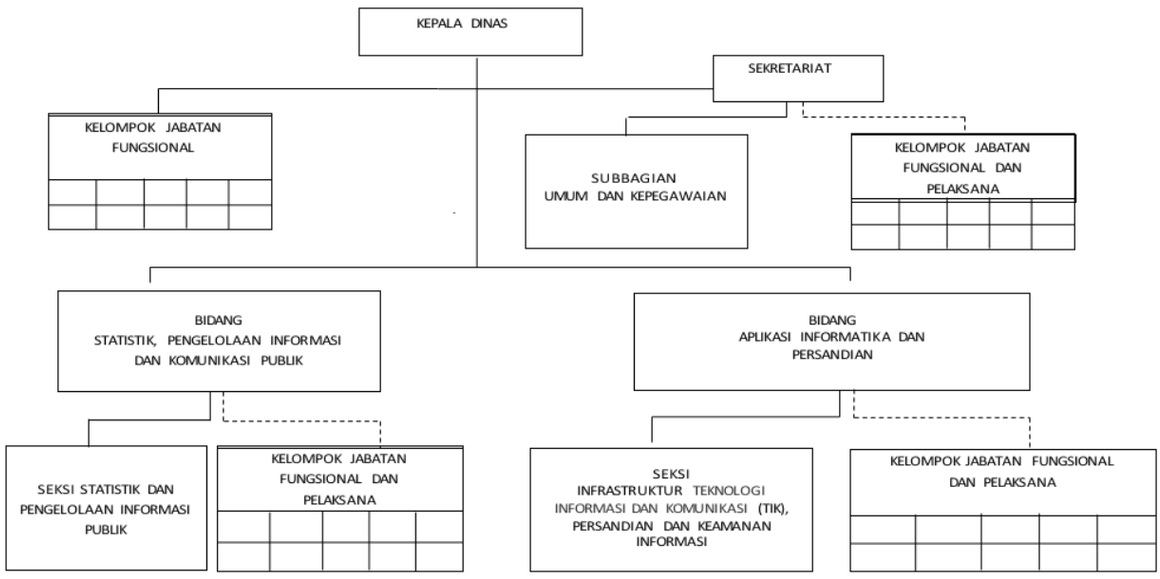
a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
b. pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
c. pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
d. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
e. pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
f. pengelolaan dan pengembangan e-government dan smart city;
g. pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;
h. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1) Sekretaris, membawahi:
   i. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   ii. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2) Bidang Statistik Dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, membawahi:
   i. Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik
   ii. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
3) Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, membawahi :
   i. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi Teknologi
   ii. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional



4) Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, dapat dilihat pada gambar di bawah.

Tugas pokok masing-masing Eselon III dan IV sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Fungsi

1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
   b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   c) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;

d) Pembinaan aparatur;
e) Pengelolaan urusan kepegawaian;
f) Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
g) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
h) Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
i) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang statistik dan pengelolaan komunikasi publik.

Fungsi:

Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja Bidang;
2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang:
   a) Pelaksanaan survei, pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral, analisis data pembangunan, penyusunan kompilasi produk statistik sektoral;
   b) pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
   c) pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
   d) Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
   e) Pelayanan informasi publik;
   f) Pelayanan hubungan media;
   g) Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
   h) Penyediaan akses informasi;
3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
5) Pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan tugasnya.

- **Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik**

  Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas:

  a) Menyusun perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban kinerja Seksi;

b) Menyiapkan bahan:
   (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
   (2) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
   (3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan
   (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan statistik sektoral, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
c) Melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data statistik sektoral;
d) Melaksanakan validasi data yang bersumber dari seluruh Perangkat Daerah, BPS dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan data;
e) Membangun e-database dan/atau metadata statistik sektoral sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
f) Pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
g) Pelaksanaan analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
h) Pelaksanaan penyusunan kompilasi produk statistik sektoral;
i) Menyusun dan mempublikasikan data statistik sektoral baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik;
j) Menyediakan sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah;
k) Mmelakukan peningkatan kemampuan aparat sdm melalui bimbingan teknis, studi banding, dan sosialisasi statistic sectoral.
l) Melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
m) Melakukan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
n) Melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;
o) Menyusun standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
p) Melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
q) Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
r) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
s) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang aplikasi informatika dan persandian.

Fungsi :

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

1) penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban kinerja Bidang;
2) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang:
   a) layanan infrastruktur dasar data center;
   b) disaster recovery center & TIK;
   c) layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
   d) layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
   e) layanan manajemen data dan informasi e-Government;
   f) layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
   g) integrasi aptika layanan publik dan kepemerintahan;
   h) penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
   i) penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten;
   j) pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat; dan
   k) layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.
   l) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
   m) pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
3) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
4) pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- ***Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi dan Teknologi***

  Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan Informasi dan Teknologi mempunyai tugas:

  a) menyusun perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban kinerja Seksi;
  b) menyiapkan bahan:

(1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
(2) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
(3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
(4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, Persandian dan Keamanan informasi di Kabupaten;

c) menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
d) menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
e) menyelenggarakan Government Cloud Computing;
f) menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
g) menyelenggarakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
h) menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
i) menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan infrastruktur TIK oleh aparatur pemerintahan;
j) menyelenggarakan layanan monitoring trafik internet dan intranet;
k) melaksanakan audit TIK;
l) menyusun teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
m) menyusun teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
n) melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
o) melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government;
p) menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
q) menyelenggarakan layanan filtering konten negatif;
r) melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan keamanan informasi milik pemerintah daerah;
s) melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
t) melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
u) melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan seminar;
v) melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian/keamanan informasi;

w) melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

x) melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan, asset, fasilitas, instalasi penting, vital, kritis melalui kontra penginderaan dan metode pengamanan persandian lainnya;

y) melaksanakan pengamanan informasi elektronik;

z) melaksnakan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

aa) melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

bb) melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

cc) melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan

dd) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Kepegawaian**

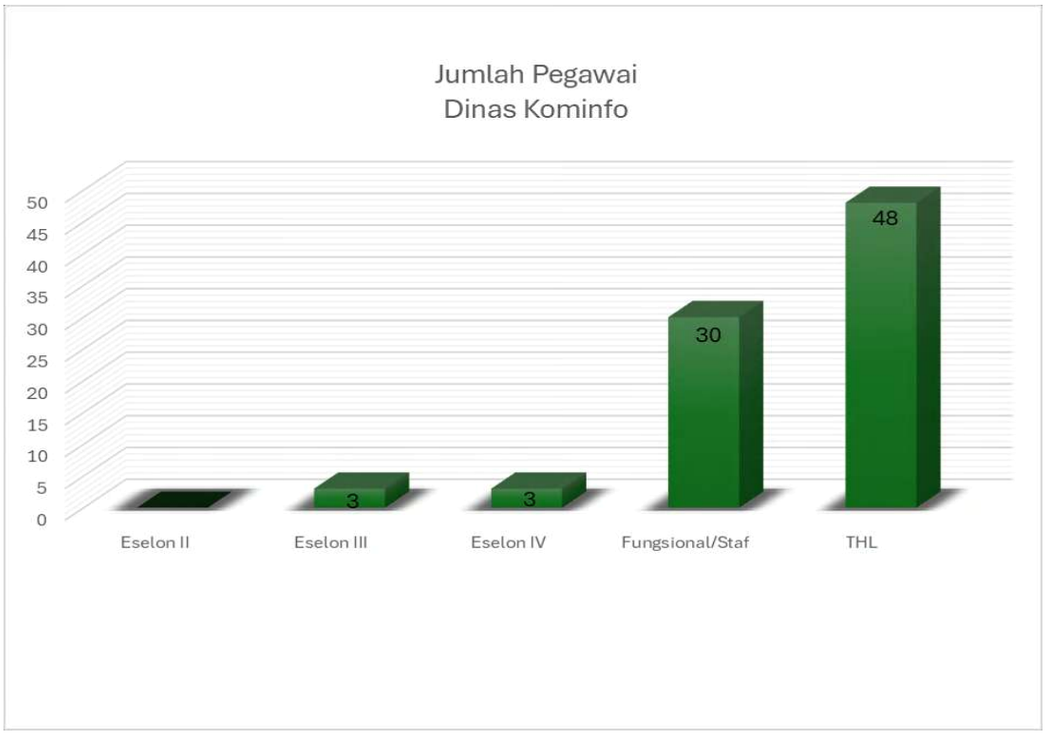
Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk memiliki pegawai ASN sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 22 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon IIIb) sebanyak 2 orang, Kepala subag dan Kepala Seksi (Eselon IVa) sebanyak 3 orang, pejabat fungsional sebanyak 9 dan serta pelaksana sebanyak 6 orang. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

TABEL 1.1
Komposisi Kepegawaian berdasarkan eselon jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional/ Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas						
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang			2			2
4	Kepala sub-bag dan Kepala seksi				3		3
5	Fungional					24	24
6	Pelaksana					6	6
	JUMLAH			**3**	**3**	**30**	**36**

Selain pegawai berstatus ASN, Diskominfo Kabupaten Nganjuk juga dibantu oleh 48 (empat puluh delapan) orang THL. Sebagai ilustrasi perbandingan jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan golongan PNS di Diskominfo Kabupaten Nganjuk tahun 2024, dapat dilihat pada gambar 1. Dari Gambar 1 di bawah menunjukkan komposisi THL menempati jumlah terbanyak di Diskominfo Kabupaten Nganjuk, diikuti Fungsional atau Staf ASN.

GAMBAR 1.1
Komposisi Pegawai Diskominfo Kabupaten Nganjuk Berdasarkan status Kepegawaian dan Golongan Tahun 2024

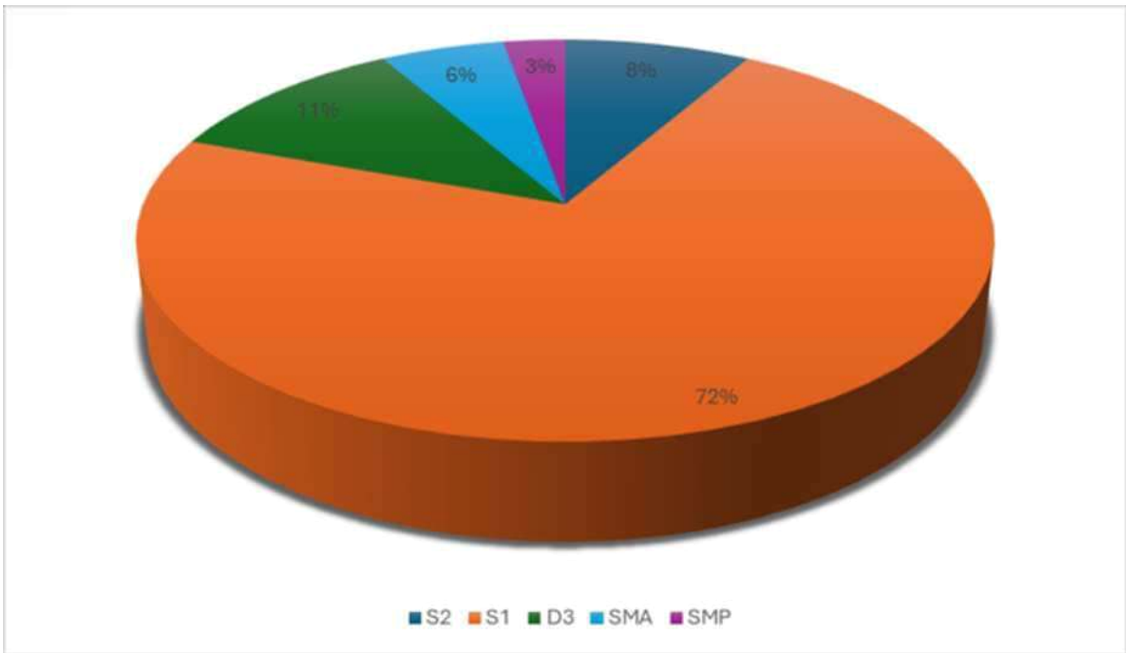


Untuk menunjang efektifitas kinerja, pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai di Diskominfo Kabupaten Nganjuk dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil pemetaaan pendidikan Pegawai dapat dilihat di tabel 1.2. Sebagai ilustrasi komposisi pendidikan pegawai ditunjukkan oleh gambar 1.2.

TABEL 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

NO	URAIAN	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	JUMLAH
1	KEPALA DINAS								
2	SEKRETARIS			1					1
3	KEPALA BIDANG		1	1					2
4	KEPALA SUB BAG		1	1					2
5	KEPALA SEKSI		1	3					4
6	JABATAN FUNGSIONAL			17	3				20
7	PELAKSANA			3	1	2	1		7
	JUMLAH		**3**	**26**	**4**	**2**	**1**	**0**	**36**

GAMBAR 1.2
Komposisi pendidikan pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024



Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, sebanyak 3 orang (14%) memiliki pendidikan S2, yaitu 1 orang eselon III dan 2 orang eselon IV. Yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 26 orang (72%), D3 sebanyak 4 orang (11%), SMA sebanyak 2 orang (6%), SMP sebanyak 1 orang (3%), dan tidak ada pegawai dengan pendidikan SD.

❖ **Sarana dan Prasarana**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk beralamat di Jalan Merdeka Nomor 21 Nganjuk Kode Pos 64412, dengan No. Telp/Fax (0358) 3550320, dan *email* diskominfo@nganjukkab.go.id.

Tanah yang digunakan masih menjadi satu dengan Dinas PUPR sedangkan Gedung yang dipergunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk terdiri 2 lantai seluas 312 M² digunakan sebagai bangunan utama untuk Ruang Kepala Dinas 24 M², Ruang Sekretaris 12 M², Ruang Kepala Bidang e-gov 12 M², Ruang Kepala Bidang SPIKP 12 M², Ruang Sekretariat 36 M², Ruang Multimedia 12 M², Studio Rsal FM 24 M², Ruang Rapat 24 M², Ruang data Center M², sedangkan 156 M² dipergunakan untuk Ruang Staf Bidang, kamar mandi dan lain-lain. Gedung tersebut telah memadai untuk kelayakan/kenyaman bekerja, pemasangan tirai/korden, penerangan dan ventilasi yang cukup dan terjaga kebersihannya. Selain bangunan di jln. Merdeka Dinas Kominfo juga mempunyai tanah bangunan di jln. Basuki Rahmad nomor 1 yang diperuntukan bagi Command Center.

Prasarana Penerangan Listrik telah memiliki instalasi tersendiri sehingga penggunaan Listrik sudah memadai akan tetapi untuk memaksimalkan perlengkapan penunjang operasional kantor, data center dan radio Rsal FM masih diperlukan penambahan daya listrik agar dapat digunakan secara optimal.

Peralatan dan perlengkapan kantor yang di miliki adalah Komputer PC 76 buah, Laptop 45 buah, Printer 21 buah scaner 3 buah. Jumlah tersebut masih memerlukan penambahan baik jumlah maupun spesifikasinya, sehingga diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap pada tahun mendatang.

Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor yang ada sebanyak 3 (tiga) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) yang ada sebanyak 7 (tujuh) unit, dengan kondisi sedang dan masih memerlukan pembaharuan/peremajaan.

Untuk prasarana jaringan internet juga telah tersedia yang dipergunakan mengakses informasi dan aturan terbaru, untuk komunikasi dan memfasilitasi pengolahan data.

D. 1su-isu Strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Organisasi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi, dan media, dan teknologi, Diskominfo Kabupaten Nganjuk dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2024-2026, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Nganjuk. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Tingginya kebutuhan infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan TIK dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi;
2. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi pemerintahan;
3. Kebutuhan yang tinggi atas data statistik sektoral yang lengkap, valid dan mutakhir;
4. Menguatnya kebutuhan masyarakat terhadap keamanan informasi.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selama tahun 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut :

Bab I- Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk serta struktur organisasi.

Bab II-Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 meliputi RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III-Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pengukuran kinerja tahun 2024, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2024.

Bab IV-Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

A. Rencana Strategis Dan Rencana Kinerja Tahun 2024

a. RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Agenda bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam Misi ke 2 RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 yang ada di dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang berbunyi "Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing*"* dengan sasaran yang terkait langsung dengan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yaitu "Meningkatnya aksesibilitas sarana dan prasarana publik yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh segenap lapisan masyarakat.".

b. Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026

a. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan atas tujuan dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Perubahan Rencana Strategis 2024-2026. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Nganjuk.

Tujuan Diskominfo

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik Indikator: Nilai Indeks SPBE

Sasaran Diskominfo

Sasaran 1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal
Indikator	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang

b. Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk telah menentukan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yang menjadi acuan kinerja untuk periode waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	**2**	**3**
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal	Presentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang

c. Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan instansi pemerintah, prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nganjuk tahun 2024–2026 telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang terkait langsung dengan bidang komunikasi dan informatika. Strateginya yaitu meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (E-Government) sedangkan arah kebijakannya adalah Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung publikasi, penyebarluasan informasi dan komunikasi terintegrasi dengan mengembangkan konsep Kabupaten Cerdas (*Nganjuk Smart City*).

Sedangkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan Dinas Kominfo secara lebih rinci adalah dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD :	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik		
Sasaran RPD:	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Menerapkan Layanan SPBE yang terintegrasi dan aman, berbasis satu data yang valid dan mutakhir, didukung infrastruktur TIK dan SDM TIK yang berkualitas serta memberdayagunakan	Penyediaan rencana induk SPBE dan memastikan pengimplementasiannya
			Peningkatan Layanan Akses Interne, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda
			Peningkatan penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City

Tujuan RPD :	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik		
Sasaran RPD:	Meningkatnya transformasi digital pemerintah daerah		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
publik		partisipasi masyarakat dalam wujud Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL)	Peningkatan Integrasi layann Publik dan Kepemerintahan
			Peningkatan Layanan Pembangunan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi
			Peingkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda
			Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar data Centrev, Disaster Recovery Center dan TIK
			Peningkatan Layanan Keamanan Informasi
			Peningkatan Pemantauan Opini dan Aspirasi masyarakat melalui Media Massa
			Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakatdan Media
			Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik
			Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat
			Pningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik
			Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Daerah

d. Program Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk didukung melalui 5 program yang didukung 12 kegiatan dan 35 subkegiatan :

Program prioritas :

1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

   Sasaran program ini adalah terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Nilai Aspek TIK dengan target nilai 2,00. Anggaran Program ini sebesar Rp. 14.357.904.941,-

2) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sasaran program ini adalah terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator presentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang ada pada Pemerintah Daerah dengan target 87%. Anggaran Program ini sebesar Rp. 800.696.000,-

3) Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Sasaran program ini adalah terlaksananya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk dengan target skor 60. Anggaran Program ini sebesar Rp. 2.249.810.800,-.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sasaran program ini adalah terselenggaranya Statistik Sektoral dengan indikator nilai tingkat kematangan layanan data terbuka. Anggaran Program ini sebesar Rp. 502.403.000,-.

Program Penunjang :

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran program ini adalah terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator nilai survey kepuasan masyarakat dengan target nilai 81 dan nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target 81. Anggaran Program ini sebesar Rp. 6.019.251.104,-.

e. Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran beserta Indikator yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk menetapkan rencana kinerja sebagai berikut :

TABEL 2.3
Target Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2024
1	**2**	**3**	**4**
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal	Presentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	7%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini

menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan/subkegiatan, dan merupakan dasar bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	7%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.260.612.504	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.970.811.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	14.286.682.541	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	502.403.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	614.696.000	APBD
	Jumlah		**23.635.205.045**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan/Subkegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *Good Governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan/subkegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	50 ≤ 60	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL) merupakan Program Prioritas Daerah “Percepatan Transformasi Digital” RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang memiliki sasaran atau tujuan untuk memberikan:

1. Pelayanan membahagiakan dengan kegiatan utama Desa/Kelurahan pelayanan kependudukan yang meliputi:
   - Pendataan peristiwa penting dan pristiwa kependudukan melalui aplikasi SEDUDO;
   - Pelayanan adminduk menggunakan aplikasi SEDUDO dan e-SUKET;

- Pelaporan data kependudukan menggunakan aplikasi SEDUDO

2. Keluarga sejahtera dengan kegiatan utama Desa/Kelurahan penanggulangan kemiskinan dan stunting melalui tim penanggulangan kemisikan Desa dan tim pendamping Keluarga Desa untuk:
   - Memberikan pelayanan ketenagakerjaan didukung aplikasi MERGAWE;
   - Melakukan verivikasi dan validasi DTKS menggunakan aplikasi SIKS-NG;
   - Melasanakan program kemiskinan dan stunting serrta melaporkan realisasinya menggunakan aplikasi SIDA BERKAT;
   - Memuthakirkan data REGSOSEK melalui aplikasi SEPAKAT
3. Masyarakat harmonis dengan kegiatan utama Desa/Kelurahan melaksanakan program Desa sadar hukum, melalui:
   a. Penyuluhan Desa sadar hukum, dengan topik:
      - Pemberantasan narkoba
      - Perdagangan orang
      - Kekerasan anak dan perempuan
      - 4 pilar kebangsaan
      - Gender
   b. Pelayanan Restorative Justice
   c. Pembangunan jaringan CCTV SIBERJOYO
4. Pemerintahan terpercaya dengan kegiatan utama Desa/Kelurahan mendukung program Desa Antikorupsi KPK, melalui:
   - Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui e-LPPDes di SEDUDO
   - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Desa
   - Penerapan naskah dinas elektronik melalui aplikasi SRIKANDI
5. Masyarakat partisipatif dengan kegiatan utama Desa/Kelurahan pelaksanaan gotong royong dan pelaporan gotong royong menggunakan aplikasi GUGUR GUNUNG di SEDUDO

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel 3.1.1 berikut ini:

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	1	2	4	5	6
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik		Nilai Indeks SPBE	2,50	3,84	154
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	7%	7%	100

Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Pada bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja atau formulasi berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

a. Nilai Indeks SPBE

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Tujuan dari indikator ini dalam rangka peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap perbandingan target dan realisasi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, disimpulkan bahwa perolehan indikator Nilai Indeks SPBE mencapai 3,84 hasil evaluasi dari Menpan RB yang berkriteria **Sangat Baik** dengan target 2,50 sesuai dokumen perencanaan sehingga memperoleh capaian 154%. Adapun formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah:

$$\frac{\textbf{Nilai Indeks SPBE hasil evaluasi Menpan RB}}{\textbf{Target Nilai Indeks SPBE}} \textbf{ X 100\%}$$

b. Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang

1) Penjelasan umum indikator sasaran

Dalam rangka mendorong percepatan capaian tujuan dan sasaran, Dinas Kominfo menetapkan KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG (KAMPUNG DIAL) sebagai proyek Prioritas 2024-2026.

KAMPUNG DIAL adalah layanan terpadu dan berbasis elektronik di bidang pemerintahan, pelayanan publik serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/411.013/2024 tentang Penyelenggaraan Program Kampung Digital Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk. Pembentukan KAMPUNG DIAL bertujuan untuk:

a) **Pelayanan Membahagiakan**, yakni menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpadu, berbasis elektronik sehingga membahagiakan masyarakat.
b) **Keluarga Sehat, Cerdas, dan Sejahtera**, yakni mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat, cerdas, mandiri ekonomi, serta sigap melayani masyarakat rentan.
c) **Masyarakat Harmonis**, yakni menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terhindar dari konflik dan gangguan kamtibmas, serta keluarga yang tangguh dari bencana dan tangguh dari dampak buruk teknologi dan internet, mampu memanfaatkan teknologi dan internet untuk kesejahteraan keluarga.
d) **Pemerintahan Terpercaya**, yakni membangun pemerintahan desa dan kelurahan yang informatif (terbuka/ transparan dalam kebijakan), responsif (tanggap terhadap keluhan/ pengaduan masyarakat), serta profesional (berpengetahuan, tertib, dan produktif).
e) **Masyarakat Partisipatif**, yakni menciptakan desa/ kelurahan yang berkarakter gotong royong serta masyarakat yang aktif berpartisipasi mendukung kelancaran pembangunan desa/kelurahan.

2) Instrumen/ cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL) di desa/kelurahan Kabupaten Nganjuk. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo 2024-2026 adalah sebesar 7% di tahun 2024. Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan KAMPUNG DIAL}}{\textbf{Jumlah seluruh Desa/Kelurahan}} \textbf{ X 100\%}$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap terhadap perbandingan target dan realisasi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, disimpulkan bahwa indikator sasaran Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL) berkriteria **sangat tinggi** dengan capaian 100%. Hal ini dibuktikan dari total 284 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Nganjuk ditargetkan 20 Desa/Kelurahan atau 7% yang menerapkan Kampung Dial dan terealisasi sebanyak 7%. Adapun daftar 20 Desa/Kelurahan yang ditetapkan untuk menerapkan Kampung Dial

dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/9/K/411.013/2024, yaitu Desa Sekarputih, Desa Kemaduh, Desa Sendangbumen, Desa Mojoseto, Desa Munung, Desa Bangsri, Desa Lengkong, Desa Tempelwetan, Desa Mangundikaran, Desa Kuncir, Desa Sugihwaras, Desa Kalianyar, Desa Mlandangan, Desa Lestari, Desa Nglawak, Desa Talang, Desa Sidorejo, Desa Nglundo, Desa Malangsari, Desa Ngadipiro.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan pengukuran realisasi kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel 3.1.2 berikut ini:

TABEL 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan tahun 2023, 2022 dan tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Realisasi			
			Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam manajemen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik		**Nilai Indeks SPBE**	-	-	-	2,50	-	-	-	3,84
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL)	N/A	N/A	N/A	7%	N/A	N/A	N/A	7%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik		**Nilai Indeks SPBE**	2,6	2,6	3,5	-	2,14	2,18	3,62	-
1	Meningkatnya Kualitas e-Government yang efisien	Persentase Aplikasi e-Government yang terhubung dengan jaringan	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Terwujudnya layanan SPBE terintegrasi	Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perangkat daerah	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi		
			Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman								
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Terwujudnya pengelolaan data dan informasi yang lengkap, valid dan terbaru	Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan informasi publik	N/A	13%	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala	N/A	60%	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari **tabel 3.1.2** kita dapat melihat peta capaian kinerja mulai dari capaian akhir tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk indikator Nilai Indeks SPBE memperoleh capaian berpredikat Sangat Baik dari tahun sebelumya yang berpredikat rata-rata Baik. Sedangkan untuk indikator Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL) belum ada capaiannya, hal ini dikarenakan untuk tahun sebelumnya belum diterapkan indikator Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL). Namun di tahun 2024 indikator tersebut memiliki target 7% dan terealisasi 7% sehingga memiliki capaian 100% atau berkriteria sangat tinggi mengingat indikator tersebut merupakan indikator awal dari target Renstra tahun 2024-2026.

Adapun indikator dari sasaran trategis dari tahun sebelumnya dengan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik pada poin 1,2,3,4 tidak menjadi indikator pada dokumen perencanaan periode 2024-2026.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Table 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik		Nilai Indeks SPBE	2,50	2,75	3,00	N/a	N/a
	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	7%	21%	42%	N/a	N/a

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik		Nilai Indeks SPBE	3,00	3,84	128
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	42%	7%	16,67

Analisa dan evaluasi atas pencapaian sasaran IKU tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik diukur dengan indikator Nilai Indeks SPBE dengan target 2,50 terealisasi 3,84 dengan capaian 154%. Hasil realisasi dijabarkan dalam evaluasi dari Menpan RB terlampir.
2. Sasaran Terselenggaranya Layanan SPBE secara Optimal diukur dengan 1 indikator yaitu:
   a. Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL)
      - ✓ Jumlah Desa/Kelurahan 284 Desa/Kelurahan
      - ✓ Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan Kampung Dial 20 Desa/Kelurahan
      - ✓ Presentase target 7%
      - ✓ Presentase Realisasi 7%
      - ✓ Presentase Capaian 100 %

Adapun kegiatan yang mendukung penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang adalah sebagai berikut :

1. Layanan publik berbasis elektronik terintegrasi rincian sebagai berikut:
   - ➢ Jumlah Aplikasi Layanan Publik 139 web/aplikasi
   - ➢ Jumlah Aplikasi/web terintegrasi dg Data Center 113 web/aplikasi

2. Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman dengan rincian sebagai berikut :
   - Jumlah seluruh Perangkat Daerah 52 PD
   - Jumlah PD yang terlayani infrastruktur Jaringan 52 PD
3. Perangkat Daerah berpredikat "Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik dengan rincian sebagai berikut :
   - Jumlah PD 52 PD
   - Jumlah PD yang berpredikat informatif 46 PD
4. OPD yang melakukan update data statistik sektoral secara berkala dengan rincian sebagai berikut :
   - Jumlah PD 52 PD
   - Jumlah PD yang melakukan update data 52 PD

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1	2	3	5	6
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	52%	7%

Sumber: https://dukcapil.klaten.go.id/pelayanan
https://jdih.magelangkota.go.id
https://mpp.magelangkab.go.id/services/detail/1

Dari **tabel 3.1.4** diatas dapat dilihat Perbandingan kinerja Dinas Kominfo Nganjuk dengan kinerja daerah lain. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

- Salah satu Indikator Presentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (Kampung Dial) telah diterapkan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah yaitu layanan kependudukan dengan sistem penerapan administrasi secara online menggunakan aplikasi SAKURA (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan dalam Jaringan), dimana aplikasi ini sangat mirip dengan aplikasi SEDUDO. Layanan administrasi online terkait kependudukan tersebut di Kabupaten Klaten telah di terapkan di 391 Desa/Kelurahan.
- Kabupaten Magelang juga telah menerapkan salah satu indikator Penerapan Kampung Dial yaitu Program Desa Sadar Hukum dimana ada 4 Desa dari 372 Desa/Kelurahan yang dilakukan pembinaan Desa Sadar Hukum yaitu Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik, Desa Banjaragung Kecamatan Kajoran, Desa Wulunggunung Kecamatan Sawangan, Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik. Sedangkan untuk layanan administrasi online Kabupaten Magelang juga diterapkan

di seluruh Desa/Kelurahan sama halnya dengan SEDUDO yang diberi nama aplikasi Genduk Manis (Gawe Adminduk Mayar Lan Gratis)

- Dapat dilihat dari penjabaran tersebut bahwa total dari Desa/Kelurahan yang menerapkan salah satu indikator Kampung Dial baik Kabupaten Klaten maupun Kabupaten Magelang dengan capaian rata-rata 52%.

A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik		Nilai Indeks SPBE	154	Tercapai
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah yang Optimal	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	100	Tercapai

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja:

1. Nilai Indeks SPBE berkriteria "**Tercapai**" dari target 2,50 realisasi 3,84 dan diperoleh capaian kinerja sebesar 154%, adapun beberapa penyebab keberhasilan kinerja ini adalah:
   a. Komitmen Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Nganjuk untuk ikut mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 yaitu pencapaian indeks SPBE Kabupaten Nganjuk serta adanya upaya perbaikan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Nganjuk berbasis TIK;
   b. Peningkatan kapasitas warehouse data untuk menampung layanan hosting bagi seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan server baik server yang diletakkan di Data Center Kabupaten Nganjuk maupun pengadaan Server DRC yang akan dimanfaatkan untuk Backup Data. Pengadaan server dilakukan dengan *e-purchasing*.
   c. Integrasi Aplikasi
   d. Pemeliharaan Aplikasi
   e. Pembuatan Aplikasi atau Software
2. Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang berkriteria "**Tercapai**" dari target 7% realisasi 7% dan diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Beberapa penyebab keberhasilan kinerja ini adalah:
   a. Komitmen Tim Pelaksana Program Prioritas Daerah Kampun Digital Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk.

b. Tersedianya pelayanan Omah Tandang atau pelatihan digital bagi pelaku usaha UMKM.
c. Peningkatan kapasitas warehouse data untuk menampung layanan hosting bagi seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan server baik server yang diletakkan di Data Center Kabupaten Nganjuk maupun pengadaan Server DRC yang akan dimanfaatkan untuk Backup Data. Pengadaan server dilakukan dengan e-purchasing. Jumlah server yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 sebesar 19 unit.
d. Integrasi Aplikasi
e. Pemeliharaan Aplikasi
f. Pembuatan Aplikasi atau Software
g. Aplikasi yang dikembankan dan disempurnakan pada tahun 2024 ini adalah: Sedudo (sedudo.nganjukkab.go.id), Portal Informasi (nganjukkab.go.id), CCTV Online (cctv.nganjukkab.go.id), Aplikasi Android Nganjuk Smart City, Aplikasi Berantas Kemiskinan dan Stunting (SIDA BERKAT), Aplikasi Geoportal, Aplikasi Dashboard Satu Data, Aplikasi Ngantar Bis.
h. Pelayanan bandwith bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Nganjuk tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 5 GB.
i. Tersedianya sarana prasarana keamanan informasi.
j. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan (Website Perangkat Daerah dan Website Desa yang digunakan untuk keterbukaan informasi publik).
k. Tersedianya Website PPID untuk masing-masing Perangkat Daerah;
l. Tenaga Non ASN terlatih yang bisa meliput dan menyiarkan berita Pembangunan Daerah.

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/tindak lanjut tersebut adalah:

1. Menambah jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk sebagai sarana implementasi SPBE;
2. Menyusun regulasi pengembangan e-government dan master plan IT
3. Seluruh pengadaan internet dipusatkan di Dinas Kominfo;
4. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan;
5. Memprioritaskan layanan internet pada titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya;
6. Mengadakan/ melatih tenaga ahli di bidang keamanan Informasi.
7. Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Nganjuk.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik				
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah yang Optimal	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	100	94,89	5,11%

Analisa efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding antara persentase anggaran sebagai berikut :

- Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran;
- Tidak Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Berdasarkan penjelasan capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk telah melakukan efisiensi pada sasaran “Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah yang Optimal”. Dari **tabel 3.1.6** diatas dapat dilihat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Kominfo Nganjuk dengan rincian sebagai berikut :

- Indikator Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran 94,89% memiliki tingkat efisiensi sebesar 5,11%, hal ini dikarenakan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran indikator tersebut mencapai 100% dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 3.1.7

Analisi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah yang Optimal	Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**81**	**86,5**	**106%**
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	**81**	**80,10**	**99%**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	69 dok	61	88%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	63 dok	76	120%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yan disusun	25 dok	25 dok	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan	12 lap	12 lap	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	26 buah	48 buah	184%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	4 jasa	4 jasa	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	42 unit	42 unit	100%
			Progam Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Nilai Aspek TIK**	**2**	**1,67**	**84%**
			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	3	5	167%
			Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabuapaten	Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	2	5	250%
				Tingkat kematangan layanan pusat data	2	5	250%
				Tingkat kematanagan penerapan manajemen aset TIK	2	5	250%
			Progam Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	**Presentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada Pemerintah daerah**	**87%**	**96,40%**	**110,80%**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE	2	2	100%
			Progam Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	**Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk**	**60**	**87,09**	**145%**
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Perangkat Daerah berpredikat "Informatif"	3 PD	46 PD	1533%
				Jumlah KIM berpredikat "Aktif"	5 KIM	7 KIM	140%
				Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif	10 PD	13 PD	130%
				Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu	100%	100%	100%
			Progam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	**Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka**	**2**	**4**	**200%**
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan	1 Buku	1 Buku	100%

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dari table 3.1.7 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa gambaran pencapaian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tercapai, bahkan capaian indikator kinerja program ada yang melebihi target dari penetapan dalam RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 2024-2026. Adapun indikator program dengan tingkat pencapaiannya antara lain :

1. **Program untuk menunjang Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang**

   Untuk mencapai indikator Kinerja sasaran tersebut Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan 5 (empat) Program yaitu:

   a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Sasaran program ini adalah terselenggaranya penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk/Kota dengan 2 indikator yaitu nilai survei kepuasan masyarakat dengan target nilai 81 terealisasi rata-rata 86,34 berdasarkan laporan SKM sehingga diperoleh capaian kinerja **106%,** sedangkan nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 81 terealiasi 80,10 berdasarkan laporan berita acara dari Inspektorat Kabupaten Nganjuk dan memperoleh capaian kinerja **99%**.

   Untuk kegiatannya adalah:

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

dengan target 69 dokumen terealisasi 61 dokumen berdasarkan data dokumen perencanaan sehingga capaian kinerja **88%;**

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan target 63 dokumen terealisasi 76 dokumen berdasarkan data dari dokumen keuangan sehingga capaian kinerja **120%**;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikator kegiatan ini Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yan disusun dengan target 25 dokumen terealisasi 25 dokumen berdasarkan data dari kepegawaian diskominfo sehingga capaian kinerja **100%**;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan dengan target 12 laporan terealisasi 12 laporan berdasarkan data dari laporan administrasi umum sehingga capaian kinerja **100%**;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dengan target 26 buah terealisasi 48 buah berdasarkan data pengadaan BMD sehingga capaian kinerja **184%**;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dengan target 4 jasa terealisasi 4 jasa berdasarkan laporan dari jasa penunjang urusan pemerintah daerah sehingga capaian kinerja **100%**;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan target 42 unit terealisasi 42 unit berdasarkan data dari rekapitulasi aset sehingga capaian kinerja **100%**.

Faktor Keberhasilan:

- Terdapat rekomendasi dari Menpan RB terkait implementasi SAKIP bahwa kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan benar-benar memiliki keterkaitan secara langsung untuk mempengaruhi pencapaian sasaran strategi/kinerja perangkat daerah;
- Penetapan target kinerja pada level perangkat daerah ditetapkan secara realistis;
- Melakukan revieu pada sebagian IKU perangkat daerah agar memiliki definisi operasional yang andal, khususnya pada beberapa indikator yang bersifat kualitatif dengan cara memberikan formulasi mengenai syarat yang menggambarkan ketercapaian indikator kinerja;
- Kinerja tim yang solid dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan, laporan keuangan serta percepatan dalam penyusunan laporan kegiatan;
- Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam berpakaian dinas
- Meningkatnya layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo
- Kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang meningkat
- Pembayaran jasa penunjang yang tepat waktu, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

kedinasan serta tersedianya bahan surat menyurat ;

- Tersedianya barang milik Dinas Kominfo yang layak pakai untuk menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan serta terpeliharanya gedung dan bangunan kantor yang nyaman.

Upaya:

- Menetapkan target kinerja pada level perangkat daerah yang lebih realistis
- Meningkatkan kualitas rencana aksi
- Mengoptimalkan pohon kinerja
- Melakukan review IKU agar memiliki definisi operasional yang handal
- Memperkuat tim kinerja

b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sasaran program ini adalah terlaksananya pengelolaan aplikasi informatika dengan indikator Nilai Aspek TIK dengan target nilai 2,00 dengan realisasi 1,67 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB sehingga capaian kinerja **84%.**

Untuk Kegiatannya adalah **:**

(1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah daerah dengan target nilai 3 terealisasi 5 sehingga capaia kinerja **167%.**

(2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indikator kegiatan ini adalah Tingkat kematangan layanan pusat data dengan target nilai 2 terealisasi 5 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB capaian kinerja **250%**, Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE dengan target nilai 2 terealisasi 5 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB capaian kinerja **250%**, Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK dengan target nilai 2 terealisasi 5 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB capaian kinerja **250%**.

Faktor Keberhasilan:

- Meningkatnya sistem informasi manajemen pemerintah daerah;
- Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika pada OPD;
- Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- Pengelolaan dan penagawasan domain dan sub domain;
- Meningkatnya jumlah OPD yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo;
- Pemeliharaan jaringan intra pemda yang selalu update
- Meningkatnya perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
- Meningkatnya layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah;
- Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
- Tersedianya layanan akses CCTV di pemerintah daerah

Upaya:

- Meningkatkan sistem informasi manajemen pemerintah daerah
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi
- Meningkatkan layaan publik dan layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
- Meningkatkan jumlah titik CCTV yang ada di pemerintah daerah

c) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sasaran program ini adalah terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Presentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang ada pada Pemerintah Daerah dengan target 87% dengan realisasi 96,40% berdasarkan data dari rekapitulasi sistem elektronik sehingga capaian kinerja **110,80%.**

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di atas terdiri dari Kegiatan :

(1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan ini adalah Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dengan target 12 Laporan realisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja **100%**.

Faktor Keberhasilan:

- Meningkatnya optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi
- Meningkatnya sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
- Meningkatnya kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan
- Pelaksanaan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serangan siber pada sistem elektronik;
- Pelaksanaan layanan keamanan informasi;
- Meningkatnya jumlah OPD yang menerapkan SMKI;
- Tersedianya dokumen tata kelola/ audit keamanan informasi.

Upaya:

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
- Menigkatkan sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah menjadi kategori sedang atau cukup
- Lebih meningkatkan kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan
- Pelaksanaan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serangan siber pada sistem elektronik;
- Melaksanakan layanan keamanan informasi lebih rutin;
- Menerapkan SMKI ke OPD

d) Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Sasaran program ini adalah terlaksananya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk dengan target 60 dengan realisasi 87,09 berdasarkan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sehingga capaian kinerja **145%**.

Program Informasi dan Komunikasi Publik di atas terdiri dari kegiatan **:**

(1) Pengelolaam Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan ini adalah:

- Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif dengan target 10 PD dan terealisasi 13 PD berdasarkan dari hasil pemantauan media komunikasi yang aktif dari masing-masing Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja **130%**;
- Jumlah PD berpredikat "Informatif" dengan target 3 PD dan terealisasi 46 PD berdasarkan data dari laporan keterbukaan informasi publik sehingga capaian kinerja **1533%**. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya realisasi PD berpredikat "informatif" dari target yang ditetapkan yaitu.;
- Jumlah KIM berpredikat "Aktif" dengan target 5 KIM dan terealisasi 7 KIM berdasarkan data dari hasil pemantauan website KIM sehingga capaian kinerja **120%**;
- Persentase pengaduan masyarakat yang tersepon tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi 100% berdasarkan dari hasil pemantauan website SP4N Lapor sehingga capaian kinerja **100%**.

Faktor Keberhasilan:

- Melakukan kerja sama informasi dengan media;
- Melaksanakan peliputan, reportase dan penyiaran dalam rangka penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat;
- Tingginya realisasi PD berpredikat "informatif" dari target yang ditetapkan dipengaruhi oleh faktor capaian keterbukan informasi publik yang merupakan salah satu kategori dan skor TPP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pasal 11 ayat (4) hal Skoring Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi);
- Dokumen informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
- Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dalam penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- Pengelolaan pengaduan publik melalui kanal aduan publik;

Upaya:

- Meningkatkan target peliputan dan penyiaran dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- Mempertahankan keterbukaan informasi publik dalam salah satu perhitungan skor TPP;
- Meningkatkan jumlah dokumen yang terupdate dalam keterbukaan informasi publik;

- Meningkatkan jumlah KIM yang aktif;
- Menghimbau atau mensosialisasikan terkait layanan respon pengadauan publik yang diakses masyarakat agar terespon tepat waktu di masing-masing perangkat daerah.

e) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sasaran program ini adalah terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Nganjuk dengan indikator nilai tingkat kematangan layanan data terbuka dengan target nilai 2 dan realisasi 4 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB sehingga capaian kinerja **200%**.

Program Informasi dan Komunikasi Publik di atas terdiri dari kegiatan **:**

(1) Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Buku Profil Daerah yang diterbitkan dengan target 1 Buku realisasi 1 Buku sehingga capaian kinerja **100%**.

Output Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah :

Tersedianya buku profil daerah, Data Sektoral yang tersedia dan update

Faktor Keberhasilan:

- Terdapat rekomendasi dari Menpan RB terkait implementasi SAKIP terhadap reviu pohon kinerja pada beberapa perangkat daerah terutama terkait dengan penjenjangan kinerja antar level untuk memiliki kausalitas atau hubungan sebab-akibat dan critical success factor (CFS) dalam menjawab kondisi kinerja diatasnya, khususnya pada level kinerja tektikal sampai kinerja operasional;
- Tersedianya buku profil daerah
- Meningkatnya pembaharuan datanya sesuai siklus jenis data oleh OPD
- kegiatan statistik sectoral;
- Meningkatnya kelengkapan metadata variabel statistik sectoral;
- Meningkatnya kelengkapan metadata indikator statistik sectoral.

Upaya:

- Optimalisasi data kemiskinan
- Meningkatkan kualitas buku profil daerah
- Meningkatkan kualitas data statistik sektoral

B. Realisasi Anggaran

Table 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.019.251.104**	**5.571.681.758**	**447.569.346**	**92,56%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**80.745.500**	**77.414.850**	**3.330.650**	**95,88%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.440.000	18.433.000	7.000	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.305.000	12.255.500	49.500	99,60%

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.153.000	7.133.350	19.650	99,73%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	42.847.500	39.593.000	3.254.500	92,40%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.956.702.000**	**3.667.856.815**	**288.845.185**	**92,70%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.937.569.000	3.648.087.807	289.481.193	92,65%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.715.000	11.713.000	2.000	99,98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.400.000	4.357.500	42.500	99,03%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.018.000	2.801.500	216.500	92,83%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**8.000.000**	**8.000.000**	**-**	**100,00%**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000	8.000.000	-	**100,00%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**523.998.300**	**469.681.423**	**54.316.877**	89,63%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.067.050	12.006.566	484	100,00%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.018.900	18.292.750	3.089.150	85,97%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.816.300	130.049.435	22.766.865	85,10%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.857.500	13.857.400	100	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	5.510.000	1.490.000	78,71%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.146.000	282.214.093	26.931.907	91,29%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.092.550	7.054.179	38.371	99,46%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**320.887.304**	**301.386.900**	**19.500.404**	**93,92%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.887.304	301.386.900	19.500.404	93,92%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**461.875.000**	**410.552.977**	**51.322.023**	**88,89%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.300.000	200.000	86,67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.800.000	305.917.472	50.882.528	85,74%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.575.000	103.335.505	239.495	99,77%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**667.043.000**	**636.788.793**	**30.254.207**	**95,46%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.919.200	299.819.686	11.099.514	96,43%
	Pemeliharaan Mebel	12.800.000	12.405.000	395.000	96,91%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.100.000	42.361.000	739.000	98,29%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.223.800	239.840.107	60.383.693	79,89%

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**2.249.810.800**	**2.069.653.250**	**180.157.550**	**91,99%**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**2.249.810.800**	**2.069.653.250**	**180.157.550**	**91,99%**
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.054.805.900	1.901.780.500	153.025.400	92,55%
	Pelayanan Informasi Publik	99.910.000	84.737.750	15.172.250	84,81%
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	95.094.900	83.135.000	11.959.900	87,42%
3	**PROGAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**14.357.904.941**	**13.870.660.133**	**487.244.808**	**96,61%**
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**8.375.264.834**	**8.331.948.136**	**43.316.698**	**99,48%**
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.845.000	67.738.845	106.155	99,84%
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.307.419.834	8.264.209.291	43.210.543	99,48%
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**5.982.640.107**	**5.538.711.997**	**443.928.110**	**92,58%**
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.412.183.250	1.301.671.250	110.512.000	92,17%
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	203.420.000	197.571.500	5.848.500	97,12%
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.818.610.857	2.728.027.403	90.583.454	96,79%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.548.426.000	1.311.441.844	236.984.156	84,70%
4	**PROGAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**502.403.000**	**496.065.450**	**6.337.550**	**98,74%**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	**502.403.000**	**496.065.450**	**6.337.550**	**98,74%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	502.403.000	496.065.450	6.337.550	98,74%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**800.696.000**	**741.924.858**	**58.771.142**	**92,66%**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**800.696.000**	**741.924.858**	**58.771.142**	**92,66%**
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	800.696.000	741.924.858	58.771.142	92,66%
		23.930.065.845	**22.706.725.441**	**1.223.340.404**	**94,89%**

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 23.930.065.845,00 yang dengan realisasi sebesar Rp. 22.706.725.441,00 Atau kinerja keuangan 94,89% dengan predikat kinerja tinggi.

Serapan Anggaran untuk program/kegiatan dengan anggaran paling besar adalah:

1. Progam Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan besaran anggaran Rp. 14.357.904.941, terserap Rp. 13.870.660.133,- dengan prosentase serapan anggaran 96,61%. Adapun faktor yang mendorong kinerja tersebut:
   a) Penataan ulang bisnis proses terkait dengan pengelolaan aplikasi informatika;
   b) Sudah tersentralisasi penyedia subdomen untuk semua aplikasi;
   c) Terlaksananya system jaringan intra pemerintah dan sudah terintegrasi;
   d) Pengelolaan pusat data sesuai standarisasi SMKI;
   e) Sudah mulai terintegrasi apliksai layanan pemerintah dan publik;
   f) Adanya master plan smart city;
   g) Adanya arsitektur dan peta rencana SPBE.
2. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan besaran anggaran Rp. 6.019.251.104,- terserap Rp. 5.528.421.750,- dengan persentase anggaran 91,85%. Adapun faktor yang mendorong kinerja tersebut:
   a) Penerapan aplikasi SIPD sebagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga mempermudah proses perencanaan perangkat daerah;
   b) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang sesuai atau melebihi target;
   c) Nilai AKIP yang sesuai atau melebihi target.
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan besaran anggran Rp. 2.249.810.800, terserap Rp. 2.069.653.250,- dengan persentase anggaran 91,99%. Adapun faktor yang mendorong kinerja tersebut:
   a) Munculnya intruksi Bupati tentang capaian Quickwin tentang publikasi, mendorong perangkat daerah untuk lebih gencar melaksnakan publikasi di website dan media sosial;
   b) Adanya portal layanan informasi publik melalui website PPID, mulai dari Kabupaten, Perangkat Daerah hingga Desa;
   c) Adanya portal layanan pengaduan publik melalui SP4N-LAPOR, Wadul Bupati dan layanan darurat Command Centre;
   d) Adanya pembinaan jurnalistik oleh Diskominfo dan diselenggarakannya KIM, mendorong KIM untuk giat melaksanakan publikasi
4. Progam Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 800.696.000,- terserap Rp. 741.924.858,- dengan persentase 92,66%. Adapun faktor yang mendorong kinerja tersebut:
   a) Tersedianya sumber daya manusia dan tersedianya anggaran;
5. Progam Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan besaran anggaran Rp. 502.403.000, terserap Rp. 496.065.450,- dengan persentase serapan anggaran 98,74%. Adapun faktor yang mendorong kinerja tersebut:

a) Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Nganjuk

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja.

Dinas Kominfo mempunyai Indikator Kinerja Utama dari tujuan Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Manajemen Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik yaitu indikator **Nilai Indeks SPBE** target yang ditetapkan 2,50 dengan capaian **3,84** atau **154%** berpredikat "**Sangat Baik**". Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama dari sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal yaitu **Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang** target yang ditetapkan 7% dengan capaian **7%** atau **100%**.

B. REKOMENDASI

Guna meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang harus dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan perencanaan anggaran dan rencana aksi kegiatan yang lebih fokus;
2. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut setiap tribulan;
3. Studi tentang pelaksanaan SPBE di daerah yang Indeks SPBEnya telah maju;
4. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Publik provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nganjuk;
5. Melakukan validasi data terkait data sektoral yang masuk pada aplikasi Single Data System dan Open Data sesuai regulasi yang berlaku;
6. Melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI), serta penyelenggaraan operasional persandian;
7. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
8. Memberdayakan sumberdaya yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk secara menyeluruh, efektif, dan efesien;

9. Menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKjIP) Diskominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 kami susun dalam rangka mempertanggungjawabkan implementasi SAKIP pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selama tahun anggaran 2024 kepada Bapak Plt. Bupati Nganjuk.

Nganjuk, 7 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SUDINO, S.Kom
Pembina
NIP 19761128 200604 1 013

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SLAMET BASUKI, AP**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si**

Jabatan : Pj.Bupati Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si	**SLAMET BASUKI,AP** Pembina Utama Muda NIP. 19750311 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	7%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.260.612.504	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1.970.811.000	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	14.286.682.541	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	502.403.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	614.696.000	APBD
	Jumlah		**23.635.205.045**	

Nganjuk, Januari 2024

Pj.Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUJONO, S.Kom**

Jabatan : Sekretaris Dinas

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SLAMET BASUKI, A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
SLAMET BASUKI, AP.	**SUJONO, S.Kom**
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19750311 199311 1 001	NIP. 19761128 200604 1 013

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP (A, BB, B) Dinas Komunikasi dan Informatika	A

Program :	**Anggaran**
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 6.260.612.504,00
	Rp. 6.260.612.504,00

Nganjuk, 02 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

Sekretaris Dinas

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AZFANDI MIFTAKHUL YAQIN,S.IP,M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi,Informatika dan Persandian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SLAMET BASUKI, A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
SLAMET BASUKI, A.P	**AZFANDI MIFTAKHUL Y,SIP,M.AP**
Pembina Utama Muda	Penata Tingkat I
NIP. 19750311 199311 1 001	NIP. 19880420 200701 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABID APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematanagan Kapabilitas Layanan	119 Aplikasi
		Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	119 Aplikasi

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.845.000	APBD
2.	*Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	7.982.294.834	APBD
3.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.312.183.250	APBD
4.	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	403.420.000	APBD
5.	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	2.924.513.457	APBD
6.	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.596.426.000	APBD
7.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	614.696.000	APBD
Jumlah		14.901.378.541	

Nganjuk, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

Kepala Bidang Aplikasi,Informatika dan Persandian

AZFANDI MIFTAKHUL Y,S.IP,M.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19880420 200701 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARI PURWANTO, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SLAMET BASUKI, A.P**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
SLAMET BASUKI, A.P	**HARI PURWANTO, ST**
Pembina Utama Muda	Pembina
NIP. 19750311 199311 1 001	NIP. 19681211 199901 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABID STATISTIK DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKSI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Skor Keterbukaan Informasi Publik	60
2.	Meningkatnya Kapabilitas Penyelenggaraan Data Sektoral	Tingkat Kematangan data Statistik Sektoral	2

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.970.811.000	APBD
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	502.403.000	APBD
Jumlah		2.473.214.000	

Nganjuk, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

Kepala Bidang Statistik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

HARI PURWANTO, ST
Pembina
NIP. 19681211 199901 1 001

LAMPIRAN II
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Merdeka Nomor 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon/Fax (0358) 3550320 Email diskominfo@nganjukkab.go.id
www.diskominfo.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR: 188/ 18 /K/411.312/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kiomunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana ercantum dalam Lmpiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunkiasi dan Informatika.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 16 Januari 2024

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK



SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/18/K/411.312/2024
Tanggal : 16 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. Nama Organisasi : KABUPATEN NGANJUK
2. Nama Unit Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.
4. Fungsi :
   a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   b. Pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
   c. Pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian
      serta bidang statistik;
   e. Pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
   f. Pengelolaan dan pengembangan e-government dan smart city;
   g. Pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;
   h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
   i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan	Penanggungjawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	Hasil evaluasi Kampung Dial Jumlah desa yang menerapkan Kampung Dial ———————————— x 100% Jumlah target Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika	Renstra 2024-2026

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 16 Januari 2024

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

LAMPIRAN III
Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

Lampiran : 1

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
LAPORAN IKHTISAR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib
Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan					KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.01	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.019.251.104**	**5.528.421.750**	**490.829.354**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**6.019.251.104**	**5.528.421.750**	**Rupiah**	
					Hasil		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81**	**80,10**	**Nilai**	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81**	**86,5**	**Nilai**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**80.745.500**	**77.414.850**	**3.330.650**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**80.745.500**	**77.414.850**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**69**	**61**	**Dokumen**	
					Hasil		**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81**	**80,10**	**Nilai**	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81**	**86,5**	**Nilai**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.440.000	18.433.000	7.000	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	18.440.000	18.433.000	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	6	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.305.000	12.255.500	49.500	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12.305.000	12.255.500	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	30	35	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.153.000	7.133.350	19.650	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	7.153.000	7.133.350	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	30	13	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan						KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	42.847.500	39.593.000	3.254.500	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	42.847.500	39.593.000	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6	7	Laporan	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.956.702.000**	**3.666.959.807**	**289.742.193**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**3.944.987.000**	**3.655.246.807**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**63**	**76**	**Dokumen**	
					Hasil	**:**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81**	**80,10**	**Nilai**	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81**	**86,5**	**Nilai**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.937.569.000	3.648.087.807	289.481.193	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	3.937.569.000	3.648.087.807	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan	22	36	ASN	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.715.000,00	11.713.000,00	2.000	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	11.715.000,00	11.713.000,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45	62	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.400.000	4.357.500	42.500	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	4.400.000	4.357.500	Rupiah	
					Keluaran	:	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	1	Laporan	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan						KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.018.000	2.801.500	216.500	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	3.018.000	2.801.500	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	Laporan	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8.000.000**	**8.000.000**	**-**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**8.000.000**	**8.000.000**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**25**	**25**	**Dokumen**	
					Hasil	:	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81**	**80,10**	**Nilai**	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81**	**86,5**	**Nilai**	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000	8.000.000	-	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	8.000.000,00	8.000.000,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	84	Orang	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**523.998.300**	**469.681.423**	**54.316.877**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**501.979.400**	**450.751.673**	Rupiah	
					Keluaran	:	**Jumlah laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**12**	**12**	Laporan	
					Hasil	:	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81**	**80,10**	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81**	**86,5**	Nilai	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12.067.050	12.066.566	484	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12.067.050,00	12.066.566,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1	1	Paket	
					Hasil		Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan						KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.018.900	18.929.750	3.089.150	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	22.018.900	18.929.750	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1	1	Paket	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.816.300	130.049.435	22.766.865	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	152.816.300,00	130.049.435,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	4	4	Paket	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.857.500	13.857.400	100	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	13.857.500,00	13.857.400,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	2	2	Paket	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	5.510.000	1.490.000	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	7.000.000,00	5.510.000,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	912	910	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.146.000	282.214.093	26.931.907	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	309.146.000,00	282.214.093,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	30	Laporan	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.092.550	7.054.179	38.371	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	7.092.550,00	7.054.179,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300	300	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan					KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**320.887.304**	**301.386.900**	**19.500.404**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**320.887.304**	**301.386.900**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**26**	**48**	**Buah**	
					Hasil	:	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81**	**80,10**	**Nilai**	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81**	**86,5**	**Nilai**	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.887.304	301.386.900	19.500.404	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	320.887.304	301.386.900	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	15	48	Unit	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**461.875.000**	**410.552.977**	**51.322.023**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**461.875.000**	**410.752.977**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia**	**4**	**4**	**Jasa**	
					Hasil	**:**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81**	**80,10**	**Nilai**	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81**	**86,5**	**Nilai**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.300.000	200.000	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1.500.000	1.500.000	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	4	Laporan	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.800.000	305.917.472	50.882.528	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	356.800.000,00	305.917.472,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	Laporan	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.575.000	103.335.505	239.495	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	103.575.000,00	103.335.505,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	12	Laporan	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan						KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**667.043.000**	**594.425.793**	**72.617.207**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**667.043.000**	**594.425.793**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**42**	**42**	**Unit**	
					Hasil	**:**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**81**	**80,10**	**Nilai**	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**81**	**86,5**	**Nilai**	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.919.200	299.819.686	11.099.514	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	310.919.200	299.819.686	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	10	Unit	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.800.000	12.405.000	395.000	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	12.800.000	12.405.000	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah mebel yang dipelihara	5	5	Unit	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.100.000	42.361.000	739.000	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	43.100.000	42.361.000	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25	25	Unit	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.223.800	239.840.107	60.383.693	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	300.223.800	239.840.107	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2	Unit	
					Hasil	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81	80,10	Nilai	
							Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81	86,5	Nilai	
2.16.02	**PROGAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**2.249.810.800**	**2.069.653.250**	**180.157.550**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**2.249.810.800**	**2.069.653.250**	**Rupiah**	
					Hasil	**:**	**Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk**	**60**	**87,09**	**Nilai**	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan						KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.249.810.800**	**2.069.653.250**	**180.157.550**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**2.249.810.800**	**2.069.653.250**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif**	**10**	**13**	**PD**	
							Jumlah PD berpredikat "Informatif"	**3**	**46**	**PD**	
							Jumlah KIM berpredikat "Aktif"	**5**	**7**	**KIM**	
							Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu	**100**	**99,6**	**%**	
					Hasil	**:**	**Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk**	**60**	**87,09**	**Nilai**	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.054.805.900	1.901.780.500	153.025.400	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	2.054.805.900	1.901.780.500		
					Keluaran	:	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1	1	Dokumen	
					Hasil	:	Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk	60	87,09	Nilai	
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	99.910.000	84.737.750	15.172.250	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	99.910.000,00	84.737.750,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1	1	Dokumen	
					Hasil	:	Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk	60	87,09	Nilai	
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	95.094.900	83.135.000	11.959.900	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	95.094.900,00	83.135.000,00	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	1	Dokumen	
					Hasil	:	Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk	60	87,09	Nilai	
2.16.03	**PROGAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**14.357.904.941**	**13.870.660.133**	**487.244.808**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**14.357.904.941**	**13.870.660.133**	**Rupiah**	
					Hasil	**:**	**Nilai Aspek TIK**	**2**	**3.38**	**Nilai**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**8.375.264.834**	**8.331.948.136**	**43.316.698**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**8.375.264.834**	**8.331.948.136**	Rupiah	
					Keluaran	**:**	**Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah daerah**	**3**	**3**	Nilai	
					Hasil	**:**	**Nilai Aspek TIK**	**2**	**3,38**	Nilai	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan						KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.845.000	67.738.845	106.155	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	67.845.000	67.738.845	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12	12	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai Aspek TIK	2	3,38	Nilai	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.307.419.834	8.264.209.291	43.210.543	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	8.307.419.834	8.264.209.291	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1	1	Unit	
					Hasil	:	Nilai Aspek TIK	2	3,38	Nilai	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**5.982.640.107**	**5.538.711.997**	**443.928.110**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**5.982.640.107**	**5.538.711.997**	Rupiah	
					Keluaran	**:**	**Tingkat kematangan layanan pusat data**	**2**	**5**	Nilai	
							Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	**2**	**5**	Nilai	
							Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	**2**	**3**	Nilai	
					Hasil	**:**	**Nilai Aspek TIK**	**2**	**3,38**	Nilai	
2.16.03.02.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	1.412.183.250	1.301.671.250	110.512.000	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1.412.183.250	1.301.671.250	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1	1	Unit	
					Hasil	:	Nilai Aspek TIK	2	3,38	Nilai	
2.16.03.02.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	203.420.000	197.571.500	5.848.500	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	203.420.000	197.571.500	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4	4	Unit	
					Hasil	:	Nilai Aspek TIK	2	3,38	Nilai	
2.16.03.02.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.818.610.857	2.728.027.403	90.583.454	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	2.818.610.857	2.728.027.403	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1	1	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai Aspek TIK	2	3,38	Nilai	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan						KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.16.03.02.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.548.426.000	1.311.441.844	236.984.156	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	1.548.426.000	1.311.441.844	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1	1	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai Aspek TIK	2	3,38	Nilai	
2.20.02	**PROGAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**502.403.000**	**496.065.450**	**6.337.550**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**502.403.000**	**496.065.450**	**Rupiah**	
					Hasil	**:**	**Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka**	**2**	**2**	**Nilai**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota**	**502.403.000**	**496.065.450**	**6.337.550**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**502.403.000**	**496.065.450**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan**	**1**	**1**	**Buku**	
					Hasil	**:**	**Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka**	**2**	**2**	**Nilai**	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	502.403.000	496.065.450	6.337.550	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	502.403.000	496.065.450	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1	1	Dokumen	
					Hasil	:	Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka	2	2	Nilai	
2.21.02	**PROGAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**800.696.000**	**741.924.858**	**58.771.142**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**800.696.000**	**741.924.858**	**Rupiah**	
					Hasil	**:**	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**87**	**100**	**%**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**800.696.000**	**741.924.858**	**58.771.142**	**Masukan**	**:**	**Dana yang dibutuhkan**	**800.696.000**	**741.924.858**	**Rupiah**	
					Keluaran	**:**	**Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE**	**2**	**3**	**Nilai**	
					Hasil	**:**	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**87**	**100**	**%**	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan						KET.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator			Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	800.696.000	741.924.858	58.771.142	Masukan	:	Dana yang dibutuhkan	800.696.000	741.924.858	Rupiah	
					Keluaran	:	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	12	12	Laporan	
					Hasil	:	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah	87	100	%	
		23.930.065.845	**22.706.725.441**	**1.223.340.404**				**23.930.065.845**	**22.706.725.441**	94,89%	

Mengetahui,
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP 19761128 200604 1 013

LAMPIRAN IV
Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Sasaran strategis

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE

TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. NGANJUK



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE





EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

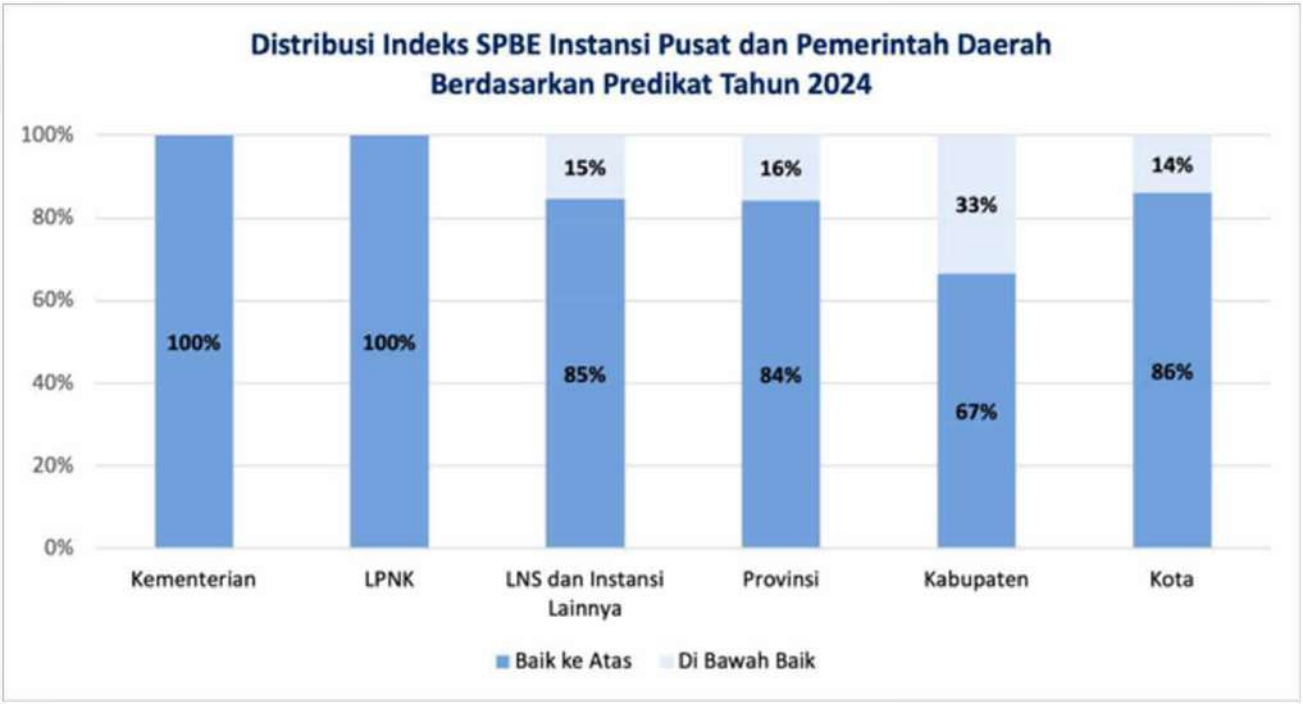
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

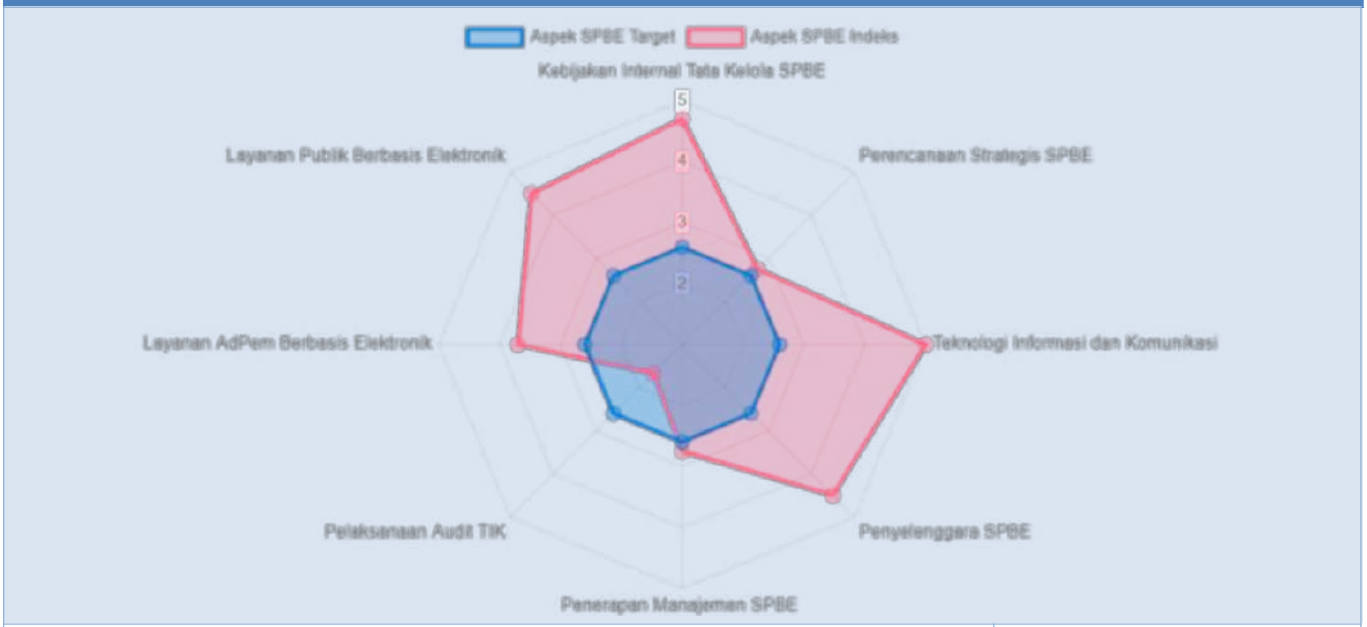
Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	**3,36**	**4,28**	**4,01**	**3,61**	**3,61**	**2,51**	**3,64**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	**2,62**	**3,92**	**3,65**	**3,11**	**3,07**	**1,69**	**2,94**
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	**1,86**	**2,87**	**2,61**	**2,31**	**2,17**	**1,13**	**2,03**
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	**3,78**	**4,44**	**4,26**	**3,81**	**3,98**	**3,32**	**4,05**
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. NGANJUK

3,84
(Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	**3,84**
Domain Kebijakan SPBE	4,70
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,70*
Domain Tata Kelola SPBE	4,00
Perencanaan Strategis SPBE	*2,75*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*5,00*
Penyelenggara SPBE	*4,50*
Domain Manajemen SPBE	2,45
Penerapan Manajemen SPBE	*2,75*
Audit TIK	*1,67*
Domain Layanan SPBE	4,02
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,70*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,50*

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Nganjuk dipenuhi oleh semua indikator, meliputi kebijakan internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan
  Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit TIK menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Nganjuk. Kebijakan Internal sembilan indikator ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Nganjuk 11/2022 sebagai dasar hukum pengaturan Arsitektur SPBE (mencakup keseluruhan Referensi dan Domain Arsitektur SPBEdan mengatur integrasi SPBE antar IPPD), Peta Rencana SPBE (mencakup keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE dan selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional), Manajemen Data (mengatur seluruh proses ruang lingkup Manajemen Data), Pembangunan Aplikasi SPBE (mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi, konsultasi, dan keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi oleh Dinas Kominfo), Layanan Pusat Data (mengatur penggunaannya dan interkoneksi antar IPPD), Layanan Jaringan Intra (mengatur penggunaannya dan interkoneksi antar IPPD), Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (mengatur penggunaannya dan interkoneksi antar IPPD), Manajemen Keamanan Informasi (mengatur penerapan Manajemen Keamanan Informasi untuk seluruh unit kerja), dan Audit TIK (mengatur cakupan Audit TIK secara lengkap).
- Kelemahan
  Pemkab Nganjuk tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Nganjuk dipenuhi oleh semua indikator, meliputi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis.

- Kekuatan
  Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya indikator Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Nganjuk. Tata kelola Arsitektur SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan, mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE, serta telah didokumentasikan secara formal (SK Bupati Nganjuk 188/203/K/411.013/2023). Tata kelola Peta Rencana SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE, dan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (Rencana Kerja dan Anggaran 2022-2025). Tata kelola Inovasi Proses Bisnis dibuktikan dengan adanya dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, telah didokumentasikan secara formal (SK Bupati 188/335/K/411.013/2022), adanya Inovasi Proses Bisnis dalam bentuk SK Bupati 2024, dan proses bisnis telah diterapkan ke dalam Sistem Elektronik.
- Kelemahan
  Namun di sisi lain, Pemkab Nganjuk masih memiliki kelemahan dalam tata kelola Rencana dan Anggaran SPBE, dimana belum ada bukti bahwa seluruh Rencana dan Anggaran SPBE telah dikonsultasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Nganjuk dipenuhi oleh semua indikator, meliputi Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra IPPD, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD.

- Kekuatan
  Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Layanan Jaringan Intra menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Nganjuk. Tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE dibuktikan dengan adanya proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE (SRS

Aplikasi Petung Dadi) sesuai siklus pembangunan aplikasi (Surat Edaran terkait standar pengembangan aplikasi), telah dikonsultasikan kepada Diskominfo, dan telah dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan. Tata Kelola Layanan Pusat Data dibuktikan dengan adanya SOP Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja, memanfaatkan fasilitas Pusat Data Nasional (VPS PDN), dan telah mendukung interkoneksi/integrasi dengan Pusat Data Nasional (Pemanfaatan PDN). Tata Kelola Layanan Jaringan Intra dibuktikan dengan adanya dokumentasi operasional pemanfaatan jaringan intra pada seluruh unit kerja. IPPD telah mengatur interkoneksi dan akses dengan VPN Kominfo (Interkoneksi).

- Kelemahan
  Pemkab Nganjuk tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Nganjuk dipenuhi oleh semua indikator, meliputi Tim Koordinasi SPBE IPPD dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
  Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya indikator Tim Koordinasi SPBE IPPD dan Kolaborasi Penerapan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Nganjuk. Tata Kelola Tim Koordinasi SPBE IPPD dibuktikan dengan adanya SK Bupati 188/238/K/411.013/2022 yang mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, dan Tim Koordinasi SPBE ini telah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja. Tata Kelola Kolaborasi Penerapan SPBE dibuktikan dengan adanya Kolaborasi Penerapan SPBE antar unit kerja pada seluruh unit kerja yang dikoordinasikan oleh Sekda Nganjuk (20d).
- Kelemahan
  Pemkab Nganjuk tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Penyelenggara SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Nganjuk dipenuhi oleh semua indikator, meliputi Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
  Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Aset TIK, dan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Nganjuk. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dibuktikan dengan adanya program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Nganjuk 2020-2024, pelaksanaan mengacu pedoman PerBSSN 4/2021 (juga mengacu pada standar ISO 27001, Indeks KAMI), dan dilakukan oleh seluruh unit kerja. Penerapan Manajemen Aset TIK dibuktikan dengan adanya program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE Pemkab Nganjuk, pelaksanaan mengacu pedoman SNI/ISO 55001, dan diterapkan di seluruh unit kerja. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dibuktikan dengan adanya program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, dan adanya dokumentasi kebutuhan SDM SPBE sebagai bukti bahwa penerapannya telah memenuhi seluruh kompetensi SDM SPBE.
- Kelemahan
  Namun di sisi lain, Pemkab Nganjuk masih memiliki kelemahan dalam penerapan manajemen terkait Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Pengetahuan, dimana pelaksanaannya belum mengacu pedoman manajemen yang berlaku atau belum ada bukti bahwa Pemkab Nganjuk telah menerapkan manajemen kepada seluruh unit kerja.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Nganjuk dipenuhi oleh semua indikator, meliputi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan
  Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini, belum ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Nganjuk.
- Kelemahan
  Namun di sisi lain, Pemkab Nganjuk masih memiliki kelemahan dalam Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana audit tidak dilakukan secara rutin dalam 2 tahun terakhir.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Nganjuk dipenuhi oleh semua indikator, meliputi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai

- Kekuatan
  Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Nganjuk. Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik dibuktikan dengan adanya penggunaan berbagai aplikasi standar nasional dengan kapabilitas fungsi teknis kolaborasi.
- Kelemahan
  Namun di sisi lain, Pemkab Nganjuk masih memiliki kelemahan dalam Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dimana belum ada data dukung yang menunjukkan kapabilitas transaksi pada SIMASET dan Gol-KPK.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Nganjuk dipenuhi oleh semua indikator, meliputi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 1-3.

- Kekuatan
  Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat semua indikator layanan (Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 1-3) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Nganjuk. Layanan Publik berbasis Elektronik dibuktikan dengan adanya penggunaan berbagai aplikasi standar nasional dengan kapabilitas fungsi teknis kolaborasi dan juga telah dilakukan optimalisasi berupa penambahan fitur aplikasi atau mendukung RB tematik.
- Kelemahan
  Pemkab Nganjuk tidak memiliki kelemahan untuk Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemkab Nganjuk. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Nganjuk, sudah dapat menggambarkan predikat Sangat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemkab Nganjuk adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari adanya Kebijakan Internal Tata Kelola melalui Peraturan Bupati Nganjuk 11/2022 yang telah mengamanatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik secara internal lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah, dengan K/L/Pemda lainnya, serta antara Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional, yang diikuti dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unsurnya secara lengkap. Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, keunggulan terlihat dari adanya dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dasar program kegiatan manajemen, serta penerapan Inovasi Proses Bisnis. Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, keunggulan terlihat dari adanya penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, seperti penerapan pada Layanan Pusat Data dengan adanya SOP Layanan Pusat Data, Jaringan Intra yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Adminstrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, keuangan melalui penerapan SIPD, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan LPSE, kepegawaian melalui penerapan SIMAS, kearsipan melalui SRIKANDI, dan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penerapan E-SAKIP sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Selain itu, pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang pengaduan pelayanan publik melalui penerapan SP4N LAPOR, dan hukum melalui penerapan JDIH sehingga layanan publik dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemkab Nganjuk menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemkab Nganjuk masih terdapat kelemahan, khususnya pada aspek Pelaksanaan Audit TIK. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE telah dilaksanakan, tetapi audit tidak dilakukan secara rutin dalam 2 tahun terakhir.

Aspek Pelaksanaan Audit TIK masih pada level terkelola, dan diharapkan dapat ditingkatkan dengan melaksanakan audit secara rutin. Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik masih pada level terstandarisasi, dan diharapkan dapat ditingkatkan dengan melaksanakan sesuai pedoman atau diterapkan ke seluruh unit kerja. Pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya, diharapkan sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	5
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	5
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

SPBE
Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024

LAPORAN

KAMPUNG DIAL

Tahun 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64419
Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk untuk merealisasi Program prioritas Daerah Percepatan Transformasi Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2o2g tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk rahun 2024-2026, telah ditetapkan indikator sasaran persentase Kampung Digital Anjuk Ladang sebagaimana diatur dalam L,ampiran Bab IV peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk rahun 2024-2026. Sehubungan tersebut Dinas Komunikasi telah menetapkan 20 Lokasi Kampung Digital Anjuk Ladang di 20 Kecamatan se Kabupaten Nganjuk.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Capaian Kampung Digita Anjuk Ladang ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kampung Digital Anjuk Ladang dalam hal layanan publik di bidang TIK.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian layanan Kampung Digital Anjuk Ladang di Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar nantinya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

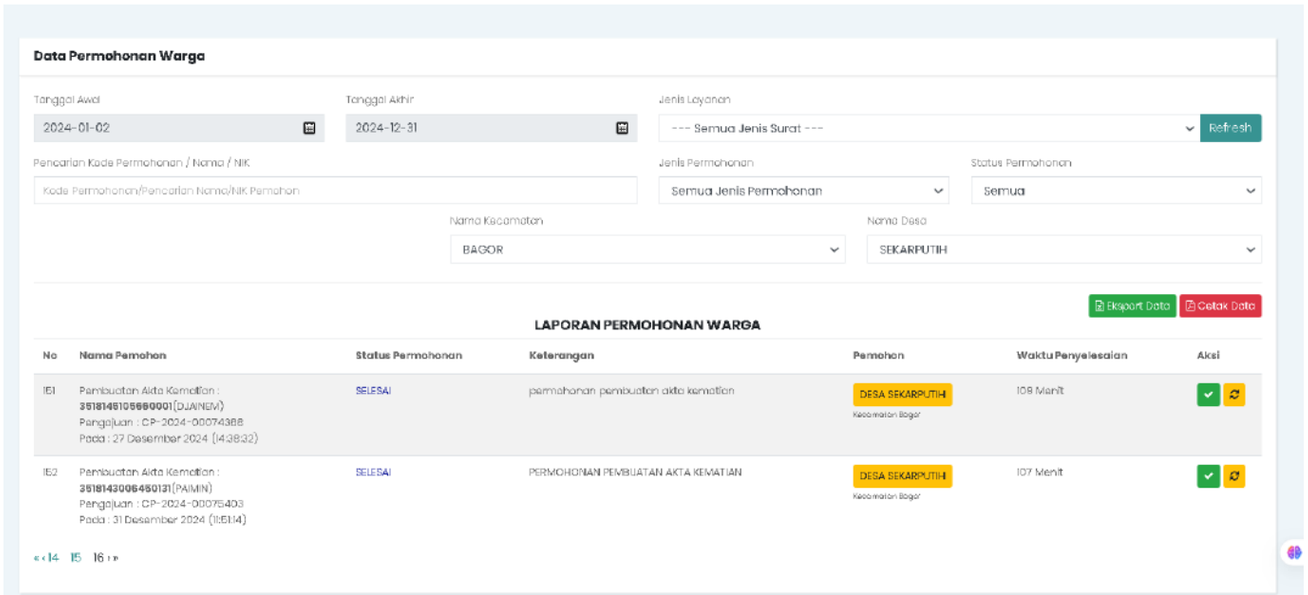
C. CAPAIAN INDIKATOR KAMPUNG DIAL

1. PELAYANAN YANG MEMBAHAGIAKAN

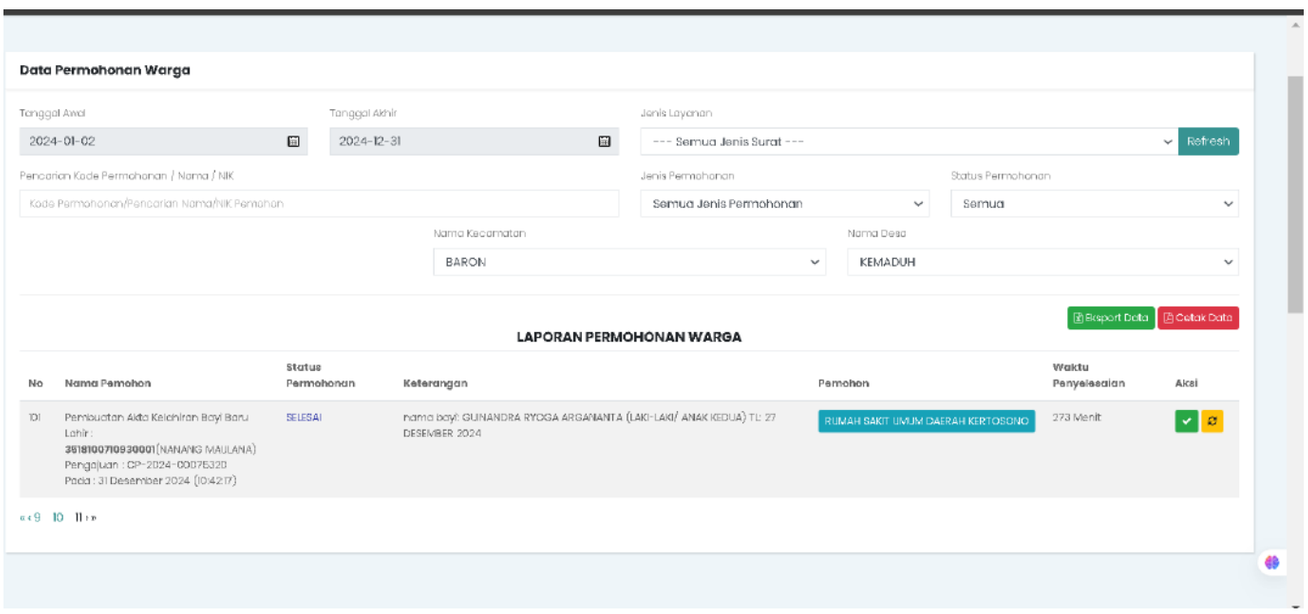
<u>Pelayanan kependudukan meliputi:</u>

Pendataan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan melalui aplikasi SEDUDO selain itu layanan adminduk menggunakan aplikasi sedudo dan laporan kependudukan melalui sedudo yang dijalankan di lokasi kampung digital di 20 desa di 20 kecamatan sudah menerapkan layanan menggunakan aplikasi sedudo untuk permohonan mandiri hal tersebut bisa dilihat di rekap penggunaan permohonan layanan adminduk sedudo.nganjukkab.go.id berikut bukti dukung rekap penggunaan aplikasi sedudo untuk layanan kependudukan sebagaimana gambar dibawah :

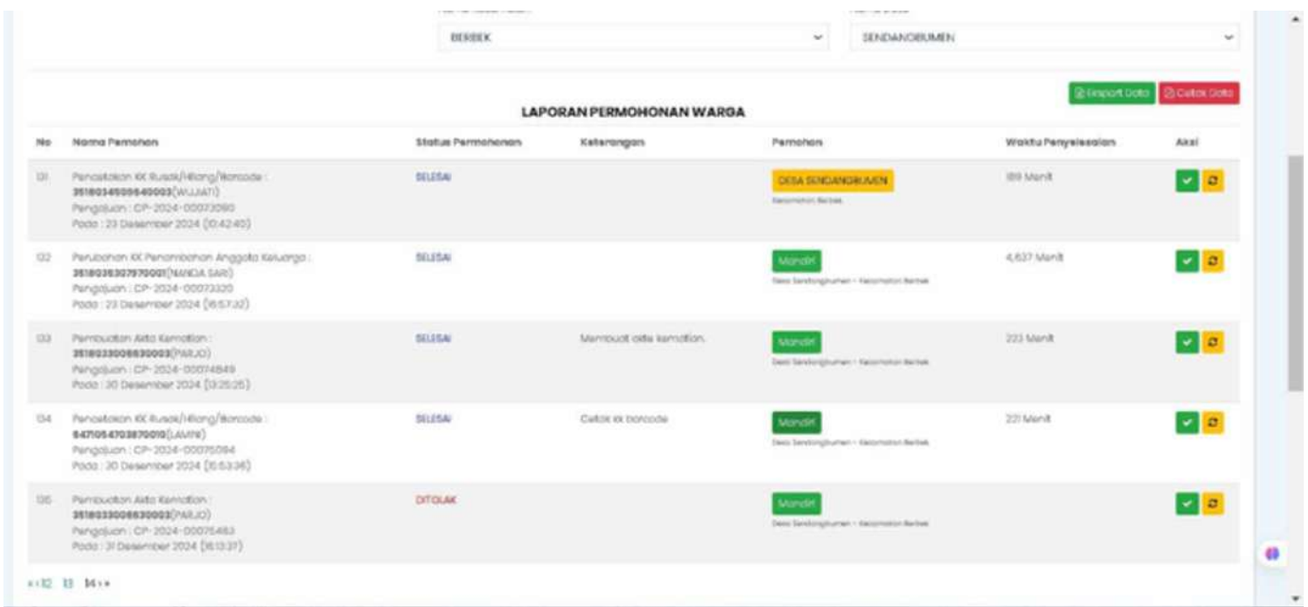
Kecamatan bagor



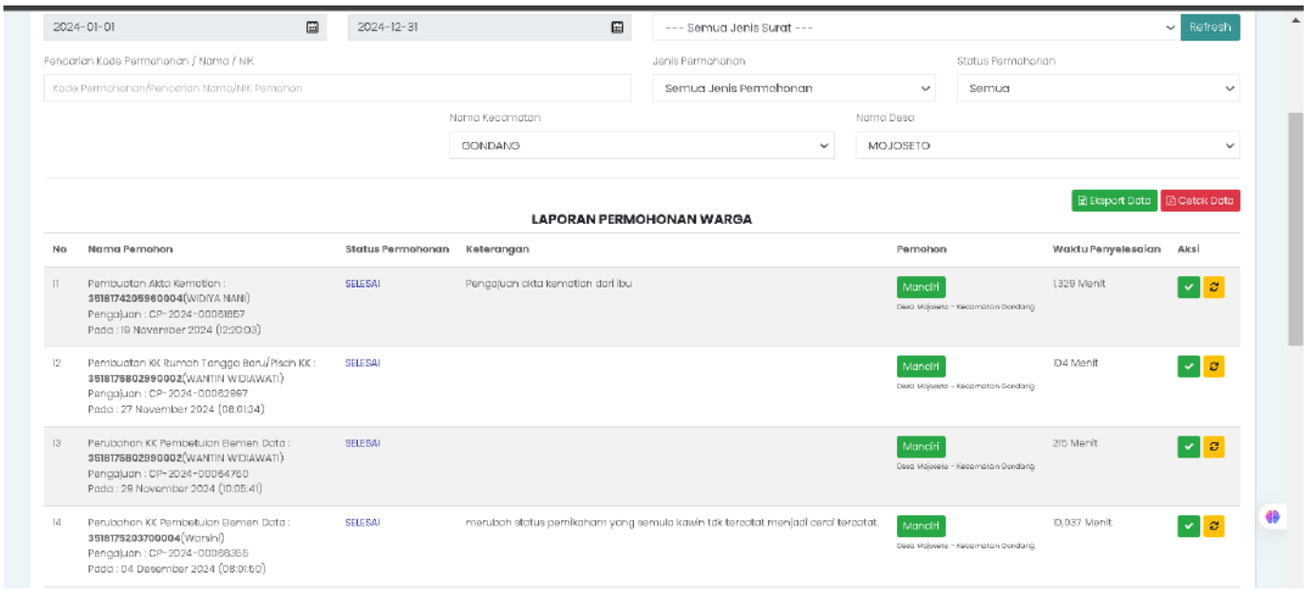
Kecamatan Baron



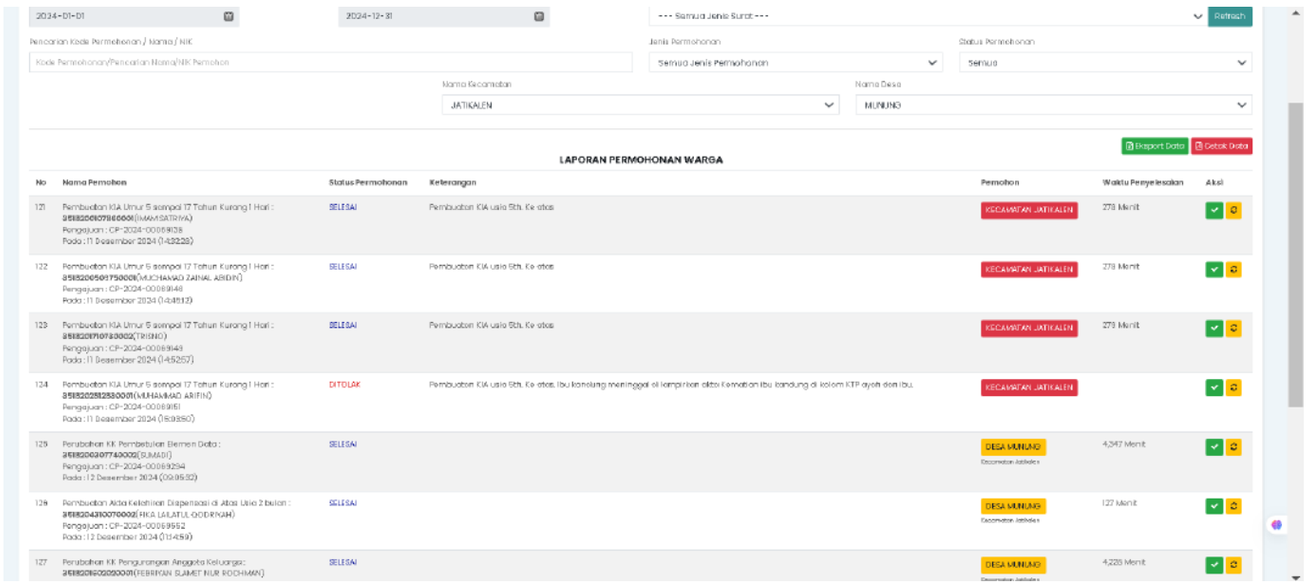
Kecamatan berbek



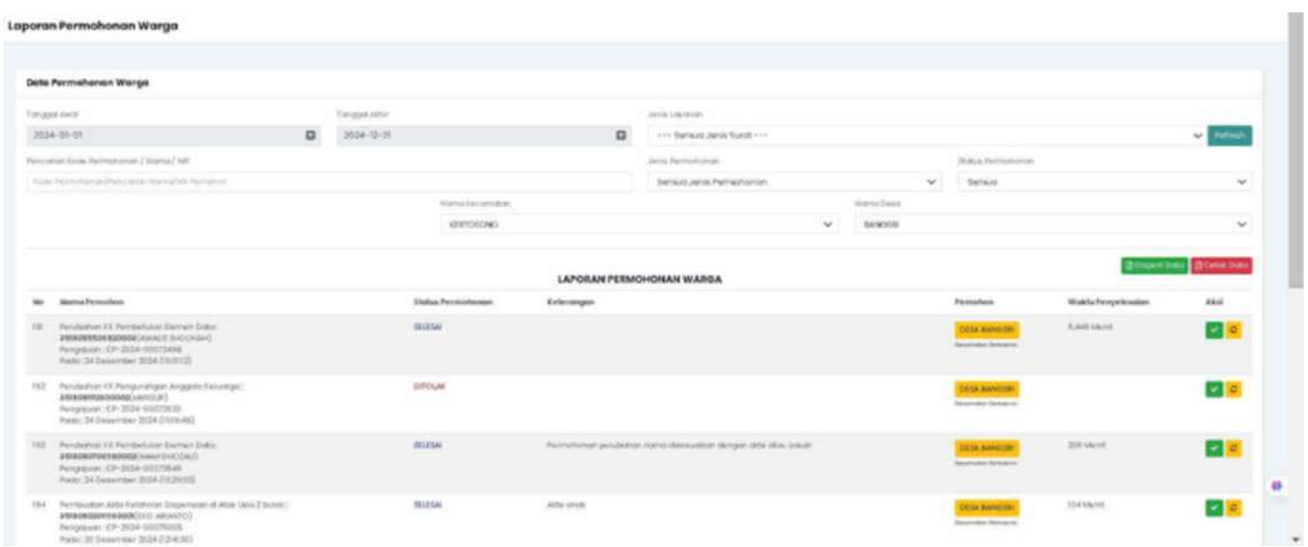
Kecamatan Gondang



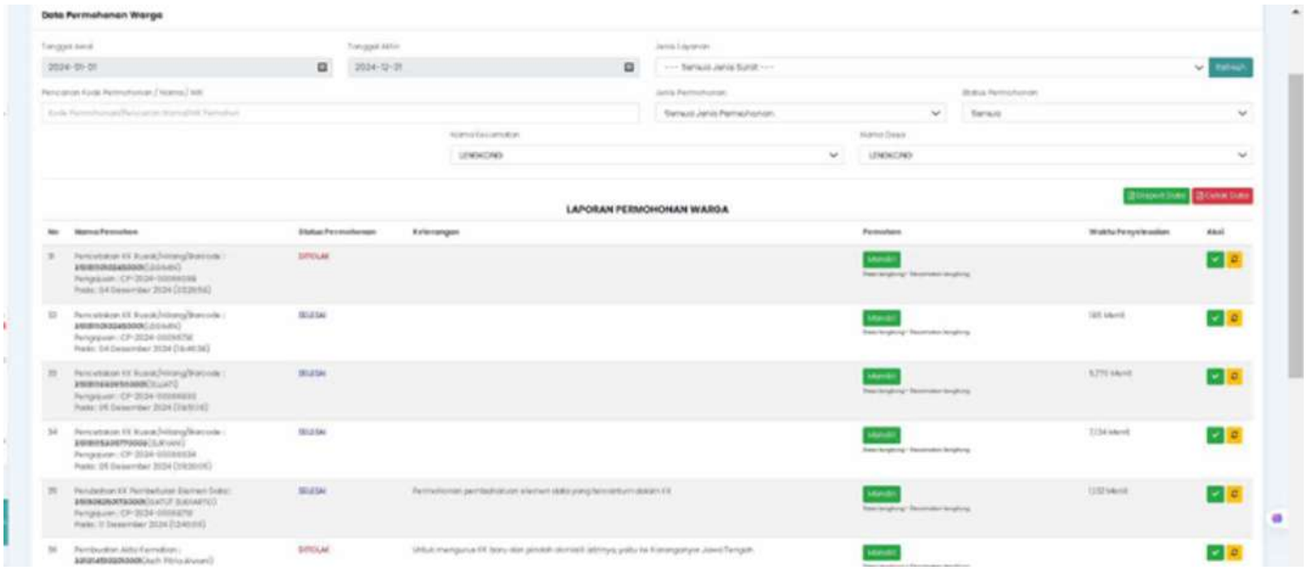
Kecamatan Jatikalen



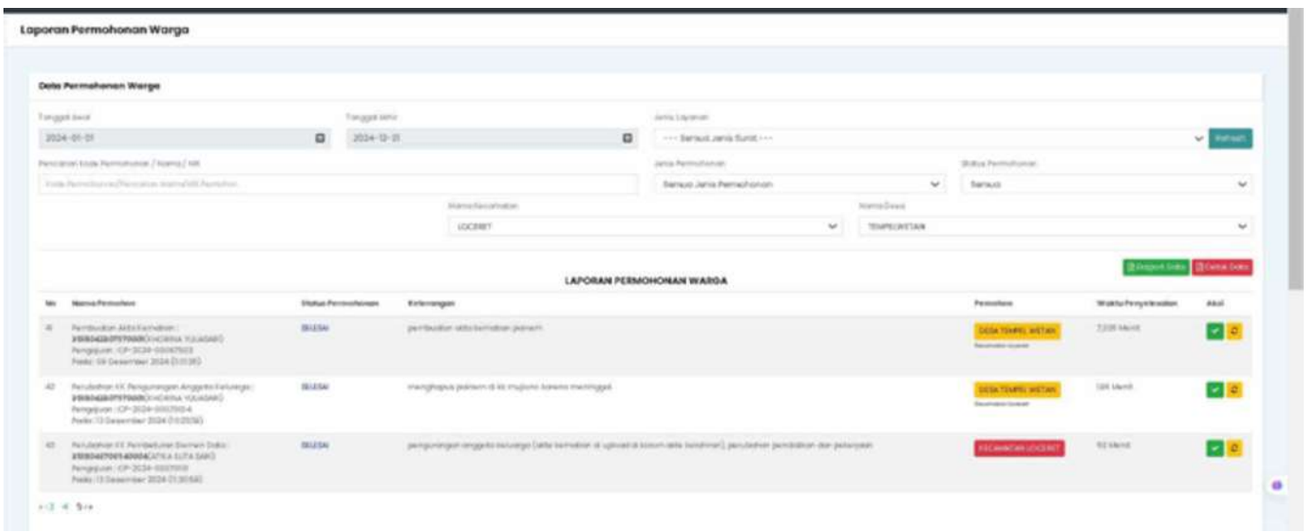
Kecamatan kertosono



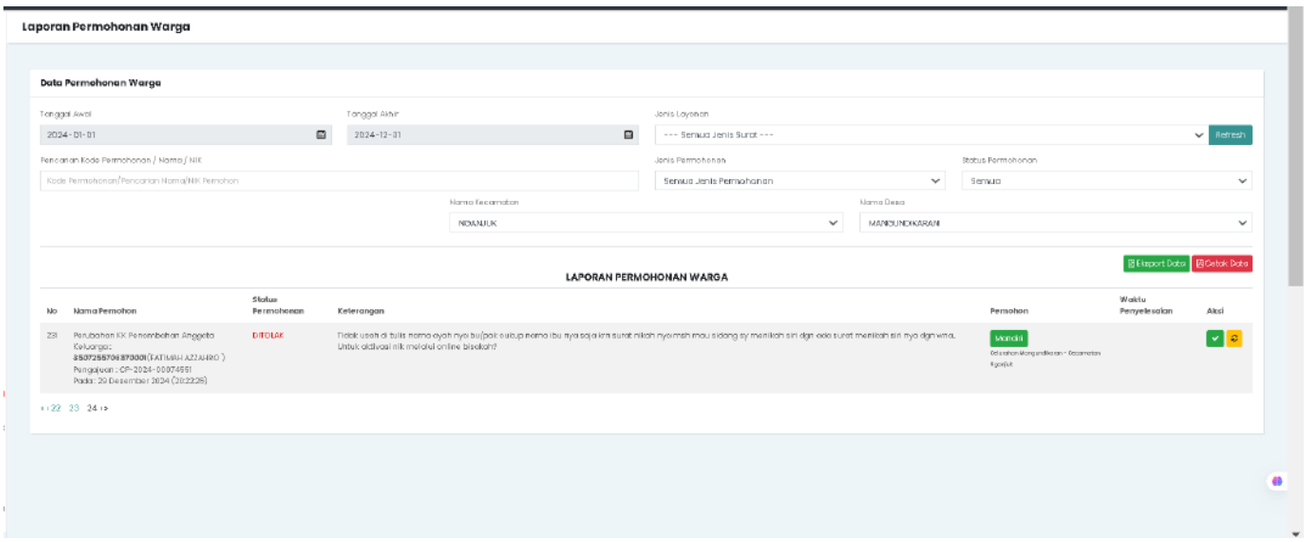
Kecamatan Lengkong



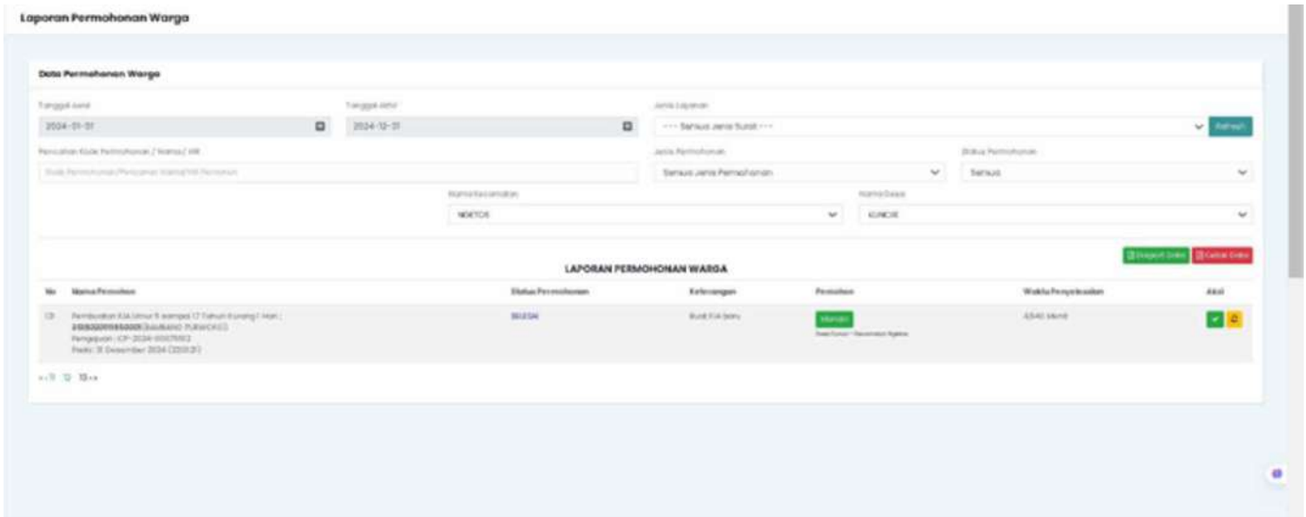
Kecamatan Loceret



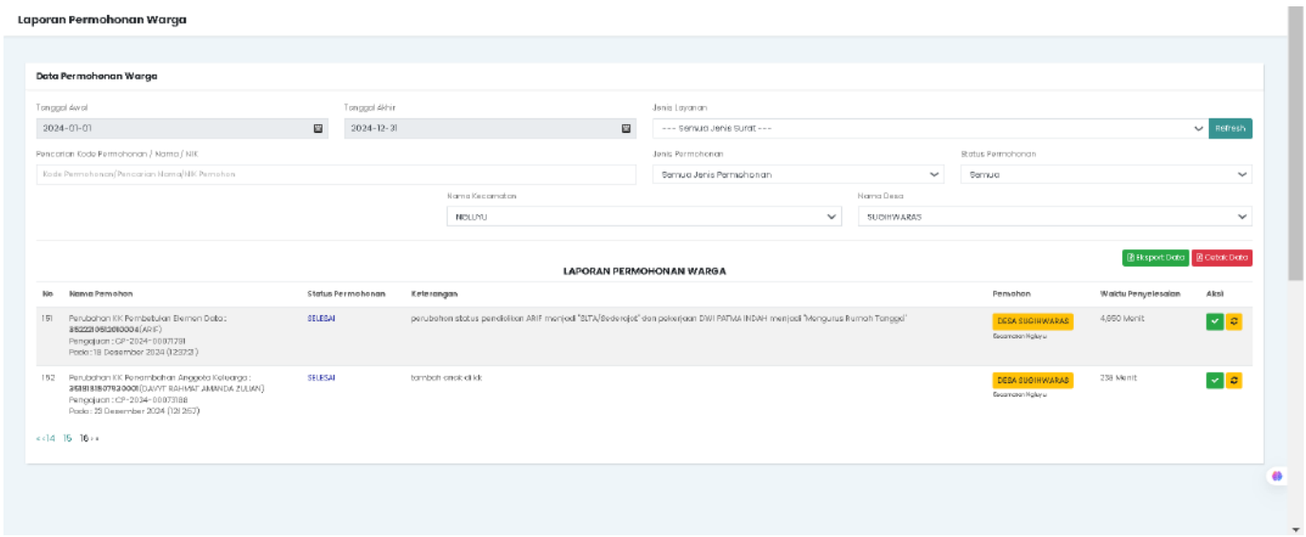
Kecamatan Nganjuk



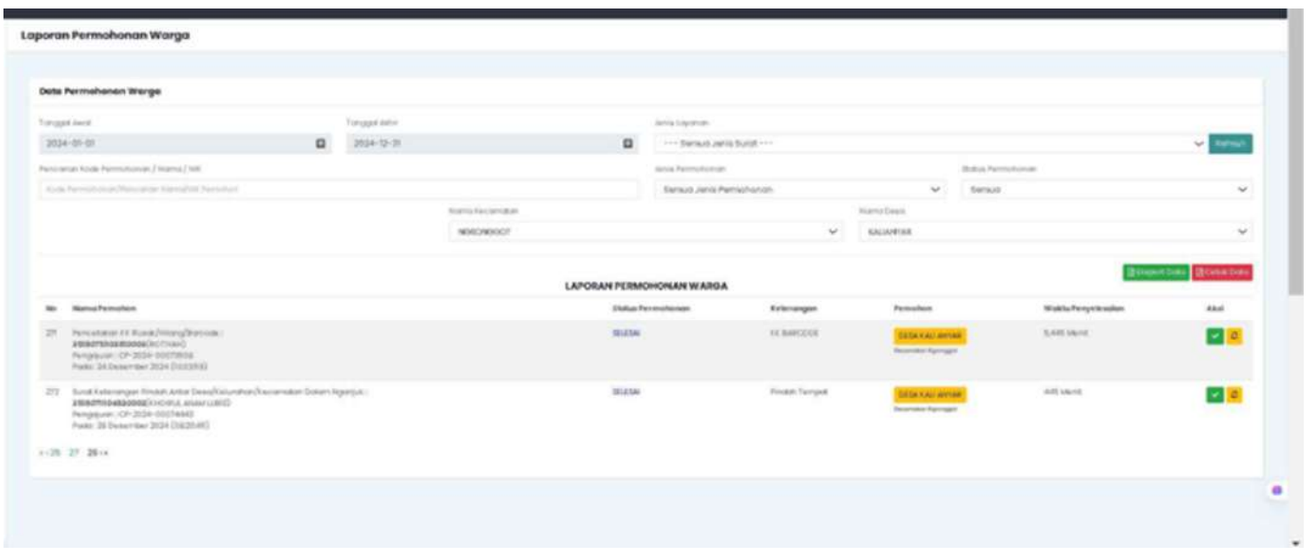
Kecamatan Ngetos



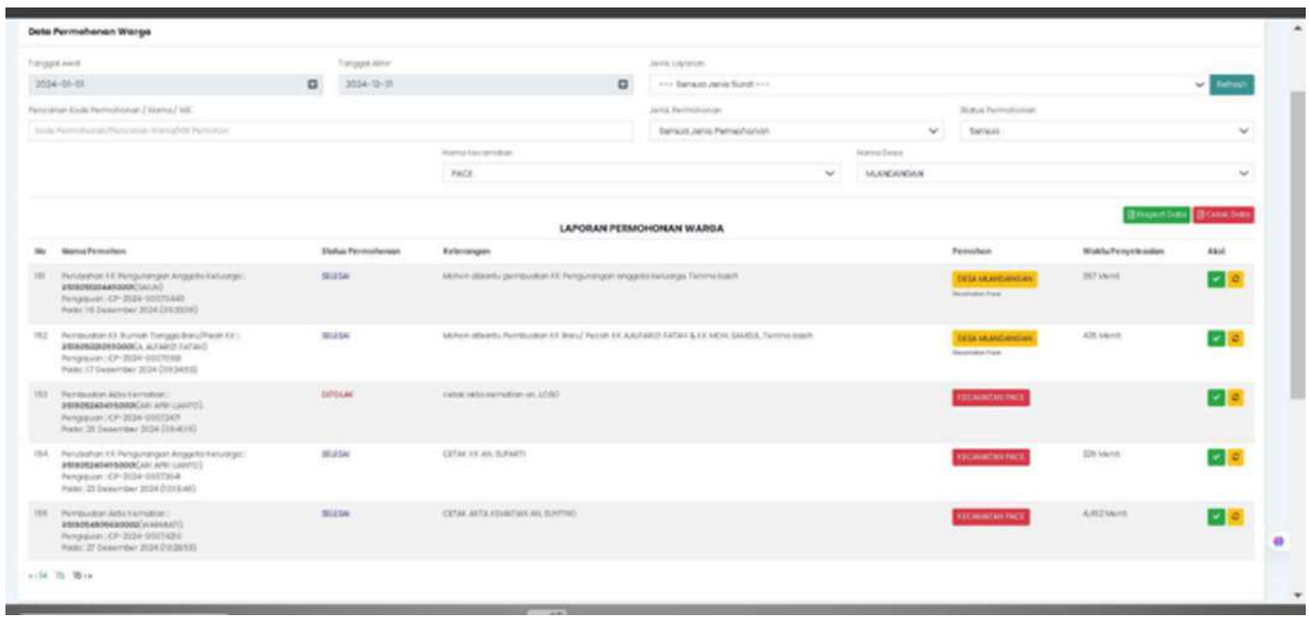
Kecamatan Ngluyu



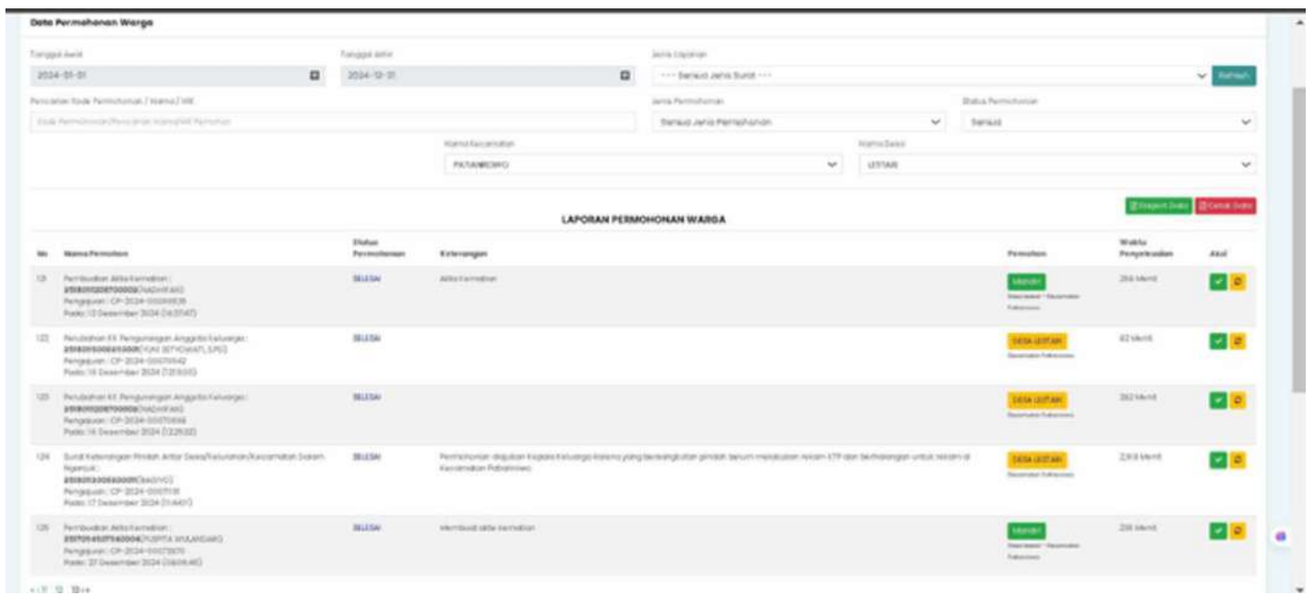
Kecamatan ngronggot



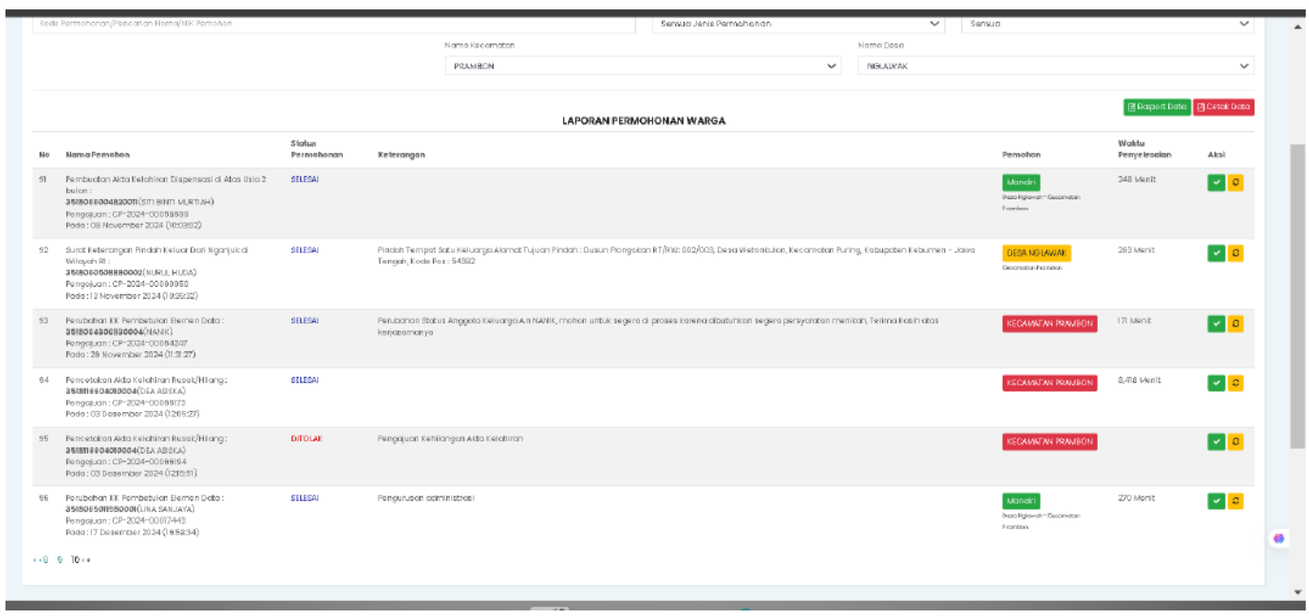
Kecamatan Pace



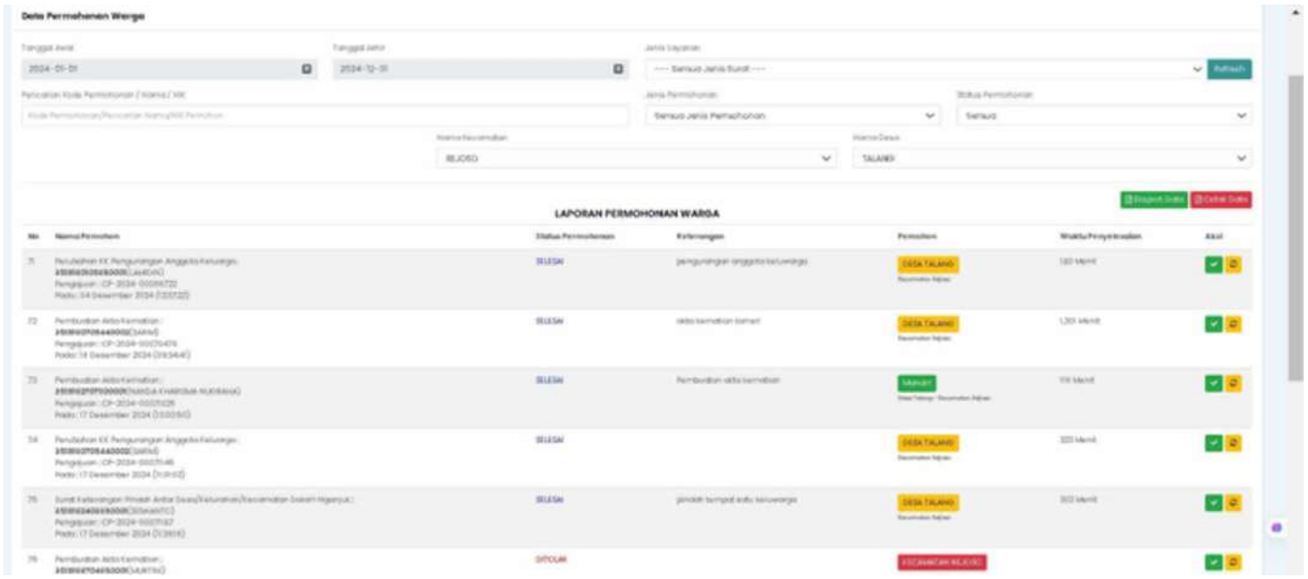
Kecamatan Paianrowo



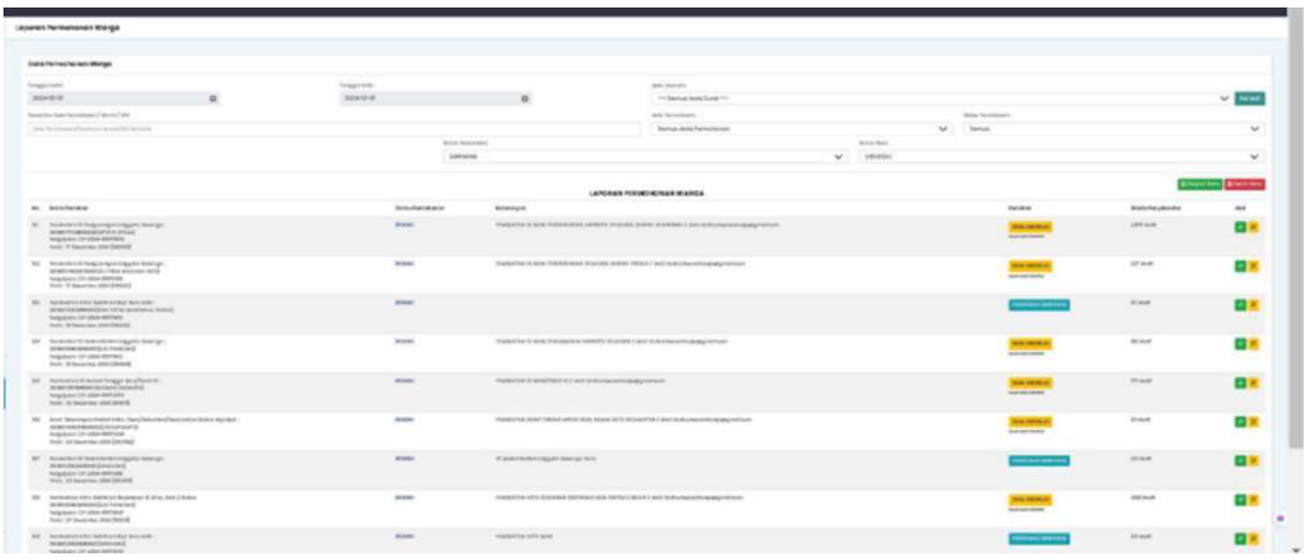
Kecamatan prambon



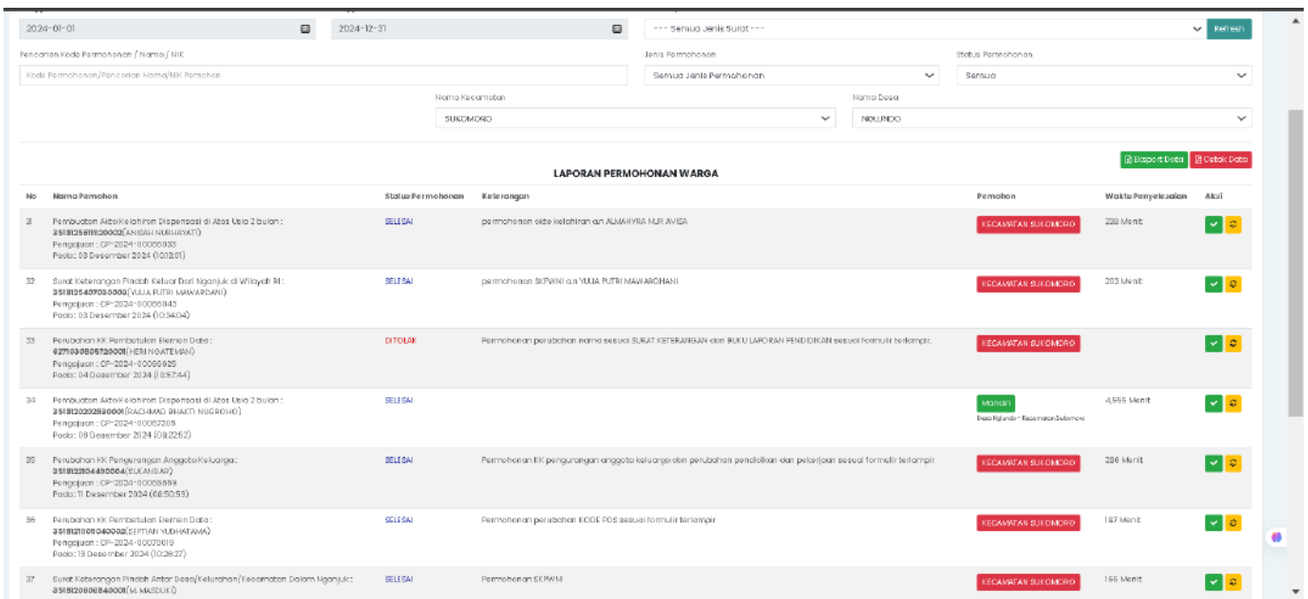
Kecamatan Rejoso



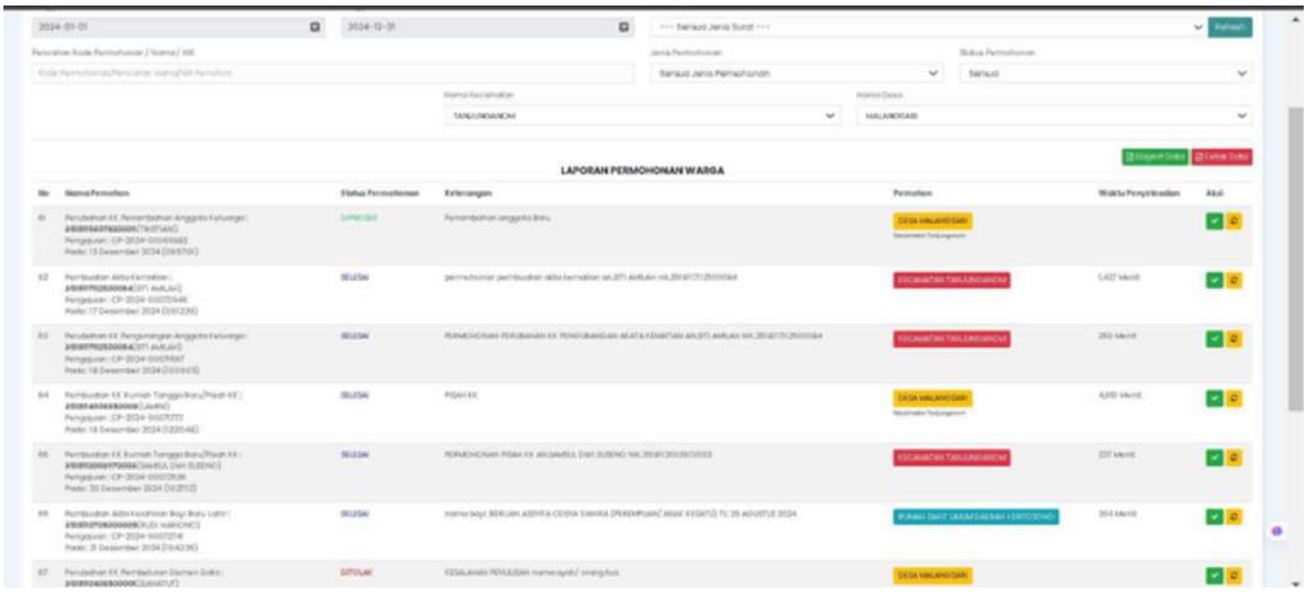
Kecamatan sawahan



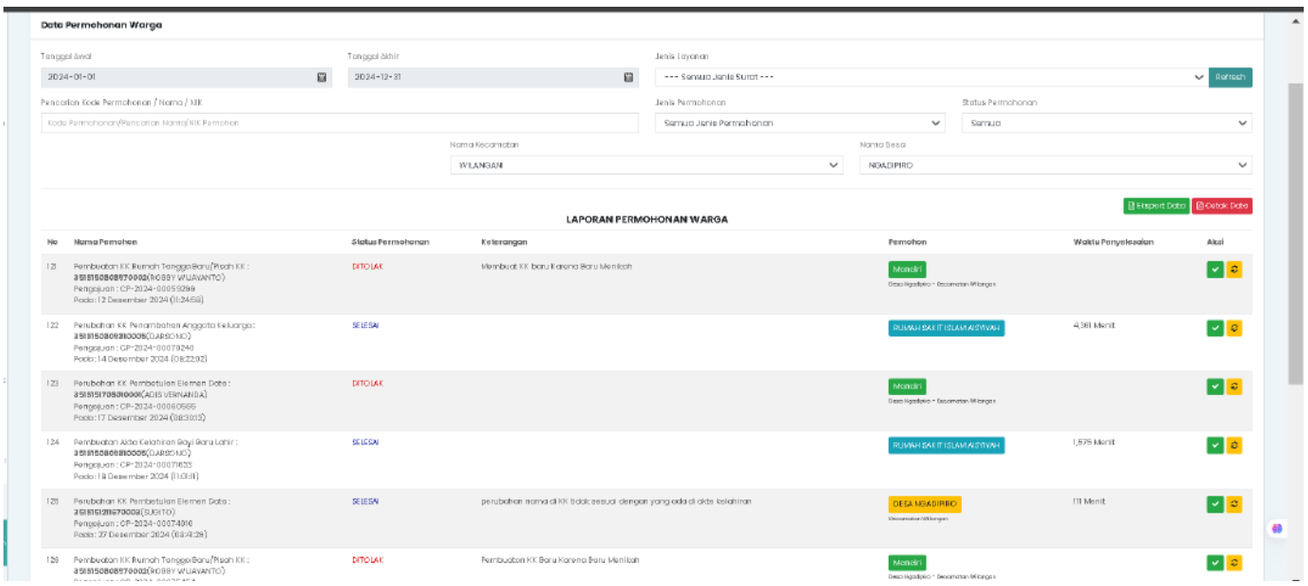
Kecamatan sukomoro



Kecamatan Tanjunganom



Kecamatan Wilangan



2. KELUARGA SEJAHTERA

Penanggulangan kemiskinan dan stunting melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa dan Tim Pendamping Keluarga Desa untuk 1) memberikan pelayanan ketenagakerjaan didukung aplikasi MERGAWE 2) melakukan verifikasi dan validasi DTKS menggunakan aplikasi SIKS-NG 3) melaksanakan program kemiskinan dan stunting serta melaporkan realisasinya menggunakan aplikasi SIDA BERKAT 4) memutakhirkan data REGSOSEK melalui aplikasi SEPAKAT. Adapun untuk bukti dukung pelaksanaan point 1 s/d 4 sebagaimana terlampir dibawah.

1. Pelayanan ketenagakerjaan



2. Verifikasi dan validasi SIK-NG per kecamatan

Kecamatan Sawahan



Kecamatan Ngetos



Kecamatan Berbek



Kecamatan Loceret



Kecamatan Pace



Kecamatan Prambon



Kecamatan Ngronggot



Kecamatan Kertosono



Kecamatan Patianrowo



Kecamatan Baron



Kecamatan Tanjunganom



Kecamatan Sukomoro



Kecamatan Nganjuk



Kecamatan Bagor



Kecamatan Wilangan



Kecamatan Rejoso



Kecamatan Gondang



Kecamatan Ngluyu



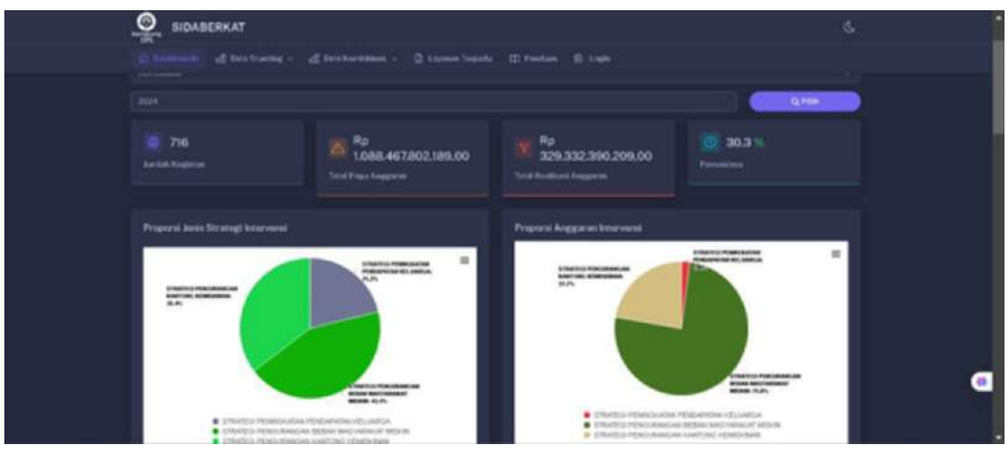
Kecamatan Lengkong

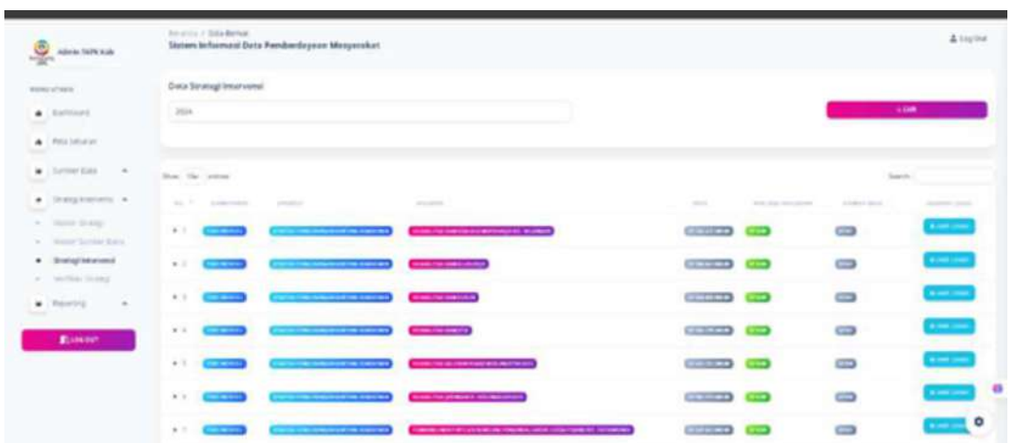


Kecamatan Jatikalen

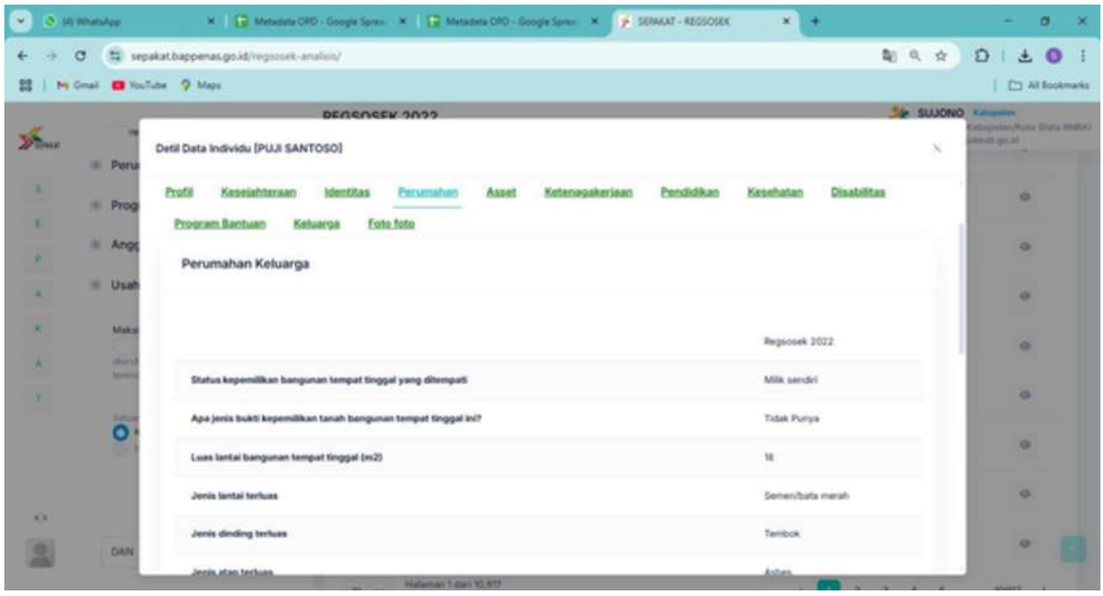


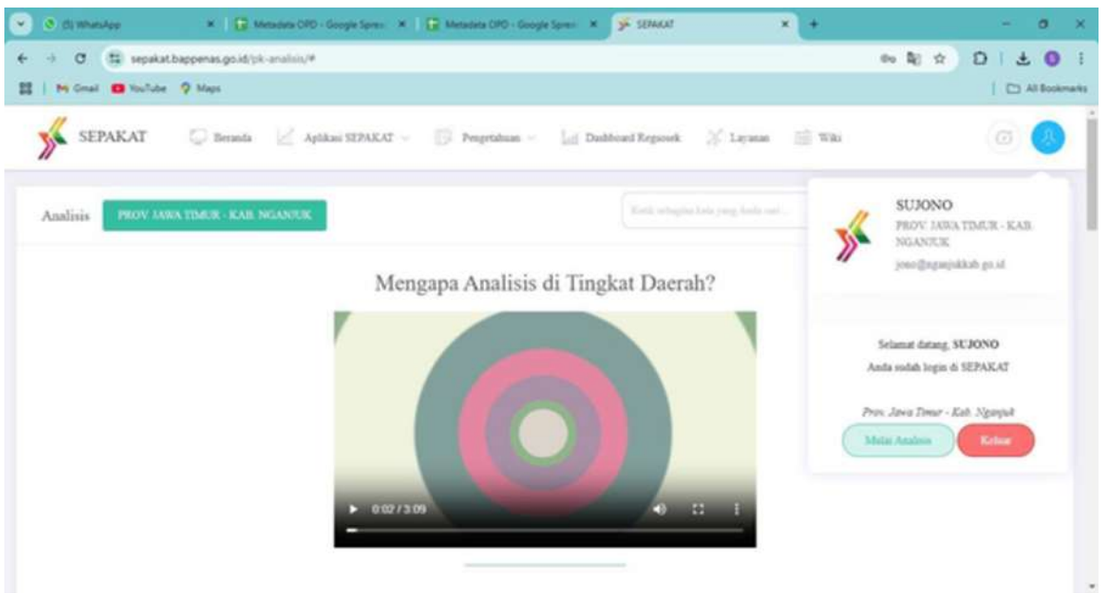
3. Melaporkan progress aplikasi sida berkat

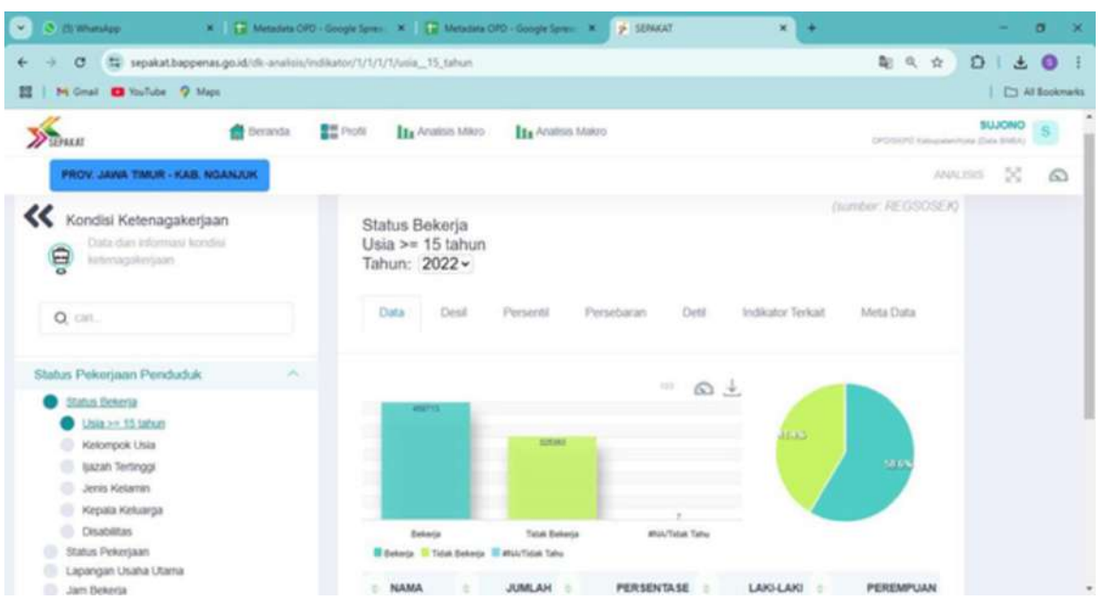


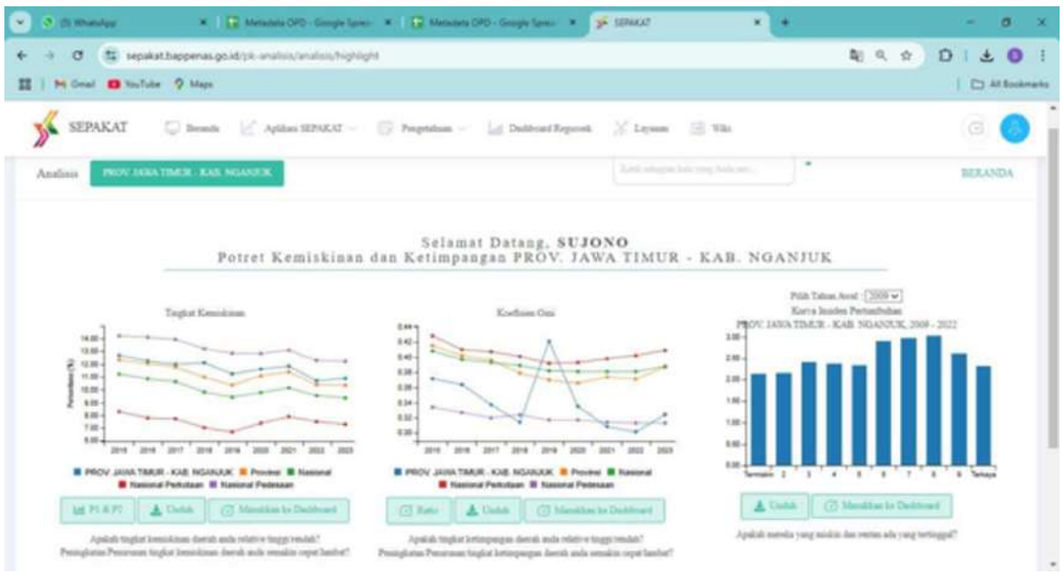


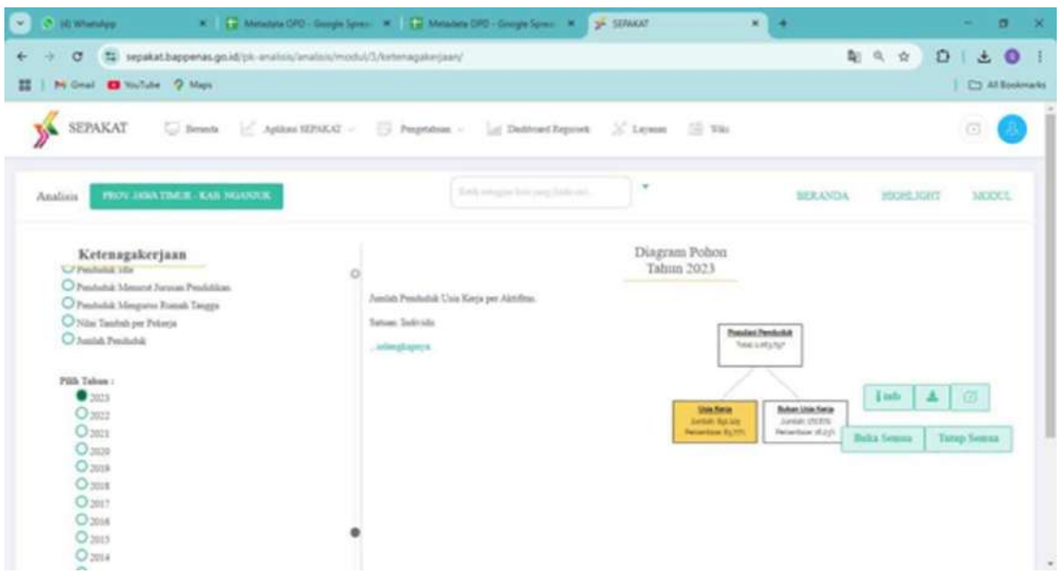
4. pelaksanaan update regsosek dengan aplikasi sepakat dapat dilihat dari tangkapan layer aplikasi sepakat sebagaimana gambar dibawah.

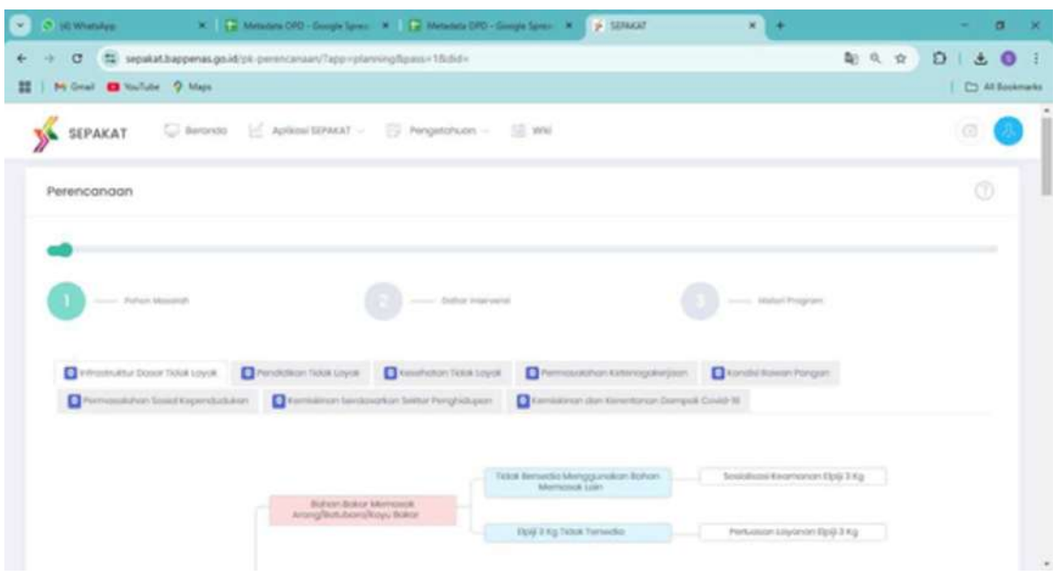


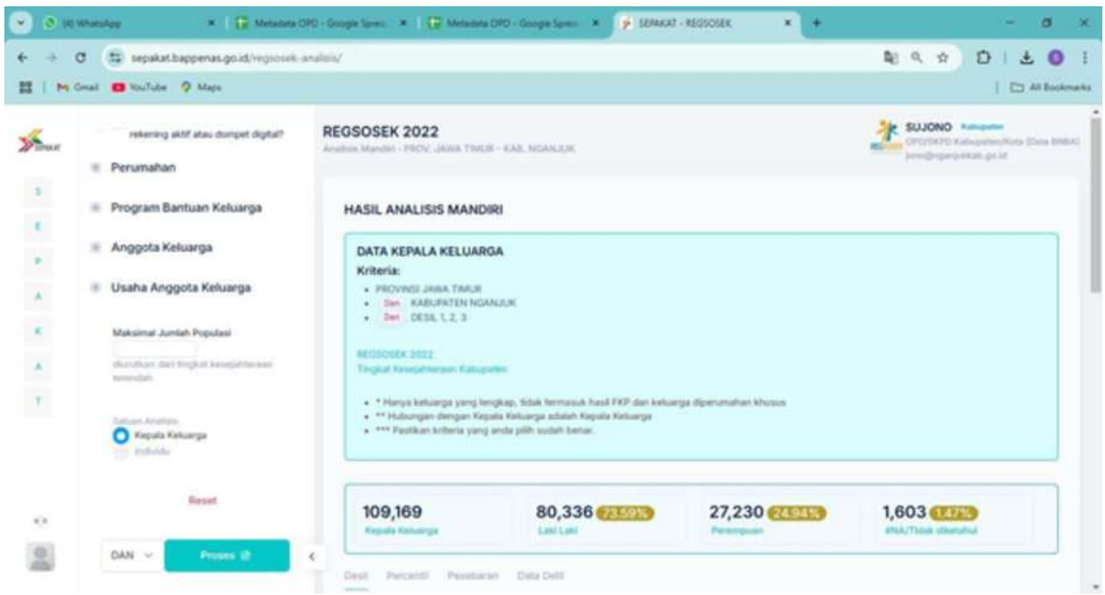





sepakat.bappenas.go.id/pk-analisis/analisis/highlight
SEPAKAT
Analisis
PROV. JAWA TIMUR - KAB. NGANJUK
BERANDA
Selamat Datang, SUJONO
Potret Kemiskinan dan Ketimpangan PROV. JAWA TIMUR - KAB. NGANJUK
Tingkat Kemiskinan
Koefisien Gini
Kurva Insiden Pertumbuhan
PROV. JAWA TIMUR - KAB. NGANJUK, 2009 - 2022
PROV. JAWA TIMUR - KAB. NGANJUK
Provinsi
Nasional
Nasional Perkotaan
Nasional Perdesaan
Unduh
Masukkan ke Dashboard


sepakat.bappenas.go.id/pk-analisis/analisis/modul/3/ketenagakerjaan/
SEPAKAT
Analisis
PROV. JAWA TIMUR - KAB. NGANJUK
BERANDA
HIGHLIGHT
MODUL
Ketenagakerjaan
Penduduk 10k
Penduduk Menurut Jurusan Pendidikan
Penduduk Mengurus Rumah Tangga
Nilai Tambah per Pekerja
Jumlah Penduduk
Pilih Tahun :
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Diagram Pohon
Tahun 2023
Jumlah Penduduk Usia Kerja per Aktifitas
Satuan: Individu
Info
Buka Semua
Tutup Semua


sepakat.bappenas.go.id/pk-perencanaan/?app=planning&pass=1&did=
SEPAKAT
Perencanaan
Infrastruktur Dasar Tidak Layak
Pendidikan Tidak Layak
Kesehatan Tidak Layak
Permasalahan Ketenagakerjaan
Kondisi Rawan Pangan
Permasalahan Sosial Kependudukan
Kemiskinan Berkaitan Sektor Pertahanan
Kemiskinan dan Kerentanan Dampak Covid-19
Tidak Tersedia Menggunakan Bahan Memasak Lain
Sosialisasi Kesehatan Elpiji 3 Kg
Elpiji 3 Kg Tidak Tersedia
Pertukaran Layanan Elpiji 3 Kg



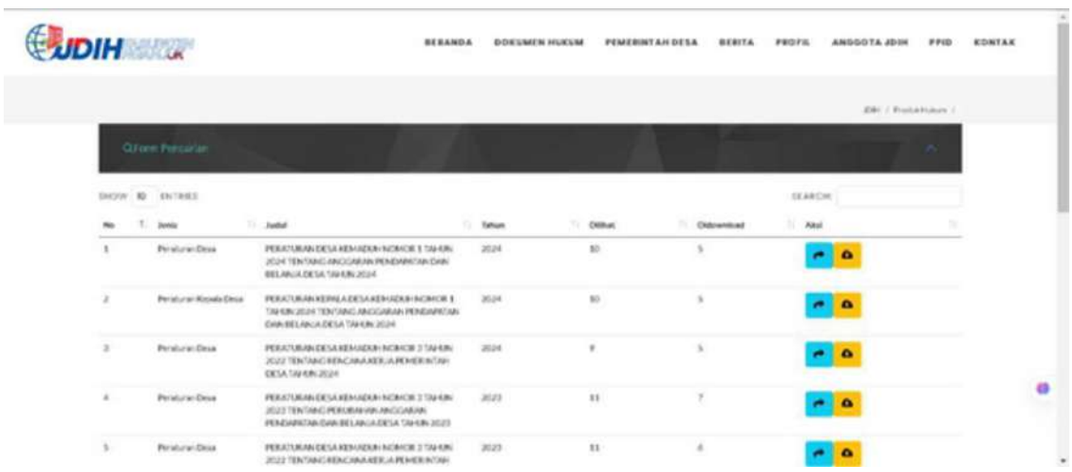
3. MASYARAKAT HARMONIS

Melaksanakan program Desa Sadar Hukum, pelaksanaan program tersebut dapat dilihat hasilnya dengan melihat keaktifan pemerintah desa dalam mengupload produk-produk hukum di masing-masing desa seperti tangkapan layer dari aplikasi JDIH Desa di 20 Kecamatan 20 Desa Lokasi Kampung DIAL sebagaimana gambar dibawah:

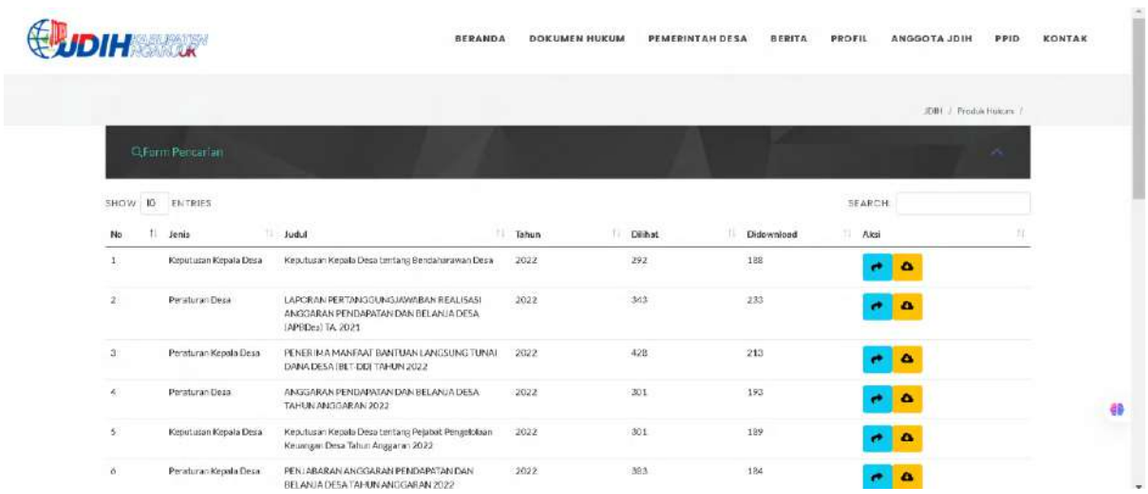
Kecamatan Bagor



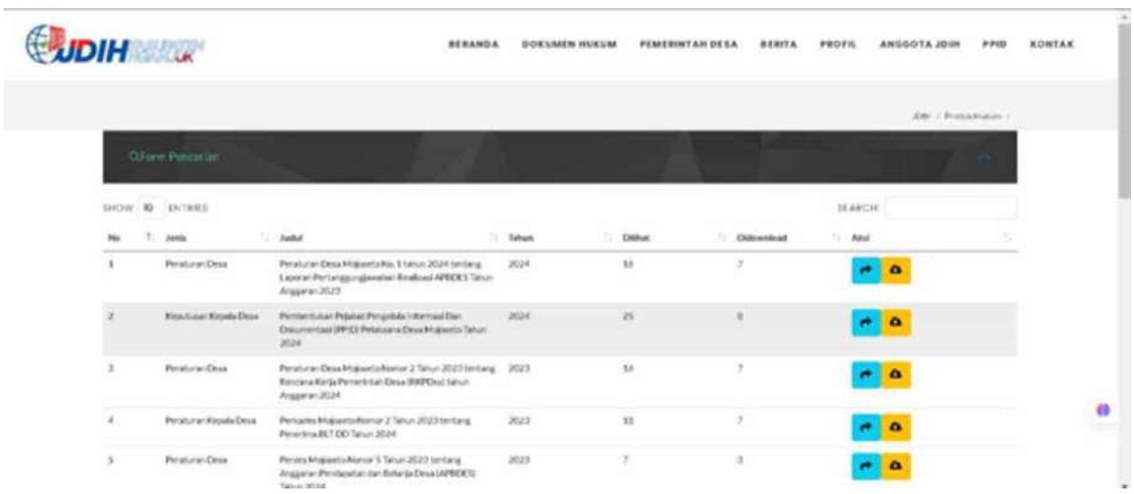
Kecamatan Baron



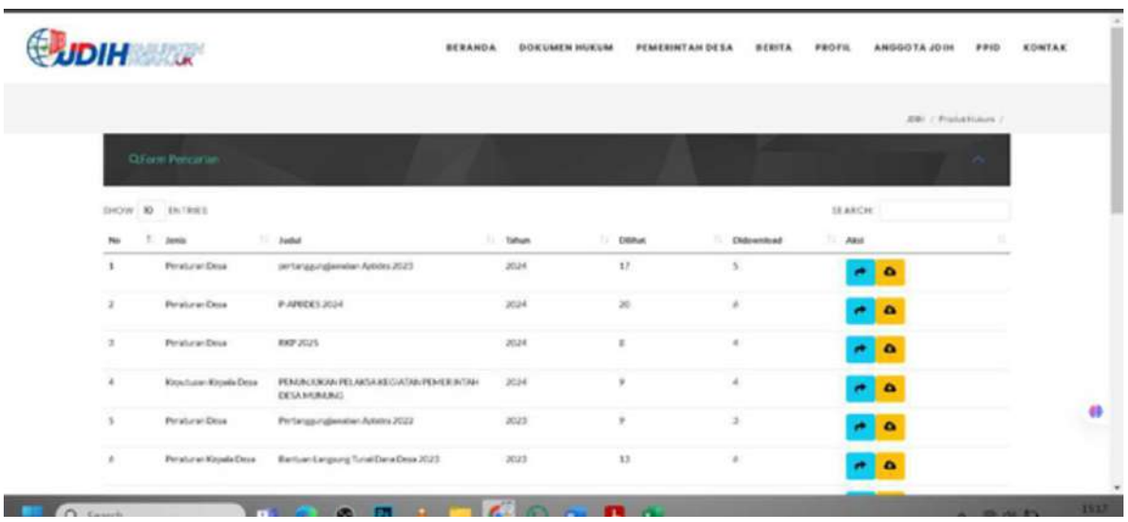
Kecamatan Berbek



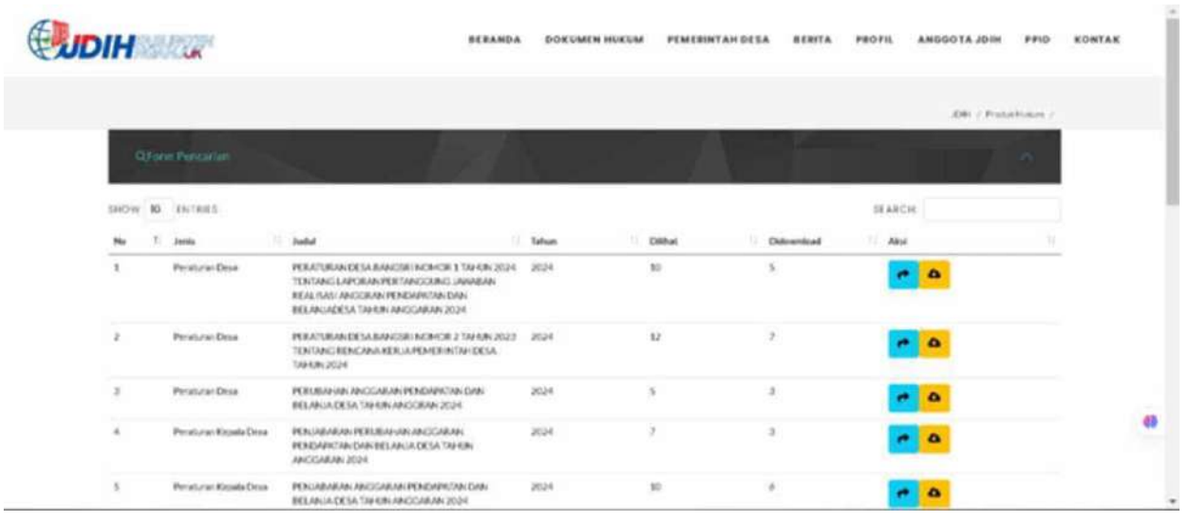
Kecamatan Gondang



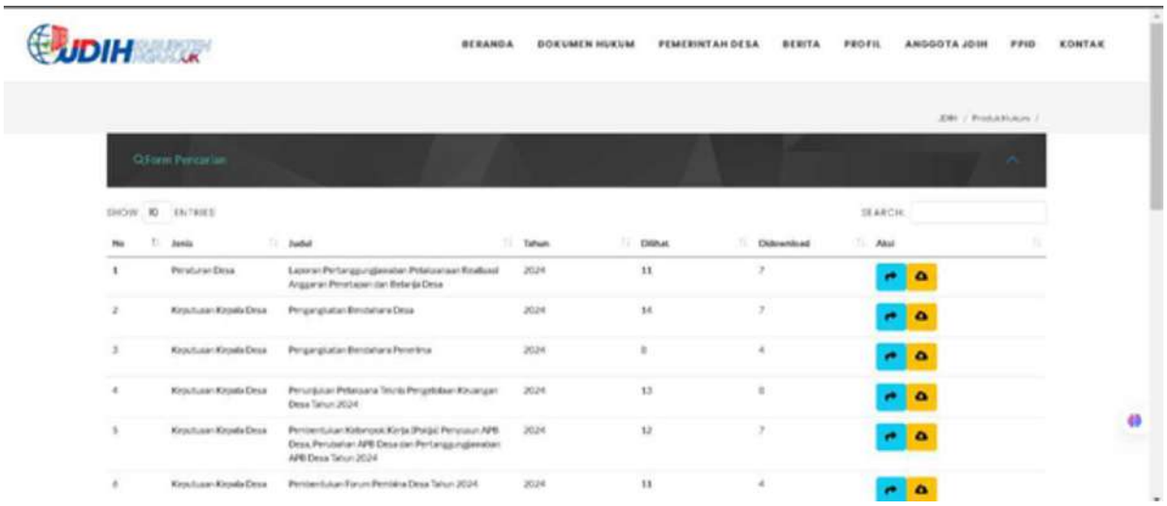
Kecamatan Jatikalen



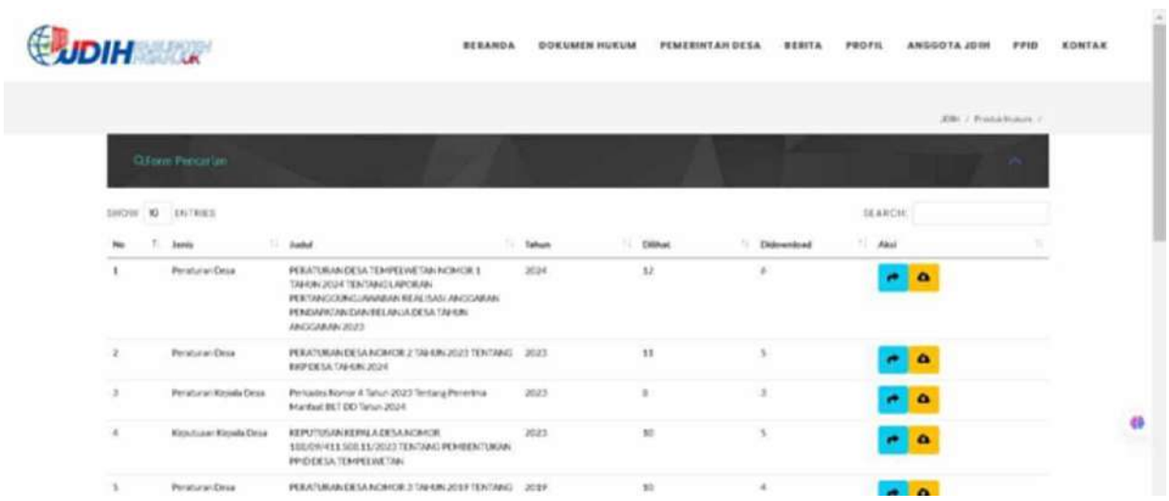
Kecamatan Kertosono



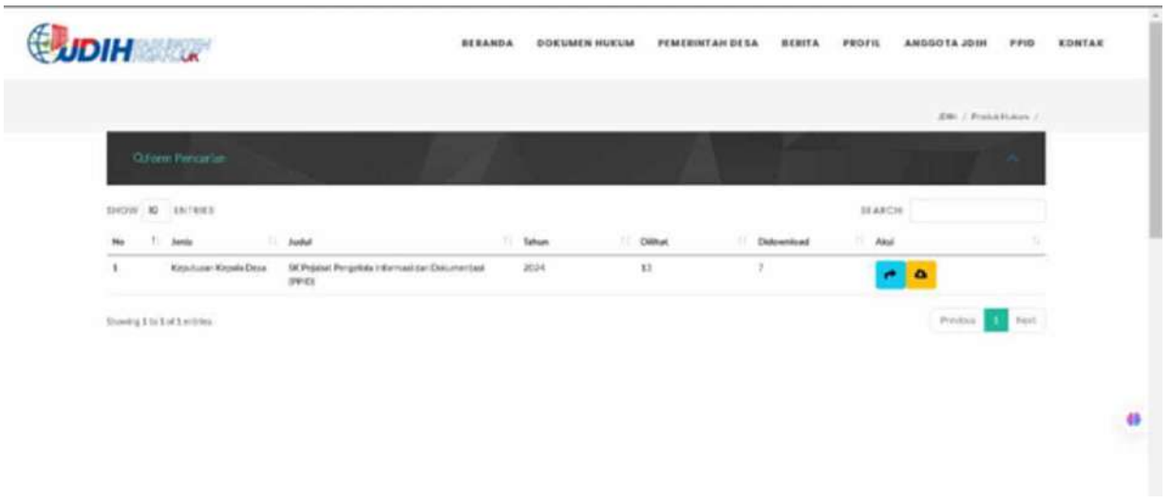
Kecamatan Lengkong



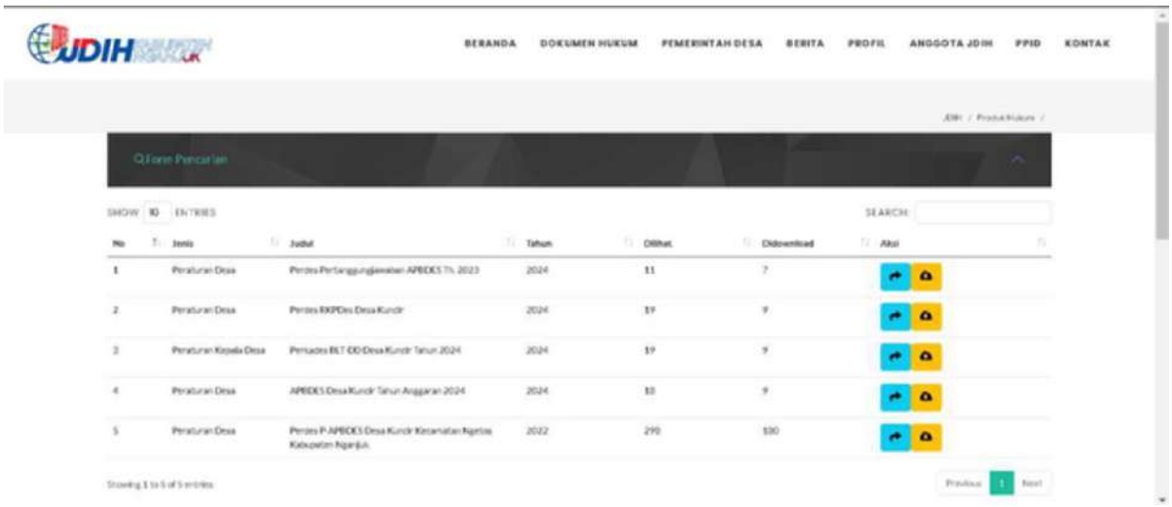
Kecamatan Loceret



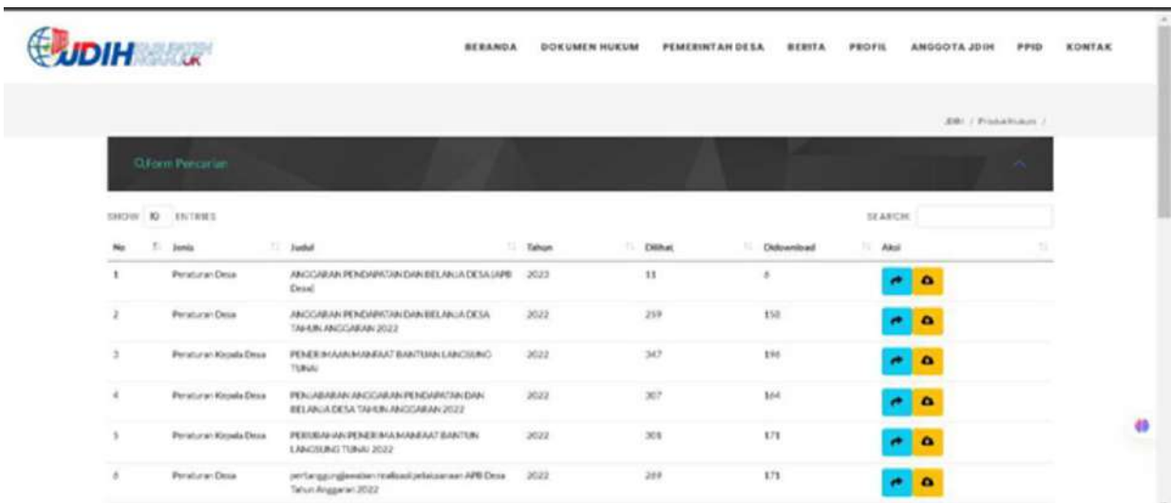
Kecamatan Nganjuk



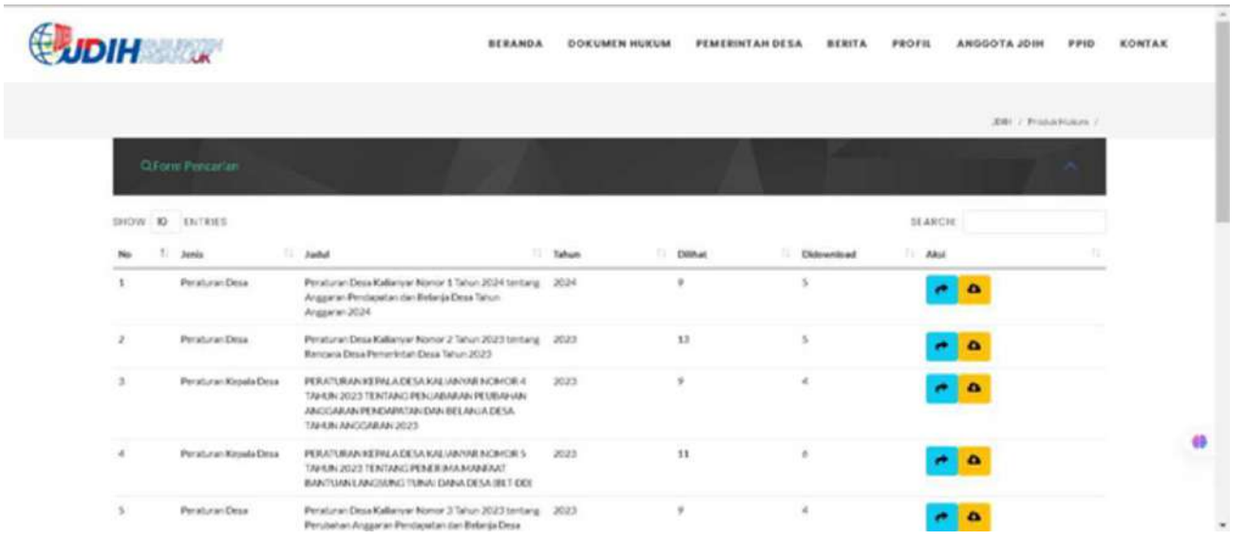
Kecamatan Ngetos



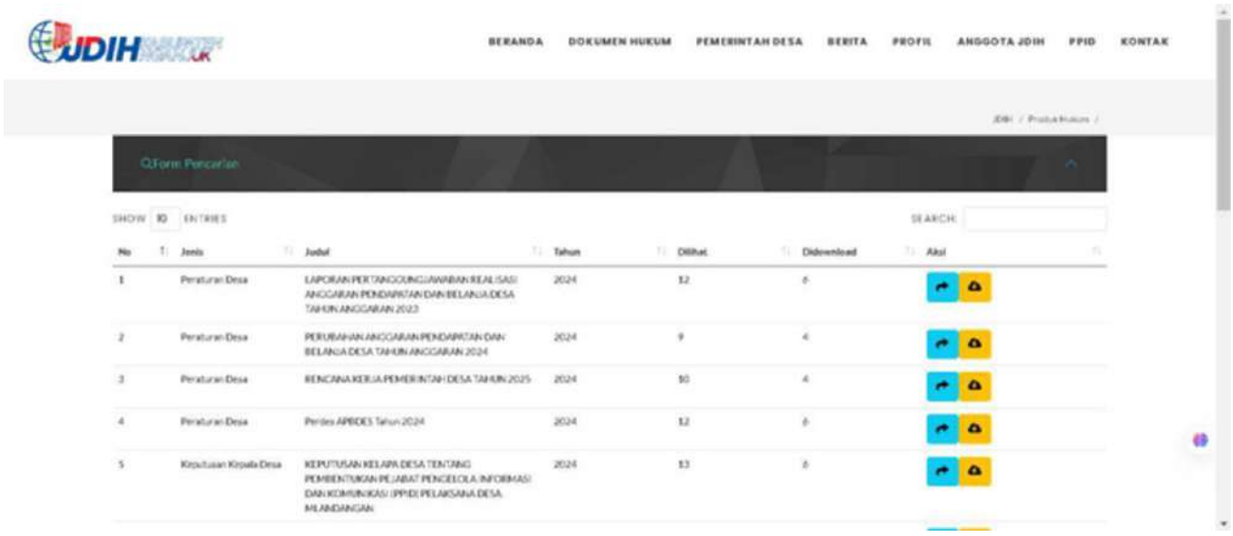
Kecamatan Ngluyu



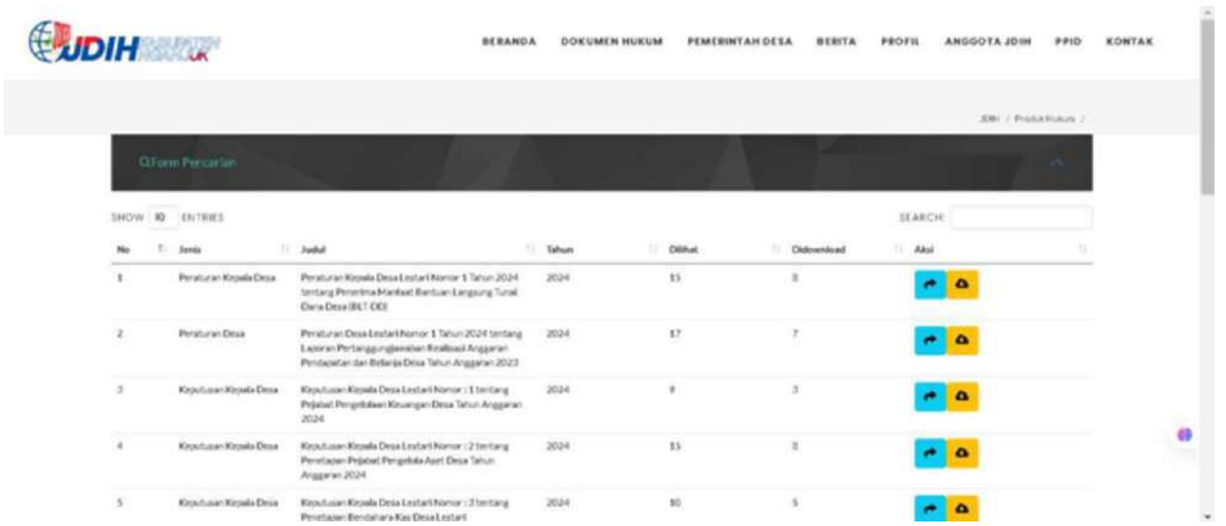
Kecamatan Ngronggot



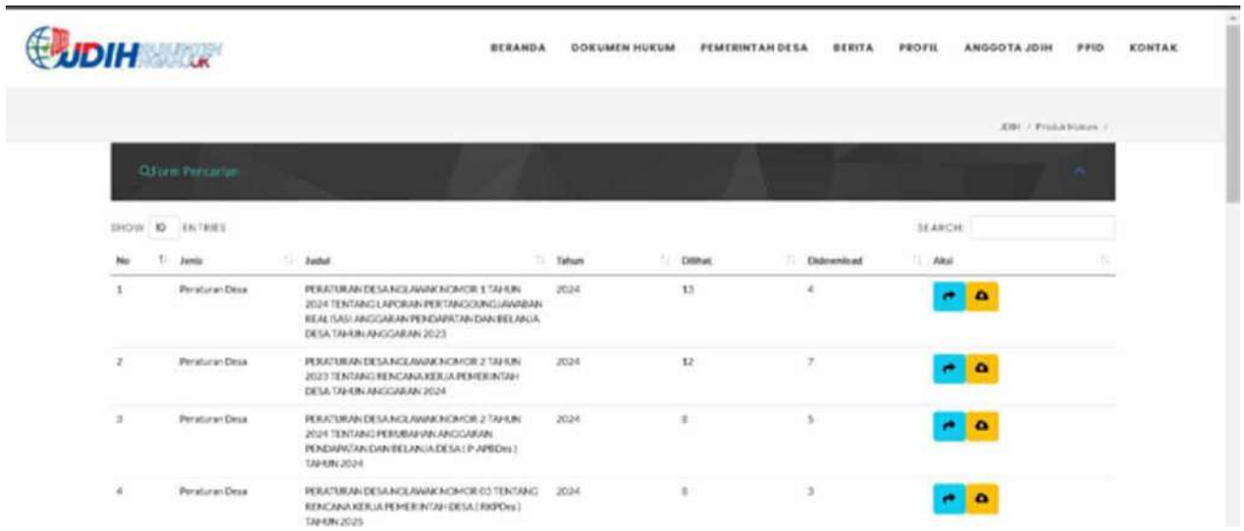
Kecamatan Pace



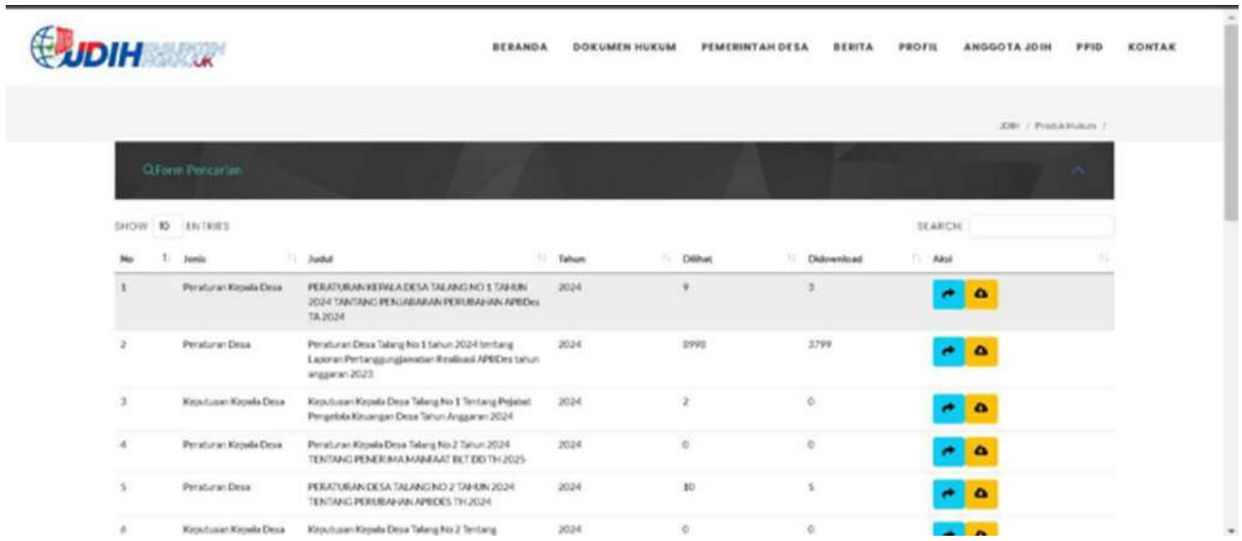
Kecamatan Patianrowo



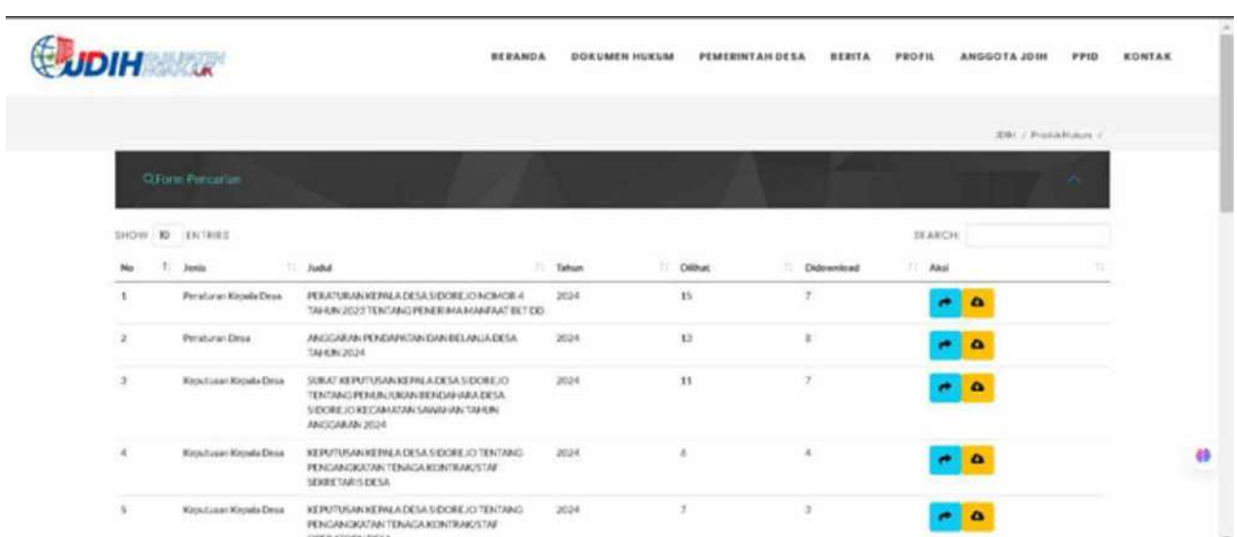
Kecamatan Prambon



Kecamatan Rejoso



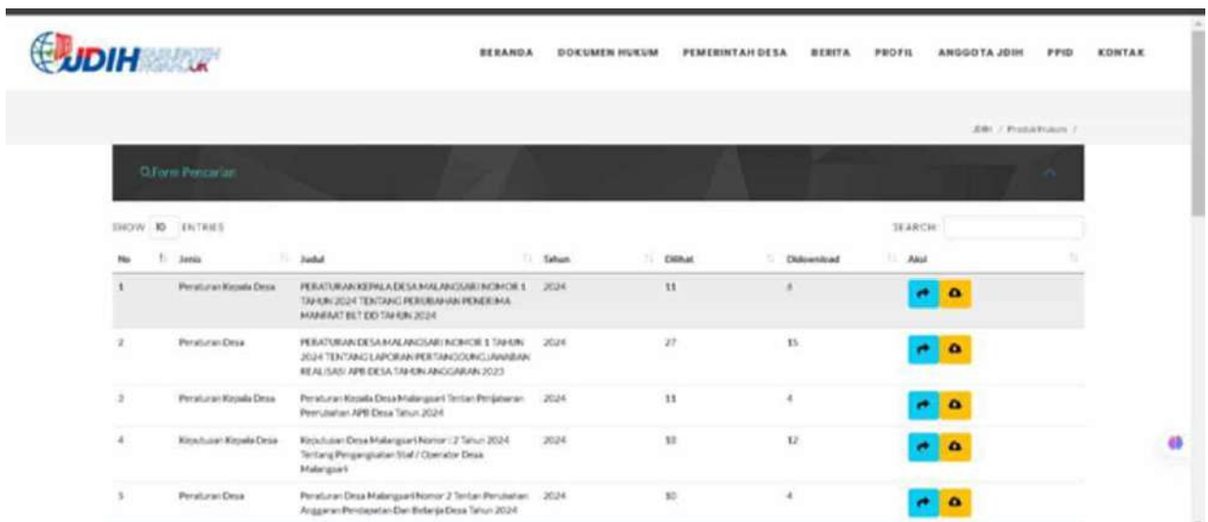
Kecamatan Sawahan



Kecamatan Sukomoro



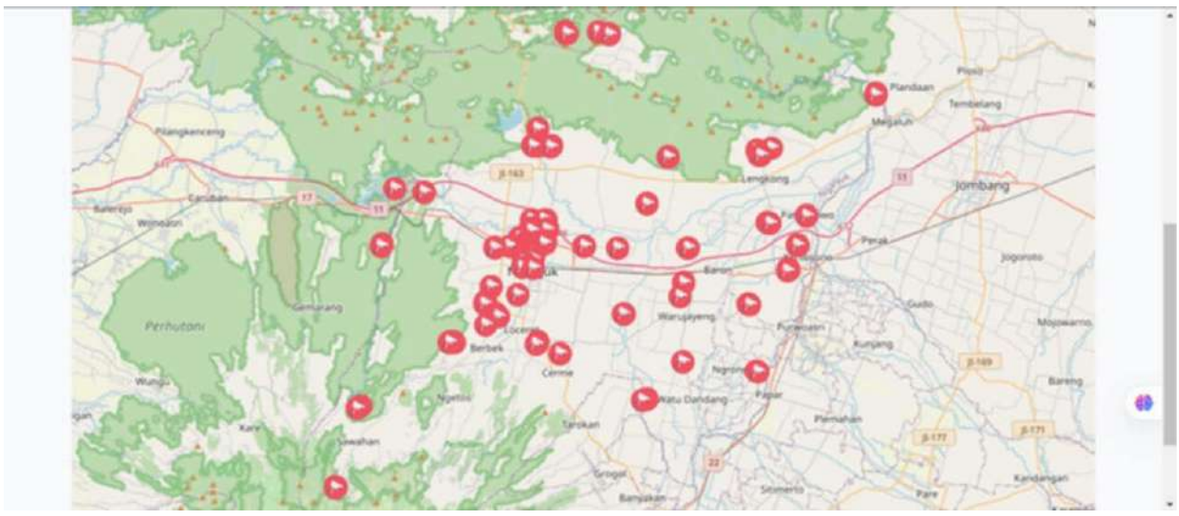
Kecamatan Tanjunganom



Kecamatan wilangan



Pembangunan jaringan CCTV SIBERJOYO di 20 desa Lokasi Kampung DIAL. Adapun pemasangan cctv ini menjadi alat bantu untuk menjaga trantibunmas di 20 Desa Lokasi Kampung DIAL.



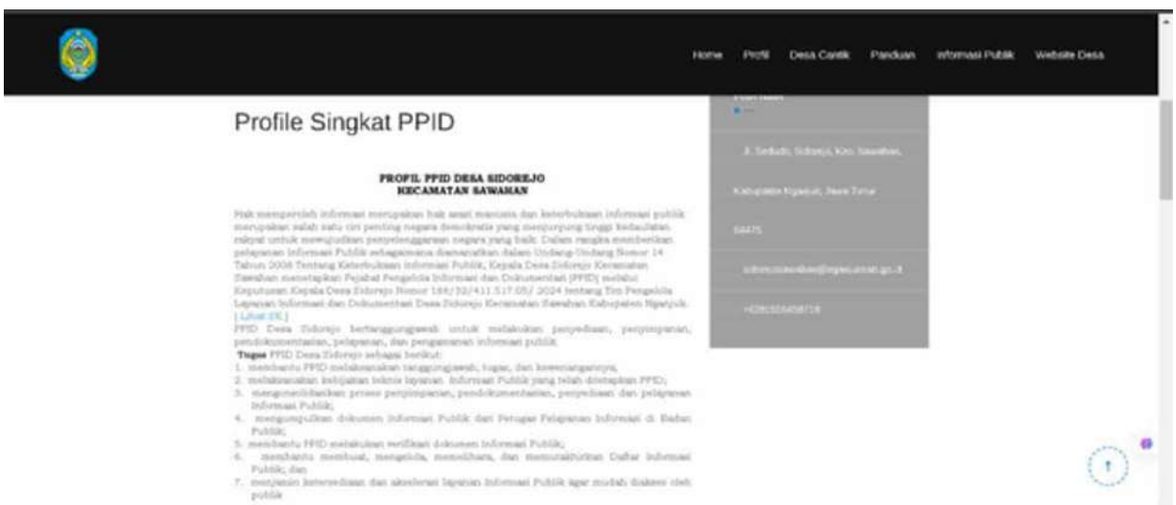
4. PEMERINTAHAN TERPERCAYA

Untuk penerapan pemerintah tepecaya dapat dilihat dari progress pelaksanaan PPID Desa yang dimana setiap informasi kegiatan pemerintah desa di publis. Adapun bukti dukung pelaksanaan PPID di 20 Desa Lokasi Kampung DIAL sebagaimana gambar dibawah.

Kecamatan Nganjuk



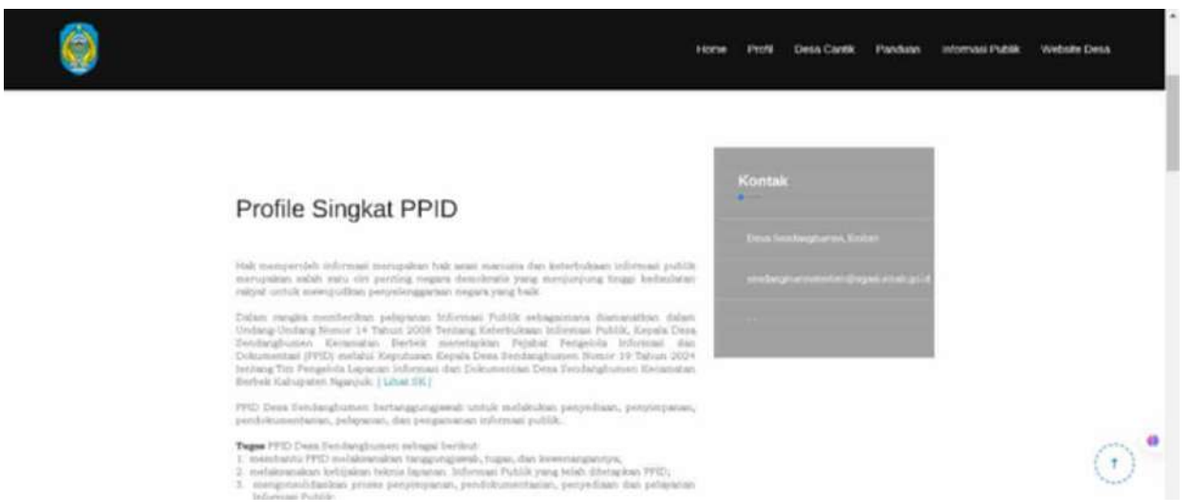
Kecamatan Sawahan



Kecamatan Ngetos



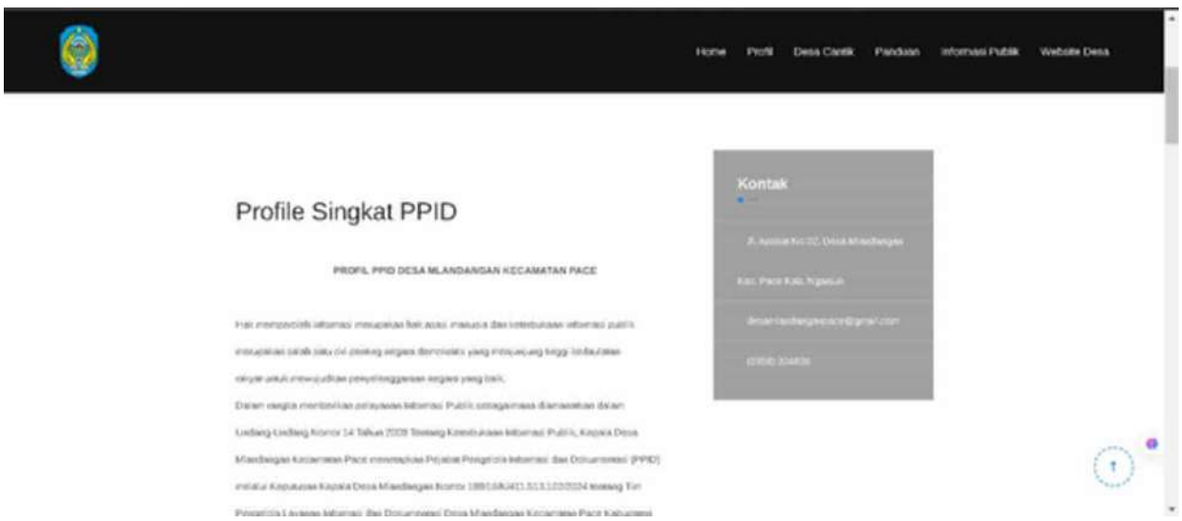
Kecamatan Berbek



Kecamatan Loceret



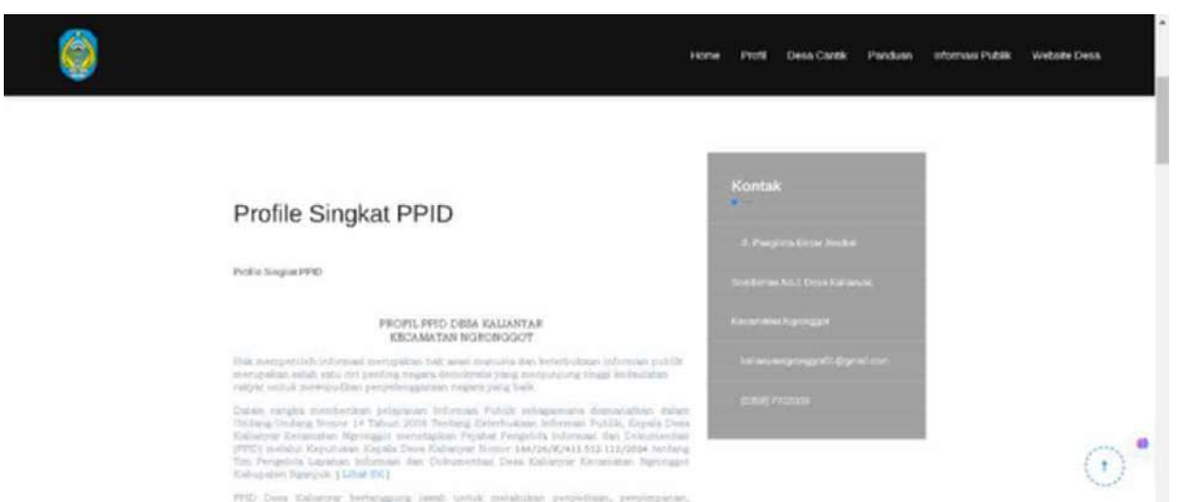
Kecamatan Pace



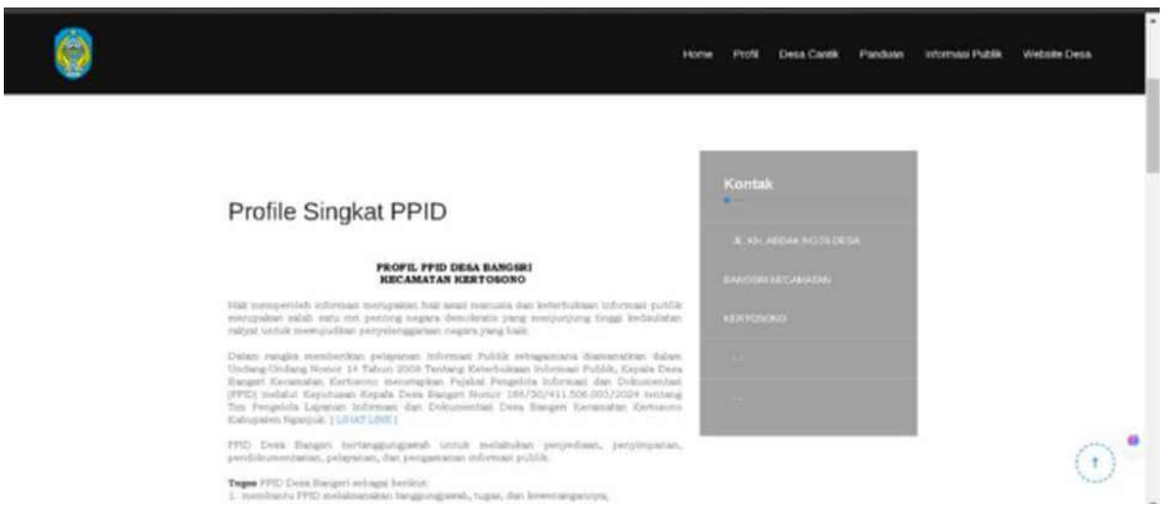
Kecamatan Prambon



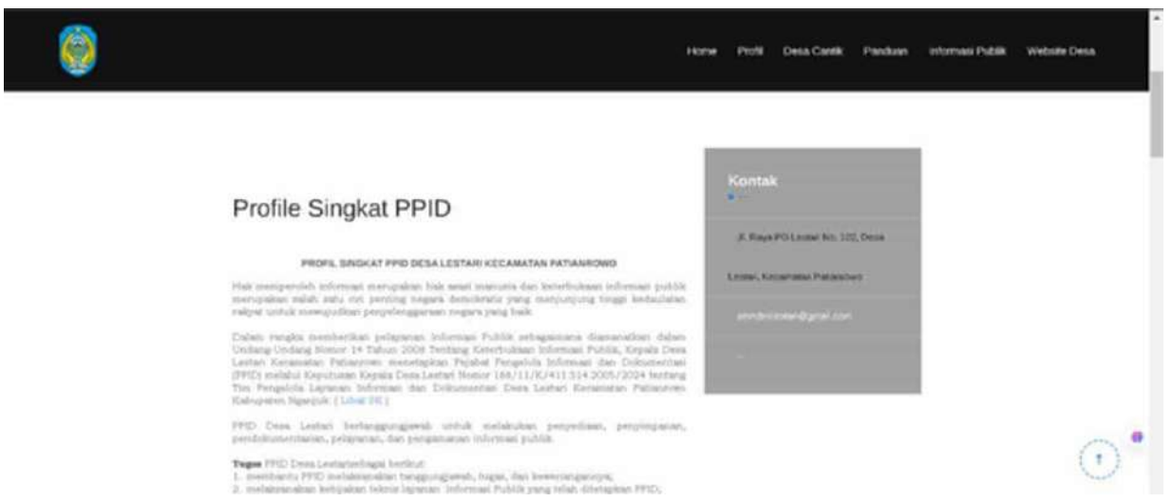
Kecamatan Ngronggot



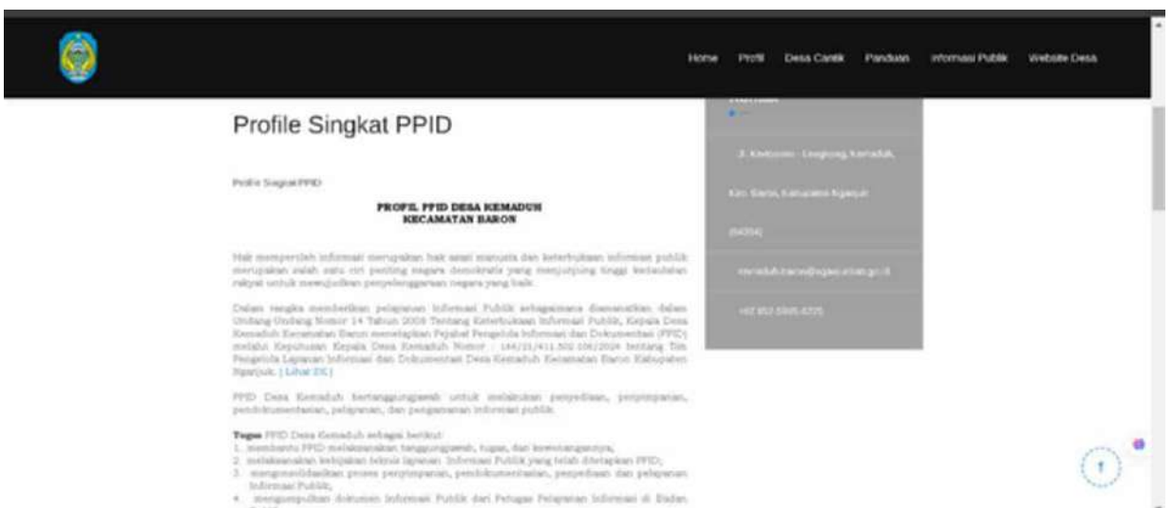
Kecamatan Kertosono



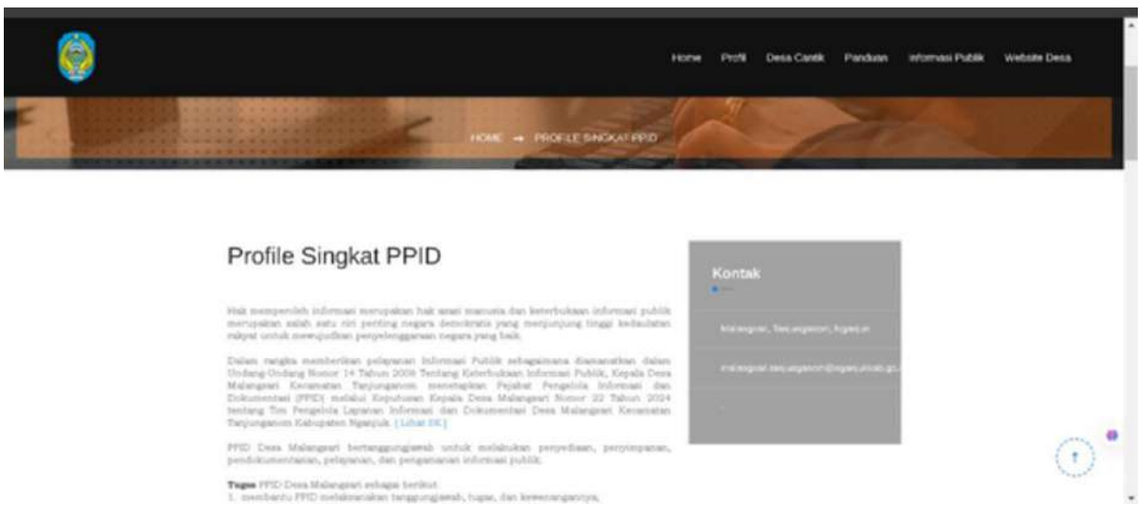
Kecamatan Patianrowo



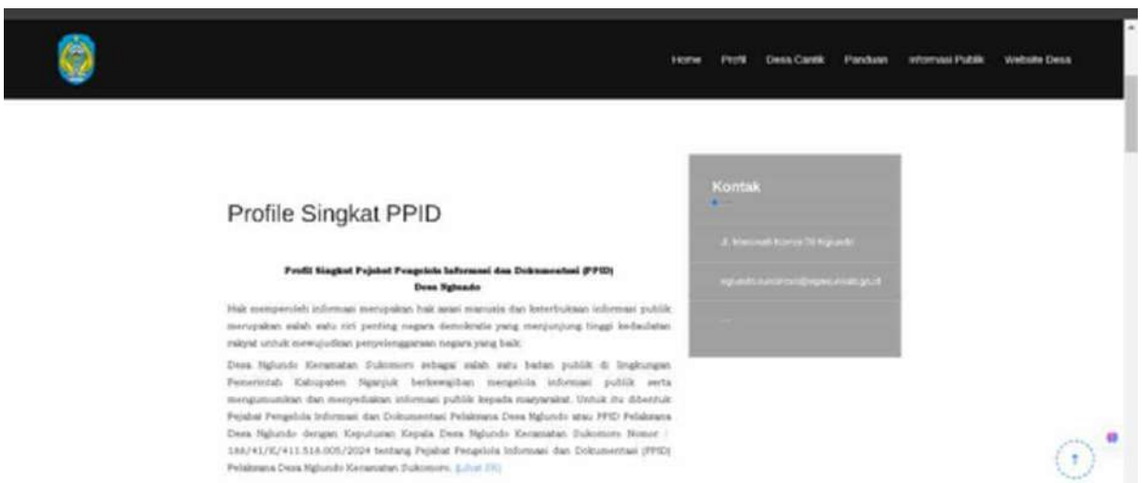
Kecamatan Baron



Kecamatan Tanjunganom



Kecamatan Sukomoro



Kecamatan Bagor



Kecamatan Wilangan



Kecamatan Rejoso



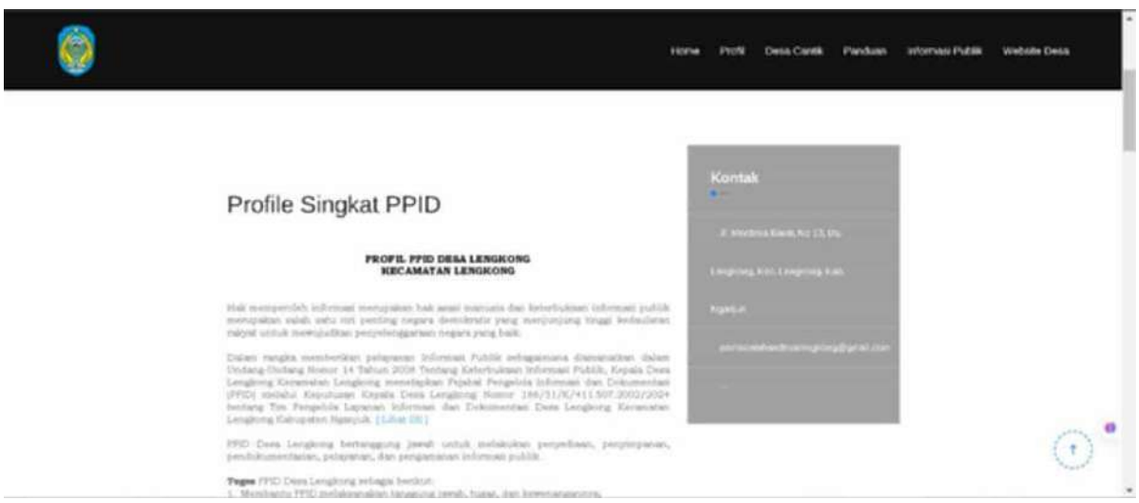
Kecamatan Gondang



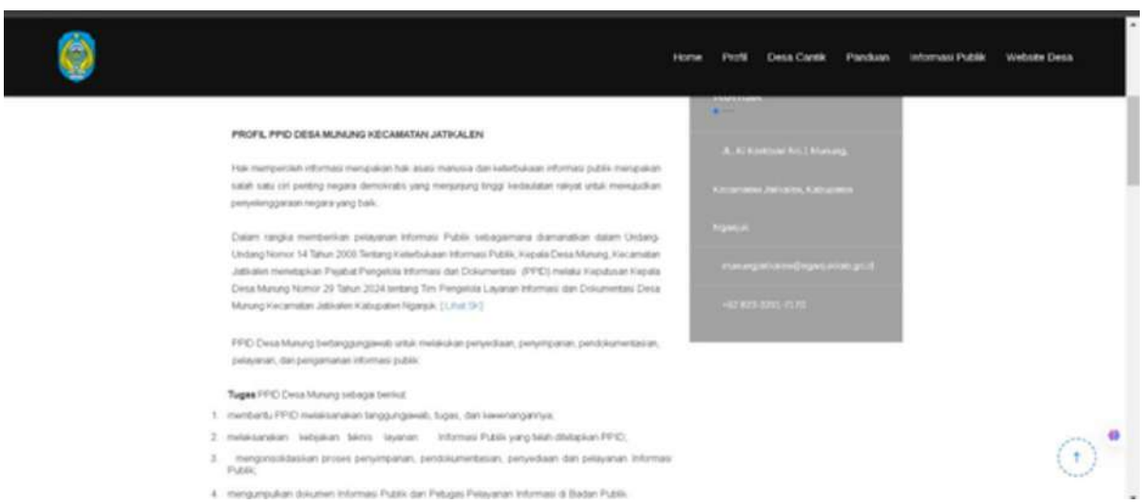
Kecamatan Ngluyu



Kecamatan Lengkong

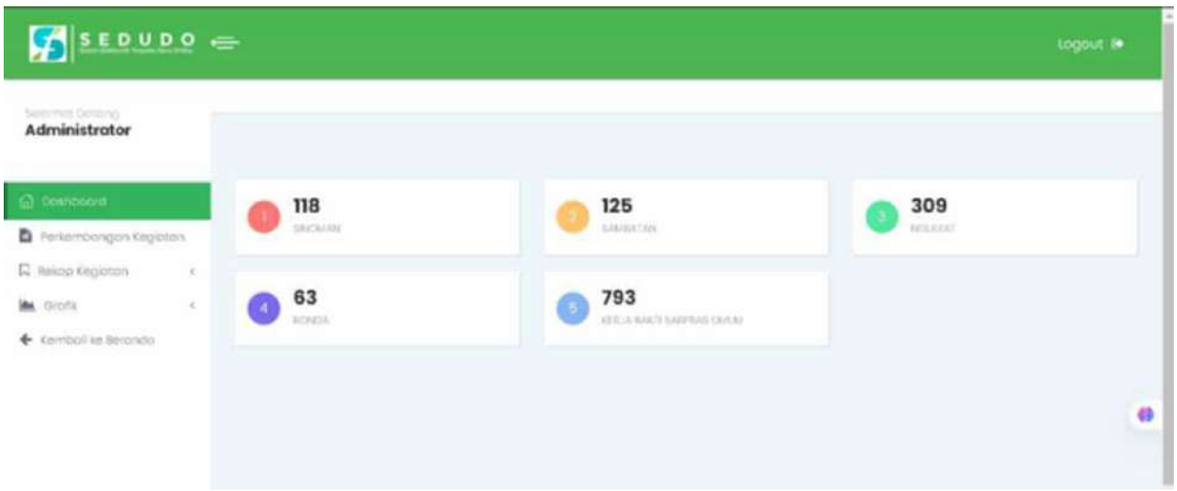


Kecamatan Jatikalen



5. MASYARAKAT PARTISIPATIF

Pelaksanaan masyarakat partisipatif dapat dilihat dari pelaporan aplikasi sedudo pada menu gugur gunung yang dimana menjadi indicator partisipasi masyarakat di 20 Desa Lokasi Kampung DIAL. Hal tersebut dapat di lihat dengan bukti dukung gambar dibawah.



D. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Kampung DIAL ini disusun dengan harapan mampu menjadikan tolok ukur layanan kepada masyarakat dalam segala bidang sehingga perbaikan layanan di pemerintah baik pemerintah kabupaten sampai pemerintah desa kedepannya selalu ada perbaikan.

Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Kampung DIAL yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember 2024.

Nganjuk, 30 Desember 2024

Pelapor Kepala Bidang Aptika dan Persandian	Mengetahui atasan langsung Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
AZFANDI MIFTAKHUL YAQIN,S.IP,M.AP Penata Tingkat I NIP. 19880420 200701 1 002	**SUJONO, S.Kom** Pembina NIP. 19761128 200604 1 013



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/9/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHAN
KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merealisasikan Program Prioritas Daerah Percepatan Transformasi Digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah ditetapkan indikator sasaran persentase Kampung Digital Anjuk Ladang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

b. bahwa untuk kelancaran program Kampung Digital Anjuk Ladang, perlu menunjuk Desa dan Kelurahan yang menjadi percontohan ideal penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHAN KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Desa dan Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/9/K /411.013/2024
TENTANG PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHAN KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR DESA DAN KELURAHAN PERCONTOHAN
KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN PERCONTOHAN
1	2	3
1.	Bagor	Desa Sekarputih
2.	Baron	Desa Kemaduh
3.	Berbek	Desa Sendangbumen
4.	Gondang	Desa Mojoseto
5.	Jatikalen	Desa Munung
6.	Kertosono	Desa Bangsri
7.	Lengkong	Desa Lengkong
8.	Loceret	Desa Tempelwetan
9.	Nganjuk	Kelurahan Mangundikaran
10.	Ngetos	Desa Kuncir
11.	Ngluyu	Desa Sugihwaras
12.	Ngronggot	Desa Kalianyar
13.	Pace	Desa Mlandangan
14.	Patianrowo	Desa Lestari
15.	Prambon	Desa Nglawak
16.	Rejoso	Desa Talang
17.	Sawahan	Desa Sidorejo
18.	Sukomoro	Desa Nglundo
19.	Tanjunganom	Desa Malangsari
20.	Wilangan	Desa Ngadipiro

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN V
Dokumen Pendukung Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Laporan

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Merdeka No. 21 – Nganjuk

Email : diskominfo@nganjukkab.go.id

Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan perkenan dan ridha-Nya maka Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini dapat terwujud.

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 dilaksanakan menggunakan aplikasi ***sukma e-Jatim*** dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Masyarakat dapat memberikan penilaian secara *online*, sehingga diharapkan aksesbilitas semakin meluas dan validitas lebih meningkat. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan bertujuan untuk mengukur keberhasilan penyelenggara layanan yang ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan dan kepuasan masyarakat dengan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara layanan.

Kami berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan masukan atau kritikan yangsifatnya membangun terhadap hasil survei ini, agar dapat memperbaiki kekurangan, sertamenjadi referensi terhadap proses perbaikan pelayanan publik yang kami selenggarakan, dengan harapan semoga dapat menjadi pelayanan yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Nganjuk, 16 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk
Sekretaris,

SUJONO, S.Kom
Pembina / IV-a
NIP. 19761128 200604 1 013

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2
1.3 Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2
1.4 Metode 2
1.4.1 Waktu Pelaksanaan 2
1.4.2 Metode Pelaksanaan 3
1.5 Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3

BAB II ANALISIS
2.1 Data Kuisioner 4
2.2 Pengolahan Data IKM 5
2.2.1 Pengolahan Data IKM Periode I 5
2.2.2 Pengolahan Data IKM Periode II 6
2.2.3 Pengolahan Data IKM Periode III 7
2.3 IKM Diskominfo Tahun 2024 8
2.4 Deskripsi Hasil Analisis 10
2.4.1 Pengujian Kualitas Data 10
2.4.2. Perbandingan Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diskominfo 11
2.4.3. Kendala Penyelenggaraan Survei Kepusasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 11

BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan 12
3.2 Saran/Rekomendasi 12

Lampiran I SK Tim SKM
Lampiran II Dokumentasi Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
Lampiran III Data Survei Periode I, II dan III
Lampiran IV Data Kotak Saran
Lampiran V Publikasi IKM Tahun 2024
Lampiran VI Matrik Realisasi Tindak Lanjut SKM Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Nganjuk, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

1.3 Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.4 Metode

1.4.1 Waktu Pelaksanaan

Periode survei merupakan periode survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kabupaten Nganjuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun pengumpulan data pada periode I dilaksanakan pada 1 Januari s.d. 31 Maret 2024, periode II dilaksanakan pada 1 April 2024 s.d. 30 Juni 2024 dan periode III dilaksanakan pada 1 Juli 2024 s.d. 30 September 2024.

1.4.2 Metode Pelaksanaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi ***sukma e-jatim*** yang merupakan replikasi inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sejak Tahun 2022.

1.5 Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi ***sukma e-jatim***. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/35/K/411.312/2024 tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang terdiri dari :

Pengarah	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Ketua	:	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretaris	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Anggota	:	1. Pranata Humas Ahli Muda
		2. Pranata Komputer

BAB II
ANALISIS

2.1 Data Kuisioner

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 menggunakan aplikasi ***sukma e-jatim*** dengan pengisian kuisioner secara *online* yang dapat diakses penerima layanan melalui *gadget* pribadi atau *gadget* yang disediakan pemberi layanan. Daftar pertanyaan pada kuisionar *online* dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN
1.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	○ Tidak sesuai ○ Kurang sesuai ○ Sesuai ○ Sangat sesuai
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	○ Tidak mudah ○ Kurang mudah ○ Mudah ○ Sangat mudah
3.	Bagaiamana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	○ Tidak cepat ○ Kurang cepat ○ Cepat ○ Sangat cepat
4.	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	○ Sangat mahal ○ Cukup mahal ○ Murah ○ Gratis
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	○ Tidak sesuai ○ Kurang sesuai ○ Sesuai ○ Sangat sesuai
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	○ Tidak kompeten ○ Kurang kompeten ○ Kompeten ○ Sangat kompeten
7.	Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	○ Tidak sopan dan ramah ○ Kurang sopan dan ramah ○ Sopan dan ramah ○ Sangat sopan dan ramah
8.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	○ Tidak ada ○ Ada tetapi tidak berfungsi ○ Berfungsi kurang maksimal ○ Dikelola dengan baik
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	○ Buruk ○ Cukup ○ Baik ○ Sangat baik

2.2 Pengolahan Data IKM

2.2.1 Pengolahan Data IKM Periode I

Nilai masing-masing unsur pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Periode I (1 Januari s/d 31 Maret) Tahun 2024 melalui aplikasi ***sukma e-jatim*** adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah/UPP	Responden	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Mutu Pelayanan	Kinerja	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana TindakLanjut
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U 9				
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	63	88,75	86,51	86,9	84,92	96,83	86,9	90,08	88,1	97,22	88,1	A	Sangat Baik	Waktu Penyelesaian	Melakukan evaluasi terhadap durasi waktu pelayanan pada setiap unsur/jenis layanan

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

2.2.2. Pengolahan Data IKM Periode II

Nilai masing-masing unsur pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Periode II (1 April s/d 30 Juni) Tahun 2024 melalui aplikasi ***sukma e-jatim*** adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah/UPP	Responden	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Mutu Pelayanan	Kinerja	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana TindakLanjut
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U 9				
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	66	83,75	81,06	80,3	78,79	93,56	81,06	82,58	83,71	94,32	82,95	B	Baik	Waktu Pelayanan	Melakukan evaluasi terhadap durasi waktu pelayanan pada setiap unsur/jenis layanan, baik dari SOP-nya maupun SDM petugas layanan dimaksud.

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

2.2.3. Pengolahan Data IKM Periode III

Nilai masing-masing unsur pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk Periode III (1 Juli s/d 30 September) Tahun 2024 melalui aplikasi ***sukma e-jatim*** adalah sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah/UPP	Responden	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Mutu Pelayanan	Kinerja	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana TindakLanjut
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U 9				
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	50	87,25	84,5	84	86	93	83	86	89,5	87	88	B	Baik	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Mengkaji dan mengevaluasi kembali output dari layanan yang telah diberikan dengan jenis layanan

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

2.3 IKM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Pengumpulan data Survei kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 menggunakan aplikasi ***sukma e-jatim***. Hasil pengolahan data dapat dilihat secara *real time* oleh admin masing-masing pemberi layanan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dalam pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Skala yang digunakan adalah skala nilai (*rating score*). Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 9 (sembilan) unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dan dihitung menggunakan rumus berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 :

Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024

NO	INSTANSI	PERIODE (WAKTU PELAKSANAAN)	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	Periode I (1 Januari s/d 31 Maret 2024)	63	88,75	86,51	86,9	84,92	96,83	86,9	90,08	88,1	97,22	88,1	A	Sangat Baik
		Periode II (1 April s/d 30 Juni 2024)	66	83,75	81,06	80,3	78,79	93,56	81,06	82,58	83,71	94,32	82,95	B	Baik
		Periode III (1 Juli s/d 30 September 2024)	50	87,25	84,5	84	86	93	83	86	89,5	87	88	B	Baik
TOTAL			**179**	**86,5**	**83,94**	**83,66**	**82,96**	**94,55**	**83,66**	**86,17**	**86,87**	**96,09**	**86,17**	**B**	**Baik**

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Rencana Tindak Lanjut Hasil IKM Tahun 2024

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Waktu Penyelesaian	1. Mematuhi Standar Operasi Prosedur yang berisi alur kerja dan waktu penyelesaian pelayanan; 2. Melakukan monitoring atas setiap produk layanan agar ter-delivery sesuai jadwal dan diketahui para stakeholders 3. Mengoptimalkan jumlah personil yang bertanggung jawab atas setiap layanan		✓	✓	✓	1. Kabid Aplikasi Informatika dan Persandian 2. Kabid Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Melakukan evaluasi output dari layanan yang telah diberikan dengan jenis layanan		✓			Kabid Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik
3	Persyaratan	Meningkatkan publikasi standar pelayanan melalui media online dan offline	✓			✓	Kabid Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik

2.4 Deskripsi Hasil Analisis

2.4.1 Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dihimpun menggunakan *scanning barcode* pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui aplikasi *Sukma e*-Jatim kemudian diolah *by sistem* dengan menampilkan nilai IKM

secara *real time*. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2024 dihimpun dari data responden sebanyak 179 responden dengan periode pengambilan data Periode I (1 Januari s.d. 31 Maret 2024), Periode II (1 April s.d. 30 Juni 2024) dan Periode III (1 Juli s.d. 30 September 2024).

2.4.2 Perbandingan Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Jika melihat kecenderungan layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, *trend* tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat melalui tabel berikut :

NO.	DATA	TAHUN		
		2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	80,5	88,75	86,5

Tabel Perbandingan Data IKM
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi sedikit penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

2.4.3 Kendala Penyelenggaraan SKM Tahun 2024

1. Kurangnya kepedulian dan kerjasama dalam penyebaran informasi / sosialisasi SKM dari masing-masing unit layanan kepada pengguna layanan; dan
2. Admin pengelola SKM juga merupakan admin/pengelola aplikasi layanan publik yang lain, sehingga perlu adanya pembagian tugas dengan personil lain untuk kedepannya.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 dilaksanakan menggunakan aplikasi ***sukma e-Jatim*** dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengumpulan data dilaksanakan pada 3 periode yakni Periode I (1 Januari s.d. 31 Maret 2024), Periode II (1 April s.d. 30 Juni 2024) dan Periode III (1 Juli s.d. 30 September 2024).Responden yang melakukan pengisian kuisioner *online* melalui aplikasi ***sukma e-jatim*** sejumlah 179 responden dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 yakni 86,5

Berdasarkan hasil analisis Tim SKM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, masih terdapat beberapa catatan dan kendala pada saat pelaksaan Survei Kepuasan Masyarakat, sehingga perlu perbaikan-perbaikan untuk optimalisasi pelaksanaan Survei KepuasanMasyarakat selanjutnya.

3.2 Saran / Rekomendasi

1 Peningkatan ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang sudah ditentukan;

2 Meningkatkan publikasi Standar Pelayanan baik secara offline maupun online.

Lampiran I
SK TIM SKM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos. 64412
Tlp./Fax (0358) 3550320 *Email : diskominfo@nganjukkab.go.id*
N G A N J U K

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188 / 35 / K / 411.312 / 2024

TENTANG

TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara, maka perlu menyusun Tim SKM Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. PeraturanPemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan survei kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 19 Februari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ 35 /K/411.312/2024
Tentang : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

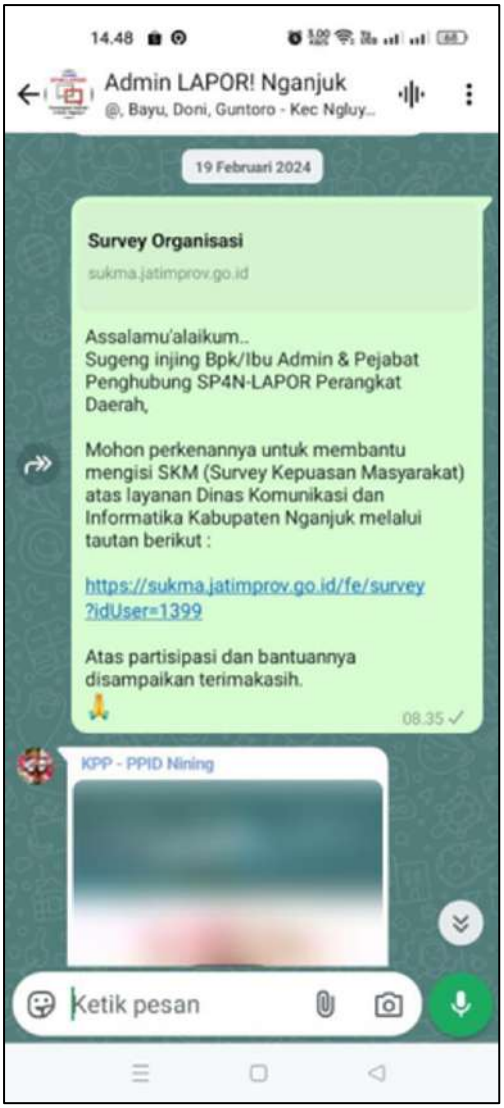
SUSUNAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Slamet Basuki, A.P. NIP. 19750311 199311 1 001	Pengarah	Kepala Dinas
2.	Sujono, S.Kom NIP. 19761128 200604 1 013	Ketua	Sekretaris
3.	Bangun Hudi Sujatmoko, SE NIP. 19720708 200312 1 007	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	1. Arif Wahyudi Wicaksana, S.Kom NIP. 19830620 201504 1 001	Anggota	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
	2. Imaning Dyah Larasati, S.Kom NIP. 19971123 202203 2 001	Anggota	Pranata Komputer

a.n. BUPATI NGANJUK,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

SLAMET BASUKI, A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199311 1 001

Lampiran II
Dokumentasi Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat

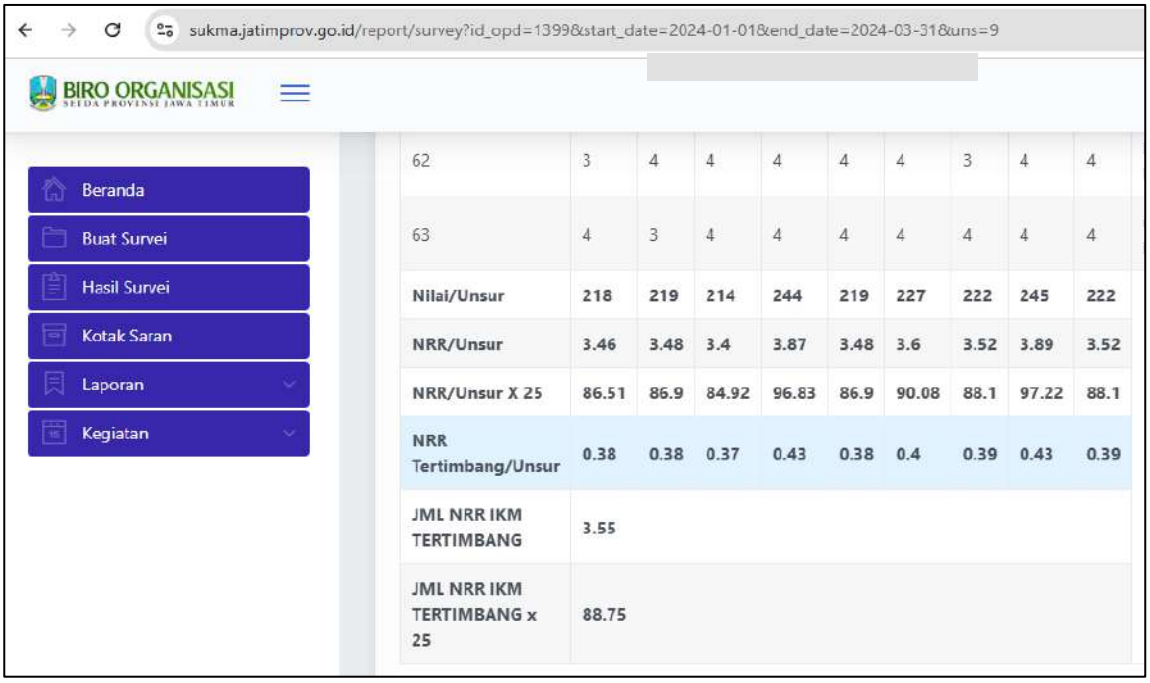


Permohonan partisipasi mengisi SKM Diskominfo melalui WA Group



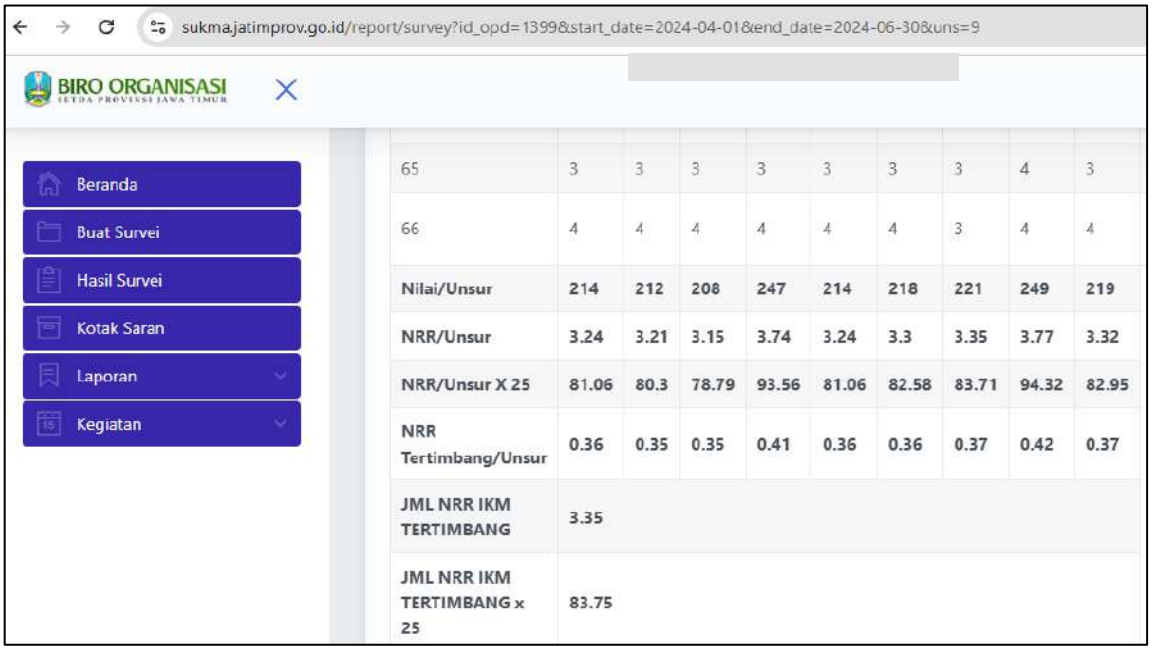
Permohonan partisipasi mengisi SKM Diskominfo dari Narasumber Kegiatan yang akan diberitakan di PING (Portal Informasi Nganjuk)

Lampiran III
Data Survei Periode I, II dan III Tahun 2024



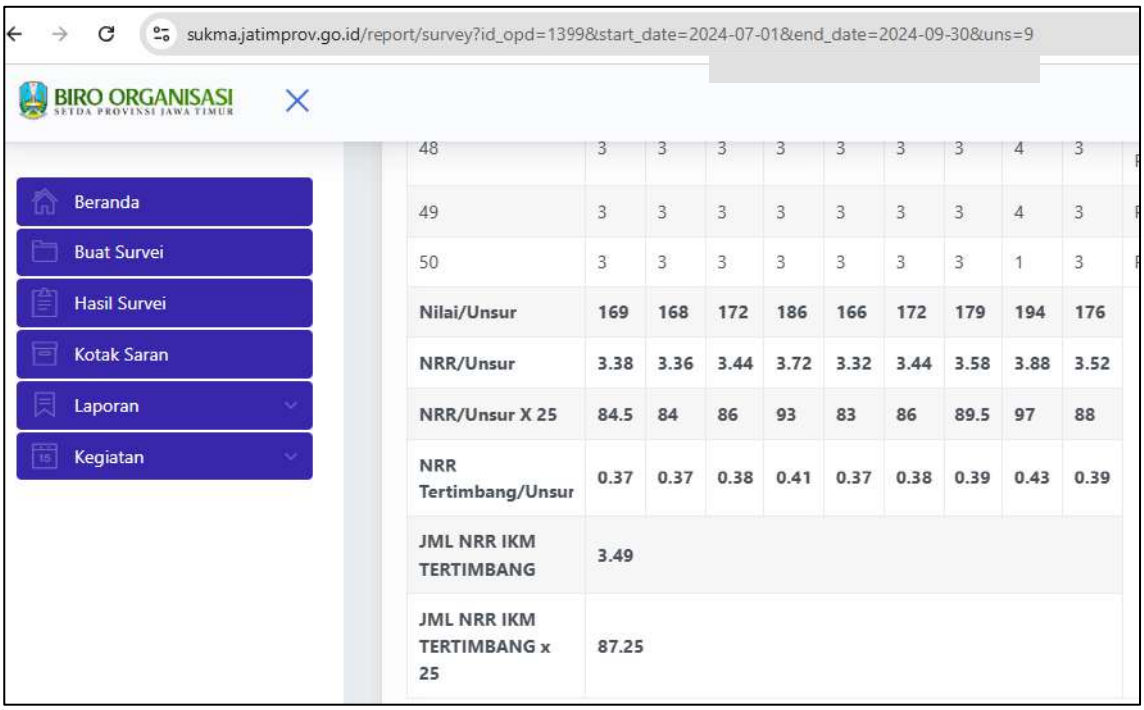
62	3	4	4	4	4	4	3	4	4
63	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Nilai/Unsur	**218**	**219**	**214**	**244**	**219**	**227**	**222**	**245**	**222**
NRR/Unsur	**3.46**	**3.48**	**3.4**	**3.87**	**3.48**	**3.6**	**3.52**	**3.89**	**3.52**
NRR/Unsur X 25	**86.51**	**86.9**	**84.92**	**96.83**	**86.9**	**90.08**	**88.1**	**97.22**	**88.1**
NRR Tertimbang/Unsur	**0.38**	**0.38**	**0.37**	**0.43**	**0.38**	**0.4**	**0.39**	**0.43**	**0.39**
JML NRR IKM TERTIMBANG	**3.55**								
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	**88.75**								

Data Survey Periode I (1 Januari s/d 31 Maret) Tahun 2024



65	3	3	3	3	3	3	3	4	3
66	4	4	4	4	4	4	3	4	4
Nilai/Unsur	**214**	**212**	**208**	**247**	**214**	**218**	**221**	**249**	**219**
NRR/Unsur	**3.24**	**3.21**	**3.15**	**3.74**	**3.24**	**3.3**	**3.35**	**3.77**	**3.32**
NRR/Unsur X 25	**81.06**	**80.3**	**78.79**	**93.56**	**81.06**	**82.58**	**83.71**	**94.32**	**82.95**
NRR Tertimbang/Unsur	**0.36**	**0.35**	**0.35**	**0.41**	**0.36**	**0.36**	**0.37**	**0.42**	**0.37**
JML NRR IKM TERTIMBANG	**3.35**								
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	**83.75**								

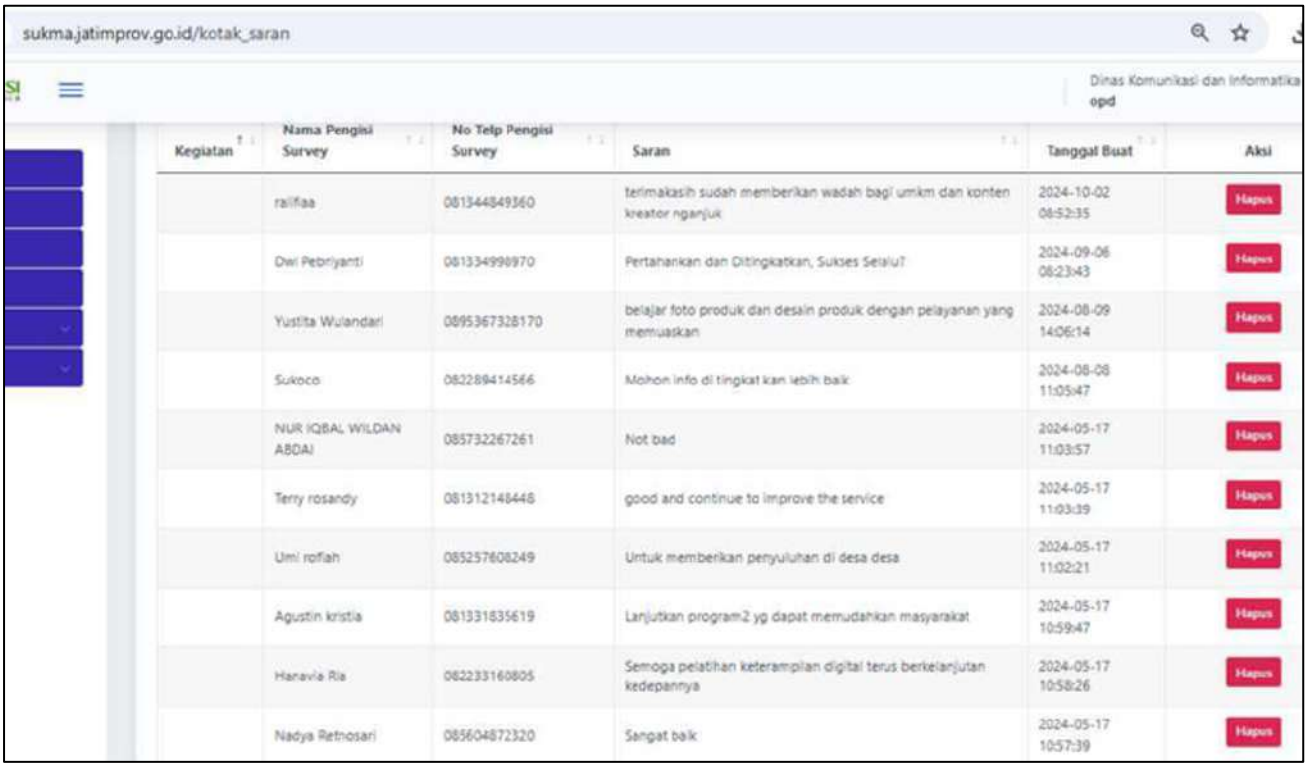
Data Survey Periode II (1 April s/d 30 Juni) Tahun 2024



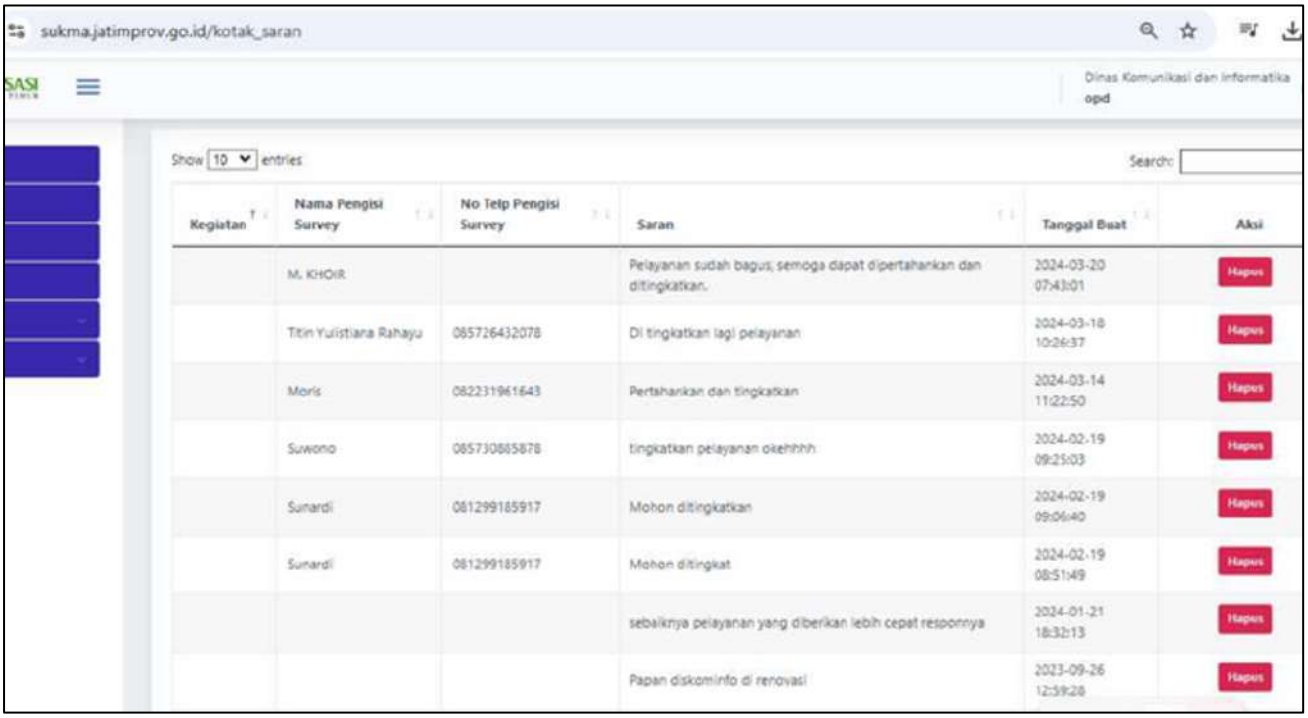
48	3	3	3	3	3	3	3	4	3
49	3	3	3	3	3	3	3	4	3
50	3	3	3	3	3	3	3	1	3
Nilai/Unsur	**169**	**168**	**172**	**186**	**166**	**172**	**179**	**194**	**176**
NRR/Unsur	**3.38**	**3.36**	**3.44**	**3.72**	**3.32**	**3.44**	**3.58**	**3.88**	**3.52**
NRR/Unsur X 25	**84.5**	**84**	**86**	**93**	**83**	**86**	**89.5**	**97**	**88**
NRR Tertimbang/Unsur	**0.37**	**0.37**	**0.38**	**0.41**	**0.37**	**0.38**	**0.39**	**0.43**	**0.39**
JML NRR IKM TERTIMBANG	**3.49**								
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	**87.25**								

Data Survey Periode III (1 Juli s/d 30 September) Tahun 2024

Lampiran IV
Data Kotak Saran



Kegiatan	Nama Pengisi Survey	No Telp Pengisi Survey	Saran	Tanggal Buat	Aksi
	rallfaa	081344849360	terimakasih sudah memberikan wadah bagi umkm dan konten kreator nganjuk	2024-10-02 08:52:35	Hapus
	Dwi Pebriyanti	081334990970	Pertahankan dan Ditingkatkan, Sukses Selalu!	2024-09-06 08:23:43	Hapus
	Yustita Wulandari	0895367328170	belajar foto produk dan desain produk dengan pelayanan yang memuaskan	2024-08-09 14:06:14	Hapus
	Sukoco	08228941456 6	Mohon info di tingkat kan lebih baik	2024-08-08 11:05:47	Hapus
	NUR IQBAL WILDAN ABDAI	085732267261	Not bad	2024-05-17 11:03:57	Hapus
	Terry rosandy	081312148448	good and continue to improve the service	2024-05-17 11:03:39	Hapus
	Umi rofiah	085257608249	Untuk memberikan penyuluhan di desa desa	2024-05-17 11:02:21	Hapus
	Agustin kristia	081331835619	Lanjutkan program2 yg dapat memudahkan masyarakat	2024-05-17 10:59:47	Hapus
	Hanavia Ria	082233160805	Semoga pelatihan keterampilan digital terus berkelanjutan kedepannya	2024-05-17 10:58:26	Hapus
	Nadya Retnosari	085604872320	Sangat baik	2024-05-17 10:57:39	Hapus



Kegiatan	Nama Pengisi Survey	No Telp Pengisi Survey	Saran	Tanggal Buat	Aksi
	M. KHOIR		Pelayanan sudah bagus, semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan.	2024-03-20 07:43:01	Hapus
	Titin Yulistiana Rahayu	085726432078	Di tingkatkan lagi pelayanan	2024-03-18 10:26:37	Hapus
	Moris	082231961643	Pertahankan dan tingkatkan	2024-03-14 11:22:50	Hapus
	Suwono	085730865878	tingkatkan pelayanan okehhhh	2024-02-19 09:25:03	Hapus
	Sunardi	081299185917	Mohon ditingkatkan	2024-02-19 09:06:40	Hapus
	Sunardi	081299185917	Mohon ditingkat	2024-02-19 08:51:49	Hapus
			sebaiknya pelayanan yang diberikan lebih cepat responnya	2024-01-21 18:32:13	Hapus
			Papan diskominfo di renovasi	2023-09-26 12:59:28	Hapus

Lampiran V
Publikasi IKM Tahun 2024



Publikasi IKM
Periode I Th. 2024



Publikasi IKM
Periode II Th. 2024



Publikasi IKM
Periode III Th. 2024

Lampiran VI
Matrik Realisasi Tindak Lanjut SKM Tahun 2023

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun pada tahun 2023, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO	RENCANA TINDAK LANJUT	APAKAH RTL TELAH DITINDAKLANJUTI (SUDAH/BELUM)	DESKRIPSI TINDAK LANJUT (MOHON DIJABARKAN)	DOKUMENTASI KEGIATAN	TANTANGAN/ HAMBATAN
1	Menyusun Standar Pelayanan Publik atau SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk setiap jenis layanan, agar tahapan dalam penyelesaian pelayanan dapat dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	Sudah	Setiap jenis layanan dibuatkan Standar Pelayanan Publik, yang membuat antara lain persyaratan, mekanisme, waktu, biaya, produk layanan dan penanganan pengaduan.	https://drive.google.com/file/d/1uDpWsjBkkWxreU5iRFVAjr0HXM8we14o/view	-
2	Meningkatkan publikasi jenis-jenis layanan beserta Standar Pelayanan Publik-nya, sehingga calon pengguna layanan mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan permohonan atas jenis layanan dimaksud	Sudah	Diseminasi informasi jenis layanan beserta Standar Pelayanan Publik melalui website dan media sosial, karena saat ini media online tersebut dirasa cukup efektif dan efisien serta sering digunakan oleh masyarakat.	1. Publikasi melalui Informasi Berkala website PPID Diskominfo : https://ppid.nganjukkab.go.id/storage/informasi-berkala/June2024/7HKJ1fk1XG17qC10Q11c.pdf 2. Publikasi melalui website Diskominfo : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/ 	-

NO	RENCANA TINDAK LANJUT	APAKAH RTL TELAH DITINDAKLANJUTI (SUDAH/BELUM)	DESKRIPSI TINDAK LANJUT (MOHON DIJABARKAN)	DOKUMENTASI KEGIATAN	TANTANGAN/ HAMBATAN
				3. Publikasi melalui media sosial Instagram Diskominfo : https://www.instagram.com/p/CwFmYxrJHpx/?igsh=MXIxMzV6aGg4ZDRhNQ%3D%3D 4. Publikasi melalui media sosial Facebook Diskominfo : https://www.facebook.com/share/p/1B3ctmwV91/	
3	Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian antara standar dan implementasi diperbaiki dalam jangka waktu tertentu	Sudah	Melaksanakan FGD Penyusunan SOP bagi SDM pada tiap unit layanan yang ada di Diskominfo.		-

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut x 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain:

NO	RTL	STRATEGI PENYELESAIAN	TARGET WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STAKEHOLDER TERKAIT
1	Monitoring dan evaluasi secara rutin/bulanan	Pembentukan tim monev	Setiap awal bulan berikutnya	1. Kabid Aplikasi Informatika dan Persandian 2. Kabid Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengendali teknis dan Ketua Tim
2	Sosialisasi lebih masif terkait produk dan layanan	Optimalisasi kanal media sosial & laman website	Setiap Tribulan	Kabid Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Pengguna Layanan

Demikian, disampaikan terima kasih.

Nganjuk, 16 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk
Sekretaris,

SUJONO, S.Kom
Pembina / IV-a
NIP. 19761128 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321196 & 321746 Faks. (0358) 321196
Email: inspektoratnganjuk2@gmail.com

BERITA ACARA

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN *INFORMATIKA*
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Kami :

Nama	: Drs. Mokhamad Yasin, M.Si
Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP	: 19661005 198703 1 010
Jabatan	: Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk

Sebagai "PIHAK KESATU" selaku Tim Evaluasi SAKIP, dan

Nama	: Slamet Basuki, A.P
Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Muda
NIP	: 19750311 199311 1 001
Jabatan	: Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Sebagai "PIHAK KEDUA" selaku Tim SAKIP OPD

Telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil Penilaian dan Evaluasi SAKIP Tahun 2023, serta diperoleh kesepakatan bahwa PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti catatan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

PIHAK KESATU

Drs. Mokhamad Yasin, M.Si
NIP. 19661005 198703 1 010

PIHAK KEDUA

Slamet Basuki, A.P
NIP. 19750311 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321196 & 321746 Faks. (0358) 321196
Email inspektoratnganjuk2@gmail.com

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	**Perencanaan Kinerja**	**30.00**	**24.00**
2	**Pengukuran Kinerja**	**30.00**	**23.10**
3	**Pelaporan Kinerja**	**15.00**	**13.50**
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25.00**	**19.50**
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**80.10**
			A

No	Catatan
1	Perencanaan Kinerja
	Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh catatan sebagai berikut :
a	Pedoman teknis berupa SOP perencanaan kinerja yaitu SOP Penyusunan Renja dan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja belum di buat.
b.	Upload dokumen perencanaan kinerja belum tepat waktu dengan dibuktikan screen shot /tangkapan layar data perencanaan kinerja pada aplikasi esr Menpan.
c.	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dalam 1 periode Perencanaan Strategis bahwa : 1) Terdapat perbedaan antara yang tertuang dalam Renstra Perubahan BAB VII Tahun 2018-2023 dengan IKU Tahun 2023.(IKU di Renstra tidak tercafer). 2) IKU sudah dilegalformalkan.
2	Pengukuran kinerja
	Kualitas pengukuran kinerja belum memadai : Pengukuran kinerja belum memadai dan dilakukan secara berkala yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi Tribulanan (Tribulan II, III dan IV) internal OPD yang memuat pengukuran capaian strategis, capaian perjanjian kinerja, capaian IKU, Capaian Rencana Aksi, Capaian Kinerja Individu, Capaian Program kegiatan sampai sub kegiatan.
3	Pelaporan Kinerja

Dipindai dengan CamScanner

a.	Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut : 1) Telah terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja. 2) Dokumen Laporan Kinerja memenuhi Standar. 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. 4) Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja direviu secara berjenjang
4	Evaluasi Kinerja
a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, antara lain telah mengikuti pelatihan/bimtek tentang SAKIP, dan jumlah tim penerapan SAKIP baru sebagian yang telah mengikuti.
b.	Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal setiap tribulan belum di tindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas / Nota Dinas untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dapat memberikan dampak yang efektif terhadap capaian kinerja selanjutnya.

PIHAK KESATU

Drs. Mokhammad Yasin, M.Si
NIP. 19661085 198703 1 010

PIHAK KEDUA

Slamet Basuki, A.P
NIP. 19750311 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

DAFTAR DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA DOKUMEN	JUMLAH
1	Rencana Strategis (Renstra)	1
2	Rencana Kerja (Renja)	1
3	Rencana Anggaran Kas (RAK)	1
4	Proses Bisnis (Probis)	1
5	Rencana Aksi	1
6	Pohon Kinerja	1
7	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	1
8	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1
9	Laporan Evaluasi Renja setiap Tribulan	4
10	Laporan Ikhtisar Kinerja	1
11	Dokumen RKA - SKPD (Jumlah Sub Kegiatan)	35
12	Dokumen Perubahan RKA - SKPD (Jumlah Sub Kegiatan yang Mengalami Perubahan	13
JUMLAH DOKUMEN		**61**

Mengetahui,
Perencana Ahli Muda

EKO SUBAGYO, S.E.,M.Si
NIP. 197505232005011003

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

DAFTAR DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

NO.	KETERANGAN	NO. SP2D	TANGGAL PENGAJUAN
1	GU 1	35.18/04.0/000004/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024	01/02/2024
2	GU 2	35.18/04.0/000005/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024	05/02/2024
3	GU 3	35.18/04.0/000007/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024	13/02/2024
4	GU 4	35.18/04.0/000008/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024	27/02/2024
5	GU 5	35.18/04.0/000010/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	01/03/2024
6	GU 6	35.18/04.0/000011/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	04/03/2024
7	GU 7	35.18/04.0/000015/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	18/03/2024
8	GU 8	35.18/04.0/000017/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	20/03/2024
9	GU 9	35.18/04.0/000018/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	26/03/2024
10	GU 10	35.18/04.0/000022/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024	28/03/2024
11	GU 11	35.18/04.0/000025/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	03/04/2024
12	GU 12	35.18/04.0/000026/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	05/04/2024
13	GU 13	35.18/04.0/000029/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024	25/04/2024
14	GU 14	35.18/04.0/000035/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	03/05/2024
15	GU 15	35.18/04.0/000036/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	06/05/2024
16	GU 16	35.18/04.0/000039/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	14/05/2024
17	GU 17	35.18/04.0/000040/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	20/05/2024
18	GU 18	35.18/04.0/000043/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024	30/05/2024
19	GU 19	35.18/04.0/000045/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	05/06/2024
20	GU 20	35.18/04.0/000046/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	07/06/2024
21	GU 21	35.18/04.0/000052/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	14/06/2024
22	GU 22	35.18/04.0/000054/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024	21/06/2024
23	GU 23	35.18/04.0/000056/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	01/07/2024
24	GU 24	35.18/04.0/000059/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	04/07/2024
25	GU 25	35.18/04.0/000060/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	09/07/2024
26	GU 26	35.18/04.0/000061/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	16/07/2024
27	GU 27	35.18/04.0/000066/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	22/07/2024
28	GU 28	35.18/04.0/000068/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	23/07/2024
29	GU 29	35.18/04.0/000069/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024	26/07/2024
30	GU 30	35.18/04.0/000073/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/8/2024	06/08/2024
31	GU 31	35.18/04.0/000077/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/8/2024	14/08/2024
32	GU 32	35.18/04.0/000078/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/8/2024	20/08/2024
33	GU 33	35.18/04.0/000083/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/8/2024	29/08/2024
34	GU 34	35.18/04.0/000091/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024	11/09/2024
35	GU 35	35.18/04.0/000093/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024	13/09/2024
36	GU 36	35.18/04.0/000094/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024	23/09/2024
37	GU 37	35.18/04.0/000098/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024	30/09/2024
38	GU 38	35.18/04.0/000101/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	04/10/2024
39	GU 39	35.18/04.0/000105/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	14/10/2024
40	GU 40	35.18/04.0/000108/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	16/10/2024
41	GU 41	35.18/04.0/000113/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	18/10/2024
42	GU 42	35.18/04.0/000114/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	22/10/2024
43	GU 43	35.18/04.0/000118/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/10/2024	29/10/2024

NO.	KETERANGAN	NO. SP2D	TANGGAL PENGAJUAN
44	GU 44	35.18/04.0/000121/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/10/2024	31/10/2024
45	GU 45	35.18/04.0/000122/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	04/11/2024
46	GU 46	35.18/04.0/000123/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	08/11/2024
47	GU 47	35.18/04.0/000125/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	15/11/2024
48	GU 48	35.18/04.0/000127/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	18/11/2024
49	GU 49	35.18/04.0/000128/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	19/11/2024
50	GU 50	35.18/04.0/000129/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	20/11/2024
51	GU 51	35.18/04.0/000135/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	22/11/2024
52	GU 52	35.18/04.0/000136/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	25/11/2024
53	GU 53	35.18/04.0/000137/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	28/11/2024
54	GU 54	35.18/04.0/000140/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	02/12/2024
55	GU 55	35.18/04.0/000141/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	04/12/2024
56	GU 56	35.18/04.0/000142/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	05/12/2024
57	GU 57	35.18/04.0/000144/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	06/12/2024
58	GU 58	35.18/04.0/000144/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	09/12/2024
59	GU 59	35.18/04.0/000148/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	11/12/2024
60	GU 60	35.18/04.0/000150/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	12/12/2024
61	GU 61	35.18/04.0/000151/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	13/12/2024
62	LS GOODIE BAG	35.18/04.0/000095/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024	24/09/2024
63	LS CETAK BANNER	35.18/04.0/000097/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024	30/09/2024
64	LS WIRELESS ACCESS POINT	35.18/04.0/000102/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	04/10/2024
65	LS CCTV	35.18/04.0/000104/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	07/10/2024
66	LS VLOGER	35.18/04.0/000106/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	15/10/2024
67	LS SEWA HOTEL	35.18/04.0/000107/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	16/10/2024
68	LS MAMIN WORKSHOP	35.18/04.0/000112/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	18/10/2024
69	LS FORTINET	35.18/04.0/000110/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024	18/10/2024
70	LS SEWA SOFTWARE	35.18/04.0/000131/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	21/11/2024
71	LS BELANJA PENGERAS SUARA	35.18/04.0/000133/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	21/11/2024
72	LS PEMBELIAN CARD GPU	35.18/04.0/000132/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	21/11/2024
73	LS PEMELIHARAAN VIDEOTRON	35.18/04.0/000134/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024	22/11/2024
74	LS PEMBELIAN MIXER	35.18/04.0/000149/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	12/12/2024
75	LS PEMBAYARAN BELANJA MODAL PERALATAN JARINGAN	35.18/04.0/000154/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	18/12/2024
76	LS PEMBELIAN AMPLIFER	35.18/04.0/000153/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024	18/12/2024

Mengetahui,
Perencana Ahli Muda

EKO SUBAGYO, S.E.,M.Si
NIP. 197505232005011003

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

BUKTI DUKUNG KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Sukarji	Pramu Kebersihan	Pengusulan Syarat Pensiun
2	Sujono, S.Kom	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Sekretaris Dinas Kominfo	Pengusulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tahun 2024
3	Eko Subagyo, SE, M.Si	Perencana Ahli Muda	
4	Bangun Hudi Sujatmoko, SE	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
5	Fancy Hermawan, S.Kom	Pranata Komputer Muda	
6	Sri Anida Kusumawati Dwi Andari, S.Kom	Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik	
7	Sujono, S.Kom	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Sekretaris Dinas Kominfo	Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Periode Januari 2025
8	Hari Purwanto, ST	Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
9	Eko Subagyo, SE, M.Si	Perencana Ahli Muda	
10	Sri Anida Kusumawati Dwi Andari, S.Kom	Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik	
11	Hanis Ary Wibisono, SE	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	
12	Sukarji	Pramu Kebersihan	
13	Sri Anida Kusumawati Dwi Andari, S.Kom	Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik	Pengusulan Kenaikan Pangkat
14	Hari Slamet Santoso, S.Sos	Analis Sistem Informasi	Desk Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pelaksana
15	Budi Prayitno	Pengadministrasi Persuratan	
16	Nurul Rismasari , S.Stat	Analis Statistik	
17	Arfin Khoirul Isnawan , A.Md.	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	
18	Gunardi	Pengadministrasi Barang Milik Negara	
19	Sukarji	Pramu Kebersihan	
20	Septo Bayu Agung	Staff	Desk Daftar Nama - nama tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN
21	M. Subur	Staff	
22	Yopic Johnanta	Staff	
23	Jayadi	Staff	
24	Whyu Dwi Cahyo	Staff	
25	Titik Sunarsih	Staff	

Mengetahui,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bangun Hudi Sujatmoko, SE
Penata Tk.I/III-d
NIP. 19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN JANUARI
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Januari 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Februari 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN FEBRUARI
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Februari 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

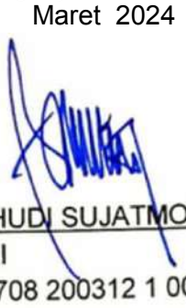
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Maret 2024

Pelapor



BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN MARET
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Maret 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : April 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN APRIL

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan April 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Mei 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN MEI
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Mei 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Juni 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN JUNI
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Juni 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Juli 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN JULI
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Juli 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
13. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Agustus 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN AGUSTUS
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Agustus 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : September 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN SEPTEMBER
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan September 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Oktober 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN OKTOBER
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Oktober 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : November 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN NOVEMBER
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan November 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Desember 2024

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM YANG DILAKSANAKAN
BULAN DESEMBER
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Agar tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk
2. Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
2. Tersedianya Kebutuhan penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Nganjuk

E. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di lakukan di bulan Januari 2024.

F. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatusahaan Arsip Dinas pada SKPD

G. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Nganjuk
Tanggal : Januari 2025

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Merk type	Tahun Pembelian	Harga
1	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.03.02.05.018	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.TOOLKIT PEMELIHARAAN	TOOLKIT	2024	1.499.000,00
2	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.03.02.05.018	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.TOOLKIT PEMELIHARAAN	TOOLKIT	2024	1.499.000,00
3	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.03.02.05.018	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR.TOOLKIT PEMELIHARAAN	TOOLKIT/ Makita	2024	1.979.000,00
4	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.01.05.103	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.SPEAKER AKTIF	SPEAKER AKTIF TOA	2024	1.695.000,00
5	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.01.05.103	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.SPEAKER AKTIF	SPEAKER AKTIF TOA	2024	1.695.000,00
6	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.01.05.110	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.SPEAKER	SPEAKER PMA	2024	1.945.000,00
7	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.01.05.103	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT KANTOR LAINNYA.SPEAKER AKTIF	MY RTS LICENSE	2024	7.900.000,00
8	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.04.016	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENDINGIN .AC UNIT	SHARP	2024	5.399.000,00
9	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.04.016	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENDINGIN .AC UNIT	SHARP	2024	5.399.000,00
10	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.04.016	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.ALAT PENDINGIN .AC UNIT	SHARP	2024	5.399.000,00
11	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.06.014	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.MICROPHONE	ASLEY MC FOUR 4 MICROPHONE	2024	3.279.000,00
12	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.06.038	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DISPENSER	DISPENSER	2024	1.339.000,00
13	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.06.038	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.DISPENSER	DISPENSER	2024	1.339.000,00
14	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.06.068	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TANGGA	TANGGA	2024	3.049.000,00
15	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.06.068	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TANGGA	TANGGA	2024	3.049.000,00
16	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.05.02.06.068	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA.TANGGA	TANGGA	2024	1.849.000,00
17	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.01.02.003	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA ELECTRONIC	CAMERA WEBCAM 1080P	2024	1.839.000,00
18	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.01.02.126	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.CAMERA DIGITAL	ZV E 10	2024	16.583.000,00
19	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.01.02.137	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.AUDIO TRANSCODER	WIRELLES VIDEO TRANSMISION	2024	10.977.000,00
20	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.01.02.169	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.POWER MIXER	MIXER AUDIO	2024	3.195.000,00
21	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.01.02.015	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.VIDEO MIXER	MIXER DNR AIRMATE USB 12 FADER	2024	51.021.150,00
22	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.01.02.169	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.POWER MIXER	MIXER AUDIO SMR 8	2024	2.449.500,00
23	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.01.02.169	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.POWER MIXER	MIXER AUDIO SMR 8	2024	2.449.500,00
24	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.02.01.032	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.HANDPHONE	REDMI NOTE 12 PRO	2024	4.145.000,00
25	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.06.02.01.032	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR.ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.HANDPHONE	REDMI NOTE 12 PRO	2024	4.145.000,00

No.	Kode Barang	Jenis Barang/Nama Barang	Merk type	Tahun Pembelian	Harga
26	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.01.02.001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	PC GAMING CORE I 5	2024	12.799.000,00
27	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.01.02.001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	PC GAMING CORE I 5	2024	12.799.000,00
28	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.01.02.001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	PC GAMING CORE I 5	2024	12.799.000,00
29	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.01.02.001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	PC GAMING CORE I 5	2024	12.799.000,00
30	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.01.02.001	ALAT KOMPUTER.P.C UNIT	PC GAMING CORE I 5	2024	12.799.000,00
31	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.01.02.002	ALAT KOMPUTER.LAP TOP	LENOVO LENOVO	2024	13.149.000,00
32	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.01.02.002	ALAT KOMPUTER.LAP TOP	LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3I 14IAH8CORE I5	2024	13.149.000,00
33	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.01.02.002	ALAT KOMPUTER.LAP TOP	LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3I 14IAH8CORE I5	2024	13.149.000,00
34	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.01.012	ALAT KOMPUTER.HARD DISK	HARDISK INTERNAL	2024	1.388.000,00
35	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.01.012	ALAT KOMPUTER.HARD DISK	HARDISK INTERNAL	2024	1.388.000,00
36	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.01.012	ALAT KOMPUTER.HARD DISK	HARDISK INTERNAL	2024	1.388.000,00
37	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.01.012	ALAT KOMPUTER.HARD DISK	HARDISK INTERNAL	2024	1.388.000,00
38	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.01.012	ALAT KOMPUTER.HARD DISK	970 EVO	2024	1.170.000,00
39	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.002	ALAT KOMPUTER.MONITOR	ASUS	2024	2.395.000,00
40	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.002	ALAT KOMPUTER.MONITOR	ASUS	2024	2.395.000,00
41	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.002	ALAT KOMPUTER.MONITOR	ASUS	2024	2.395.000,00
42	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.002	ALAT KOMPUTER.MONITOR	ASUS	2024	2.395.000,00
43	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.002	ALAT KOMPUTER.MONITOR	ASUS	2024	2.395.000,00
44	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.002	ALAT KOMPUTER.MONITOR	ASUS	2024	2.395.000,00
45	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.003	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	CANON PIXMA 3010	2024	4.395.000,00
46	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.003	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	CANON PIXMA 3010	2024	4.395.000,00
47	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.003	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	CANON PIXMA 3010	2024	4.395.000,00
48	12.01.35.18.021601.00000.00 000.2024-1.3.2.10.02.03.003	ALAT KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	CANON PIXMA 3010	2024	4.395.000,00
					287.231.150,00

Mengetahui,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bangun Hudi Sujatmoko, SE
Penata Tk.I/III-d
NIP. 19720708 200312 1 007

DOKUMENTASI







DOKUMENTASI











DOKUMENTASI





DOKUMENTASI









DOKUMENTASI







DOKUMENTASI













DOKUMENTASI















DOKUMENTASI







DOKUMENTASI









DOKUMENTASI









DOKUMENTASI









DOKUMENTASI







PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64419
Telepon (0358) 3550320 Email : diskominfo@nganjukkab.go.id
Website : https://diskominfo.nganjukkab.go.id/

LAPORAN
JUMLAH JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

Salah satu upaya pendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara efektif dan efisien adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelancaran aktifitas. Penyediaan sarana dan prasarana bagi aparatur pemerintah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal hal ini dapat meningkatkan mutu lembaga dan pelayanan terhadap masyarakat secara prima.

B. Landasan Hukum

DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

C. Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat menunjang aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Adapun Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan antara lain :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jasa Surat Menyurat	1	Jasa
2	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jasa
3	Jasa Penyelenggaraan Acara	1	Jasa
4	Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jasa
		4	Jasa

D. Penutup

Demikian Laporan Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pelapor

BANGUN HUDI SUJATMOKO, SE
Penata TK.I
NIP.19720708 200312 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk – Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550320 – email : diskominfo@nganjukkab.go.id

BUKTI DUKUNG JUMLAH BARANG YANG DIPELIHARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mobil Dinas Operasional AG 1139 VP	1	Unit
2	Mobil Dinas Operasional AG 1273 VP	1	Unit
3	Mobil Dinas Operasional AG 8318 VP	1	Unit
4	Mobil Dinas Operasional AG 1181 VP	1	Unit
5	Mobil Dinas Operasional AG 1376 VP	1	Unit
6	Kendaraan Roda 2 AG 6954 VP	1	Unit
7	Kendaraan Roda 2 AG 6955 VP	1	Unit
8	Kendaraan Roda 2 AG 6956 VP	1	Unit
9	Kendaraan Roda 2 AG 6394 VP	1	Unit
10	Alat Pendingin / AC Split	8	Unit
11	Gedung	2	Unit
12	Kursi	10	Unit
13	Genset	1	Unit
14	Personal Komputer/Notebook	5	Unit
15	Printer	7	Unit
Jumlah		42	Unit

Mengetahui,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bangun Hudi Sujatmoko, SE
Penata Tk.I/III-d
NIP. 19720708 200312 1 007












RSAL fm 105.3
Radio Suara Arnjuk Ladang
email: rsalfm@yahoo.com
AG 1273 VP
RADIONE WONG NGANJUK


ATOYOT




FUTURA


AG 1139 VP


AG 1181 VP


















PIXMA
790


PIXMA
790













DOKUMENTASI PEMELIHARAAN











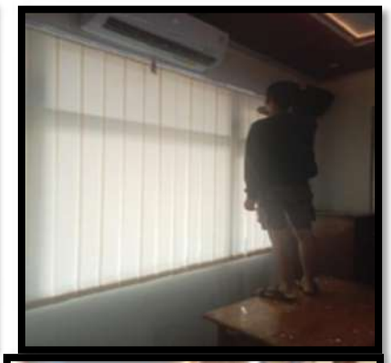
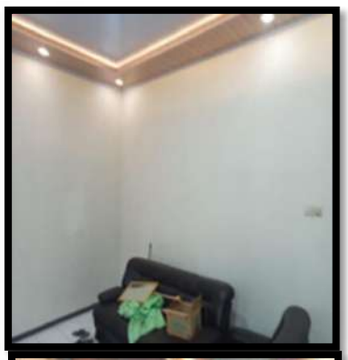













LAMPIRAN VI
Dokumen Pendukung Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

IKK OUTPUT URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEGIATAN (EVENT), PERANGKAT DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH YANG DIMANFAATKAN SECARA DARING DENGAN MEMANFAATKAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO NOMOR 5 TAHUN 2015

Daftar Pelayanan Publik Yang Memanfaatkan Domain dan Sub domain

No	Nama/alamat	Data Informasi Yang Dihasilkan
1	bkpsdm.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
2	simpelmasjar.nganjukkab.go.id	Data rekomendasi penelitian
3	kesbangpol.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
4	bpbd.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
5	bapenda.nganjukkab.go.id	layanan pajak / E-Tax pendapatan daerah
6	bpkad.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
7	bappeda.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
8	sidaberkat.nganjukkab.go.id	Data Kemiskinan dan Stunting
9	sikn.nganjukkab.go.id	Data Kearsipan
10	siarsip.nganjukkab.go.id	Data Kearsipan
11	arpus.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
12	disporabudpar.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
13	dekwita.nganjukkab.go.id	statistik kunjungan wisata
14	sedudo.nganjukkab.go.id	Data kependudukan
15	lasmini.nganjukkab.go.id	Layanan Informasi dan Konsultasi administrasi kependudukan
16	dispendukcapil.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
17	SMILE	Layanan kesehatan
18	pkm-baron.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
19	pkm-bagor.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
20	pkm-berbek.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
21	pkm-gondang.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
22	pkm-jatikalen.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
23	pkm-kertosono.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
24	pkm-lengkong.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
25	pkm-loceret.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
26	pkm-nganjuk.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
27	pkm-ngetos.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
28	pkm-ngluyu.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
29	pkm-ngronggot.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
30	pkm-pace.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
31	pkm-patianrowo.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
32	pkm-prambon.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
33	pkm-rejoso.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
34	pkm-sawahan.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah

35	pkm-sukomoro.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
36	pkm-tanjunganom.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
37	pkm-wilangan.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
38	dinkes.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
39	dkpp.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
40	sikecap.nganjukkab.go.id	sistem informasi ketersediaan cadangan pangan
41	dashboard.nganjukkab.go.id	Layanan informasi data
42	wadulbupati.nganjukkab.go.id	Data pengaduan
43	ppid.nganjukkab.go.id	Data informasi dan dokumentasi
44	www.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
45	diskominfo.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
46	rsalfm.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
47	cctv.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
48	ngantarbis.nganjukkab.go.id	Nganjuk Pintar Berbisnis
49	fantasisite.nganjukkab.go.id	Forum Anak
50	spbe.nganjukkab.go.id	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
51	Aplikasi Nganjuk Smart City	Data layanan dan informasi daerah
52	diskopum.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
53	b3.nganjukkab.go.id	Data limbah
54	dlh.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
55	dlhkp.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
56	sioptimis.nganjukkab.go.id	
57	jalan.nganjukkab.go.id	Data informasi jalan
58	pupr.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
59	simperev.nganjukkab.go.id	
60	damkar.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
61	pmd.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
62	perizinan.nganjukkab.go.id	Layanan perijinan
63	antrianmpp.nganjukkab.go.id	Layanan antrian MPP
64	dpmptsp.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
65	dispendik.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
66	dppkb.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
67	ekir.nganjukkab.go.id	
68	simpkb.nganjukkab.go.id	
69	dishub.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
70	disperindag.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
71	disperta.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
72	siomah.nganjukkab.go.id	Layanan pengembangan perumahan
73	prkpp.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
74	dinsospppa.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
75	loker.nganjukkab.go.id	Layanan ketenagakerjaan
76	disnaker.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
77	inspektorat.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
78	bagor.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
79	baron.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
80	berbek.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
81	gondang.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
82	jatikalen.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah

83	kertosono.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
84	lengkong.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
85	loceret.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
86	nganjuk.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
87	ngetos.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
88	ngluyu.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
89	ngronggot.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
90	pace.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
91	patianrowo.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
92	prambon.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
93	rejoso.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
94	sawahan.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
95	sukomoro.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
96	tanjunganom.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
97	wilangan.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
98	pkk.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
99	rsudkertosono.nganjukkab.go.id	Layanan kesehatan
100	rsud.nganjukkab.go.id	Layanan kesehatan
101	tiger-cepp.nganjukkab.go.id	Data pengaduan
102	polpp.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
103	jdih.nganjukkab.go.id	Data informasi Dokumen Hukum
104	setda.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
105	sepiion.nganjukkab.go.id	Agenda Pj. Bupati
106	jdihdprd.nganjukkab.go.id	Data informasi Dokumen Hukum
107	pmi.nganjukkab.go.id	Layanan informasi daerah
108	sianik.nganjukkab.go.id	Sistem Antrian Elektronik
109	fks.nganjukkab.go.id	
110	ckan.nganjukkab.go.id	
111	nsc.nganjukkab.go.id	
112	geoportal.nganjukkab.go.id	
113	sipertan.nganjukkab.go.id	
114	deskpemilukada.nganjukkab.go.id	
115	etax.nganjukkab.go.id/	Layanan pajak
116	silapbb.nganjukkab.go.id/	

Rumus :

Presentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 =

$$\frac{\begin{array}{c}\textit{Jumlah pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}\\ \textit{yang dimanfaatkan secara daring}\\ \textit{dengan memanfaatkan domain dan sub domain}\\ \textit{Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan}\\ \textit{Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015}\end{array}}{\textit{Jumlah pelayanan publik pada Pemerintah Daerah}} x\ 100\%$$

$= \frac{115}{116} x\ 100\%$

= 99,13%

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

IKK OUTPUT URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERANGKAT DAERAH YANG MENYIMPAN DATA DI PUSAT DATA PEMERINTAH TAHUN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Penyimpanan Data
1	Sekretariat Daerah	√
2	Sekretariat DPRD	√
3	Inspektorat Daerah	√
4	Dinas Arsip dan Perpustakaan	√
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	√
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	√
8	Dinas Kesehatan	√
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	√
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	√
11	Dinas Koperasi dan UM	√
12	Dinas Lingkungan Hidup	√
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√
14	Dinas Pemadam Kebakaran	√
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√
16	Dinas Pendidikan	√
17	Dinas Pengandalian Penduduk dan KB	√
18	Dinas Perhubungan	√
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	√
20	Dinas Pertanian	√
21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	√
22	Dinas Sosial PPPA	√
23	Dinas Tenaga Kerja	√
24	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	√
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√
27	Badan Pendapatan Daerah	√
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√
30	RSD Kertosono	√
31	RSD Nganjuk	√
32	Satuan Polisi Pamong Praja	√
33	Kecamatan Bagor	√
34	Kecamatan Baron	√
35	Kecamatan Berbek	√
36	Kecamatan Gondang	√
37	Kecamatan Jatikalen	√
38	Kecamatan Kertosono	√
39	Kecamatan Lengkong	√
40	Kecamatan Loceret	√
41	Kecamatan Nganjuk	√
42	Kecamatan Ngetos	√

No	Nama Perangkat Daerah	Penyimpanan Data
43	Kecamatan Ngluyu	√
44	Kecamatan Ngronggot	√
45	Kecamatan Pace	√
46	Kecamatan Patianrowo	√
47	Kecamatan Prambon	√
48	Kecamatan Rejoso	√
49	Kecamatan Sawahan	√
50	Kecamatan Sukomoro	√
51	Kecamatan Tanjunganom	√
52	Kecamatan Wilangan	√

Rumus :

Presentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah =

$$\frac{perangkat\ daerah\ yang\ menyimpan\ data\ di\ pusat\ data\ pemerintah}{Jumlah\ perangkat\ daerah}\ x\ 100\%$$

$= \frac{52}{52}\ x\ 100\%$

$= 100\%$

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

IKK OUTCOME URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI
TAHUN 2024

No	Nama/alamat	OPD/Instansi	Terintegrasi
1	bkpsdm.nganjukkab.go.id	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Terintegrasi
2	simpelmasjar.nganjukkab.go.id	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terintegrasi
3	kesbangpol.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
4	bpbd.nganjukkab.go.id	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terintegrasi
5	bapenda.nganjukkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah	Terintegrasi
6	bpkad.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
7	bappeda.nganjukkab.go.id	Badan Perencanaan Daerah	Terintegrasi
8	sidaberkat.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
9	sikn.nganjukkab.go.id	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Belum Terintegrasi
10	siarsip.nganjukkab.go.id		Belum Terintegrasi
11	arpus.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
12	disporabudpar.nganjukkab.go.id	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Terintegrasi
13	dekwita.nganjukkab.go.id		Belum Terintegrasi
14	sedudo.nganjukkab.go.id	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil	Terintegrasi
15	lasmini.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
16	dispendukcapil.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
17	SMILE	Dinas Kesehatan	Belum Terintegrasi
18	pkm-baron.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
19	pkm-bagor.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
20	pkm-berbek.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
21	pkm-gondang.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
22	pkm-jatikalen.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
23	pkm-kertosono.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
24	pkm-lengkong.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
25	pkm-loceret.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
26	pkm-nganjuk.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
27	pkm-ngetos.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
28	pkm-ngluyu.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
29	pkm-ngronggot.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
30	pkm-pace.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
31	pkm-patianrowo.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
32	pkm-prambon.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
33	pkm-rejoso.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
34	pkm-sawahan.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
35	pkm-sukomoro.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
36	pkm-tanjunganom.nganjukkab.go.id		Terintegrasi

No	Nama/alamat	OPD/Instansi	Terintegrasi
37	pkm-wilangan.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
38	dinkes.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
39	dkpp.nganjukkab.go.id	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Terintegrasi
40	sikecap.nganjukkab.go.id	Dinas Pertanian	Belum Terintegrasi
41	dashboard.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
42	wadulbupati.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
43	ppid.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
44	www.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
45	diskominfo.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
46	rsalfm.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
47	cctv.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
48	ngantarbis.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
49	fantasisite.nganjukkab.go.id		Belum Terintegrasi
50	spbe.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
51	Aplikasi Nganjuk Smart City		Terintegrasi
52	diskopum.nganjukkab.go.id	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Terintegrasi
53	b3.nganjukkab.go.id	Dinas Lingkungan Hidup	Belum Terintegrasi
54	dlh.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
55	dlhkp.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
56	sioptimis.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
57	jalan.nganjukkab.go.id	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Belum Terintegrasi
58	pupr.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
59	damkar.nganjukkab.go.id	Dinas Pemadam Kebakaran	Terintegrasi
60	pmd.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
61	perizinan.nganjukkab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terintegrasi
62	antrianmpp.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
63	dpmptsp.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
64	dispendik.nganjukkab.go.id	Dinas Pendidikan	Terintegrasi
65	dppkb.nganjukkab.go.id	Dinas Pengandalian Penduduk dan KB	Terintegrasi
66	ekir.nganjukkab.go.id	Dinas Perhubungan	Terintegrasi
67	simpkb.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
68	dishub.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
69	disperindag.nganjukkab.go.id	Dinas Perdagangan	Terintegrasi
70	disperta.nganjukkab.go.id	Dinas Pertanian	Terintegrasi
71	siomah.nganjukkab.go.id	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terintegrasi
72	prkpp.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
73	dinsospppa.nganjukkab.go.id	Dinas Sosial dan Perlindungan Anak	Terintegrasi
74	loker.nganjukkab.go.id	Dinas Tenaga Kerja	Terintegrasi
75	disnaker.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
76	inspektorat.nganjukkab.go.id	Inspektorat	Terintegrasi
77	bagor.nganjukkab.go.id	Kecamatan Bagor	Terintegrasi
78	baron.nganjukkab.go.id	Kecamatan Baron	Terintegrasi
79	berbek.nganjukkab.go.id	Kecamatan Berbek	Terintegrasi
80	gondang.nganjukkab.go.id	Kecamatan Gondang	Terintegrasi
81	jatikalen.nganjukkab.go.id	Kecamatan Jatikalen	Terintegrasi
82	kertosono.nganjukkab.go.id	Kecamatan Kertosono	Terintegrasi

No	Nama/alamat	OPD/Instansi	Terintegrasi
83	lengkong.nganjukkab.go.id	Kecamatan Lengkong	Terintegrasi
84	loceret.nganjukkab.go.id	Kecamatan Loceret	Terintegrasi
85	nganjuk.nganjukkab.go.id	Kecamatan Nganjuk	Terintegrasi
86	ngetos.nganjukkab.go.id	Kecamatan Ngetos	Terintegrasi
87	ngluyu.nganjukkab.go.id	Kecamatan Ngluyu	Terintegrasi
88	ngronggot.nganjukkab.go.id	Kecamatan Ngronggot	Terintegrasi
89	pace.nganjukkab.go.id	Kecamatan Pace	Terintegrasi
90	patianrowo.nganjukkab.go.id	Kecamatan Patianrowo	Terintegrasi
91	prambon.nganjukkab.go.id	Kecamatan Prambon	Terintegrasi
92	rejoso.nganjukkab.go.id	Kecamatan Rejoso	Terintegrasi
93	sawahan.nganjukkab.go.id	Kecamatan Sawahan	Terintegrasi
94	sukomoro.nganjukkab.go.id	Kecamatan Sukomoro	Terintegrasi
95	tanjunganom.nganjukkab.go.id	Kecamatan Tanjunganom	Terintegrasi
96	wilangan.nganjukkab.go.id	Kecamatan Wilangan	Terintegrasi
97	pkk.nganjukkab.go.id	PKK	Terintegrasi
98	rsudkertosono.nganjukkab.go.id	RSUD Kertosono	Terintegrasi
99	rsud.nganjukkab.go.id	RSUD Nganjuk	Terintegrasi
100	pacs.rsd.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
101	dokter.rsd.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
102	tiger-cepp.nganjukkab.go.id	Satuan Polisi Pamong Praja	Belum Terintegrasi
103	polpp.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
104	jdih.nganjukkab.go.id	Sekretariat Daerah	Terintegrasi
105	setda.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
106	pmi.nganjukkab.go.id	PMI	Terintegrasi
107	sianik.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
108	fks.nganjukkab.go.id	Bappeda	Terintegrasi
109	ckan.nganjukkab.go.id	Diskominfo	Terintegrasi
110	nsc.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
111	geoportal.nganjukkab.go.id		Terintegrasi
112	sipertan.nganjukkab.go.id	Dinas Pertanian	Terintegrasi
113	https://etax.nganjukkab.go.id/	Bapenda	Terintegrasi

Rumus :

Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi =

$$\frac{\textit{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\textit{Jumlah seluruh layanan publik}} x\ 100\%$$

$$= \frac{104}{113} x\ 100\%$$

= 92,85%

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMPERBAHARUI DATANYA SESUAI SIKLUS JENIS DATA (SESUAI KEPUTUSAN DAFTAR DATA PRIORITAS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024) TAHUN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral	Jumlah Data Sektoral yang terupdate	Prosentase Data Terupdate
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	5	5	100%
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7	7	100%
3	Inspektorat Daerah	3	3	100%
4	Dinas Pendidikan	24	24	100%
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	11	11	100%
6	Dinas Kesehatan	33	33	100%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21	21	100%
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	100%
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	10	100%
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	8	100%
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	100%
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	9	100%
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7	7	100%
14	Dinas Tenaga Kerja	4	4	100%
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	100%
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	21	100%
17	Dinas Perhubungan	1	1	100%
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	16	16	100%
19	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	100%
20	Dinas Pertanian	4	4	100%
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	8	100%
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	7	100%
23	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	100%
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	100%
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5	100%
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	2	100%

27	Badan Pendapatan Daerah	2	2	100%
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	6	100%
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	100%
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	7	100%
31	Kecamatan Bagor	3	3	100%
32	Kecamatan Baron	3	3	100%
33	Kecamatan Berbek	3	3	100%
34	Kecamatan Gondang	3	3	100%
35	Kecamatan Jatikalen	3	3	100%
36	Kecamatan Kertosono	3	3	100%
37	Kecamatan Lengkong	3	3	100%
38	Kecamatan Loceret	3	3	100%
39	Kecamatan Nganjuk	3	3	100%
40	Kecamatan Ngetos	3	3	100%
41	Kecamatan Ngluyu	3	3	100%
42	Kecamatan Ngronggot	3	3	100%
43	Kecamatan Pace	3	3	100%
44	Kecamatan Patianrowo	3	3	100%
45	Kecamatan Prambon	3	3	100%
46	Kecamatan Rejoso	3	3	100%
47	Kecamatan Sawahan	3	3	100%
48	Kecamatan Sukomoro	3	3	100%
49	Kecamatan Tanjunganom	3	3	100%
50	Kecamatan Wilangan	3	3	100%
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	4	4	100%
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	5	5	100%
	JUMLAH	**318**	**318**	**100%**

Rumus :

Presentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Keputusan Daftar Data Prioritas Kabupaten Nganjuk Tahun 2024)=

$$\frac{perangkat\ daerah\ yang\ memperbaharui\ datanya\ sesuai\ siklus\ jenis\ data\ (sesuai\ renstra\ kominfo)}{Jumlah\ perangkat\ daerah}\ x\ 100\%$$

$= \frac{52}{52}\ x\ 100\%$

$= 100\%$

Nganjuk, 13 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024, perlu menetapkan hasil kegiatan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 706); dan
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 299 Tahun 2024 tentang Lokus Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 615 (*enam ratus lima belas*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan, dapat menggunakan hasil evaluasi mengikuti nomenklatur instansi sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU.

KETIGA : Instansi Pusat yang mengalami perubahan nomenklatur atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai capaian kinerja tahun 2024 dan acuan untuk perencanaan kinerja tahun 2025.

KEEMPAT : Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dihimbau untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

HASIL EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	3,08	Baik
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4,00	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,46	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	3,92	Sangat Baik
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,98	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4,64	Memuaskan
7	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,63	Sangat Baik
8	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4,33	Memuaskan
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	3,75	Sangat Baik
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4,46	Memuaskan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11	Kementerian Dalam Negeri	4,21	Memuaskan
12	Kementerian Luar Negeri	3,93	Sangat Baik
13	Kementerian Pertahanan	3,88	Sangat Baik
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4,36	Memuaskan
15	Kementerian Keuangan	4,74	Memuaskan
16	Kementerian Pertanian	4,00	Sangat Baik
17	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3,60	Sangat Baik
18	Kementerian Perhubungan	4,60	Memuaskan
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4,02	Sangat Baik
20	Kementerian Kesehatan	3,73	Sangat Baik
21	Kementerian Agama	4,63	Memuaskan
22	Kementerian Ketenagakerjaan	3,42	Baik
23	Kementerian Sosial	3,58	Sangat Baik
24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,99	Sangat Baik
25	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3,99	Sangat Baik
26	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4,75	Memuaskan
27	Kementerian Perdagangan	4,22	Memuaskan
28	Kementerian Perindustrian	3,44	Baik
29	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	4,35	Memuaskan
30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,68	Memuaskan
31	Kementerian Sekretariat Negara	3,95	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4,15	Sangat Baik
33	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	3,54	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
34	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4,10	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Siber dan Sandi Negara	4,06	Sangat Baik
2	Badan Kepegawaian Negara	4,19	Sangat Baik
3	Badan Pusat Statistik	4,53	Memuaskan
4	Arsip Nasional Republik Indonesia	3,88	Sangat Baik
5	Badan Informasi Geospasial	3,88	Sangat Baik
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3,51	Sangat Baik
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	4,31	Memuaskan
8	Perpustakaan Nasional RI	4,12	Sangat Baik
9	Badan Standardisasi Nasional	3,81	Sangat Baik
10	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3,91	Sangat Baik
11	Badan Pengawas Obat dan Makanan	4,53	Memuaskan
12	Lembaga Ketahanan Nasional RI	3,16	Baik
13	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,98	Sangat Baik
14	Badan Narkotika Nasional	3,38	Baik
15	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3,14	Baik
16	Badan Keamanan Laut	3,57	Sangat Baik
17	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	3,63	Sangat Baik
18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3,95	Sangat Baik
19	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	3,09	Baik
20	Badan Pangan Nasional	3,91	Sangat Baik
21	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	3,38	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Intelijen Negara	4,20	Memuaskan
2	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3,47	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Kabinet	2,90	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Kejaksaan Agung	4,13	Sangat Baik
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3,00	Baik
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	4,23	Memuaskan
4	Sekretariat Mahkamah Agung RI	3,52	Sangat Baik
5	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3,81	Sangat Baik
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	3,91	Sangat Baik
7	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2,65	Baik
8	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	2,99	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Instansi Lainnya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4,07	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Televisi Republik Indonesia	3,21	Baik
2	Radio Republik Indonesia	3,37	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Non Struktural (LNS)

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	3,37	Baik
2	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	3,53	Sangat Baik
3	Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3,32	Baik
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	4,36	Memuaskan
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4,66	Memuaskan
6	Sekretariat Jenderal Ombudsman	3,93	Sangat Baik
7	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3,75	Sangat Baik
8	Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2,82	Baik
9	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3,47	Baik
10	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	2,65	Baik
11	Sekretariat Komisi Kejaksaan	1,67	Kurang
12	Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional	2,22	Cukup
13	Dewan Pertimbangan Presiden	2,63	Baik
14	Sekretariat Dewan Pers	2,58	Cukup
15	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	3,39	Baik
16	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi	3,57	Sangat Baik
17	Badan Pengusahaan Sabang	2,42	Cukup
18	Badan Pengusahaan Batam	3,82	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
19	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	3,54	Sangat Baik
20	Lembaga Sensor Film	2,75	Baik
21	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	2,36	Cukup
22	Kantor Staf Presiden	3,93	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Aceh	3,64	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	2,39	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pidie	2,25	Cukup
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1,44	Kurang
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Selatan	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	2,48	Cukup
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	2,29	Cukup
10	Pemerintah Kab. Bireuen	2,32	Cukup
11	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	2,28	Cukup
12	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	2,86	Baik
13	Pemerintah Kab. Gayo Lues	2,69	Baik
14	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,86	Baik
15	Pemerintah Kab. Nagan Raya	2,94	Baik
16	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	2,67	Baik
17	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,66	Baik
18	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	2,61	Baik
19	Pemerintah Kota Sabang	3,02	Baik
20	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,70	Sangat Baik
21	Pemerintah Kota Langsa	1,95	Cukup
22	Pemerintah Kota Lhokseumawe	2,80	Baik
23	Pemerintah Kota Subulussalam	2,48	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3,86	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Deli Serdang	3,57	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Karo	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Langkat	3,66	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	2,38	Cukup
6	Pemerintah Kab. Simalungun	2,37	Cukup
7	Pemerintah Kab. Dairi	2,69	Baik
8	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	3,14	Baik
10	Pemerintah Kab. Asahan	2,86	Baik
11	Pemerintah Kab. Nias	3,72	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Toba	2,95	Baik
13	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	2,89	Baik
14	Pemerintah Kab. Nias Selatan	2,90	Baik
15	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	2,80	Baik
16	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	2,66	Baik
17	Pemerintah Kab. Samosir	2,70	Baik
18	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2,65	Baik
19	Pemerintah Kab. Padang Lawas	2,17	Cukup
20	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	2,26	Cukup
21	Pemerintah Kab. Batubara	2,67	Baik
22	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1,93	Cukup
23	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	2,78	Baik
24	Pemerintah Kab. Nias Barat	1,80	Kurang
25	Pemerintah Kab. Nias Utara	2,41	Cukup
26	Pemerintah Kota Medan	3,67	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3,79	Sangat Baik
28	Pemerintah Kota Binjai	3,12	Baik
29	Pemerintah Kota Pematang Siantar	3,06	Baik
30	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3,24	Baik
31	Pemerintah Kota Sibolga	2,41	Cukup
32	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2,66	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
33	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,33	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Riau	3,75	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kampar	2,96	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkalis	2,79	Baik
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	2,54	Cukup
6	Pemerintah Kab. Pelalawan	2,50	Cukup
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	3,46	Baik
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	3,51	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Siak	3,54	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	3,23	Baik
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	3,08	Baik
12	Pemerintah Kota Pekanbaru	3,85	Sangat Baik
13	Pemerintah Kota Dumai	3,90	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	3,05	Baik
2	Pemerintah Kab. Bintan	3,25	Baik
3	Pemerintah Kab. Karimun	2,33	Cukup
4	Pemerintah Kab. Natuna	3,61	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Lingga	2,60	Baik
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	3,04	Baik
7	Pemerintah Kota Batam	3,77	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Tanjungpinang	3,25	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,85	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Agam	2,56	Cukup
3	Pemerintah Kab. Pasaman	2,67	Baik
4	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2,70	Baik
5	Pemerintah Kab. Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	3,51	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,23	Memuaskan
8	Pemerintah Kab. Tanah Datar	2,81	Baik
9	Pemerintah Kab. Sijunjung	3,00	Baik
10	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2,46	Cukup
11	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3,28	Baik
12	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3,61	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	3,66	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
15	Pemerintah Kota Padang Panjang	3,16	Baik
16	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,41	Baik
17	Pemerintah Kota Solok	3,75	Sangat Baik
18	Pemerintah Kota Padang	3,96	Sangat Baik
19	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,75	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Pariaman	3,44	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3,05	Baik
2	Pemerintah Kab. Batang Hari	3,55	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	2,92	Baik
4	Pemerintah Kab. Bungo	2,71	Baik
5	Pemerintah Kab. Merangin	3,20	Baik
6	Pemerintah Kab. Kerinci	2,18	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sarolangun	3,10	Baik
8	Pemerintah Kab. Tebo	2,62	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
9	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	2,62	Baik
10	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	2,83	Baik
11	Pemerintah Kota Jambi	4,32	Memuaskan
12	Pemerintah Kota Sungai Penuh	3,14	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	3,00	Baik
2	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	3,62	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,62	Baik
4	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,29	Baik
5	Pemerintah Kab. Lahat	2,33	Cukup
6	Pemerintah Kab. Musi Rawas	3,09	Baik
7	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,71	Baik
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2,61	Baik
10	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	2,40	Cukup
11	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	2,94	Baik
12	Pemerintah Kab. Empat Lawang	2,34	Cukup
13	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	2,38	Cukup
14	Pemerintah Kota Palembang	3,51	Sangat Baik
15	Pemerintah Kota Pagar Alam	2,54	Cukup
16	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	2,64	Baik
17	Pemerintah Kota Prabumulih	3,37	Baik
18	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2,66	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	4,11	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bangka	2,80	Baik
3	Pemerintah Kab. Belitung	3,35	Baik
4	Pemerintah Kab. Bangka Barat	3,16	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	4,07	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	3,25	Baik
7	Pemerintah Kab. Belitung Timur	4,16	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	3,81	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bengkulu	3,92	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	3,28	Baik
3	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	2,87	Baik
4	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	3,24	Baik
5	Pemerintah Kab. Kaur	2,42	Cukup
6	Pemerintah Kab. Seluma	2,26	Cukup
7	Pemerintah Kab. Mukomuko	2,07	Cukup
8	Pemerintah Kab. Kepahiang	2,47	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lebong	3,38	Baik
10	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	2,84	Baik
11	Pemerintah Kota Bengkulu	2,63	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Lampung	4,09	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	3,08	Baik
3	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	2,68	Baik
4	Pemerintah Kab. Lampung Utara	3,12	Baik
5	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,85	Baik
7	Pemerintah Kab. Tanggamus	3,44	Baik
8	Pemerintah Kab. Way Kanan	3,52	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Lampung Timur	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pesawaran	3,49	Baik
11	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	2,49	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
12	Pemerintah Kab. Pringsewu	3,05	Baik
13	Pemerintah Kab. Mesuji	3,99	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	2,94	Baik
15	Pemerintah Kota Metro	3,34	Baik
16	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,98	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4,46	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4,73	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bogor	4,10	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sukabumi	3,95	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Cianjur	3,75	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Bekasi	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Karawang	4,40	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Purwakarta	3,94	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Subang	3,38	Baik
9	Pemerintah Kab. Bandung	3,98	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Sumedang	4,51	Memuaskan
11	Pemerintah Kab. Garut	3,89	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	3,76	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Ciamis	3,65	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Cirebon	3,61	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Kuningan	3,57	Sangat Baik
16	Pemerintah Kab. Indramayu	3,93	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Majalengka	2,94	Baik
18	Pemerintah Kab. Bandung Barat	3,78	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Pangandaran	3,56	Sangat Baik
20	Pemerintah Kota Bandung	4,59	Memuaskan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
21	Pemerintah Kota Bogor	4,08	Sangat Baik
22	Pemerintah Kota Sukabumi	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kota Cirebon	4,13	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Bekasi	3,83	Sangat Baik
25	Pemerintah Kota Depok	4,32	Memuaskan
26	Pemerintah Kota Cimahi	4,15	Sangat Baik
27	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,96	Sangat Baik
28	Pemerintah Kota Banjar	3,58	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Banten	3,47	Baik
2	Pemerintah Kab. Serang	3,73	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,45	Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	3,52	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Tangerang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Tangerang	3,85	Sangat Baik
7	Pemerintah Kota Cilegon	2,56	Cukup
8	Pemerintah Kota Serang	2,61	Baik
9	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,48	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di D.I Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,31	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	3,66	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,93	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,57	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	3,05	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemalang	3,04	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,51	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,99	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,28	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	4,09	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,27	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,93	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,72	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,92	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	3,64	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,49	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	4,07	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	4,07	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,89	Sngat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,34	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,45	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,90	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	4,20	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Semarang	3,95	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,64	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,76	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,95	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,69	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	4,30	Memuaskan

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,43	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Gresik	4,32	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	4,16	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Jombang	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	3,67	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	3,92	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Sumenep	3,73	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,92	Baik
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	3,86	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Situbondo	4,21	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Banyuwangi	4,77	Memuaskan
13	Pemerintah Kab. Jember	3,54	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Malang	3,74	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Pasuruan	3,88	Sangat Baik
16	Pemerintah Kab. Probolinggo	3,97	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Lumajang	3,39	Baik
18	Pemerintah Kab. Kediri	4,63	Memuaskan
19	Pemerintah Kab. Tulungagung	3,78	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Nganjuk	3,84	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Trenggalek	4,22	Memuaskan
22	Pemerintah Kab. Blitar	3,77	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Ngawi	3,61	Sangat Baik
24	Pemerintah Kab. Magetan	2,92	Baik
25	Pemerintah Kab. Ponorogo	3,07	Baik
26	Pemerintah Kab. Pacitan	3,50	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
27	Pemerintah Kab. Bojonegoro	4,14	Sangat Baik
28	Pemerintah Kab. Tuban	4,24	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Lamongan	4,18	Sangat Baik
30	Pemerintah Kota Surabaya	4,54	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Mojokerto	4,32	Memuaskan
32	Pemerintah Kota Malang	4,24	Memuaskan
33	Pemerintah Kota Pasuruan	4,07	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Probolinggo	4,04	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Blitar	4,11	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Kediri	3,89	Sangat Baik
37	Pemerintah Kota Madiun	4,57	Memuaskan
38	Pemerintah Kota Batu	3,57	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,58	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,91	Baik
3	Pemerintah Kab. Sanggau	3,29	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	2,30	Cukup
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,73	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,82	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	3,06	Baik
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	3,12	Baik
9	Pemerintah Kab. Landak	2,40	Cukup
10	Pemerintah Kab. Melawi	2,47	Cukup
11	Pemerintah Kab. Sekadau	3,13	Baik
12	Pemerintah Kab. Kubu Raya	3,38	Baik
13	Pemerintah Kab. Kayong Utara	2,68	Baik
14	Pemerintah Kota Pontianak	3,49	Baik
15	Pemerintah Kota Singkawang	3,35	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2,87	Baik
2	Pemerintah Kab. Kapuas	2,63	Baik
3	Pemerintah Kab. Barito Utara	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Barito Selatan	3,20	Baik
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3,22	Baik
6	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,87	Baik
7	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	3,16	Baik
8	Pemerintah Kab. Gunung Mas	2,74	Baik
9	Pemerintah Kab. Lamandau	3,15	Baik
10	Pemerintah Kab. Sukamara	2,75	Baik
11	Pemerintah Kab. Murung Raya	2,63	Baik
12	Pemerintah Kab. Katingan	3,25	Baik
13	Pemerintah Kab. Seruyan	2,50	Cukup
14	Pemerintah Kab. Barito Timur	2,82	Baik
15	Pemerintah Kota Palangka Raya	3,75	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	3,63	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab. Tapin	3,81	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	4,09	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	3,37	Baik
7	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,99	Baik
8	Pemerintah Kab. Tabalong	3,70	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Kotabaru	2,43	Cukup
10	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	2,51	Cukup
11	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	3,30	Baik
12	Pemerintah Kab. Balangan	3,34	Baik
13	Pemerintah Kota Banjarmasin	4,06	Sangat Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
14	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,74	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	3,09	Baik
3	Pemerintah Kab. Paser	3,27	Baik
4	Pemerintah Kab. Berau	2,28	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,62	Baik
6	Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,02	Baik
7	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,87	Baik
8	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	2,25	Cukup
9	Pemerintah Kota Samarinda	3,85	Sangat Baik
10	Pemerintah Kota Balikpapan	3,96	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bontang	3,39	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bulungan	3,93	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Malinau	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Nunukan	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,84	Baik
6	Pemerintah Kota Tarakan	3,11	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3,01	Baik
2	Pemerintah Kab. Minahasa	2,23	Cukup
3	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	2,46	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
5	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	2,48	Cukup
6	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	2,39	Cukup
7	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	3,37	Baik
8	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	2,34	Cukup
9	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	2,46	Cukup
10	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	3,02	Baik
11	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,66	Baik
12	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	2,88	Baik
13	Pemerintah Kota Manado	3,93	Sangat Baik
14	Pemerintah Kota Bitung	3,31	Baik
15	Pemerintah Kota Tomohon	3,03	Baik
16	Pemerintah Kota KotaMobagu	2,93	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Gorontalo	4,13	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Gorontalo	2,68	Baik
3	Pemerintah Kab. Boalemo	2,40	Cukup
4	Pemerintah Kab. Pohuwato	2,52	Cukup
5	Pemerintah Kab. Bone Bolango	3,00	Baik
6	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	2,89	Baik
7	Pemerintah Kota Gorontalo	2,82	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2,91	Baik
2	Pemerintah Kab. Poso	2,52	Cukup
3	Pemerintah Kab. Donggala	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Tolitoli	2,49	Cukup
5	Pemerintah Kab. Banggai	3,59	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Buol	3,19	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
7	Pemerintah Kab. Morowali	3,25	Baik
8	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	2,55	Cukup
9	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	2,72	Baik
10	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	3,06	Baik
11	Pemerintah Kab. Sigi	2,29	Cukup
12	Pemerintah Kab. Banggai Laut	2,11	Cukup
13	Pemerintah Kab. Morowali Utara	2,56	Cukup
14	Pemerintah Kota Palu	2,58	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	3,94	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pinrang	3,49	Baik
3	Pemerintah Kab. Gowa	3,63	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Wajo	2,77	Baik
5	Pemerintah Kab. Bone	3,18	Baik
6	Pemerintah Kab. Tana Toraja	2,75	Baik
7	Pemerintah Kab. Maros	3,15	Baik
8	Pemerintah Kab. Luwu	2,60	Baik
9	Pemerintah Kab. Sinjai	3,01	Baik
10	Pemerintah Kab. Bulukumba	2,56	Cukup
11	Pemerintah Kab. Bantaeng	3,64	Sangat Baik
12	Pemerintah Kab. Jeneponto	3,10	Baik
13	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	2,57	Cukup
14	Pemerintah Kab. Takalar	2,80	Baik
15	Pemerintah Kab. Barru	2,79	Baik
16	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	3,04	Baik
17	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2,64	Baik
18	Pemerintah Kab. Soppeng	2,98	Baik
19	Pemerintah Kab. Enrekang	3,20	Baik
20	Pemerintah Kab. Luwu Utara	3,26	Baik

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
21	Pemerintah Kab. Luwu Timur	3,16	Baik
22	Pemerintah Kab. Toraja Utara	2,31	Cukup
23	Pemerintah Kota Makassar	4,02	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Parepare	2,62	Baik
25	Pemerintah Kota Palopo	3,12	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	2,87	Baik
2	Pemerintah Kab. Konawe	2,92	Baik
3	Pemerintah Kab. Buton	2,26	Cukup
4	Pemerintah Kab. Muna	2,35	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kolaka	3,68	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	3,68	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	2,63	Baik
8	Pemerintah Kab. Bombana	2,85	Baik
9	Pemerintah Kab. Wakatobi	2,55	Cukup
10	Pemerintah Kab. Buton Utara	2,19	Cukup
11	Pemerintah Kab. Konawe Utara	2,85	Baik
12	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	2,12	Cukup
13	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	2,16	Cukup
14	Pemerintah Kab. Buton Selatan	2,25	Cukup
15	Pemerintah Kab. Buton Tengah	2,63	Baik
16	Pemerintah Kab. Muna Barat	1,82	Cukup
17	Pemerintah Kota Kendari	3,23	Baik
18	Pemerintah Kota Baubau	3,09	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3,70	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Pasangkayu	2,52	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
3	Pemerintah Kab. Mamuju	2,42	Cukup
4	Pemerintah Kab. Mamasa	2,01	Cukup
5	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	3,88	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Majene	3,04	Baik
7	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	2,28	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	4,30	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Buleleng	3,69	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Jembrana	3,77	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab, Gianyar	3,49	Baik
5	Pemerintah Kab. Karangasem	2,57	Cukup
6	Pemerintah Kab. Bangli	2,71	Baik
7	Pemerintah Kab. Badung	3,87	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tabanan	3,54	Sangat Baik
9	Pemerintah Kota Denpasar	3,96	Sangat Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,56	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lombok Barat	3,05	Baik
3	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	3,04	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	3,27	Baik
5	Pemerintah Kab. Bima	2,52	Cukup
6	Pemerintah Kab. Sumbawa	2,90	Baik
7	Pemerintah Kab. Dompu	2,52	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	3,45	Baik
9	Pemerintah Kab. Lombok Utara	2,71	Baik
10	Pemerintah Kota Mataram	3,55	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Bima	2,66	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,89	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Kupang	2,48	Cukup
3	Pemerintah Kab. Belu	2,47	Cukup
4	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,43	Cukup
5	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,83	Baik
6	Pemerintah Kab. Alor	2,19	Cukup
7	Pemerintah Kab. Sikka	2,02	Cukup
8	Pemerintah Kab. Flores Timur	2,10	Cukup
9	Pemerintah Kab. Ende	2,58	Cukup
10	Pemerintah Kab. Ngada	2,17	Cukup
11	Pemerintah Kab. Manggarai	2,90	Baik
12	Pemerintah Kab. Sumba Timur	2,56	Cukup
13	Pemerintah Kab. Sumba Barat	3,12	Baik
14	Pemerintah Kab. Lembata	2,42	Cukup
15	Pemerintah Kab. Rote Ndao	3,35	Baik
16	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,47	Baik
17	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	2,64	Baik
18	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	2,03	Cukup
19	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	2,19	Cukup
20	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	1,84	Cukup
21	Pemerintah Kab. Malaka	2,17	Cukup
22	Pemerintah Kota Kupang	3,14	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku	2,63	Baik
2	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	2,24	Cukup
3	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1,96	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	2,31	Cukup
5	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	2,41	Cukup

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
6	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1,90	Cukup
7	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	2,41	Cukup
8	Pemerintah Kab. Buru Selatan	1,81	Cukup
9	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	2,05	Cukup
10	Pemerintah Kota Ambon	2,64	Baik
11	Pemerintah Kota Tual	2,28	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1,90	Cukup
3	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	1,90	Cukup
4	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	2,06	Cukup
5	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	2,43	Cukup
6	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	2,73	Baik
7	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	1,38	Kurang
8	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	1,97	Cukup
9	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	2,09	Cukup
10	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	2,32	Cukup
11	Pemerintah Kota Ternate	1,89	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua	2,03	Cukup
2	Pemerintah Kab. Jayapura	2,82	Baik
3	Pemerintah Kab. Keerom	1,14	Kurang
4	Pemerintah Kab. Sarmi	1,53	Kurang
5	Pemerintah Kab. Supiori	1,48	Kurang
6	Pemerintah Kota Jayapura	2,35	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat	2,28	Cukup
2	Pemerintah Kab. Manokwari	1,75	Kurang
3	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	2,40	Cukup
4	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1,68	Kurang
5	Pemerintah Kab. Kaimana	2,15	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	1,61	Kurang
2	Pemerintah Kab. Merauke	2,25	Cukup
3	Pemerintah Kab. Boven Digoel	2,16	Cukup
4	Pemerintah Kab. Asmat	1,03	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	1,88	Cukup
2	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	1,94	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mimika	2,33	Cukup
4	Pemerintah Kab. Puncak	1,62	Kurang
5	Pemerintah Kab. Dogoyai	1,53	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Pegunungan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	1,62	Kurang
2	Pemerintah Kab. Jayawijaya	2,43	Cukup
3	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	1,09	Kurang
4	Pemerintah Kab. Nduga	1,50	Kurang
5	Pemerintah Kab. Tolikara	1,47	Kurang

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	2,39	Cukup
2	Pemerintah Kab. Sorong	2,49	Cukup
3	Pemerintah Kab. Raja Ampat	1,33	Kurang
4	Pemerintah Kota Sorong	1,78	Kurang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ANAS WIDYANTINI

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/203/K/411.013/2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024.

KEDUA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
b. disusun sebagai dokumen panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi, yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR



ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE KABUPATEN NGANJUK



Kata Pengantar

Buku Arsitektur Proses Bisnis ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan dokumen Arsitektur SPBE yang terdiri dari buku : Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan Informasi. Dokumen ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Buku ini terdiri dari 7 pokok pembahasan yaitu : Referensi Arsitektur, Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Arsitektur Layanan, Domain Asrsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur. Tiada gading yang tak retak, semoga buku yang belum sempurna ini dapat menjadi referensi dalam melengkapi dokumentasi SPBE untuk pencapaian kinerja pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

Nganjuk, 10 Mei 2023

Penyusun

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS	3
BAB 3 METODE PENYUSUNAN ARSITEKTUR PROSES BISNIS	7
BAB 4 ARSITEKTUR PROSES BISNIS	1
BAB 5 ROADMAP ARSITEKTUR PROSES BISNIS	87
BAB 6 PENUTUP	89

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Referensi arsitektur proses bisnis 2
Gambar 1.2. Ilustrasi relasi domain data dan informasi 2

Daftar Tabel

Tabel 2. 1. Referensi arsitektur proses bisnis tingkat Nasional 3
Tabel 4. 1. Arsitektur proses bisnis dan Referensi Arsitektur Level 1- Level 3 11
Tabel 5.1. Roadmap Arsitektur Proses Bisnis 87

BAB 1 PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 didefinisikan bahwa Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan bahwa Arsitektur Proses Bisnis SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dalam menghasilkan layanan pemerintah yang optimal.Arsitektur SPBE Kabupaten Nganjuk terdiri atas dua komponen yaitu :

1. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
2. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2018 didefiniskan bahwa Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Arsitektur proses bisnis pada pemerintahan diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis dalam 4 tingkat, yaitu:

1. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan pada struktur di tingkat nasional di tingkat 1 (pertama).
2. Urusan pemerintahan, turunan dari sektor pemerintahan dalam struktur tingkat nasional di tingkat 2 (kedua),

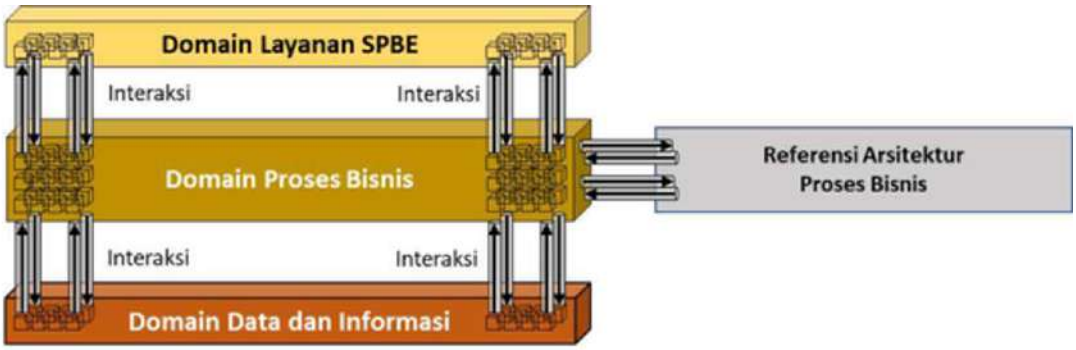
3. Fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional.
4. Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan Instansi pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada stntktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional di tingkat 4 (keempat).

Adapun struktur referensi arsitektur proses bisnis adalah sebagaimana berikut ini Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Referensi arsitektur proses bisnis

Domain arsitektur proses bisnis terdiri dari proses bisnis pemerintahan yang membentuk data dan informasi, serta layanan pemerintah, Domain proses bisnis memiliki berelasi secara langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan informasi. Relasi antar data dan informasi, serta layanan pemerintah diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 2.



Gambar 2. Ilustrasi relasi domain data dan informasi

BAB 2 REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Domain proses bisnis memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur proses bisnis tingkat nasional dengan referensi pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Referensi arsitektur proses bisnis tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi
Pertahanan dan Luar Negeri		
01.01	Pertahanan	
01.02	Hubungan Luar Negeri	
Ekonomi dan Industri		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan perdagangan
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan pertanian
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan perkebunan
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan peternakan
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan perikanan
02.07	BUMN	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan BUMN
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan investasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan koperasi
02.10	UMKM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan UMKM
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan pariwisata
Pembangunan Kewilayahan		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan Kawasan atau daerah tertinggal
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan
Perlindungan Sosial dan Kesehatan		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan
Ketertiban Umum dan Keselamatan		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan
05.03	HAM	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang HAM
Pendidikan dan Tenaga Kerja		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemuda
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang olahraga
Lingkungan dan Sumberdaya Alam		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup
Budaya dan Agama		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan
Pemerintahan Umum		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi
09.04	Telekomunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang telekomunikasi
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang aparatur negara
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara

BAB 2 METODE PENYUSUNAN ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Peta proses bisnis dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah. Ruang lingkup peta proses bisnis mencakup seluruh kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi. Peta bisnis proses pemerintahan disusun berdasarkan pada prinsip:

1. Definitif, peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.
5. Keterkaitan,i suatu proses tidak dapat berdiri,melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

Prosedur penyusunan peta bisnis dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu :

3.1. Tahap Perencanaan

Inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas dalam

instansi pemerintah tersebut. Proses aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan. Pengelompokan seluruh aktivitas dilakukan oleh instansi pemerintah ada 3 (tiga) prinsip yaitu :

a. Pengelompokkan berdasarkan pada kegiatan bukan unit organisasi.
b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh aktivitas proses kerja instansi pemerintah.
c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

3.1.1. Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, aporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis diantaranya adalah informasi terkait dengan supplier, input, process, output, dan customer. Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui beberapa metode analisis. Analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh. Klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung. Pemodelan proses : pembuatan rumusan tatalaksana (business process) dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi

3.1.2. Pengorganisasian

Tahapan pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

a. Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah; dan
b. Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

3.2. Tahap Pengembangan

Penyusunan peta proses bisnis organisasi atau business process mapping, membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan. Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan.
2. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
3. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0, merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
    a) Proses Inti, Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah. Dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
    b) Proses Pendukung, proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sesuai kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

BAB 4 ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Tabel 4. 1. Arsitektur proses bisnis dan Referensi Arsitektur Level 1 - Level 3

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.01	NGK.01.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Pengelolaan Keuangan daerah	RAB.09 Administrasi Umum	RAB.09.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidane keuangan negara	RAB.09.02.01 Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
NGK. Bisnis.02		Pengelolaan Keuangan daerah	RAB.09 Administrasi Umum	RAB.09.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan alam Bidang keuangan negara	RAB.09.02.02 Layanan Penggabungan SPPT PBB-P2	BPKAD
NGK.Bisnis .03		Pengelolaan Keuangan daerah	RAB.09 Administrasi Umum	RAB.09.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan alam Bidang keuangan negara	RAB.09.02.03 Layanan Pemecahan SPPT PBB-P2	BPKAD

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.04		Pengelolaan Keuangan daerah	RAB.09 Administrasi Umum	RAB.09.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan alam Bidang keuangan negara	RAB.09.02.04 LayananPembetulan SPPT PBB-P2	BPKAD
NGK.Bisnis.05		Pengelolaan Keuangan daerah	RAB.09 Administrasi Umum	RAB.09.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan alam Bidang keuangan negara	RAB.09.02.05 Layanan SK NJOP PBB-P2	BPKAD
NGK.Bisnis.06		Pengelolaan Keuangan daerah	RAB.09 Administrasi Umum	RAB.09.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan alam Bidang keuangan negara	RAB.09.02.06 Layanan BPHTB	BPKAD
NGK.Bisnis.07		Pengelolaan Keuangan daerah	RAB.09 Administrasi Umum	RAB.09.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan alam Bidang keuangan	RAB.09.02.07 Layanan informasi pendapatan asli daerah	BPKAD

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				negara		
NGK.Bisnis.08		Pengelolaan Keuangan daerah	RAB.09 Administrasi Umum	RAB.09.02 Penyelenggaraan urusan pemerintahan alam Bidang keuangan negara	RAB.09.02.08 Layanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
NGK.Bisnis.09		NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	RAB 09. Pemerintahan Umum	RAB. 09.06 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola arl aparatur negara	RAB.09.06.01 Pengawasan Reguler	INPEKTORAT DAERAH
NGK.Bisnis.10		Penyelenggaraan pengawasan	RAB. 09. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam	RAB 09.06 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola arl aparatur negara	RAB 09.06.02 Pengawasan Khusus dengan Tujuan tertentu	INPEKTORAT DAERAH

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.11		Penyelenggaraan pengawasan	RAB 09. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam	RAB 09.06 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara	RAB 09.06.03 Probity Audit	INPEKTORAT DAERAH
NGK.Bisnis.12		Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.01 Penyelenggaraan Uurusan pemerintah dalam bidang dalam negeri	RAB.09.01.01 Penyusunan keputusan Bupati	Asisten Pemerintahan dan Kesra
NGK.Bisnis.13		Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.01 Penyelenggaraan Uurusan pemerintah dalam bidang dalam negeri	RAB.09.01.02.Pembuatan Raperda Inisiatif	SETDA
NGK.Bisnis.14		Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	RAB.04. Layanan Publik	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.01.Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat Daerah

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.15		Perekonomian dan pembangunan	RAB.02 Layanan Publik	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pengelolaan industri.	RAB.02.01.Pelayanan Regristrasi dan Verifikasi untuk E-Purchasing	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
NGK.Bisnis.16		Perekonomian dan pembangunan	RAB.02 Layanan Publik	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.	RAB.02.01.02.Registrasi dan Verifikasi SPSE	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
NGK.Bisnis.17		Perekonomian dan pembangunan	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.07. Penyelenggaraan urusan pemerintaha dalam Bidang kesekretariatan negara.	RAB.09.07.01.Penyusunan RPJPD Kabupaten	BAPPEDA
NGK.Bisnis.18		Perekonomian dan pembangunan	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam	RAB.09.07.02.Penyusunan RKPD Kabupaten	BAPPEDA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				Bidang kesekretariatan negara.		
NGK.Bisnis.19		Perekonomian dan pembangunan	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.07. Penyelenggaraan urusan pemerintaha dalam Bidang kesekretariatan negara.	RAB.09.07.03.Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	BAPPEDA
NGK.Bisnis.20		Perekonomian dan pembangunan	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.07. Penyelenggaraan urusan pemerintaha dalam Bidang kesekretariatan negara.	RAB.09.07.04.Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja)	BAPPEDA
NGK.Bisnis.21		Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.01.Layanan Infomasi Publik	SETDA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.22		Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.02.Penyusunan RPJPD Kabupaten	BAPPEDA
NGK.Bisnis.23		06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.01. Penyelenggaraan ururusan oemerintahan dalam bidang dalam negeri	RAB.09.01.03. Penerimaan Kunjungan Kerja	SETDA
NGK.Bisnis.24		Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.03. Layanan Infomasi Publik	Badan Pendapatan Daerah
NGK.Bisnis.25		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09. Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.04.Layanan Infomasi Publik	SETDA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.26		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09. Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.05.Layanan Pengaduan	SETDA
NGK.Bisnis.27		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.06.Layanan Fasilitasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat	SETDA
NGK.Bisnis.28		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09. Layanan Publik	RAB.09.04. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.	RAB.09.04.01.Hearing /Rapat Dengar Pendapat	SETDA
NGK.Bisnis.29		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09. Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.07.Layanan Pemasangan Iklan Berita Kehilangan (STNK/BPKB) di Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL) FM	DISKOMINFO

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.30		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.08.Layanan Permohonan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Nganjuk	DISKOMINFO
NGK.Bisnis.31		NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.01 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.09.Layanan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR)	DISKOMINFO
NGK.Bisnis.32		NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.10.Layanan Peliputan dan Publikasi Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk	DISKOMINFO
NGK.Bisnis.33		NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.01 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.11.Layanan Command Center (Layanan Darurat)	DISKOMINFO

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.34		NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.12.Layanan informasi publik	BPKAD
NGK.Bisnis.35		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.13Layanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
NGK.Bisnis.36		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.14. Layanan informasi publik Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT
NGK.Bisnis.37		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.15. Layanan informasi publik Kecamatan Bagor	Kecamatan Bagor

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.38		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.16. Layanan informasi publik Kecamatan Baron	Kecamatan Baron
NGK.Bisnis.39		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.17. Layanan informasi publik Kecamatan Berbek	Kecamatan Berbek
NGK.Bisnis.40		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.18. Layanan informasi publik Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang
NGK.Bisnis.41		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.19. Layanan informasi publik Kecamatan Jatikalen	Kecamatan Jatikalen

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.42		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.20. Layanan informasi publik Kecamatan Kertosono	Kecamatan Kertosono
NGK.Bisnis.43		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.21. Layanan informasi publik Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong
NGK.Bisnis.44		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.22. Layanan informasi publik Kecamatan Loceret	Kecamatan Loceret
NGK.Bisnis.45		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.23. Layanan informasi publik Kecamatan Nganjuk	Kecamatan Nganjuk

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.46		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.24. Layanan informasi publik Kecamatan Ngetos	Kecamatan Ngetos
NGK.Bisnis.47		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.25. Layanan informasi publik Kecamatan Ngluyu	Kecamatan Ngluyu
NGK.Bisnis.48		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.26. Layanan informasi publik Kecamatan Ngronggot	Kecamatan Ngronggot
NGK.Bisnis.49		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.27. Layanan informasi publik Kecamatan Pace	Kecamatan Pace

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.50		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.28. Layanan informasi publik Kecamatan Patianrowo	Kecamatan Patianrowo
NGK.Bisnis.51		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.29. Layanan informasi publik Kecamatan Prambon	Kecamatan Prambon
NGK.Bisnis.52		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.30. Layanan informasi publik Kecamatan Rejoso	Kecamatan Rejoso
NGK.Bisnis.53		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.31. Layanan informasi publik Kecamatan Sawahan	Kecamatan Sawahan

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.54		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.32. Layanan informasi publik Kecamatan Sukomoro	Kecamatan Sukomoro
NGK.Bisnis.55		NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.33. Layanan informasi publik Kecamatan Tanjunganom	Kecamatan Tanjunganom
NGK.Bisnis.56		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.34. Layanan informasi publik Kecamatan Wilangan	Kecamatan Wilangan
NGK.Bisnis.57		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.35. Layanan informasi publik Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	DINSOS PPPA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.58		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.36. Layanan informasi publik RSUD Kertosono	RSUD Kertosono
NGK.Bisnis.59		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.37. Layanan informasi publik RSUD Nganjuk	RSUD Nganjuk
NGK.Bisnis.60		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.38. Layanan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOLPP
NGK.Bisnis.61		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.39. Layanan informasi publik Sekretariat Daerah	SEKDA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.62		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.40. Layanan informasi publik Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
NGK.Bisnis.63		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi	RAB.09.03.41. Layanan informasi siap nikah, siap hamil	BKKBN
NGK.Bisnis.64		Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09. Layanan Publik	RAB.09.04. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.	RAB.09.04.02.Layanan survei kepuasan masyarakat	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
NGK.Bisnis.65		Pengelolaan Aplikasi Informatika				
NGK.Bisnis.66		Penyelenggaraan statistic sectoral	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.04. Penyelenggaraan urusan pemerintahan	RAB.09.04.03. Layanan Pelayanan Data Statistik Sektoral	DISKOMINFO

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				dalam bidang komunikasi.		
NGK.Bisnis.67		Pengelolaan Arsip				
NGK.Bisnis.68		Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kabupaten	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara.	RAB.09.07.05. Layanan Pegajuan Naskah Sambutan	SETDA
NGK.Bisnis.69		Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kabupaten	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesekretariatan negara.	RAB.09.07.06. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	DISKOMINFO

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis. 70		Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.	RAB.09.05.01. Layanan Fasilitasi Sidak	SETDA
NGK.Bisnis.71		Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah				
NGK.Bisnis.72		Penelitian dan pengembangan daerah	RAB.06 Layanan Publik	RAB.06.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.	RAB.06.03.01. Layanan pendaftaran penelitian	BAKESBANGPOL
NGK.Bisnis.73	NGK.02 Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam	RAB.09.01.04. Layanan Kenaikan Pangkat Reguler	BKPSM

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				bidang dalam negeri.		
NGK.Bisnis.74		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.04. Layanan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Struktural	BKPSDM
NGK.Bisnis.75		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.05. Layanan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM
NGK.Bisnis.76		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.06. Layanan Kenaikan Gaji Berkala	BKPSDM

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.77		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.07. Layanan Pensiun Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)	BKPSDM
NGK.Bisnis.78		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.08. Layanan Pensiun Janda/Duda	BKPSDM
NGK.Bisnis.79		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.09. Layanan Pensiun atas Permintaan Sendiri (APS)	BKPSDM
NGK.Bisnis.80		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola	RAB.09.06.10. Layanan Ijin Belajar	BKPSDM

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				aparatur negara.		
NGK.Bisnis.81		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.11. Layanan Kartu Pegawai	BKPSDM
NGK.Bisnis.82		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.12. Layanan Karis dan Karsu	BKPSDM
NGK.Bisnis.83		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.13. Layanan Satyalancana Karya satya	BKPSDM

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.84		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAB.09.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.06.14. Layanan Cuti diluar tanggungan negara	BKPSDM
NGK.Bisnis.85		Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Layanan Publik	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelola aparatur negara.	RAB.09.03.42. Layanan informasi publik Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
NGK.Bisnis.86	NGK.03 Peningkatan Stabilitas Sosial	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi social dan budaya				
NGK.Bisnis.87		Peningkatan kewaspadaan nasional kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial				

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.88		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	RAB. 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.	RAB.05.03.01. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
NGK.Bisnis.89		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	RAB. 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.	RAB.05.02.01. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SATPOL PP
NGK.Bisnis.90		Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAB. 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.	RAB.05.02.02. Layanan Penanganan Kebakaran	DINAS DAMKAR
NGK.Bisnis.91		Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAB. 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.05.02.03. Layanan Sosial Pencegahan Bahaya Kebakaran	DINAS DAMKAR

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				keamanan.		
NGK.Bisnis.92		Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAB. 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.	RAB.05.02.04. Layanan informasi publik Dinas Pemadam Kebakaran	DINAS DAMKAR
NGK.Bisnis.93		Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAB. 05. Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.	RAB.05.02.05. Layanan Penanganan Sarang Tawon/Hewan Reptil	DINAS DAMKAR
NGK.Bisnis.94	NGK.04 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemberdayaan sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.02.01. Layanan Fasilitas Ijin undian gratis berhadiah (UGB)	DINSOS PPA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.95		Rehabilitasi Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.02.02. Layanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	DINSOS PPA
NGK.Bisnis.96		Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.02.03. Pemberian Layanan Informasi Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesra
NGK.Bisnis.97		Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.02.04. Layanan Pemberian Bantuan Transport orang terlantar dan atau kehabisan bekal	DINSOS PPA
NGK.Bisnis.98		Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.02.05. Layanan Pemberian Bantuan untuk penyandang Disabilitas	DINSOS PPA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.99		Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.02.06. Layanan rekomendasi data terpadu kesejahteraan Sosial	DINSOS PPA
NGK.Bisnis.100		Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.02.07. Layanan Reaktifasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	DINSOS PPA
NGK.Bisnis.101		Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.	RAB.04.02.08. Layanan Bantuan Lansia Miskin	DINSOS PPA
NGK.Bisnis.102	NGK.05 Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.	RAB.06.03.02 Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.103		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.01. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	DISPENDIK
NGK.Bisnis.104		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.02. Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta	DISPENDIK
NGK.Bisnis.105		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.03. Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta	DISPENDIK
NGK.Bisnis.106		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.06.01.04. Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	DISPENDIK

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				pendidikan.		
NGK.Bisnis.107		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.05. Layanan Pengajuan Legalisasi Ijazah	DISPENDIK
NGK.Bisnis.108		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.06. Layanan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Siswa	DISPENDIK
NGK.Bisnis.109		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.07. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP secara online	DISPENDIK

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.110		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.08. Layanan Pembelajaran Sekolah melalui Aplikasi SI-PRESTASI	DISPENDIK
NGK.Bisnis.111		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.09. Layanan Konfirmasi Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Aplikasi DAPODIK	DISPENDIK
NGK.Bisnis.112		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.10. Layanan Kenaikan Pangkat Reguler bagi Tenaga Pendidik	DISPENDIK
NGK.Bisnis.113		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.06.01.11. Layanan Usulan Pensiun Tenaga Guru	DISPENDIK

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				pendidikan.		
NGK.Bisnis.114		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.12. Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional	DISPENDIK
NGK.Bisnis.115		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.13. Layanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijasah dengan Satuan pendidikan yang masih berdiri/berganti Nama Lembaga Baru	DISPENDIK
NGK.Bisnis.116		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.14. Layanan Pengesahan rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	DISPENDIK

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.117		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.15. Layanan bantuan operasional sekolah	DISPENDIK
NGK.Bisnis.118		Pengelolaan Pendidikan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.16. Layanan informasi publik Dinas Pendidikan	DISPENDIK
NGK.Bisnis.119		Pengembangan Kurikulum	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.17. Layanan Pengajuan pengesahan Kurikulum Pendidikan Jenjang PAUD dan Dasar	DISPENDIK
NGK.Bisnis.120		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.06.01.18. Layanan Srikulasi Otomasi Perpustakaan	DINAS ARPUS

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				pendidikan.		
NGK.Bisnis.121		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.19. Layanan Perpustakaan Anak	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.122		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.20. Layanan Dongkel Beras	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.123		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.21. Layanan Perpustakaan Keliling	DINAS ARPUS

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.124		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.22. Layanan TABAMAS	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.125		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.23. Layanan Car Free Day	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.126		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.24. Layanan Tos Keliling	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.127		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.06.01.25. Layanan E-Book Nganjuk	DINAS ARPUS

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				pendidikan.		
NGK.Bisnis.128		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.26. Layanan Bahan Pustaka	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.129		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.27. Layanan Pengihan Buku	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.130		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.28. Layanan Pelaksanaan Bimtek	DINAS ARPUS

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.131		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.29. Layanan informasi publik Dinas Arsip dan Perpustakaan	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.132		Pembinaan Perpustakaan	RAB. 06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.	RAB.06.01.30. Layanan Kearsipan	DINAS ARPUS
NGK.Bisnis.133		Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan				
NGK.Bisnis.134		Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				
NGK.Bisnis.135	NGK.06 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam	RAB.04.01.02. Rekomendasi Ijin Opersional Klinik (Utama dan Pratama)	DINKES

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
	Penduduk			bidang kesehatan.		
NGK.Bisnis.136		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.03. Layanan Gawat Darurat 24 Jam	DINKES
NGK.Bisnis.137		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.04. Layanan Rawat Jalan	DINKES
NGK.Bisnis.138		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.05. Layanan Rawat Inap	DINKES

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.139		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.06. Layanan Ruang Isolasi Khusus	DINKES
NGK.Bisnis.140		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.07. Layanan ICU	DINKES
NGK.Bisnis.141		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.08. Layanan Bedah Sentral	DINKES
NGK.Bisnis.142		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.04.01.09. Layanan Hemodialisa	DINKES

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				kesehatan.		
NGK.Bisnis.143		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.10. Layanan Ambulans	DINKES
NGK.Bisnis.144		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.11. Layanan Penunjang Medis	DINKES
NGK.Bisnis.145		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.12. Layanan Penunjang Non Medis	DINKES

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.146		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.13. Layanan kesehatan SMILE	DINKES
NGK.Bisnis.147		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.14. Penerbitan Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	DINKES
NGK.Bisnis.148		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.15. Layanan informasi publik Dinas Kesehatan	DINKES
NGK.Bisnis.149		Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.04.01.16. Rekomendasi Perijinan Apotek	DINKES

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				kesehatan.		
NGK.Bisnis.150		Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.17. Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	DINKES
NGK.Bisnis.151		Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.18. SLHS Jasa Boga /Rumah Makan/ Restoran/ Depo Air Minum/ TPP Tertentu	DINKES
NGK.Bisnis.152		Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.	RAB.04.01.19. Penerbitan Ijin STPT	DINKES

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.153		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.01. Layanan Kartu Keluarga	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.154		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.02. Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.155		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.03. Layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.156		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.03.07.04. Layanan Akta Kelahiran	DINAS PPKB

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
				kependudukan.		
NGK.Bisnis.157		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.05. Layanan Akta Perkawinan	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.158		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.06. Layanan Akta Kematian	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.159		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.07. Layanan Pindah Datang Penduduk	Kecamantan

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.08. Layanan Pindah Keluar Penduduk	Kecamantan
NGK.Bisnis.160		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.09. Layanan Akta Perceraian	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.161		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.10. Layanan Pindah Tempat Antar Kecamatan	Kecamatan
NGK.Bisnis.162		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.03.07.11. Layanan Pindah Tempat Antar Kabupaten	Kecamatan

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
				kependudukan.		
NGK.Bisnis.163		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.12. Layanan Legalisasi Surat-Surat	Kecamatan
NGK.Bisnis.164		Pengendalian Penduduk	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.13. Layanan informasi publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.165		Pembinaan Keluarga Berencana	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.14. Layanan Ayoman Kegagalan KB	DINAS PPKB

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.166		Pembinaan Keluarga Berencana	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.15. Layanan Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP)	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.167		Pembinaan Keluarga Berencana	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.16. Layanan Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW)	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.168		Pembinaan Keluarga Berencana	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.03.07.17. Layanan Konseling KB	DINAS PPKB
NGK.Bisnis.169		Pembinaan Keluarga Berencana	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang	RAB.03.07.18. Layanan informasi publik Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	DINAS PPKB

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				kependudukan.		
NGK.Bisnis.170	NGK.07 Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Pengarustamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan				
NGK.Bisnis.171		Perlindungan Perempuan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.04.03.01. Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOS PPPA
NGK.Bisnis.172		Perlindungan Khusus Anak	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.	RAB.04.03.02. Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOS PPPA
NGK.Bisnis.173	NGK.8 Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Sektor Pertanian dan	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan	RAB.02.03.01 Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Usaha Tani Perternakan dan	DISPERTA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
	Perikanan			dalam bidang pertanian	Pemasaran	
NGK.Bisnis.174		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan	RAB.02.05.01. Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Produksi, Penyebaran, dan Pengembangan Ternak	DISPERTA
NGK.Bisnis.175		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan	RAB.02.05.02. Penerbitan Recording pada Ternak	DISPERTA
NGK.Bisnis.176		Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian				
NGK.Bisnis.177		Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam	RAB.02.05.03. Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Tentang Standar Kesehatan	DISPERTA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				bidang peternakan	Masyrakat Veteriner Pada PAH Obat Hewan dan Pakan Ternak	
NGK.Bisnis.178		Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan	RAB.02.05.04. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISPERTA
NGK.Bisnis.179		Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan	RAB.02.05.05. Pengawasan Kesehatan Hewan, Kesmavet, Larangan Pemotongan Betina Produktif	DISPERTA
NGK.Bisnis.180		Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan	RAB.02.05.06. Pemberantas Penyakit Hewan	DISPERTA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.181		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
NGK.Bisnis.182		Perizinan usaha pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian	RAB.02.03.02. Perinzinan Usaha Pertanian	DISPERTA
NGK.Bisnis.183		Perizinan usaha pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan	RAB.02.05.07. Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Perternakan	DISPERTA
NGK.Bisnis.184		Perizinan usaha pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian	RAB.02.03.03. Layanan Pendaftaran Ijin edar Beras	DINAS KPP

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.185		Penyuluhan Pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan	RAB.02.05.08. Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Produksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak	DISPERTA
NGK.Bisnis.186		Penyuluhan Pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan	RAB.02.05.09. Pelaksanaan Penyuluhan Kesmavet, POH dan Pakan Ternak	DISPERTA
NGK.Bisnis.187		Penyuluhan Pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian	RAB.02.03.04. Layanan informasi pertanian Kab Nganjuk	Dinas Pertanian
NGK.Bisnis.188		Penyuluhan Pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian	RAB.02.03.05. Layanan informasi publik Dinas Pertanian	DINAS Pertanian

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.189		Pengelolaan perikanan budidaya	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan	RAB.02.06.01. Layanan informasi publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
NGK.Bisnis.190		Pengelolaan perikanan budidaya	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan	RAB.02.06.02. Layanan Bantuan Perikanan	DINAS KPP
NGK.Bisnis.191		Pengelolaan perikanan budidaya	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian	RAB.02.03.06. Layanan Pembelian Benih	DINAS KPP
NGK.Bisnis.192		Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian	RAB.02.03.07. Pengawasan Produksi, Peredaran, Higiene dan Sanitasi PAH	DISPERTA

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.193		Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian	RAB.02.03.08. Pelaksanaan Sosialisasi HACCP, Unit Pengolah, Alat Transport dan Unit Penyimpan HBAH	DISPERTA
NGK.Bisnis.194		Peningkatan Kerjasama Desa				
NGK.Bisnis.195		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian	RAB.02.03.09. Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Usaha Tani Perternakan dan Pemasaran	DISPERTA
NGK.Bisnis.196	NGK.09 Peningkatan Volume Usaha Sektor Indudtri dan Perdagangan	Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.01. Permohonan surat keterangan sebagai pelaku usaha mikro di Kabupaten Nganjuk	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.197		Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.02. Pendaftaran Merk	DISPERINDAG
NGK.Bisnis.198		Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.03. Layanan informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
NGK.Bisnis.199		Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.04. Fasilitasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	DISPERINDAG

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.200		Peningkatan sarana distribusi	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah	RAB.02.10.05. E Redistribusi Pelayanan Publik	DISPERINDAG
NGK.Bisnis.201		Standarisasi dan perlindungan konsumen	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.09. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pembinaan koperasi	RAB.02.09.01. Layanan informasi publik Dinas Koperasi dan UM	DINASKOPUM
NGK.Bisnis.202		Pengendalian izin usaha industri	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.09. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pembinaan koperasi	RAB.02.09.02. Fasilitasi Permohonan Verifikasi Teknis	DISPERINDAG

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.203		Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.09. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pembinaan koperasi	RAB.02.09.03. Layanan keuangan dan akuntansi koperasi	DINAS KOPUM
NGK.Bisnis.204		Pengembangan UMKM				
NGK.Bisnis.205	NGK.10 Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan	Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.01. Pembuatan Kartu Pencari Kerja	DISNAKER
NGK.Bisnis.206		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.02. Pembuatan Rekomendasi Pasport Kerja dan ID CPMI	DISNAKER

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.207		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.03. Penerbitan IjinLPK tidak berbasis Resiko	DISNAKER
NGK.Bisnis.208		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.04. Penerbitan Tandar Daftar BKK Bursa Kerja Khusus) untuk SMA/SMK/ Universitas/LPK	DISNAKER
NGK.Bisnis.209		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.05. Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	DISNAKER
NGK.Bisnis.210		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang	RAB.06.02.06. Pengesahan Peraturan Perusahaan	DISNAKER

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				ketenagakerjaan		
NGK.Bisnis.211		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.07. Layanan informasi publik Dinas Tenaga Kerja	DISNAKER
NGK.Bisnis.212		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.08. Layanan informasi lowongan kerja	DISNAKER
NGK.Bisnis.213		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.09. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DISNAKER

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.214		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.10. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	DISNAKER
NGK.Bisnis.215		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.11. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	DISNAKER
NGK.Bisnis.216		Hubungan Industrial	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang ketenagakerjaan	RAB.06.02.12. Pemberitahuan PHK	DISNAKER
NGK.Bisnis.217	NGK.11 Peningakatan Iklim Investasi	Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang	RAB.06.02.13. Layanan Perizinan non Berusaha	DPMPTSP

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				ketenagakerjaan		
NGK.Bisnis.218		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pengelolaan industri	RAB.02.01.03. Layanan Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA)	DPMPTSP
NGK.Bisnis.219		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pengelolaan industri	RAB.02.01.04. Layanan Perizinan non Berusaha	DPMPTSP
NGK.Bisnis.220		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pengelolaan	RAB,02.01.05. Layanan Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA)	DPMPTSP

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				industri		
NGK.Bisnis.221		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pengelolaan industri	RAB.02.01.06. Layanan Izin Pemakaian Sarana Olah Raga	DPMPTSP
NGK.Bisnis.222		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pengelolaan industri	RAB.02.01.07. Layanan Izin Reklame	DPMPTSP
NGK.Bisnis.223		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pengelolaan	RAB.02.01.08. Layanan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	DPMPTSP

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				industri		
NGK.Bisnis.224		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pengelolaan industri	RAB.02.01.09. Layanan Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Ternak	DPMPTSP
NGK.Bisnis.225		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang kesehatan	RAB.04.01.20. Layanan Izin Praktek Bidan	DPMPTSP
NGK.Bisnis.226		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang kesehatan	RAB.04.01.21. Layanan Izin Kerja Akunpunkturis	DPMPTSP

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.227		Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang kesehatan	RAB.04.01.22. Layanan Izin Kerja Perawat	DPMPTSP
NGK.Bisnis.228	NGK.12 Peningkatan Kemandiran dan Pemberdayaan Desa	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.04. Perlindungan social dan kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang sosial	RAB.04.02.09. Layanan Permohonan Surat	DINAS PMD
NGK.Bisnis.229		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.04. Perlindungan social dan kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang sosial	RAB.04.02.10. Layanan Penerimaan Tamu	DINAS PMD

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.230		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang keuangan	RAB.09.02.09. Layanan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Khusus Program JATIM PUSPA	DINAS PMD
NGK.Bisnis.231		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang keuangan	RAB.09.02.10. Layanan Pencairan Bantuan Keuangan khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa	DINAS PMD
NGK.Bisnis.232		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang kepariwisataan	RAB.02.11.01. Layanan Usulan Kegiatan video kreatif pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	DINAS PMD
NGK.Bisnis.233		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang kepariwisataan	RAB.02.11.02. Layanan usulan kegiatan pameran kampung kreasi pemberdayaan ekonomi masyarakat	DINAS PMD

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.234		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang kepariwisataan	RAB.02.11.03. Layanan Program Pemberdayaan BUM Desa	DINAS PMD
NGK.Bisnis.235		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pembangunan Kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.01. Layanan entry data BUM Desa pada Aplikasi DDC	DINAS PMD
NGK.Bisnis.236		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pembangunan Kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.02. Layanan realisasi program pemberdayaan BUM Desa	DINAS PMD

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.237		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pembangunan Kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.03. Layanan Fasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan	DINAS PMD
NGK.Bisnis.238		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang sosial	RAB.04.02.11. Layanan Penyusunan Rencana Pelatihan peningkatan kapasitas badan pemusyawaratan desa	DINAS PMD
NGK.Bisnis.239		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang sosial	RAB.04.02.12. Layanan Fasilitasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	DINAS PMD
NGK.Bisnis.240		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang sosial	RAB.04.02.13. Layanan Fasilitas Perencanaan Desa	DINAS PMD

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.241		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang sosial	RAB.04.02.14. Layanan Fasilitasi Proses Pengajuan SK PJ, PAW BPD	DINAS PMD
NGK.Bisnis.242		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang sosial	RAB.04.02.15. Layanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
NGK.Bisnis.243	NGK.13 Peningkatan daya saing pariwista	Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata				
NGK.Bisnis.244		Pemasaran pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Indusrtri	RAB.02.11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan	RAB.02.11.04. Layanan informasi publik Dinas Pariwisata	DISPORALU DPAR
NGK.Bisnis.245	NGK.14 Peningkatan Pelestarian Kebudayaan,	Pengembangan Budayaan	RAB.02 Ekonomi dan Indusrtri	RAB.02.11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam	RAB.02.11.05. Surat Advis/Ijin Pentas	DISPORALU DPAR

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
	Kesenian dan Tradisi Lokal Daerah			Bidang Kepariwisataan		
NGK.Bisnis.246		Pengembangan Kesenian Tradisional	RAB.02 Ekonomi dan Indusrtri	RAB.02.11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan	RAB.02.11.05. Kartu Tanda Seniman	DISPORALU DPAR
NGK.Bisnis.247		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
NGK.Bisnis.248	NGK.15 Peningkatan Infrastuktur	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
NGK.Bisnis.249		Penataan Bangunan Gedung	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang perumahan	RAB.03.04.01. Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	DINAS PRKPP

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.250		Penyelenggaraan Jalan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang transportasi	RAB.03.03.01. Layanan pengujian kendaraan bermotor	DISHUB
NGK.Bisnis.251		Pengembangan Jasa Konstruksi	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pekerjaan umum	RAB.03.01.01. Layanan pendaftaran kontraktor	DINAS PUPR
NGK.Bisnis.252		Pengembangan Perumahan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pekerjaan umum	RAB.03.01.02 Layanan Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk	DINAS PUPR
NGK.Bisnis.253		Pengembangan Perumahan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang	RAB.03.04.02 Layanan Rekomendasi Tapa/Siteplan Perumahan di Kabupaten Nganjuk	DINAS PUPR

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitektur Level 1	Referensi Arsitektur Level 2	Referensi Arsitektur Level 3	Unit Pelaksana
				perumahan		
NGK.Bisnis.254		Kawasan Pemukiman				
NGK.Bisnis.255		Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh				
NGK.Bisnis.256		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang transportasi	RAB.03.03.02. Layanan Teknik Sarana dan Prasarana	DISHUB
NGK.Bisnis.257		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang transportasi	RAB.03.03.03. Layanan Pemberian Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	DISHUB

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.258		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang transportasi	RAB.03.03.04. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB
NGK.Bisnis.259		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang transportasi	RAB.03.03.05. Layanan Angkutan dan Transportasi	DISHUB
NGK.Bisnis.260		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang transportasi	RAB.03.03.06. Layanan informasi publik Dinas Perhubungan	DISHUB
NGK.Bisnis.261		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang	RAB.03.03.07. Layanan informasi publik Dinas Perhubungan	DISHUB

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				transportasi		
NGK.Bisnis.262	NGK.16 Peningkatan Penyelenggaraan Penataan uang dan Pelestarian Lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pekerjaan umum	RAB.03.01.03. Layanan Perbaikan jalan dan jembatan	DINAS PUPR
NGK.Bisnis.263		Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pekerjaan umum	RAB.03.01.04. Layanan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DINAS PUPR
NGK.Bisnis.264		Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pekerjaan umum	RAB.03.01.05. Layanan informasi publik Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	DINAS PUPR

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.265		Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang pekerjaan umum	RAB.03.01.06. KRK (Keterangan Rencana Tata Ruang Kota/ Kabupaten).	DINAS PUPR
NGK.Bisnis.266	NGK.17 Peningkatan Kualitas Lingkungan	Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.01. Layanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan	DINAS LH
NGK.Bisnis.267		Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.02. Layanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup	DINAS LH
NGK.Bisnis.268		Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang	RAB.07.05.03. Izin Penggunaan Ruang Terbuka Hijau	DINAS LH

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				lingkungan hidup		
NGK.Bisnis.269		Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.04. Izin Lingkungan	DINAS LH
NGK.Bisnis.270		Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.05. Izin Penggunaan Tepi Jalan	DINAS LH
NGK.Bisnis.271		Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.06. Layanan Pengelolaan Pohon Tepi Jalan	DINAS LH

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
NGK.Bisnis.272		Pengelolaan Persampahan	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.07. Layanan informasi limbah B3	DINAS LH
NGK.Bisnis.273	NGK.18 Peningkatan Ketangguhan Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.08. Layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	BPBD
NGK.Bisnis.274		Penanggulangan Bencana	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.09. Layanan Pemberian Bantuan Bencana	DINSOS PPA
NGK.Bisnis.275		Penanggulangan Bencana	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang	RAB.07.05.10. Layanan Cepat Kejadian Bencana	BPBD

ID Proses Bisnis	Proses Bisnis	Sub Proses	Referensi Arsitrektur Level 1	Referensi Arsitrektur Level 2	Referensi Arsitrektur Level 3	Unit Pelaksana
				lingkungan hidup		
NGK.Bisnis.276		Penanggulangan Bencana	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.11. Layanan Inventarisasi Kerusakan Pasca Bencana	BPBD
NGK.Bisnis.277		Penanggulangan Bencana	RAB.07 Lingkungan dan Sumber daya alam	RAB.07.05. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Bidang lingkungan hidup	RAB.07.05.12. Layanan Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana	BPBD
NGK.Bisnis.278		Penanggulangan Bencana	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam Informasi	RAB.09.03.43. Layanan informasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD

BAB 5 ROADMAP
ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Tabel 5.1. Roadmap Arsitektur Proses Bisnis

Kebijakan	Strategi	Tahapan / Program Kegiatan Pembangunan	Tahap Pelaksanaan					OPD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	
Misi: 1. Membangun tatakelola SPBE yang terpadu dan akuntabel yang menghasilkan layanan SPBE berkualitas dan Optimal								
Penyusunan ID Proses Bisnis dan ID Referensi setiap Level dari Proses Bisnis dan Sub Proses Bisnis	Menyiapkan data proses bisnis, sub proses dan referensi arsitektur setiap level.	Klasifikasi data proses bisnis berdasarkan pada kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintahan						Kominfo
		a. Penyusunan ID Proses Bisnis b. Penyusunan ID Referensi setiap Level						Kominfo
Analisis Data Proses Bisnis dan Referensi	Melakukan analisis dan klasifikasi data proses bisnis.	a. Analisis Kausal, relasi logis antar data atau fakta yang sudah dihimpun. b. Klasifikasi, pemilahan data atau fakta yang terkumpul sesuai dengan proses utama.						

Kebijakan	Strategi	Tahapan / Program Kegiatan Pembangunan	Tahap Pelaksanaan					OPD Penanggung Jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	
Pengorganisasian Proses Bisnis	Pengorganisasian oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam Reformasi Birokrasi Internal.	Membentuk tim struktural dan fungsional untuk mengorganisasikan data proses bisnis.						
MISI 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, kompeten dan inovatif								
Peningkatan pengetahuan manajerial dan skill terhadap pengelolaan proses bisnis di semua OPD dalam kebijakan SPBE	Menyiapkan SDM diinternal Dinas Kominfo yang mampu mensosialisasikan dan mengimplementasikan Proses Bisnis dalam kebijakan SPBE.	Implementasi kebijakan Proses Bisnis di seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk.						Kominfo
MISI 3 : Membangun infrastruktur tekhnologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi								
Infrastruktur yang mendukung proses bisnis dari aplikasi dan sistem disemua OPD	Penyediaan system data center untuk mendukung dan mewadahi aplikasi dan sistem disemua OPD.	Membangun dan meningkatkan kapasitas serta kecepatan akses data center						Kominfo
MISI 4 : Mengembangkan Sistem Integrasi Data Sebagai Perwujutan Layanan G2G, G2B, G2C								
Proses Bisnis pada sistem terintegrasi di semua OPD dalam klasifikasi G2G, G2B dan G2C	Menyediakan Proses Bisnis aplikasi terintegrasi pada berbagai klasifikasi antar pemerintah (G2G), antara pemerintah dengan bisnis (G2B) dan pemerintah dan warga kota (G2C).	Pembuatan arsitektur proses bisnis pada sistem terintegrasi G2G, G2B dan G2C.						Kominfo

BAB 6 PENUTUP

Penyusunan arsitektur proses bisnis merupakan bagian dari arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada setiap layanan pemerintahan. Penyusunan dokumen SPBE merupakan salah satu indikator suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah khususnya dalam penerapan sistem dan teknologi informasi yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen SPBE Arsitektur Proses Bisnis ini kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dalam menghasilkan layanan pemerintah yang optimal berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR



ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SPBE

KABUPATEN NGANJUK



Kata Pengantar

Buku Arsitektur Data dan Informasi ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan dokumen Arsitektur SPBE yang terdiri dari buku : Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan Informasi. Dokumen ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Buku ini terdiri dari 7 pokok pembahasan yaitu : Referensi Arsitektur, Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Arsitektur Layanan, Domain Asrsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur. Tiada gading yang tak retak, semoga buku yang belum sempurna ini dapat menjadi referensi dalam melengkapi dokumentasi SPBE untuk pencapaian kinerja pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

Nganjuk, 10 Mei 2023

Penyusun

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 REFERENSI ARSITEKTUR	4
BAB 3 DOMAIN ARSITEKTUR PROSES BISNIS	6
BAB 4 DOMAIN ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI	20
BAB 5 DOMAIN ARSITEKTUR LAYANAN	37
BAB 6 DOMAIN ASRSITEKTUR APLIKASI	43
BAB 7 DOMAIN ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR	67
BAB 8 DOMAIN ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR	78

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Hubungan antara SPBE dan Kebijakan SDI 1

Gambar 1.2. Hubungan antara SPBE dan Kebijakan SDI 2

Gambar 3.1. Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat Nasional 6

Gambar 3.2. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Level 1 7

Gambar 3.3. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Level 2 7

Gambar 4.1. Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi Tingkat Nasional 20

Gambar 4.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Level 1 21

Gambar 4.3. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Level 2 21

Gambar 5.1. Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsitektur Layanan Tingkat Nasional 37

Gambar 5.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Level 1 37

Gambar 5.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Level 2 38

Gambar 6.1. Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE 43

Gambar 6.2. Klasifikasi Aplikasi di OPD Kabupaten Nganjuk berbasis Web dan Desktop 43

Gambar 6.3. Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum di OPD Kabupaten Nganjuk 44

Gambar 6.4. Prosentase Aplikasi Fungsi Tertentu, Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan di OPD Kabupaten Nganjuk 44

Gambar 7.1. Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional 67

Gambar 7.2. Prosentase Fasilitas Komputasi Arsitektur Infrastruktur 77

Gambar 7.3. Prosentase Sistem Integrasi pada Arsitektur Infrastruktur 77

Gambar 8.1. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE 78

Gambar 8.2. Standar Aristektur Keamanan SPBE 96

Gambar 8.3. Standar Arsitektur Penerapan Keamanan SPBE 96

Daftar Tabel

Tabel.3.1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023 9

Tabel.4.1. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023 22

Tabel.5.1. Referensi Arsitektur Layanan Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023 39

Tabel 6.1. Referensi Arsitektur Aplikasi Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023 45

Tabel.7.1. Referensi Arsitektur Infrastuktur Berdasarkan pada Layanan Aplikasi Kab. Nganjuk 68

Tabel.8.1 Referensi Arsitektur Keamanan Informasi Berdasarkan pada Layanan Aplikasi Kab. Ngajuk 79

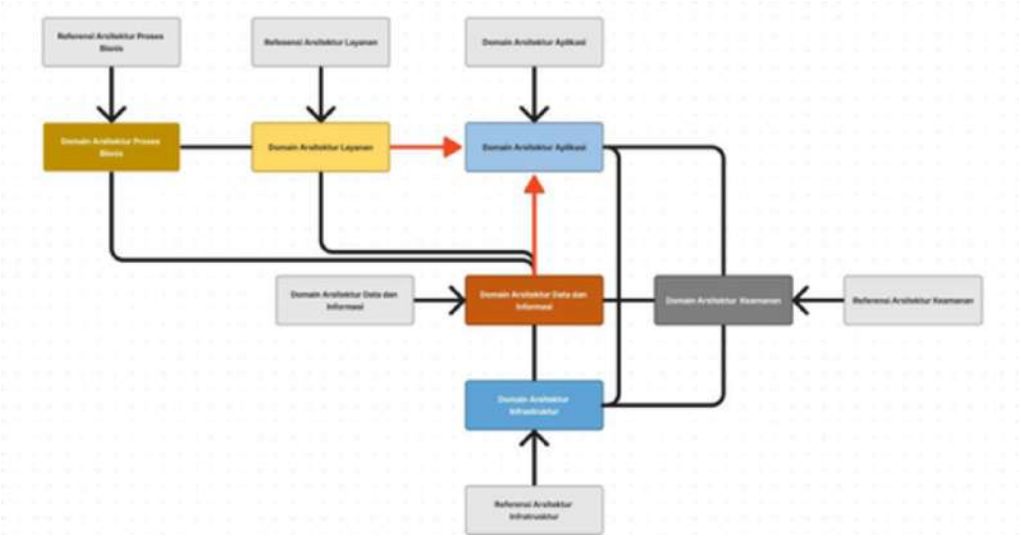
BAB 1 PENDAHULUAN

Urgensi akan perwujudan SATU DATA INDONESIA (SDI) adalah karena hingga saat ini dalam penyelenggaraan data pemerintahan masih mengalami berbagai kendala yaitu : (1) Keberagaman data dan metode untuk pendataan yang belum berstandar, (2) duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah. (3) Kekurangan SDM talenta digital dan efektivitas anggaran data di Instansi Pemerintah. (4) Egosektoral dalam penyelenggaraan data dan platform data, serta keengganan berbagi pakai data antar Instansi Pemerintah. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga mengeluarkan Peraturan Presiden N0.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tujuan kebijakan tersebut adalah mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Satu Data mendorong integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola data dan interoperablisasi, layanan pemerintah terintegrasi tidak bisa terwujud jika kondisi data masih tersebar dan dengan standar yang beragam. Dengan data dan layanan pemerintah yang terintegrasi, masyarakat selaku pengguna layanan akan dimudahkan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pemerintah.



Gambar 1.1. Hubungan antara SPBE dan Kebijakan SDI

Melalui upaya manajemen dan penjaminan kualitas data, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pengembangan layanan dapat lebih terarah dan berbasis fakta. Secara umum kebijakan SDI adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1. Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional secara tegas menyatakan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia diwujudkan dalam kerangka SPBE khususnya arsitektur data dan informasi, penerapan manqiemen data, dan penerapan Big Data dann Artificial Intelligence pemerintah. Dengan sinergitas antara Satu Data Indonesia dan SPBE dapat diwujudkan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia yang sinergis, karena SPBE yang berkualitas bergantung pada data Satu Data Indonesia yang berkualitas, sedangkan data Satu Data Indonesia yang berkualitas bergantung pada penerapan SPBE yang berkualitas. Arsitektur Data dan Informasi SPBE Kabupaten Nganjuk merupakan basis referensi untuk mengklasifikasikan data yang selaras dengan arsitektur proses bisnis yang ditujukan untuk menyediakan kewenangan berbagi pakai data, pencegahan duplikasi dan redudansi data. Data yang bermutu, valid dan akurat akan menjamin interoperabilitas data antar OPD, Badan, instansi, lembaga atau stakeholders Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.



Gambar 1.2. Posisi Arsitektur Data dan Informasi (ADI) diantara arsitektur SPBE

lainnya

Arsitektur Data dan Informasi SPBE Kabupaten Nganjuk berisi standar data, metadata baku, interoperabilitas data, kode referensi dan data induk yang dibagi dalam 5 lapisan (layer) yaitu : lingkup data, interoperabilitas data, data warehouse, datamart dan representasi data. Posisi Arsitektur Data dan Informasi (ADI) adalah sebagaimana pada Gambar 1.2. Setiap domain arsitektur memiliki substansi arsitektur yang sudah ditetapkan secara Nasional dan ditargetkan dapat tercapai pada Tahun 2024. Substansi arsitektur tersebut memuat seluruh target pencapaian Arsitektur SPBE di keenam Domain Arsitektur SPBE, yaitu :

1. domain arsitektur proses bisnis;
2. domain arsitektur data dan informasi;
3. domain arsitektur layanan SPBE;
4. domain arsitektur aplikasi SPBE;
5. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
6. domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB 2 REFERENSI ARSITEKTUR

Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB), adalah acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/proses untuk penyelenggaraan pemerintahan. RAB bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada. RAB ditetapkan dalam Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. RAB disusun melalui mekanisme penjabaran fungsi bisnis berdasarkan pada proses bisnis dari setiap kementerian.

RAB SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: (1) Tingkat 1, struktur RAB Sektor pemerintahan (2) Tingkat 2, struktur RAB Urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU. RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 46 (empat puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua).

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) adalah acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keselarasan antara RAD dengan RAB akan menjamin kemudahan dalam berbagi pakai data (interoperability) berdasarkan pada standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep interoperability ini sejalan dalam kebijakan pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Interoperability data dan informasi SPBE antar Kementerian/Lembaga/Dinas sebagai bagian dalam pencapaian tujuan SDI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 20l9 Tentang Satu Data Indonesia. RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: (1) Tingkat 1, sebanyak 10 Data pokok, dan (2) Tingkat 2, Data tematik, sebanyak 50 data tematik yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU.

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) adalah klasifikasi layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu, berdasarkan pada fungs penyelenggaraan pemerintahan. Layanan SPBE merupakan luaran dari proses bisnis dan disajikan kepada pengguna sesuai karakteristik layanan tertentu yang selaras dengan inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan. RAL diklasifikasikan berdasarkan pada penerima manfaat layanan yaitu : (1) Government to Citizen (G2C) dan Government to Business (G2B), (2) Government to Government/ G2G, Government to Employee/G2E. Struktur dari RAL SPBE Nasional terdiri atas 2 tingkat, yaitu: (1) Tingkat 1, Domain layanan, yang mengelompokkan layanan dalam 2 domain layanan, dan (2) Tingkat 2, Area layanan, yang terdiri dari 40 area layanan.

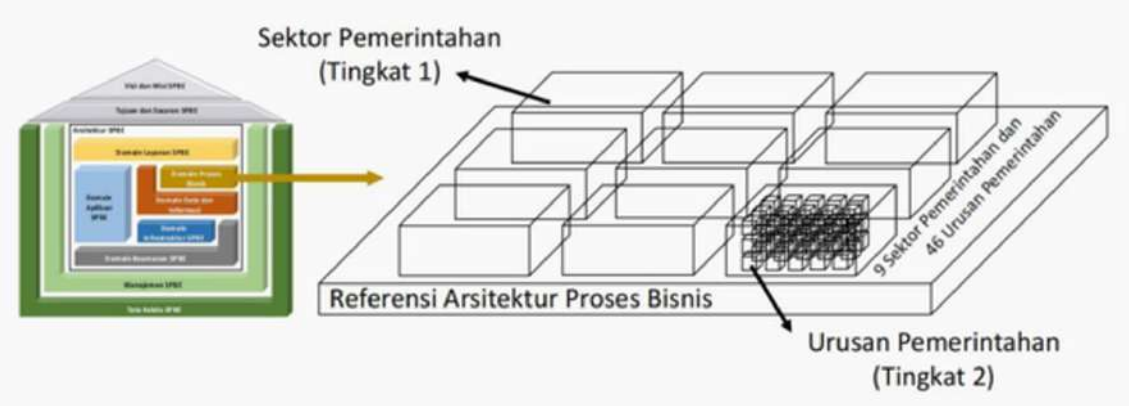
Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) adalah klasifikasi aplikasi dalam berbagi, penggunaan, kolaborasi dan konsolidasi layanan pemerintahan. Tujuan RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Struktur RAA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: (1) Tingkat 1, terdiri dari 2 domain aplikasi, dan (2) Tingkat 2, terdiri dari 3 area aplikasi.

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI) adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Tujuan penyusunan RAI adalah sebagai dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK dalam mendukung pelaksanaan SPBE, acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK dan pemetaan domain arsitektur infrastruktur SPBE. Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat, yaitu : (1) Tingkat 1, adalah 3 Domain infrastruktur, (2) Tingkat 2, adalah 8 Area.

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK) disusun dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu. Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu: (1) Tingkat 1, domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, dan (2) Tingkat 2, Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam 9 area keamanan.

BAB 3 DOMAIN ARSITEKTUR PROSES BISNIS

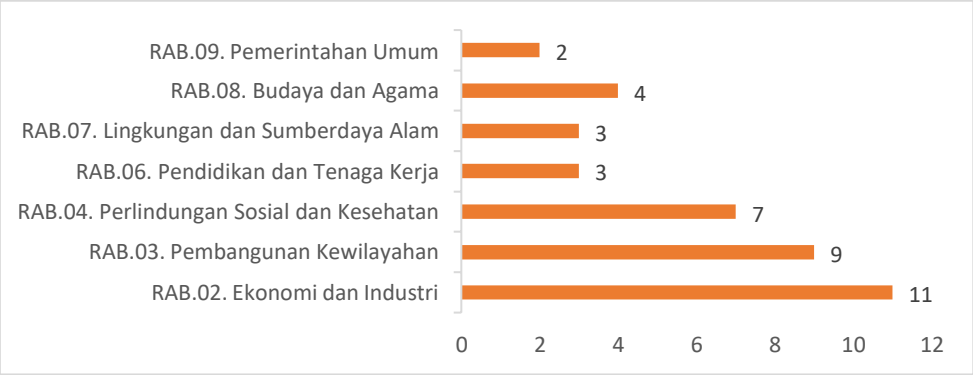
Domain arsitektur proses bisnis memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional, tingkat 3 dan seterusnya adalah di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur proses bisnis tingkat nasional dengan ilustrasi pada Gambar 3.1.



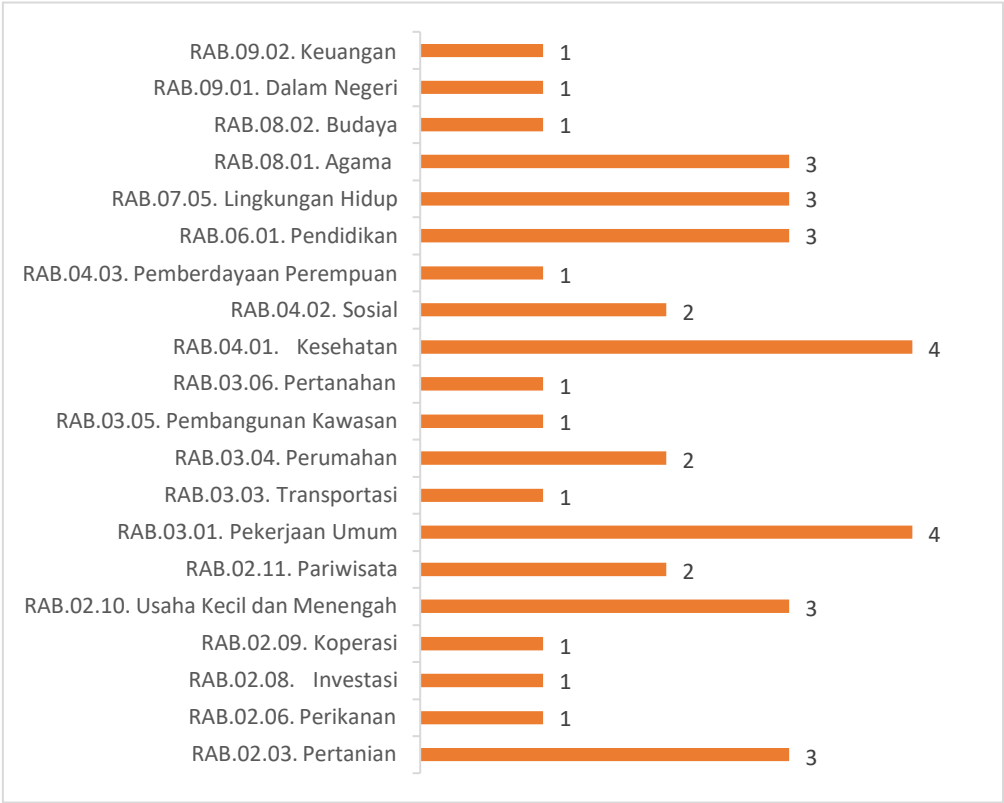
Gambar 3.1 Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis TingkatNasional.

Domain arsitektur proses bisnis pada Level 1 di Kabupaten Nganjuk yang terbanyak adalah RAB 02. Ekonomi dan Industri terdapat 9 proses bisnis, RAB 03. Pembangunan Kewilayahan terdapat 9 proses bisnis dan RAB 04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan terdapat 7 proses bisnis (Gambar 3.2). Domain arsitektur proses bisnis pada Level 2 yang terbanyak adalah pada RAB 03.01. Pekerjaan Umum, dan RAB 04.01. Kesehatan sebanyak 4 proses bisnis. RAB 02.09. Pertanian, RAB 02.01 Pariwisata, RAB

06.01. Pendidikan, RAB 07.05. Lingkungan Hidup dan RAB 08.01. Agama memiliki 3 proses bisnis (Gambar 3.3).



Gambar 3.2. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Level 1



Gambar 3.3. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Level 2

Domain arsitektur proses bisnis tersusun atas komponen ID Proses Bisnis, Nama Proses Bisnis, Tingkatan Referensi Nasional Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 3, dan Unit Kerja berdasarkan pada kegiatan pemerintahan yang dirumuskan dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah seperti pada Tabel 1.1.

Tabel.3.1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
NGK.Bisnis.01	Peningkatan volume usaha sektor industri dan perdagangan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.01. Penciptaan pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan Kawasan industri dan pusat perdagangan terintegras	Dinas Perdagangan
NGK.Bisnis.02	Pengembangan Sektor IKM/UMKM	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.02. Pengembangan sektor IKM/UKM	Dinas Perdagangan
NGK.Bisnis.03	Pengembangan Sektor IKM/UMKM Pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.10. Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.03. Pengembangan Sektor IKM/UMKM Pertanian	Dinas Pertanian
NGK.Bisnis.04	Akses permodalan Petani melalui Kartu Nganjuk Mandiri bidang Pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.01. Akses permodalan Petani melalui Kartu Nganjuk	Dinas Pertanian

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
				Mandiri bidang Pertanian	
NGK.Bisnis.05	Prasarana serta fasilitasi teknologi pertanian	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.02. Prasarana serta fasilitasi teknologi pertanian	Dinas Pertanian
NGK.Bisnis.06	Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan melalui Nganjuk Farming Development Center	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.03. Pertanian	RAB.02.03.03. Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan melalui Nganjuk Farming Development Center	Dinas Pertanian
NGK.Bisnis.07	Pengembangan Sektor Perikanan	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.06. Perikanan	RAB.02.06.01. Pengembangan Sektor Perikanan	Dinas Perikanan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
NGK.Bisnis.08	Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Budaya	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.11. Pariwisata	RAB.02.11.01. Pengembangan Sektor Pariwisata	Dinas Pariwisata
NGK.Bisnis.09	Pengembangan ekonomi kreatif dan produk digital	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.11. Pariwisata	RAB.02.11.02. Pengembangan ekonomi kreatif dan produk digital	Dinas Pariwisata
NGK.Bisnis.10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.08. investasi	RAB.02.08.01. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKPM
NGK.Bisnis.11	Pembinaan Pelaku Usaha dan Koperasi	RAB.02. Ekonomi dan Industri	RAB.02.09. Koperasi	RAB.02.09.01. Pembinaan Pelaku Usaha dan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM
NGK.Bisnis.12	Infrastruktur fisik jalan, dan jembatan milik kabupaten	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03. Transportasi	RAB.03.03.01. Pekerjaan pemantapan Infrastruktur fisik jalan dan jembatan, milik kabupaten	Dinas PUPR

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
NGK.Bisnis.13	Infrastruktur fisik sungai dan irigasi milik kabupaten	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.01. Pekerjaan pemantapan infrastruktur fisik sungai dan irigasi milik kabupaten	Dinas PUPR
NGK.Bisnis.14	Infrastruktur Pelayanan Publik	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02. Pekerjaan pemantapan infrastruktur pelayanan publik	Dinas PUPR
NGK.Bisnis.15	Infrastruktur jaringan perpipaan air bersih	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01. Pekerjaan Umum	RAB.03.01.03. Pekerjaan pemantapan infrastruktur jaringan perpipaan air bersih.	Dinas PUPR
NGK.Bisnis.16	Infrastruktur jaringan perpipaan air limbah rumah tangga	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01.Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04. Pekerjaan pemantapan infrastruktur jaringan perpipaan air limbah rumah tangga.	Dinas PUPR

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
NGK.Bisnis.17	Pengurangan kawasan kumuh	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.01. Pekerjaan pengurangan 13awasan kumuh	Dinas PUPR
NGK.Bisnis.18	Peningkatan kawasan rumah layak huni	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04. Perumahan	RAB.03.04.02. Pekerjaan 13awasan rumah layak huni	Dinas PUPR
NGK.Bisnis.19	Pengembangan kelembagaan ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05. Pembangunan Kawasan	RAB.03.05.01. Pengembangan kelembagaan ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
NGK.Bisnis.20	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	RAB.03. Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06. Pertanahan	RAB.03.06.01. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas Pertanahan
NGK.Bisnis.21	Kesejahteraan Masyarakat	RAB.04.Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.01. Penurunan jumlah	Dinas Sosial

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
				penduduk miskin melalui berbagai program pemerintah daerah.	
NGK.Bisnis.22	Perlindungan Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	RAB.04.Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02. Sosial	RAB.04.02.02. Perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Dinas Sosial
NGK.Bisnis.23	Kesehatan Masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.01. Penyediaan fasilitas Kesehatan secara lebih merata dari Puskesmas dan Posyandu	Dinas Kesehatan
NGK.Bisnis.24	Kesehatan Masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.02. Perluasan akses fasilitas Kesehatan secara lebih merata	Dinas Kesehatan
NGK.Bisnis.25	Gerakan masyarakat hidup sehat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.03. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat	Dinas Kesehatan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
NGK.Bisnis.26	Partisipasi KB Masyarakat	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01. Kesehatan	RAB.04.01.04. Penguatan partisipasi KB masyarakat	Dinas Kesehatan
NGK.Bisnis.27	Pemberdayaan Perempuan	RAB.04. Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03. Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03..01. kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial
NGK.Bisnis.28	Pengelolaan, pemeliharaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran	RAB.07. Lingkungan dan Sumberdaya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01. Pengelolaan, pemeliharaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran	DLH
NGK.Bisnis.29	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	RAB.07. Lingkungan dan Sumberdaya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lestari	DLH
NGK.Bisnis.30	Peningkatan kapasitas	RAB.07. Lingkungan dan Sumberdaya Alam	RAB.07.05. Lingkungan Hidup	RAB.07.05.03. Peningkatan kapasitas	DLH

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
	Pemerintah Daerah dan Desa dengan ”Desa Tangguh Bencana			Pemerintah Daerah dan Desa dengan ”Desa Tangguh Bencana	
NGK.Bisnis.31	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog menuju ”Gerakan Nganjuk Damai	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.01. Agama	RAB.08.01.01. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog menuju ”Gerakan Nganjuk Damai	Departemen Agama
NGK.Bisnis.32	Meningkatkan fasilitasi layanan keagamaan	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.01. Agama	RAB.08.01.02 Meningkatkan fasilitasi layanan keagamaan	Departemen Agama
NGK.Bisnis.33	Gerakan Nganjuk Aman	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.01. Agama	RAB.08.01.03 Gerakan Nganjuk Aman	Departemen Agama
NGK.Bisnis.34	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya dan kearifan lokal	RAB.08. Budaya dan Agama	RAB.08.02. Budaya	RAB.08.02.01. Peningkatan promosi seni budaya dan kearifan lokal serta	

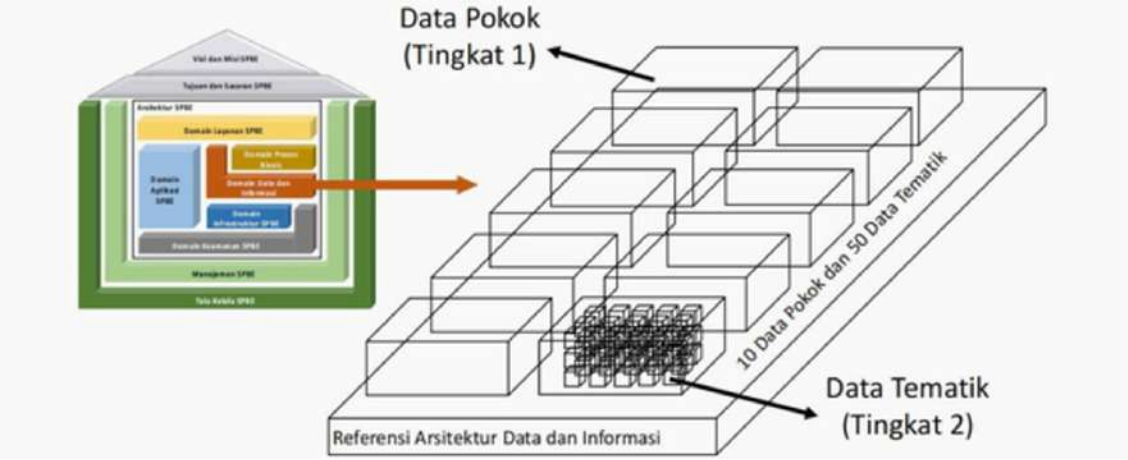
ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
				kerjasama investasi kepariwisataan	
NGK.Bisnis.35	Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.01. Dalam Negeri	RAB.09.01.01. Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government) serta tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis elektronik (e-government)	Departemen Dalam Negeri
NGK.Bisnis.36	Tata Kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi,	RAB.09. Pemerintahan Umum	RAB.09.02. Keuangan	RAB.09.02.01. Integrasi perencanaan berbasis elektronik (e-planning) dan penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting)	Departemen Dalam Negeri

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
	akuntabel, dan partisipatif)			serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;	
NGK.Bisnis.37	Meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui Gerakan dan budaya “Nganjuk Membaca”	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.01. Peningkatan minat baca masyarakat dan Pengembangan perpustakaan Daerah dan Desa	Dinas Pendidikan
NGK.Bisnis.38	Meningkatkan kinerja pelayanan lembaga pendidikan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.02. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.	Dinas Pendidikan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	RAB Tingkat 1 Nasional	RAB Tingkat 2	RAB Tingkat 3	Unit Kerja
NGK.Bisnis.39	Meningkatkan kinerja pelayanan lembaga pendidikan dengan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan	RAB.06. Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01. Pendidikan	RAB.06.01.03. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi .	Dinas Pendidikan

BAB 4 DOMAIN ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

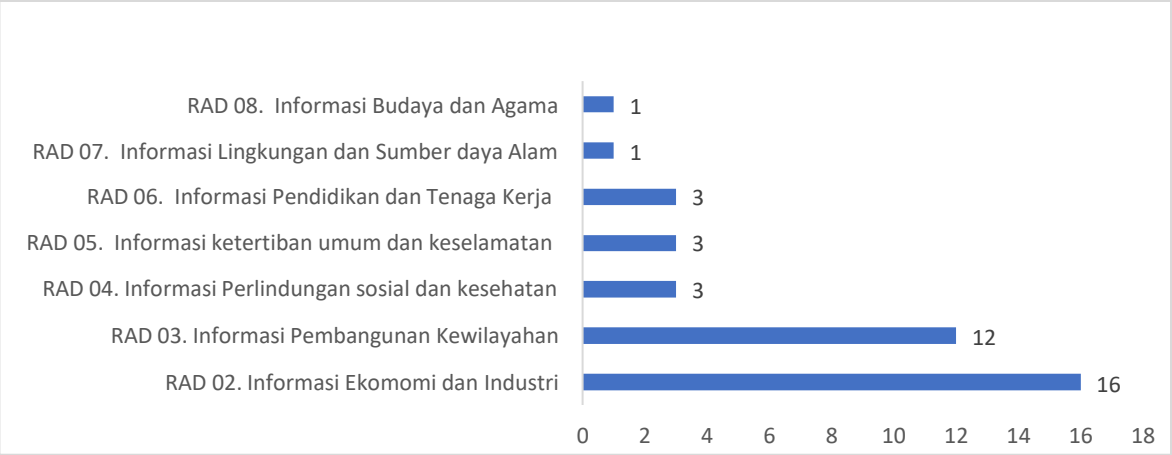
Domain arsitektur data dan informasi memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional, tingkat 3 dan seterusnya adalah di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur proses bisnis tingkat nasional dengan ilustrasi pada Gambar 4.1.



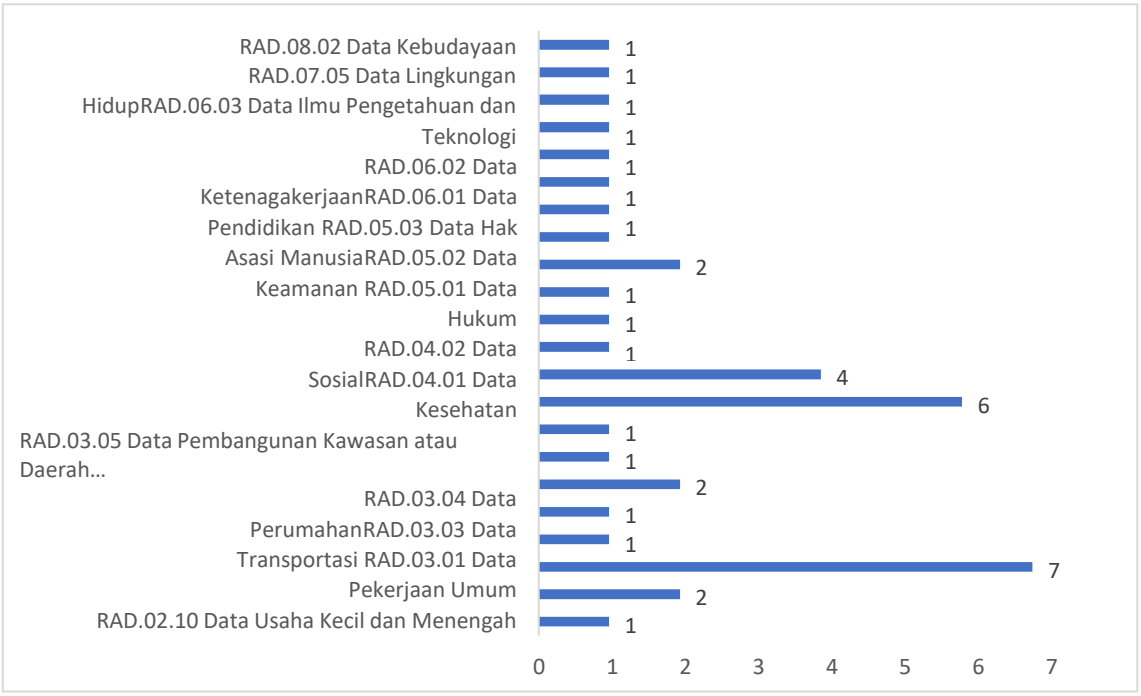
Gambar 4.1 Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsitektur Data dan InformasiTingkat Nasional.

Domain arsitektur proses bisnis pada Level 1 di Kabupaten Nganjuk yang terbanyak adalah RAD 02. Informasi Ekonomi dan Industri terdapat 16 Data dan Informasi, RAD 03. Pembangunan Kewilayahan terdapat 12 Data dan Informasi dan RAD 04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan, RAD 05. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan, RAD 06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja terdapat 3 Data dan Informasi (Gambar 4.2). Domain arsitektur Data dan Informasi pada Level 2 yang terbanyak adalah pada RAD 02.03. Pertanian memiliki 7 Data dan Informasi. RAD 03.01.

Pekerjaan Umum memiliki 7 Data dan Informasi dan RAD 03.03. memiliki 4 Data dan Informasi (Gambar 4.3). Domain arsitektur data dan informasi tersusun atas komponen ID Data, Nama Data, Tingkatan Referensi Nasional Arsitektur Data dan Informasi Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 3, dan Unit Kerja berdasarkan pada kegiatan pemerintahan yang dirumuskan dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah seperti pada Tabel 4.1.



Gambar 4.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Level 1



Gambar 4.3. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Level 2.

Tabel.4.1. Referensi Arsitektur Data dan Informasi Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
NGK.Data 01	Usaha perdagangan	Volume usaha perdagangan	Dinas Perindustrian Perdagangan	Peningkatan efisiensi perdagangan	RAD.02. Informasi Ekomomi dan Industri	RAD.02.02. Data Perdagangan	RAD.02.02.01. Data Volume usaha perdagangan per sektor
NGK.Data.02	Harga bahan pokok	Hasil informasi harga bahan pokok	Dinas Perindustrian Perdagangan	Program pengembangan pasar	RAD.02. Informasi Ekomomi dan Industri	RAD.02.02. Data Perdagangan	RAD.02.02.02. Data Harga bahan pokok
NGK.Data.03	Prosentase IKM	Prosentase IKM yang mendapatkan fasilitas pemerintah	Dinas Perindustrian Perdagangan	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	RAD.02. Informasi Ekomomi dan Industri	RAD.02.01. Data Industri	RAD.02.01.01. Data Prosentase IKM yang mendapatkan fasilitas pemerintah

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
NGK.Data.04	Persentase koperasi aktif	Jumlah Persentase koperasi aktif	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	RAD.02. Informasi Ekomomi dan Industri	RAD.02.09. Data Koperasi	RAD.02.09.01. Data Jumlah Persentase koperasi aktif
NGK.Data.05	Persentase pertumbuhan usaha mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUM	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	RAD.02. Informasi Ekomomi dan Industri	RAD.02.10. Data UKM	RAD.02.10.01. Data Persentase pertumbuhan usaha mikro yang memiliki IUM
NGK.Data.06	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Padi, jagung dan Kedelai	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	RAD.02. Informasi Ekomomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian	RAD.02.03.01. Data Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Padi, jagung dan Kedelai

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
NGK.Data.07	Prosentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	Prosentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	RAD.02. Informasi Ekomomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian	RAD.02.03.02. Data Prosentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian
NGK.Data.08	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura bawang merah dan cabe rawit	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	RAD.02. Informasi Ekomomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian	RAD.02.03.03.Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura bawang merah dan cabe rawit
NGK.Data.09	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Tebu	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.04. Data Perkebunan	RAD 02.04.01. Data Prosentase Peningkatan Produksi Tanaman

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
							Perkebunan Tebu
NGK.Data.10	Prosentase Peningkatan Produksi hasil Peternakan	Prosentasi Deteksi penyakit menular ternak : Brucella,Antrax,Helinthiasi,Avian Influensa; Produksi Hasil peternakan : Susu (Ton), Telur (Ton); Jumlah Populasi Ternak : Ternak Besar (Ekor), Ternak Kecil (ekor),unggas, aneka ternak	Dinas Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05. Data Peternakan	RAD.02.05.01. Data Prosentasi Deteksi penyakit menular ternak Brucella,Antrax, Helinthiasi,Avian Influensa; Produksi Hasil peternakan : Susu (Ton), Telur (Ton); Jumlah Populasi Ternak : Ternak Besar (Ekor), Ternak Kecil (ekor),unggas, aneka ternak

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
NGK.Data.11	kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan Penyuluhan	Prosentase Pengurangan Biaya Produksi	Dinas Pertanian	Program Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan Penyuluhan	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian	RAD.02.03.01. Data Prosentase Pengurangan Biaya Produksi
NGK.Data.12	Pertanian/Perkebunan yang terlatih	Prosentase Pertanian/perkebunan yang terlatih	Dinas Pertanian	Program Pelatihan Perkebunan/pertanian	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian	RAD.02.03.02. Data Prosentase Pertanian/perkebunan yang terlatih
NGK.Data.13	Kelompok Tani yang sudah MOU dengan pengusaha hasil bumi	Jumlah Kelompok tani yang sudah MOU dengan pengusaha hasil bumi	Dinas Pertanian	Program kelompok tani	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian	RAD.02.03.03. Data Jumlah Kelompok tani yang sudah MOU dengan pengusaha hasil bumi
NGK.Data.14	Kelompok tani yang menerapkan sistim pertanian terpadu	Prosentasi kelompok tani yang menerapkan sistim pertanian terpadu	Dinas Pertanian	Program Kelompok tani yang menerapkan sistem terpadu	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03. Data Pertanian	RAD.02.03.04. Data Prosentasi kelompok tani yang

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
							menerapkan sistim pertanian terpadu
NGK.Data.15	Prosentase Pengembangan Budidaya Perikanan	Prosentase jumlah produksi perikanan budidaya dan non budidaya; jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan	RAD.02.06.01. Data jumlah produksi perikanan budidaya dan non budidaya; jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat
NGK.Data.16	Prosentase Peningkatan Ketahanan Pangan	Prosentase kesediaan pangan utama dan ketersediaan energi dan protein per kapita	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	RAD.02. Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06. Data Perikanan	RAD.02.06.02. Data kesediaan pangan utama dan ketersediaan energi dan protein per kapita

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
NGK.Data.17	Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan ,saluran drainase,dan bronjong yang terbagun dan terpelihara	Dinas PU dan Penataan Ruang	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapnya	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01. Data Panjang jalan dan jembatan ,saluran drainase,dan bronjong yang terbagun dan terpelihara
NGK.Data.18	Sarana,prasarana dan pembinaan jasa konstruksi	Persentase peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruks dalam kondisi baik	Dinas PU dan Penataan Ruang	Program peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruksi	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.02. Data Persentase peningkatan sarana, prasarana dan pembinaan jasa konstruks dalam kondisi bai
NGK.Data.19	Sumber Daya Air	Persentase jaringan pengairan, sungai, waduk,benduk, dan	Dinas PU dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber daya air	RAD.03. Informasi	RAD.03.01. Data	RAD.03.01.03. Data Persentase jaringan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
		luas genangan dalam kondisi baik			Pembangunan Kewilayahan	Pekerjaan Umum	pengairan, sungai, waduk,benduk, dan luas genangan dalam kondisi baik
NGK.Data.20	Tata Bangunan	Jumlah fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Dinas PU dan Penataan Ruang	Program Tata Bangunan	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.04. Data Jumlah fasilitas umum dan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik
NGK.Data.21	Tata Ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dan jumlah dokumen yang tersusun	Dinas PU dan Penataan Ruang	Program Tata ruang	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.05. Data Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
							jumlah dokumen yang tersusun
NGK.Data.22	pendataan, perencanaan, dan pengendalian teknis dan pengadaan tanah	Persentase realisasi pengadaan tanah, database infrastruktur yang terupdate	Dinas PU dan Penataan Ruang	Program pendataan, perencanaan, dan pengendalian teknis dan pengadaan tanah	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01. Data Pekerjaan Umum	RAD.03.03.06. Data Persentase realisasi pengadaan tanah, database infrastruktur yang terupdate
NGK.Data.23	Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Penyediaan Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05. Data Pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.01. Data Penyediaan Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan
NGK.Data.24	Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah layak huni dan terjangkau,Ketersedia	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04. Data Perumahan	RAD.03.04.01. Data Persentase rumah layak huni dan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
		an rumah akibat bencana alam/sosial, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU					terjangkau,Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU
NGK.Data.25	Pelayanan Angkutan	Pelaksanaan Transportasi terlaksana dengan optimal	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03. Data Transportasi	RAD.03.03.01. Data Pelaksanaan Transportasi terlaksana dengan optimal
NGK.Data.26	Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan wajib uji yang lulus uji	Dinas Perhubungan	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03. Data Transportasi	RAD.03.03.02. Data Jumlah Kendaraan wajib uji yang lulus uji

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
NGK.Data.27	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03. Data Transportasi	RAD.03.03.03. Data Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik
NGK.Data.28	Pembangunan, Pemeliharaan, Fasilitas Umum	Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan, Pemeliharaan, Fasilitas Umum	RAD.03. Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03. Data Transportasi	RAD.03.03.04. DataPersentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik
NGK.Data.29	Perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial	Persentase penanganan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	Program Perlindungan jaminan dan rehabilitasi sosial	RAD.04. Informasi Perlindungan sosial dan kesehatan	RAD.04.02. Data Sosial	RAD.04.02.01. Data Persentase penanganan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
NGK.Data.30	Pemberdayaan sosial dan	Persentase pelayanan PMKS	Dinas Sosial, pemberdayaan	Program Pemberdayaan sosial	RAD.04. Informasi Perlindungan	RAD.04.02. Data Sosial	RAD.04.02.02. Data Persentase

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
	kesejahteraan masyarakat		perempuan dan Perlindungan anak	dan kesejahteraan masyarakat	sosial dan kesehatan		pelayanan PMKS
NGK.Data.31	Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer Terakreditasi	Dinas Kesehatan/RSUD	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RAD.04. Informasi Perlindungan sosial dan kesehatan	RAD.04.01. Data Kesehatan	RAD.04.01.01. Data Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Primer Terakreditasi
NGK.Data.32	Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani	Kantor kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat	Program penanganan konflik dan kewaspadaan nasional	RAD.05. Informasi ketertiban umum dan keselamatan	RAD.05.02. Data Keamanan	RAD.05.02.01. Data Persentase konflik sosial yang tertangani
NGK.Data.33	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	RAD.05. Informasi ketertiban	RAD.05.03. Data Hak Asasi Manusia	RAD.05.01.01. Data Persentase penyelesaian gangguan

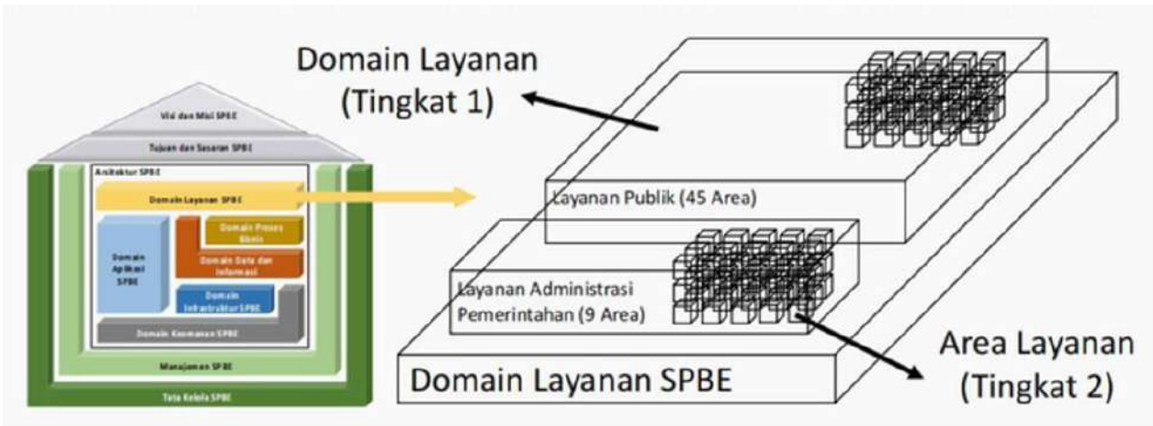
ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
		ketentraman dan ketertiban umum			umum dan keselamatan		ketentraman dan ketertiban umum
NGK.Data.34	Pembinaan/Penyuluhan Hukum	Persentase sosialisasi di bidang hukum yang dilaksanakan dengan baik	Sekretarian Daerah	Program Pembinaan/Penyuluhan Hukum	RAD.05. Informasi ketertiban umum dan keselamatan	RAD.05.01. Data Hukum	RAD.05.01.01. Data Persentase sosialisasi di bidang hukum yang dilaksanakan dengan baik
NGK.Data.35	Pegelolaan aplikasi informatika	Jumlah Implementasi Sistem Informasi	Diskominfo	Program Pegelolaan aplikasi informatika	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.03. Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	RAD.06.03.01. Data Jumlah Implementasi Sistem Informasi
NGK.Data.36	akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	nilai aspek pelaporan kinerja dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sekretariat Daerah	Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02. Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01. Data nilai aspek pelaporan kinerja dalam hasil evaluasi

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
							akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
NGK.Data.37	Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase SD/SMP yang Memiliki Akreditasi ≥B	Dinas Pendidikan	Program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	RAD.06. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01. Data Pendidikan	RAD.06.01.01. Data Prosentase SD/SMP yang Memiliki Akreditasi ≥B
NGK.Data.38	Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	RAD.07. Informasi Lingkungan dan Sumber daya Alam	RAD.07.05. Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01. Data Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan hidup
NGK.Data.39	Nilai dan Pengelolaan	Persentase benda, situs dan kawasan	Dinas Pariwisata,kepemudaa	Program Pengembangan Nilai	RAD.08. Informasi	RAD.08.02. Data Kebudayaan	RAD.08.02.01. Data Persentase benda, situs dan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Produsen Data	Proses Bisnis	RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2	RAD Tingkat 3
	Keragaman Budaya	cagar budaya yang dilestarikan	n ,olahraga, dan Kebudayaan	dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Budaya dan Agama		kawasan cagar budaya yang dilestarikan

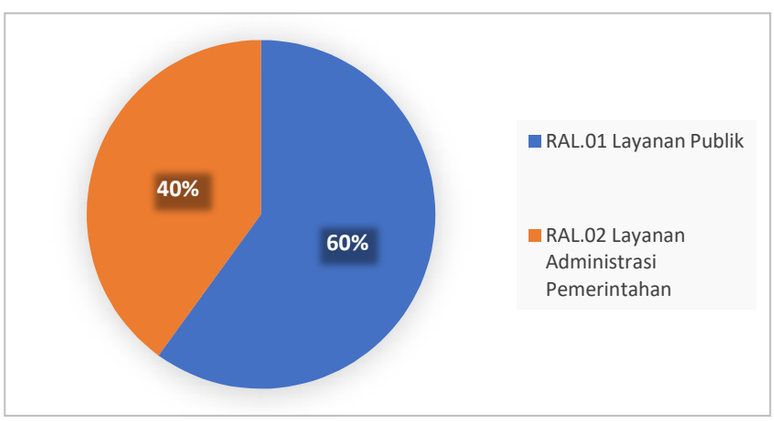
BAB 5 DOMAIN ARSITEKTUR LAYANAN

Domain arsitektur Layanan memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional, tingkat 3 dan seterusnya adalah di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur proses bisnis tingkat nasional dengan ilustrasi pada Gambar 4.1.

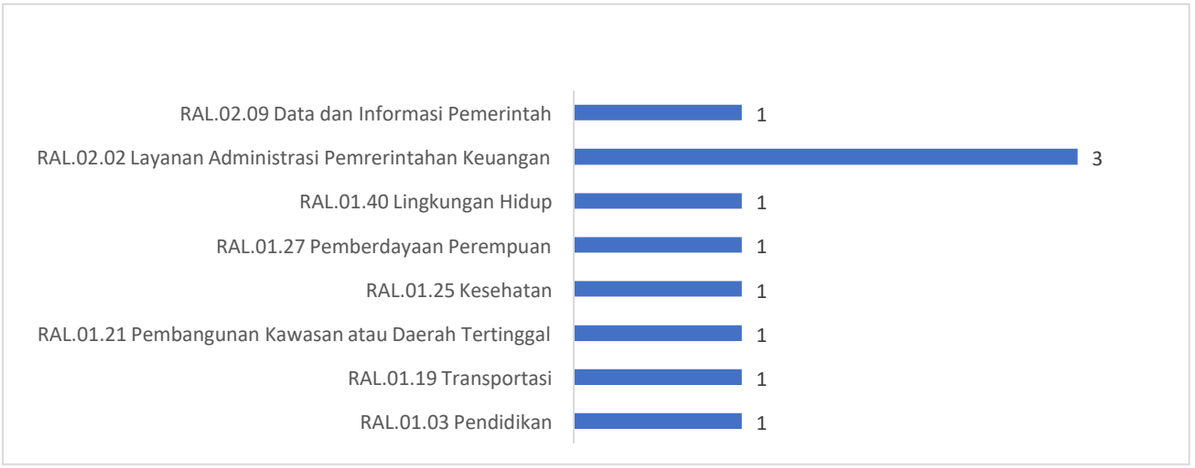


5.1. Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsitektur Layanan Tingkat Nasional

Domain arsitektur Layanan pada Level 1 di Kabupaten Nganjuk yang terbanyak adalah RAL 0.1. Layanan Publik sebesar 60% dan RAL 0.2. Layanan Administrasi Pemerintahan sebesar 60% (Gambar 5.2.). RAL Level 2 menunjukkan jumlah terbesar adalah RAL 0.2.02. Layanan Administrasi Pemerintahan dan Keuangan sebanyak 3 layanan (Gambar 5.3.).



5.2 Referensi Arsitektur Layanan Level 1



5.3 Referensi Arsitektur Layanan Level 2

Domain arsitektur Layanan tersusun atas komponen ID Layanan, Nama Layanan, Unit Pelaksana Layanan, Proses Bisnis, RAL Level 1, RAL Level 2 dan RAL Level 3. Penyusunan domain Layanan berdasarkan pada kegiatan pemerintahan yang dirumuskan dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah seperti pada Tabel 5.1.

Tabel.5.1. Referensi Arsitektur Layanan Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Proses Bisnis	RAL Nasional	RAL Level 2	RAL Level 3
NGK. Layanan .01	Layanan penyusunan penganggaran (APBD dan P. APBD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02. Layanan Administrasi Pemerintahan Keuangan	RAL.02.02.01. Layanan penyusunan penganggaran (APBD dan P. APBD)
NGK. Layanan .02	Pelayanan penerimaan PAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program penagihan dan penerimaan pendapatan asli daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02. Layanan Administrasi Pemerintahan Keuangan	RAL.02.02.02. Layanan penerimaan PAD
NGK. Layanan .03	Layanan Penyususnan LKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02. Layanan Administrasi Pemerintahan Keuangan	RAL.02.02.02. Layanan Penyususnan LKPD

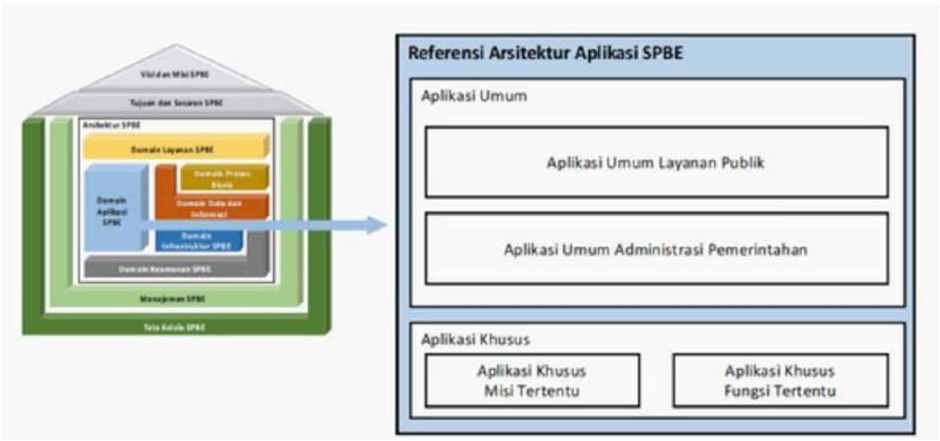
ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Proses Bisnis	RAL Nasional	RAL Level 2	RAL Level 3
NGK. Layanan .04	Layanan kebutuhan data dan statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL.02.09.01. Layanan Layanan kebutuhan data dan statistik sektoral
NGK. Layanan .05	Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC	Dinas kesehatan/RSUD	Program Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL.01.25.01. Layanan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC
NGK. Layanan .06	Layanan perlindungan perempuan dan anak	Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak	Program perlindungan perempuan dan anak	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.27. Pemberdayaan Perempuan	RAL.01.27.01. Layanan Perlindungan perempuan dan anak

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Proses Bisnis	RAL Nasional	RAL Level 2	RAL Level 3
NGK. Layanan .07	Layanan Penyediaan Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL.01.21.01. Layanan Penyediaan Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan
NGK. Layanan .08	Pelayanan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman Perkotaan dan Perdesaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL.01.40. 01.Layanan Air Minum
NGK. Layanan .09	Pelayanan transportasi	Dinas Perhubungan	Program peningkatan pelayanan angkutan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL.01.19.01. Layanan Transportasi
NGK. Layanan .10	Layanan kunjungan ke perpustakaan	Dinas kerasipan dan perpustakaan	Program pengembangan budaya baca dan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	RAL. 01.03.01. Layanan

ID Layanan	Nama Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Proses Bisnis	RAL Nasional	RAL Level 2	RAL Level 3
			pembinaan perpustakaan			Kunjungan ke perpustakaan

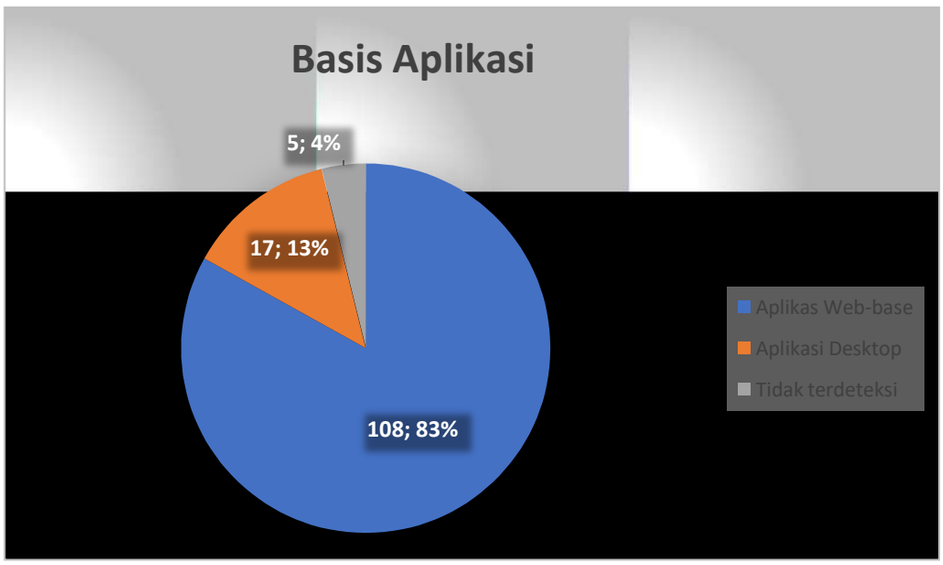
BAB 6 DOMAIN ARSITEKTUR APLIKASI

Domain aplikasi SPBE memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama), dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional, serta tingkat 3 (tiga) dan seterusnya merupakan tingkat daerah/kabupaten/kota.



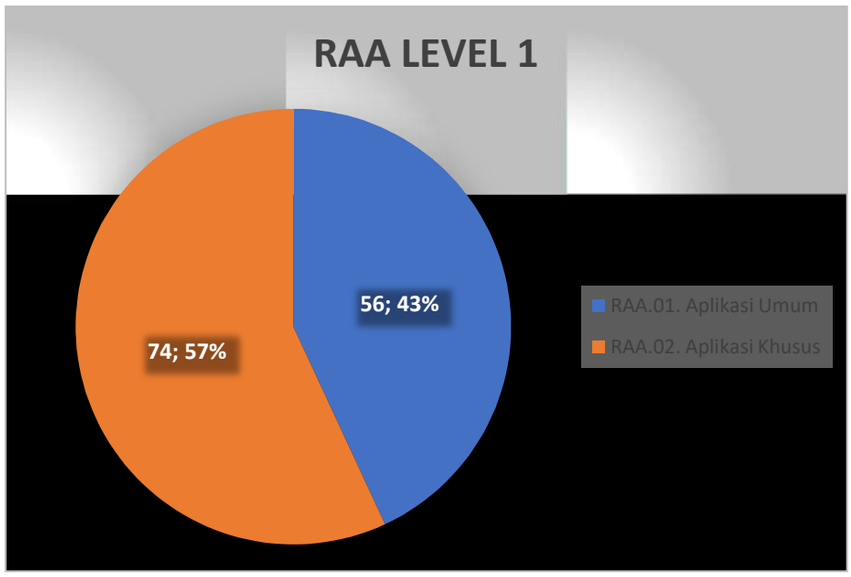
Gambar 6.1. Kerangka Kerja dan Struktur Referensi Arsiterktur Aplikasi SPBE

Aplikasi yang ada di seluruh OPD Kabupaten Nganjuk terdiri dari aplikasi berbasis web sebesar 36.84% dan aplikasi berbasis desktop sebesar 2.16% (Gambar 6.2.).

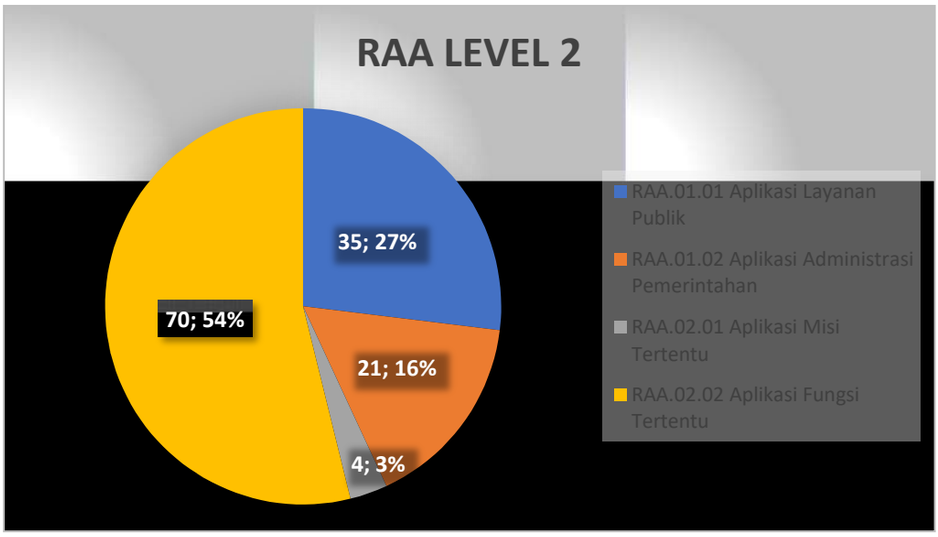


Gambar 6.2. Klasifikasi Aplikasi di OPD Kabupaten Nganjuk berbasis Web dan Desktop

Berdasarkan pada struktur referensi arsitektur SPBE, aplikasi di OPD Kabupaten Nganjuk diklasifikasikan menjadi 2 kategori yaitu RAA.01. aplikasi umum sebesar 21.51% dan RAA.02. aplikasi khusus 20.51% (Gambar 6.3.).



Gambar 6.3. Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum di OPD Kabupaten Nganjuk



Gambar 6.4. Prosentase Aplikasi Fungsi Tertentu, Layanan Publik dan AdministrasiPemerintahan di OPD Kabupaten Nganjuk

Domain arsitektur layanan Aplikasi tersusun atas komponen ID Aplikasi, Nama Aplikasi, Tingkatan Referensi Nasional Arsitektur Layanan Aplikasi Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 2, dan Unit Kerja berdasarkan pada kegiatan pemerintahan yang dirumuskan dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 6.1. Referensi Arsitektur Aplikasi Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.01	Aplikasi Management Surat (AMS)	Pencatatan surat masuk dan keluar	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.02	SIMRS Khanza	Pelayanan di RSD Kertosono	Desktop			Dinas Kesehatan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.03	SI-MERGAWE	Memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan	Web-base			Dinas Tenaga Kerja	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.04	Srikandi	Surat menyurat	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.05	Sirup	Pengadaan Barang/Jasa	Web-base			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.06	Simas	Aplikasi kepegawaian dan database kepegawaian ASN kab.Nganjuk	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.07	Simbak	Penilaian Kinerja ASN	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.08	Aplikasi Presensi	Untuk Mengelola Kehadiran Pegawai	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.09	Aplikasi P3DN	pengawasan TKDN	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.10	Simaset	Sebagai Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, Sistim Informasi keuangan daerah, Sistem informasi pemerintah daerah lainnya	Desktop			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.11	Sukma E-Jatim	sistem untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
		penyelenggaraan pelayanan publik						
NGK.APP.12	SIPD	berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien	Web-base			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.13	E-Katalog	sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	Web-base			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.14	LPSE Bagian umum(Sekretariat)	Mengelola sistem e-Procuremen	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.15	Simda (Bagian Keuangan)	sistem informasi keuangan daerah	Desktop			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.16	Sedudo	Aktifitas pengiriman data secara online	Web-base			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.17	SP4n Lapor	Aktifitas pengiriman data secara online	Web-base			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.18	Aplikasi LHKPN	pelaporan harta kekayaan pejabat	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.19	Lasmini					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.20	Salipuk					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.21	Wablas					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.22	SIAK					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.23	E-KIR nganjuk					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.24	SIKN	Sistem Informasi kearsipan	Desktop/Web-based/Mobile			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.25	EPUSDA NGANJUK	Layanan perpustakaan secara online	Mobile/Desktop			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.26	E-Tax : e-SPTPD	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.27	E-Tax : SIMPATDA	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.28	E-Tax : e-SPPT	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.29	E-Tax : e-BPHTB	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.30	E-Tax : e-Dashboard	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.31	E-Tax : e-KSWP	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.32	E-Tax : e-Setoran	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.33	SIM PBB P2	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Desktop			Badan Pendapatan Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu
NGK.APP.34	Si Omah	Penerbitan rekomendasi site plan dan penyerahan PSU Perumahan dari	Web-base			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
		Pengembang/developer kepada Pemda						
NGK.APP.35	SIASN	usulan pelayanan kepegawaian	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.36	SIJAPTI	usulan rotasi mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.37	E-MUTASI	Usulan mutasi ASN	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu
NGK.APP.38	SIAPP	usulan pangkat pensiun, jabatan fungsional untuk golongan utama	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.39	Internet Banking	transaksi keuangan	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.40	PPID	PPID adalah kepanjangan dari	Web-base			Seluruh OPD	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.						Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.41	E-Formasi	Usulan Pengdaan ASN	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu
NGK.APP.42	SSCASN	Portal pengadaan pendaftaran ASN	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.43	DJP Online	pelaporan pajak	Web-base			Dinas Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.44	SIM DTH	Pelaporan daftar transaksi harian	Web-base			Badan Pengelolah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
						Keuangan dan Aset Daerah		Layanan Publik
NGK.APP.45	SIM SKPP	Penerbitan Suket pembayaran gaji sementara	Web-base			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu
NGK.APP.46	Sitara	Menonaktifkan pegawai pensiun	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.47	SIM-Gaji	Sebagai Sistem informasi Penggajian ASN di Kabupaten Nganjuk	Desktop			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.48	Simbal	Sebagai Sistem informasi Kendaraan dinas di Kab. Nganjuk	Web-base			Dinas Perhubungan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.49	E- Budgeting	Sistem informasi Penganggaran	Web-base			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.50	Siskudes	Sistem Informasi Keuangan Desa	Desktop			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.51	E-Proposal	Proposal Online	Desktop			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.52	OMSPAM	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	Web-base			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.53	SIMPatda	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan	Web-base			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.54	PUPNS	Pendataan ulang PNS	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.55	SIMKepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.56	JDIH	Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum	Web-base			Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.57	E-Agendaris	Sistem Informasi Pengagendaan	Desktop			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.58	E-Register Surat Tugas	Sistem informasi surat tugas	Desktop			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.59	LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan	Desktop			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.60	SPM	Standar Pelayanan Minimal	Desktop			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.61	SKM	Survei Kepuasan Masyarakat	Web-base			Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.62	PING	Portal Informasi Nganjuk	Web-base			Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.63	PIP	Pendidikan	Web-base			Dinas Pendidikan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.64	Pendaftaran Rawat Jalan	Kesehatan	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.65	Cek Ketersediaan kamar	Kesehatan	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.66	FANLAB	Kesehatan	Desktop			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.67	Applycare	Kesehatan	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.68	Bansos	Sosial	Web-base			Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.69	Daftar Mandiri DTKS	Sosial	Web-base			Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.70	Layanan Data Kesehatan	Sosial	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.71	SIPentol	Perizinan	Web-base			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.72	Simplemanjar	Penelitian	Web-base			Dinas Pendidikan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.73	E-KTP	Kependudukan	Desktop			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.74	Peminjaman Buku	Perpustakaan	Desktop			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.75	WadulBupati	Pengaduan Masyarakat	Web-base			Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.76	Dumas	Pengaduan Masyarakat	Web-base			Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.77	Si tindak lanjut	Pengaduan Masyarakat	Desktop			Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
						Perlindungan Anak		Layanan Publik
NGK.APP.78	SMILE	Sistem Management Informasi dan Pelaporan elektronik	Web-base			Dinas Komunikasi dan Informasi	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.79	Brambang	Pertanian	Web-base			Dinas Pertanian	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.80	SIPertan	Pertanian	Web-base			Dinas Pertanian	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.81	Web Sekretariat Daerah	Web Sekretariat Daerah	Web-base			Sekretariat daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.82	Web Sekretariat DPRD	Web Sekretariat DPRD	Web-base			Sekretariat DPRD	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.83	Web Inspektorat Daerah	Web Inspektorat Daerah	Web-base			Inspektorat Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.84	Web Dinas Pendidikan	Web Dinas Pendidikan	Web-base			Dinas Pendidikan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
								Fungsi Tertentu
NGK.APP.85	Web Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan ; dan Pariwisata	Web Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan ; dan Pariwisata	Web-base			Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan ; dan Pariwisata	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.86	Web Dinas Kesehatan	Web Dinas Kesehatan	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.87	Web Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Web Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Web-base			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.88	Web Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Web Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Web-base			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.89	Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web-base			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.90	Web Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Web Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Web-base			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.91	Web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Web-base			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.92	Web Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Web Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Web-base			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.93	Web Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Web Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Web-base			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.94	Web Dinas Tenaga Kerja	Web Dinas Tenaga Kerja	Web-base			Dinas Tenaga Kerja	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.95	Web Dinas Komunikasi dan Informatika	Web Dinas Komunikasi dan Informatika	Web-base			Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.96	Web Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Web Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Web-base			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.97	Web Dinas Perhubungan	Web Dinas Perhubungan	Web-base			Dinas Perhubungan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.98	Web Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Web Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Web-base			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.99	Web Dinas Lingkungan Hidup	Web Dinas Lingkungan Hidup	Web-base			Dinas Lingkungan Hidup	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.100	Web Dinas Pertanian	Web Dinas Pertanian	Web-base			Dinas Pertanian	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.101	Web Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Web Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Web-base			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.102	Web Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Web Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Web-base			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.103	Web Satuan Polisi Pamong Praja	Web Satuan Polisi Pamong Praja	Web-base			Satuan Polisi Pamong Praja	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.104	Web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Web-base			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.105	Web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Web-base			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.106	Web Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Web Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Web-base			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.107	Web Badan Pendapatan Daerah	Web Badan Pendapatan Daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.108	Web Badan Kepegawaian dan	Web Badan Kepegawaian dan	Web-base			Badan Kepegawaian dan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia				Pengembangan Sumber Daya Manusia		Fungsi Tertentu
NGK.APP.109	Web Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Web Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Web-base			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.110	Web Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Web Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Web-base			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.111	Web Kecamatan Bagor	Web Kecamatan Bagor	Web-base			Kecamatan Bagor	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.112	Web Kecamatan Baron	Web Kecamatan Baron	Web-base			Kecamatan Baron	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.113	Web Kecamatan Berbek	Web Kecamatan Berbek	Web-base			Kecamatan Berbek	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.114	Web Kecamatan Gondang	Web Kecamatan Gondang	Web-base			Kecamatan Gondang	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

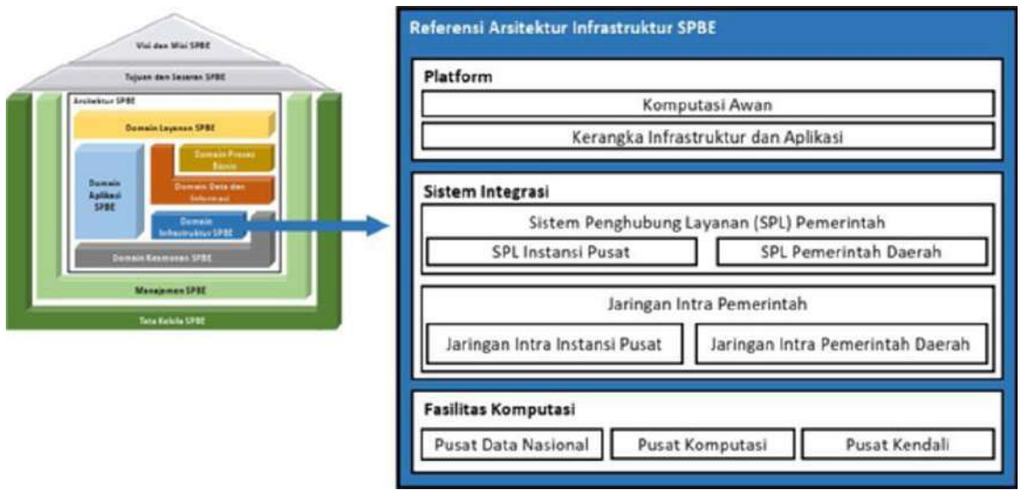
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.115	Web Kecamatan Jatikalen	Web Kecamatan Jatikalen	Web-base			Kecamatan Jatikalen	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.116	Web Kecamatan Kertosono	Web Kecamatan Kertosono	Web-base			Kecamatan Kertosono	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.117	Web Kecamatan Lengkong	Web Kecamatan Lengkong	Web-base			Kecamatan Lengkong	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.118	Web Kecamatan Loceret	Web Kecamatan Loceret	Web-base			Kecamatan Loceret	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.119	Web Kecamatan Nganjuk	Web Kecamatan Nganjuk	Web-base			Kecamatan Nganjuk	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.120	Web Kecamatan Ngetos	Web Kecamatan Ngetos	Web-base			Kecamatan Ngetos	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.121	Web Kecamatan Ngluyu	Web Kecamatan Ngluyu	Web-base			Kecamatan Ngluyu	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.122	Web Kecamatan Ngronggot	Web Kecamatan Ngronggot	Web-base			Kecamatan Ngronggot	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.123	Web Kecamatan Pace	Web Kecamatan Pace	Web-base			Kecamatan Pace	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.124	Web Kecamatan Patianrowo	Web Kecamatan Patianrowo	Web-base			Kecamatan Patianrowo	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.125	Web Kecamatan Prambon	Web Kecamatan Prambon	Web-base			Kecamatan Prambon	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.126	Web Kecamatan Rejoso	Web Kecamatan Rejoso	Web-base			Kecamatan Rejoso	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.127	Web Kecamatan Sawahan	Web Kecamatan Sawahan	Web-base			Kecamatan Sawahan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.128	Web Kecamatan Sukomoro	Web Kecamatan Sukomoro	Web-base			Kecamatan Sukomoro	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.129	Web Kecamatan Tanjunganom	Web Kecamatan Tanjunganom	Web-base			Kecamatan Tanjunganom	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.130	Web Kecamatan Wilangan	Web Kecamatan Wilangan	Web-base			Kecamatan Wilangan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

BAB 7 DOMAIN ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR

Domain infrastruktur SPBE memiliki struktur dengan 3 (tiga) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan stmktur di tingkat nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan referensi arsitektur infrastruktur tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) dan seterusnya. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional adalah sebagaimana seperti pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat Nasional

Tabel.7.1. Referensi Arsitektur Infrastuktur Berdasarkan pada Layanan Aplikasi Kab. Nganjuk

ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
NGK.AI.01	Aplikasi Management Surat (AMS)	Pencatatan surat masuk dan keluar	Sekretariat Daerah	RAI.01.01.01. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.01. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.01. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.02	SIMRS Khanza	Pelayanan di RSD Kertosono	Dinas Kesehatan	RAI.01.01.02. Pusat Data Nasional	RAI.02.02.02. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.02. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.03	SI-MERGAWE	Memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan	Dinas Tenaga Kerja	RAI.01.01.03. Pusat Data Nasional	RAI.02.02.03. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.03. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.04	Srikandi	Surat menyurat	Sekretariat Daerah	RAI.01.01.04. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.04. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.04. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.05	Sirup	Pengadaan Barang/Jasa	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.01.02.05. Pusat Komputasi	RAI.02.02.05. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.05. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.06	Simas	Aplikasi kepegawaian dan database	Badan Kepegawaian dan	RAI.01.01.06. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.06. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.06. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi

ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
		kepegawaian ASN kab.Nganjuk	Pengembangan SDM			
NGK.AI.07	Simbak	Penilaian Kinerja ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.03.07. Pusat Kendali	RAI.02.02.07. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.07. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.08	Aplikasi Presensi	Untuk Mengelola Kehadirin Pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.03.08. Pusat Data Kendali	RAI.02.01.08. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.08. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.09	Aplikasi P3DN	pengawasan TKDN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.03.09. Pusat Kendali	RAI.02.01.09. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.09. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.10	SIMASET	Sistem informasi perencanaan keuangan daerah	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAI.01.02.10. Pusat Komputasi	RAI.02.02.10. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.10. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.11	Sukma E-Jatim	sistem untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.02.11. Pusat Komputasi	RAI.02.02.11. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.11. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi

ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
		penyelenggaraan pelayanan publik				
NGK.AI.12	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.02.12. Pusat Komputasi	RAI.02.02.12. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.12. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.13	E-Katalog	sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAI.01.01.13. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.13. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.13. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.14	LPSE Bagian umum (Sekretariat)	Mengelola sistem e-Procurement	Sekretariat Daerah	RAI.01.02.14. Pusat Komputasi	RAI.02.02.14. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.14. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.15	Sitem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	Sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	RAI.01.02.15. Pusat Komputasi	RAI.02.02.15. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.15. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi

ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
NGK.AI.16	Sedudo	Aktifitas pengiriman data secara online	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAI.01.02.16. Pusat Komputasi	RAI.02.02.16. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.16. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.17	SP4n Lapor	Aktifitas pengiriman data secara online	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAI.01.02.17. Pusat Komputasi	RAI.02.02.17. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.17. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.18	Aplikasi LHKPN	pelaporan harta kekayaan pejabat	Sekretariat Daerah	RAI.01.03.18. Pusat Kendali	RAI.02.01.18. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.18. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.19	Lasmini		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAI.01.01.19. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.19. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.19. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.20	Salipuk		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAI.01.01.20. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.20. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.20. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.21	Wablas		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAI.01.01.21. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.21. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.21. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.22	SIAK		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAI.01.01.22. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.22. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.22. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi

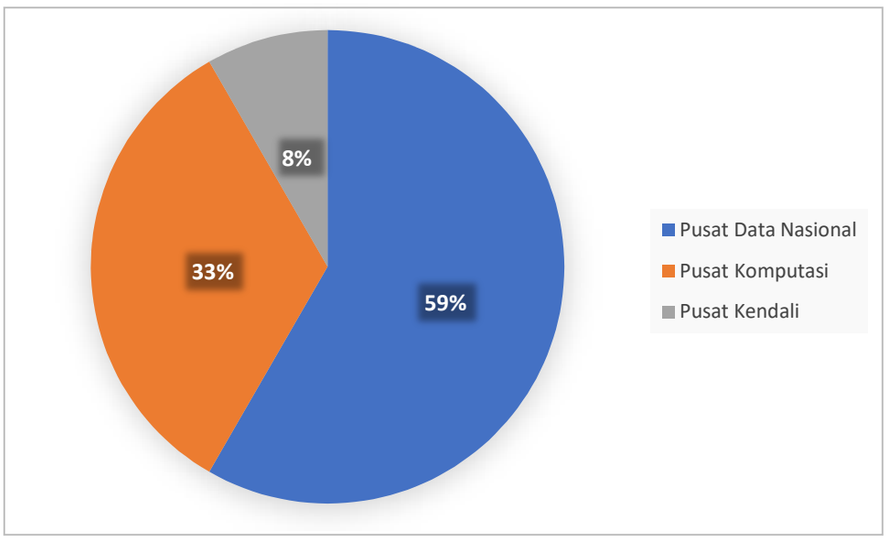
ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
NGK.AI.23	E-KIR nganjuk		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAI.01.01.23. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.23. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.23. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.24	SIKN	Sistem Informasi kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAI.01.01.24. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.24. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.24. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.25	EPUSDA NGANJUK	Layanan perpustakaan secara online	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAI.01.01.25. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.25. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.25. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.26	E-Tax : e-SPTPD	Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.02.26. Pusat Komputasi	RAI.02.02.26. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.26. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.27	E-Tax : SIMPATDA	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.02.27. Pusat Komputasi	RAI.02.02.27. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.27. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.APP.28	E-Tax : e-SPPT	Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.01.28. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.28. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.28. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.29	E-Tax : e-BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.02.29. Pusat Komputasi	RAI.02.02.29. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.29. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi

ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
NGK.AI.30	E-Tax : e-Dashboard	Aplikasi untuk visualisasi informasi pendapatan daerah	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.01.30. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.30. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.30. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.31	E-Tax : e-KSWP	Elektronik Konfirmasi Status Wajib Pajak	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.01.31. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.31. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.31. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.32	E-Tax : e-Setoran	Media pelaporan retribusi daerah secara online	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.01.32. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.32. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.32. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.33	SIM PBB P2	Sistem informasi untuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.02.33. Pusat Komputasi	RAI.02.02.33. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.33. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.34	Si Omah	Penerbitan rekomendasi site plan dan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang/developer kepada Pemda	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	RAI.01.01.31. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.31. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.31. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.35	SI-ASN	Sistem Informasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.01.35. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.35. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.35. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi

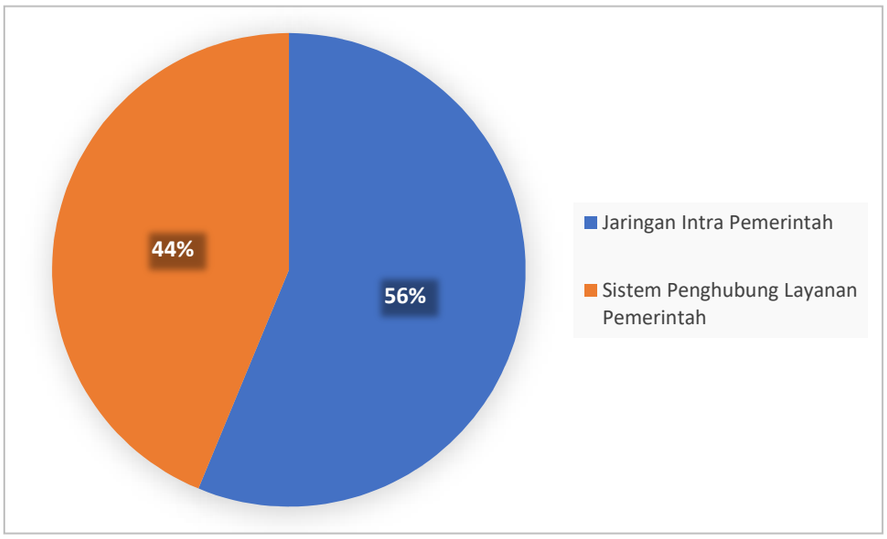
ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
NGK.AI.36	SIJAPTI	Sistem informasi untuk usulan rotasi mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.01.36. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.36. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.36. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.37	E-MUTASI	Sistem informasi untuk pengusulan mutasi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.01.37. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.37. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.37. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.38	SIAPP	Sistem informasi usulan kepangkatan pensiun, jabatan fungsional untuk golongan utama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.01.38. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.38. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.38. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.39	Internet Banking	Sistem informasi untuk transaksi perbankan di lingkungan pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah	RAI.01.02.39. Pusat Komputasi	RAI.02.02.39. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.39. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.40	PPID	Sistem informasi untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Seluruh OPD	RAI.01.01.40. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.40. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.40. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi

ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
NGK.AI.41	E-Formasi	Usulan Pengadaan ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.01.41. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.41. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.41. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.42	SSCASN	Portal pengadaan pendaftaran ASN	Sekretariat Daerah	RAI.01.01.42. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.42. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.42. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.43	DJP Online	pelaporan pajak	Dinas Pendapatan Daerah	RAI.01.02.43. Pusat Komputasi	RAI.02.02.43. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.43. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.44	SIM DTH	Pelaporan daftar transaksi harian	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAI.01.02.44. Pusat Komputasi	RAI.02.02.44. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.44. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.APP.45	SIM SKPP	Penerbitan Suket pembayaran gaji sementara	Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAI.01.02.45. Pusat Komputasi	RAI.02.02.45. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.45. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.APP.46	Sitara	Menonatifkan pegawai pensiun	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.01.46. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.46. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.46. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi

ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Unit Operasional	Fasilitas Komputasi	Sistem Integrasi	Platform
NGK.AI.47	SIM-Gaji	Sebagai Sistem informasi Penggajian ASN di Kabupaten Nganjuk	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAI.01.02.47. Pusat Komputasi	RAI.02.02.47. Sistem Penghubung l.ayanan Pemerintah	RAI.03.01.47. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi
NGK.AI.48	Simbal	Sebagai Sistem informasi Kendaraan dinas di Kab. Nganjuk	Dinas Perhubungan	RAI.01.01.48. Pusat Data Nasional	RAI.02.01.48. Jaringan Intra Pemerintah	RAI.03.01.48. Kerangka dan Infrastruktur Aplikasi



Gambar 7.2. Prosentase Fasilitas Komputasi Arsitektur Infrastruktur

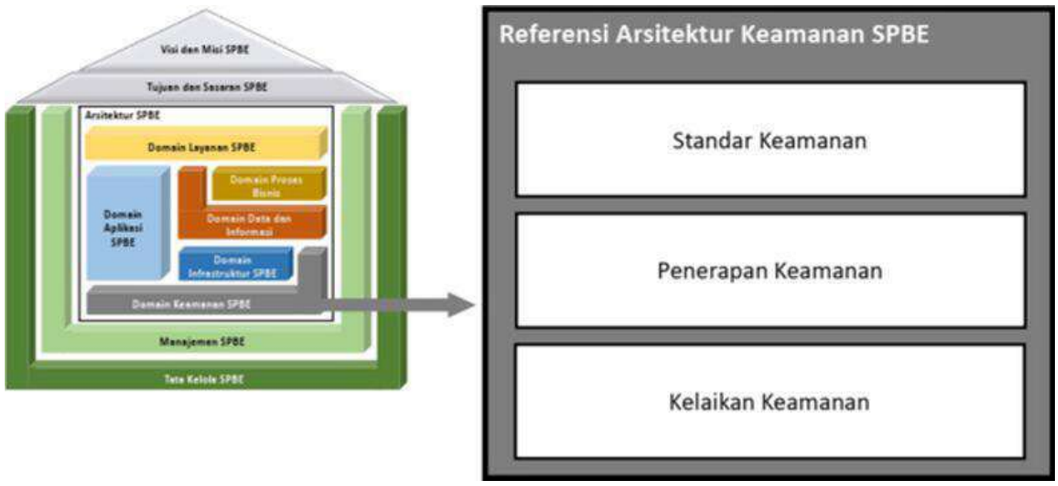


Gambar 7.3. Prosentase Sistem Integrasi pada Arsitektur Infrastruktur

Semua sistem informasi atau aplikasi menggunakan platform Kerangka Infrastruktur Aplikasi, tidak ada yang menggunakan platform Komputasi Awan. Layer ini merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar platform lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di atasnya.

BAB 8 DOMAIN ARSITEKTUR KEAMANAN

Domain keamanan memiliki struktur dengan 2 (dua) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di tingkat nasional. Referensi arsitektur keamanan SPBE terdiri dari komponen standar keamanan, penerapan keamanan, dan kelaikan keamanan sebagaimana disajikan pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Tabel.8.1. Referensi Arsitektur Keamanan Informasi Berdasarkan pada Layanan Aplikasi Kab. Nganjuk

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
NGK.KI.01	NGK.APP.01	NGK.AI.01	Aplikasi Management Surat (AMS)	01.03.01. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.01.Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.01.Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.02	NGK.APP.02	NGK.AI.02	SIMRS Khanza	01.03.02. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.02.Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.02.Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.03	NGK.APP.03	NGK.AI.03	SI-MERGAWE	01.03.03. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.03. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.03. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.04	NGK.APP.04	NGK.AI.04	SRIKANDI	01.01.04. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.04. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.04. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.05	NGK.APP.05	NGK.AI.05	SIRUP	01.01.05. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.05. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.05. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.06	NGK.APP.06	NGK.AI.06	SIMAS	01.03.06. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.06. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.06. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.07	NGK.APP.07	NGK.AI.07	SIMBAK	01.03.07. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.07. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.07. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.08	NGK.APP.08	NGK.AI.08	Aplikasi Presensi	01.03.08. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.08. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.08. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.09	NGK.APP.09	NGK.AI.09	Aplikasi P3DN	01.01.09. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.09. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.09. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.10	NGK.APP.10	NGK.AI.10	SIMASET	01.03.10. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.10. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.10. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.11	NGK.APP.11	NGK.AI.11	Sukma E-Jatim	01.03.11. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.11. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.11. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.12	NGK.APP.12	NGK.AI.12	SIPD	01.01.12. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.12. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.12. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.13	NGK.APP.13	NGK.AI.13	E-Katalog	01.01.13. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.13. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.13. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.14	NGK.APP.14	NGK.AI.14	LPSE Bagian umum(Sekretariat)	01.01.14. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.14. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.14. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.15	NGK.APP.15	NGK.AI.15	SIMDA (Bagian Keuangan)	01.01.15. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.15. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.15. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.16	NGK.APP.16	NGK.AI.16	SEDUDO	01.03.16. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.16. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.16. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.17	NGK.APP.17	NGK.AI.17	SP4n Lapor	01.01.17. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.17. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.17. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.18	NGK.APP.18	NGK.AI.18	Aplikasi LHKPN	01.01.18. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.18. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.18. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.19	NGK.APP.19	NGK.AI.19	Lasmini	01.03.19. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.19. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.19. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.20	NGK.APP.20	NGK.AI.20	Salipuk	01.03.20. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.20. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.20. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.21	NGK.APP.21	NGK.AI.21	Wablas	01.03.21. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.21. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.21. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.22	NGK.APP.22	NGK.AI.22	SIAK	01.03.22. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.22. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.22. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.23	NGK.APP.23	NGK.AI.23	E-KIR nganjuk	01.03.23. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.23. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.23. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.24	NGK.APP.24	NGK.AI.24	SIKN	01.03.24. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.24. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.24. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.25	NGK.APP.25	NGK.AI.25	EPUSDA NGANJUK	01.03.25. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.25. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.25. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.26	NGK.APP.26	NGK.AI.26	E-Tax : e-SPTPD	01.03.26. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.26. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.26. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.27	NGK.APP.27	NGK.AI.27	E-Tax : SIMPATDA	01.03.27. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.27. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.27. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.28	NGK.APP.28	NGK.APP.28	E-Tax : e-SPPT	01.03.28. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.28. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.28. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.29	NGK.APP.29	NGK.AI.29	E-Tax : e-BPHTB	01.03.29. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.29. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.29. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.30	NGK.APP.30	NGK.AI.30	E-Tax : e-Dashboard	01.03.30. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.30. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.30. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.31	NGK.APP.31	NGK.AI.31	E-Tax : e-KSWP	01.03.31. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.31. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.31. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.32	NGK.APP.32	NGK.AI.32	E-Tax : e-Setoran	01.03.32. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.32. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.32. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.33	NGK.APP.33	NGK.AI.33	SIM PBB P2	01.03.33. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.33. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.33. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.34	NGK.APP.34	NGK.AI.34	Si Omah	01.03.34. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.34. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.34. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.35	NGK.APP.35	NGK.AI.35	SIASN	01.03.35. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.35. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.35. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.36	NGK.APP.36	NGK.AI.36	SIJAPTI	01.03.36. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.36. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.36. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

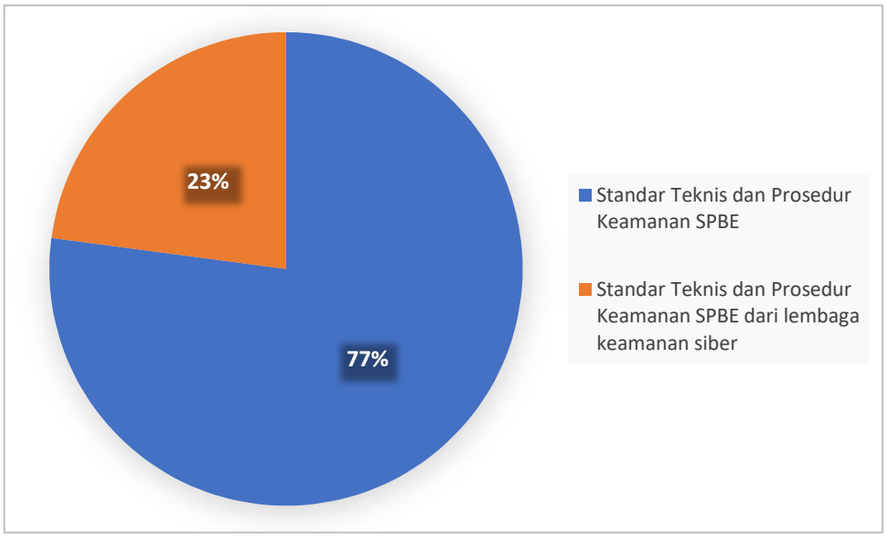
ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.37	NGK.APP.37	NGK.AI.37	E-MUTASI	01.03.37. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.37. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.37. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.38	NGK.APP.38	NGK.AI.38	SIAPP	01.03.38. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.38. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.38. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.39	NGK.APP.39	NGK.AI.39	Internet Banking	01.01.39. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.39. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.39. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.40	NGK.APP.40	NGK.AI.40	PPID	01.03.40. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.40. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.40. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.41	NGK.APP.41	NGK.AI.41	E-FORMASI	01.03.41. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.41. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.41. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.42	NGK.APP.42	NGK.AI.42	SSCASN	01.03.42. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.42. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.42. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

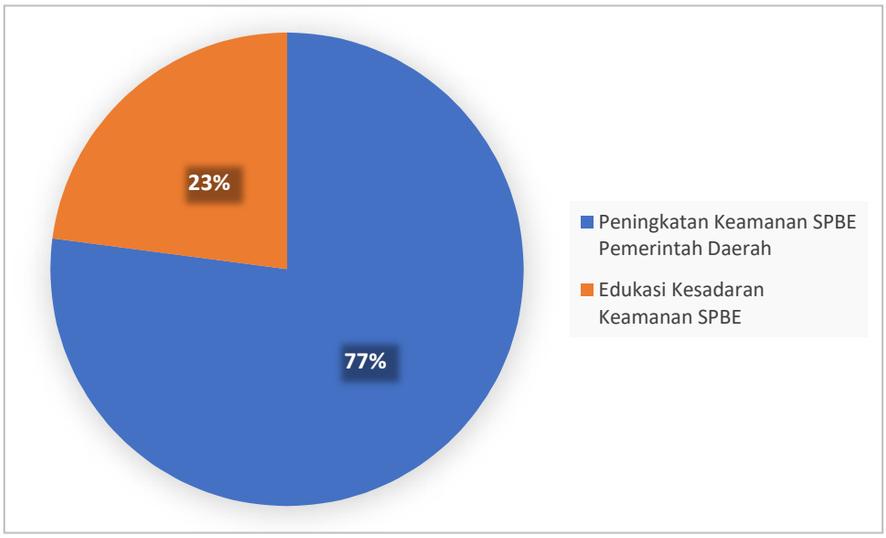
ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.43	NGK.APP.43	NGK.AI.43	DJP Online	01.01.43. Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dari lembaga keamanan siber.	02.01.43. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	03.01.43. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.44	NGK.APP.44	NGK.AI.44	SIM DTH	01.03.44. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.44. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.44. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.45	NGK.APP.45	NGK.APP.45	SIM SKPP	01.03.45. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.45. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.45. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.46	NGK.APP.46	NGK.APP.46	SITARA	01.03.46. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.46. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.46. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.47	NGK.APP.47	NGK.AI.47	SIM-GAJI	01.03.47. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.47. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.47. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia rekomendasi kelaikan keamanan.
NGK.KI.48	NGK.APP.48	NGK.AI.48	SIMBAL	01.03.48. Peraturan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	02.03.48. Peningkatan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah	03.01.48. Kelaikan keamanan Aplikasi melalui penilaian mandiri dan tersedia

ID Keamanan Informasi	ID Aplikasi	ID Infrastruktur	Nama Aplikasi	Standar Keamanan	Penerapan Keamanan	Kelaikan Keamanan
						rekomendasi kelaikan keamanan.



Gambar 8.2. Standar Arsitektur Keamanan SPBE



Gambar 8.3. Standar Arsitektur Penerapan Keamanan SPBE

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR



ARSITEKTUR APLIKASI SPBE KABUPATEN NGANJUK



Kata Pengantar

Buku ArsitekturAplikasi ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan dokumen Arsitektur SPBE yang terdiri dari buku : Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan Informasi. Dokumen ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Buku ini terdiri dari 7 pokok pembahasan yaitu : Referensi Arsitektur, Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Arsitektur Layanan, Domain Asrsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur. Tiada gading yang tak retak, semoga buku yang belum sempurna ini dapat menjadi referensi dalam melengkapi dokumentasi SPBE untuk pencapaian kinerja pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

Nganjuk, 10 Mei 2023

Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

1. PENDAHULUAN

    1.1 KERANGKA KERJA ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

    1.2 KETERKAITAN ANTAR DOMAIN

2. KONDISI ARSITEKTUR SAAT INI

3. KONDISI ARSITEKTUR APLIKASI YANG DIHARAPKAN

USULAN ARSITEKTUR APLIKASI

ANALISI GAP

INTEGRASI APLIKASI

ROADMAP

METADATA APLIKASI

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Gambar 1.2 Ilustrasi Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

SPBE

Gambar 4.1 Aplikasi Target untuk Penyelenggaran Pemerintah Berbasis

SPBE Gambar 4.2 Aplikasi Target untuk Layanan Masyarakat Berbasis SPBE

Gambar 4.3 Rencana Integrasi Antar Aplikasi

Gambar 5.1 Analisis Gap Arsitektur e-office Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Gambar 5.2 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi Pengadaan Barang Jasa, Aplikasi Aset Daerah, Aplikasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Nganjuk

Gambar 5.3 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi Layanan Masyarakat
Kabupaten Nganjuk

Gambar 5.4 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi Website Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Pemetaan Aplikasi Umum Eksisting di Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.2 Pemetaan Aplikasi Khusus Eksisting di Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.3 Pemetaan Aplikasi Berdasarkan Struktur Referensi Aplikasi SPBE di Kabupaten Nganjuk

Tabel 7.1 Roadmap Pengembangan Aplikasi

Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Aplikasi Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023

Arsitektur Aplikasi

1. Pendahuluan

Arsitektur aplikasi dalam pemerintah daerah merupakan salah satu komponen kunci dari arsitektur SPBE nasional. Arsitektur aplikasi mengkonversi berbagai proses bisnis yang ada di lingkungan suatu pemerintah daerah menjadi layanan yang didukung aplikasi berbasis teknologi informasi. Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, aplikasi yang dibuat harus memperhatikan prinsip integrasi, berbagi, efisiensi, dan optimalisasi layanan. Selain itu, penyusunan arsitektur aplikasi disesuaikan dengan referensi arsitektur proses dan layanan bisnis. Pada tingkat persiapan arsitektur aplikasi, perhatian juga harus diberikan pada standarisasi aplikasi termasuk teknologi yang digunakan, lisensi, open source, dan distribusi/proses.

Arsitektur Aplikasi menggambarkan kondisi terkini arsitektur aplikasi di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, target arsitektur aplikasi, hasil analisis kerentanan, rekomendasi dan roadmap pengembangan aplikasi. Dalam menyusun arsitektur aplikasi, beberapa dokumen digunakan sebagai acuan, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik

7. Peraturan Bupati (PERBUP) Nganjuk Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nganjuk
8. Peraturan Bupati (PERBUP) Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023
9. Laporan Akhir Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

1.1. Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE ditunjukkan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (Perpres 132 Tahun 2022)

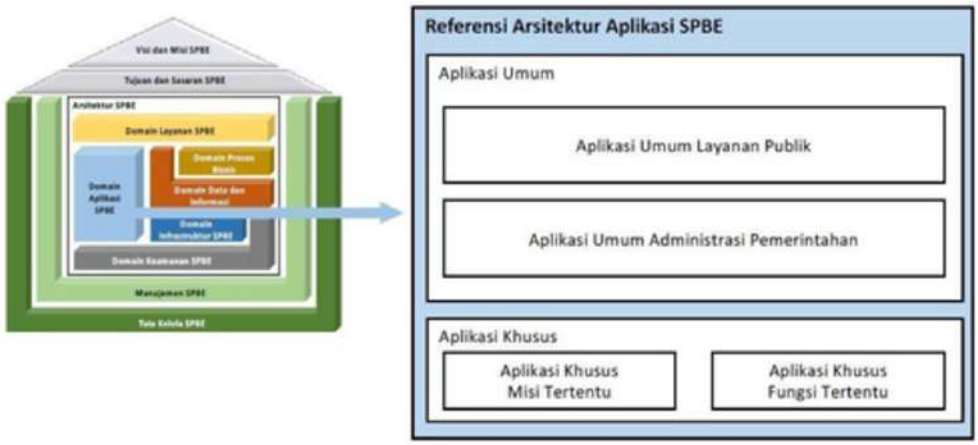
Guna mendukung arah kebijakan nasional, maka arsitektur aplikasi pada SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE, yaitu (Perpres 132 Tahun 2022):

a. Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
c. Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat

dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan

d. Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat men5rusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Berdasarkan Struktur Referensi di atas, Referensi Arsitektur Aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada pada Tingkat 3 dan Tingkat 4, yaitu Kategori Aplikasi dan Sub Kategori Aplikasi. Sebagai ilustrasi Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE dapat diturunkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Ilustrasi Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (Perpres 132 Tahun 2022)

Secara deskriptif, penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur aplikasi SPBE adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi Umum Layanan Publik

Lapisan Aplikasi Umum layanan publik (RAA 01.01) merupakan lapisan Aplikasi Umum yang mendukung layanan publik, secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama {shared seruicesl. Lapisan ini merupakan lapisan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung dengan melayani publik sesuai bidang dan memiliki

hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tidak lanjut dan sebagai presentasi ke publik dari hasil tindak lanjut. Dengan demikian, lapisan ini berhubungan dengan lapisan di bawahnya, baik lapisan aplikasi khusus maupun lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan.

b. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan (RAA 01.02) memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara berbagi pakai. Aplikasi ini dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (shared seruicesl. Dalam lapisan ini, pengelompokan bidang administrasi pemerintahan digunakan untuk mendukung atau menjadi dasar operasional dari lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi dapat digunakan untuk mendukung aplikasi pada lapisan di atasnya.

c. Aplikasi Khusus Misi Tertentu

lapisan aplikasi khusus misi tertentu (RAA A2.0l) mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi khusus hanya dikembangkan dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

d. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

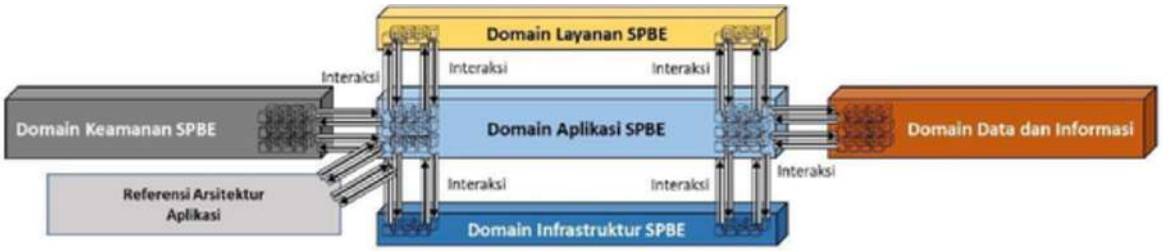
Aplikasi khusus fungsi tertentu (RAA 02.02) ini hanya dikembangkan dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai

pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

1.2. Keterkaitan Antar Domain

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional. Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

a. disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembErngan dan atau pengintegrasian fungsi lain/bam dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
b. aplikasi yang berorientasi pada layanan;
c. didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
d. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
e. berbasis kode sumber terbuka (open sourel; dan
f. terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain aplikasi SPBE pada Gambar 1.3



Gambar 1.3 Relasi Langsung pada Domain Aplikasi SPBE (Perpres 132 Tahun 2022)

2. Kondisi Arsitektur Aplikasi Saat ini

Untuk mengetahui aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, berbagai sumber dokumen dan proses wawancara dan diskusi telah dilakukan. Referensi arsitektur yang dibuat untuk domain aplikasi SPBE tidak hanya untuk mengumpulkan data tentang aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, tetapi juga untuk mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan melakukan klasifikasi dan pemetaan aplikasi yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional, yaitu penciptaan layanan yang terintegrasi, dapat diidentifikasi kemungkinan adanya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi penggunaan aplikasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik Pasal 25 Ayat 3, Apilkasi SPBE yang dibangun pemerintah secara umum terbagi menjadi:

a. perencanaan dan penganggaran;
b. keuangan;
c. pengadaan barang dan jasa;
d. kepegawaian;
e. kearsipan;
f. pengelolaan barang milik daerah;
g. pengawasan; dan
h. akuntabilitas kinerja

Sesuai dengan pembagian jenis aplikasi pada dokumen Rencana Perpres tentang SPBE Nasional, maka aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Nganjuk harus diidentifikasi jenis sesuai dengan fungsinya masing- masing. Pemetaan aplikasi umum di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan pemetaan aplikasi khusus ditunjukkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Pemetaan Aplikasi Umum Eksisting di Kabupaten Nganjuk

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Penggunaa	Deskripsi
Perencanaan dan Penganggaran	NGK.APP. 49	E-BUDGETING	Web	Pemerintah	Sistem Informasi Penganggaran
	NGK.APP. 50	SISKUDES	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi Keuangan Desa
	NGK.APP. 51	E-PROPOSAL	Desktop	Pemerintah	Proposal online
	NGK.APP. 52	OMSPAM	Web	Pemerintah	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Keuangan	NGK.APP. 53	SIMPatda	Web	Publik	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah
	NGK.APP. 26	e-SPTPD	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.	E-BPHTB	Web	Publik	Pajak Online

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
	29				Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.31	e-KSWP	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.32	e-Setoran	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP. 30	e-Dashboard	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.28	E-SPPT	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.15	SIMDA	Desktop	Pemerintah	sistem informasi keuangan daerah
	NGK.APP. 33	SIM PBB P2	Desktop	Pemerintah	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah
	NGK.APP.39	Internet Banking	Web	Pemerintah	transaksi keuangan
	NGK.APP.44	SIM DTH	Web	Pemerintah	Pelaporan daftar transaksi harian
	NGK.APP. 47	SIMGaji	Desktop	Pemerintah	Sebagai Sistem informasi Penggajian ASN di kabupaten Nganjuk

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
Pengadaan Barang dan Jasa	NGK.APP.14	LPSE	Web	Publik	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
	NGK.APP.05	Sirup	Web	Pemerintah	Pengadaan Barang/Jasa
	NGK.APP.09	Aplikasi P3DN	Web	Pemerintah	pengawasan TKDN
	NGK.APP. 13	E-Katalog	Web	Pemerintah	sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
	NGK.APP. 34	Si Omah	Web	Pemerintah	Penerbitan rekomendasi site plan dan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang/developer kepada Pemda
Kepegawaian	NGK.APP.54	PUPNS	Web	Pemerintah	Pendataan Ulang PNS
	NGK.APP.55	SIM Kepegawai	Web	Pemerintah	Sistem Informasi Kepegawaian

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
		an			
	NGK.APP. 06	Simas	Web	Pemerintah	Aplikasi kepegawaian dan database kepegawaian ASN kab.Nganjuk
	NGK.APP. 07	Simbak	Web	Pemerintah	Penilaian Kinerja ASN
	NGK.APP. 08	Aplikasi Presensi	Web	Pemerintah	Untuk Mengelola Kehadiran Pegawai
	NGK.APP. 35	SIASN	Web	Pemerintah	usulan pelayanan kepegawaian
	NGK.APP. 37	E-Mutasi	Web	Pemerintah	Usulan mutasi ASN
	NGK.APP. 38	SIAPP	Web	Pemerintah	usulan pangkat pensiun, jabatan fungsional untuk golongan utama
	NGK.APP. 41	E-FORMASI	Web	Pemerintah	Usulan Pengdaan ASN
	NGK.APP. 42	SSCASN	Web	Pemerintah	Portal pengadaan pendaftaran ASN
	NGK.APP. 45	SIM SKPP	Web	Pemerintah	Penerbitan Suket pembayaran gaji sementara
	NGK.APP. 46	Sitara	Web	Pemerintah	Menonaktifkan pegawai pensiun
Kearsipan	NGK.APP.	PPID	Web	Pemerint	Pejabat pengelola

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
	40			ah	informasi dan dokumentasi
	NGK.APP.56	JDIH	Web	Publik	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
	NGK.APP.04	Srikandi	Web	Pemerintah	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
	NGK.APP.57	E-Agendaris	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi Pengagendaan
	NGK.APP. 58	E-Register Surat Tugas	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi Surat Tugas
	NGK.APP. 01	Aplikasi Manajemen Surat (AMS)	Web	Pemerintah	Pencatatan surat masuk dan keluar
	NGK.APP.24	SIKN	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi kearsipan
Pengelolaan barang Milik Daerah	NGK.APP. 10	SIMAset	Web	Pemerintah	Sistem Informasi Manajemen Aset
Pengawasan dan akuntabilitas kinerja	NGK.APP. 18	e-LHKPN	Web	Pemerintah	e-Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara negara
	NGK.APP.	SIPD	Deskto	Pemerint	Sistem Informasi

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
	12		p	ah	Pemerintah Daerah
	NGK.APP.59	LHP	Desktop	Pemerintah	Laporan Hasil Pemeriksaan
	NGK.APP.60	SPM	Desktop	Pemerintah	Standar Pelayanan Minimal
	NGK.APP.61	SKM	Web	Publik	Survei Kepuasan Masyarakat
	NGK.APP.36	SIJAPTI	Web	Pemerintah	usulan rotasi mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama
Layanan	NGK.APP.62	PING	Web	Publik	Portal Informasi Nganjuk
	NGK.APP.63	PIP	Web	Publik	Pendidikan
	NGK.APP.64	Pendaftaran Rawat Jalan	Web	Publik	Kesehatan
	NGK.APP. 65	Cek Ketersediaan Kamar	Web	Publik	Kesehatan
	NGK.APP.02	SIMRS,	Desktop	Pemerintah	Kesehatan
	NGK.APP.66	FANLAB,	Desktop	Pemerintah	Kesehatan
		APPLYCARE	Web	Pemerintah	Kesehatan
	NGK.APP.68	Bansos	web	Publik	Sosial

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
	NGK.APP.69	Daftar Mandiri DTKS	web	Publik	Sosial
	NGK.APP. 70	Layanan Data Kesehatan	web	Publik	Sosial
	NGK.APP.71	SIPentol	web	Publik	Perizinan
	NGK.APP.72	Simpelmanjar	web	Publik	Penelitian
	NGK.APP.16	Sedudo	web	Publik	Kependudukan
	NGK.APP.22	SIAK	Desktop	Pemerintah	Kependudukan
	NGK.APP.73	e-KTP	Desktop	Pemerintah	Kependudukan
	NGK.APP.73	Peminjaman Buku	Desktop	Pemerintah	Perpustakaan
	NGK.APP.74	WadulBupati	Web	Publik	Pengaduan Masyarakat
	NGK.APP.75	Dumas	Web	Publik	Pengaduan Masyarakat
	NGK.APP.17	SPAN	Web	Publik	Pengaduan Masyarakat
	NGK.APP.76	SI Tindak Lanjut	Desktop	Pemerintah	Pengaduan Masyarakat
	NGK.APP. 77	SMILE	Web	Pemerintah	Sistem Management Informasi dan

Kelompok Aplikasi SPBE	ID ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Penggun a	Deskripsi
					Pelaporan Elektronik
	NGK.APP. 78	Brambang	Web	Publik	Pertanian
	NGK.APP. 79	SIPertan	Web	Publik	Pertanian
	NGK.APP. 03	SI-Mergawe	Web	Pemerint ah	Pencatatan surat masuk dan keluar
	NGK.APP . 11	Sukma E-Jatim	Web	Publik	Sistem untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
	NGK.APP . 25	Epusda Nganjuk	Deskto p	Publik	Layanan perpustakaan secara online
	NGK.APP. 40	PPID	Web	Pemerint ah	PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berfungsi sebagai pengelola dan pena Informasi dan penymampai dokumen yang

				dimiliki oleh badan publik dimiliki oleh badan publik
NGK.APP.43	DJP Online	Web-base	Pemerintah	Pelaporan Pajak
NGK.APP.48	Simbal	Web-base	Pemerintah	Sebagai sistem informasi kendaraan dinas di kab.Nganjuk

Tabel 2.2 Pemetaan Aplikasi Khusus Eksisting di Kabupaten Nganjuk

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
SEKRETARIAT DAN INSPEKTORAT	1	NGK.APP.80	Sekretariat Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/setda
	2	NGK.APP.81	Sekretariat DPRD	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/setwan
	3	NGK.APP.82	Inspektorat Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/inspektorat
DINAS	1	NGK.APP.83	Dinas Pendidikan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/pendid

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
				ikan
	2	NGK.APP.84	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan ; dan Pariwisata	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dispar
	3	NGK.APP.85	Dinas Kesehatan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dinkes
	4	NGK.APP.86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dinsos
	5	NGK.APP.87	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/ppkb
	6	NGK.APP.88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dukcapil
	7	NGK.APP.89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/pmd
	8	NGK.APP.90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dpmptsp
	9	NGK.APP.91	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/disperindag
	10	NGK.APP.92	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/koperasi
	11	NGK.APP.93	Dinas Tenaga Kerja	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/disnaker

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
	12	NGK.APP.94	Dinas Komunikasi dan Informatika	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/diskominfo
	13	NGK.APP.95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/pupr
	14	NGK.APP.96	Dinas Perhubungan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dishub
	15	NGK.APP.97	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/prkpp
	16	NGK.APP.98	Dinas Lingkungan Hidup	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dinaslh
	17	NGK.APP.99	Dinas Pertanian	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/pertanian
	18	NGK.APP.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kpp
	19	NGK.APP.101	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/arpus
	20	NGK.APP.102	Satuan Polisi Pamong Praja	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/polpp
	21	NGK.APP.103	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/damkar
BADAN	1	NGK.APP.104	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bappeda

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
	2	NGK.APP.105	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bpkad
	3	NGK.APP.106	Badan Pendapatan Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bapenda
	4	NGK.APP.107	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bkpsdm
	5	NGK.APP.108	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kesbangpol
	6	NGK.APP.109	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bpbd
KECAMATAN	1	NGK.APP.110	Kecamatan Bagor	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecbagor
	2	NGK.APP.111	Kecamatan Baron	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecbaron
	3	NGK.APP.112	Kecamatan Berbek	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecberbek
	4	NGK.APP.113	Kecamatan Gondang	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecgondang
	5	NGK.APP.114	Kecamatan Jatikalen	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecjatikalen

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
	6	NGK.APP.115	Kecamatan Kertosono	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/keckertosono
	7	NGK.APP.116	Kecamatan Lengkong	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/keclengkong
	8	NGK.APP.117	Kecamatan Loceret	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecloceret
	9	NGK.APP.118	Kecamatan Nganjuk	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecnganjuk
	10	NGK.APP.119	Kecamatan Ngetos	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecngetos
	11	NGK.APP.120	Kecamatan Ngluyu	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecngluyu
	12	NGK.APP.121	Kecamatan Ngronggot	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecngronggot
	13	NGK.APP.122	Kecamatan Pace	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecpace
	14	NGK.APP.123	Kecamatan Patianrowo	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecpatianrowo
	15	NGK.APP.124	Kecamatan Prambon	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecpra

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
				mbon
	16	NGK.APP.125	Kecamatan Rejoso	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecrejoso
	17	NGK.APP.126	Kecamatan Sawahan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecsawahan
	18	NGK.APP.127	Kecamatan Sukomoro	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecsukomoro
	19	NGK.APP.128	Kecamatan Tanjunganom	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kectanjunganom
	20	NGK.APP.129	Kecamatan Wilangan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecwilangan

Berdasarkan Perpres 132 Tahun 2022, kondisi eksisting arsitektur aplikasi SPBE Kabupaten Nganjuk dapat diklasifikasikan sebagai: Aplikasi Umum Layanan Publik, Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan, dan Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu. Secara spesifik struktur referensi aplikasi SPBE di Kabupaten Nganjuk ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pemetaan Aplikasi Berdasarkan Struktur Referensi Aplikasi SPBE di Kabupaten Nganjuk

STRUKTUR REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI/ BIDANG
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	e-LHKPN	e-Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	SPM	Standar Pelayanan Minimal
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	E-BUDGETING	Sistem Informasi Penganggaran
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	SISKUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	E-PROPOSAL	
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	OMSPAM	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	SIMPatda	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	PUPNS	Pendataan Ulang PNS
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	SIM Kepegawaia	Sistem Informasi Kepegawaian

STRUKTUR REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI/ BIDANG
	n	
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Srikandi	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	E-Agendaris	Sistem Informasi Pengagendaan
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	E-Register Surat Tugas	Sistem Informasi Surat Tugas
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	SIMAset	Sistem Informasi Manajemen Aset
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Aplikasi Umum Layanan Publik	e-SPTPD	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
Aplikasi Umum Layanan Publik	E-BPHTB	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
Aplikasi Umum Layanan Publik	e-KSWP	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
Aplikasi Umum Layanan Publik	e-Setoran	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
Aplikasi Umum Layanan Publik	e-Dashboard	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
Aplikasi Umum Layanan Publik	E-SPPT	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu

STRUKTUR REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI/ BIDANG
Aplikasi Umum Layanan Publik	LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Aplikasi Umum Layanan Publik	PPID	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
Aplikasi Umum Layanan Publik	JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Aplikasi Umum Layanan Publik	SKM	Survei Kepuasan Masyarakat
Aplikasi Umum Layanan Publik	PING	Portal Informasi Nganjuk
Aplikasi Umum Layanan Publik	PIP	Pendidikan
Aplikasi Umum Layanan Publik	Pendaftaran Rawat Jalan	Kesehatan
Aplikasi Umum Layanan Publik	Cek Ketersediaan Kamar	Kesehatan
Aplikasi Umum Layanan Publik	SIMRS,	Kesehatan
Aplikasi Umum Layanan Publik	FANLAB,	Kesehatan
Aplikasi Umum Layanan Publik	APPLYCARE	Kesehatan
Aplikasi Umum Layanan Publik	Bansos	Sosial
Aplikasi Umum Layanan Publik	Daftar Mandiri DTKS	Sosial
Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Data Kesehatan	Sosial
Aplikasi Umum Layanan Publik	SIPentol	Perizinan

STRUKTUR REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI/ BIDANG
Aplikasi Umum Layanan Publik	Simpelmanjar	Penelitian
Aplikasi Umum Layanan Publik	Sedudo	Kependudukan
Aplikasi Umum Layanan Publik	SIAK	Kependudukan
Aplikasi Umum Layanan Publik	e-KTP	Kependudukan
Aplikasi Umum Layanan Publik	Peminjaman Buku	Perpustakaan
Aplikasi Umum Layanan Publik	WadulBupati	Pengaduan Masyarakat
Aplikasi Umum Layanan Publik	Dumas	Pengaduan Masyarakat
Aplikasi Umum Layanan Publik	SPAN	Pengaduan Masyarakat
Aplikasi Umum Layanan Publik	SI Tindak Lanjut	Pengaduan Masyarakat
Aplikasi Umum Layanan Publik	SMILE	Sistem Management Informasi dan Pelaporan Elektronik
Aplikasi Umum Layanan Publik	Brambang	Pertanian
Aplikasi Umum Layanan Publik	SIPertan	Pertanian
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Aplikasi Management Surat (AMS)	Pencatatan surat masuk dan keluar
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	SIMRS	Pelayanan di RSD
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	SI-MERGAWE	Memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sirup	Pengadaan Barang/Jasa

STRUKTUR REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI/ BIDANG
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Simas	Aplikasi kepegawaian dan database kepegawaian ASN kab.Nganjuk
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Simbak	Penilaian Kinerja ASN
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Aplikasi Presensi	Untuk Mengelola Kehadiran Pegawai
Aplikasi Umum Layanan Publik	Aplikasi P3DN	pengawasan TKDN
Aplikasi Umum Layanan Publik	Sukma E-Jatim	sistem untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	E-Katalog	sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Simda (Bagian Keuangan)	sistem informasi keuangan daerah
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	SIKN	Sistem Informasi

STRUKTUR REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI/ BIDANG
		kearsipan
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	EPUSDA NGANJUK	Layanan perpustakaan secara online
Aplikasi Khusus Misi Tertentu	SIM PBB P2	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah
Aplikasi Umum Layanan Publik	Si Omah	Penerbitan rekomendasi site plan dan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang/developer kepada Pemda
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	SIASN	usulan pelayanan kepegawaian
Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	SIJAPTI	usulan rotasi mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama
Aplikasi Khusus Misi Tertentu	E-MUTASI	Usulan mutasi ASN
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	SIAPP	usulan pangkat pensiun, jabatan fungsional untuk golongan utama
Aplikasi Umum Layanan Publik	Internet Banking	transaksi keuangan
Aplikasi Khusus Misi Tertentu	E-Formasi	Usulan Pengdaan ASN
Aplikasi Umum Layanan Publik	SSCASN	Portal pengadaan pendaftaran ASN

STRUKTUR REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE	NAMA APLIKASI	DESKRIPSI/ BIDANG
Aplikasi Umum Layanan Publik	DJP Online	pelaporan pajak
Aplikasi Umum Layanan Publik	SIM DTH	Pelaporan daftar transaksi harian
Aplikasi Khusus Misi Tertentu	SIM SKPP	Penerbitan Suket pembayaran gaji sementara
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Sitara	Menonaktifkan pegawai pensiun
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	SIM-Gaji	Sebagai Sistem informasi Penggajian ASN di Kabupaten Nganjuk
Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Simbal	Sebagai Sistem informasi Kendaraan dinas di Kab. Nganjuk

3. Kondisi Arsitektur Aplikasi yang Diharapkan

Menurut evaluasi terhadap situasi terkini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan teknologi informasi untuk mendukung strategi yang telah disusun. Dalam hal ini, ditemukan beberapa kendala seperti:

a. Peranan TI

Pemahaman yang salah dalam memandang peran Teknologi Informasi (TI) adalah dengan mempersepsikannya hanya sebagai alat untuk mempercepat proses dan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas saja. TI masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan analisis dan bahkan tidak digunakan untuk mendukung strategi organisasi, seperti untuk meningkatkan transparansi kinerja pemerintahan.

b. Organisasi Internal

Pengembangan dan perencanaan TI sebagian besar dilakukan oleh Unit Kerja terkait, meskipun secara keseluruhan pengelolaan TI dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Karena tidak ada standar dari unit pengelola TI secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga operasional, pengelolaan TI menjadi rumit dan tidak terintegrasi (belum ada unit yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap TI).

c. Aplikasi

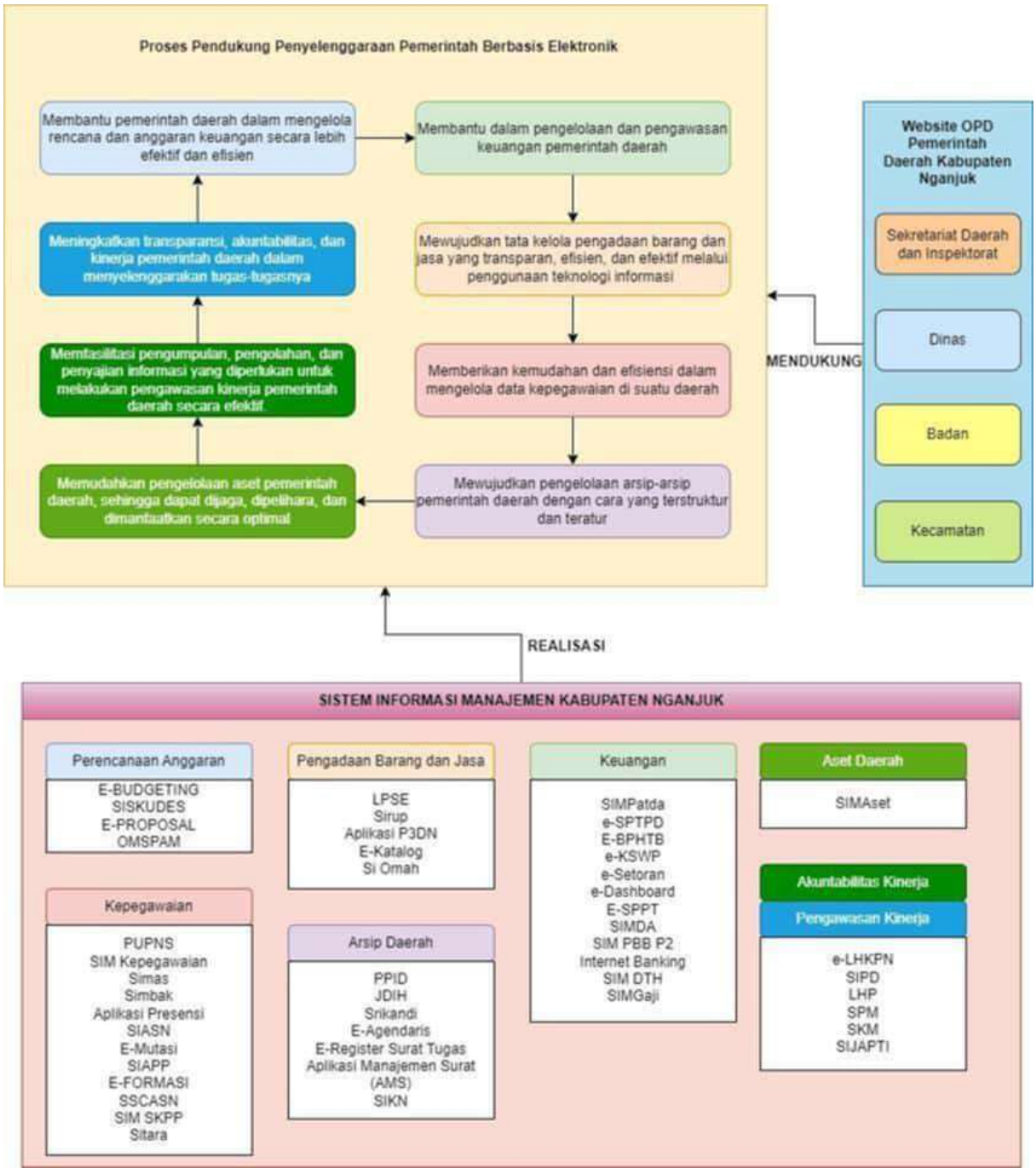
Berdasarkan situasi internal organisasi yang disebutkan di atas, terungkap bahwa saat ini tidak ada integrasi antara aplikasi yang ada dan ada banyak aplikasi yang beroperasi secara terpisah. Hal ini mengakibatkan inkonsistensi dalam data dan penggunaan infrastruktur TI yang tidak efisien. Rencana pengembangan aplikasi belum ada, sehingga aplikasi internal dan eksternal yang dikembangkan baik in-house maupun melalui outsourcing tidak terpusat dan tidak terintegrasi dalam mendukung aktivitas utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Aplikasi dikembangkan secara terpisah berdasarkan kebutuhan yang ada pada saat itu dan dikembangkan secara tidak teratur.

Dari beberapa isu yang telah diungkapkan sebelumnya, telah disusun saran-saran untuk arsitektur aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dibutuhkan pengembangan Sistem Informasi yang dapat menangani proses bisnis utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mulai dari pembuatan kebijakan, koordinasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Sistem Informasi ini harus terintegrasi dengan baik dalam setiap prosesnya untuk mencegah terjadinya aplikasi yang tidak terhubung satu sama lain.
b. Beberapa aplikasi yang umum harus memiliki fungsi yang standar dan umum sehingga dapat diterapkan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi dan optimasi layanan.
c. Aplikasi yang sudah ada harus diintegrasikan sesuai dengan domainnya masing-masing, sehingga jumlah aplikasi dapat dikurangi namun masih mampu menangani semua operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

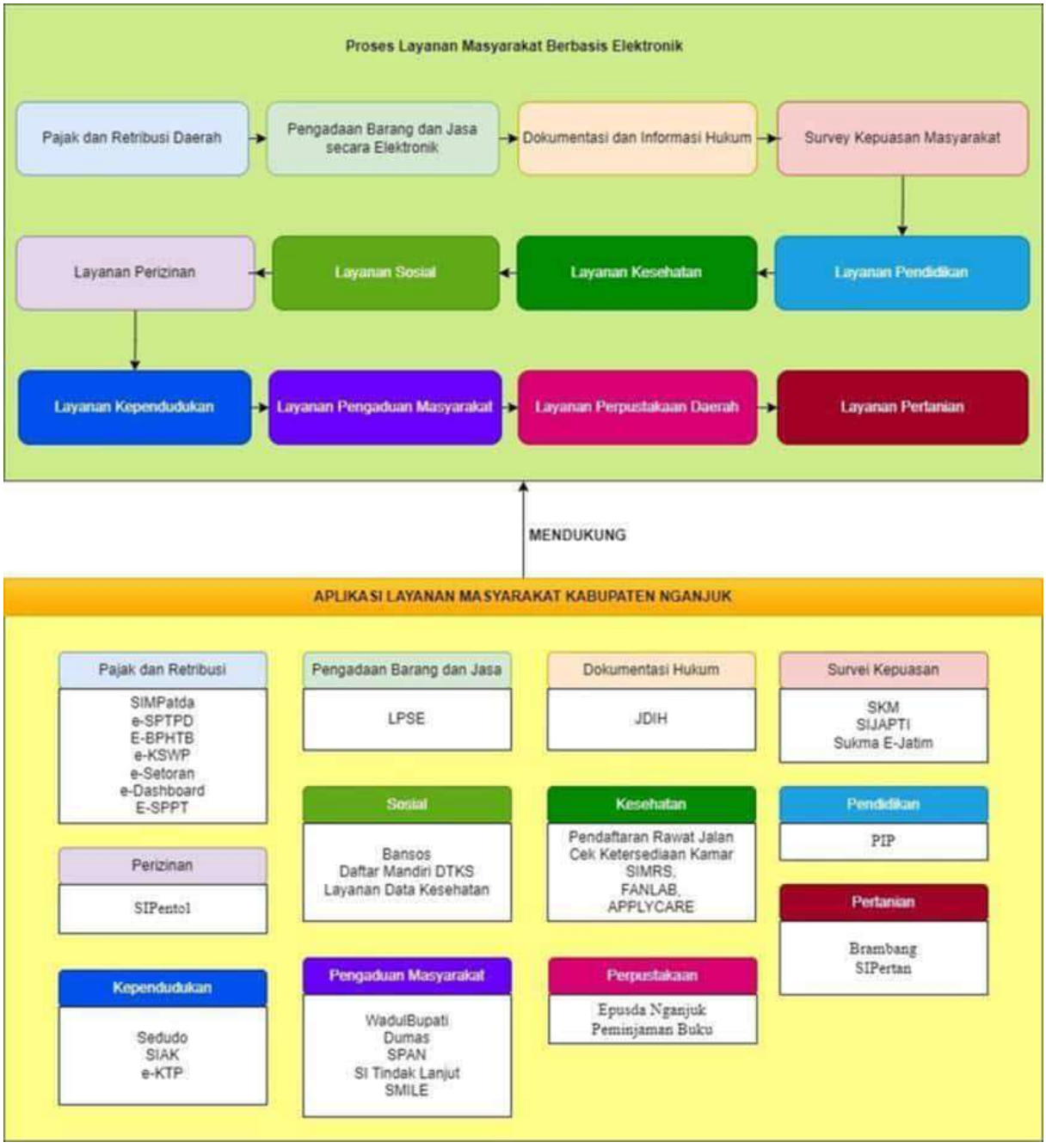
4. Usulan Arsitektur Aplikasi

Dalam sub bab sebelumnya telah disarankan beberapa rekomendasi, dan berdasarkan rekomendasi tersebut telah dibuat arsitektur aplikasi yang diusulkan untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Arsitektur aplikasi tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu untuk proses pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan untuk proses layanan masyarakat. Untuk arsitektur aplikasi proses pendukung penyelenggaran pemerintahan, dapat dilihat pada Gambar 4.1



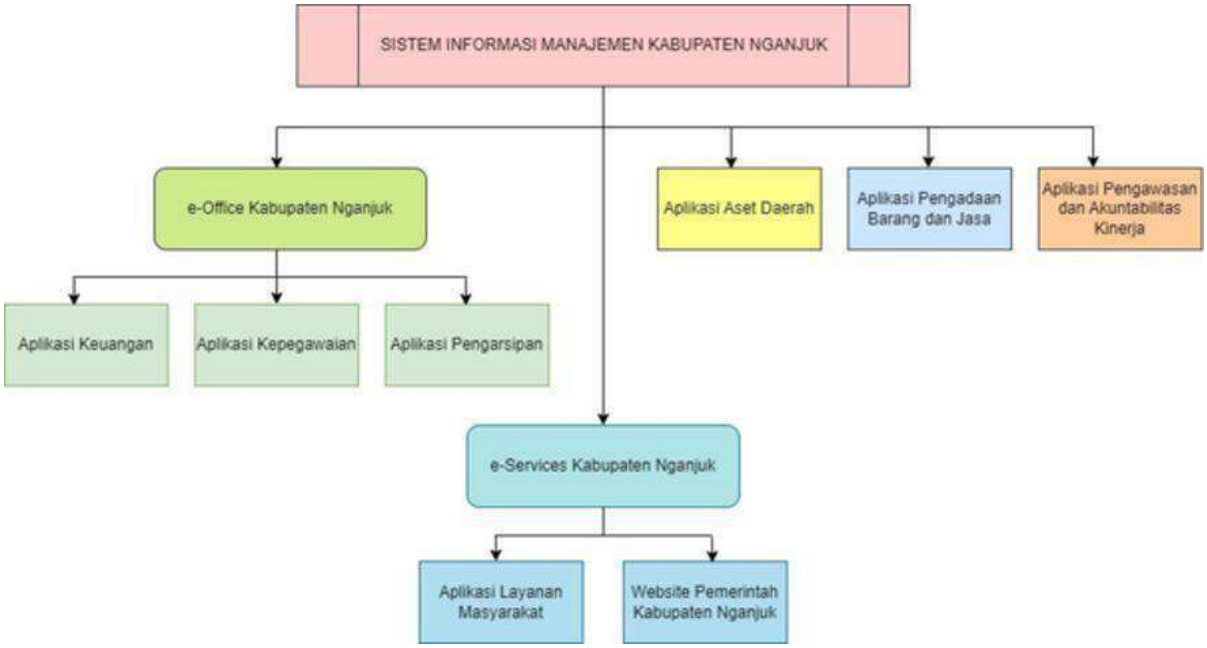
Gambar 4.1 Aplikasi Target untuk Penyelenggaran Pemerintah Berbasis SPBE

Di samping itu, telah dirancang pula Arsitektur Aplikasi Layanan Masyarakat yang terdiri dari penggabungan dan pengelompokan aplikasi yang sudah ada saat ini. Arsitektur Aplikasi Layanan Masyarakat ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Aplikasi Target untuk Layanan Masyarakat Berbasis SPBE

Untuk memastikan terpenuhinya prinsip berbagi dan integrasi, aplikasi-aplikasi yang dibangun harus terkait satu sama lain agar dapat memanfaatkan sumber data yang serupa. Gambar 4.3 menggambarkan bagaimana rencana integrasi antara kelompok aplikasi yang berbeda terlihat.



Gambar 4.3 Rencana Integrasi Antar Aplikasi

5. Analisis Gap

Diperlukan analisis perbedaan antara arsitektur aplikasi saat ini dan arsitektur aplikasi yang diinginkan agar dapat merencanakan langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk mencapai arsitektur aplikasi target. Gambar 5.1 sampai Gambar 5.2 menunjukkan hasil analisis perbedaan tersebut. Analisis Gap terbagi menjadi tiga diagram:

a. Analisis Gap Arsitektur e-office Pemerintah Kabupaten Nganjuk
b. Analisis Gap Arsitektur Aplikasi:
    i. Aset Daerah
    ii. Pengadaan Barang dan Jasa
    iii. Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
c. Analisis Gap Aplikasi e-Services:

i. Aplikasi layanan masyarakat

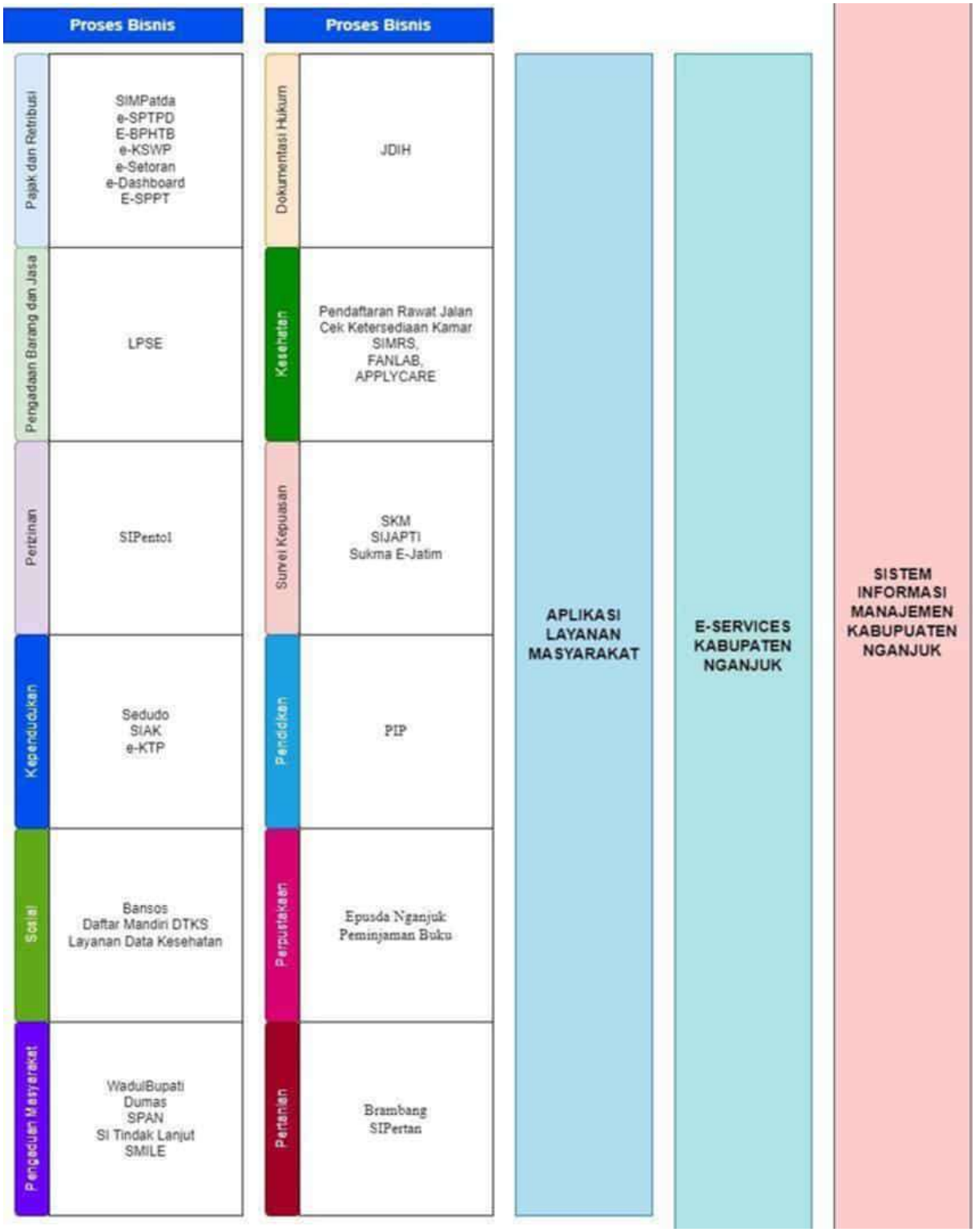
ii. Website pemerintah Kabupaten Nganjuk



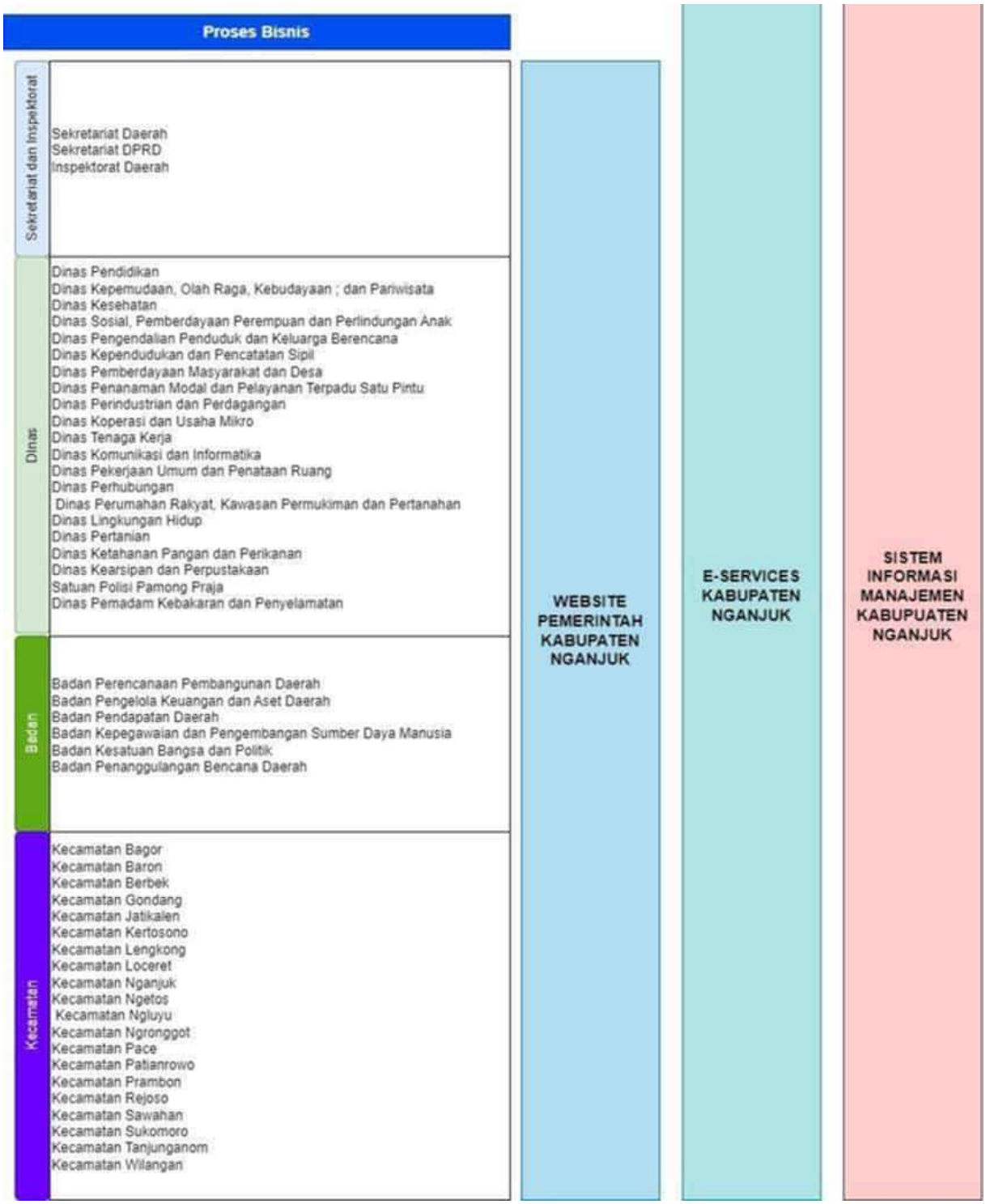
Gambar 5.1 Analisis Gap Arsitektur e-office Pemerintah Kabupaten Nganjuk



Gambar 5.2 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi Pengadaan Barang Jasa, Aplikasi Aset Daerah, Aplikasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Nganjuk



Gambar 5.3 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi Layanan Masyarakat Kabupaten Nganjuk



Gambar 5.4 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi Website Pemerintah Kabupaten Nganjuk

6. Integrasi Aplikasi

Agar prinsip berbagi pakai, efektif, dan efisien terpenuhi, disarankan agar aplikasi-aplikasi yang digunakan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk diintegrasikan sesuai dengan domain masing-masing. Berikut adalah pembagian untuk integrasi aplikasi yang direkomendasikan:

a. Aplikasi e-Office Kabupaten Nganjuk
   Kelompok aplikasi yang menangani semua urusan perkantoran dan manajemen kinerja:
   a. Aplikasi Keuangan
   b. Aplikasi Kepegawaian
   c. Aplikasi Pengarsipan

b. Aplikasi Aset Daerah
   Kelompok aplikasi yang menangani semua pendataan asset milik daerah.

c. Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa
   Kelompok aplikasi yang menangani semua layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Nganjuk.

d. Aplikasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
   Kelompok aplikasi yang menangani semua pengawasan dan akuntabilitas kinerja.

e. Aplikasi e-Services Kabupaten Nganjuk
   Kelompok aplikasi yang menangani semua layanan masyarakat:
   a. Aplikasi Layanan Masyarakat
   b. Website Pemerintah Kabupaten Nganjuk

7. Roadmap

Dalam rangka menerapkan arsitektur aplikasi yang ditargetkan, diperlukan penyusunan peta jalan untuk memandu perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang lebih terarah. Informasi mengenai peta jalan untuk domain arsitektur aplikasi dapat ditemukan pada Tabel 7.1

Tabel 7.1 Roadmap Pengembangan Aplikasi

Kebijakan	Strategi	Program Pembangunan	Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
			2023	2024	2025	2026	2027	
Misi: 1. *Membangun tatakelola SPBE yang terpadu dan akuntabel yang menghasilkan layanan SPBE berkualitas dan Optimal*								
Penyusunan Regulasi, Standarisasi, Pengintegrasian Aplikasi SPBE	Penyusunan Regulasi dan standarisasi Pengintegrasian Aplikasi SPBE	Penyusunan SK Bupati Implementasi dan Pengelolaan Integrasi Aplikasi SPBE di Seluruh OPD	*v*					
		Penyusunan Pedoman Pengintegrasian Aplikasi	*v*					Diskominfo
		Pembuatan prosedur dan dokumentasi tentang integrasi Aplikasi: • Aplikasi e-Office Kabupaten Nganjuk • Aplikasi Aset Daerah • Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa • Aplikasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja • Aplikasi e-Services Kabupaten Nganjuk	*v*					
		Dokumentasi Pelaksanaan integrasi aplikasi SPBE	*v*					
		Pelaksanaan review, evaluasi, dan tindak lanjut setiap tahun mengenai regulasi dan standarisasi pengintegrasian aplikasi SPBE		*v*	*v*	*v*	*v*	

Kebijakan	Strategi	Program Pembangunan	Tahun Pelaksanaan					OPD
			2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung jawab
MISI 2 : *Membangun Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, kompeten dan inovatif*								
Peningkatan kemampuan dan penambahan Tenaga IT yang pakar dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharan aplikasi/sistem informasi	Penambahan Tenaga IT (Bidang keahlian: Software Engineering) di Tiap OPD melalui rekruitmen ASN dan non-ASN	Seleksi dan rekrutmen staff dengan latar belakang pendidikan TIK (Bidang keahlian: Software Engineering). Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 5 orang	v	v	v	v		Semua OPD
		Pengadaan Tenaga Pengelola Aplikasi/Sistem Informasi	v	v				Semua OPD
		Penambahan Tenaga Fungsional bidang IT (Bidang keahlian: Software Engineering).	v	v				Semua OPD
	Peningkatan Kompetensi Tenaga IT pada bidang keahlian perencanaan, implementasi, dan pemeliharan aplikasi/sistem informasi melaui sertifikasi dan pelatihan	Pengiriman SDM TI Dinas Kominfo untuk mengikuti pelatihan kompetensi bidang pemrograman/ software engineering. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 5 orang	v	v	v	v	v	Diskominfo
		Pemetaan kompetensi pemeliharaan sistem informasi dan distribusi SDM TI di OPD dan kecamatan. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 3 org	v					Diskominfo
		Penyelenggraan pelatihan pemeliharaan sistem informasi bagi SDM TI di OPD dan kecamatan. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 2 adalah 3 org		v	v	v	v	Diskominfo
		Pengadaan Pelatihan IT tiap OPD	v	v				Semua OPD
		Peningkatan Jumlah Staft TI yang Bersertifikasi	v	v	v	v	v	Semua OPD
		Optimalisasi PNS Berpendidikan IT sebagai Tenaga IT	v	v				Semua OPD

		Pelaksanaan review, evaluasi, dan tindak lanjut setiap tahun mengenai Peningkatan kemampuan dan penambahan Tenaga IT yang pakar dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharan aplikasi/sistem informasi		v	v	v	v	Semua OPD
Peningkatan Pemahaman SDM dalam Implementasi Aplikasi SPBE	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SPBE di seluruh OPDsecara rutin	Melakukan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi/Sistem Informasi SPBE tingkat OPD	v	v	v	v	v	Semua OPD

Kebijakan	Strategi	Program Pembangunan	Tahun Pelaksanaan					OPD
			2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung jawab
MISI 3 : *Membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi* **MISI 4 : *Mengembangkan Sistem Integrasi Data Sebagai Perwujutan Layanan G2G, G2B, G2C***								
Integrasi Aplikasi berdasarkan masing-masing domain	Pembangunan Platform Integrasi Aplikasi	Perancangan arsitektur service sebagai platform integrasi aplikasi	v	v				Diskominfo
		Pembangunan Data Center sebagai database terintegrasi	v	v				Diskominfo
		Pembangunan platform backend sebagai penyedia services	v	v				Diskominfo
	Pembangunan Aplikasi Terintegrasi	Pembangunan aplikasi masing-masing domain:						
		• Kelompok Aplikasi e-Office Kabupaten Nganjuk			v	v	v	Diskominfo
		• Kelompok Aplikasi Aset Daerah			v	v	v	Diskominfo
		• Kelompok Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa			v	v	v	Diskominfo
		• Kelompok Aplikasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja			v	v	v	Diskominfo
		• Kelompok Aplikasi e-Services Kabupaten Nganjuk			v	v	v	Diskominfo

8. Metadata Aplikasi

Dalam rencana Peraturan Presiden mengenai SPBE, disebutkan bahwa aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus memenuhi persyaratan Metadata Aplikasi yang telah ditetapkan. Informasi mengenai atribut yang harus ada pada Metadata Aplikasi dapat ditemukan pada tabel 8.1

Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Aplikasi Berdasarkan pada RPJMD 2018 – 2023

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.01	Aplikasi Management Surat (AMS)	Pencatatan surat masuk dan keluar	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.02	SIMRS Khanza	Pelayanan di RSD Kertosono	Desktop			Dinas Kesehatan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.03	SI-MERGAWE	Memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan	Web-base			Dinas Tenaga Kerja	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.04	Srikandi	Surat menyurat	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.05	Sirup	Pengadaan Barang/Jasa	Web-base			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.06	Simas	Aplikasi kepegawaian dan database kepegawaian ASN kab.Nganjuk	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.07	Simbak	Penilaian Kinerja ASN	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.08	Aplikasi Presensi	Untuk Mengelola Kehadiran Pegawai	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.09	Aplikasi P3DN	pengawasan TKDN	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.10	Simaset	Sebagai Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, Sistim Informasi keuangan daerah, Sistem informasi pemerintah daerah lainnya	Desktop			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.11	Sukma E-Jatim	sistem untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
		penyelenggaraan pelayanan publik						
NGK.APP.12	SIPD	berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien	Web-base			Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.13	E-Katalog	sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah	Web-base			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.14	LPSE Bagian umum(Sekretariat)	Mengelola sistem e-Procuremen	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.15	Simda (Bagian Keuangan)	sistem informasi keuangan daerah	Desktop			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.16	Sedudo	Aktifitas pengiriman data secara online	Web-base			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.17	SP4n Lapor	Aktifitas pengiriman data secara online	Web-base			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.18	Aplikasi LHKPN	pelaporan harta kekayaan pejabat	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.19	Lasmini					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.20	Salipuk					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.21	Wablas					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.22	SIAK					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.23	E-KIR nganjuk					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.24	SIKN	Sistem Informasi kearsipan	Desktop/Web-based/Mobile			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.25	EPUSDA NGANJUK	Layanan perpustakaan secara online	Mobile/Desktop			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.26	E-Tax : e-SPTPD	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.27	E-Tax : SIMPATDA	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.28	E-Tax : e-SPPT	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.29	E-Tax : e-BPHTB	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.30	E-Tax : e-Dashboard	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.31	E-Tax : e-KSWP	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.32	E-Tax : e-Setoran	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.33	SIM PBB P2	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah	Desktop			Badan Pendapatan Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu
NGK.APP.34	Si Omah	Penerbitan rekomendasi site plan dan penyerahan PSU Perumahan dari	Web-base			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
		Pengembang/developer kepada Pemda						
NGK.APP.35	SIASN	usulan pelayanan kepegawaian	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.36	SIJAPTI	usulan rotasi mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.37	E-MUTASI	Usulan mutasi ASN	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu
NGK.APP.38	SIAPP	usulan pangkat pensiun, jabatan fungsional untuk golongan utama	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.39	Internet Banking	transaksi keuangan	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.40	PPID	PPID adalah kepanjangan dari	Web-base			Seluruh OPD	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.						Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.41	E-Formasi	Usulan Pengdaan ASN	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu
NGK.APP.42	SSCASN	Portal pengadaan pendaftaran ASN	Web-base			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.43	DJP Online	pelaporan pajak	Web-base			Dinas Pendapatan Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.44	SIM DTH	Pelaporan daftar transaksi harian	Web-base			Badan Pengelolah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
						Keuangan dan Aset Daerah		Layanan Publik
NGK.APP.45	SIM SKPP	Penerbitan Suket pembayaran gaji sementara	Web-base			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu
NGK.APP.46	Sitara	Menonaktifkan pegawai pensiun	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.47	SIM-Gaji	Sebagai Sistem informasi Penggajian ASN di Kabupaten Nganjuk	Desktop			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.48	Simbal	Sebagai Sistem informasi Kendaraan dinas di Kab. Nganjuk	Web-base			Dinas Perhubungan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.49	E- Budgeting	Sistem informasi Penganggaran	Web-base			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.50	Siskudes	Sistem Informasi Keuangan Desa	Desktop			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.51	E-Proposal	Proposal Online	Desktop			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.52	OMSPAM	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara	Web-base			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.53	SIMPatda	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan	Web-base			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.54	PUPNS	Pendataan ulang PNS	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.55	SIMKepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian	Web-base			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.56	JDIH	Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum	Web-base			Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.57	E-Agendaris	Sistem Informasi Pengagendaan	Desktop			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.58	E-Register Surat Tugas	Sistem informasi surat tugas	Desktop			Sekretariat Daerah	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan
NGK.APP.59	LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan	Desktop			Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.60	SPM	Standar Pelayanan Minimal	Desktop			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.61	SKM	Survei Kepuasan Masyarakat	Web-base			Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.62	PING	Portal Informasi Nganjuk	Web-base			Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.63	PIP	Pendidikan	Web-base			Dinas Pendidikan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.64	Pendaftaran Rawat Jalan	Kesehatan	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.65	Cek Ketersediaan kamar	Kesehatan	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.66	FANLAB	Kesehatan	Desktop			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.67	Applycare	Kesehatan	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.68	Bansos	Sosial	Web-base			Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.69	Daftar Mandiri DTKS	Sosial	Web-base			Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.70	Layanan Data Kesehatan	Sosial	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.71	SIPentol	Perizinan	Web-base			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.72	Simplemanjar	Penelitian	Web-base			Dinas Pendidikan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.73	E-KTP	Kependudukan	Desktop			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.74	Peminjaman Buku	Perpustakaan	Desktop			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.75	WadulBupati	Pengaduan Masyarakat	Web-base			Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.76	Dumas	Pengaduan Masyarakat	Web-base			Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.77	Si tindak lanjut	Pengaduan Masyarakat	Desktop			Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
						Perlindungan Anak		Layanan Publik
NGK.APP.78	SMILE	Sistem Management Informasi dan Pelaporan elektronik	Web-base			Dinas Komunikasi dan Informasi	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.79	Brambang	Pertanian	Web-base			Dinas Pertanian	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.80	SIPertan	Pertanian	Web-base			Dinas Pertanian	RAA.01. Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik
NGK.APP.81	Web Sekretariat Daerah	Web Sekretariat Daerah	Web-base			Sekretariat daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.82	Web Sekretariat DPRD	Web Sekretariat DPRD	Web-base			Sekretariat DPRD	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.83	Web Inspektorat Daerah	Web Inspektorat Daerah	Web-base			Inspektorat Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.84	Web Dinas Pendidikan	Web Dinas Pendidikan	Web-base			Dinas Pendidikan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
								Fungsi Tertentu
NGK.APP.85	Web Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan ; dan Pariwisata	Web Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan ; dan Pariwisata	Web-base			Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan ; dan Pariwisata	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.86	Web Dinas Kesehatan	Web Dinas Kesehatan	Web-base			Dinas Kesehatan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.87	Web Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Web Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Web-base			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.88	Web Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Web Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Web-base			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.89	Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Web-base			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.90	Web Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Web Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Web-base			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.91	Web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Web Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Web-base			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.92	Web Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Web Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Web-base			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.93	Web Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Web Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Web-base			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.94	Web Dinas Tenaga Kerja	Web Dinas Tenaga Kerja	Web-base			Dinas Tenaga Kerja	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.95	Web Dinas Komunikasi dan Informatika	Web Dinas Komunikasi dan Informatika	Web-base			Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.96	Web Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Web Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Web-base			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.97	Web Dinas Perhubungan	Web Dinas Perhubungan	Web-base			Dinas Perhubungan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.98	Web Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Web Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Web-base			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.99	Web Dinas Lingkungan Hidup	Web Dinas Lingkungan Hidup	Web-base			Dinas Lingkungan Hidup	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.100	Web Dinas Pertanian	Web Dinas Pertanian	Web-base			Dinas Pertanian	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.101	Web Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Web Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Web-base			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.102	Web Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Web Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Web-base			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.103	Web Satuan Polisi Pamong Praja	Web Satuan Polisi Pamong Praja	Web-base			Satuan Polisi Pamong Praja	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.104	Web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Web Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Web-base			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.105	Web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Web-base			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.106	Web Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Web Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Web-base			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.107	Web Badan Pendapatan Daerah	Web Badan Pendapatan Daerah	Web-base			Badan Pendapatan Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.108	Web Badan Kepegawaian dan	Web Badan Kepegawaian dan	Web-base			Badan Kepegawaian dan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia				Pengembangan Sumber Daya Manusia		Fungsi Tertentu
NGK.APP.109	Web Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Web Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Web-base			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.110	Web Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Web Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Web-base			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.111	Web Kecamatan Bagor	Web Kecamatan Bagor	Web-base			Kecamatan Bagor	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.112	Web Kecamatan Baron	Web Kecamatan Baron	Web-base			Kecamatan Baron	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.113	Web Kecamatan Berbek	Web Kecamatan Berbek	Web-base			Kecamatan Berbek	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.114	Web Kecamatan Gondang	Web Kecamatan Gondang	Web-base			Kecamatan Gondang	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.115	Web Kecamatan Jatikalen	Web Kecamatan Jatikalen	Web-base			Kecamatan Jatikalen	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.116	Web Kecamatan Kertosono	Web Kecamatan Kertosono	Web-base			Kecamatan Kertosono	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.117	Web Kecamatan Lengkong	Web Kecamatan Lengkong	Web-base			Kecamatan Lengkong	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.118	Web Kecamatan Loceret	Web Kecamatan Loceret	Web-base			Kecamatan Loceret	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.119	Web Kecamatan Nganjuk	Web Kecamatan Nganjuk	Web-base			Kecamatan Nganjuk	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.120	Web Kecamatan Ngetos	Web Kecamatan Ngetos	Web-base			Kecamatan Ngetos	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.121	Web Kecamatan Ngluyu	Web Kecamatan Ngluyu	Web-base			Kecamatan Ngluyu	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.122	Web Kecamatan Ngronggot	Web Kecamatan Ngronggot	Web-base			Kecamatan Ngronggot	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.123	Web Kecamatan Pace	Web Kecamatan Pace	Web-base			Kecamatan Pace	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.124	Web Kecamatan Patianrowo	Web Kecamatan Patianrowo	Web-base			Kecamatan Patianrowo	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.125	Web Kecamatan Prambon	Web Kecamatan Prambon	Web-base			Kecamatan Prambon	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.126	Web Kecamatan Rejoso	Web Kecamatan Rejoso	Web-base			Kecamatan Rejoso	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.127	Web Kecamatan Sawahan	Web Kecamatan Sawahan	Web-base			Kecamatan Sawahan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.128	Web Kecamatan Sukomoro	Web Kecamatan Sukomoro	Web-base			Kecamatan Sukomoro	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Basis Aplikasi	Lisensi	Basisdata	Unit Operasional	RAA Level 1	RAA Level 2
NGK.APP.129	Web Kecamatan Tanjunganom	Web Kecamatan Tanjunganom	Web-base			Kecamatan Tanjunganom	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu
NGK.APP.130	Web Kecamatan Wilangan	Web Kecamatan Wilangan	Web-base			Kecamatan Wilangan	RAA.02. Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR



ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE KABUPATEN NGANJUK



BAB 1 PENDAHULUAN

Infrastuktur SPBE di Kota Nganjuk didasarkan pada entitas yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan untuk mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi. Arsitektur infrastruktur SPBE yang dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memiliki peraturan atau pedoman yang mendasari dalam pengelolaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 1.1. Kebijakan Penyusunan Dokumen SPBE Kabupaten Nganjuk

Nama Kebijakan SPBE	Nomor Kebijakan	Bentuk Kebijakan	Tanggal Penandatangan	Tanggal Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	Nomor 132 Tahun 2022	Peraturan Presiden	20 Desember 2022	20 Desember 2022
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nomor 16 Tahun 2020	Peraturan Menteri	22 Desember 2020	22 Desember 2020
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Timur	Nomor 53 Tahun 2021	Peraturan	7 Oktober 2021	7 Oktober 2021
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nganjuk	Nomor 11 Tahun 2022	Peraturan	28 Maret 2022	28 Maret 2022

Referensi arsitektur infrastruktur SPBE terdiri atas komponen :

a. Fasilitas Komputasi (RAI.01.), terdiri dari pusat data nasional (RAI 01.01), pusat komputasi (RAI 01.02), dan pusat kendali (RAI01.03) dan memiliki lingkup nasional. Fasilitas komputasi dapat milik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan fasilitas komputasi

nasional. Lapisan ini merupakan fasilitas dari layanan infrastruktur dasar yang digunakan sebagai penyimpanan (storagel, kendali, dan

komputasi dari sistem nasional.

b. Sistem Integrasi (RAI 02), lapisan ini terdiri dari:

1. Jaringan Intra Pemerintah (RAI 02.01) adalah lapisan penghubung yang membentuk jaringan penghubung antar komponen dari lapisan di bawahnya dan

membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya, serta memastikan keamanan informasi dalam komunikasi data antar sistem informasi. Jaringan intra pemerintah dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (Netutork Operation CenterlNoCl Pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI 02.02), lapisan sistem penghubung yang secara logikal menghubungkan fisik dari lapisan di bawahnya menjadi hubungan logikal yang mendukung lapisan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur SPBE di atasnya.

c. Platform (RAI 03), lapisan ini terdiri dari:

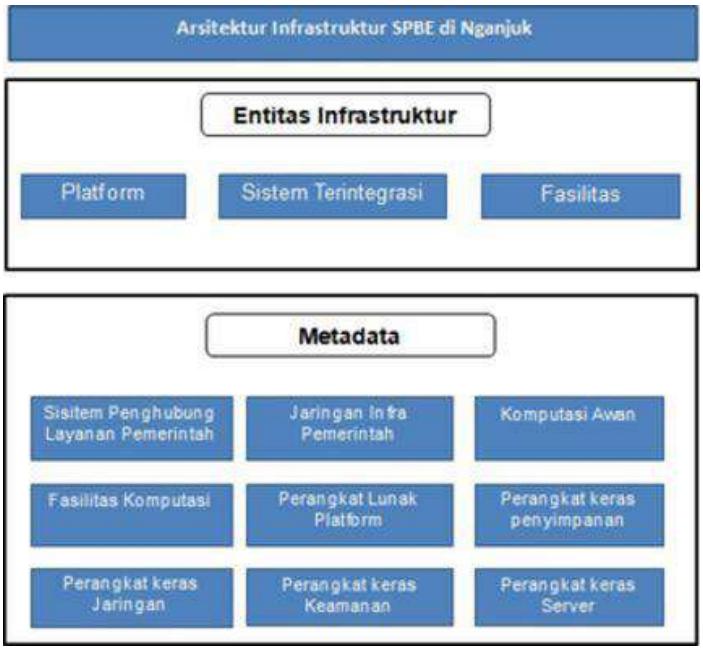
1. Kerangka infrastruktur dan aplikasi (RAI 03.01), lapisan ini menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar platform lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di atasnya.

2. Komputasi Awan (RAI 03.02), lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur SPBE berbagi pakai berupa sistem Infrastructure as a Services (IaaS), Platform as a Services (PaaS), dan Sofiware as a Services (SaaS), dimana data dan informasi didalamnya, diolah menggunakan Big Data as a Seruices (BaaS), serta didukung aspek keamanan untuk keseluruhan komputasi awan dengan Security as a Servies (SecaaS).

Arsitektur infrastruktur tingkat nasional adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1. Arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten Nganjuk adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1. Arsitektur infrastruktur tingkat nasional



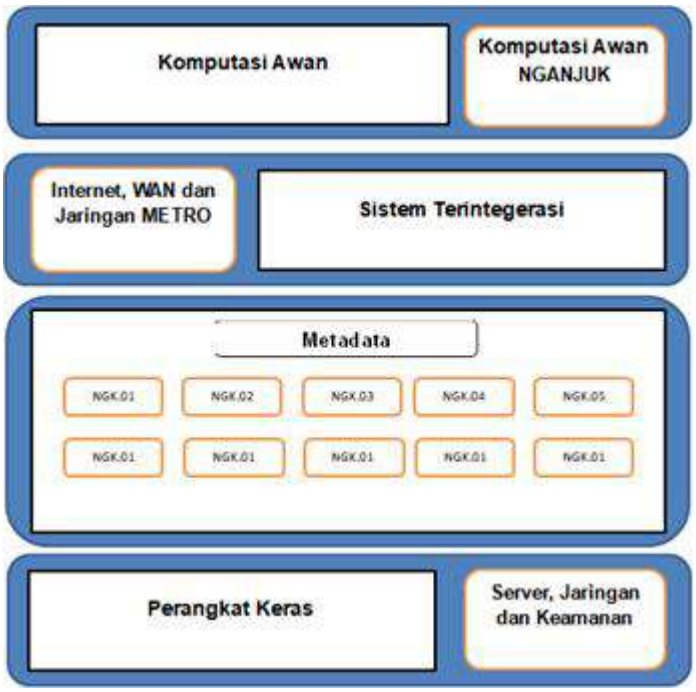
Gambar 1.2. Arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten Nganjuk

Arsitektur Infrastruktur SPBE menyediakan semua fitur teknologi yang dibutuhkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi dengan dukungan arsitektur keamanan. Arsitektur Infrastruktur SPBE mendukung arsitektur layanan seperti akses layanan mandiri, Layanan bergerak, Layanan cerdas bagi masyarakat melalui aplikasi-aplikasi yang saling terhubung dalam komputasi awan. Infrastruktur SPBE dikategorikan pada platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi dengan mengacu pada kondisi infrastruktur yang ada saat ini di Kota Nganjuk.

Kondisi infrastruktur di Kota Nganjuk memungkinkan pengguna dapat

menyimpan data secara terpusat pada satu server berdasarkan layanan yang

disediakan komputasi awan dimana penyimpanan pada layanan komputasi awan telah tersedia secara virtual. Dalam sistem integrasi, Kota Nganjuk menggunakan sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan memanfaatkan jaringan konektivitas pada Kota Nganjuk (LAN, WAN, dan internet) sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/ organisasi. Jaringan ini dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center*) Noc pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Unit Kerja. Kondisi jaringan intra pemerintah di lingkungan Kota Nganjuk telah berjalan dimana berbagai layanan dapat diakses secara daring melalui aplikasi yang menjadi layanan kepada masyarakat dan instansi terkait. Konektivitas pada Kota Nganjuk (LAN, WAN, dan internet), terdapat bandwidth yang memadai untuk digunakan dalam mendukung kelancaran. terhadap akses layanan yang ada dengan integrasi akses aplikasi sistem informasi yang menerapkan *Virtual Private Network* (VPN) untuk memudahkan konektivitas dan tingkat keamanan. Fasilitas komputasi di Kota Nganjuk belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi pusat layanan big data nasional, pengembangan teknologi kecerdasan buatan, penerapan big data. Kondisi Infrastruktur TI di Kota Nganjuk saat ini dipetakan pada komponen umum infrastruktur TI



Gambar 1.3. Pemetaan Komponen Umum Infrastruktur TI di Kota Nganjuk

Berdasarkan seluruh aktivitas koleksi data dari pemetaan komponen umum yang telah dilakukan, informasi kondisi infrastruktur Kota Nganjuk saat ini digambarkan ke dalam metadata arsitektur infrastruktur SPBE. Berdasarkan seluruh aktivitas koleksi data dari

pemetaan komponen umum yang telah dilakukan, informasi kondisi infrastruktur Kota Nganjuk saat ini digambarkan ke dalam metadata arsitektur infrastruktur SPBE.

No	Nama Metadata	Diskripsi Fasilitas	Kondisi saat ini
1.	Komputasi Awan	Cloud Kota Nganjuk (*Software as a Service* (SaaS))	Pada saat ini Kota Nganjuk sudah menerapkan konsep komputasi awan secara maksimal dengan konsep Software as a Service (SaaS) yang dikelola secara mandiri oleh pihak Diskominfo.
2.	Perangkat Lunak Platform	Perangkat lunak platform layanan aplikasi terdiri dari **88 aplikasi** dan perangkat lunak pendukung (sistem operasi, sistem database, sistem utilitas)	Kota Nganjuk telah memiliki beberapa perangkat lunak platform yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dan layanan yang dapat diakses dengan mayoritas menggunakan teknologi web, dan juga dapat diakses secara mobile.
3.	Perangkat Keras Server	Server digunakan untuk menjalankan berbagai layanan aplikasi aplikasi e- office, aplikasi Inspektorat, dan aplikasi instansi terkait	Perangkat keras server di Kota Nganjuk telah menggunakan teknologi clustering yang diharapkan menghasilkan suatu sistem dengan tingkat reliabilitas, availability tinggi serta dikelola oleh internal untuk mendukung kinerja aplikasi yang berjalan di lingkungan institusi tersebut.
4.	Perangkat keras media Penyimpanan	Perangkat keras yang digunakan untuk penyimpanan data di lingkungan internal	Pemkot telah memiliki perankat keras media penyimpanan dngan kapasitas yang cukp besar untuk mendukung operasional yang dijalankan

5.	Perangkat keras Jaringan	Router Jaringan, distribusi lantai, *Switch Host*, *Bandwidth Management*, *Access Point*, *Switch Storage Server*, *Switch* distribusi	Pada perangkat keras jaringan telah menggunakan perangkat memadai yang memungkinkan kinerja maksimal dalam mendukung konektivitas operasional di Kota Nganjuk dengan mengacu pada aspek keamanan, ketersediaan, pertukaran data, dll.

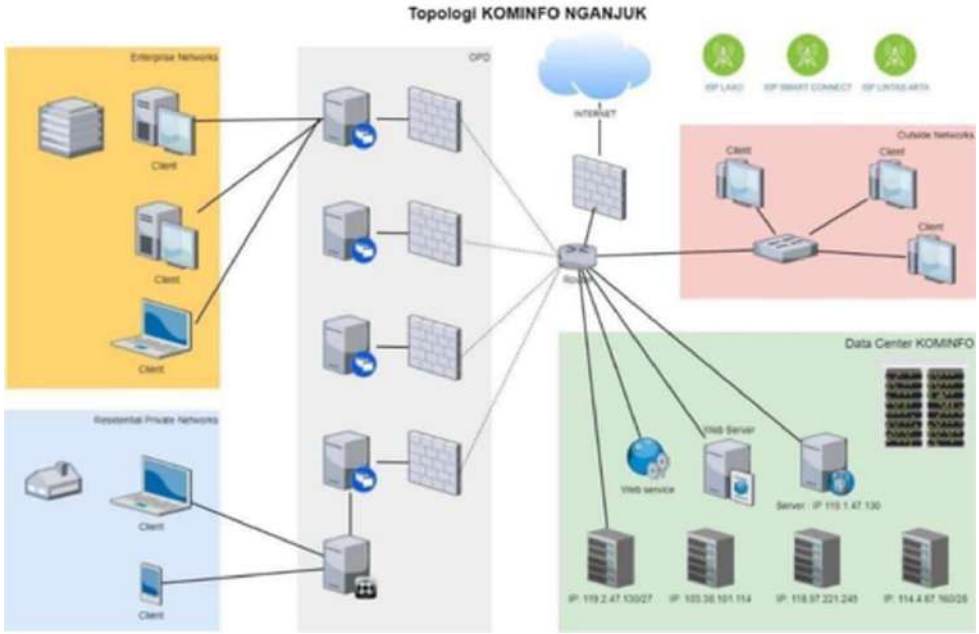
No	Nama Metadata	Diskripsi Fasilitas	Kondisi saat ini
6.	Perangkat keras keamanan	Perangkat untuk Menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan TI, pengendalian lalu lintas jaringan, control penghubung jaringan, Penyaringan keamanan, Proxy dan *controller* VPN	Pada perangkat keras keamanan telah menggunakan beberapa teknologi untuk berbagai fungsi (firewall, keamanan, VPN, pengendalian jaringan, kontrol penghubung jaringan).
7.	Perangkat Keras *Peripheral*	*Backup power supply*, *Switching monitor*	Kota Nganjuk telah memiliki perangkat keras peripheral dalam mendukung kinerja perangkat lainnya terutama dalam penyediaan backup sumber daya listrik dan perangkat monitoring. Selain itu telah memiliki perangkat peripheral pendukung yang dapat digunakan dalam interaksi terhadap layanan aplikasi yang digunakan.
8.	Penghubung Layanan Pemerintah	Jaringan konektivitas pada Kota Nganjuk (LAN, WAN, dan internet)	Sistem penghubung layanan pemerintah di Kota Nganjuk dalam penerapannya telah berjalan dengan menggunakan jaringan konektivitas pada Kota Nganjuk (LAN, WAN, dan internet sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung.

9.	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intranet DC,	Jaringan intra pemerintah di lingkungan Kota Nganjuk telah berjalan dengan baik. Akses terhadap aplikasi sistem informasi di lingkungan Kota Nganjuk saat ini sudah menerapkan Virtual Private Network (VPN). Berbagai aplikasi dapat diakses secara daring yang menjadi layanan kepada masyarakat dan instansi terkait karena hamper keseluruhan layanan aplikasi berjalan berbasis web.
10	Fasilitas Komputasi		Fasilitas komputasi di Kota Nganjuk belum maksimal diterapkan terutama dalam mendukung terhadap rencana terkait implementasi penerapan big data *analytics*, dan *Artificial Intelligence* (AI)

BAB 2 TOPOLOGI INFRASTRUKTUR

Infrastruktur jaringan komputer digunakan sebagai perangkat untuk melakukan akses data, internet dan perangkat lunak baik berbasis website maupun dekstop yanh digunakan dalam penyelenggaraan operasional pemerintahan di Kabupaten Nganjuk. Infrastruktur jaringan komputer yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk mencakup akses jaringan data lokal (Local Area Network) di setiap OPD, layanan internet, koneksi berbagi data dan aplikasi antar OPD, dan akses internet masyarakat (internet publik).

Topologi jaringan komputer diseluruh OPD Kabupaten Ngajuk yang berada dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah sebagaimana pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Topologi Jaringan Komputer Kabupaten Nganjuk

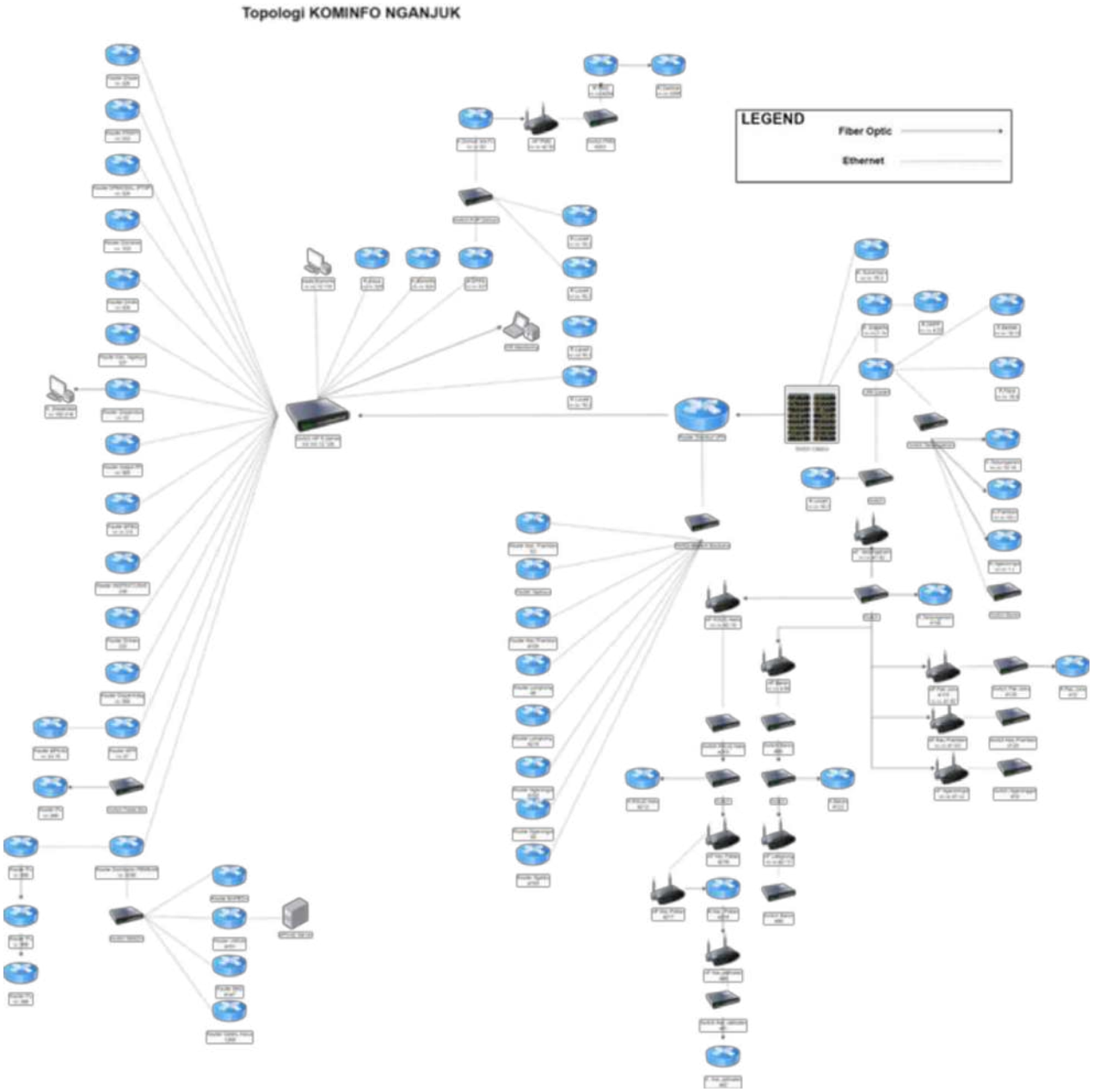
Berdasarkan pada Gambar 2.1. jaringan komputer yang dikelola oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. Jaringan komputer untuk layanan enterprise
2. Jaringan komputer untuk layanan OPD
3. Jaringan komputer untuk layanan public

4. Jaringan komputer untuk layanan Data Center
5. Jaringan komputer untuk layanan perumahan

Peta topologi jaringan komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk terdiri dari 7 IP yaitu : 119.2.47.130, 119.2.47.131, 119.2.47.132, 119.2.47.134, 119.2.47.141, 119.2.47.142, dan 119.2.47.143. Setiap IP tersimpan pada sistem server yang digunakan untuk menampung website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk yang secara keseluruhan terdiri dari 88 website (Gambar 2.2.)(Tabel 2.1).



Gambar 2.1. Pemetaan topologi jaringan di Kota Nganjuk Sebaran IP

dan aplikasi yang di gunakan

Tabel 2.1. Daftar alamat IP, Server dan Website di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

No	IP	SERVER	DAFTAR WEB
1	119.2.47.130	SERVER NGANJUKKAB DELL EMC R740	bkd.nganjukkab.go.id bpbd.nganjukkab.go.id bpkad.nganjukkab.go.id bppt.nganjukkab.go.id cctv.nganjukkab.go.id cobasatudata.nganjukkab.go.id covid19.nganjukkab.go.id dashboard.nganjukkab.go.id dinkes.nganjukkab.go.id dinsospppa.nganjukkab.go.id dishub.nganjukkab.go.id diskominfo.nganjukkab.go.id disnakerkum.nganjukkab.go.id disparporabud.nganjukkab.go.id dispendik.nganjukkab.go.id dispenduk.nganjukkab.go.id disperindag.nganjukkab.go.id disperta.nganjukkab.go.id dlh.nganjukkab.go.id doc.nganjukkab.go.id dpmpt.nganjukkab.go.id dpmptsp.nganjukkab.go.id dppkb.nganjukkab.go.id dprd.nganjukkab.go.id egov.nganjukkab.go.id event.nganjukkab.go.id fks.nganjukkab.go.id gondang.nganjukkab.go.id gronggot.nganjukkab.go.id indag.nganjukkab.go.id inspektorat.nganjukkab.go.id jatikalen.nganjukkab.go.id jdih.nganjukkab.go.id jurnal.nganjukkab.go.id katalog.nganjukkab.go.id kepegawaian.nganjukkab.go.id

			ngetos.nganjukkab.go.id ngluyu.nganjukkab.go.id pace.nganjukkab.go.id patianrowo.nganjukkab.go.id pemilu2019.nganjukkab.go.id ping.nganjukkab.go.id pkk.nganjukkab.go.id pkmsukomoro.nganjukkab.go.id pmd.nganjukkab.go.id polpp.nganjukkab.go.id

No	IP	SERVER	DAFTAR WEB
			ppid.nganjukkab.go.id prambon.nganjukkab.go.id prkpp.nganjukkab.go.id pupr.nganjukkab.go.id rejoso.nganjukkab.go.id rekrutmen.nganjukkab.go.id rsudkertosono.nganjukkab.go.id satudata.nganjukkab.go.id sawahan.nganjukkab.go.id sedudo.nganjukkab.go.id setda.nganjukkab.go.id sikeren.nganjukkab.go.id simapkop.nganjukkab.go.id simmbak.nganjukkab.go.id simmbak.nganjukkab.go.id_backup simolek.api simolek.nganjukkab.go.id sipendik.nganjukkab.go.id sipertan.nganjukkab.go.id sukomoro.nganjukkab.go.id tanjunganom.nganjukkab.go.id teleconference.nganjukkab.go.id tes.nganjukkab.go.id wadulmasnovi.nganjukkab.go.id wilangan.nganjukkab.go.id
		Total :	71 Aplikasi web

2	119.2.47.131	SERVER DELL EMC POWEREDGE R730	siprestari.nganjukkab.go.id ppdbsmpn.nganjukkab.go.id ppdbsdn.nganjukkab.go.id ebos.nganjukkab.go.id
		Total :	4 Aplikasi web
3	119.2.47.132	SERVER DELL EMC POWEREDGE R730	simolek.nganjukkab.go.id integrasi.nganjukkab.go.id sipentol.nganjukkab.go.id dpmptsp.nganjukkab.go.id emusrenbang.nganjukkab.go.id eplanning.nganjukkab.go.id
		Total :	6 Aplikasi web
4	119.2.47.134	SERVER DELL EMC POWEREDGE R730	simas.nganjukkab.go.id absensi.nganjukkab.go.id
		Total :	2 Aplikasi web

No	IP	SERVER	DAFTAR WEB
5	119.2.47.141	SERVER	perpus.nganjukkab.go.id
		Total :	1 Aplikasi web
6	119.2.47.142	VMWARE	VMWARE
7	119.2.47.143	SERVER DELL EMC R740	blud.nganjukkab.go.id
		Total :	1 Aplikasi web
			88 Aplikasi Web

Untuk management bandwith yang dilakukan di nganjuk yang memiliki sumber dari 3 provider ISP yang terdiri dari LAXO, Smart Connect dan Lintas Arta yang menyumbang bandwith masing - masing sebesar 1 G, dan 250 MB, berikut table yang dapat dipetakan.

Tabel 2.1. Daftar alamat IP, dan Server Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

ISP LAXO GLOBAL AKSES		
	119.2.47.129	1000 mb
1	119.2.47.130/27	Server Nganjukkab
2	119.2.47.131	Siprestasi
3	119.2.47.132	Sipentol
4	119.2.47.133	sedudo
5	119.2.47.134	Simas
6	119.2.47.135	TTElektronik
7	119.2.47.136	absensi
8	119.2.47.137	sikn
9	119.2.47.138	server baru PPDB
10	119.2.47.139	sipd
11	119.2.47.140	Router pak hari
12	119.2.47.141	pemilu
13	119.2.47.142	jalan
14	119.2.47.143	Rekrutmen Blud
15	119.2.47.144	(sudah di digunakan)
16	119.2.47.145	radio rsal
17	119.2.47.146	ubuntu mail nganjukkab
18	119.2.47.147	(sudah di digunakan)
19	119.2.47.148	centos 7 mail server

ISP LAXO GLOBAL AKSES		
20	119.2.47.149	(belum diketahui)
21	119.2.47.150	siskeudes
22	119.2.47.151	(belum diketahui)
23	119.2.47.152	HARDWARE MANAJAMEN SISKEUDES
24	119.2.47.153	(belum diketahui)
25	119.2.47.154	(belum diketahui)
26	119.2.47.155	(belum diketahui)
27	119.2.47.156	(belum diketahui)
28	119.2.47.157	jaringan
29	119.2.47.158	Router dan Proxmox
30	103.38.101.114	Siak Dispenduk
31	103.38.103.67/29	LPSE
32	103.38.103.65	Gateway
33	103.38.103.70	PC
ISP SMART CONNECT		
34	118.97.221.245	Bapenda
ISP LINTAS ARTA 250 MB		
35	114.4.87.160/28	PTP
36	114.5.87.161	Gateway
37	114.5.87.162-175	IP Publik

BAB 3 KAPABILITAS INFRASTRUKTUR

Kapabilitas Infrastruktur di Kota Nganjuk merupakan kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti organisasi, orang, ataupun sistem. Kapabilitas infrastruktur SPBE dalam penerapannya dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau setiap level pemerintahan dan instansi, optimalisasi penggunaan Aplikasi SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai, dan penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas sesuai dengan Cetak Biru (*BluePrint*) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Kapabilitas infrastruktur SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi komponen infrastruktur yang terlibat dalam sejumlah layanan utama yang berjalan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif berupa struktur pendukung (rincian perangkat keras, perangkat lunak) mengacu pada kualitas yang diharapkan. Pemetaan kapabilitas infrastruktur SPBE didasarkan pada identifikasi layanan berdasarkan proses bisnis di Kota Nganjuk yang didukung dengan kebutuhan infrastruktur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Model Arsitektur integrasi merupakan kebutuhan penting dalam proses bisnis di Kota Nganjuk yang memiliki kompleksitas yang tinggi, dimana direkomendasikan untuk kebutuhan integrasi layanan layanan yang telah terdefinisi dan penggunaan sistem yang berbeda dengan harapan terdapat adanya proses kontrol. Pemodelan arsitektur ini memberikan pendekatan dan strategi untuk mengintegrasikan layanan (Sub kategori layanan), proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi secara menyeluruh. Pemodelan arsitektur integrasi ini diawali dengan mendeskripsikan konsep-konsep bisnis pada layanan untuk penetapan kebutuhan integrasi bagi setiap layanan untuk seluruh pengguna. Selanjutnya, dari setiap komponen konseptual bisnis yang telah terdefinisi, diterjemahkan ke dalam komponen-komponen yang

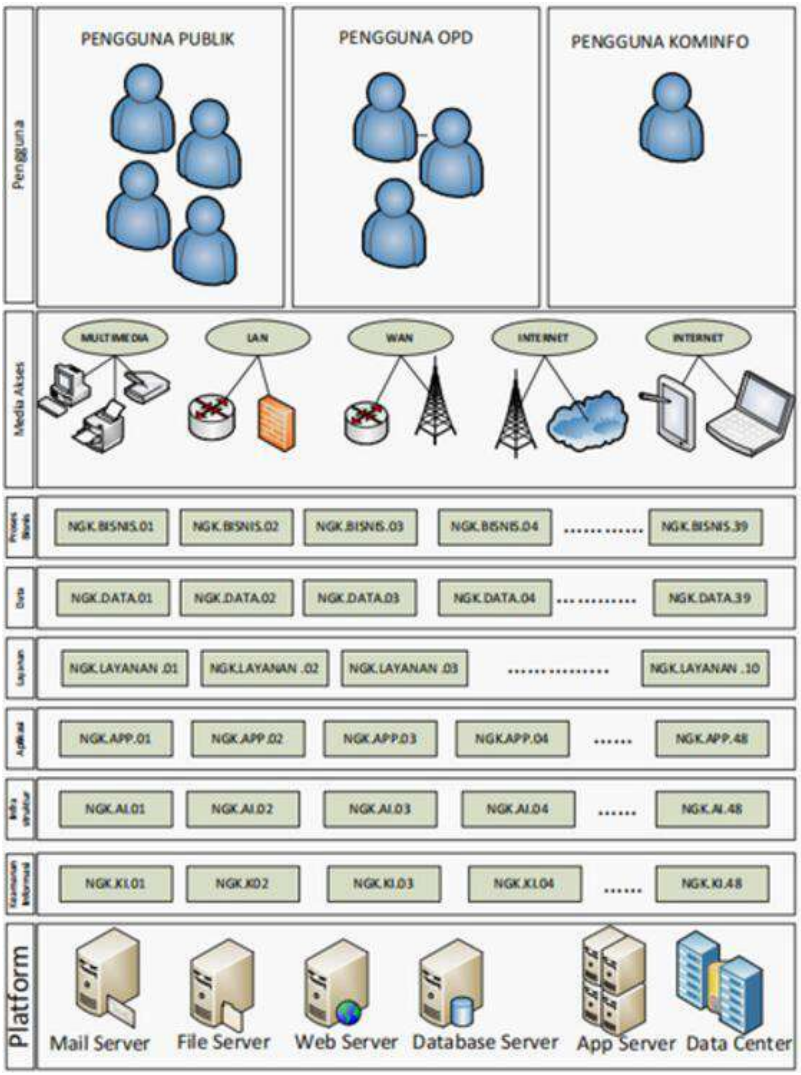
dibutuhkan, terutama kebutuhan platform fisik untuk setiap lapisan arsitektur. Mekanisme dan pengaturan layanan pada pemodelan ini mengacu pada aktivitas proses bisnis dimana pengguna menggunakan media akses tertentu untuk berinteraksi terhadap layanan tertentu. Terdapat beberapa lapisan yang ada pada arsitektur model integrasi ini

1. Lapisan Pengguna: merupakan Otorisasi tingkat layanan pengguna yang

akan berinteraksi dengan proses dan layanan Kota Nganjuk.

2. Lapisan Media akses: media yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan yang terdapat di Kota Nganjuk.
3. Lapisan Proses Bisnis: Kumpulan Fungsi utama dan pendukung bisnis.
4. Lapisan Data : Kumpulan data dan informasi yang ada dalam proses bisnis
5. Lapisan Layanan: Kumpulan kemampuan layanan yang disampaikan.
6. Lapisan Aplikasi: Kumpulan aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Lapisan Infrastruktur : Kumpulan berbagai infrastruktur yang mendukung data, aplikasi, layanan dan keamanan informasi.
8. Lapisan Keamanan Informasi : Kumpulan sistem pendukung keamanan informasi pada pemerintahan
9. Lapisan Platform: Infrastruktur teknologi

Arsitektur integrasi merupakan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai macam sistem yang berbeda dengan harapan memudahkan kontrol terhadap proses bisnis. Pada proses integrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja standar pada SOA (*Service Oriented Architecture*). Dengan memanfaatkan SOA diharapkan adanya solusi yang tepat untuk mendapatkan sebuah infrastruktur yang baik dengan kemampuan integrasi yang sudah terkelola, dengan memberikan kemudahan pertukaran informasi antar aplikasi, mengurangi pengaruh jika terjadi perubahan, dan adanya penekanan biaya untuk keperluan integrasi dan modifikasi aplikasi. Setiap lapisan arsitektur mendeskripsikan hubungan dari mulai lapisan pengguna sampai dengan lapisan platform atau teknologi yang digunakan, berikut penjelasan dari strategi integrasi setiap lapisan arsitektur:



Gambar 3.1. Arsitektur di Kota Nganjuk

a. Lapisan Pengguna

Pada lapisan ini diidentifikasi siapa saja pengguna yang ada dan terlibat dalam mengakses layanan yang terdapat di Kota Nganjuk, kewenangan dan kemudahan pengguna diberikan untuk melakukan proses tertentu sesuai dengan kapasitas dan status dari pengguna tersebut terutama untuk mendapatkan informasi. Para pengguna diidentifikasi hak aksesnya untuk berinteraksi dengan sistem sesuai otoritas akses terhadap layanan yang diterjemahkan kedalam peran dan hak-hak yang secara logis diterapkan di dalam otentikasi keamanan. Pengguna dengan melakukan satu kali *sign on* (SSO), akan mendapatkan informasi

dan daftar proses sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.

b. Lapisan Media Akses

Lapisan ini mencerminkan dimana para pengguna dapat menggunakan media akses yang berbeda untuk mendapatkan akses ke informasi atau proses yang mereka butuhkan dalam melakukan penggunaan akses layanan bisnis. Penetapan media untuk akses layanan sangat penting untuk dipertimbangkan. Berdasarkan proses bisnis yang ada, serta analisis kebutuhan informasi layanan terdapat berbagai macam media akses yang digunakan untuk menunjang operasional dengan menyesuaikan keinginan pengguna. Media akses yang dibutuhkan terdiri dari media fisik berupa perangkat peripheral, media jaringan LAN, WAN, internet.

c. Lapisan Proses Bisnis

Lapisan ini merupakan lapisan yang mengidentifikasi proses bisnis yang ada di Pemerintah Kota Nganjuk yang bersumber dari dokumen RPJMD Kabupaten Nganjuk. Pengelompokan proses bisnis di Kota Nganjuk mendefinisikan keterkaitan antara tujuan yang sudah selaras dengan visi dan misi Kota Nganjuk yang diturunkan pada sub fungsi dalam tiga proses bisnis utama dan enam proses bisnis pendukung. Proses bisnis Kota Nganjuk tersebar di semua O P D, Badan dan Lembaga yang ada mencakup I D pada NGK. Bisnis.01 sampai dengan NGK.Bisnis.39.

d. Lapisan Layanan Bisnis

Lapisan ini menjelaskan layanan bisnis apa saja yang terdapat dalam proses bisnis yang telah ada. Layanan bisnis merupakan kumpulan layanan yang memiliki nilai untuk proses bisnis. Lapisan ini mengacu pada permasalahan interoperabilitas pada lingkup

platform yang dipecahkan melalui pengembangan teknologi-teknologi dan standar untuk integrasi

dengan platform teknologi yang berbeda. Perkembangan teknologi dan standar aplikasi memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Kumpulan kemampuan layanan di Kota Nganjuk dihasilkan dari kategori layanan yang telah didefinisikan sebelumnya pada arsitektur layanan, yang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan keinginan pengguna. Proses bisnis Kota Nganjuk tersebar di s e m u a OP D, B a da n d a n L emb a g a y a n g a d a me n c ak u p I D pada NGK.Layanan.01 sampai dengan NGK.Layanan.39.

e. Lapisan Layanan Aplikasi

Lapisan layanan aplikasi merupakan layanan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk untuk mengakses suatu layanan bisnis yang merupakan bagian-bagian dari proses bisnis yang ada di Kota Nganjuk. Pendekatan layanan aplikasi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan aplikasi yang diintegrasikan ke dalam arsitektur layanan. Strategi integrasi memberikan arah tentang bagaimana aplikasi dukungan dapat mendukung arsitektur layanan, dan sistem ini memiliki nilai strategis tinggi untuk organisasi. Layanan aplikasi yang direkomendasikan, dilakukan melalui pendekatan arsitektur berorientasi layanan untuk menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh pengguna melalui berbagai media akses, yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Strategi ini dipetakan dalam pemaketan layanan yang merupakan salah satu ciri dari pendekatan arsitektur berorientasi layanan. Kombinasi dari lapisan integrasi dan lapisan layanan bisnis menggunakan sebagai ***Enterprise Service Bus*** (ESB). ESB merupakan infrastruktur penunjang yang terdistribusi, untuk melakukan integrasi dan mengatur layanan bisnis. Dalam mengintegrasikan aplikasi-aplikasi dukungan yang

disajikan dibuat dalam bentuk paket-paket layanan pada lapisan integrasi layanan, yang secara jelas digambarkan pada domain arsitektur layanan.

f. Lapisan Aplikasi

Lapisan ini merupakan penggambaran kembali mengenai aplikasi yang telah teridentifikasi dan digunakan dalam pembentukan infrastruktur teknologinya. Lapisan ini merupakan tempat semua artefak terkait dengan aplikasi dukungan yang terintegrasi atau perlu diintegrasikan dengan arsitektur layanan. Pada lapisan ini direkomendasikan menggunakan teknologi web services, karena karakteristik dan pola dari teknologi ini sinergi dengan kebutuhan integrasi layanan aplikasi yang telah ada dan aplikasi yang baru dapat terjadi interaksi.

g. Lapisan Infrastruktur

Lapisan ini merupakan platform yang diusulkan untuk digunakan dalam pembentukan infrastruktur teknologinya. Lapisan ini direpresentasikan pada kebutuhan teknologi yang diperlukan dalam lingkungan bisnis untuk penyediaan layanan TI, yang merupakan kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan untuk mendukung beroperasinya layanan yang digunakan organisasi. Dalam mendefinisikan kebutuhan teknologi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap prinsip dan platform teknologi yang akan

digunakan. Prinsip platform teknologi, yang memiliki kebutuhan pemenuhan *enterprise-wide*. Proses dan layanan dimungkinkan dapat diakses oleh seluruh pemakai, dimana saja, kapan saja, dan melalui media akses yang berbeda-beda. Platform yang saat ini telah ada di Kota Nganjuk, perangkat lunak sistem operasi dan server (windows, linux, Zimbra, PHP apache server), perangkat database (MySQL, Ms. Access, MariaDB). Dalam pemilihan platform ESB dapat mempertimbangkan beberapa produk ESB, misalnya IBM App Connect, Microsoft Azure Service Bus, Oracle Enterprise Service Bus, atau yang open-source Apache Camel, Apache Synapse Pemilihan platform tersebut harus dipertimbangkan kesesuaiannya, sebagai dukungan terhadap fungsi yang diperlukan, jaminan keberlangsungannya untuk kebutuhan bisnis di masa mendatang, serta kepatuhan terhadap kebutuhan standar implementasi, dan dukungan terhadap internal dan vendor.

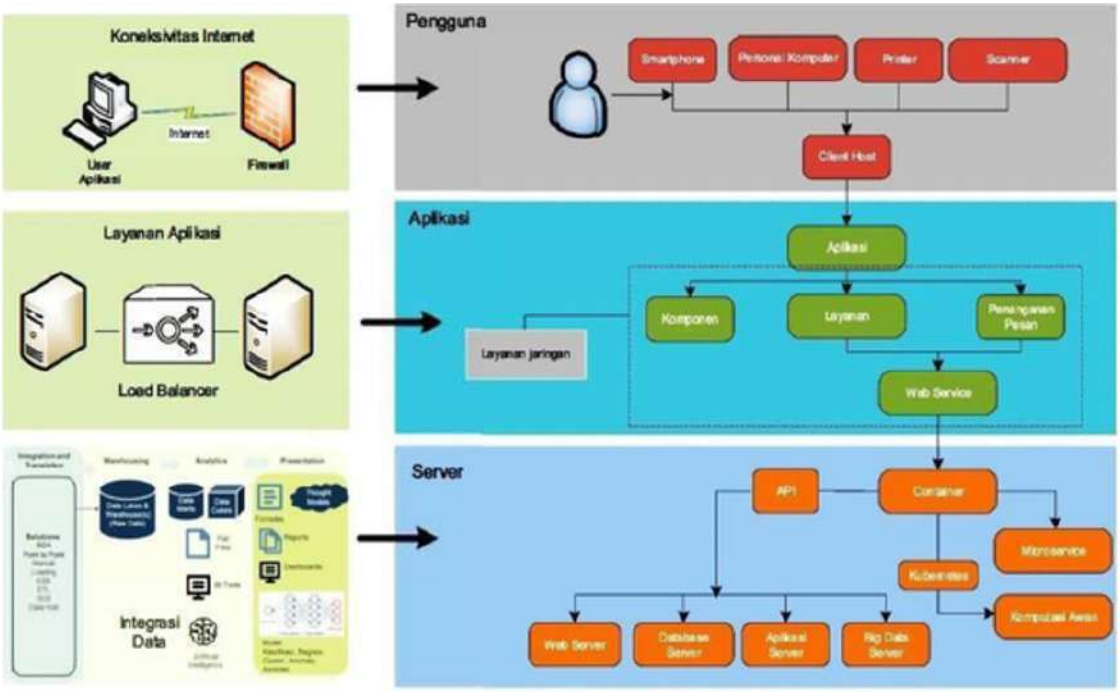
BAB 4 INFRASTRUKTUR TARGET

1. Arsitektur Teknologi Layanan

Arsitektur ini menjelaskan elemen utama infrastruktur teknologi layanan di Kota Nganjuk. Hal ini deskripsikan dalam tiga lapisan persegi panjang, yang menggambarkan elemen infrastruktur yang terdiri area pengguna, area layanan aplikasi, area server. Elemen ini digambarkan dalam diagram yang mengilustrasikan bagaimana infrastruktur fisik dipetakan ke kemampuan logis. Arsitektur infrastruktur teknologi layanan ini akan digunakan untuk merancang lingkungan target meliputi:

1. Area pengguna yang terdiri dari perangkat *peripheral* yang menjadi media akses pengguna. Dalam hal ini pengguna terhubung pada aplikasi dengan menggunakan jaringan internet, ditunjukkan dengan dengan panah ke area aplikasi.
2. Area layanan aplikasi terdiri dari komponen, layanan, penanganan pesan yang mengacu proses pada aplikasi. Pada area ini digunakan teknologi web services, untuk kebutuhan integrasi layanan aplikasi yang telah ada dan aplikasi yang baru. Pada prosesnya area ini membutuhkan load balancer untuk proses pendistribusian traffic layanan jaringan aplikasi ke beberapa server.
3. Area server meliputi terdiri dari web server, database server, aplikasi server, big data server. Pada area ini menjelaskan penerapan teknologi komputasi awan merupakan teknologi pengelolaan data dan informasi internet tanpa terlihatnya bentuk fisik infrastruktur dan platform yang digunakan. Kemudian, teknologi berbagi pakai layanan (*shared service*) yang menggunakan arsitektur microservice, dimana microservice merupakan pendekatan pengembangan aplikasi dalam satuan/ unit terkecil, baik dapat berupa fungsi kompleks atau fungsi terkecil.

Pada area ini dijelaskan juga terkait elemen lingkungan integrasi data yang ditampilkan terhubung ke beberapa penyimpanan untuk database relasional, OLAP database, dan big data database yang dijembatani oleh aplikasi dukungan dan big data analytics.

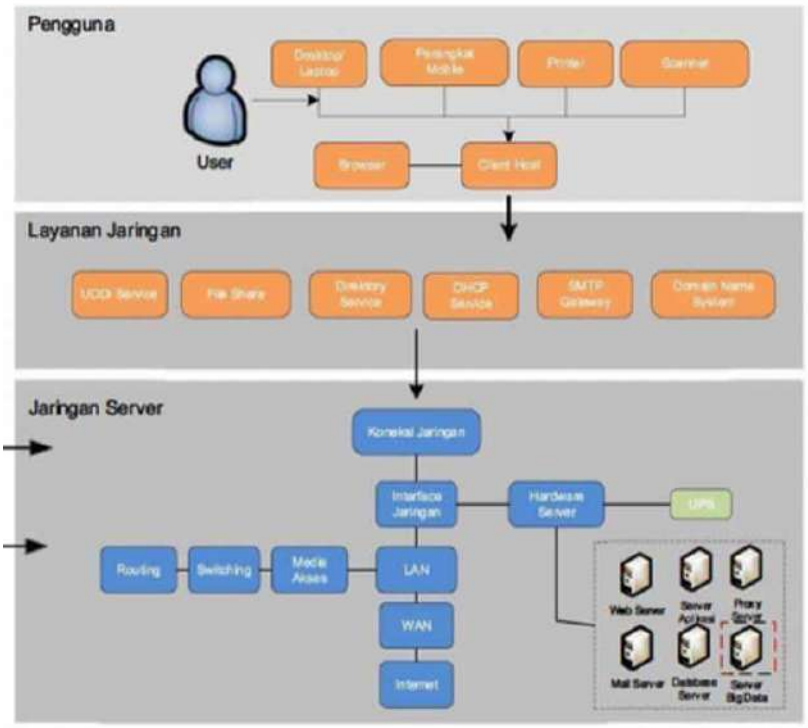


Gambar 4.1. Arsitektur Infrastruktur Teknologi Layanan Pemerintah Kota Nganjuk

2. Arsitektur Jaringan

Konseptual arsitektur jaringan Kota Nganjuk dibangun berdasarkan pada kebutuhan strategi distribusi data dan aplikasi serta hubungan sharing data diantara unit kerja organisasi dan institusi lain serta masyarakat dengan memperlihatkan lokasi bisnis. Kondisi dari arsitektur jaringan mencakup infrastruktur dasar diantaranya *Local Area Network* (LAN). *Wide Area Network* (WAN), dan Internet. Selain itu arsitektur infrastruktur jaringan juga mencakup teknologi dengan menerapkan konsep jaringan intra pemerintah dengan proses pengelolaan berupa pusat kendali jaringan dengan mengadopsi virtualisasi server, fasilitas komputasi, virtualisasi jaringan, optimalisasi storage dengan teknologi VPN (*Virtual Private Network*).Dalam perencanaan terkait penerapan data warehouse, *big data analytics*, dan AI diharapkan menambah perangkat server dan jalur komunikasi dengan mengacu pada penerapan konsep teknologi *High Performance Computing Cluster* (HPCC) dalam processing terhadap suatu data, seperti, Extract, Transform, dan Load.

Konseptual arsitektur jaringan ini meliputi sistem penghubung layanan pemerintah, operasi komputasi, masukan, keluaran, perangkat penyimpanan dan fasilitas komunikasi. Konseptual arsitektur jaringan untuk fungsi bisnis utama di Kota Nganjuk.

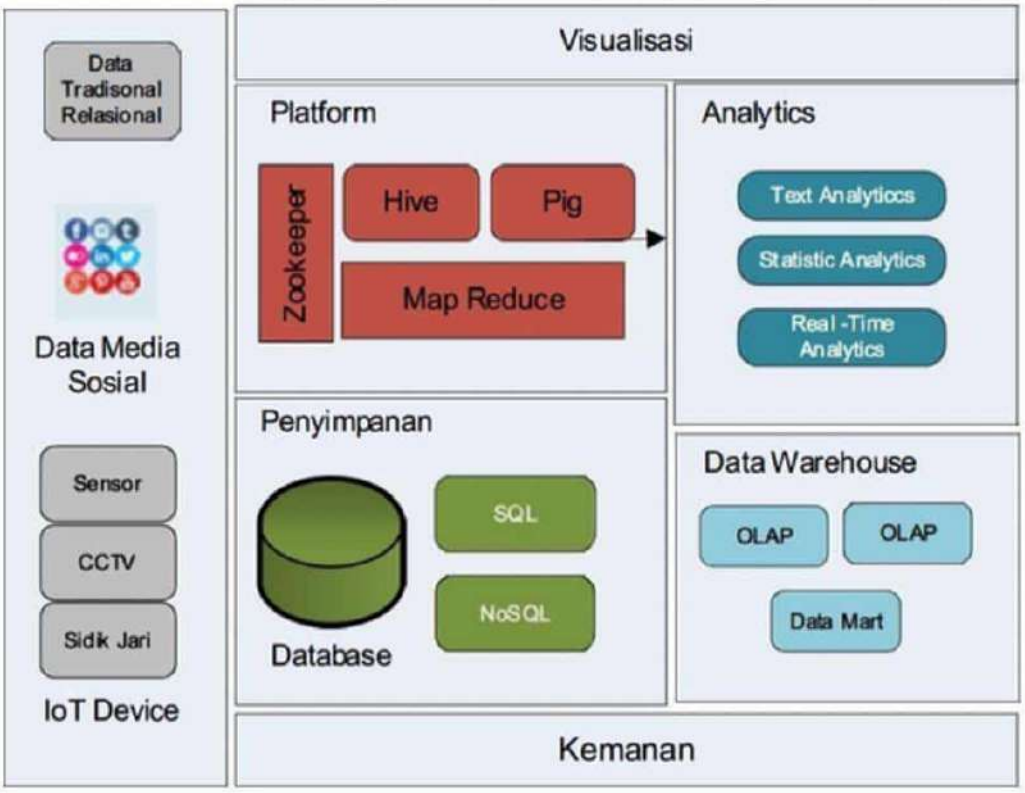


Gambar 4.2. Arsitektur Infrastruktur Jaringan Kota Nganjuk

3. Arsitektur Pusat Layanan Big Data

Arsitektur pusat layanan big data mengacu pada perencanaan arsitektur data yang terdiri dari five-tiers, dimana dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan kecepatan dari proses generate report dengan dilandasi integrasi menggunakan SOA. Arsitektur pusat data dikelola lebih dari platform data, basis data relasional tradisional (RDBMS), NoSQL, penyimpanan berbasis cloud. Kebutuhan untuk pelaporan, analitik, integrasi, kualitas, metadata, pengembangan, dan administrasi dipengaruhi ketersediaan infrastruktur sehingga diharapkan dapat memberikan optimalisasi terutama kecepatan, skala, interoperabilitas, dan ketersediaan.Komponen infrastruktur pusat data bergantung pada perangkat keras yang dimiliki saat ini oleh Kota Nganjuk yaitu memori server, jaringan,penyimpanan, dan layanan cloud. Komponen yang diperlukan dari arsitektur yang harus menjadi bagian dari sistem pusat data menggunakan kerangka kerja open source atau berlisensi untuk memanfaatkan sepenuhnya semua fitur dari berbagai komponen

sistem tersebut. Arsitektur layanan big data terdiri dari lapisan-lapisan yang digambarkan di bawah ini :



Gambar 4.3. Arsitektur layanan big data Kota Nganjuk

1. Lapisan Sumber Data

Lapisan ini mendefinisikan berbagai jenis sumber data baik data internal maupun data dari eksternal Kota Nganjuk (data RDBMS, data media sosial, data IoT) yang perlu dianalisis. Kategori data ini didefinisikan sebagai big data dalam yang dicirikan oleh volume, ragam, kecepatan yang sangat besar. Aliran data pada arsitektur ini sangat kompleks sehingga perlu kemampuan untuk memvalidasi, membersihkan,mengubah, mengurangi, dan mengintegrasikan data.

2. Lapisan Keamanan

Lapisan ini dirancang untuk perlindungan data karena keamanan data ini menjadi perhatian utama. Mengacu pada Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE, data dan informasi merupakan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE dengan berlandaskan standar kriteria SNI ISO
/IEC 27001. Data dari media sosial dan IoT merupakan penggunaan data yang sangat memerlukan proses perlindungan, baik untuk memenuhi persyaratan kepatuhan maupun untuk melindungi data individu.

3. Lapisan Penyimpanan

Lapisan ini dideskripsikan untuk menyimpan data dengan menggunakan penyimpanan serta pemrosesan data secara besar-besaran yang merupakan perubahan Kota Nganjuk dalam mengelola data. Penyimpanan ini merupakan sistem penyimpanan file terdistribusi dengan jenis SQL dan NoSQL yang dirancang untuk menyimpan data yang sangat besar (terabyte atau petabyte) melalui perangkat dengan konsep cluster.

4. Lapisan Data Warehouse

Lapisan ini berisi catatan yang terdiri dari data dan informasi yang berasal dari transaksi operasional maupun transaksi historis di Kota Nganjuk, yang ditempatkan dalam database yang dirancang untuk mengistimewakan penganalisisan data dan pelaporan (terutama OLAP). Dalam proses migrasi data pada lapisan ini diperlukan beberapa proses seperti ETL (Extract, Transform dan Load). Pada lapisan ini diterapkan konsep data mart untuk mendukung pembuatan laporan dan analisa data.

5. Lapisan Platform

Lapisan ini menyediakan perangkat yang diperlukan untuk memproses dengan *platform cluster Hadoop* dengan konsep MapReduce

serta Bahasa query untuk mengakses database NoSQL dengan menggunakan sistem file penyimpanan HDFS terdistribusi (Pig, Hive, Spark, Sqoop, dll). Proses manipulasi dan pemrosesan data menggunakan kerangka pemrosesan paralel. Teknologi utama pada lapisan ini berkaitan dengan pergerakan data dalam lingkungan komputasi terdistribusi.

6. Lapisan Visualisasi

Lapisannya ini berkaitan terkait analisis data untuk memahami lebih baik dan lebih cepat dalam memeriksa berbagai aspek data dalam mode visual yang memungkinkan pengguna dapat bekerja dengan komputasi bahasa yang mudah dipahami.

Proses pemetaan kebutuhan infrastruktur ini dilakukan dengan mengukur dan mengkategorikan kesenjangan kualitas yang mengacu pada ketersediaan infrastruktur saat ini sesuai metadata infrastruktur yang dapat digunakan sebagai landasan peningkatan kualitas infrastruktur. Analisis gap ini menjadi acuan untuk perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kota Nganjuk. Pada proses ini dilakukan langkah perbandingan antara infrastruktur saat ini dan infrastruktur ke depan sesuai arsitektur target. Gambaran kondisi infrastruktur saat ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan dan perbaikan yang harus dilakukan oleh Kota Nganjuk, sehingga diharapkan menjadi acuan untuk persiapan Kota Nganjuk dalam merencanakan kebutuhan infrastruktur pada arsitektur target yang telah ditetapkan. Analisis gap dibuat dalam bentuk tabel matriks, dengan ketentuan-ketentuan bahwa komponen infrastruktur saat ini (as-is) ditempatkan pada kolom pertama yang merupakan gambaran kondisi infrastruktur saat ini yang

terdapat di Kota Nganjuk. Berikutnya komponen arsitektur kedepan (to-be) ditempatkan pada baris kedua yang menjelaskan kebutuhan komponen-komponen infrastruktur baru yang mendukung rencana target arsitektur yang telah ditetapkan.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR



ARSITEKTUR LAYANAN SPBE KABUPATEN NGANJUK



Kata Pengantar

Buku Arsitektur Layanan ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan dokumen Arsitektur SPBE yang terdiri dari buku: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan Informasi. Dokumen ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Buku ini terdiri dari 4 pokok pembahasan yaitu : Inisiatif Strategis Layanan SPBE, Kondisi yang Diharapkan, Detail Kondisi yang Diinginkan, dan Peta Jalan Arsitektur Layanan SPBE. Tiada gading yang tak retak, semoga buku yang belum sempurna ini dapat menjadi referensi dalam melengkapi dokumentasi SPBE untuk pencapaian kinerja pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

Nganjuk, 10 Mei 2023

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Pendahuluan 1
A. Inisiatif Strategis Layanan SPBE 4
1. Pemetaan Layanan 5
2. Kondisi Layanan Kabupaten Nganjuk Saat Ini 82
3. Metadata dan Tipe Layanan 88
A. Kondisi yang Diharapkan 252
1. Penyedia Layanan 252
2. Paket Layanan 268
B. Detail Kondisi yang Diinginkan 270
1. Katalog Status Layanan 271
2. Analisis Kesenjangan 274
3. Daftar Pekerjaan Kabupaten Nganjuk 275
C. Peta Jalan Arsitektur Layanan SPBE 277

Daftar Tabel

Tabel 1 Pemetaan Pengelompokan Layanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Penanggung jawabnya 3
Tabel 2 Pemetaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Pemerintahan Kabupaten Nganjuk 18
Tabel 3 Keadaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk 83
Tabel 4 Metadata Layanan Kabupaten Nganjuk 91
Tabel 5 Tipe Layanan Kabupaten Nganjuk 237
Tabel 6 Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan Kabupaten Nganjuk 254
Tabel 7 Paket Layanan Kabupaten Nganjuk 269
Tabel 8 Daftar Pekerjaan Solusi Layanan 276
Tabel 9 Peta Jalan Arsitektur Layanan Kabupaten Nganjuk 278

Daftar Gambar

Gambar 1 Posisi Domain Layanan diantara arsitektur SPBE lainnya 2
Gambar 2 Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan SDI 5
Gambar 3 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 6
Gambar 4 Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk 7
Gambar 5 NGK.01. Peningakatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 8
Gambar 6 NGK.02. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah 8
Gambar 7 NGK.03. Peningkatan Stabilitas Sosial 9
Gambar 8 NGK.04. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 9
Gambar 9 NGK.05. Peningkatan Kualitas Pendidikan 10
Gambar 10 NGK.06. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk 10
Gambar 11 NGK.07. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak 11
Gambar 12 NGK.08. Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Sektor Pertanian dan Perikanan 11
Gambar 13 NGK.09. Peningkatan Volume Sektor Industri dan Perdagangan 12
Gambar 14 NGK.10. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan 12
Gambar 15 NGK.11. Peningkatan Iklim Investasi 13
Gambar 16 NGK.12. Peningkatan Kemandirian dan Pemberdayaan Desa 13
Gambar 17 NGK.13. Peningkatan Daya Saing Pariwisata 14
Gambar 18 NGK.14. Peningkatan Pelestarian Budaya,Kesenian dan Tradisi Lokal Daerah 14
Gambar 19 NGK.15. Peningkatan Infrastuktur 15
Gambar 20 NGK.16. Peningkatan Pengelengaraan Penataan Ruang dan Pelestarian Lingkungan 15
Gambar 21 NGK.17. Peningkatan Kualitas Lingkungan 16
Gambar 22 NGK.18. Peningkatan Ketangguhan Penangulangan Bencana 16
Gambar 23 NGK.19. Peta Relasi 17
Gambar 24 Klasifikasi Layanan Kabupaten Nganjuk 89
Gambar 25 Layanan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk 236
Gambar 26 Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan 253
Gambar 27 Pemaketan Layanan Kabupaten Nganjuk 268
Gambar 28 Katalog Layanan SPBE Kabupaten Nganjuk 272
Gambar 29 Model Relasi Status Layanan SPBE Kabupaten Nganjuk 274

BAB V
ARSITEKTUR LAYANAN

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui ketetapan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengatur dan menjelaskan untuk memberikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik. SPBE digunakan sebagai sarana dalam mengimpementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan. Adanya peraturan presiden mengenai SPBE maka pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang lebih baik. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Layanan SPBE merupakan output yang dihasilkan dari beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE terdiri atas:

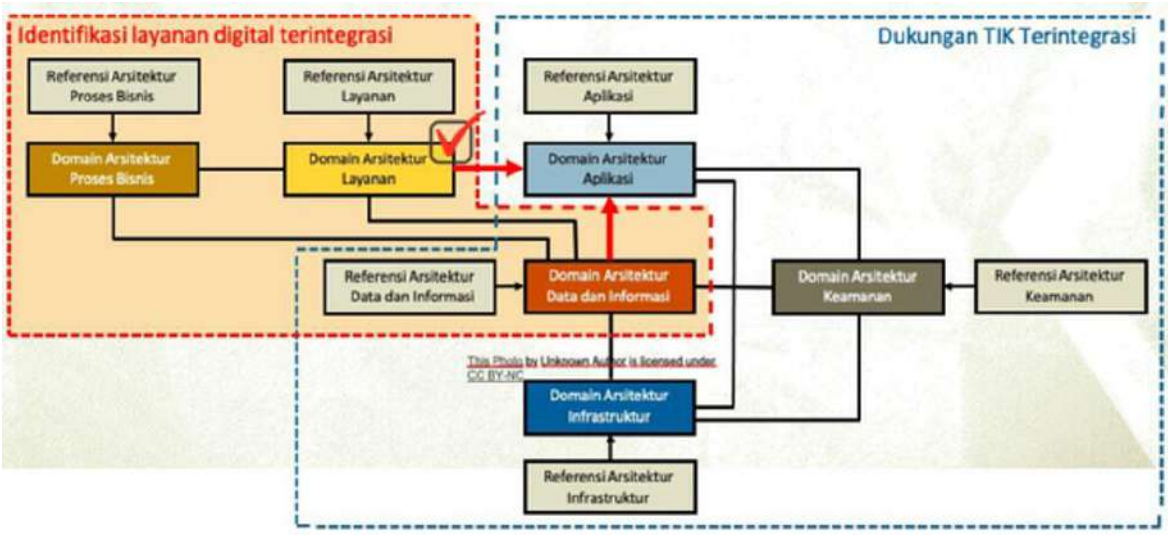
1. **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

   Layanan administrasi berfungsi untuk memenuhi semua layanan yang sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

2. **Layanan Publik Berbasis Elektronik**

   Layanan publik berbasis elektronik dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah.

Posisi Domain Layanan dalam kerangka arsitektur SPBE adalah sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1 Posisi Domain Layanan diantara arsitektur SPBE lainnya

Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah mempunyai layanan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang memadahi dan didukung dengan adanya kebijakan mengenai standar layanan, yaitu Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 335 Tahun 2022. Kebijakan tersebut berisi tentang peta proses bisnis pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Standar layanan adalah penerapan berbagai strategi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang memiliki sifat rumusan aturan, koordinasi dan penyesuaian aturan, bahkan pengawasan dan evaluasi aturan bidang pendayagunaan aparatur daerah dan reformasi birokrasi instansi daerah.

Standar layanan merupakan acuan untuk menilai mutu dan kinerja layanan yang diperuntukkan bagi yang menyelenggarakan layanan, penerima layanan (masyarakat), juga pejabat yang mengawasi jalannya layanan tersebut. Adapun pengelompokan layanan dalam standar layanan di wilayah Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

a. Data dan informasi;
b. Konsultasi;
c. Audiensi;
d. Sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
e. Penataan organisasi;
f. Penetapan kebutuhan calon Aparatur Sipil Negara;
g. Pengaduan pelayanan publik;
h. Layanan perpustakaan;
i. Penetapan tunjangan kinerja instansi Pemerintah;
j. Penetapan kelas jabatan;
k. Penetapan jabatan fungsional;

l. Penetapan hari dan jam kerja instansi Pemerintah;
m. Penetapan pakaian dinas instansi Pemerintah;
n. Pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sistem pemerintahan berbasis elektronik;
o. Penetapan tunjangan jabatan fungsional; dan
p. Penetapan hak keuangan pimpinan/ anggota lembaga non struktural.

Adapun implementasi masing-masing pengelompokan mengikutsertakan dan berada di bawah tanggung jawab masing-masing pihak yang berkaitan di wilayah Pemerintah Kabupaten Nganjuk, diantaranya adalah:

1. Pimpinan Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas);
2. Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah ;
3. Sekretariat Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Masing-masing pengelompokan layanan yang dipetakan beserta penanggung jawabnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Pemetaan Pengelompokan Layanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Penanggung jawabnya

NO	PENGELOMPOKAN LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Data dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Konsultasi	Pimpinan Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas)
3	Sosialisasi Aturan Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Pimpinan Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas)
4	Penataan Organisasi	Pimpinan Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas)
5	Penetapan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara	Sekretariat Daerah
6	Pengaduan Pelayanan Publik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PENGELOMPOKAN LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Layanan Perpustakaan	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Penetapan Tunjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pimpinan Unit Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas)
9	Penetapan Kelas Jabatan	Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah
10	Penetapan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Penetapan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	Penetapan Pakaian Dinas Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah
13	Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah	Sekretariat Daerah
14	Penetapan Tunjangan Jabatan Fungsional	Sekretariat Daerah
15	Penetapan Hak Keuangan Pimpinan/Anggota Lembaga Non Struktural	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, standar pelayanan dari setiap kategori layanan yang ada telah didefinisikan secara rinci untuk diterapkan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, terdiri dari:

1. Komponen Penyampaian Layanan, terdiri dari (a) Persyaratan; (b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (c) Jangka Waktu Pelayanan; (d) Biaya/Tarif; (e) Produk Layanan; (f) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi;
2. Komponen Pengelolaan Layanan, terdiri dari (a) Dasar Hukum; (b) Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas; (c) Kompetensi Pelaksana; (d) Pengawasan Internal; (e) Jumlah Pelaksana; (f) Jaminan Pelayanan; (g) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; (h) Evaluasi Kinerja Pelaksana.

A. Inisiatif Strategis Layanan SPBE

Inisiatif Strategis SPBE merupakan acuan untuk pelaksanaan SPBE dan uraian terperinci dari Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan Kabupaten Nganjuk untuk melakukan

pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Nasional. Dalam konteks layanan SPBE, inisiatif strategis dikembangkan untuk mewujudkan sasaran layanan SPBE sebagai turunan dari sasaran SPBE secara menyeluruh, seperti pada Gambar 2.



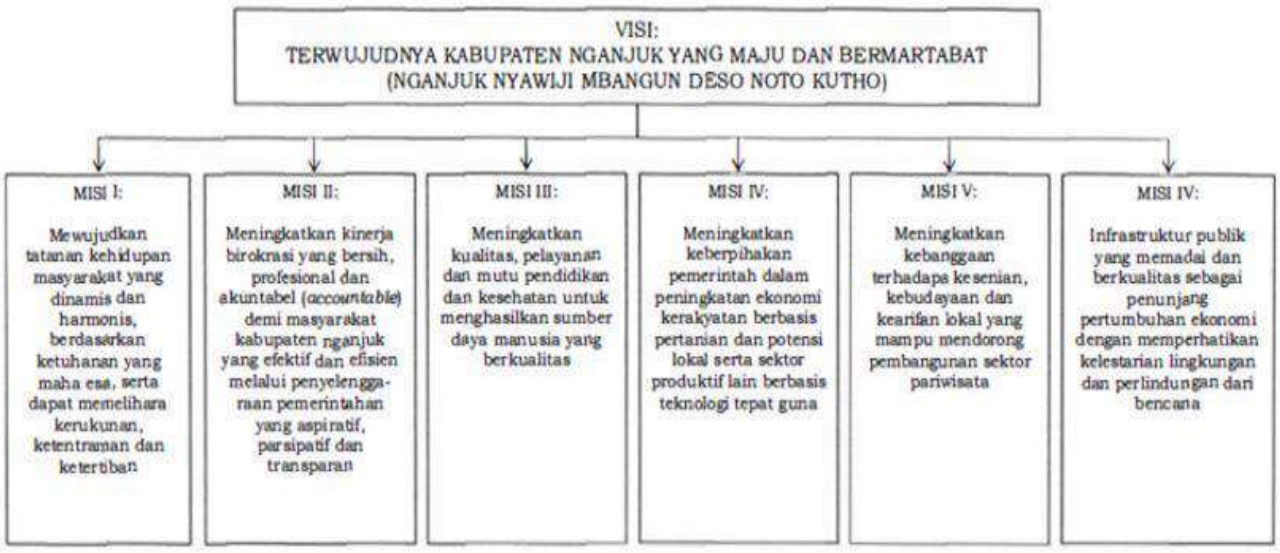
Gambar 2 Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan SDI

Daftar pekerjaan solusi dalam bentuk pelayanan aplikasi pemerintahan merupakan bagian dari Inisiatif sasaran strategis layanan SPBE yang diwujudkan ke dalam tahapan peta jalan yang terkait dengan kemampuannya. Daftar pekerjaan solusi tersebut merupakan seperangkat kemampuan akan datang, dimana banyak stakeholder SPBE dapat dijangkau dalam rangka kemajuan solusi dan pembangunan SPBE. Daftar pekerjaan solusi sebagai bagian dari komponen inisiatif strategis SPBE juga mengindikasikan inisiatif strategis bagian dari Layanan Aplikasi Pemerintah. Layanan aplikasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah diimplementasikan dalam beberapa proses utama maupun pendukung. Akan tetapi, dalam rangka penentuan kemampuan kebutuhan yang akan datang, membutuhkan identifikasi lebih rinci yaitu dengan pemetaan terhadap atribut Metadata Arsitektur Layanan SPBE.

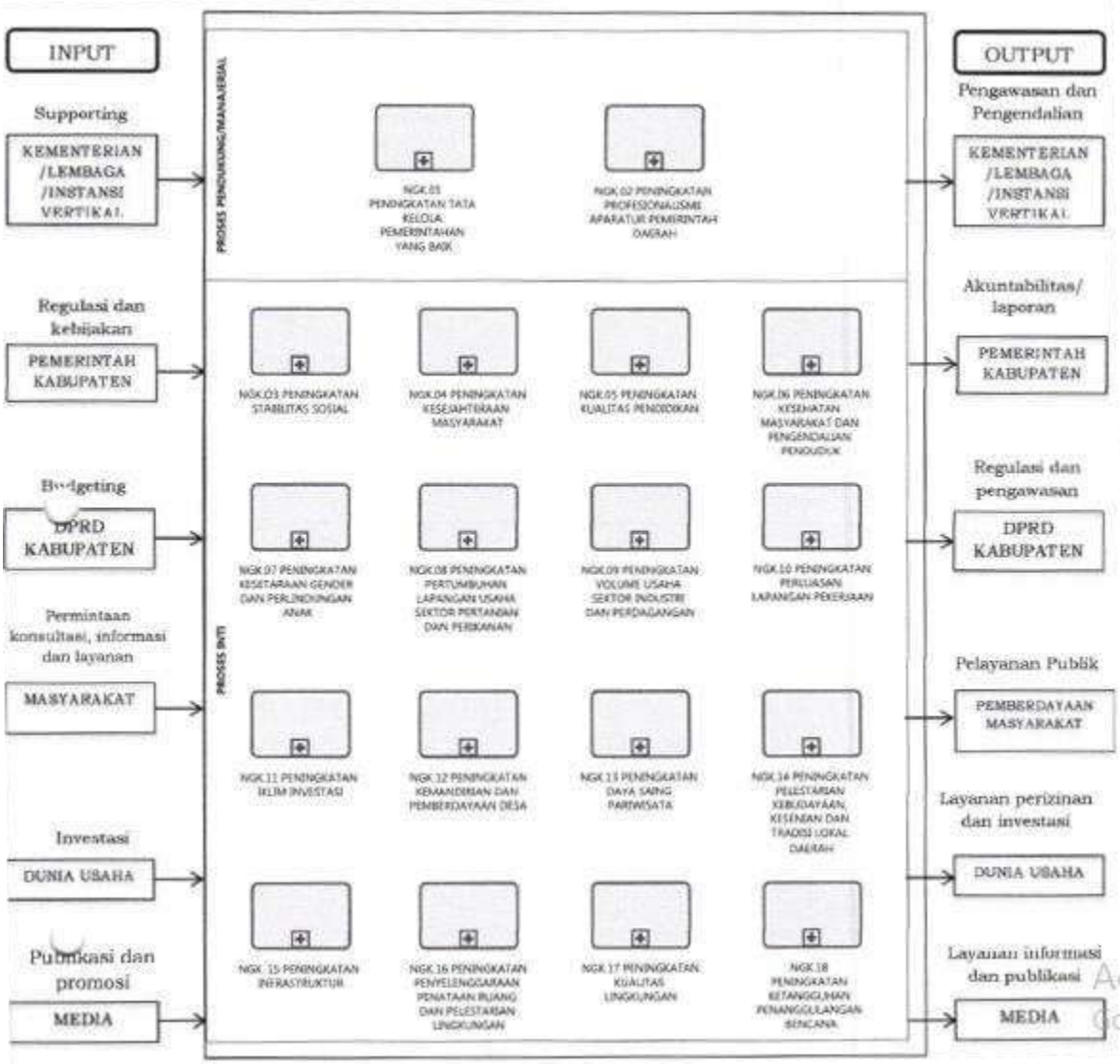
1. Pemetaan Layanan

Berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 335 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, Pemkab Nganjuk telah melakukan pemodelan Visi dan Misi seperti tampak pada Gambar 3 dan penjelasan Peta Proses Bisnis pada

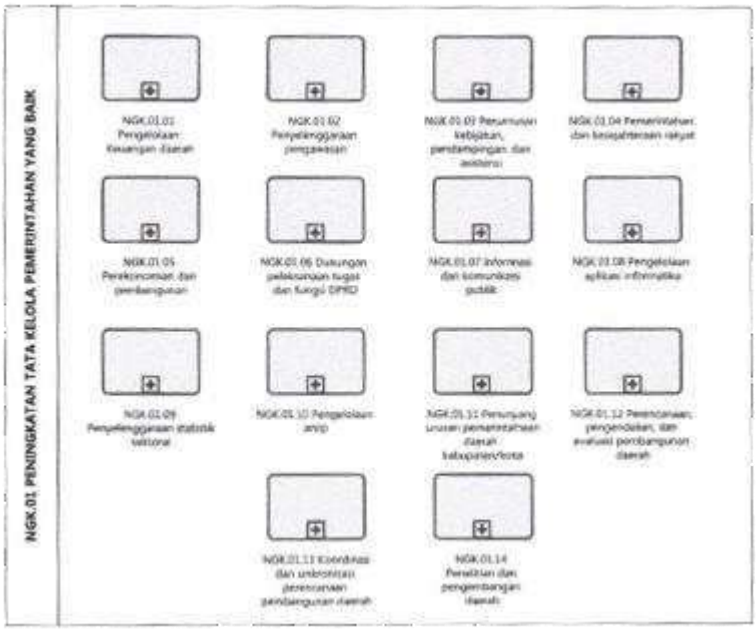
Gambar 4. Pemkab Nganjuk memetakan 16 (enam belas) Proses Inti dan 2 (dua) Proses Pendukung/Manajerial. Adapun masing-masing proses bisnis secara terperinci disajikan pada Gambar 5 sampai Gambar 22. Sedangkan peta relasi disajikan pada Gambar 23.



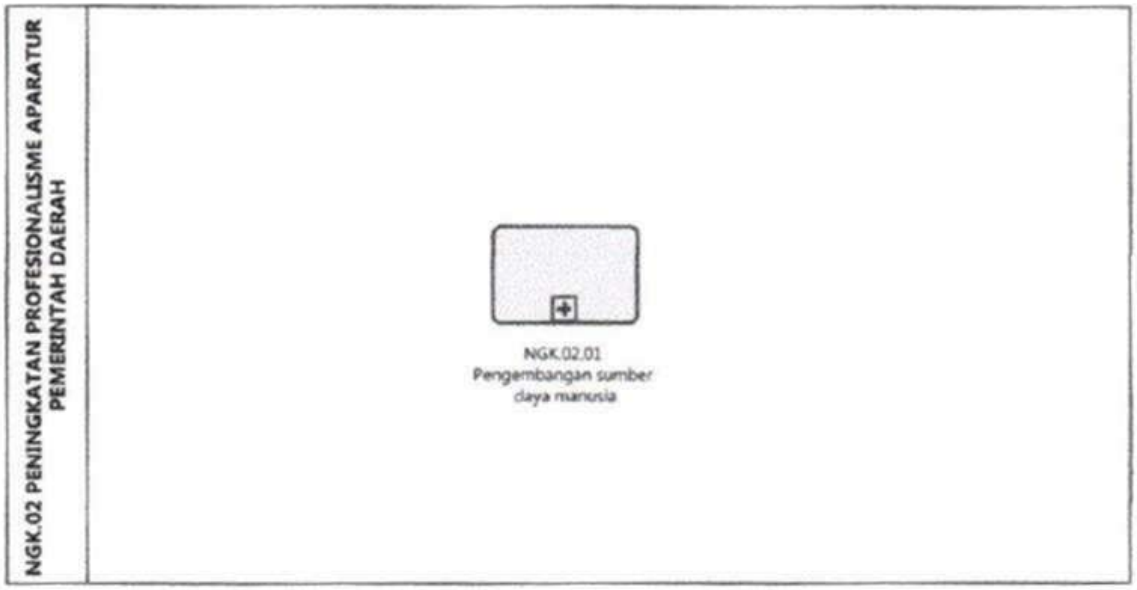
Gambar 3 Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023



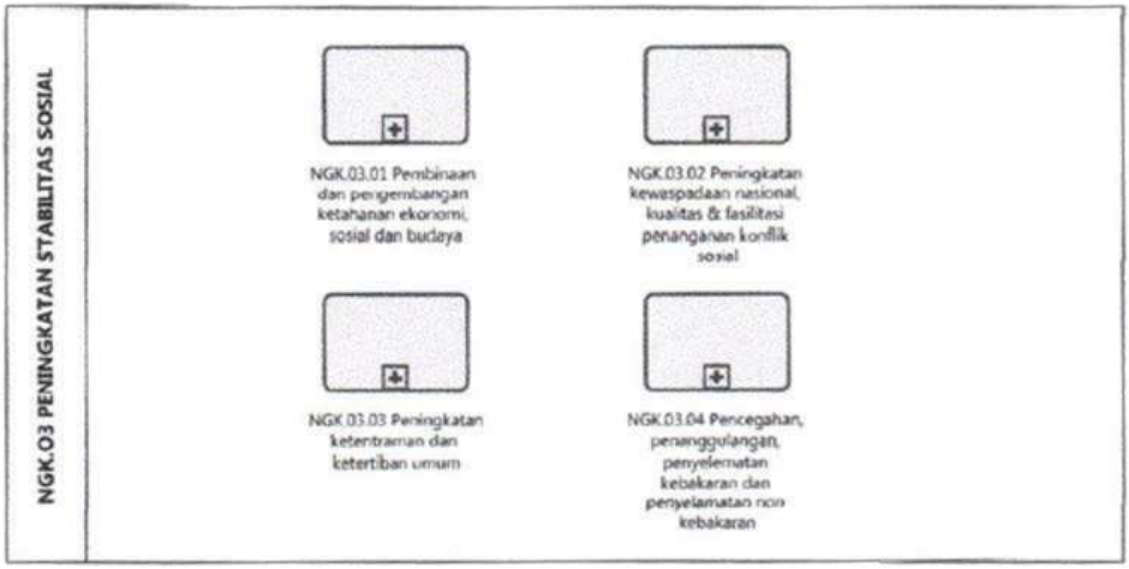
Gambar 4 Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Nganjuk



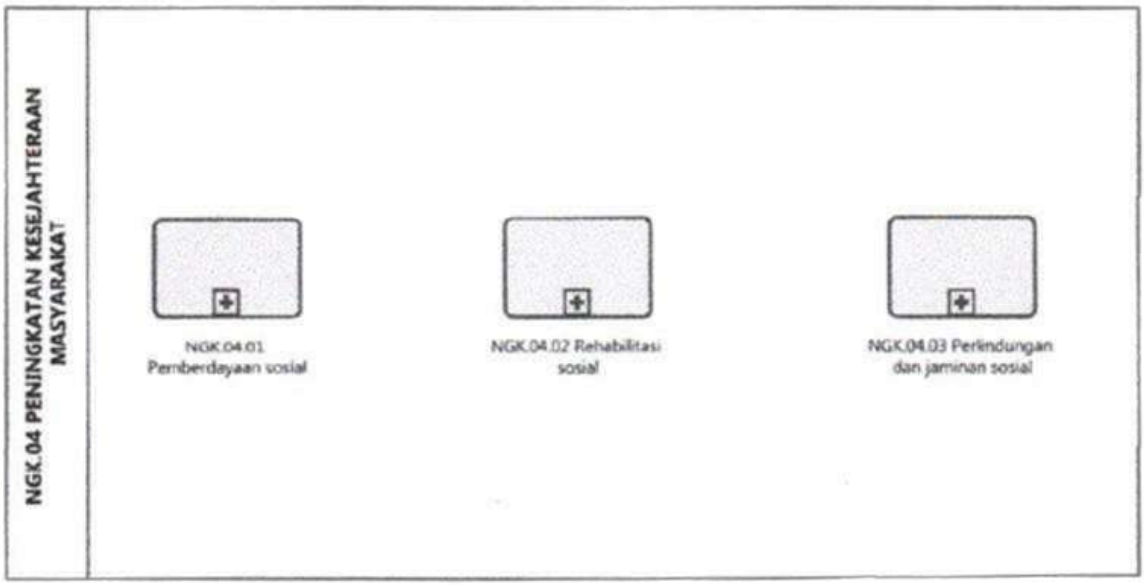
Gambar 5 NGK.01. Peningakatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



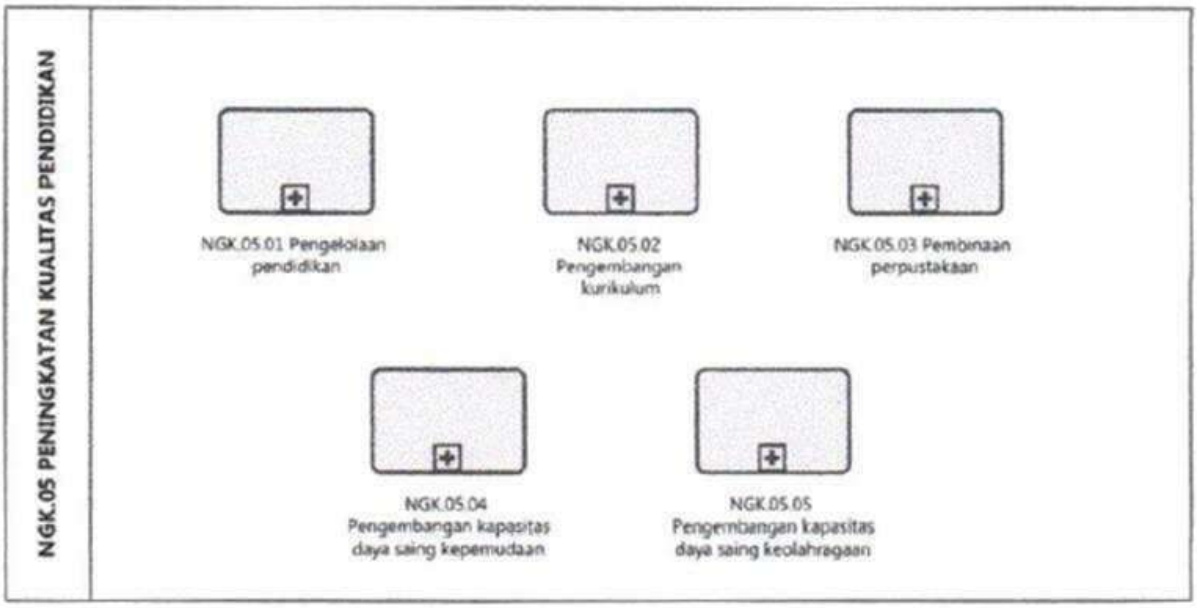
Gambar 6 NGK.02. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah



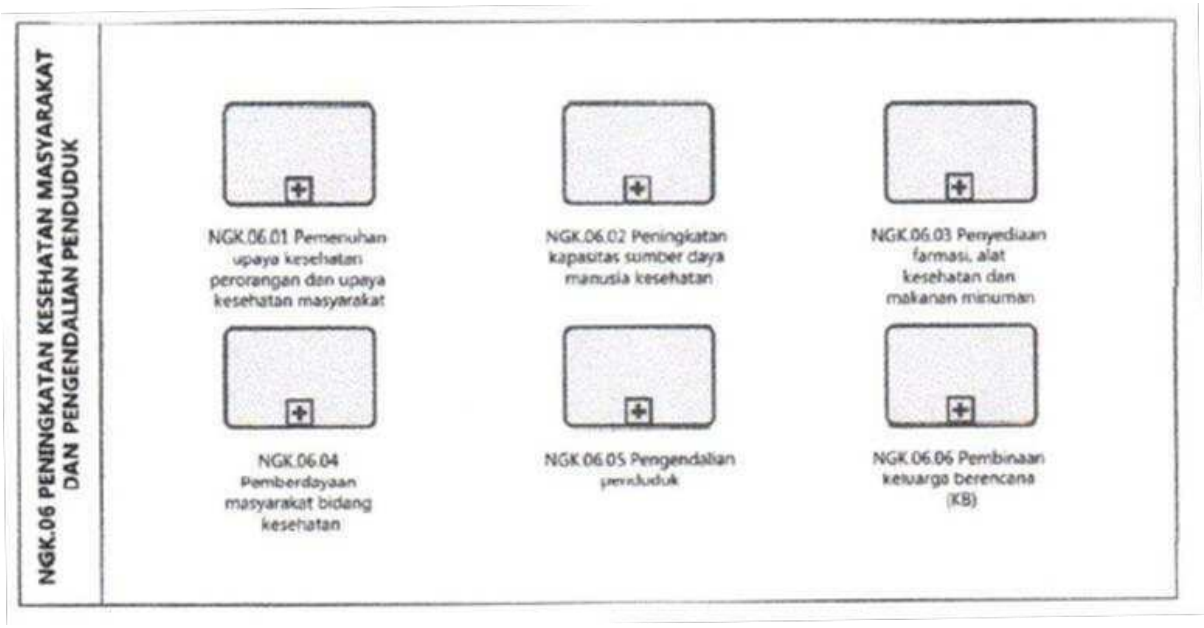
Gambar 7 NGK.03. Peningkatan Stabilitas Sosial



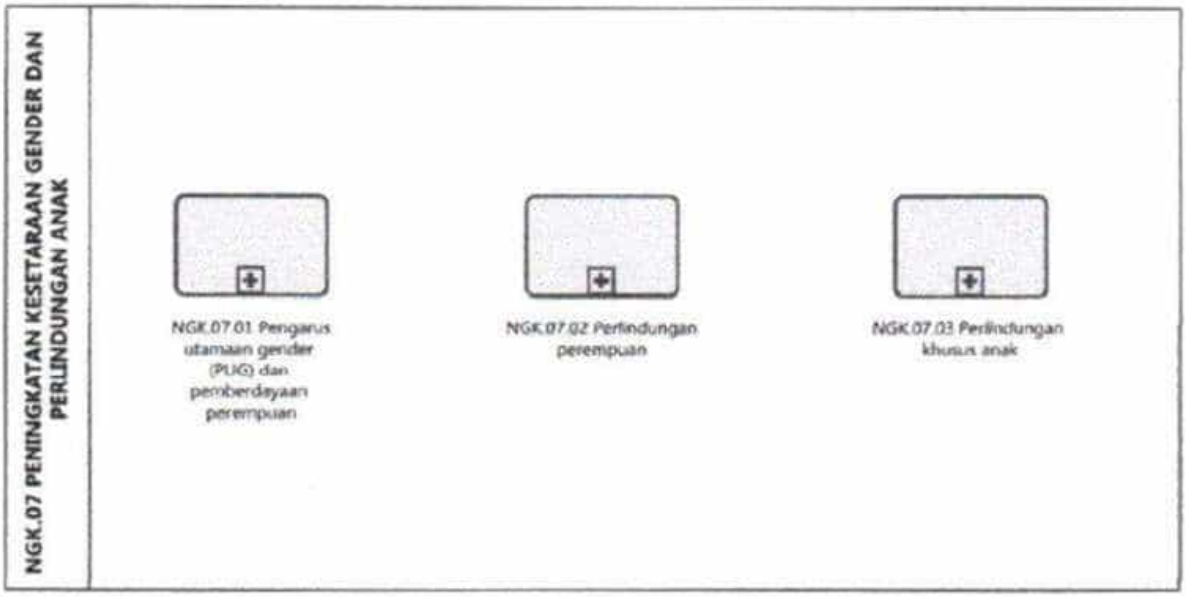
Gambar 8 NGK.04. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



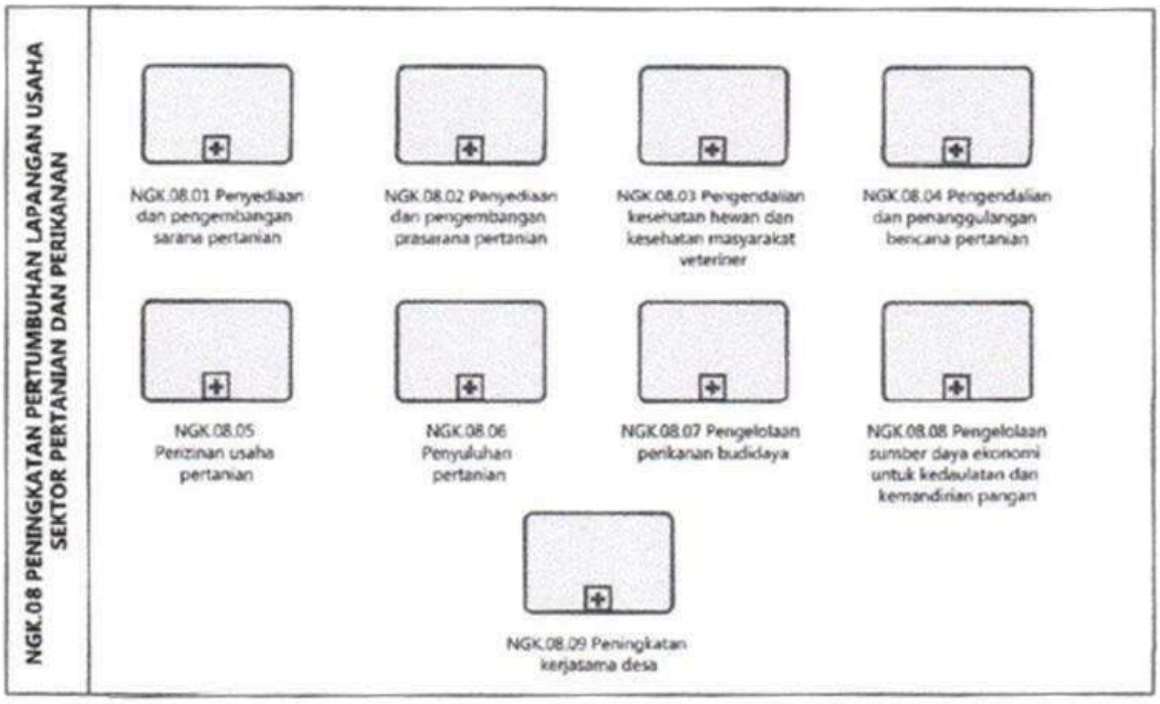
Gambar 9 NGK.05. Peningkatan Kualitas Pendidikan



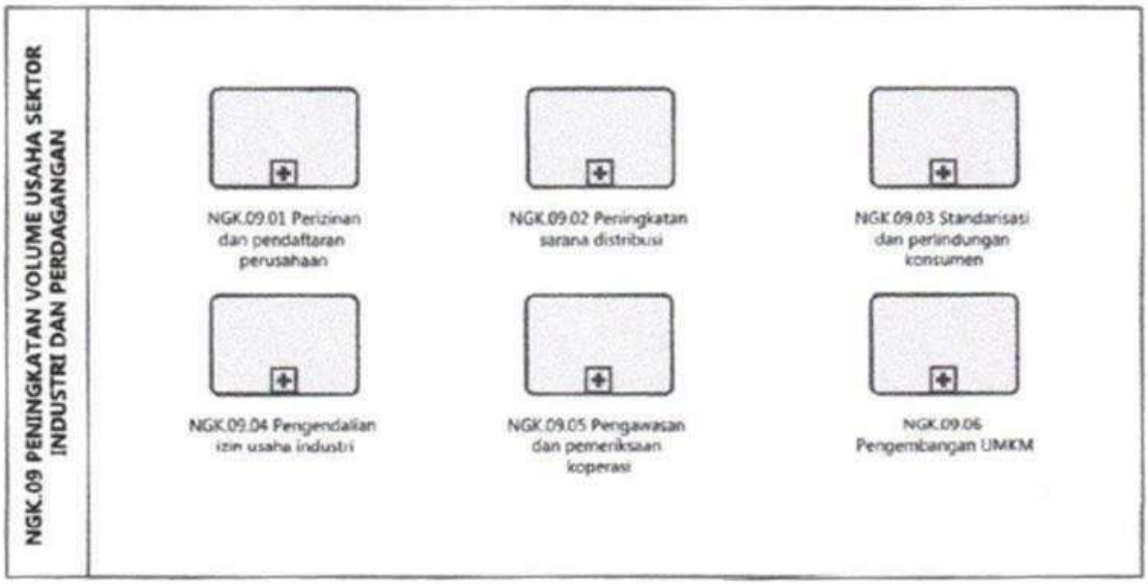
Gambar 10 NGK.06. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk



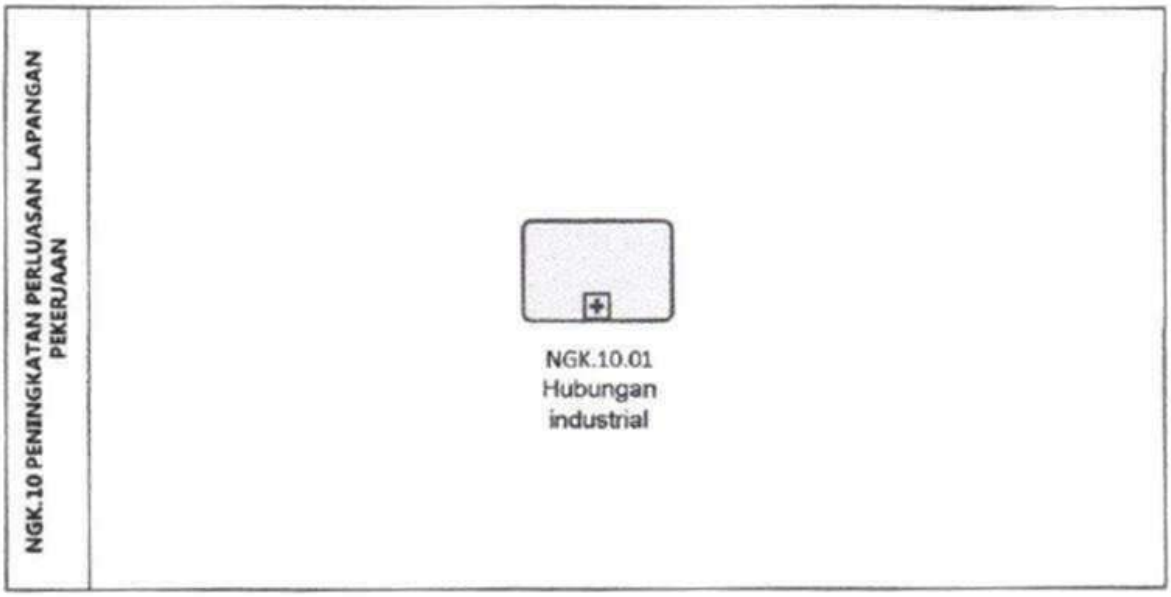
Gambar 11 NGK.07. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak



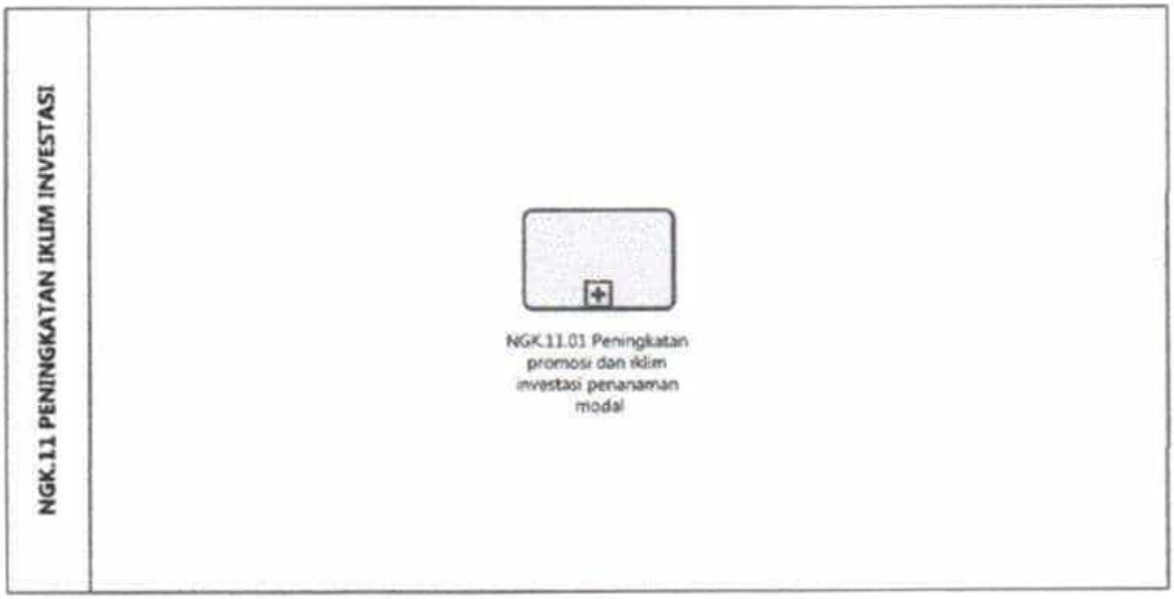
Gambar 12 NGK.08. Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Sektor Pertanian dan Perikanan



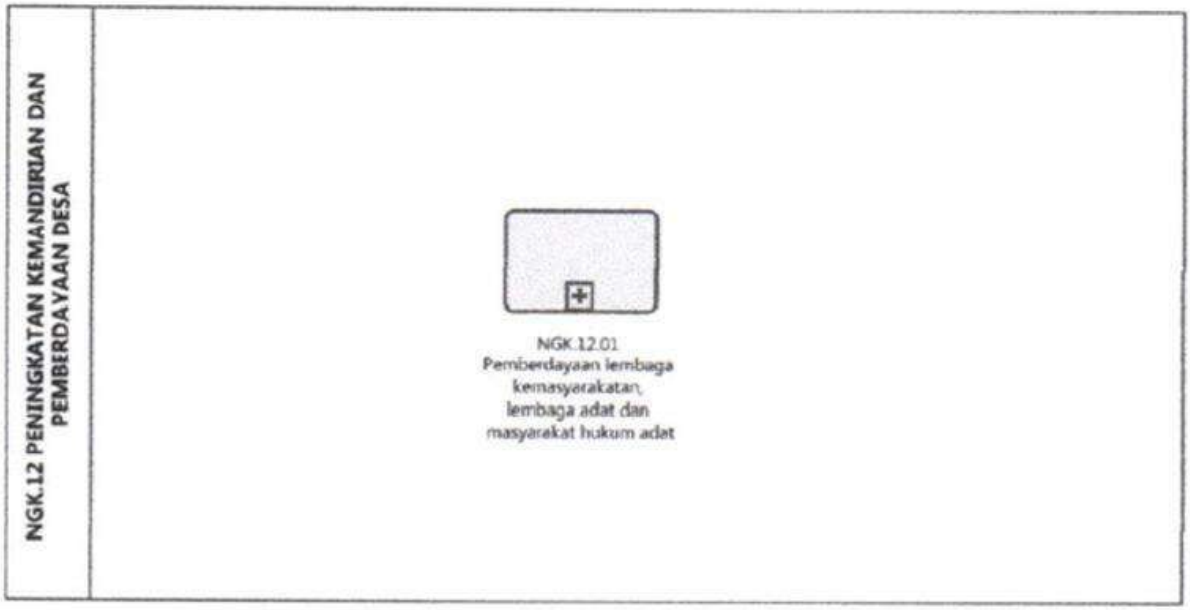
Gambar 13 NGK.09. Peningkatan Volume Sektor Industri dan Perdagangan



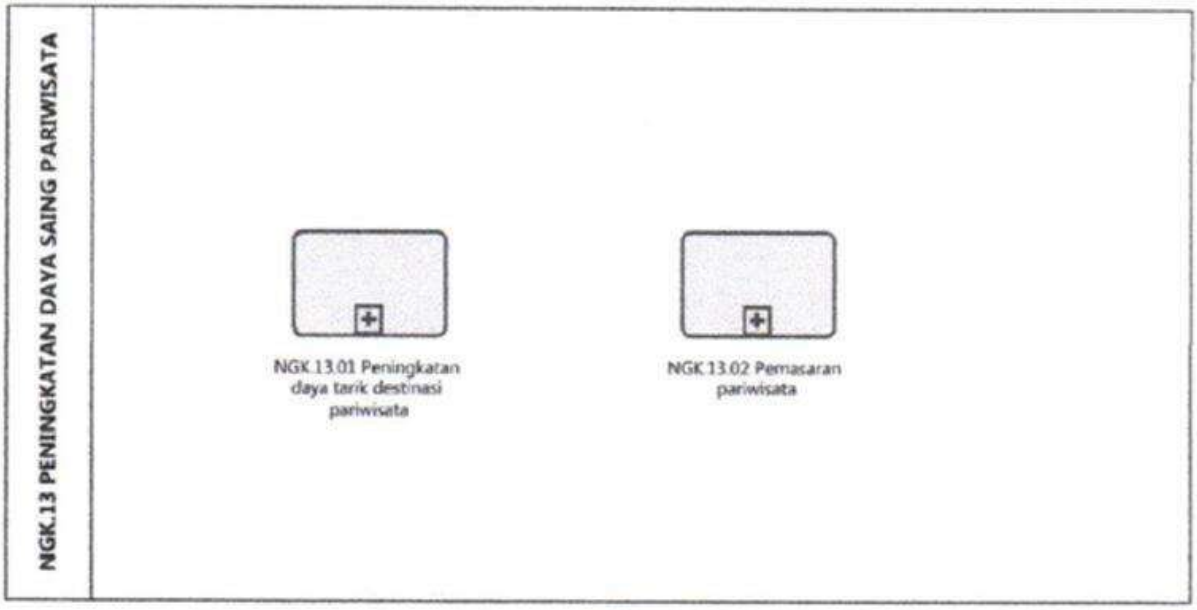
Gambar 14 NGK.10. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan



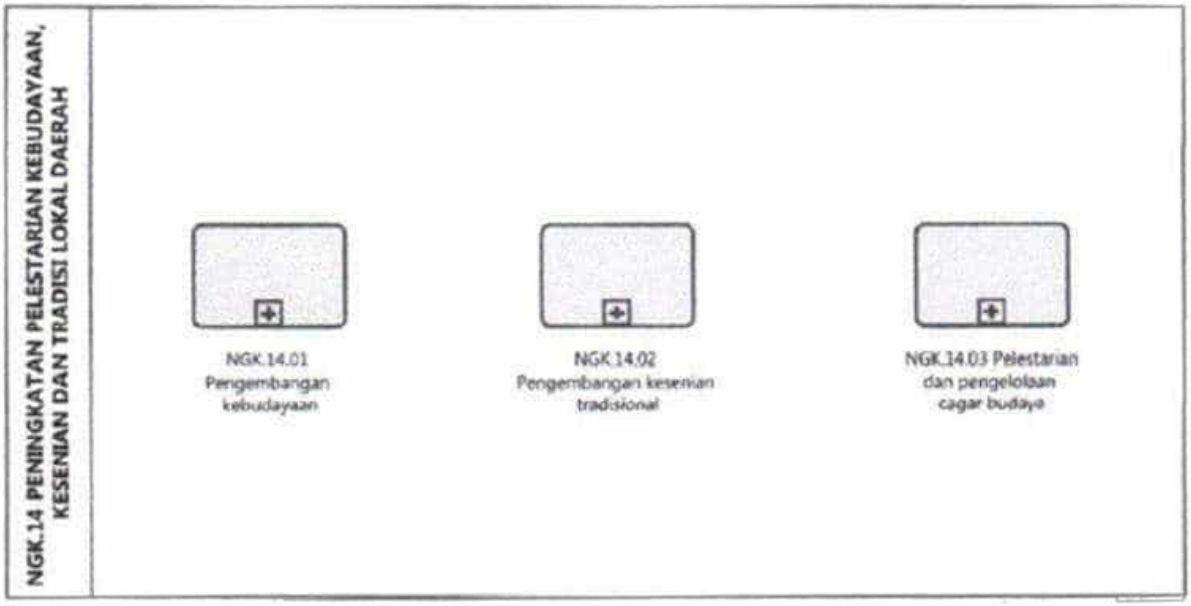
Gambar 15 NGK.11. Peningkatan Iklim Investasi



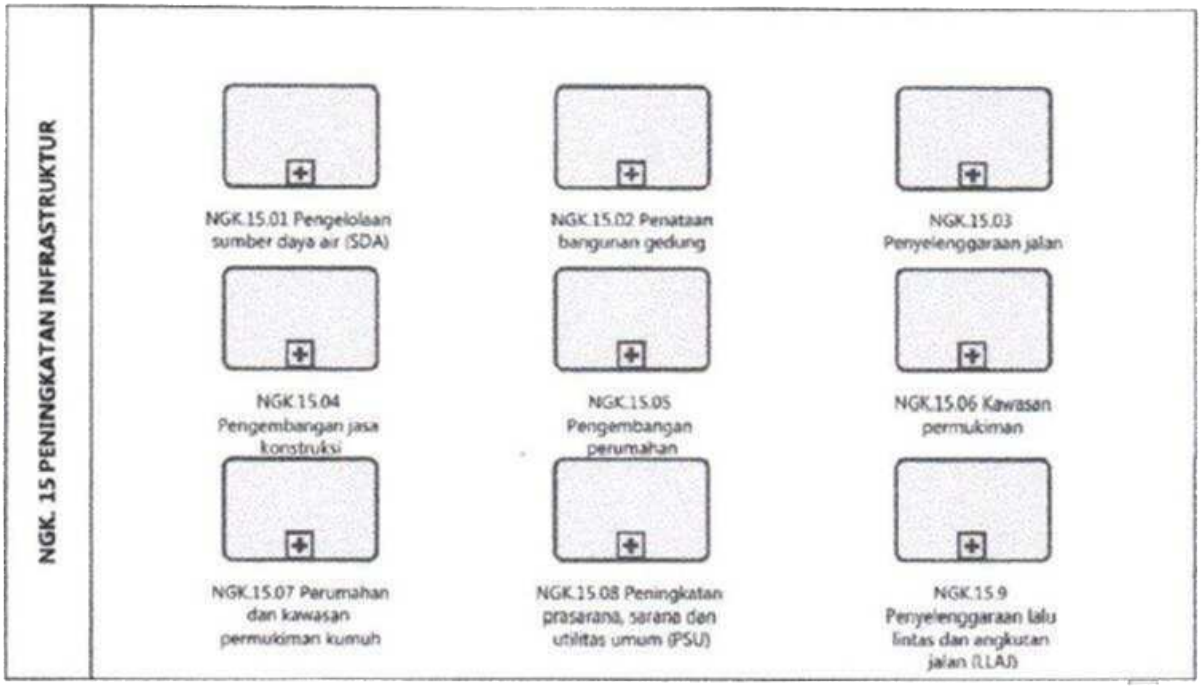
Gambar 16 NGK.12. Peningkatan Kemandirian dan Pemberdayaan Desa



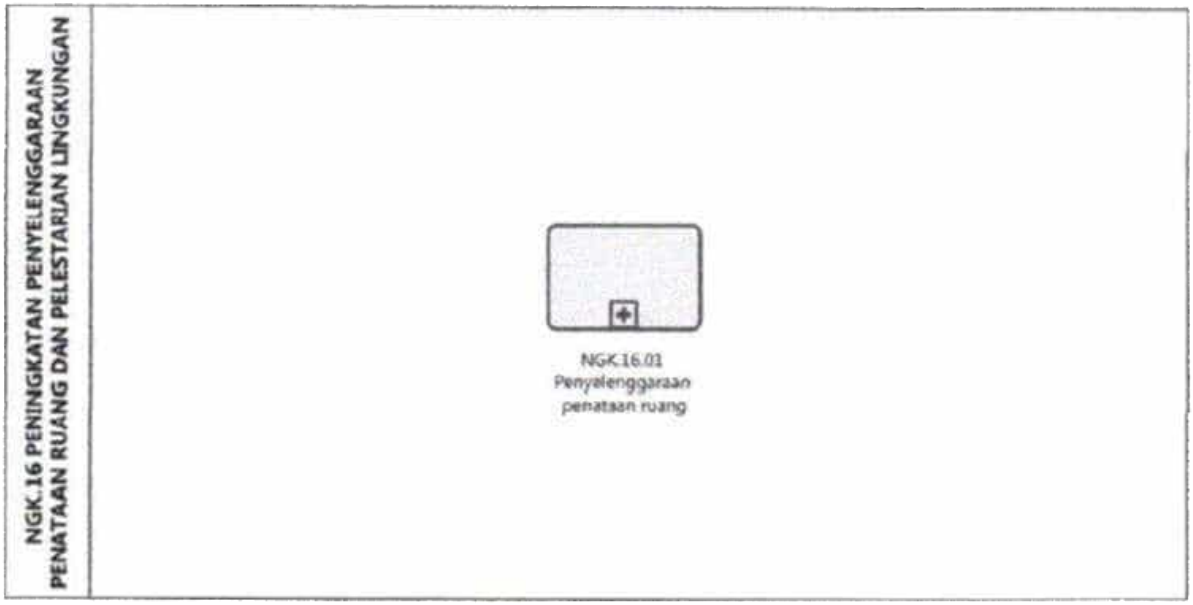
Gambar 17 NGK.13. Peningkatan Daya Saing Pariwisata



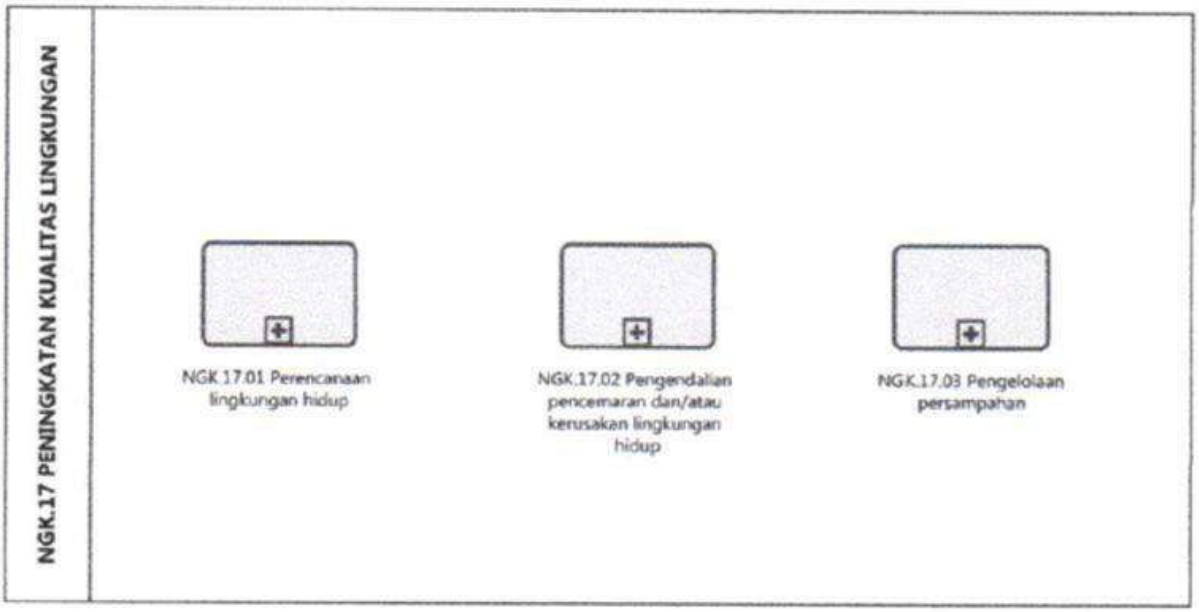
Gambar 18 NGK.14. Peningkatan Pelestarian Budaya,Kesenian dan Tradisi Lokal Daerah



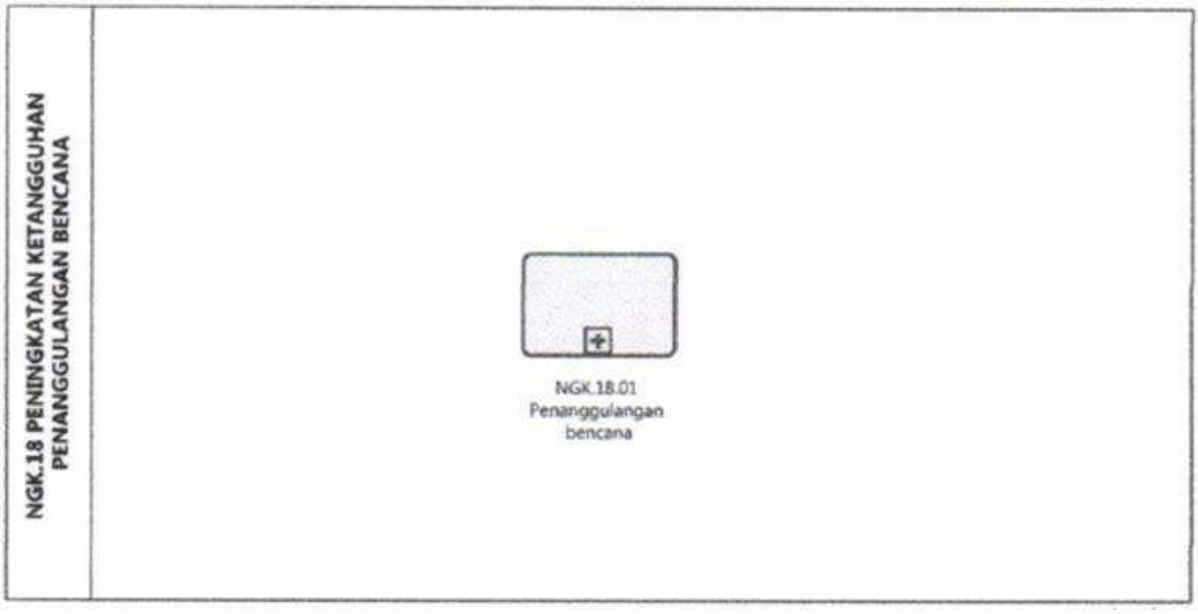
Gambar 19 NGK.15. Peningkatan Infrastuktur



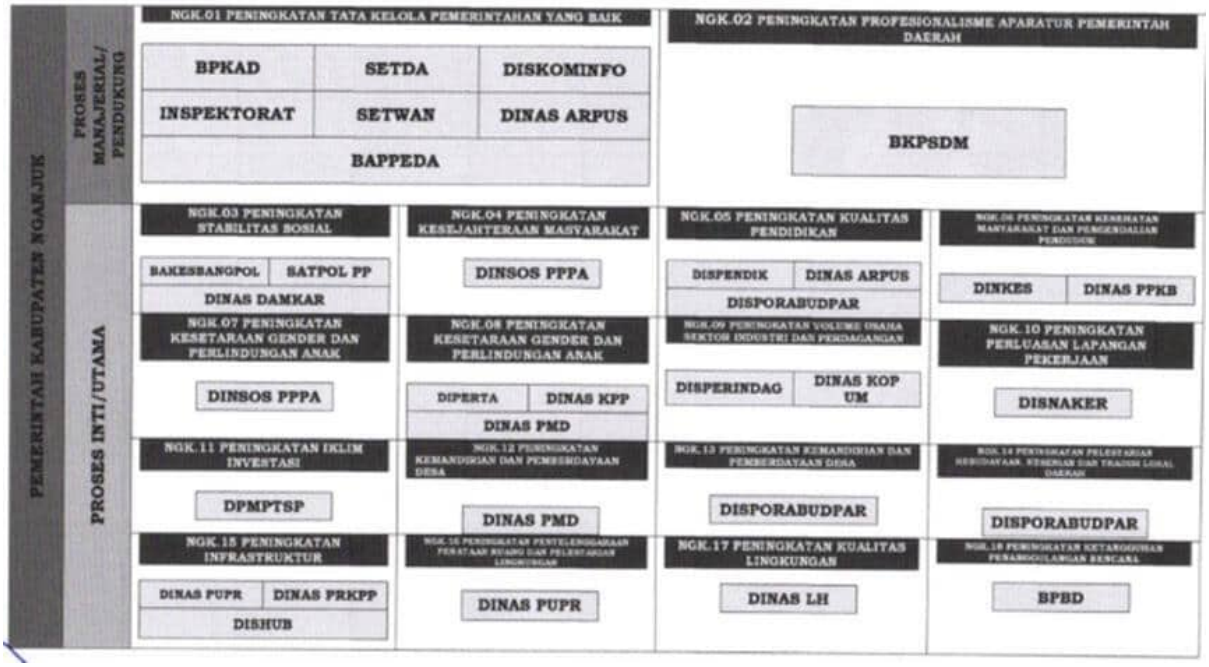
Gambar 20 NGK.16. Peningkatan Pengelengaraan Penataan Ruang dan Pelestarian Lingkungan



Gambar 21 NGK.17. Peningkatan Kualitas Lingkungan



Gambar 22 NGK.18. Peningkatan Ketangguhan Penangulangan Bencana



Gambar 23 NGK.19. Peta Relasi

Tabel 2. Pemetaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
NGK.01 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Adpem
	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Layanan Penggabungan SPPT PBB-P2	BPKAD	Publik
	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Layanan Pemecahan SPPT PBB-P2	BPKAD	Publik
	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Layanan Pembetulan SPPT PBB-P2	BPKAD	Publik
	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Layanan SK NJOP PBB-P2	BPKAD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Layanan BPHTB	BPKAD	Publik
	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Layanan informasi pendapatan asli daerah	BPKAD	Publik
	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Layanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	Publik
	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Pengawasan Reguler	INPEKTORAT DAERAH	Publik
	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Pengawasan Khusus dengan Tujuan tertentu	INPEKTORAT DAERAH	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	Probity Audit	INPEKTORAT DAERAH	Publik
	NGK.01.03 Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	Non-Elektronik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	Penyusunan keputusan Bupati	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pemeritah
	NGK.01.03 Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	Non-Elektronik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	Pembuatan Raperda Inisiatif	SETDA	Pemeritah
	NGK.01.04 Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat Daerah	Publik
	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.04 Ekonomi	Pelayanan Regristrasi dan Verifikasi untuk E-Purchasing	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.04 Ekonomi	Registrasi dan Verifikasi SPSE	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Publik
	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	Non-Elektronik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan RPJPD Kabupaten	BAPPEDA	Pemerintah
	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	Non-Elektronik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan RKPD Kabupaten	BAPPEDA	Pemerintah
	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	Non-Elektronik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	BAPPEDA	Pemerintah
	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	Non-Elektronik	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja)	BAPPEDA	Pemerintah

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	Layanan Infomasi Publik	SETDA	Publik
	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	Penyusunan RPJPD Kabupaten	BAPPEDA	Publik
	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	Penerimaan Kunjungan Kerja	SETDA	Publik
	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	Layanan Infomasi Publik	Badan Pendapatan Daerah	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan Infomasi Publik	SETDA	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Layanan Pengaduan	SETDA	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Layanan Fasilitasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat	SETDA	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	Hearing /Rapat Dengar Pendapat	SETDA	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan Pemasangan Iklan Berita Kehilangan (STNK/BPKB) di Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL) FM	DISKOMINFO	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan Permohonan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Nganjuk	DISKOMINFO	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR)	DISKOMINFO	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	Layanan Peliputan dan Publikasi Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk	DISKOMINFO	Pemerintah
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan Command Center (Layanan Darurat)	DISKOMINFO	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik	BPKAD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Bagor	Kecamatan Bagor	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi Layanan informasi publik Kecamatan Baron	Kecamatan Baron	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Berbek	Kecamatan Berbek	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Jatikalen	Kecamatan Jatikalen	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Kertosono	Kecamatan Kertosono	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Loceret	Kecamatan Loceret	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Nganjuk	Kecamatan Nganjuk	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Ngetos	Kecamatan Ngetos	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Ngluyu	Kecamatan Ngluyu	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Ngronggot	Kecamatan Ngronggot	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Pace	Kecamatan Pace	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Patianrowo	Kecamatan Patianrowo	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Prambon	Kecamatan Prambon	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Rejoso	Kecamatan Rejoso	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Sawahan	Kecamatan Sawahan	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Sukomoro	Kecamatan Sukomoro	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Tanjunganom	Kecamatan Tanjunganom	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Kecamatan Wilangan	Kecamatan Wilangan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	DINSOS PPPA	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik RSUD Kertosono	RSUD Kertosono	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik RSUD Nganjuk	RSUD Nganjuk	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOLPP	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Sekretariat Daerah	SEKDA	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi siap nikah, siap hamil	BKKBN	Publik
	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan survei kepuasan masyarakat	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Publik
	NGK01.08 Pengelolaan Aplikasi Informatika						
	NGK.01.09 Penyelenggaraan statistic sectoral	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	Layanan Pelayanan Data Statistik Sektoral	DISKOMINFO	Pemerintah
	NGK.01.10 Pengelolaan Arsip						
	NGK.01.11 Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kabupaten	Non-Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02. 06 Dukungan Operasioanl Organisasi	Layanan Pegajuan Naskah Sambutan	SETDA	Pemerintah

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.01.11 Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kabupaten	Non-Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	DISKOMINFO	Pemerintah
	NGK.01.12 Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Non-Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02. 07 Akuntabilitas Kinerja	Layanan Fasilitasi Sidak	SETDA	Pemerintah
	NGK.01.13 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						
	NGK.01.14 Penelitian dan pengembangan daerah	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah Daerah	Layanan pendaftaran penelitian	BAKESBANGPOL	Publik
NGK.02 Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Kenaikan Pangkat Reguler	BKPSM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam	BKPSDM	Pemerintah

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Jabatan Struktural		
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Kenaikan Gaji Berkala	BKPSDM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Pensiun Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)	BKPSDM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Pensiun Janda/Duda	BKPSDM	Pemerintah

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Pensiun atas Permintaan Sendiri (APS)	BKPSDM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Non-Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Ijin Belajar	BKPSDM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Kartu Pegawai	BKPSDM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Karis dan Karsu	BKPSDM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Satyalancana Karya satya	BKPSDM	Pemerintah
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Non-Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	Layanan Cuti diluar tanggungan negara	BKPSDM	Pemerintah

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	Layanan informasi publik Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Pemerintah
NGK.03 Peningkatan Stabilitas Sosial	NGK.03.01 Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi social dan budaya						
	NGK.03.02 Peningkatan kewaspadaan nasional kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial						
	NGK.03.03 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.03.03 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SATPOL PP	Publik
	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Penanganan Kebakaran	DINAS DAMKAR	Publik
	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Sosial Pencegahan Bahaya Kebakaran	DINAS DAMKAR	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan informasi publik Dinas Pemadam Kebakaran	DINAS DAMKAR	Publik
	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Penanganan Sarang Tawon/Hewan Reptil	DINAS DAMKAR	Publik
NGK.04 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	NGK.04.01 Pemberdayaan sosial	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Fasilitas Ijin undian gratis berhadiah (UGB)	DINSOS PPA	Publik
	NGK.04.02 Rehabilitasi Sosial	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	DINSOS PPA	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.28 Hukum	Pemberian Layanan Informasi Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Publik
	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Pemberian Bantuan Transport orang terlantar dan atau kehabisan bekal	DINSOS PPA	Publik
	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Pemberian Bantuan untuk penyandang Disabilitas	DINSOS PPA	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan rekomendasi data terpadu kesejahteraan Sosial	DINSOS PPA	Publik
	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Reaktifasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	DINSOS PPA	Publik
	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Bantuan Lansia Miskin	DINSOS PPA	Publik
NGK.05 Peningkatan Kualitas Pendidikan	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	DISPENDIK	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pengajuan Legalisasi Ijazah	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Siswa	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP secara online	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pembelajaran Sekolah melalui Aplikasi SI-PRESTASI	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Konfirmasi Mutasi	DISPENDIK	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Aplikasi DAPODIK		
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Kenaikan Pangkat Reguler bagi Tenaga Pendidik	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Usulan Pensiun Tenaga Guru	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional	DISPENDIK	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijasah dengan Satuan pendidikan yang masih berdiri/bergan ti Nama Lembaga Baru	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pengesahan rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan bantuan operasional sekolah	DISPENDIK	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan informasi publik Dinas Pendidikan	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.02 Pengembangan Kurikulum	Non-Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	Layanan Pengajuan pengesahan Kurikulum Pendidikan Jenjang PAUD dan Dasar	DISPENDIK	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Srikulasi Otomasi Perpustakaan	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Perpustakaan Anak	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Dongkel Beras	DINAS ARPUS	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Perpustakaan Keliling	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan TABAMAS	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Car Free Day	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Tos Keliling	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan E-Book Nganjuk	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Bahan Pustaka	DINAS ARPUS	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Pengihan Buku	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Pelaksanaan Bimtek	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan informasi publik Dinas Arsip dan Perpustakaan	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.03. Pendidikan	Layanan Kearsipan	DINAS ARPUS	Publik
	NGK.05.04 Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan						
	NGK.05.05 Pengembangan kapasitas daya saing						

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	keolahragaan						
NGK.06 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Rekomendasi Ijin Opersional Klinik (Utama dan Pratama)	DINKES	Publik
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Gawat Darurat 24 Jam	DINKES	Publik
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Rawat Jalan	DINKES	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	masyarakat						
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Rawat Inap	DINKES	Publik
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Ruang Isolasi Khusus	DINKES	Publik
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan ICU	DINKES	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Bedah Sentral	DINKES	Publik
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Hemodialisa	DINKES	Publik
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Ambulans	DINKES	Publik
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Penunjang Medis	DINKES	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	masyarakat						
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan Penunjang Non Medis	DINKES	Publik
	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan kesehatan SMILE	DINKES	Publik
	NGK.06.02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Penerbitan Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	DINKES	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.06.02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Layanan informasi publik Dinas Kesehatan	DINKES	Publik
	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Rekomendasi Perijinan Apotek	DINKES	Publik
	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	DINKES	Publik
	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	SLHS Jasa Boga /Rumah Makan/ Restoran/ Depo Air Minum/ TPP Tertentu	DINKES	Publik
	NGK.06.04 Pemberdayaan masyarakat bidang	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	Penerbitan Ijin STPT	DINKES	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	kesehatan						
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Kartu Keluarga	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Akta Kelahiran	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Akta Perkawinan	DINAS PPKB	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Akta Kematian	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Pindah Datang Penduduk	Kecamantan	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Pindah Keluar Penduduk	Kecamantan	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Akta Perceraian	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Pindah Tempat Antar Kecamatan	Kecamatan	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Pindah Tempat Antar Kabupaten	Kecamatan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Non-Elektronik	RAL.02. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Legalisasi Surat-Surat	Kecamatan	Publik
	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS PPKB	
	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Ayoman Kegagalan KB	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP)	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW)	DINAS PPKB	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan Konseling KB	DINAS PPKB	Publik
	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	Layanan informasi publik Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	DINAS PPKB	Publik
NGK.07 Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	NGK.07.01 Pengarustamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan						
	NGK.07.02 Perlindungan Perempuan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOS PPPA	Publik
	NGK.07.03 Perlindungan Khusus Anak	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.27. Pemberdayaan Perempuan	Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan	DINSOS PPPA	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Perempuan dan Anak		
NGK.8 Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Usaha Sektor Pertanian dan Perikanan	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Usaha Tani Perternakan dan Pemasaran	DISPERTA	Publik
	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Produksi, Penyebaran, dan Pengembangan Ternak	DISPERTA	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Penerbitan Recording pada Ternak	DISPERTA	Publik
	NGK.08.02 Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian						
	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Tentang Standar Kesehatan Masyrakat Veteriner Pada PAH Obat Hewan dan Pakan Ternak	DISPERTA	Publik
	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISPERTA	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	Masyarakat veteriner						
	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Pengawasan Kesehatan Hewan, Kesmavet, Larangan Pemotongan Betina Produktif	DISPERTA	Publik
	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	Pemberantas Penyakit Hewan	DISPERTA	Publik
	NGK.08.04 Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Perinzinan Usaha Pertanian	DISPERTA	Publik
	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Perternakan	DISPERTA	Publik
	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Layanan Pendaftaran Ijin edar Beras	DINAS KPP	Publik
	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Produksi Penyebaran dan Pengembanga n Ternak	DISPERTA	Publik
	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Kesmavet, POH dan	DISPERTA	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Pakan Ternak		
	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Layanan informasi pertanian Kab Nganjuk	Dinas Pertanian	Publik
	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Layanan informasi publik Dinas Pertanian	DINAS Pertanian	Publik
	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	Layanan informasi publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Publik
	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	Layanan Bantuan Perikanan	DINAS KPP	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	Layanan Pembelian Benih	DINAS KPP	Publik
	NGK.08.08 Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Pengawasan Produksi, Peredaran, Higiene dan Sanitasi PAH	DISPERTA	Publik
	NGK.08.08 Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Pelaksanaan Sosialisasi HACCP, Unit Pengolah, Alat Transport dan Unit Penyimpan HBAH	DISPERTA	Publik
	NGK.08.09 Peningkatan Kerjasama Desa						

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Usaha Tani Perternakan dan Pemasaran	DISPERTA	Publik
NGK.09 Peningkatan Volume Usaha Sektor Indudtri dan Perdagangan	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil dan Menengah	Permohonan surat keterangan sebagai pelaku usaha mikro di Kabupaten Nganjuk	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Publik
	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pendaftaran Merk	DISPERINDAG	Publik
	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan informasi publik Dinas Perindustrian dan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Perdagangan		
	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Fasilitasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	DISPERINDAG	Publik
	NGK.09.02 Peningkatan sarana distribusi	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	E Redistribusi Pelyanan Publik	DISPERINDAG	Publik
	NGK.09.03 Standarisasi dan perlindungan konsumen	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Dinas Koperasi dan UM	DINASKOPUM	Publik
	NGK.09.04 Pengendalian izin usaha industri	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Fasilitasi Permohonan Verifikasi Teknis	DISPERINDAG	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.09.05 Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Elektronik	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 13 Koperasi	Layanan keuangan dan akuntansi koperasi	DINAS KOPUM	Publik
	NGK.09.06 Pengembangan UMKM						
NGK.10 Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pembuatan Kartu Pencari Kerja	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pembuatan Rekomendasi Pasport Kerja dan ID CPMI	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Penerbitan IjinLPK tidak berbasis Resiko	DISNAKER	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Penerbitan Tandar Daftar BKK Bursa Kerja Khusus) untuk SMA/SMK/ Universitas/LPK	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pengesahan Peraturan Perusahaan	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan informasi publik Dinas Tenaga Kerja	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Layanan informasi lowongan kerja	DISNAKER	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	DISNAKER	Publik
	NGK.10.01 Hubungan Industrial	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	Pemberitahuan PHK	DISNAKER	Publik
NGK.11 Peningakatan Iklim Investasi	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Perizinan non Berusaha	DPMPTSP	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA)	DPMPTSP	Publik
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Perizinan non Berusaha	DPMPTSP	Publik
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA)	DPMPTSP	Publik
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Izin Pemakaian Sarana Olah Raga	DPMPTSP	Publik
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Izin Reklame	DPMPTSP	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	penanaman modal						
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	DPMPTSP	Publik
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Ternak	DPMPTSP	Publik
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Izin Praktek Bidan	DPMPTSP	Publik
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Izin Kerja Akunpunkturis	DPMPTSP	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	Layanan Izin Kerja Perawat	DPMPTSP	Publik
NGK.12 Peningkatan Kemandiran dan Pemberdayaan Desa	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Permohonan Surat	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Penerimaan Tamu	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Khusus	DINAS PMD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Program JATIM PUSPA		
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Pencairan Bantuan Keuangan khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Usulan Kegiatan video kreatif pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	DINAS PMD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan usulan kegiatan pameran kampung kreasi pemberdayaan ekonomi masyarakat	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Program Pemberdayaan BUM Desa	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan entry data BUM Desa pada Aplikasi DDC	DINAS PMD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan realisasi program pemberdayaan BUM Desa	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Fasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Penyusunan Rencana Pelatihan peningkatan kapasitas badan pemusyawaratan desa	DINAS PMD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Fasilitasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Fasilitas Perencanaan Desa	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Fasilitasi Proses Pengajuan SK PJ, PAW BPD	DINAS PMD	Publik
	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	masyarakat hukum						
NGK.13 Peningkatan daya saing pariwista	NGK.13.01 Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata						
	NGK.13.02 Pemasaran pariwisata	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	Layanan informasi publik Dinas Pariwisata	DISPORABUDPAR	Publik
NGK.14 Peningkatan Pelestarian Kebudayaan, Kesenian dan Tradisi Lokal Daerah	NGK.14.01 Pengembangan Budayaan	Elektonik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	Surat Advis/Ijin Pentas	DISPORABUDPAR	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.14.02 Pengembangan Kesenian Tradisional	Elektonik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	Kartu Tanda Seniman	DISPORABUDPAR	Publik
	NGK.14.03 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						
NGK.15 Peningkatan Infrastuktur	NGK.15.01 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						
	NGK.15.02 Penataan Bangunan Gedung	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	DINAS PRKPP	Publik
	NGK.15.03 Penyelenggaraan Jalan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	Layanan pengujian kendaraan bermotor	DISHUB	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.15.04 Pengembangan Jasa Konstruksi	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Layanan pendaftaran kontraktor	DINAS PUPR	Publik
	NGK.15.05 Pengembangan Perumahan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk	DINAS PUPR	Publik
	NGK.15.05 Pengembangan Perumahan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan Rekomendasi Tapa/Siteplan Perumahan di Kabupaten Nganjuk	DINAS PUPR	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.15.06 Kawasan Pemukiman						
	NGK.15.07 Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh						
	NGK.15.08 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	Layanan Teknik Sarana dan Prasarana	DISHUB	Publik
	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	Layanan Pemberian Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	DISHUB	Publik
	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Non-Elektronik	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	Layanan Angkutan dan Transportasi	DISHUB	Publik
	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	Layanan informasi publik Dinas Perhubungan	DISHUB	Publik
	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	Layanan informasi publik Dinas Perhubungan	DISHUB	Publik
NGK.16 Peningkatan Penyelenggaraan Penataan uang dan Pelestarian Lingkungan	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Layanan Perbaikan jalan dan jembatan	DINAS PUPR	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Layanan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DINAS PUPR	Publik
	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	Layanan informasi publik Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	DINAS PUPR	Publik
	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	KRK (Keterangan Rencana Tata Ruang Kota/ Kabupaten).	DINAS PUPR	Publik
NGK.17 Peningkatan Kualitas Lingkungan	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan	DINAS LH	Publik
	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan informasi publik Dinas Lingkungan	DINAS LH	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Hidup		
	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Izin Penggunaan Ruang Terbuka Hijau	DINAS LH	Publik
	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan	DINAS LH	Publik
	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Izin Penggunaan Tepi Jalan	DINAS LH	Publik
	NGK.17.02 Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Pohon Tepi Jalan	DINAS LH	Publik
	NGK.17.03 Pengelolaan Persampahan	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi limbah B3	DINAS LH	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
NGK.18 Peningkatan Ketangguhan Penanggulangan Bencana	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	BPBD	Publik
	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Pemberian Bantuan Bencana	DINSOS PPA	Publik
	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan Cepat Kejadian Bencana	BPBD	Publik
	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	Layanan Inventarisasi Kerusakan Pasca Bencana	BPBD	Publik
	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	Non-Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	Layanan Pemberian Bantuan kepada	BPBD	Publik

Proses Utama	Sub Proses	Metode Layanan	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Target Layanan
					Korban Bencana		
	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	Elektronik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	Layanan informasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	Publik

2. Kondisi Layanan Kabupaten Nganjuk Saat Ini

Berdasarkan hasil pemetaan layanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur SPBE, dapat dilihat keadaan saat ini bahwa sebagian besar proses bisnis telah menggunakan sistem berbasis elektronik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa proses bisnis yang memerlukan peningkatan optimalisasi dukungan menggunakan aplikasi terintegrasi. Secara umum, pada proses utama, proses pendukung sudah banyak memiliki dukungan layanan, namun terdapat beberapa layanan yang memiliki kesamaan baik pada proses utama maupun pendukung. Selain itu, masih terdapat beberapa proses bisnis yang belum memiliki layanan yang dibutuhkan.

Jumlah layanan Kabupaten Nganjuk sebanyak 284 layanan. Dari total layanan yang ada, 254 layanan merupakan layanan publik dan 30 layanan merupakan layanan administrasi pemerintah. Terdapat 154 layanan publik yang sudah elektronik dan sisanya (100 layanan) masih non – elektronik. Layanan elektronik lebih banyak daripada yang non-elektronik. Dari 154 layanan publik elektronik tersebut, terdapat 143 yang sudah terintegrasi dengan pemerintahan pusat. Di sisi lain, layanan administrasi pemerintah yang elektronik lebih sedikit dibandingkan yang non-elektronik, dimana yang sudah elektronik (12 layanan) seluruhnya sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Jika dilihat lebih lanjut, layanan-layanan tersebut membutuhkan optimalisasi.

Dengan demikian, peninjauan perlu dilakukan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan Arsitektur Layanan SPBE. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki sistem pendukung berupa kelompok aplikasi yang difungsikan secara terpisah. Adapun yang mengembangkan sistem atau aplikasi-aplikasi tersebut lebih dari satu, yang terdiri dari pengembang internal maupun pihak ketiga. Aktivitas pengembangannya dibuat atas dasar kebutuhan atau permintaan masing-masing unit kerja, sehingga dampaknya adalah sistem dan aplikasi tersebut dibuat dalam berbagai platform, dan belum memiliki sistem penghubung layanan yang berfungsi untuk komunikasi dan interaksi antar aplikasi baik dalam pertukaran data maupun layanan. Akibatnya, sistem-sistem tersebut terpisah atau berdiri sendiri dan layanan yang diberikan untuk fungsionalitas setiap unit kerja belum sepenuhnya terintegrasi. Berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya harus dilakukan pengguna, dimana prosedur dan validasi yang ada harus dilakukan tidak hanya sekali. Bahkan, beberapa layanan yang dibutuhkan juga belum dimiliki di beberapa sub proses yang ada.

Selain itu, dari data layanan yang ada saat ini, diperlukan pengelompokan yang berupa kodefikasi layanan berdasarkan kategori, tujuan dan fungsinya menjadi sub kategori untuk kebutuhan metadata layanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 4 IPPD perlu didefinisikan dengan cara mengurai unsur kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 IPPD secara lebih rinci. Pendefinisian sub kategori layanan ini dapat dilakukan dengan menetapkan dukungan kinerjanya dan penurunan hambatannya (*utility*), serta pendefinisian komponen asetnya (*service assets*). Kebutuhan ini dapat diwujudkan melalui kategorisasi layanan untuk menetapkan metadata dan tipe layanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dapat memenuhi seluruh fungsi yang ada di organisasi secara terintegrasi. Penetapan model ini akan dibahas pada bagian metadata dan tipe layanan dalam laporan ini.

Tabel 3 Keadaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Proses Bisnis	No.	Sub Proses Bisnis	Sistem Pendukung	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori Layanan	Penanggung jawab Layanan
NGK.03	1	NGK.03.01						
	2	NGK.03.02						
	3	NGK.03.03						
	4	NGK.03.04						
NGK.04	1	NGK.04.01						
	2	NGK.04.02						
	3	NGK.04.03						

Proses Bisnis	No.	Sub Proses Bisnis	Sistem Pendukung	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori Layanan	Penanggung jawab Layanan
NGK.05	1	NGK.05.01						
	2	NGK.05.02						
	3	NGK.05.03						
	4	NGK.05.04						
	5	NGK.05.05						
NGK.06	1	NGK.06.01						
	2	NGK.06.02						
	3	NGK.06.03						
	4	NGK.06.04						
	5	NGK.06.05						
	6	NGK.06.06						
NGK.07	1	NGK.07.01						
	2	NGK.07.02						

Proses Bisnis	No.	Sub Proses Bisnis	Sistem Pendukung	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori Layanan	Penanggung jawab Layanan
	3	NGK.07.03						
NGK.08	1	NGK.08.01						
	2	NGK.08.02						
	3	NGK.08.03						
	4	NGK.08.04						
	5	NGK.08.05						
	6	NGK.08.06						
	7	NGK.08.07						
	8	NGK.08.08						
	9	NGK.08.09						
NGK.09	1	NGK.09.01						
	2	NGK.09.02						
	3	NGK.09.03						

Proses Bisnis	No.	Sub Proses Bisnis	Sistem Pendukung	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori Layanan	Penanggung jawab Layanan
	4	NGK.09.04						
	5	NGK.09.05						
	6	NGK.09.06						
NGK.10	1	NGK.10.01						
NGK.11	1	NGK.11.01						
NGK.12	1	NGK.12.01						
NGK.13	1	NGK.13.01						
	2	NGK.13.02						
NGK.14	1	NGK.14.01						
	2	NGK.14.02						
	3	NGK.14.03						
NGK.15	1	NGK.15.01						
	2	NGK.15.02						

Proses Bisnis	No.	Sub Proses Bisnis	Sistem Pendukung	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori Layanan	Penanggung jawab Layanan
	3	NGK.15.03						
	4	NGK.15.04						
	5	NGK.15.05						
	6	NGK.15.06						
	7	NGK.15.07						
	8	NGK.15.08						
	9	NGK.15.09						
NGK.16	1	NGK.16.01						
NGK.17	1	NGK.17.01						
	2	NGK.17.02						
	3	NGK.17.03						
NGK.18	1	NGK.18.01						

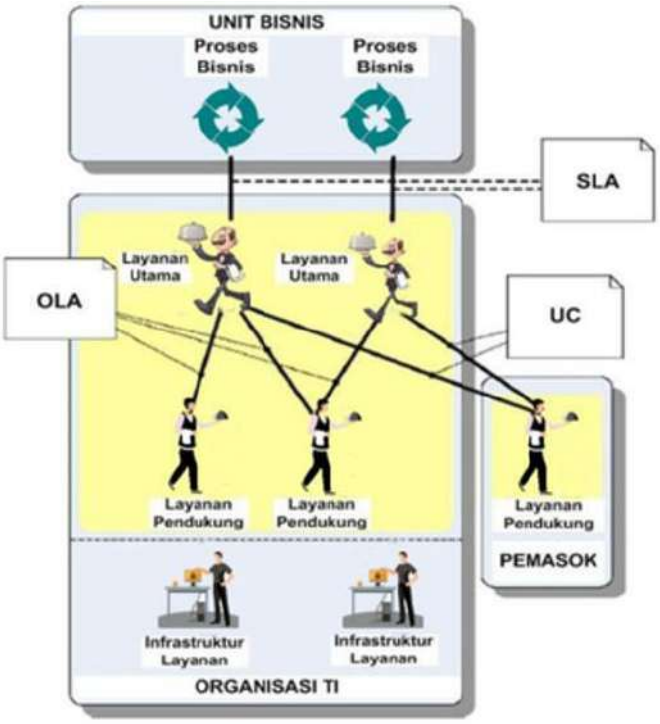
Perlu Optimalisasi

Sudah baik

3. Metadata dan Tipe Layanan

Kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya manusia, ataupun sistem yang ada di lingkungan Kabupaten Nganjuk untuk keberhasilan realisasi Layanan SPBE secara digital. Kapabilitas layanan direalisasikan dalam bentuk pengembangan layanan SPBE dimana pengguna SPBE menjadi orientasinya dan memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga mutu layanan SPBE dapat terus meningkat dan berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk klasifikasi dan identifikasi layanan berdasarkan proses utama dan pendukung di Kabupaten Nganjuk untuk mendefinisikan hasil berupa kebutuhan aplikasi, fungsi aplikasi dan komponen aplikasi atau dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Target dari hasil akumulasi setiap elemen dalam tahapan peta jalan adalah dapat terwujudnya Visi, Misi SPBE, arah kebijakan SPBE, tujuan SPBE, dan sasaran SPBE sebagai acuan kapabilitas serta mempengaruhi inisiatif strategis, yang berujung pada (a) Layanan Publik dan (b) Layanan Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Cetak Biru (*Blue Print*) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kapabilitas layanan SPBE memerlukan kombinasi organisasi dan aset yang berbeda, seperti SDM, proses, dan teknologi untuk dicapai, sehingga dapat mewujudkan tujuannya. Kapabilitas SPBE yang masih abstrak kemudian direalisasikan oleh komponen teknis yang bersifat lebih konkret. Dalam konteks penyediaan layanan di Kabupaten Nganjuk, kebutuhan ini dapat didefinisikan melalui pemetaan unsur organisasi dan asetnya secara rinci dan menyeluruh dalam Daftar Pekerjaan Solusi sebagai Inisiatif Strategis Layanan SPBE. Berdasarkan pemetaan unsur organisasi secara rinci dan menyeluruh, fungsi dan proses bisnis Kabupaten Nganjuk diklasifikasikan seperti terlihat pada Gambar 4. Proses klasifikasi ini tujuannya adalah untuk menetapkan *utility* bagi penyediaan layanan, serta dukungan terhadap customer assets dan penyebaran *service assets.*



Gambar 24 Klasifikasi Layanan Kabupaten Nganjuk

Klasifikasi layanan Kabupaten Nganjuk dapat digunakan untuk mengidentifikasi layanan yang harus disediakan untuk setiap proses bisnis di dalam setiap unit bisnis Kabupaten Nganjuk. Metode klasifikasi ini juga digunakan untuk penetapan service level agreements (SLA), operational level agreements (OLA) dan underpinning contract (UC) untuk pengelolaan tingkat layanan (*warranty*). Selanjutnya dapat dilakukan penetapan dukungan kinerjanya atau penurunan hambatannya (*utility*) melalui penetapan kategori dan sub kategori layanan, serta komponen lainnya (*service assets*). Setiap service assets berupa aplikasi, data, infrastruktur, keamanan, beserta rincian setiap komponennya akan dibahas pada Bab selanjutnya laporan ini. Penetapan metadata dan tipe layanan di lingkungan Kabupaten Nganjuk didefinisikan berdasarkan klasifikasi dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat tingkat:

a. Domain Layanan, mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

b. Area Layanan, menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

c. Kategori Layanan menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik

yang hanya dimiliki oleh IPPD (Kabupaten Nganjuk) sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga).

d. Sub Kategori Layanan menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD (Kabupaten Nganjuk) pada tingkatan struktur ini dapat menyusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Dengan demikian, kodefikasi yang disesuaikan dengan proses bisnisnya dan referensi arsitektur layanan SPBE Nasional perlu dilakukan. Berikut merupakan rekomendasi kodefikasi layanan Kabupaten Nganjuk sebagai penamaan konfigurasi layanan SPBE. Tabel 4 menunjukkan metadata layanan Kabupaten Nganjuk berdasarkan tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE. Entitas metadata ini berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Entitas metadata arsitektur layanan SPBE Kabupaten Nganjuk berhubungan dengan arsitektur aplikasi SPBE sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut.

Tabel 4 Metadata Layanan Kabupaten Nganjuk

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.02.04.01	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	Adpem	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran
NGK-DAL. 01.24.03.01	Layanan Penggabungan SPPT PBB-P2	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.03.02	Layanan Pemecahan SPPT PBB-P2	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan
NGK-DAL. 01.24.03.03	Layanan Pembetulan SPPT PBB-P2	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.03.04	Layanan SK NJOP PBB-P2	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan
NGK-DAL. 01.24.03.05	Layanan BPHTB	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.06.01	Layanan informasi pendapatan asli daerah	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
NGK-DAL. 01.24.06.02	Layanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.06.03	Pengawasan Reguler	INPEKTORAT DAERAH	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
NGK-DAL. 01.24.06.04	Pengawasan Khusus dengan Tujuan tertentu	INPEKTORAT DAERAH	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.06.05	Probity Audit	INPEKTORAT DAERAH	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.05.01.01	Penyusunan keputusan Bupati	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kesekretariatan Negara	Pemeritah	Non-Elektronik	NGK.01.03 Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	RAL 02.05.01 Pemerintahan Umum
NGK-DAL. 02.05.01.02	Pembuatan Raperda Inisiatif	SETDA	Kesekretariatan Negara	Pemeritah	Non-Elektronik	NGK.01.03 Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	RAL 02.05.01 Pemerintahan Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.44.02.01	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat Daerah	Komunikasi	Publik	Elektronik	NGK.01.04 Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik
NGK-DAL. 01.04.01.01	Pelayanan Regristrasi dan Verifikasi untuk E-Purchasing	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ekonomi	Publik	Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.04 Ekonomi	RAL 01.04.01 Ekonomi Makro

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.04.01.02	Registrasi dan Verifikasi SPSE	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ekonomi	Publik	Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.04 Ekonomi	RAL 01.04.01 Ekonomi Makro
NGK-DAL. 02.03.02.01	Penyusunan RPJPD Kabupaten	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.03.02.02	Penyusunan RKPD Kabupaten	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan
NGK-DAL. 02.03.02.03	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.03.02.04	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja)	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan
NGK-DAL. 01.24.01.01	Layanan Infomasi Publik	SETDA	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.06.06	Penyusunan RPJPD Kabupaten	BAPPEDA	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
NGK-DAL. 01.24.06.07	Penerimaan Kunjungan Kerja	SETDA	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.01.02	Layanan Infomasi Publik	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat
NGK-DAL. 01.43.03.01	Layanan Infomasi Publik	SETDA	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.44.02.02	Layanan Pengaduan	SETDA	Komunikasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik
NGK-DAL. 01.44.02.03	Layanan Fasilitasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat	SETDA	Komunikasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.44.03.01	Hearing /Rapat Dengar Pendapat	SETDA	Komunikasi	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.03 Sistem Komunikasi Tertentu
NGK-DAL. 01.43.04.01	Layanan Pemasangan Iklan Berita Kehilangan (STNK/BPKB) di Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL) FM	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.04 penyelenggaraan penyiaran radio publik

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.43.03.02	Layanan Permohonan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Nganjuk	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL. 01.43.03.03	Layanan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR)	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.43.03.04	Layanan Peliputan dan Publikasi Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk	DISKOMINFO	Data dan Informasi Pemerintah	Pemerintah	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL. 01.43.03.05	Layanan Command Center (Layanan Darurat)	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.06	Layanan informasi publik	BPKAD	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.43.03.07	Layanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL. 01.43.03.08	Layanan informasi publik Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.43.03.09	Layanan informasi publik Kecamatan Bagor	Kecamatan Bagor	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL. 01.43.03.10	Layanan informasi Layanan informasi publik Kecamatan Baron	Kecamatan Baron	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.11	Layanan informasi publik Kecamatan Berbek	Kecamatan Berbek	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.12	Layanan informasi publik Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.43.03.13	Layanan informasi publik Kecamatan Jatikalen	Kecamatan Jatikalen	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL. 01.43.03.14	Layanan informasi publik Kecamatan Kertosono	Kecamatan Kertosono	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.15	Layanan informasi publik Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.16	Layanan informasi publik Kecamatan Loceret	Kecamatan Loceret	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.17	Layanan informasi publik Kecamatan Nganjuk	Kecamatan Nganjuk	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.18	Layanan informasi publik Kecamatan Ngetos	Kecamatan Ngetos	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.19	Layanan informasi publik Kecamatan Ngluyu	Kecamatan Ngluyu	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.20	Layanan informasi publik Kecamatan Ngronggot	Kecamatan Ngronggot	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.43.03.21	Layanan informasi publik Kecamatan Pace	Kecamatan Pace	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL. 01.43.03.22	Layanan informasi publik Kecamatan Patianrowo	Kecamatan Patianrowo	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.23	Layanan informasi publik Kecamatan Prambon	Kecamatan Prambon	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.24	Layanan informasi publik Kecamatan Rejoso	Kecamatan Rejoso	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.25	Layanan informasi publik Kecamatan Sawahan	Kecamatan Sawahan	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.26	Layanan informasi publik Kecamatan Sukomoro	Kecamatan Sukomoro	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.27	Layanan informasi publik Kecamatan Tanjunganom	Kecamatan Tanjunganom	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.28	Layanan informasi publik Kecamatan Wilangan	Kecamatan Wilangan	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.43.03.29	Layanan informasi publik Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	DINSOS PPPA	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL. 01.43.03.30	Layanan informasi publik RSUD Kertosono	RSUD Kertosono	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.31	Layanan informasi publik RSUD Nganjuk	RSUD Nganjuk	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.32	Layanan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOLPP	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.43.03.33	Layanan informasi publik Sekretariat Daerah	SEKDA	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL. 01.43.03.34	Layanan informasi publik Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.35	Layanan informasi siap nikah, siap hamil	BKKBN	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.36	Layanan survei kepuasan masyarakat	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK01.08 Pengelolaan Aplikasi Informatika			
NGK-DAL. 02.09.06.01	Layanan Pelayanan Data Statistik Sektoral	DISKOMINFO	Data dan Informasi Pemerintah	Pemerintah	Elektronik	NGK.01.09 Penyelenggaraan statistic sectoral	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.09.06 Statistik Sektoral

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.01.10 Pengelolaan Arsip			
NGK-DAL. 02.06.18.01	Layanan Pegajuan Naskah Sambutan	SETDA	Dukungan Operasioanl Organisasi	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.11 Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kabupaten	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02. 06 Dukungan Operasioanl Organisasi	RAL 02.06.18 Dukungan Kearsipan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.09.02.01	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	DISKOMINFO	. Data dan Informasi Pemerintah	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.11 Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kabupaten	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
NGK-DAL. 02.07.01.01	Layanan Fasilitasi Sidak	SETDA	Akuntabilitas Kinerja	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.12 Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02. 07 Akuntabilitas Kinerja	RAL 02.07.01 Pembinaan Kegiatan Pengawasan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.01.13 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
NGK-DAL. 01.24.01.03	Layanan pendaftaran penelitian	BAKESBANGPOL	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.14 Penelitian dan pengembangan daerah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.04.02.01	Layanan Kenaikan Pangkat Reguler	BKPSM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.02 .Pembinaan Jabatan Fungsional
NGK-DAL. 02.04.02.02	Layanan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Struktural	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.02 .Pembinaan Jabatan Fungsional

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.04.02.03	Layanan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.02 .Pembinaan Jabatan Fungsional
NGK-DAL. 02.04.01.01	Layanan Kenaikan Gaji Berkala	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 . Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.04.01.02	Layanan Pensiun Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN
NGK-DAL. 02.04.01.03	Layanan Pensiun Janda/Duda	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.04.01.04	Layanan Pensiun atas Permintaan Sendiri (APS)	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN
NGK-DAL. 02.04.03.01	Layanan Ijin Belajar	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.03. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.04.07.01	Layanan Kartu Pegawai	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi
NGK-DAL. 02.04.07.02	Layanan Karis dan Karsu	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.04.10.01	Layanan Satyalancana Karya satya	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS
NGK-DAL. 02.04.01.05	Layanan Cuti diluar tanggungan negara	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.06.08	Layanan informasi publik Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Pemerintahan daerah	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
						NGK.03.01 Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi social dan budaya			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.03.02 Peningkatan kewaspadaan nasional kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial			
NGK-DAL. 01.26.01.01	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.03 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.26.01.02	Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SATPOL PP	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.03 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL. 01.26.01.03	Layanan Penanganan Kebakaran	DINAS DAMKAR	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.26.01.04	Layanan Sosial Pencegahan Bahaya Kebakaran	DINAS DAMKAR	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL. 01.26.01.05	Layanan informasi publik Dinas Pemadam Kebakaran	DINAS DAMKAR	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.26.01.06	Layanan Penanganan Sarang Tawon/Hewan Reptil	DINAS DAMKAR	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL. 01.26.01.07	Layanan Fasilitas Ijin undian gratis berhadiah (UGB)	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.01 Pemberdayaan sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.26.01.08	Layanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.02 Rehabilitasi Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL. 01.28.02.01	Pemberian Layanan Informasi Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Hukum	Publik	Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.28 Hukum	RAL 01.28.02 Lembaga Pemasyarakatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.26.01.09	Layanan Pemberian Bantuan Transport orang terlantar dan atau kehabisan bekal	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL. 01.26.01.10	Layanan Pemberian Bantuan untuk penyandang Disabilitas	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.26.01.11	Layanan rekomendasi data terpadu kesejahteraan Sosial	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL. 01.26.01.12	Layanan Reaktifasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.26.02.01	Layanan Bantuan Lansia Miskin	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin
NGK-DAL. 01.31.01.01	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.01.02	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL. 01.31.02.01	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.03.01	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
NGK-DAL. 01.31.06.01	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.06 Pendidikan non-Formal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.01.03	Layanan Pengajuan Legalisasi Ijazah	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL. 01.31.01.04	Layanan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Siswa	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									dikan
NGK-DAL. 01.31.01.05	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP secara online	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.01.06	Layanan Pembelajaran Sekolah melalui Aplikasi SI-PRESTASI	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL. 01.31.01.07	Layanan Konfirmasi Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Aplikasi DAPODIK	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									dikan
NGK-DAL. 01.31.01.08	Layanan Kenaikan Pangkat Reguler bagi Tenaga Pendidik	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.01.09	Layanan Usulan Pensiun Tenaga Guru	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL. 01.31.01.10	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									dikan
NGK-DAL. 01.31.01.11	Layanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijasah dengan Satuan pendidikan yang masih berdiri/berganti Nama Lembaga Baru	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.01.12	Layanan Pengesahan rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL. 01.31.01.13	Layanan bantuan operasional sekolah	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									dikan
NGK-DAL. 01.31.01.14	Layanan informasi publik Dinas Pendidikan	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL.01 Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.01.15	Layanan Pengajuan pengesahan Kurikulum Pendidikan Jenjang PAUD dan Dasar	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.02 Pengembangan Kurikulum	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL. 01.31.08.01	Layanan Srikulasi Otomasi Perpustakaan	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.08.02	Layanan Perpustakaan Anak	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL. 01.31.08.03	Layanan Dongkel Beras	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.08.04	Layanan Perpustakaan Keliling	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL. 01.31.08.05	Layanan TABAMAS	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.08.06	Layanan Car Free Day	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL. 01.31.08.07	Layanan Tos Keliling	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.08.08	Layanan E-Book Nganjuk	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL. 01.31.08.09	Layanan Bahan Pustaka	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.08.10	Layanan Pengihan Buku	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL. 01.31.08.11	Layanan Pelaksanaan Bimtek	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.31.08.12	Layanan informasi publik Dinas Arsip dan Perpustakaan	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL. 01.31.08.13	Layanan Kearsipan	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.05.04 Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan			
						NGK.05.05 Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.02.12	Rekomendasi Ijin Opersional Klinik (Utama dan Pratama)	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL. 01.25.02.01	Layanan Gawat Darurat 24 Jam	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.02.02	Layanan Rawat Jalan	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL. 01.25.02.03	Layanan Rawat Inap	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.02.04	Layanan Ruang Isolasi Khusus	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL. 01.25.02.05	Layanan ICU	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.02.06	Layanan Bedah Sentral	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL. 01.25.02.07	Layanan Hemodialisa	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.02.08	Layanan Ambulans	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL. 01.25.01.01	Layanan Penunjang Medis	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.01 Farmasi dan Alat Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.02.09	Layanan Penunjang Non Medis	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL. 01.25.02.10	Layanan kesehatan SMILE	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.03.01	Penerbitan Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan
NGK-DAL. 01.25.02.11	Layanan informasi publik Dinas Kesehatan	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.02.13	Rekomendasi Perijinan Apotek	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL. 01.25.05.01	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.25.05.02	SLHS Jasa Boga /Rumah Makan/ Restoran/ Depo Air Minum/ TPP Tertentu	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan
NGK-DAL. 01.25.03.02	Penerbitan Ijin STPT	DINKES	Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.04 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.01.01	Layanan Kartu Keluarga	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL. 01.23.01.02	Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.01.03	Layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL. 01.23.03.01	Layanan Akta Kelahiran	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.03.02	Layanan Akta Perkawinan	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil
NGK-DAL. 01.23.03.03	Layanan Akta Kematian	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.01.04	Layanan Pindah Datang Penduduk	Kecamantan	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL. 01.23.01.05	Layanan Pindah Keluar Penduduk	Kecamantan	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.03.04	Layanan Akta Perceraian	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil
NGK-DAL. 01.23.01.06	Layanan Pindah Tempat Antar Kecamatan	Kecamatan	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.01.07	Layanan Pindah Tempat Antar Kabupaten	Kecamatan	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL. 01.23.03.05	Layanan Legalisasi Surat-Surat	Kecamatan	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.01.08	Layanan informasi publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS PPKB	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL. 01.23.04.01	Layanan Ayoman Kegagalan KB	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.04.02	Layanan Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP)	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana
NGK-DAL. 01.23.04.03	Layanan Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW)	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.23.04.04	Layanan Konseling KB	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana
NGK-DAL. 01.23.04.05	Layanan informasi publik Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.07.01 Pengarustamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan			
NGK-DAL. 01.27.02.01	Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOS PPPA	. Pemberdayaan Perempuan	Publik	Elektronik	NGK.07.02 Perlindungan Perempuan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.27. Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.27.02.02	Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOS PPPA	. Pemberdayaan Perempuan	Publik	Elektronik	NGK.07.03 Perlindungan Khusus Anak	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.27. Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak
NGK-DAL. 01.07.01.01	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Usaha Tani Perternakan dan Pemasaran	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.09.02.01	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Produksi, Penyebaran, dan Pengembangan Ternak	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan
NGK-DAL. 01.09.02.02	Penerbitan Recording pada Ternak	DISPERTA	Peternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.08.02 Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			
NGK-DAL. 01.09.04.01	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Tentang Standar Kesehatan Masyrakat Veteriner Pada PAH Obat Hewan dan Pakan	DISPERTA	Peternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
	Ternak								
NGK-DAL. 01.09.04.02	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISPERTA	Perternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.09.02.03	Pengawasan Kesehatan Hewan, Kesmavet, Larangan Pemotongan Betina Produktif	DISPERTA	Peternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan
NGK-DAL. 01.09.05.01	Pemberantas Penyakit Hewan	DISPERTA	Peternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.05 penyehatan hewan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.08.04 Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			
NGK-DAL. 01.07.01.02	Perinzinan Usaha Pertanian	DISPERTA	Pertanian	Publik	Elektronik	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.07.01.03	Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Perternakan	DISPERTA	Perternakan	Publik	Elektronik	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian
NGK-DAL. 01.07.01.04	Layanan Pendaftaran Ijin edar Beras	DINAS KPP	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.09.02.04	Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Produksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak	DISPERTA	Perternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Perternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan
NGK-DAL. 01.09.02.05	Pelaksanaan Penyuluhan Kesmavet, POH dan Pakan Ternak	DISPERTA	Perternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Perternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.07.01.05	Layanan informasi pertanian Kab Nganjuk	Dinas Pertanian	Pertanian	Publik	Elektronik	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian
NGK-DAL. 01.07.01.06	Layanan informasi publik Dinas Pertanian	DINAS Pertanian	Pertanian	Publik	Elektronik	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.10.01.01	Layanan informasi publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Perikanan	Publik	Elektronik	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya
NGK-DAL. 01.10.01.02	Layanan Bantuan Perikanan	DINAS KPP	Perikanan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.10.02.01	Layanan Pembelian Benih	DINAS KPP	Perikanan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya
NGK-DAL. 01.07.01.07	Pengawasan Produksi, Peredaran, Higiene dan Sanitasi PAH	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.08 Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.07.01.08	Pelaksanaan Sosialisasi HACCP, Unit Pengolah, Alat Transport dan Unit Penyimpan HBAH	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.08 Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian
						NGK.08.09 Peningkatan Kerjasama Desa			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.07.01.09	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Usaha Tani Perternakan dan Pemasaran	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian
NGK-DAL. 01.14.01.01	Permohonan surat keterangan sebagai pelaku usaha mikro di Kabupaten Nganjuk	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Usaha Kecil dan Menengah	Publik	Non-Elektronik	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil dan Menengah	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.08.11	Pendaftaran Merk	DISPERINDAG	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL. 01.05.08.12	Layanan informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.08.13	Fasilitasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	DISPERINDAG	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL. 01.05.08.14	E Redistribusi Pelyanan Publik	DISPERINDAG	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.02 Peningkatan sarana distribusi	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.13.01.01	Layanan informasi publik Dinas Koperasi dan UM	DINASKOPUM	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.09.03 Standarisasi dan perlindungan konsumen	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro
NGK-DAL. 01.05.08.01	Fasilitasi Permohonan Verifikasi Teknis	DISPERINDAG	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.04 Pengendalian izin usaha industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.13.01.02	Layanan keuangan dan akuntansi koperasi	DINAS KOPUM	Koperasi	Publik	Elektronik	NGK.09.05 Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro
						NGK.09.06 Pengembangan UMKM			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.08.02	Pembuatan Kartu Pencari Kerja	DISNAKER	Industri	Publik	Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL. 01.05.03.01	Pembuatan Rekomendasi Pasport Kerja dan ID CPMI	DISNAKER	Industri	Publik	Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak dan Cukai

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.08.02	Penerbitan IjinLPK tidak berbasis Resiko	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL. 01.05.08.03	Penerbitan Tandar Daftar BKK Bursa Kerja Khusus) untuk SMA/SMK/ Universitas/LPK	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.08.04	Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL. 01.05.08.05	Pengesahan Peraturan Perusahaan	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.08.06	Layanan informasi publik Dinas Tenaga Kerja	DISNAKER	Industri	Publik	Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL. 01.05.08.07	Layanan informasi lowongan kerja	DISNAKER	Industri	Publik	Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.06.01	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.06 Ketahanan Industri
NGK-DAL. 01.05.08.08	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.08.09	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL. 01.05.08.10	Pemberitahuan PHK	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.12.03.01	Layanan Perizinan non Berusaha	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 pengembangan sektor usaha penanaman modal
NGK-DAL. 01.12.06.01	Layanan Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA)	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.12.03.02	Layanan Perizinan non Berusaha	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 pengembangan sektor usaha penanaman modal
NGK-DAL. 01.12.06.02	Layanan Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA)	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.12.06.03	Layanan Izin Pemakaian Sarana Olah Raga	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal
NGK-DAL. 01.12.06.04	Layanan Izin Reklame	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.12.03.03	Layanan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 pengembangan sektor usaha penanaman modal
NGK-DAL. 01.12.03.04	Layanan Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Ternak	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 pengembangan sektor usaha penanaman

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									modal
	Layanan Izin Praktek Bidan	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.12.06.05	Layanan Izin Kerja Akunpunkturis	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal
NGK-DAL. 01.12.06.06	Layanan Izin Kerja Perawat	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.01	Layanan Permohonan Surat	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL. 01.21.01.02	Layanan Penerimaan Tamu	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.03	Layanan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Khusus Program JATIM PUSPA	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL. 01.21.01.04	Layanan Pencairan Bantuan Keuangan khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.05	Layanan Usulan Kegiatan video kreatif pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL. 01.21.01.05	Layanan usulan kegiatan pameran kampung kreasi pemberdayaan ekonomi masyarakat	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.07	Layanan Program Pemberdayaan BUM Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL. 01.21.01.08	Layanan entry data BUM Desa pada Aplikasi DDC	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.09	Layanan realisasi program pemberdayaan BUM Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL. 01.21.01.10	Layanan Fasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.11	Layanan Penyusunan Rencana Pelatihan peningkatan kapasitas badan pemusyawaratan desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL. 01.21.01.12	Layanan Fasilitasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.13	Layanan Fasilitas Perencanaan Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL. 01.21.01.14	Layanan Fasilitasi Proses Pengajuan SK PJ, PAW BPD	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.15	Layanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
						NGK.13.01 Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.15.01.01	Layanan informasi publik Dinas Pariwisata	DISPORABUDPAR	Pariwisata	Publik	Elektronik	NGK.13.02 Pemasaran pariwisata	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisataan
NGK-DAL. 01.42.01.01	Surat Advis/Ijin Pentas	DISPORABUDPAR	Kebudayaan	Publik	Elektonik	NGK.14.01 Pengembangan Budayaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.01 kebijakan kebudayaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.42.02.01	Kartu Tanda Seniman	DISPORABUDPAR	Kebudayaan	Publik	Elektonik	NGK.14.02 Pengembangan Kesenian Tradisional	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.02 Perfilman dan Kesenian
						NGK.14.03 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.15.01 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
NGK-DAL. 01.40.04.01	Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	DINAS PRKPP	. Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.02 Penataan Bangunan Gedung	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.40.04.04	Izin Penggunaan Ruang Terbuka Hijau	DINAS LH	. Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam
NGK-DAL. 01.40.04.05	Izin Lingkungan	DINAS LH	. Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									Alam
NGK-DAL. 01.40.04.06	Izin Penggunaan Tepi Jalan	DINAS LH	. Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.19.02.01	Layanan pengujian kendaraan bermotor	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.03 Penyelenggaraan Jalan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi
NGK-DAL. 01.17.01.01	Layanan pendaftaran kontraktor	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Elektronik	NGK.15.04 Pengembangan Jasa Konstruksi	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.21.01.16	Layanan Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk	DINAS PUPR	. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.05 Pengembangan Perumahan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL. 01.21.01.17	Layanan Rekomendasi Tapa/Siteplan Perumahan di Kabupaten Nganjuk	DINAS PUPR	. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.05 Pengembangan Perumahan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.15.06 Kawasan Pemukiman			
						NGK.15.07 Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.19.02.02	Layanan Teknik Sarana dan Prasarana	DISHUB	Transportasi	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.08 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi
NGK-DAL. 01.19.01.01	Layanan Pemberian Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.01 Kemananan dan Keselamatan Transportasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.19.02.02	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi
NGK-DAL. 01.19.02.03	Layanan Angkutan dan Transportasi	DISHUB	Transportasi	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.19.02.04	Layanan informasi publik Dinas Perhubungan	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi
NGK-DAL.01.19.02.05	Layanan informasi publik Dinas Perhubungan	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.17.01.02	Layanan Perbaikan jalan dan jembatan	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Elektronik	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis
NGK-DAL. 01.17.01.03	Layanan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Elektronik	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.17.01.04	Layanan informasi publik Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Elektronik	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis
NGK-DAL. 01.17.01.05	Rekomendasi Site Plan Pengembang Perumahan.	PUPR	Dinas Perkim dan Pertanahan	Publik	Non-Elektronik	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.17.01.06	KRK (Keterangan Rencana Tata Ruang Kota/ Kabupaten).	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Non-Elektronik	DINAS PUPR NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis
NGK-DAL. 01.40.02.01	Layanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan	DINAS LH	Lingkungan Hidup	Publik	Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.40.02.02	Layanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup	DINAS LH	Lingkungan Hidup	Publik	Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem
NGK-DAL. 01.40.02.03	Layanan Pengelolaan Pohon Tepi Jalan	DINAS LH	Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.17.02 Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosiste

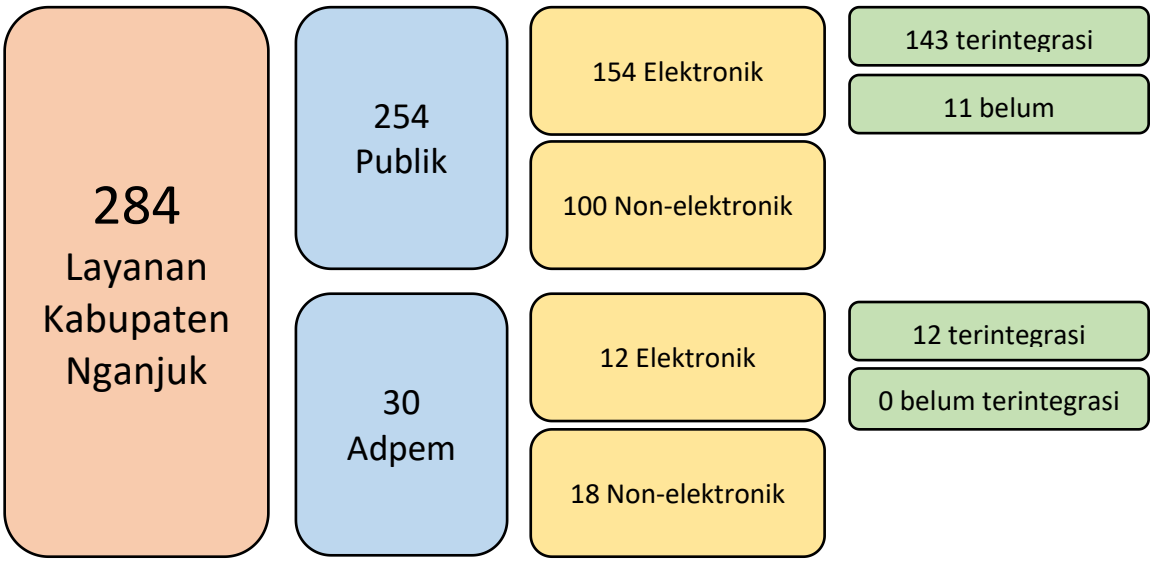
ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
									m
NGK-DAL.01.40.04.02	Layanan informasi limbah B3	DINAS LH	Lingkungan Hidup	Publik	Elektronik	NGK.17.03 Pengelolaan Persampahan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan an Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.13	Layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	BPBD	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.14	Layanan Pemberian Bantuan Bencana	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.26.01.15	Layanan Cepat Kejadian Bencana	BPBD	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL. 01.26.01.16	Layanan Inventarisasi Kerusakan Pasca Bencana	BPBD	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.17	Layanan Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana	BPBD	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.18	Layanan informasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

Layanan yang diinginkan di lingkungan Kabupaten Nganjuk berdasarkan hasil kodefikasi dan klasifikasi metadata layanan pada Tabel 4 telah diarahkan untuk mencapai tujuan SPBE. Arsitektur layanan Kabupaten Nganjuk terdiri dari 284 layanan yang diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, meliputi 254 layanan publik dan 30 layanan administrasi pemerintahan. Gambar 24 menyajikan hasil penetapan tipe layanan di Kabupaten Nganjuk.



Gambar 25 Layanan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Tabel 5 Tipe Layanan Kabupaten Nganjuk

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISPENDIK	Publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro	DINAS KOPUM	Publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan	BPKAD	Publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	INPEKTORAT DAERAH	Publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	SATPOL PP	Publik
RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	DINAS DAMKAR	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISPENDIK	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.04 Ekonomi	RAL 01.04.01 Ekonomi Makro	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.01 Manajemen Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	DISPERINDAG	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	DISNAKER	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	DINAS Pertanian	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro	DINASKOPUM	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisataan	DISPORABUDPAR	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis	DINAS PUPR	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	DISHUB	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu	DINAS PMD	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana	DINAS PPKB	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	BAKESBANGPOL	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	SETDA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	Badan Pendapatan Daerah	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BAPPEDA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SETDA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BKPSDM	Pemerintah

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	DINKES	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	DINAS DAMKAR	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	DINSOS PPA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	BPBD	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	DINSOS PPA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	BPBD	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin	DINSOS PPA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.28 Hukum	RAL 01.28.02 Lembaga Pemasyarakatan	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem	DINAS LH	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem	DINAS LH	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.01 kebijakan kebudayaan	DISPORABUDPAR	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	DINAS PPKB	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	SETDA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	DISKOMINFO	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	BPKAD	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	INSPEKTORAT	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Bagor	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Baron	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Berbek	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Gondang	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Jatikalen	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Kertosono	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Lengkong	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Loceret	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Nganjuk	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Ngetos	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Ngluyu	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Ngronggot	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Pace	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Patianrowo	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Prambon	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Rejoso	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Sawahan	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Sukomoro	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Tanjunganom	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Kecamatan Wilangan	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	DINSOS PPPA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	RSUD Kertosono	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	RSUD Nganjuk	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	SATPOLPP	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	SEKDA	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Sekretariat DPRD	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	BKKBN	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Publik
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	SETDA	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	DISPERTA	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	DINAS KPP	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	DISPERTA	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Perternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan	DISPERTA	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.05 penyehatan hewan	DISPERTA	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner	DISPERTA	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	DINAS KPP	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya	DINAS KPP	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.01 Manajemen Ekonomi Kreatif	DISPERINDAG	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak dan Cukai	DISNAKER	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.06 Ketahanan Industri	DISNAKER	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	DISNAKER	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	DISNAKER	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal	DPMPTSP	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal	DPMPTSP	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil dan Menengah	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis	DINAS PUPR	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	DISHUB	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.01 Kemananan dan Keselamatan Transportasi	DISHUB	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	DISHUB	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu	DINAS PMD	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu	DINAS PUPR	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan	DINKES	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.01 Farmasi dan Alat Kesehatan	DINKES	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	DINKES	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	DINKES	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan	DINKES	Publik

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.27. Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	DINSOS PPPA	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan	DINAS ARPUS	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam	DINAS PRKPP	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	Inspektorat Daerah	Publik
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Adpem
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02. 06 Dukungan Operasioanl Organisasi	RAL 02.06.18 Dukungan Kearsipan	SETDA	Pemerintah
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02. 07 Akuntabilitas Kinerja	RAL 02.07.01 Pembinaan Kegiatan Pengawasan	SETDA	Pemerintah
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN	BKPSDM	Pemerintah

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.02.Pembinaan Jabatan Fungsional	BKPSM	Pemerintah
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.03. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian	BKPSDM	Pemerintah
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi	BKPSDM	Pemerintah
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS	BKPSDM	Pemerintah
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika	DISKOMINFO	Pemerintah
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.09.06 Statistik Sektoral	DISKOMINFO	Pemerintah

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	DISKOMINFO	Pemerintah
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Kecamatan	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	DINAS PPKB	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Kecamantan	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil	DINAS PPKB	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil	Kecamatan	Publik
RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan	DINKES	Publik
RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.06 Rencana Pembangunan Nasional	BAPPEDA	Pemerintah

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Unit Pelaksana	→ Target Layanan (Dependency)
RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	RAL 02.05.01 Pemerintahan Umum	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pemeritah
RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	RAL 02.05.01 Pemerintahan Umum	SETDA	Pemeritah

A. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi layanan yang diinginkan di Kabupaten Nganjuk didefinisikan untuk mewujudkan inisiatif strategis SPBE, yaitu direalisasikan melalui daftar pekerjaan berupa produk rilis aplikasi untuk mendukung layanan SPBE. Targetnya adalah tercapainya keterpaduan dan keterhubungan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga terbentuk satu kesatuan pemerintahan yang terintegrasi serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dalam konteks layanan, *requirement* untuk mewakili persyaratan dalam mewujudkan sebuah tujuan kondisi yang diinginkan untuk SPBE adalah:

"Kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah".

1. Penyedia Layanan

   Berdasarkan Perpres No 95 tahun 2018, layanan SPBE terdiri dari dua layanan, yaitu Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan. Layanan ini merupakan perwujudan aplikasi yang didefinisikan secara eksplisit serta merepresentasikan fungsionalitas komponen terhadap lingkungannya. Fungsionalitas ini dapat diakses melalui satu atau lebih antarmuka layanan yang disediakan oleh penyedia layanan dan diatur dalam pengelolaan tingkat layanan. Model pengelolaan tingkat layanan dapat meliputi kebijakan *service level* management (SLM) yang berhubungan dengan proses perencanaan, koordinasi, penyusunan, persetujuan, pemantauan, dan pelaporan, terdiri dari:

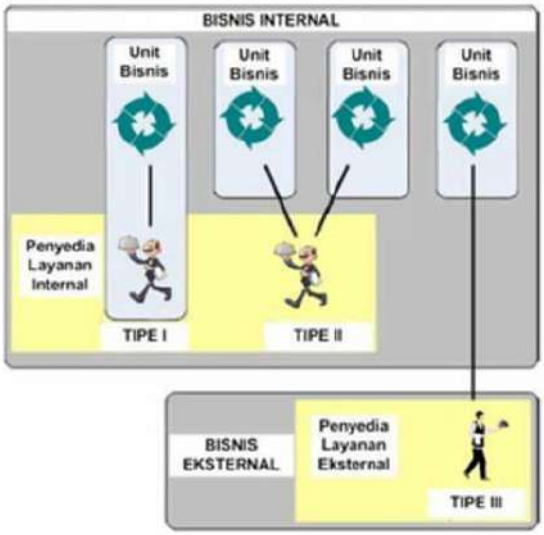
   a. Pengelolaan service level agreements (SLA), yaitu perjanjian tertulis diantara penyedia layanan dan pelanggan, yaitu mendefinisikan target layanan utama dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. SLM berfungsi untuk memastikan semua target dan tindakan yang telah disepakati dalam SLA dengan bisnis yang didukung oleh operational level agreements (OLA).
   b. Pengelolaan OLA, yaitu perjanjian antara penyedia layanan dan bagian lainnya dalam organisasi yang sama, tujuannya membantu penyediaan persyaratan layanan. OLA berisi target yang mendasari SLA, memastikan

target tidak dilanggar oleh kegagalan aktifitas pendukung.

c. Pengelolaan underpinning contract (UC), merupakan sebuah perjanjian dengan penyedia layanan eksternal dalam tingkatan tertentu.

Pengelolaan SLA, OLA dan UC diimplementasikan sebagai suatu proses pengelolaan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan tingkat layanan di Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi tipe penyedia layanan untuk penetapan SLA, OLA dan UC, dengan cara melakukan pengelompokan penyedia layanan kedalam 3 (tiga) tipe penyedia layanan, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Ketiga tipe penyedia layanan tersebut adalah:

a. Tipe I, adalah penyedia layanan internal Kabupaten Nganjuk
b. Tipe II, adalah layanan Kabupaten Nganjuk yang digunakan secara bersama.
c. Tipe III, adalah penyedia layanan eksternal yang terkait dengan layanan Kabupaten Nganjuk, yaitu Kominfo (Infrastruktur dan Aplikasi), PPN/Bappenas (Data), Badan Siber dan Sandi Negara/ BSSN (Keamanan).



Gambar 26 Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan

Berdasarkan hasil klasifikasi tipe layanan, pengelompokan penyedia layanan untuk kebutuhan pengelolaan tingkat layanan di Kabupaten Nganjuk seperti dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan Kabupaten Nganjuk

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tipe I / Tipe II	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tipe I / Tipe II	DISPENDIK
RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro	Tipe I / Tipe II	DINAS KOPUM
RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan	Tipe I / Tipe II	BPKAD
RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tipe I / Tipe II	INPEKTORAT DAERAH
RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Tipe I / Tipe II	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Tipe I / Tipe II	SATPOL PP
RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Tipe I / Tipe II	DINAS DAMKAR

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tipe I / Tipe II	DISPENDIK
RAL 01.04.01 Ekonomi Makro	Tipe I / Tipe II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
RAL 01.05.01 Manajemen Ekonomi Kreatif	Tipe I / Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	Tipe I / Tipe II	DISPERINDAG
RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	Tipe I / Tipe II	DISNAKER
RAL 01.07.01 Pertanian	Tipe I / Tipe II	DINAS Pertanian
RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Tipe I / Tipe II	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro	Tipe I / Tipe II	DINASKOPUM
RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisataan	Tipe I / Tipe II	DISPORABUDPAR

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis	Tipe I / Tipe II	DINAS PUPR
RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	Tipe I / Tipe II	DISHUB
RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu	Tipe I / Tipe II	DINAS PMD
RAL 01.23.04 Keluarga Berencana	Tipe I / Tipe II	DINAS PPKB
RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	BAKESBANGPOL
RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	SETDA
RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	Badan Pendapatan Daerah
RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tipe I / Tipe II	BAPPEDA
RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tipe I / Tipe II	SETDA

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tipe I / Tipe II	BKPSDM
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	DINKES
RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Tipe I / Tipe II	DINAS DAMKAR
RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Tipe I / Tipe II	DINSOS PPA
RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Tipe I / Tipe II	BPBD
RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Tipe I / Tipe II	DINSOS PPA
RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Tipe I / Tipe II	BPBD
RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin	Tipe I / Tipe II	DINSOS PPA
RAL 01.28.02 Lembaga Pemasyarakatan	Tipe I / Tipe II	Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem	Tipe I / Tipe II	DINAS LH
RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem	Tipe I / Tipe II	DINAS LH
RAL 01.42.01 kebijakan kebudayaan	Tipe I / Tipe II	DISPORABUDPAR
RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Tipe I / Tipe II	DINAS PPKB
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	SETDA
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	DISKOMINFO
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	BPKAD
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	INSPEKTORAT
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Bagor

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Baron
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Berbek
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Gondang
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Jatikalen
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Kertosono
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Lengkong
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Loceret
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Nganjuk
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Ngetos

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Ngluyu
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Ngronggot
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Pace
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Patianrowo
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Prambon
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Rejoso
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Sawahan
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Sukomoro
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Tanjunganom

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Kecamatan Wilangan
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	DINSOS PPPA
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	RSUD Kertosono
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	RSUD Nganjuk
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	SATPOLPP
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	SEKDA
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Sekretariat DPRD
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	BKKBN
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	Tipe I / Tipe II	SETDA
RAL 01.07.01 Pertanian	Tipe I / Tipe II	DISPERTA
RAL 01.07.01 Pertanian	Tipe I / Tipe II	DINAS KPP
RAL 01.07.01 Pertanian	Tipe I / Tipe II	DISPERTA
RAL 01.09.02 kebijakan peternakan	Tipe I / Tipe II	DISPERTA
RAL 01.09.05 penyehatan hewan	Tipe I / Tipe II	DISPERTA
RAL 01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner	Tipe I / Tipe II	DISPERTA
RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Tipe I / Tipe II	DINAS KPP
RAL 01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya	Tipe I / Tipe II	DINAS KPP

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.05.01 Manajemen Ekonomi Kreatif	Tipe I / Tipe II	DISPERINDAG
RAL 01.05.03 Pajak dan Cukai	Tipe I / Tipe II	DISNAKER
RAL 01.05.06 Ketahanan Industri	Tipe I / Tipe II	DISNAKER
RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	Tipe I / Tipe II	DISNAKER
RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	Tipe I / Tipe II	DISNAKER
RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal	Tipe I / Tipe II	DPMPTSP
RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal	Tipe I / Tipe II	DPMPTSP
RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	Tipe I / Tipe II	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis	Tipe I / Tipe II	DINAS PUPR

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	Tipe I / Tipe II	DISHUB
RAL 01.19.01 Kemananan dan Keselamatan Transportasi	Tipe I / Tipe II	DISHUB
RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	Tipe I / Tipe II	DISHUB
RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu	Tipe I / Tipe II	DINAS PMD
RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu	Tipe I / Tipe II	DINAS PUPR
RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan	Tipe I / Tipe II	DINKES
RAL 01.25.01 Farmasi dan Alat Kesehatan	Tipe I / Tipe II	DINKES
RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Tipe I / Tipe II	DINKES
RAL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	Tipe I / Tipe II	DINKES

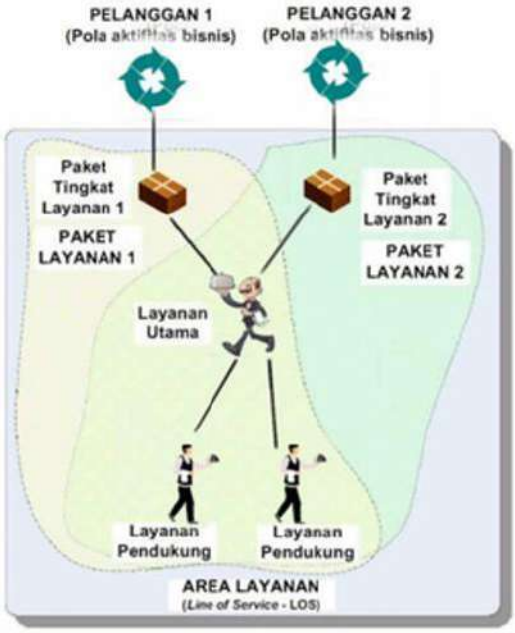
Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan	Tipe I / Tipe II	DINKES
RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	Tipe I / Tipe II	DINSOS PPPA
RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan	Tipe I / Tipe II	DINAS ARPUS
RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam	Tipe I / Tipe II	DINAS PRKPP
RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	Tipe I / Tipe II	Inspektorat Daerah
RAL 02.02.04 Penganggaran	Tipe III	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
RAL 02.06.18 Dukungan Kearsipan	Tipe III	SETDA
RAL 02.07.01 Pembinaan Kegiatan Pengawasan	Tipe III	SETDA
RAL 02.04.01. Manajemen ASN	Tipe III	BKPSDM

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 02.04.02.Pembinaan Jabatan Fungsional	Tipe III	BKPSM
RAL 02.04.03. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian	Tipe III	BKPSDM
RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi	Tipe III	BKPSDM
RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS	Tipe III	BKPSDM
RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika	Tipe III	DISKOMINFO
RAL 02.09.06 Statistik Sektoral	Tipe III	DISKOMINFO
RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	Tipe I / Tipe II	DISKOMINFO
RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Tipe I / Tipe II	Kecamatan
RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Tipe I / Tipe II	DINAS PPKB

Kategori Layanan	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan
RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Tipe I / Tipe II	Kecamantan
RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil	Tipe I / Tipe II	DINAS PPKB
RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil	Tipe I / Tipe II	Kecamatan
RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan	Tipe I / Tipe II	DINKES
RAL 02.03.06 Rencana Pembangunan Nasional	Tipe III	BAPPEDA
RAL 02.05.01 Pemerintahan Umum	Tipe III	Asisten Pemerintahan dan Kesra
RAL 02.05.01 Pemerintahan Umum	Tipe III	SETDA

2. Paket Layanan

Tujuan dari pendefinisian paket layanan adalah untuk menentukan pola layanan sebagai sebuah paket layanan. Hal ini dilakukan sebagai dukungan aktivitas dan jaminan keberlangsungan layanan (*warranty*) melalui pendefinisian paket tingkat layanan. Konsep dari pemaketan layanan di lingkungan Kabupaten Nganjuk seperti disajikan pada Gambar 27.



Gambar 27 Pemaketan Layanan Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil klasifikasi layanan dan tipe penyedia layanan, maka dilakukan pemaketan untuk menetapkan sub kategori layanan pendukung yang melekat ke dalam kategori layanan, atau menetapkan konsolidasi layanan yang dapat digunakan secara bersama melalui paket tingkat layanan yang berbeda, sesuai dengan pola aktivitas bisnis masing- masing pengguna seperti dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Paket Layanan Kabupaten Nganjuk

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	Kesehatan	Pelayanan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Penerbitan	RAL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan
		Pengawasan	RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan
		Konsultasi	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Sertifikasi	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Permintaan dan Permohonan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Registrasi	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
		Operasi	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
2	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini
		Sekolah Dasar	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
		Pendidikan Non-Formal	RAL 01.31.06 Pendidikan Non-Formal
		Manajemen Pendidik	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Pembinaan Kepustakaan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
3	Informasi	Informasi	RAL.01.43.03 Pelayanan Informasi
		Dokumentasi	RAL.01.43.03 Pelayanan Informasi
		Penyiaran	RAL 01.43.04 Penyelenggaraan penyiaran radio publik
4	Keuangan	Pengangaran	RAL.02.02.04 Penganggaran
		Perencanaan Keuangan Satuan Kerja	RAL.02.02.05 Pengelolaan Barang Milik Negara
5	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyusunan	RAL.02.03.02 Penyusunan Perencanaan

No.	Paket Layanan	Otoritas Akses Paket Layanan	
		Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
6	Aparatur Negara	Kepegawaian	RAL.02.04.01 Manajemen ASN
		Layanan Pembinaan Jabatan	RAL 02.04.02.Pembinaan Jabatan Fungsional
		Sarana	RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi
		Penghargaan ASN	RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS
7	Dukungan Operasional Organisasi	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Survey	RAL.02.06.04 Sistem Pelaporan
		Laporan	RAL.02.06.04 Sistem Pelaporan
		Penjejakan digital	RAL.02.06.06 Bantuan Hukum
		Gelar Kasus	RAL.02.06.06 Bantuan Hukum
		Pengelolaan	RAL.02.06.07 Dukungan Administrasi Organisasi
		Penomoran	RAL.02.06.07 Dukungan Administrasi Organisasi
		Kearsipan	RAL 02.06.18 Dukungan Kearsipan
8	Organisasi dan Tata Kelola	Monitoring dan Evaluasi	RAL 02.08.01 Pengawasan Fungsi Organisasi
9	Data dan Informasi Pemerintah	Penyelenggaraan Informatika	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
		Data Statistik	RAL 02.09.06 Statistik Sektoral

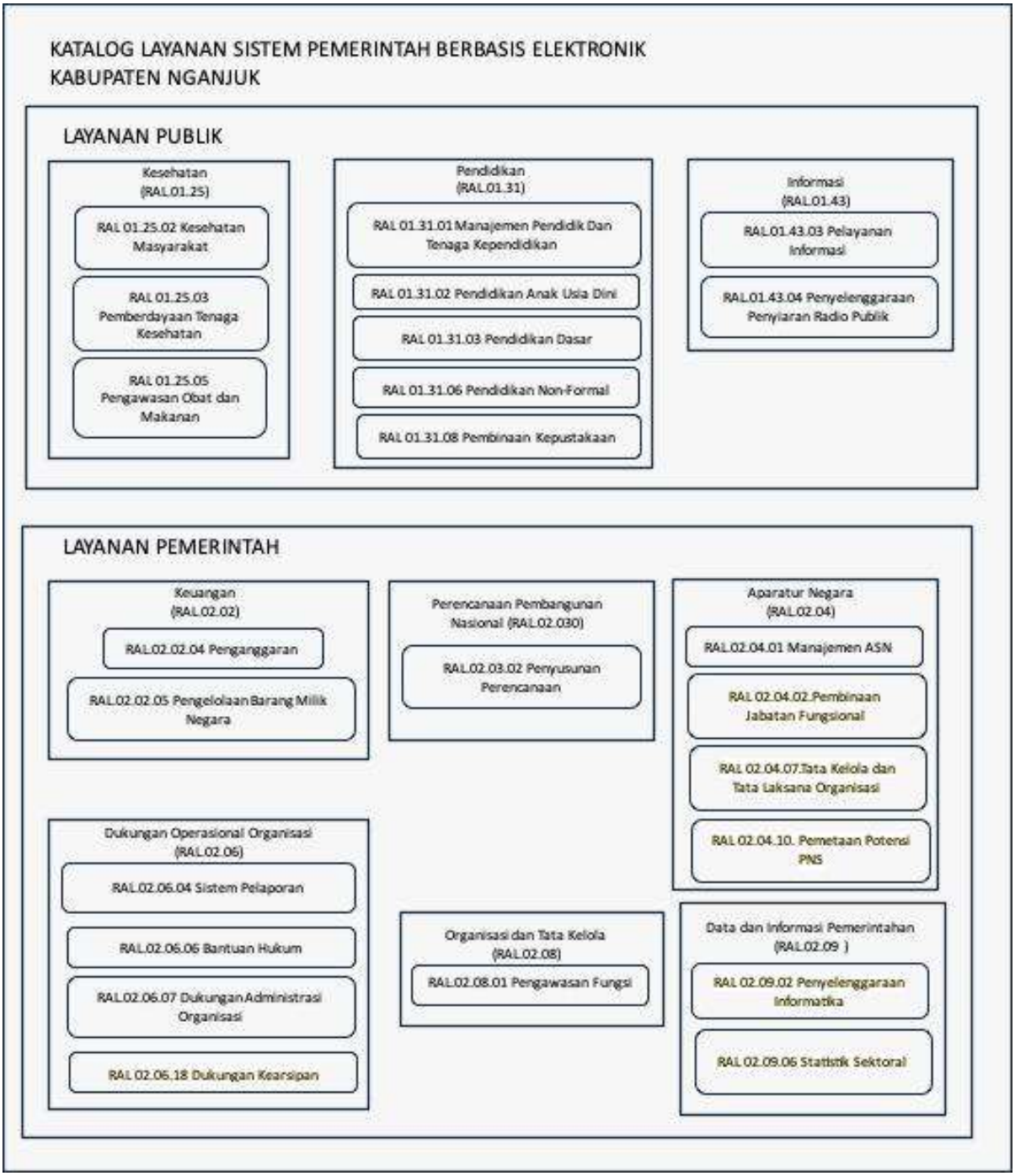
B. Detail Kondisi yang Diinginkan

Detail dari kondisi yang diinginkan dideskripsikan sebagai suatu keadaan dimana setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia.

Detail kondisi yang diinginkan ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kabupaten Nganjuk. Lingkupnya berupa layanan umum yang digunakan dan dikembangkan sesuai dengan tahapannya (rilis) masing--masing (layanan umum dibagi ke dalam komponen- komponen yang saling terhubung berdasarkan teknologi *microservices*), dan layanan tersebut saling terhubung dalam komputasi awan untuk mendukung Layanan SPBE. Berdasarkan Cetak Biru (*BluePrint*) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo), rincian dari kondisi yang diinginkan dari Layanan SPBE adalah kemudahan perolehan pelayanan pemerintah diwujudkan melalui (a) Akses layanan mandiri, (b) Layanan bergerak, (c) Layanan cerdas bagi masyarakat.

1. Katalog Status Layanan

Dari hasil seluruh tahapan pemodelan yang telah dilakukan, maka model katalog layanan yang direkomendasikan untuk penyediaan layanan SPBE di Kabupaten Nganjuk diawali dari pendefinisian katalog layanan. Katalog layanan terdiri dari 284 layanan, yang diklasifikasikan menjadi 9 area dan 24 kategori, meliputi 254 layanan publik dan 30 layanan administrasi pemerintahan. Gambaran umum dari katalog layanan Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 28 Katalog Layanan SPBE Kabupaten Nganjuk

Setiap layanan saling bergantung dan berkontribusi satu sama lain. Ketergantungan dan kontribusi ini diatur melalui dokumen persetujuan tingkat layanan yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk sejumlah paket SLA, 3 paket OLA, dan 2 paket UC. Dokumen SLA, yang merupakan tipe berbasis perusahaan, digunakan untuk mengelola tingkat layanan berdasarkan kebutuhan operasional proses bisnis, baik layanan internal maupun eksternal Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, dokumen OLA dan UC adalah layanan berbasis layanan yang melibatkan Unit TI dan unit terkait lainnya sebagai penanggung jawab, serta pihak eksternal seperti Kominfo (penyedia dukungan infrastruktur dan aplikasi), Data (PPN/Bappenas), dan Keamanan (Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN).

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, ketergantungan dan kontribusi antara layanan SPBE (Sistem Pengelolaan Basis Data Elektronik) dapat diatur melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP). SPLP adalah perangkat integrasi atau penghubung yang memungkinkan pertukaran data dan layanan. Dalam konteks Kabupaten Nganjuk, SPLP berfungsi sebagai antarmuka yang mewakili titik akses di mana pengguna dapat memanfaatkan layanan. Secara umum, kebutuhan ini dicapai melalui dukungan Komputasi Awan dan Berbagai Pakai Layanan (menggunakan microservices), yang akan dijelaskan lebih detail dalam bagian Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan dalam laporan ini.

Selain SPLP, perbaikan versi layanan merupakan periode waktu di mana SPBE memberikan nilai tambahan melalui perangkat lunak dan sistem yang berfungsi dan teruji. Perbaikan versi layanan (product increment) menggambarkan keadaan stabil arsitektur dalam jangka waktu tertentu, yang bersifat inkremental dan dapat berkembang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam SPBE, perbaikan versi layanan terdiri dari tiga versi aplikasi, yaitu Layanan Versi 0.0, Layanan Versi 1.0, dan Layanan Versi 2.0. Produk dari perbaikan versi layanan akan memenuhi kebutuhan yang ada dalam daftar elemen Kabupaten Nganjuk, seperti Komputasi Awan dan Berbagi Pakai Layanan.

Berdasarkan katalog layanan dan spesifikasi yang telah ditetapkan, kita dapat menentukan kondisi ideal layanan yang seharusnya ada untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan SPBE. Dalam konteks kondisi layanan saat ini di Kabupaten Nganjuk, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kesenjangan yang terjadi di setiap status layanan yang ada, serta melakukan penyesuaian dengan hasil pemodelan katalog layanan yang telah ditentukan. Hubungan antara status layanan dalam katalog dan status layanan saat ini dapat

dilihat pada Gambar 29.



Gambar 29 Model Relasi Status Layanan SPBE Kabupaten Nganjuk

2. Analisis Kesenjangan

Kapabilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan SPBE adalah layanan SPBE. Berdasarkan Perpres Nomor 132 tahun 2022 mengenai Arsitektur SPBE, kapabilitas SPBE merupakan Layanan SPBE yang diarahkan untuk peningkatan kualitas dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE salah satunya dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, penerapan manajemen layanan, serta teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran. Semuanya merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan di Kabupaten Nganjuk. Pembahasan kebutuhan ini akan diuraikan secara rinci pada bagian kondisi yang diinginkan dalam laporan ini.

Kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan berdasarkan hasil pemodelan yang direkomendasikan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap kesenjangan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk merencanakan tindakan sebagai daftar pekerjaan Kabupaten Nganjuk. Unsur-unsur yang dievaluasi terkait pemenuhan kebutuhan kriteria Layanan SPBE mencakup domain dan area layanan sebagai tingkat 1 dan 2 yang merupakan struktur nasional, kategori dan subkategori layanan sebagai tingkat 3 dan 4 yang merupakan layanan spesifik yang dimiliki oleh Kabupaten Nganjuk, serta infrastruktur layanan sebagai dukungan teknologi

untuk memenuhi kriteria Arsitektur Layanan SPBE.

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan solusi sebagai kumpulan kapabilitas ke depan yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE, serta dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE di Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah:

a. Rancangan yang menyediakan layanan dalam rangka merumuskan kebijakan sebagai area layanan dukungan operasional organisasi dan area lain yang berkaitan perlu dilakukan.
b. Dibutuhkan layanan helpdesk yang akan memberikan penjelasan serta merespon pertanyaan dari seluruh instansi yang sedang melaksanakan kegiatan.
c. Pemenuhan kategori dan sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 dan 4 referensi arsitektur SPBE tingkat IPPD, dapat diidentifikasi melalui penetapan dukungan kinerja dan penurunan hambatan (*utility*), serta pengelolaan tingkat layanan (warranty), termasuk kebutuhan komponen asetnya (*service assets*).
d. Perlu dikelompokkan secara tepat masing-masing layanan pada proses yang ada yang disesuaikan dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Hal ini dilakukan supaya proses evaluasi terhadap layanan Kabupaten Nganjuk berbasis sistem keseluruhan dan berada pada domain aplikasi SPBE lebih mudah. Selain itu, juga dapat menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi berdasarkan domain proses bisnisnya masing-masing, serta perlunya ketersediaan sistem perbaikan versi layanan untuk kebutuhan layanan masa depan.
e. Perlu diidentifikasi serta dikelompokkan lebih lanjut layanan yang belum berbasis sistem atau elektronik dalam rangka mempermudah pekerjaan unit pelaksana.

3. Daftar Pekerjaan Kabupaten Nganjuk

Secara umum, daftar pekerjaan di Kabupaten Nganjuk terdiri dari dua bidang utama, yaitu Komputasi Awan dan Berbagai Pakai Layanan yang menggunakan microservices. Setelah menganalisis katalog dan status layanan yang diperlukan di Kabupaten Nganjuk, telah dihasilkan rincian daftar pekerjaan solusi. Daftar pekerjaan tersebut mencakup penyediaan layanan baru yang harus disediakan, pembaruan layanan untuk keperluan

integrasi, serta manajemen tingkat layanan untuk keperluan berbagi penggunaan layanan di lingkungan Kabupaten Nganjuk. Informasi tersebut dapat ditemukan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Daftar Pekerjaan Solusi Layanan

No.	Daftar Pekerjaan	Deskripsi
1	**Manajemen Layanan**	
	Identifikasi Layanan terintegrasi fokus pada layanan pemerintah berbasis arsitektur SPBE	Untuk melakukan analisis kebutuhan dan menetapkan status sistem layanan dalam mengidentifikasi layanan SPBE, terdapat dua langkah utama yang perlu dilakukan. Pertama, langkah tersebut melibatkan penetapan layanan yang bersifat corporate based dan menyusun dokumen SLA yang terkait. Kedua, langkah tersebut melibatkan penetapan layanan yang bersifat service based dan menyusun dokumen OLA dan UC yang terkait. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyediakan layanan SPBE berbasis Teknologi 4.0 yang melibatkan pihak internal dan eksternal sebagai penyedia infrastruktur dan aplikasi (Kominfo), Data (PPN/Bappenas), dan Keamanan (BSSN).
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kabupaten Nganjuk berbasis arsitektur SPBE	
	Identifikasi aplikasi, data dan informasi	
	integrasi layanan administrasi pemerintahan (Aplikasi Umum)	
	Pengembangan aplikasi umum untuk layanan administrasi pemerintahan	
	Pengembangan layanan dengan Teknologi 4.0	
	Sosialisasi layanan terintegrasi	
	Operasional layanan terintegrasi	
2	**Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan**	
	Identifikasi Layanan terintegrasi	Dalam rangka penetapan dan penyesuaian regulasi untuk pengelompokan layanan dalam domain dan area layanan sebagai struktur tingkat 1 dan 2 SPBE Nasional, serta merincikannya menjadi kategori dan subkategori layanan sebagai struktur tingkat 3 dan 4 SPBE IPPD (Kabupaten Nganjuk), terdapat serangkaian aktivitas proses yang perlu
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kabupaten Nganjuk	
	Identifikasi data dan informasi	
	integrasi layanan	
	Sosialisasi layanan terintegrasi	

	Operasional layanan terintegrasi	dilakukan. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan layanan dengan melakukan pemetaan terhadap proses bisnis yang terintegrasi, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dan operasionalisasi layanan. Dalam proses ini, regulasi akan ditetapkan dan disesuaikan untuk memastikan pengelompokan dan penentuan struktur tingkat layanan yang tepat dalam kerangka SPBE Nasional dan SPBE IPPD Kabupaten Nganjuk.

C. Peta Jalan Arsitektur Layanan SPBE

Realisasi daftar pekerjaan solusi yang telah disusun direncanakan melalui tahapan peta jalan (roadmap) yang akan mencerminkan kondisi stabil dari arsitektur layanan SPBE di Kabupaten Nganjuk dalam jangka waktu tertentu. Peta jalan ini dirancang untuk merealisasikan layanan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Nganjuk melalui dua tahapan aktivitas yang terdefinisi dalam Tabel 3, yaitu:

a. Tahapan pembangunan pondasi melalui manajemen layanan: Pada tahap ini, fokus utamanya adalah membangun fondasi yang kuat melalui pengelolaan layanan yang efektif. Aktivitas ini akan memastikan bahwa sistem layanan SPBE di Kabupaten Nganjuk dikelola dengan baik dan didukung oleh praktik manajemen yang tepat.

b. Tahapan pengembangan SPBE melalui pengembangan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan: Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan layanan administrasi pemerintahan. Langkah-langkah ini akan memperluas cakupan layanan yang disediakan oleh SPBE di Kabupaten Nganjuk dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan mengikuti peta jalan ini, Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat mencapai tujuan dalam merealisasikan layanan pemerintahan yang optimal dalam lingkungannya.

Tabel 9 Peta Jalan Arsitektur Layanan Kabupaten Nganjuk

No.	Daftar Layanan	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Manajemen Layanan**					
	Identifikasi Layanan terintegrasi fokus pada layanan pemerintah berbasis arsitektur SPBE					
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kabupaten Nganjuk berbasis arsitektur SPBE					
	Identifikasi aplikasi, data dan informasi					
	Integrasi layanan administrasi pemerintahan (Aplikasi Umum)					
	Pengembangan aplikasi umum untuk layanan administrasi pemerintahan					
	Sosialisasi layanan terintegrasi					
	Operasional layanan terintegrasi					
2	**Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan**					
	Identifikasi Layanan terintegrasi					
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kabupaten Nganjuk					
	Identifikasi data dan informasi					
	integrasi layanan					
	Sosialisasi layanan terintegrasi					
	Operasional layanan terintegrasi					

3	**Layanan Administrasi Pemerintahan**					
	Identifikasi Layanan terintegrasi					
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Kabupaten Nganjuk					
	Identifikasi data dan informasi					
	Integrasi layanan					
	Sosialiasi layanan terintegrasi					
	Operasional layanan terintegrasi					

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR



ARSITEKTUR KEAMANAN INFORMASI SPBE

KABUPATEN NGANJUK



`

Kata Pengantar

Buku Arsitektur Keamanan Informasi ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan dokumen Arsitektur SPBE yang terdiri dari buku : Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan Informasi. Dokumen ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Buku Arsitektur Keamanan ini terdiri dari 4 pokok pembahasan penting yaitu Pemetaan Keamanan, Analisa Kesenjangan, Kondisi yang diinginkan arsitektur keamanan SPBE dan Peta Jalan Arsitektur Kemanan. Tiada gading yang tak retak, semoga buku yang belum sempurna ini dapat menjadi referensi dalam melengkapi dokumentasi SPBE untuk pencapaian kinerja pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

Nganjuk, 10 Mei 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I ARSITEKTUR KEAMANAN 6

A. PEMETAAN KEAMANAN 6

1. Standar dan atau Kebijakan Keamanan 8

2. Penerapan Keamanan 9

3. Uji Kelaikan Keamanan 9

4. Pemetaan Area Keamanan Data dan Aplikasi 10

B. ANALISA KESENJANGAN 14

1. Domain Keamanan Tingkat 1 14

2. Area Keamanan Tingkat 2 16

C. Kondisi yang diinginkan Arsitektur Keamanan SPBE 19

1. Domain Keamanan 21

2. Area Keamanan 22

D. Peta jalan arsitektur keamanan 28

`

Daftar Gambar

Gambar 1. Kondisi Eksisting Arsitektur Keamanan SPBE Kab Nganjuk 6

Gambar 2 Pemetaan Domain Keamanan SPBE di Lingkungan Kab Nganjuk. 7

Gambar 3 Topologi Jaringan Komputer Intranet OPD Kabupaten Nganjuk. 10

Gambar 4 . Pemetaan Area Keamanan berdasarkan Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 13

Gambar 5 Gap Analisis Kesenjangan pada Domain KeamananTingkat 1 16

Gambar 6 Analisa kesenjangan Area keamanan Tingkat 2 17

Gambar 7 Roadmap Arsitektur Keamanan “perlu gambar ulang” 28

`

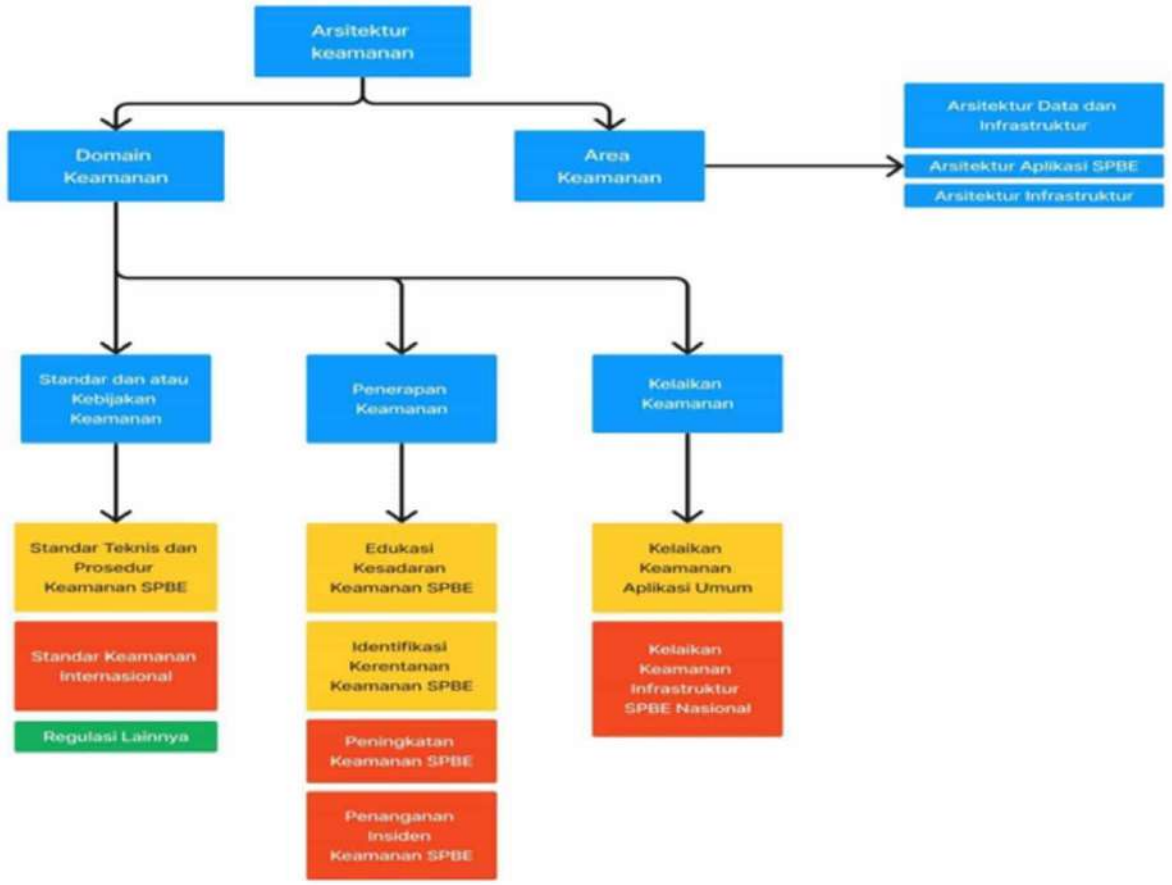
Daftar Tabel

Tabel 1 Daftar Semua Regulasi Keamanan Kab Ngajuk.....8
Tabel 2 Dua Standar Keamanan Kab Nganjuk.....8
Tabel 3 Daftar Kegiatan Penerapan Keamanan di Kab Nganjuk.....9
Tabel 4 Audit dan Keamanan Aplikasi.....9
Tabel 5 Keamanan data dan informasi, Aplikasi SPBE.....11
Tabel 6 Area Keamanan Infrastruktur.....11
Tabel 7 Domain Keamanan Tingkat 1.....14
Tabel 8 Rekapitulasi hasil analisa Kesenjangan Keamanan SPBE Kab Nganjuk.....25
Tabel 9 Peta Jalan Asitektur Keamanan Kab Nganjuk.....29

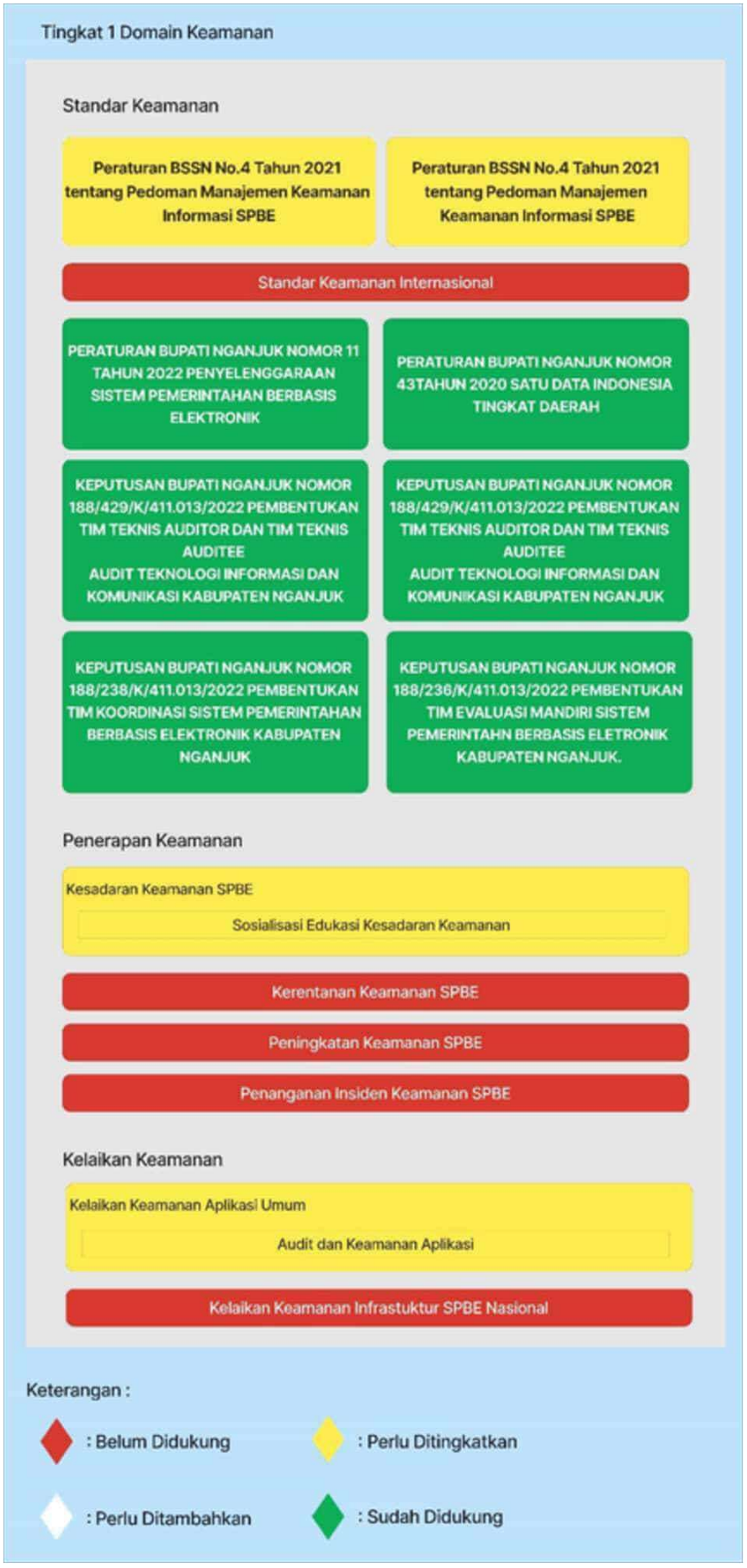
BAB I ARSITEKTUR KEAMANAN

A. PEMETAAN KEAMANAN

Pemetaan arsitektur keamanan terhadap metadata arsitektur keamanan di lingkungan Kabupaten Nganjuk terdiri dari dua tingkatan. Pertama domain keamanan dengan uraian standar dan atau kebijakan keamanan, penerapan keamanan serta kelaikan keamanan. Kedua area keamanan terhadap domain arsitektur lain yaitu arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur. Hasil pemetaan metadata arsitektur keamanan terhadap kondisi eksisting Kab Nganjuk dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Kondisi Eksisting Arsitektur Keamanan SPBE Kab Nganjuk



Gambar 2 Pemetaan Domain Keamanan SPBE di Lingkungan Kab Nganjuk.

`

1. Standar dan atau Kebijakan Keamanan

Selama kegiatan ini, diperoleh lima kebijakan keamanan yang didapatkan dan dua standar dan referensi utama, diantaranya Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE, Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dan dari Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Kebijakan atau regulasi kemanan yang sudah ada pada lingkup Kab Nganjuk tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Semua Regulasi Keamanan Kab Ngajuk

NO	Kebijakan
1	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/429/K/411.013/2022 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS AUDITOR DAN TIM TEKNIS AUDITEE AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN NGANJUK
3	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 43TAHUN 2020 SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
4	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/170/411.012/2018 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DIKABUPATEN NGANJUK
5	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/238/K/411.013/2022 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN NGANJUK
6	KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/236/K/411.013/2022 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM PEMERINTAHN BERBASIS ELETRONIK KABUPATEN NGANJUK.

Tabel 2 Dua Standar Keamanan Kab Nganjuk

NO	Standar Keamanan
1	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE
2	Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit SPBE

`

2. Penerapan Keamanan

Penerapan kegiatan keamanan dalam lingkungan atau OPD terkait Pemda Kab Nganjuk meliputi kegiatan pembentukan tim audit TIK SPBE pemkab Nganjuk dan bimtek. Pelaksanaan dilakukan 3 Oktober untuk rapat koordinasi dan 11 Oktober untuk kegiatan bimtek. Daftar Kegiatan yang sudah dilakukan yang masuk dalam penerapan keamanan tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3 Daftar Kegiatan Penerapan Keamanan di Kab Nganjuk

No	Judul Kegiatan	Tanggal	Kategori Kegiatan	Deskrispi Kegiatan
1	Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Teknis Auditor SPBE Kab Nganjuk	3 Oktober 2022	Rapat Koordinasi No surat undangan 005/3570/411.12/2022	Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Tim Teknis Auditee SPBE Kab Nganjuk
2	Bimtek Audit TIK SPBE	11 Oktober 2022	Bimtek No Surat 005/3688/411.312/2022	Bimbingan Teknis Tim Auditor dan Tim auditee Informasi dan komunikasi SPBE

3. Uji Kelaikan Keamanan

Saat ini dokumen yang ditemukan untuk kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur SPBE ada pada dokumen rencana induk teknologi informasi Kab Nganjuk dan laporan evaluasi pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh BSSN. Dokumen ini menyatakan bahwa audit dan keamanan informasi telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan terkait keamanan aplikasi dan keamanan jaringan. Kegiatan ini tertuang dalam berita acara no 027/286/411.312/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 terhadap ujipetik sebanyak 9 Laporan Uji keamanan informasi. Metode yang digunakan adalah menggunakan OWASP ZAP, hasil pengujian seperti pada Tabel 4

Tabel 4 Audit dan Keamanan Aplikasi

Kegiatan		Hasil Pengujian		
		Lolos	Low	Medium
1	Laporan Uji Keamanan Website Pemkab Nganjuk	6	1	3

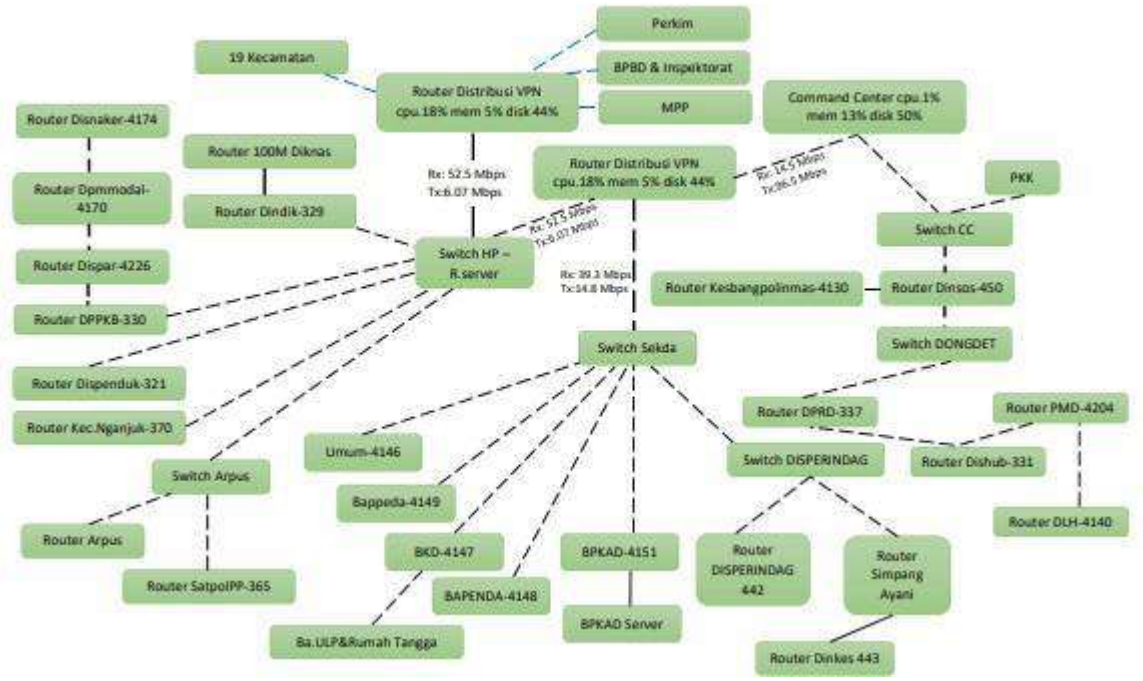
`

2	Laporan Uji Keamanan Sistem Laporan Kinerja ASN	6	1	3
3	Laporan Uji Keamanan Sistem Layanan Darurat	6	1	3

4	Laporan Uji Keamanan Sistem Elektronik Terpadu Daerah Online	8	1	1
5	Laporan Uji Keamanan Website Pemkab Nganjuk	6	1	3
6	Laporan Uji Keamanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	6	2	2
7	Laporan Uji Keamanan Webiste Dinas Komunikasi dan Informatika	6	2	2
8	Laporan Uji Keamanan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online	7	1	2
9	Laporan Uji Keamanan Sistem Aplikasi Absensi Elektronik	6	2	2

4. Pemetaan Area Keamanan Data dan Aplikasi

Pada kegiatan survey yang dilakukan, maka diperoleh peta area keamanan seperti Gambar 6.3. Gambar ini menunjukkan topologi area keamanan data dan informasi, aplikasi serta infrastruktur pada tingkat kedua domain keamanan.



Gambar 3 Topologi Jaringan Komputer Intranet OPD Kabupaten Nganjuk.

Uraian data keamanan dan informasi serta arsitektur layanan dan keamanan infrastruktur tertuang dalam Tabel 6.4 dan 6.5. Area Keamanan ini berkaitan dengan keamanan data pada SPBE Kab Nganjuk yang tertuang dalam peraturan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 6.4.

`

Tabel 5 Keamanan data dan informasi, Aplikasi SPBE

No	Nama	Dasar hukum
1	Penyusunan Tata Kelola Database	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2	Identifikasi dan otentikasi	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
3	Kriptografi	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
4	Digital Signature	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
4	Audit Trail Capture and Analysis	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
5	Certification and Accreditation	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
6	Dst	

Tabel 6 Area Keamanan Infrastruktur

No	Nama Alat	Dasar hukum
1	Firewall	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2	Proxy Transparant	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
3	Content Filtering	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
4	Intrusion detection and prevention (IDS & IPS)	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
5	Identity and access management	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
6	Public key infrastructure	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
7	Antivirus & anti malware, antispam	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
8	Patch management	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
9	SSL	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
10	Keamanan Fisik dan Lingkungan	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

`

11	Pencatu Daya	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
12	Pendingin Ruangan	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
13	Pengkabelan	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
14	Perlindungan Kebakaran	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
15	Pengendali Data Center	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
16	Keamanan operasional dan komunikasi	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
17	Akses kontrol	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
18	Pelaporan dan pengelolaan insiden keamanan informasi	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
19	Business Continuity Framework	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
20	Kepatuhan lisensi dan perangkat lunak	PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 11 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Tingkat 2 area keamanan selanjutnya merujuk ke Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 4 . Pemetaan Area Keamanan berdasarkan Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

B. ANALISA KESENJANGAN

Berdasarkan hasil pemetaan arsitektur keamanan di lingkungan Kab Nganjuk domain keamanan tingkat satu merujuk arsitektur tingkat nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Area keamanan tingkat dua merujuk pada Peraturan BSSN No 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi sistem pemerintahan berbasis eletronik dan standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1. Domain Keamanan Tingkat 1

Kebutuhan Metadata Arsitektur Keamanan SPBE domain keamanan tingkat merujuk pada referensi arsitektur, hal ini dimaksud tertuang dalam Tabel 5.

Tabel 7 Domain Keamanan Tingkat 1

Domain Keamanan	No	Referensi Arsitektur	Deskripsi Arsitektur
Standar Keamanan	1	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber
	2	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
	3	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE
Penerapan Keamanan	1	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE
	2	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi hrsat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE
	3	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi hrsat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE
	4	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangr, memulihkan, dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
	5	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Rrsat dan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan standar keamanan SPBE.

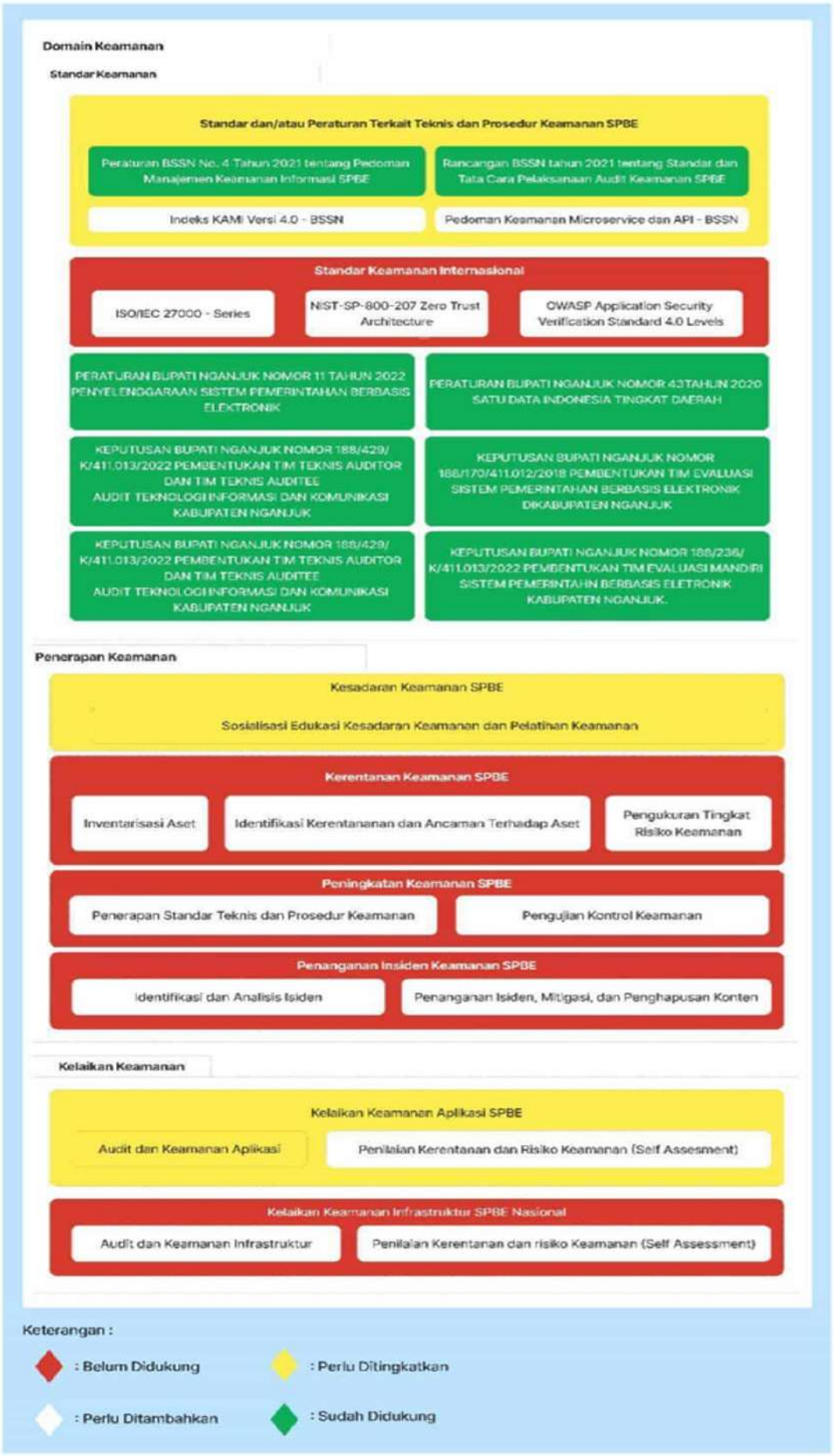
`

Kelaikan Keamanan	1	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Rrsat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan

`

	2	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastnrktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan

Kebutuhan Metadata Arsitektur Keamanan SPBE Kab Nganjuk akan menunjukan kesenjangan seperti yang terlihat pada Gambar 5



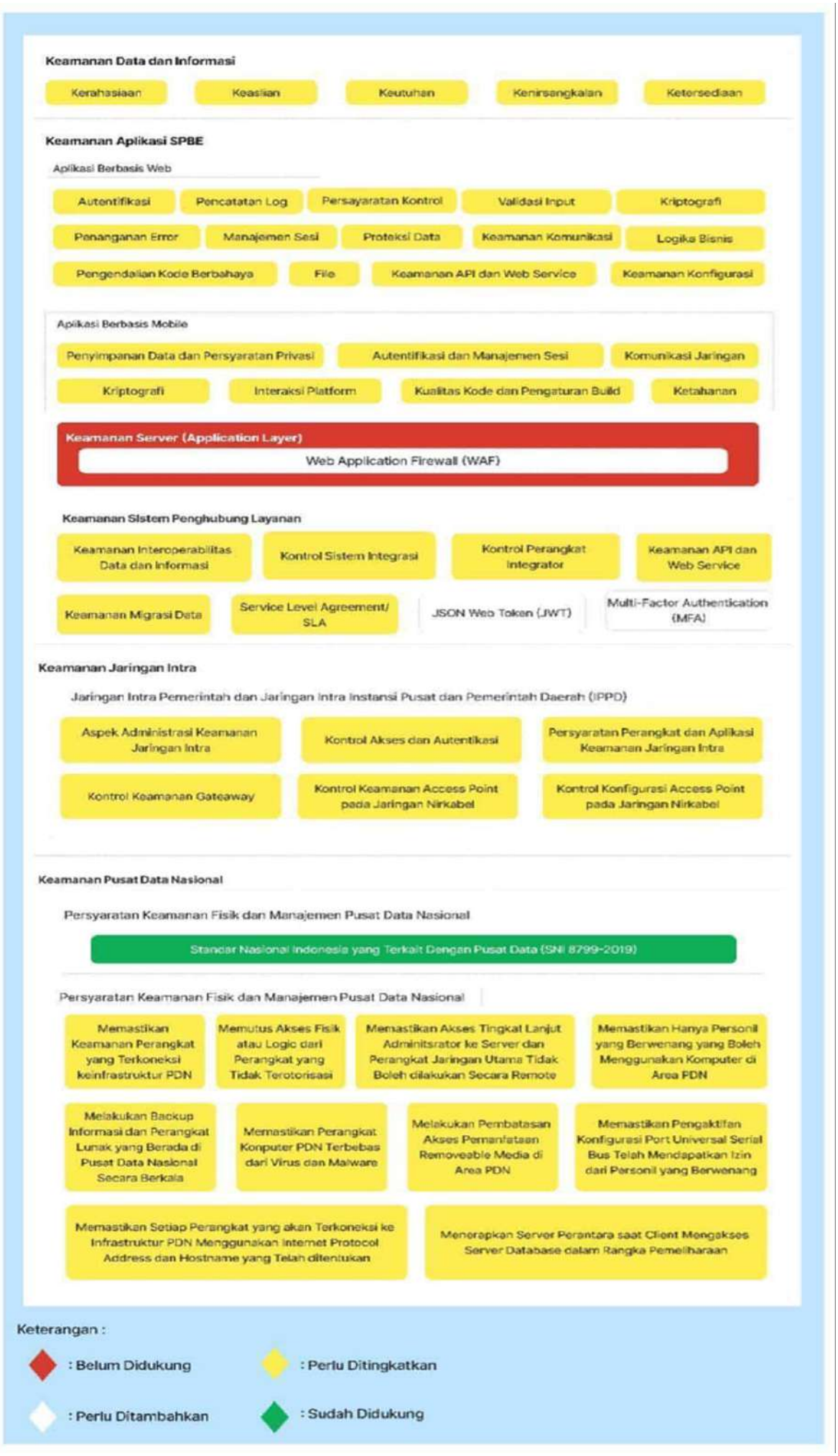
Gambar 5 Gap Analisis Kesenjangan pada Domain KeamananTingkat 1

`

Warna merah mendeskripsikan belum didukungnya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE, warna putih mendeskripsikan perlunya penambahan, warna kuning mendeskripsikan perlunya upaya penyesuaian atau perbaikan, dan sel warna hijau mendeskripsikan sudah terpenuhinya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE. Pemenuhan domain keamanan sebagai struktur tingkat 1 referensi arsitektur tingkat nasional telah terdefinisi untuk setiap kebutuhan keamanan di kab Nganjuk. Berdasarkan hasil pemetaan arsitektur keamanan di lingkungan Kab Nganjuk terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur Keamanan SPBE, diperoleh keadaan yang menunjukan bahwa masih terdapat kesenjangan, diantaranya adalah:

2. Area Keamanan Tingkat 2.

Standar teknis keamanan data dan informasi meliputi aspek: kerahasiaan, keaslian, Keutuhan, kenirsangkalan dan ketersediaan. Analisa kesenjangan area keamanan tingkat 2 keamanan data, informasi dan aplikasi SPBE seperti pada Gambar 6


Keamanan Data dan Informasi
Kerahasiaan
Keaslian
Keutuhan
Kenirsangkalan
Ketersediaan
Keamanan Aplikasi SPBE
Aplikasi Berbasis Web
Autentifikasi
Pencatatan Log
Persayaratan Kontrol
Validasi Input
Kriptografi
Penanganan Error
Manajemen Sesi
Proteksi Data
Keamanan Komunikasi
Logika Bisnis
Pengendalian Kode Berbahaya
File
Keamanan API dan Web Service
Keamanan Konfigurasi
Aplikasi Berbasis Mobile
Penyimpanan Data dan Persyaratan Privasi
Autentifikasi dan Manajemen Sesi
Komunikasi Jaringan
Kriptografi
Interaksi Platform
Kualitas Kode dan Pengaturan Build
Ketahanan
Keamanan Server (Application Layer)
Web Application Firewall (WAF)
Keamanan Sistem Penghubung Layanan
Keamanan Interoperabilitas Data dan Informasi
Kontrol Sistem Integrasi
Kontrol Perangkat Integrator
Keamanan API dan Web Service
Keamanan Migrasi Data
Service Level Agreement/ SLA
JSON Web Token (JWT)
Multi-Factor Authentication (MFA)
Keamanan Jaringan Intra
Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD)
Aspek Administrasi Keamanan Jaringan Intra
Kontrol Akses dan Autentikasi
Persyaratan Perangkat dan Aplikasi Keamanan Jaringan Intra
Kontrol Keamanan Gateaway
Kontrol Keamanan Access Point pada Jaringan Nirkabel
Kontrol Konfigurasi Access Point pada Jaringan Nirkabel
Keamanan Pusat Data Nasional
Persyaratan Keamanan Fisik dan Manajemen Pusat Data Nasional
Standar Nasional Indonesia yang Terkait Dengan Pusat Data (SNI 8799-2019)
Persyaratan Keamanan Fisik dan Manajemen Pusat Data Nasional
Memastikan Keamanan Perangkat yang Terkoneksi keinfrastruktur PDN
Memutus Akses Fisik atau Logic dari Perangkat yang Tidak Terotorisasi
Memastikan Akses Tingkat Lanjut Adminitsrator ke Server dan Perangkat Jaringan Utama Tidak Boleh dilakukan Secara Remote
Memastikan Hanya Personil yang Berwenang yang Boleh Menggunakan Komputer di Area PDN
Melakukan Backup Informasi dan Perangkat Lunak yang Berada di Pusat Data Nasional Secara Berkala
Memastikan Perangkat Konputer PDN Terbebas dari Virus dan Malware
Melakukan Pembatasan Akses Pemanfataan Removeable Media di Area PDN
Memastikan Pengaktifan Konfigurasi Port Universal Serial Bus Telah Mendapatkan Izin dari Personil yang Berwenang
Memastikan Setiap Perangkat yang akan Terkoneksi ke Infrastruktur PDN Menggunakan Internet Protocol Address dan Hostname yang Telah ditentukan
Menerapkan Server Perantara saat Client Mengakses Server Database dalam Rangka Pemeliharaan
Keterangan :
: Belum Didukung
: Perlu Ditingkatkan
: Perlu Ditambahkan
: Sudah Didukung

Gambar 6 Analisa kesenjangan Area keamanan Tingkat 2.

`

Gambar 6.6 merupakan gambaran gap analisis area keamanan pada tingkat 2, warna merah mendeskripsikan belum didukungnya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE, warna putih mendeskripsikan perlunya penambahan, warna kuning mendeskripsikan perlunya upaya penyesuaian atau perbaikan, dan sel warna hijau mendeskripsikan sudah terpenuhinya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE. Pemenuhan area keamanan sebagai struktur tingkat 2 referensi arsitektur tingkat nasional telah terdefinisi untuk setiap kebutuhan keamanan di Kab Nganjuk. Berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang telah teridentifikasi, maka daftar pekerjaan solusi sebagai kumpulan kapabilitas kedepan yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE, serta dimaksudkan untuk memajukan solusidan membangun SPBE di Kab Nganjuk adalah:

1. Perlu adanya pemetaan standar keamanan pada setiap Instansi Pusat danPemerintah Daerah (IPPD)
2. Rujukan standar Internasional sebaiknya tetap harus ada walaupun sudahdirujuk pada standar keamanan atau peraturan yang ada
3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang edukasi keamanan sebagai bentuk penerapan keamanan perlu dilakukan disetiap level baik di tingkat nasional maupun IPPD
4. Uji mandiri dan penilaian kerentanan perlu dilakukan di setiap IPPD dan diverifikasi tingkat nasional sehingga kelaikan keamanan dari seluruh aplikasi, data dan layanan dapat dipastikan
5. Begitu juga untuk kelaikan keamanan infrastruktur SPBE perlu adanya self- assessment untuk menilai kerentanan dan dipastikan kelaikan keamanan infrastruktur SPBE Nasional.

C. KONDISI YANG DIINGINKAN ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Kondisi yang diinginkan adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan tentang kondisi keamanan SPBE. Kondisi keamanan yang diinginkan di Kab Nganjuk didefinisikan untuk mewujudkan inisiatif strategis SPBE, yaitu direalisasikan melalui daftar pekerjaan berupa penjaminan keamanan dan operasional manajemen keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan budaya keamanan informasi. Targetnya dalah tercapainya penjaminan keamanan aplikasi SPBE, infrastruktur serta domain pendukung terkait baik di level nasional, dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional dapat tercapai dengan acuan manajemen keamanan informasi, teknologi keamanan informasi serta budaya keamanan informasi. Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam melakukan layanan organisasiuntuk melindungi aset-aset penting yang dimilikinya. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan peta kontrol•kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Arsitektur kemanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol

keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Keamanan SPBE mencakup sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE yang meliputi:

1. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
2. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
3. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
4. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanis meverifikasi dan validasi.
5. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tandatangan digital dan jaminan oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK, melalui penggunaan sertifikat digital.

Dalam menerapkan Keamanan SPBE, maka Satuan Kerja di lingkungan Kab Nganjuk berkewajiban melaporkan setiap permasalahan keamanan SPBE ke Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK untuk diselesaikan. Jika ada permasalahan terkait keamanan maka Penyelesaain permasalahan keamanan SPBE berdasarkan teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

`

1. Domain Keamanan

a. Standar Keamanan

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu meliputi:

1) standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan; Beberapa diantaranya adalah Peraturan BSSN no. 4 tahun 2021 dan Indeks KAMI.
2) standar internasional terkait keamanan informasi; Diantaranya adalah ISO 27001.
3) regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap instansi harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

b. Penerapan Keamanan.

Edukasi kesadaran keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan infomasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan infrastruktur SPBE. Penilaian kerentanan keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi seluruh sset SPBE dengan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE. Peningkatan keamanan SPBE harus dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan wajib dilaksanakan melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan pada aplikasi dan indrastrktur.

`

Penanganan insiden keamanan yang wajib dilaksanakan adalah:

1. identifikasi sumber serangan.

`

2. analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya.
3. penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi.
4. dokumentasi bukti insiden yang terjadi.
5. mitigasi atau pengurangan dampak risiko keamanan SPBE.
6. penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/ atau terkait malware.

c. Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara self assessment (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi penggerak aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional yang akan ditetapkan. Tahap berikutnya dilakukan verifikasi terhadap self assessment tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber/BSSN.

2. Area Keamanan

a. Data dan informasi, yaitu harus terpenuhinya aspek: kerahasiaan; keaslian; keutuhan; kenirsangkalan; ketersediaan untuk data dan informasi.
b. Aplikasi SPBE, yaitu diterapkannya keamanan pada:
    i. Aplikasi berbasis web, yaitu dalam Aplikasi SPBE berbasis web harus memiliki fungsi autentikasi, manajemen sesi, persyaratan kontrol akses, validasi input, kriptografi pada verifikasi statis, penanganan error dan pencatatan log, proteksi data, keamanan komunikasi, pengendalian kode berbahaya, logika bisnis, file, keamanan API dan web service, dan keamanan konfigurasi.
    ii. Aplikasi berbasis mobile, yaitu pada aplikasi SPBE berbasis mobile harus terpenuhi fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi, kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan, interaksi platform, kualitas kode dan pengaturan build dan ketahanan.
    iii. Keamanan Server (application layer), yaitu berfungsi sebagai

keamanan pada lapisan aplikasi dalam hal ini penjaminan terhadap isi atau data permintaan dari client benar-benar data yang benar, bukan berisi virus, trojan atau ancaman lainnya.

`

c. Sistem Penghubung Layanan, yaitu adanya keamanan interoperabilitas data dan informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan web service, dan keamanan migrasi data.

d. Jaringan Intra, yaitu terpenuhinya aspek-aspek administrasi keamanan Jaringan Intra, kontrol akses dan autentikasi, persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra, kontrol keamanan gateway, kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel, dan kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.

e. Pusat Data Nasional.

Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/ atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan pada Perpres Nomor 95 tahun 2018, maka Pusat Data nasional harus:

1. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
2. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Secara detail Pusat Data Nasional harus memenuhi:

1) Persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasionalsesuai Standar Nasional Indonesia terkait dengan Pusat Data.

2) persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional dengan mencakup prosedur yakni :

- memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastrukturPusat Data Nasional.

`

- memutus akses fisik atau logic dari perangkat yang tidakterotorisasi

`

- memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara remote;
- memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;
- melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala;
- memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari virus dan malware;
- melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area Pusat Data Nasional;
- memastikan pengaktifan konfigurasi port universal serial bus telahmendapatkan izin dari personil yang berwenang;
- memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan internet protocol address dan hostname yang telah ditentukan;
- menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan.

Implementasi domain arsitektur keamanan SPBE akan mempengaruhi pelaksanaan SPBE secara keseluruhan, utamanya terhadap pencegahan insiden keamanan. Di dalam Container terdapat Container Security yang merupakan proses penerapan alat dan kebijakan keamanan untuk memastikan bahwa semua yang ada di dalam Container berjalan sebagaimana mestinya.

`

`

Tabel 8 Rekapitulasi hasil analisa Kesenjangan Keamanan SPBE Kab Nganjuk

NO	Kondisi eksisting	Kondisi yang diinginkan	Penilaian kesenjangan	Tindak lanjut
1	Standar keamanan serta peraturan terkait standarteknis dan prosesdur keamanan belum lengkap	Penyesuaian dan penambahan standar keamanan serta peraturan terkait standar teknisdan prosedur keamanan	Standar dan framework tentang keamanan perlu disusun pada level sectorpusat maupun IPPD	Penyusunan framework danstandar keamanan di sektor pemerintah pada Instansi Pusat maupun pemerintah daerah
2	Pedoman identifikasi kerentanan dan penilaianrisi ko belum lengkap	Penyesuaian dan penambahan pedoman terkait identifikasi keren tanan dan penilaian risiko keamanan di instansi pusat maupun pemerintah daerah	Pedoman identifikas i kerentanan dan penilaian risiko perlu disusun pada sektor pemerintah pusat maupun pemerintah daerah	Penyusunan dan Penerapan Pedoman dentifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Instansi Pusat dan pemerintah daerah
3	Pedoman instrument uji kelaikan secara mandiri pada instansi pusat dan pemerintah daerah	Penyesuaian pedoman penyusunan instrumen uji kelaikan untuk instansi pusatdan pemerintah daerah	Pedoman instrumen uji kelaikan perlu disusun untuk sektor instansi pusat dan pemerintah daerah	Penyusunan dan penerapan instrumen uji kelaikan secara mandiri untuk instansi pusat dan pemerintah daerah

`

4	Layanan honeypot sudah tersedia	Layanan honeynet melalui pemasanganan honeypotpada instansi pusat dan pemerintah daerah	Layanan honeypot belum terpasang secara menyeluruh	Pemasangan honeypotpada instansi pusat dan pemerintah daera
5	DMZ belum terkelola dengan baik	Pengelolaan DMZ Nasional pada infrastruktur TIK Nasional	Perlu pengelolaan DMZ pada infrastruktur nasional	Pengelolaan DMZ Nasiona l pada

`

				infrastruktur TIK Nasional
6	Belum terimplementasi nya layanan security as a services (SecaaS) pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE	Layanan SecaaS dapat diimplementasik an pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE	Perlu dilakukan penerapan SecaaS pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE	Penyediaan layanan securityas a services (SecaaS) pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE
7	Uji kelaikan dan hasil audit aplikasi belum dilaksanakan secara optimal	Uji kelaikan aplikasi umum wajib dilakukan setiap tahun	Perlu dilakukan penerapan SecaaS pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE	Uji kelaikan keamanan aplikasi umum
8	Uji kelaikan dan hasil audit infrastruktur belum dilaksanakan secara optimal	Uji kelaikan infrastruktur wajib dilakukan setiap tahun	Perlu dilakukan uji kelaikan aplikasi minimal self-assessment	Uji kelaikan keamanan infrastruktur
9	Uji kelaikan dan hasil audit system penghubung layananbelum dilaksanakan secara optimal	Uji kelaikan system penghubung layanan wajib dilakukan setiap tahun	Perlu dilakukan uji kelaikan infrastruktur minimal self-assessment	Uji kelaikan keamanan system penghubung layanan
10	Uji kelaikan dan hasil auditJaringan intra pemerintah belum dilaksanakan secara	Uji kelaikan Jaringan intra pemerintah wajib dilakukansetiap tahun	Perlu dilakukan uji kelaikanJaringan intra pemerintah secara berkala	Uji kelaikan keamanan Jaringan intra pemerintah

`

	optimal			
11	Belum dilakukan pentest pada aplikasi-aplikasi SPBE	Dilakukan pentest pada setiap aplikasi dan system yang digunakan	Perlu dilakukan pentest pada seluruh aplikasi yang digunakan	Pengujian aplikasi / system dengan penetester atau audit

`

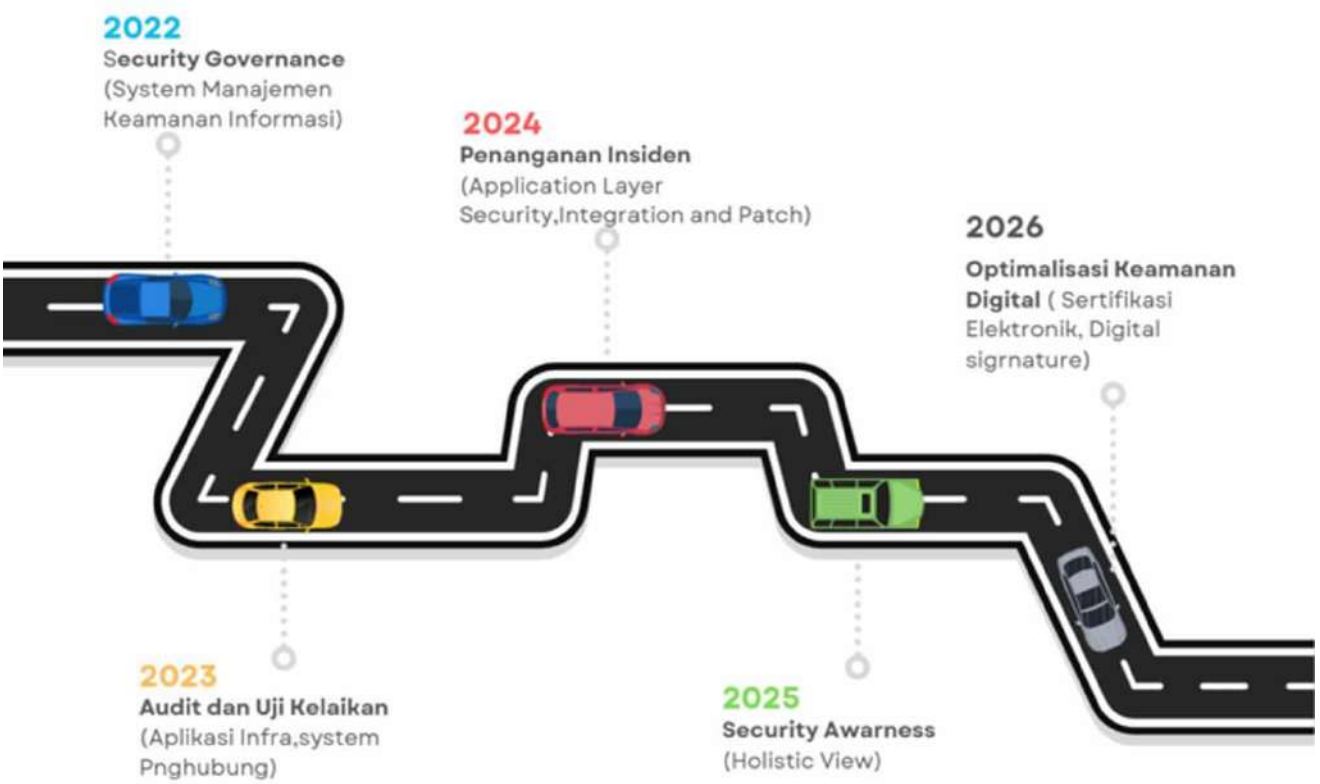
				khusus keamanan
12	Belum ada bagian khusus penanganan insiden siber	Harus adanya kelompok yang menangani insiden keamanan	Perlu dibentuk kelompok khusus penanganan insiden keamanan seperti CSIRT	Pembentukan CSIRT pada instansi pusat dan pemerintah daerah
13	Belum adanya pengamanan khusus pada lapisan aplikasi / server	Adanya pengamanan khususpada application layer/ WebApplication Firewall	Perlu diterapkan Web Application Firewall berdasarkan standar tertentu	Penerapan Web Application Firewall dengan standar OWASP
14	Sosialisasi keamanan SPBEmasih minim	Sosialisasi dan pelatihan keamanan informasi pada instansi pusat dan pemerintah daerah	Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan keamanan informasi di IPPD	Pelatihan dan soisalisasi kesadaran keamanan informasi di IPPD
15	Belum adanya penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital	Setiap system mampu menggunakan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital	Perlu adanya penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital padasetiap aplikasi yang digunakan SPBE	Penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital pada setiap aplikasi diIPPD

`

`

D. PETA JALAN ARSITEKTUR KEAMANAN

Realisasi dari kondisi yang diinginkan serta daftar pekerjaan solusi direncanakan melalui tahapan peta jalan yang dapat memandu Kota Nganjuk menjadi lebih stabil dan matang dalam hal ini pada domain arsitektur keamanan seperti Gambar 7



Gambar 7 Roadmap Arsitektur Keamanan

Sesuai Peta Rencana SPBE, program terkait tata keamanan SPBE pada Peta Jalan ini terdiriatas:

1. Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2. Audit dan Uji Kelaikan
3. Penanganan Insiden
4. Kesadaran Keamanan Informasi
5. Optimalisasi Keamanan Siber dan Digital

`

Tabel 9 Peta Jalan Asitektur Keamanan Kab Nganjuk

No	Daftar Pekerjaan	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Sistem Manajemen Keamanan Informasi**					
	Penyusunan framework dan standar keamanan di sektor pemerintah pada Instansi Pusat maupun pemerintah daerah	√				
	Penyusunan dan Penerapan Pedoman Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Instansi Pusat dan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
	Penyusunan dan penerapan instrumen uji kelaikan secara mandiri untuk instansi pusat dan pemerin tah daerah	√	√	√	√	√
	Pemasangan honeypot pada instansi pusat dan pemerintah daerah		√	√	√	√
	Pengelolaan DMZ Nasional pada infrastruktur TIK Nasional		√	√	√	√
	Penyediaan layanan security as a services(SecaaSJ pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE		√	√	√	√
2	**Audit dan Uji Kelaikan**					
	Uji kelaikan keamanan aplikasi umum	√	√	√	√	√
	Uji kelaikan keamanan infrastruktur	√	√	√	√	√
	Uji kelaikan keamanan system penghubung lavanan	√	√	√	√	√
	Uji kelaikan keamanan Jaringan intra pemerintah	√	√	√	√	√
	Pengujian aplikasi/ system dengan pentester atau audit khusus keamanan	√	√	√	√	√
3	**Penanganan Insiden**					
	Pembentukan CSIRT pada instansi pusat dan	√	√	√	√	√

`

	pemerintah daerah					
	Penerapan Web Application Firewall dengan standar OWASP		√	√	√	√
4	**Security Awareness / Penerapan Budaya Keamanan Informasi**					

`

	Pelatihan dan sosialisasi kesadaran keamanan informasi di IPPD	√	√	√	√	√
5	**Optimasi Keamanan Digital**					
	Penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital pada setiap aplikasi di IPPD	√	√	√	√	√

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/204/K/411.013/2023
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024.

KEDUA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; dan
b. disusun sebagai dokumen panduan dalam perumusan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR



PETA RENCANA SPBE

KABUPATEN NGANJUK



Kata Pengantar

Buku peta rencana ini adalah sebagai bagian dari keseluruhan dokumen Arsitektur SPBE yang terdiri dari buku : Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur dan Arsitektur Keamanan Informasi. Dokumen ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Buku ini terdiri dari 7 pokok pembahasan yaitu : Referensi Arsitektur, Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Arsitektur Layanan,Domain Asrsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur. Tiada gading yang tak retak, semoga buku yang belum sempurna ini dapat menjadi referensi dalam melengkapi dokumentasi SPBE untuk pencapaian kinerja pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.

Nganjuk, 10 Mei 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 6
BAB 1 PENDAHULUAN 7
A. Visi 8
B. Misi 8
C. Maksud dan Tujuan 9
D. Landasan Hukum 10
E. Metodologi Penyusunan 12
BAB 2 TATA KELOLA SPBE 13
A. Latar Belakang 13
C. Metodologi Penyusunan Tata Kelola 16
D. Model Tata Kelola Sumber Daya TIK 26
E. Struktur Tata Kelola dan Peran GCIO Kabupaten Nganjuk 28
F. Struktur Komite TIK Kabupaten Nganjuk 29
BAB 3 MANAJEMEN SPBE 123
BAB 4 LAYANAN SPBE 148
BAB 5 INFRASTUKTUR SPBE 292
BAB 6 APLIKASI SPBE 304
BAB 7 KEAMANAN SPBE 325
BAB 8 AUDIT TIK 330

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Nganjuk
Gambar 2.1 Tata Kelola (COBIT)
Gambar 2.2 COBIT 5.0 Enabler
Gambar 2.3. Fase pada framework TOGAF 9.1.
Gambar 2.4 Model Tata Kelola Sumber Daya TIK
Gambar 2.5
Gambar 2.6
Gambar 2.7 Tahapan proses penyusunan perencanaan induk TIK
Gambar 2.8 Metodologi Penyusunan Roadmap TIK Kabupaten Nganjuk
Gambar 2.9 Arsitektur Pengembangan SPBE
Gambar 2.10 Arsitektur Pengelolaan SPBE
Gambar 2.11 Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan
Gambar 2.12 Topologi Jaringan NOC dan Data Center
Gambar 2.13 Kebutuhan Perangkat Lunak
Gambar 2.14 Daftar nama aplikasi
Gambar 2.15 Daftar jenis Perangkat keras
Gambar 2.16 Layout command center
Gambar 2.17 Tahapan Pembangunan Aplikasi dengan SDLC
Gambar 2.18 Tahapan SDLC-Waterfall
Gambar 3.1 Manajemen Risiko SPBE (sumber: paparan kemenpan-rb)
Gambar 3.2 Pedoman Struktur Manajemen Risiko SPBE Daerah (sumber: paparan Kemenpan- RB)
Gambar 3.3 Struktur Manajemen Risiko SPBE Kab. Nganjuk
Gambar 3.4 Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya menajemen SPBE
Gambar 3.5 Manajemen Data
Gambar 3.6 Forum Satu Data
Gambar 3.6 Manajemen Aset TIK
Gambar 3.7 Manajemen Keamanan Informasi
Gambar 3.8 Keamanan SPBE
Gambar 3.9 Manajemen Layanan
Gambar 3.10 Lingkup Audit TIK (sumber: Paparan Kemenpan-RB)
Gambar 3.11 Manajemen SDM
Gambar 3.12 Struktur Organsisasi Satuan Kerja Pengelola TIK
Gambar 3.13 Manajemen Perubahan
Gambar 3.14 Manajemen Pengetahuan
Gambar 3.15 Siklus Manajemen Pengetahuan
Gambar 4.1 Klasifikasi Layanan Kabupaten Nganjuk
Gambar 5.1 Arsitektur infrastruktur tingkat nasional
Gambar 5.2 Arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten Nganjuk
Gambar 5.3 Topologi Jaringan Komputer Kabupaten Nganjuk
Gambar 5.4 Arsitektur di Kabupaten Nganjuk
Gambar 6.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (Perpres 132 Tahun 2022)

Gambar 6.2 Ilustrasi Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (Perpres 132 Tahun 2022)
Gambar 7.1 Roadmap Arsitektur Keamanan
Gambar 8.1 Domain Audit Keamanan SPBE
Gambar 8.2 Ruang Lingkup Audit Keamanan SPBE Kabupaten Nganjuk
Gambar 8.3 Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Gambar 8.4 Topologi Jaringan SPBE Kabupaten Nganjuk

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE
Tabel 2. Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE
Tabel 3. Klasifikasi jenis data dan informasi
Tabel 4. Sistem Operasi tiap OPD
Tabel 5. Sistem Operasi lainnya
Tabel 6. Luas Area Terkena Sinyal Antena Di Wilayah Kabupaten Nganjuk
Tabel 7. Penyedia Jaringan
Tabel 8. Persepsi Kualitas Internet di OPD
Tabel 9. GAP eksisting dan ideal Bendwidt di OPD
Tabel 10. Jumlah Penggunaan Teknologi LAN di seluruh OPD
Tabel 11. Teknologi dan Jumlah koneksi antar OPD
Tabel 12.Koneksi Antar Instansi
Tabel 13. Kondisi Eksisting Perangkat Keras
Tabel 14. Pedoman dan Standar Infrastruktur jaringan
Tabel 15. Roadmap Pelaksanaan Program Pembangunan SPBE
Tabel 16. Lingkup Manajemen SPBE
Tabel 17. Tabel Perencanaan Fungsionalitas dan kinerja pusat data
Tabel 18. Tabel Perencaan Fungsionalitas dan kinerja jaringan intra pemerintah
Tabel 19. Tabel Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
Tabel 20. Metadata Layanan Kabupaten Nganjuk
Tabel 21. Pemetaan Aplikasi Umum Eksisting di Kabupaten Nganjuk
Tabel 22. Pemetaan Aplikasi Khusus Eksisting di Kabupaten Nganjuk
Tabel 23. Roadmap Kabupaten Nganjuk
Tabel 24. Daftar Semua Regulasi Keamanan Kab. Nganjuk
Tabel 25. Standar Keamanan Kabupaten Nganjuk
Tabel 26. Audit dan Keamanan Aplikasi
Tabel 27. Peta Jalan Arsitektur Keamanan Kab. Nganjuk
Tabel 28. Hasil Temuan dan Rekomendasi Audit Aplikasi SEDUDO
Tabel 29. Hasil temuan dan rekomendasi Audit Aplikasi SIPENTOL
Tabel 30. Hasil temuan dan rekomendasi Audit Aplikasi SI-PRESTASI
Tabel 31. Uji Penetration Test

BAB 1 PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Perpres No 95 Tahun 2018). Komponen-komponen yang terdapat Perpres No 95 Tahun 2018 menjadi bagian penting dalam pelaksanaan dan evaluasi penerapan SPBE di pemerintahan.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur secara administratif kabupaten Nganjuk terbagi atas 20 kecamatan, 264 desa dan 20 kelurahan dengan luas wilayah 1.224,33 Km2, dengan luas sebesar ini teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi menjadi sebuah keharusan agar pelayanan publik dapat tersampaikan dengan maksimal. Kabupaten Nganjuk memiliki Visi pembangunan Kabupaten Nganjuk untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

"NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO"

Berdasarkan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publikyang dibangun dari pemerintah tingkat Desa yang berdampak kearah Penataan wilayah perkotaan. Sesuai dengan focus pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mampumeberikan dampak pada Peningkatan kesejahteraan dengan menekan angka kemiskinan, kemudahan birokrasi dengan mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan untukpeningkatan investasi dan perekonomian. Sehingga diharapkan melalui implementasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Nganjuk mampu mewujudkan apa yang menjadi visi dan misinya.

Peta Rencana SPBE Daerah disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD maupun RPJP pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Pada tahap selanjutnya dikoordinasikan dan ditetapkan oleh pejabat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dearah. Peta Rencana juga disusun berdasarkan Renstra daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan RPJMD dengan jangka waktu per 5 tahun. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Review dilakukan bila terdapat kondisi yaitu Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional.

A. Visi

"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Terintegrasi, Efektif dan Efisien"

B. Misi

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan kuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelengggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas peayanan, mutu pendidikan dankesehatan untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.

5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Insfrastruktur publik yang mamadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Nganjuk adalah untuk memberikan fondasi, standarisasi, tahapan dan implementasi untuk pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang komprehensif, efektif, efisien dan terintegrasi**.** Sehingga peta recana ini dapat menjadi:

1. Kerangka Dasar dan pedoman Pemikiran serta referensi dalam pengambanga SPBE (SPBE Framework);
2. Solusi metode dan tahap pengembangan SPBE (roadmap SPBE);
3. Referensi dalam dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)
4. Referensi pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak pendukung layanan SPBE;
5. Acuan standar keselamatan SPBE
6. Pedoman Rencana Pelaksanaan Proyek 5 tahun (Rencana Pelaksanaan SPBE);
7. Arahan strategis pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Nganjuk agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta terintegrasi;
8. Dokumen Rencana Induk dan Arsitektur SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berfungsi sebagai Rencana Induk untuk pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Nganjuk.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

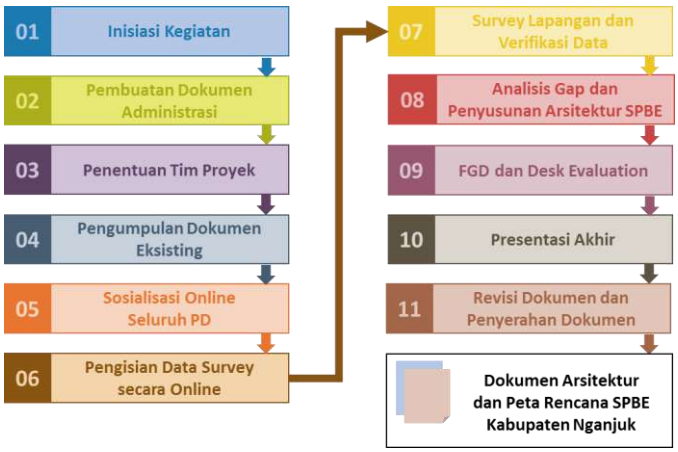
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4846).
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), khususnya pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
8. Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007).
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan SistemPemerintahan berbasis Elektronik.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018 - 2023.

Penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Nganjuk dilaksanakan dengan menerapkan metode:

a. Studi pustaka (literature review) untuk referensi metodologi, perangkat pengumpulan data, dan pengukuran, serta analisisnya;
b. Survey online dengan menggunakan aplikasi web dan survey lapangan;
c. observasi bukti pendukung (dokumen, peralatan, dan lain-lain);
d. Wawancara;
e. Focus Group Discussion dan Desk Evaluation untuk konfirmasi temuan dan rekomendasi akhir.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk dirumuskan berdasarkan pada metodologi ilmiah yang telah terbukti sebagai praktik terbaik (best practice) di dunia, yaitu:

1. Kerangka kerja (framework) TOGAF 9.1.
2. COBIT 5, khususnya untuk melakukan evaluasi kondisi eksisting.
3. ITIL 2011, khususnya untuk analisis struktur dan tupoksi unit TI.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya, berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2018 disebutkan bahwa peta rencana SPBE memuat komponen dibawah ini, yaitu:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE;
7. Audit TIK

E. Metodologi Penyusunan

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Daerah mengadopsi referensi dari (1). Ruang Lingkup Rencana Induk SPBE Daerah, (2). COBIT 5dan (3). TOGAF 9.1. Dalam kajian rencana induk ini telah mengkombinasikan ketiga framework tersebut dengan cara membuat analisis organisasi (Pemahaman menyeluruh terhadap misi pemerintahan daerah) yang kemudian dipetakan ke dalam framework COBIT5 dan TOGAF 9.1. Sehingga diperoleh Business Goal dan IT Goal yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, Dokumen peta rencana tersebut diharapkan dapat menjadi panduan dalam pengembangan layanan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk berbasis teknologi informasi.

BAB 2 TATA KELOLA SPBE

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 dan Peratutan Bupati Nganjuk Nomor 11 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) bahwa tata kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Selanjutnya bahwa Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Selanjutnya Sesuai Perpres No. 95 Tahun 2018 pada pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, danpengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu (Pasal. 1). Selanjutnya pada pasal 2disebutkan tujuan dari Tata Kelola SPBE untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur yang terdapat pada tata kelola sesuai ayat (1) sebagai berikut:

a. Rencana Induk SPBE;
b. Arsitektur SPBE;
c. Peta Rencana SPBE;
d. rencana dan anggaran SPBE;
e. Proses Bisnis;
f. data dan informasi;
g. Infrastruktur SPBE;
h. Aplikasi SPBE;
i. Keamanan SPBE; dan
j. Layanan SPBE.

Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasionalpengembangan SPBE, disebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk melaksanakan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional. Pelayanan yang dikenaldengan sebutan SPBE diharapkan mampu mendongkrak kualitas layanan Pemda kepada masyarakat karena dapat menghemat waktu layanan, percepatan proses, menyederhanakan birokrasi, serta adanya transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan merupakan prasyarat terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik.

Untuk memastikan SPBE baik yang akan dibangun maupun yang sudah ada benar- benar mendukung proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berjalan dengan baik maka diperlukan suatu kajian terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka membangun panduan yang dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyusun Rencana Induk SPBE Daerah. Harapan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan adanya kajian ini maka pengembangan SPBE dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

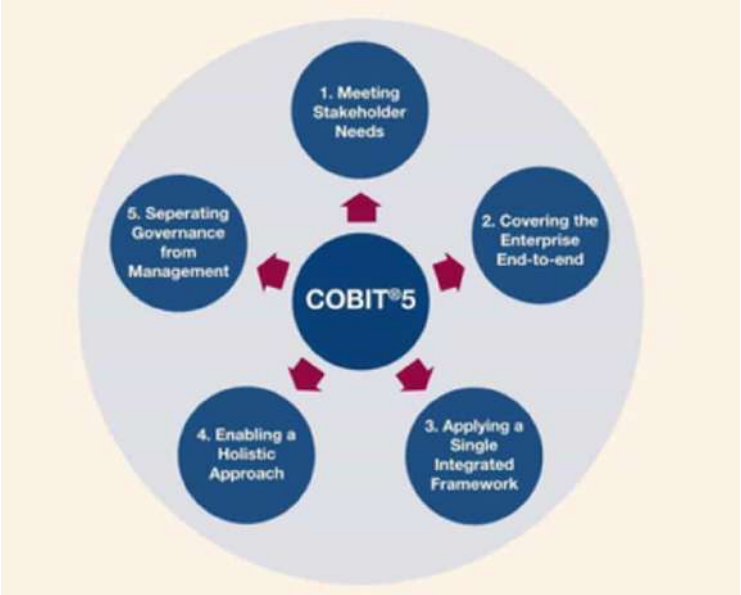
B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen tata kelola SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
2. Peraturan Presiden No.132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
5. PermenPANRB No.59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 18 Tahun 2022 Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023.

C. Metodologi Penyusunan Tata Kelola

1) COBIT 5 Framework untuk Tata Kelola TIK



Gambar 2.1 Tata Kelola (COBIT)

Penyusunan program kerja terkait teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan SPBE, bermula dari kondisi eksisting lingkungan, teknologi dan kebijakan pemangku kepentingan (stakeholder drivers) yang diturunkan menjadi analisis kebutuhan dari pemangku kepentingan pemerintah daerah (masyarakat, pemerintah pusat, kepala daerah dan seterusnya). Selanjutnya diturunkan menjadi tujuan organisasi (Enterprise Goals) pemerintah daerah. Tujuan organisasi harus dapat dipastikan tingkat pencapaiannya. Oleh karena itu perlu adanya keselarasan antara tujuan organisasi pemerintah daerah dengan tujuan teknologi informasi dan komunikasi (Enabler Goals) yangberperan menjadi pendukungnya agar implementasi TIK dapat tercapai.

Framework COBIT 5 memberikan landasan konseptual dalam mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Framework ini

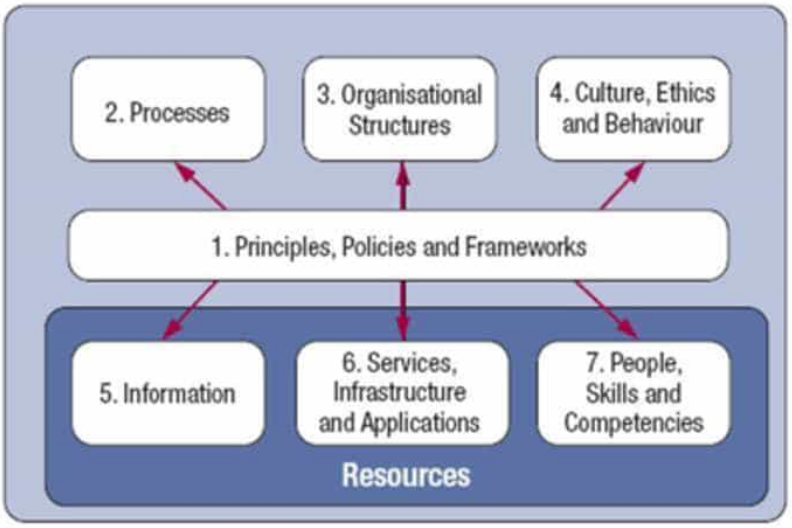
melibatkan serangkaian proses yang meliputi identifikasi, inventarisasi, dan penggalian kondisi yang ada dalam lingkungan, teknologi, dan kebijakan (Stakeholder drivers). Melalui proses ini, dilakukan analisis kebutuhan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut, penting untuk memastikan jaminan pencapaian dengan menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan teknologi informasi dan komunikasi (Enabler Goals). Tujuan ini berperan penting dalam memastikan pencapaian SPBE yang diinginkan. Gambar 3 memberikan gambaran tentang berbagai proses yang terdapat dalam framework ini, yang membantu memahami hubungan antara tujuan organisasi, tujuan teknologi informasi, dan komunikasi. Prinsip-prinsip utama COBIT 5.0 adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (Meeting Stakeholder Needs): COBIT 5.0 menggarisbawahi pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi informasi. Ini melibatkan pengenalan, pemahaman, dan respons terhadap kebutuhan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pendekatan holistik (Mencakup Seluruh Organisasi Secara Menyeluruh): COBIT 5.0 melihat teknologi informasi sebagai bagian integral dari seluruh organisasi. Prinsip ini mendorong pendekatan holistik yang mencakup siklus hidup teknologi informasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, akuisisi, implementasi, operasi, pemeliharaan, hingga penghapusan.
3. Penggunaan kerangka kerja terintegrasi tunggal (Single Integrated Framework): COBIT 5.0 menyediakan kerangka kerja terintegrasi tunggal yang menggabungkan berbagai standar, metode, dan praktik terkait pengelolaan teknologi informasi. Prinsip ini memudahkan organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang terpadu dan konsisten dalam pengelolaan teknologi informasi.
4. Pembedaan antara tata kelola dan manajemen (Distinguishing Governance from Management): COBIT 5.0 membedakan antara tata

kelola (governance) dan manajemen (management) dalam pengelolaan teknologi informasi. Prinsip ini menekankan bahwa tata kelola bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kebijakan, tujuan, dan arahan, sementara manajemen bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

5. Disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (Tailored to Enterprise Needs): COBIT 5.0 mengakui bahwa setiap organisasi memiliki kebutuhan unik dalam pengelolaan teknologi informasi. Prinsip ini mendorong adaptasi dan penyesuaian COBIT sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus dari masing-masing perusahaan.

Prinsip-prinsip ini menjadi panduan yang penting dalam menerapkan COBIT 5.0 dalam pengelolaan teknologi informasi di suatu organisasi (Gambar 3.2).



Gambar 2.2 COBIT 5.0 Enabler

1. Prinsip, kebijakan, dan framework merujuk pada mekanisme komunikasi yang ditetapkan untuk mengkomunikasikan arah dan instruksi dari badan pengawas dan manajemen.
2. Model referensi proses COBIT 5 membagi praktik dan aktivitas terkait TI dalam perusahaan menjadi dua area utama, yaitu tata kelola dan

manajemen, dengan manajemen lebih lanjut dibagi menjadi domain proses.

3. Setiap organisasi membutuhkan struktur yang tepat untuk menjadi efektif. Struktur organisasi yang matang memiliki prinsip operasional yang jelas yang menetapkan cara kerja sehari-hari. Memiliki struktur yang tepat berarti semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tugas dan hasil yang penting. Setiap orang, tanpa memandang peran mereka, perlu mengetahui tugas seperti frekuensi pertemuan atau persyaratan pelaporan. Struktur organisasi juga akan mendokumentasikan batasan pengendalian dan prosedur eskalasi - memberikan pedoman tentang berapa banyak laporan langsung yang seharusnya dimiliki oleh suatu peran dan bagaimana hal-hal harus ditingkatkan jika diperlukan.
4. Budaya, etika, dan perilaku yang tepat dapat mendorong standar dan kinerja yang tinggi. Memastikan bahwa hal-hal ini tepat adalah kunci untuk bekerja secara efektif, misalnya menetapkan standar kualitas atau tingkat toleransi risiko. Misalnya, organisasi yang sangat diatur seperti perusahaan hukum, keuangan, atau farmasi akan beroperasi dan mematuhi tingkat legislasi yang sangat tinggi sehingga memiliki toleransi risiko yang sangat terbatas. Sementara jenis organisasi lain, seperti perusahaan teknologi startup, mungkin dapat mentoleransi tingkat risiko yang lebih tinggi.
5. Perilaku "tepat" yang diharapkan perlu dikomunikasikan pada berbagai tingkat. Namun, tidak ada pendekatan yang cocok untuk semua, jadi perhatikan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa saluran yang mungkin digunakan adalah melalui pelatihan induksi.

2) TOGAF 9.1 Framework untuk Arsitektur Data, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan TIK

Penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi mengadopsi dari konsep Arsitektur Pengembangan IT (Architecture Development Method) yang ada dalam framework TOGAF 9.1 konsep ini mendefinisikan arsitektur dimulai dengan mendefinisikan visi arsitektur dilanjutkan dengan menentukan arsitektur bisnis, arsitektur sistem dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur TIK). Visi arsitektur yang dibangun harus mampu memenuhi tujuan dari perkembangan teknologi/kebijakan yang ingin diadopsi oleh pemerintah daerah di masa mendatang dan mempertimbangkan evaluasi atas arsitektur TIK yang telah dibangun sebelumnya.

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) merupakan sebuah Framework yang digunakan untuk mengembangkan sistem secara open source. Framework ini merupakan kumpulan pengetahuan yang terdokumentasi dengan baik, meliputi metode-metode yang terperinci serta berbagai alat pendukung dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Versi terbaru dari TOGAF adalah TOGAF 9.2. TOGAF dikembangkan oleh The Open Group melalui tim yang disebut Architecture Forum. Pengembangan awal dari TOGAF versi 1 dimulai pada tahun 1995, dan versi-versi selanjutnya mengembangkan serta meningkatkan sistem pengetahuan ini. Proses pengembangan arsitektur dalam suatu perusahaan merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan proses pengambilan keputusan. TOGAF membantu dalam mendokumentasikan spesifikasi, proses, dan produk kerja dalam arsitektur perusahaan. Dengan menggunakan TOGAF, organisasi dapat mengembangkan arsitektur perusahaan yang konsisten, sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, mengadopsi praktik terbaik, serta mempertimbangkan dengan tepat kebutuhan saat ini dan kebutuhan bisnis yang diantisipasi di masa depan.

Arsitektur sistem dan teknologi informasi harus secara erat

mencerminkan tujuan bisnis organisasi. Bahkan, penggunaan teknik khusus seperti skenario bisnis diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap tujuan bisnis oleh arsitek TI, dan tercermin dalam arsitektur TI yang dikembangkan menggunakan TOGAF. Berikut ini adalah alasan mengapa kita seharusnya mengadopsi TOGAF untuk pengembangan arsitektur:

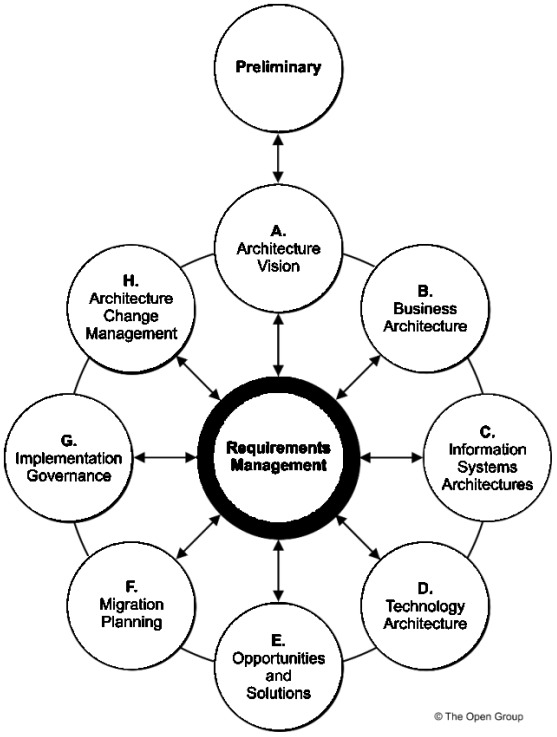
1. Metode umum yang komprehensif
2. Bersifat pelengkap, bukan bersaing, dengan kerangka kerja lain
3. Telah banyak diadopsi di pasar
4. Dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan industri
5. Tersedia dengan lisensi perpetual gratis
6. Netral terhadap vendor, alat, dan teknologi, serta merupakan standar terbuka
7. Menghindari duplikasi yang tidak perlu
8. Menghubungkan antara bisnis dan TI
9. Berdasarkan praktik terbaik
10. Memungkinkan partisipasi dalam evolusi kerangka kerja.

Metode Pengembangan Arsitektur (ADM) TOGAF digunakan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan yang memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi informasi organisasi. ADM TOGAF merupakan hasil kontribusi berkelanjutan dari sejumlah praktisi arsitektur yang besar dan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan metode untuk mengembangkan dan mengelola siklus hidup arsitektur perusahaan, serta menjadi inti dari TOGAF.
2. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan digunakan untuk mengelola pelaksanaan aktivitas perencanaan arsitektur.
3. Metode pengembangan arsitektur, yang sering disebut ADM, adalah proses terperinci langkah demi langkah yang digunakan untuk mengembangkan atau mengubah arsitektur perusahaan.
4. ADM menggambarkan 10 fase yang mencakup siklus pengembangan arsitektur.

Berikut adalah fase-fase tersebut:

1. Tahap Pendahuluan
2. Fase A: Visi Arsitektur
3. Fase B: Arsitektur Bisnis
4. Fase C: Arsitektur Sistem Informasi
5. Fase D: Arsitektur Teknis
6. Fase E: Peluang dan Solusi
7. Fase F: Perencanaan Migrasi
8. Tahap G: Implementasi Tata Kelola
9. Fase H: Manajemen Perubahan Arsitektur
10. Manajemen Persyaratan



Gambar 2.3. Fase pada framework TOGAF 9.1.

https://www.opengroup.org/togaf

TOGAF terdiri dari beberapa tahap yang mengarahkan pengembangan dan pengelolaan arsitektur perusahaan. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Tahap Awal: Tahap ini melibatkan persiapan organisasi untuk pengembangan arsitektur dengan membentuk kerangka kerja, sumber daya yang diperlukan, dan memahami konteks bisnis.

2. Tahap A: Visi Arsitektur: Pada tahap ini, dibuat visi arsitektur tingkat tinggi yang mendefinisikan tujuan bisnis, objektif, dan kekhawatiran pemangku kepentingan utama.
3. Tahap B: Arsitektur Bisnis: Fokus tahap ini adalah memahami fungsi bisnis, proses, dan struktur organisasi perusahaan. Ini melibatkan definisi komponen arsitektur bisnis dan hubungan di antara mereka.
4. Tahap C: Arsitektur Sistem Informasi: Tahap ini berhubungan dengan pengembangan arsitektur sistem informasi, termasuk definisi arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi.
5. Tahap D: Arsitektur Teknologi: Tahap ini melibatkan pengembangan arsitektur teknologi, yang mencakup pemilihan platform teknologi, infrastruktur, dan alat yang mendukung sistem informasi.
6. Tahap E: Peluang dan Solusi: Tahap ini berfokus pada mengidentifikasi dan menganalisis solusi potensial untuk memenuhi persyaratan bisnis dan teknologi. Ini melibatkan evaluasi solusi alternatif dan perencanaan implementasi.
7. Tahap F: Perencanaan Migrasi: Pada tahap ini, dibuat rencana detail untuk memandu implementasi dan migrasi dari arsitektur saat ini ke arsitektur target. Ini termasuk definisi arsitektur transisi dan identifikasi tonggak penting.
8. Tahap G: Implementasi Tata Kelola: Fokus tahap ini adalah memastikan implementasi arsitektur yang berhasil dengan membentuk struktur tata kelola, memantau kemajuan, dan mengelola risiko dan masalah.
9. Tahap H: Manajemen Perubahan Arsitektur: Tahap ini berhubungan dengan mengelola perubahan pada arsitektur seiring waktu, termasuk mengevaluasi dampak perubahan, membuat penyesuaian yang diperlukan, dan memastikan kesesuaian berkelanjutan dengan tujuan bisnis.
10. Manajemen Persyaratan: Sepanjang seluruh proses pengembangan arsitektur, persyaratan dikelola dan disempurnakan untuk memastikan bahwa mereka diperhatikan dengan baik dalam arsitektur.

11. Tahap-tahap ini memberikan pendekatan sistematis untuk pengembangan, implementasi, dan pengelolaan arsitektur perusahaan menggunakan TOGAF.

Berdasarkan penilaian tingkat kematangan penerapan SPBE dalam suatu lemba, maka disesuaikan dengan indikator yang terdapat pada atutran Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun tingakat kematangan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE

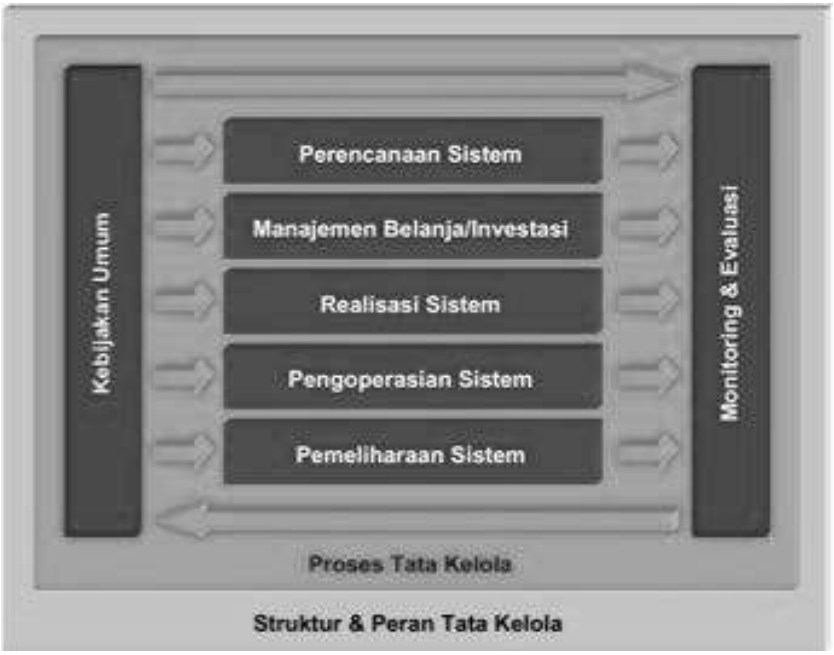
Tingkat	Tingkat Kematangan	Kondisi
1	Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2	Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral
3	Terstandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4	Terintegrasi	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5	Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Tabel 2. Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat	Tingkat Kematangan	Kondisi
1	Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah
2	Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah
3	Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4	Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain
5	Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal

D. Model Tata Kelola Sumber Daya TIK

Model Tata Kelola Sumber Daya TIK Nasional difokuskan pada pengelolaan proses-proses TIK melalui mekanime pengarahan dan monitoring & evaluasi. Model keseluruhan Tata Kelola Sumber Daya TIK Nasional adalah sebagai berikut :



Gambar 2.4 Model Tata Kelola Sumber Daya TIK

Model Tata Kelola TIK dapat dibagi dalam dua bagian utama :

1) Struktur & Peran Tata Kelola – yaitu entitas apa saja yang berperan dalam pengelolaan proses-proses TIK dan bagaimana pemetaan perannya dalam pengelolaan proses-proses TIK tersebut. Struktur dan peran tata kelola ini mendasari seluruh proses tata kelola TIK.
2) Proses Tata Kelola – yaitu proses-proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan utama tata kelola dapat tercapai, terkait dengan pencapaian tujuan Kabupaten Nganjuk, pengelolaan sumber daya, dan manajemen risiko.

a. Lingkup Proses Tata Kelola

- Perencanaan Sistem, Proses ini menangani identifikasi kebutuhan organisasi dan formulasi inisiatif-inisiatif TIK apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi tersebut.
- Manajemen Belanja/Investasi, Proses ini menangani pengelolaan investasi/belanja TIK
- Realisasi Sistem, Proses ini menangani pemilihan, penetapan, pengembangan/akuisisi sistem TIK, serta manajemen proyek TIK
- Pengoperasian Sistem, Proses ini menangani operasi TIK yang memberikan jaminan tingkat layanan dan keamanan sistem TIK yang dioperasikan.
- Pemeliharaan Sistem, Proses ini menangani pemeliharaan aset-aset TIK untuk mendukung pengoperasian sistem yang optimal.

b. Mekanisme Proses Tata Kelola

- Kebijakan Umum, Kebijakan umum ditetapkan untuk memberikan tujuan dan batasan-batasan atas proses TIK tentang bagaimana sebuah proses TIK dilakukan untuk memenuhi kebijakan yang ditetapkan.
- Monitoring & Evaluasi – Monitoring & evaluasi ditetapkan untuk memastikan adanyaumpan balik atas pengelolaan TIK, yaitu berupa ketercapaian kinerja yang diharapkan. Untuk mendapatkan deskripsi kinerja setiap proses TIK digunakan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan inilah yang dapat digunakan oleh manajemen atau auditor, untuk mengetahui apakah proses TIK telah dilakukan dengan baik.

E. Struktur Tata Kelola dan Peran GCIO Kabupaten Nganjuk

Penetapan entitas struktur tata kelola ini dimaksudkan untuk memastikan kapasitas kepemimpinan yang memadai dan hubungan kerja antar OPD yang sinergis dalam perencanaan, pengganggaran, realisasi Sistem TIK, Operasi sistem TIK, dan evaluasi umum implementasi TIK di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pembentukan CIO dan Komite TIK di Kabupaten Nganjuk mutlak dan prioritas disamping entitas struktur tata kelola TIK yang sudah ada sebelumnya dalam hal ini Bidang Teknologi Informasi dibawah Dinas KOMINFO. Komite TIK ini terdiri dari :

a. Eksekutif Pemerintah, yaitu pimpinan Kabupaten Nganjuk.

b. Satuan kerja Pengelola TIK, yaitu satuan kerja yang bertugas dalam pengelolaan TIKkabupaten dalam hal ini KOMINFO.

c. Satuan pemilik Proses kerja, yaitu seluruh satuan kerja diluar satuan kerja pengelolaTIK (KOMINFO).

Struktur tata kelola yang sangat prinsipal adalah yang terkait kepemimpinan dan hubungansinergis antar satuan kerja dalam lingkup internal maupun lingkup eksternal (antar OPD). Dua ketentuan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

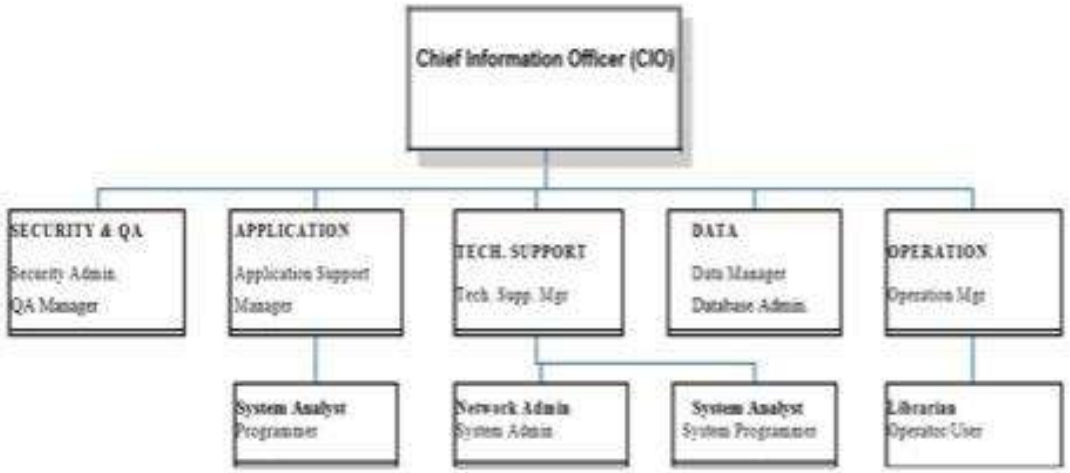
1. Ketentuan struktur tata kelola terkait dengan kepemimpinan :
    a. Untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK di semua level pemerintahan maka Kabupaten Nganjuk harus menetapkan CIO yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional harian dan evaluasi internal TIK di Kabupaten Nganjuk, bekerja sama dengan satuan kerja pengelola TIK dan satuan kerja pengguna lainnya.
    b. Puncak dari struktur tata kelola terkait dengan kepemimpinan ini adalah keberadaan CIO Nasional yang bertugas mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasionalharian dan evaluasi TIK khususnya terkait

flagship nasional TIK prioritas.

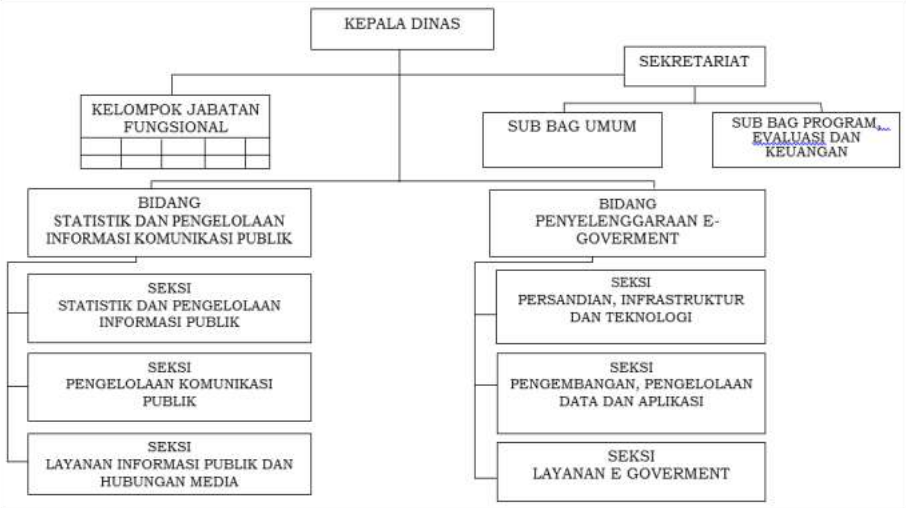
2. Ketentuan struktur tata kelola terkait dengan hubungan sinergis antar satuan kerjadalam satu satuan kerja atau hubungan sinergis antar satuan kerja.
   a. Untuk memastikan hubungan sinergis antar satuan kerja Kabupaten Nganjuk dalam pengelolaan inisiatif TIK, maka Kabupaten Nganjuk harus membentuk Komite TIK yang mewadahi kepentingan satuan kerja TIK dansatuan kerja pengguna TIK, mengkoordinasikan perencanaan, operasionalinisiatif TIK strategis.
   b. Puncak dari hierarki struktur tata kelola terkait dengan hubungan sinergis antar institusi pemerintah ini adalah keberadaan Dewan TIK Nasional yang bertugas memastikan implementasi TIK yang tepat dan berkelanjutan secara nasional, dan secara khusus juga mengkoordinasikan hubungan antar institusi pemerintah untuk memastikan terlaksananya flagship TIK nasional.

F. Struktur Komite TIK Kabupaten Nganjuk

Bupati Nganjuk sebagai Ketua Tim Pengarah didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bappeda sebagai Wakil-nya, Kepala KOMINFO sebagai Ketua Harian, dan beranggotakan seluruh kepala satuan kerja Perangkat Daerah lainnya dan Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, Komite TIK membentuk Tim Pelaksana yang diketuai oleh SekretarisDaerah dan beranggotakan para CIO OPD (Dinas/Badan/Biro/Kantor). Sekretaris Daerah sebagai GCIO Kabupaten tugas pokoknya adalah memberikan rekomendasi tentang kebijakan pengembangan TIK yang efektif dan efisien di Kabupaten Nganjuk.



Gambar 2.5



Gambar 2.6

Dalam model tata kelola TIK seperti pada gambar 8 maka dijelaskan fungsi setiap strukturpada Komite TIK sebagai berikut :

a. Eksekutif pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai Tim pengarah, yang mempunyai peran pada proses kebijakan, dibantu oleh Sekretaris Daerah
b. GCIO Kabupaten diusulkan Sekretaris Daerah
c. GCIO Inspektorat mempunyai fungsi/peran utama pada proses Monitoring dan evaluasi, yaitu :
    a) Memantau Keseluruhan Proses
    b) Mengkaji Ketersediaan Kontrol Internal dan Menyediakan PenjaminIndependen
    c) Mempersiapkan Tim Audit Independen
d. GCIO Bappeda bersama GCIO BKD mempunyai fungsi/peran utama pada prosesperencanaan dan organisasi SDM, yaitu :
    a) Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi
    b) Mendefinisikan Arsitektur Informasi Kabupaten Nganjuk
    c) Menentukan Arah Perkembangan Teknologi
    d) Merancang Struktur Organisasi Teknologi Informasi
    e) Mempertimbangkan Investasi Teknologi Informasi
    f) Mengkomunikasikan Arah dan Sasaran Manajemen
    g) Mengembangkan Sumber Daya Manusia
    h) Menjamin Pemenuhan Standar Eksternal
    i) Mengkaji Resiko
    j) Mengelola Proyek Teknologi Informasi
    k) Memelihara Kualitas

e. GCIO Keuangan mempunyai fungsi/peran utama pada proses manajemen Belanjadan investasi serta implementasi, yaitu :

   a) Mengidentifikasikan Solusi bagi Pemerintah Kabupaten
   b) Mengadakan dan Memelihara Perangkat Lunak Aplikasi
   c) Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Teknologi
   d) Menyusun Prosedur Kerja dan Pemeliharaan
   e) Mengakreditasi Sistem
   f) Mengelola Perubahan

f. GCIO KOMINFO selaku OPD pengelola TIK mempunyai fungsi/peran terbesar padaproses realisasi, pengoperasian dan pemeliharaan Sistem secara keseluruhan, yaitu :

   a) Menentukan Standar Kepuasan
   b) Memonitor Keterlibatan Pihak Ketiga
   c) Menjaga Kinerja dan Kapasitas
   d) Menjamin Pelayanan yang Berkesinambungan
   e) Mengelola Sistem Keamanan
   f) Mengidentifikasikan dan Mengalokasikan Biaya
   g) Mendidik dan Melatih Pengguna
   h) Membantu Pelanggan Sistem
   i) Memantau Konfigurasi
   j) Mengatasi Keluhan dan Masalah
   k) Mengelola Data
   l) Mengelola Fasilitas

m) Mengelola Operasi

g. GCIO OPD mempunyai peran utama pada proses pengoperasian danpemeliharaan sistem di tingkat OPD.

1. RENCANA INDUK SPBE KABUPATEN NGANJUK

Maksud Penyusunan Rencana Induk SPBE adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan / pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Tujuan Penyusunan Rencana Induk SPBE adalah menyediakan dokumen Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Infrastruktur SPBE, Arsitektur Aplikasi SPBE, Arsitektur Keamanan SPBE, Arsitektur Layanan SPBE, serta Peta Rencana SPBE. Rencana Induk SPBE Kabupatebn Nganjuk dibangun atas dasar Visi dan Misi Kabupaten yang diturunkan kedalam Visi dan Misi SPBE Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Rencana induk TIK Kabupaten nganjuk tertuang dalam Roadmap TIK. Sehingga dalam pembangunannya bahwa Rencana Induk SPBE Kabupaten Nganjuk mengacu pada Roadmap TIK Kabupaten Nganjuk yang secara ringkas dapat dijelaskan dibawah ini.

a. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Nganjuk ini secaraumum adalah untuk memberikan arahan yang lebih nyata dan terukur serta realistis untuk dapat diselesaikan dari setiap kegiatan di Kabupaten Nganjuk yang menggunakan teknologi informasi. Selain itu penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Nganjuk ini dapat memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan implementasi bagi pengembangan SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang

komprehensif, efisien, efektif dan terpadu menuju Good Corporate Governance dan tetap berada dalam kerangka dan bagian dari penerapanTIK di lingkungan Kabupaten Nganjuk. Hasil yang diharapkan denganadanya dokumen Rencana Induk terkait SPBE Kabupaten Nganjuk ini adalah :

1. Terciptanya langkah-langkah yang sinergis dan sistematis dalam pengembangan TIKkhususnya pengembangan SPBE guna menjadi dasar penyusunan kegiatan dan penganggaran bidang TIK di Kabupaten Nganjuk yang selalu mengacu pada dokumen ini.
2. Terdefinisikannya sebuah rencana TIK stratejik yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengarahkan seluruh sumber daya TI sehingga sesuai dengan strategi bisnis serta prioritasnya.
3. Tersedianya acuan untuk melaksanakan aktivitas di bidang pengembangan dan penerapan TIK yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Nganjuk saat ini dan 3-5 tahun kedepan.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan pekerjaan penyusunan Rencana Induk SPBE Kabupaten Nganjuk adalahsebagai berikut :

1. Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka membuka akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang transparan.
2. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Terciptanya kegiatan penyelenggaran birokrasi dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif sehinggamenghasilkan sebuah layanan prima.
4. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, budgeting dan proses kerja kepemerintahan.

c. Sasaran

Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Tersusunnya review terhadap berbagai rencana dan kebijakan terkait SPBE ataupun teknologi informasi yang telah disusun.
2. Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait SPBE di Kabupaten Nganjuk danmerumuskan kebutuhannya.
3. Terumuskannya rencana pengembangan SPBE di Kabupaten Nganjuk meliputi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan, tahapan pengembangan, dan rencana implementasi.

1.1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rencana induk SPBE iniadalah beberapa peraturan yang terkait dengan SPBE diantaranya adalah :

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. PP No. 56 Th. 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan TransaksiElektronik.
7. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025
9. Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

10. Keppres No. 9 Th. 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
11. Keppres 20/2006 Pembentukan DETIKNAS (Dewan Teknologi Informasi danKomunikasi Nasional.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentangPengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003, tentang Strategi danKebijakan Nasional Pengembangan SPBE.
14. KepMendagri No. 45 Th. 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan SistemInformasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.
15. KepMenpan No. 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum PerkantoranElektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
16. Kepmen 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003, tentang Panduan Penyusunan RencanaIndukPengembangan SPBE Lembaga.
17. Blueprint Sistem Aplikasi SPBE, Depkominfo, 2004.
18. Kerangka kerja Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework).
19. SK Bupati Nganjuk No :188/411.012/2018 tentang Pembentukan Tim Fasilitasidan Percepatan Pelaksanaan SPBE Kabupaten Nganjuk.

1.2 RUANG LINGKUP DOKUMEN PERENCANAAN

a. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penyusunan Roadmap TIK ini adalah mencakup seluruh wilayahadministrasi Kabupaten Nganjuk.

b. Ruang Lingkup Substansi

Adapun ruang lingkup substansi dalam dokumen Rencana induk TIK meliputi:

a) Perencanaan Kebijakan dan Regulasi

b) Perencanaan Kelembagaan dan Organisasi (Sumber Daya Manusia)

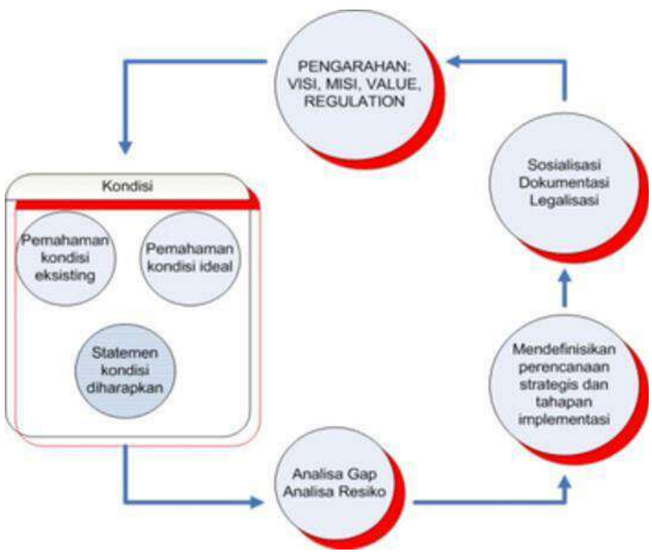
c) Perencanaan Data dan Aplikasi SIM

d) Perencanaan Infrastruktur Jaringan

e) Perencanaan keberlangsungan sistem

1.3 TAHAPAN PENYUSUNAN ROADMAP TIK

Untuk menyusun Dokumen Roadmap TIK Kabupaten Nganjuk diperlukan tahapan sebagaiberikut:



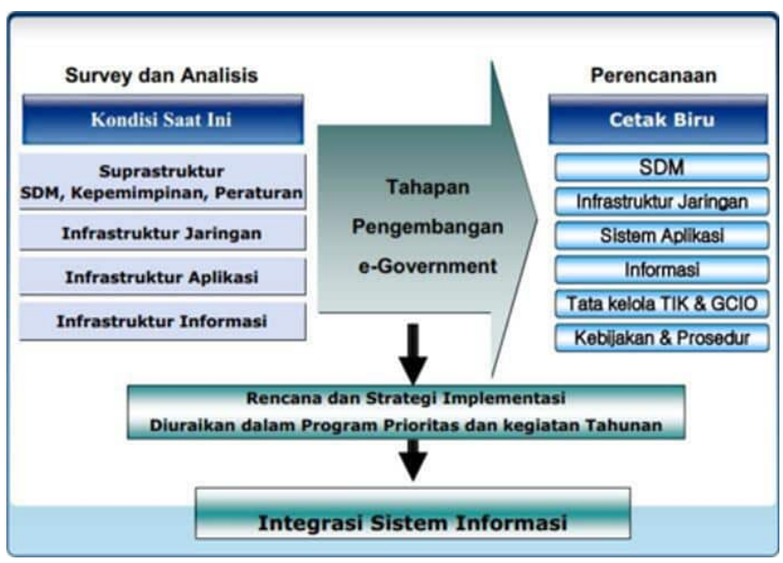
Gambar 2.7 Tahapan proses penyusunan perencanaan induk TIK

a) Mendapatkan pengarahan dari pimpinan daerah untuk memastikan peran TIK dalam mendukung pembangunan daerahnya.
b) Mendapatkan informasi mendalam dari SKPD pengelola TIK.

c) Studi literasi perkembangan terkini tentang regulasi SPBE dan perkembangan teknologi informasi terkini dan trend perkembangan lima tahun kedepan.
d) Pemahaman kondisi terkini dilaksanakan pengumpulan data melalui kegiatan survey dengan menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dan observasi lapangan.
e) Mendapatkan gambaran hambatan dan harapan dari pimpinan SKPD terkait pengembangan dan pemanfaatan TIK di satuan kerja yang dipimpinnya.
f) Melakukan kajian analisa resiko atas kondisi terkini dan analisa gap dari kondisi ideal yang diharapkan oleh pimpinan daerah.
g) Mendefinisikan langkah langkah strategis pencapaian tujuan.
h) Memperinci tahapan implementasi.
i) Melaksanakan sosialisasi dan menjaring umpan balik atas perencanaan yangtelah diusulkan.
j) Legalisasi dokumen.
k) Review berkala.

1.4 Metodologi Penyusunan Roadmap TIK

Mengingat pengembangan SPBE merupakan sebuah proses transformasi pelayanan publik dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-upaya sistematis yang menyangkut subyek, obyek dan metoda yang terkait dengan proses transformasi tersebut. Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, yaitu perundang-undangan di bidangteknologi informasi dan komunikasi, kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan yang bersumber pada tuntutan layanan publik dan kemajuan teknlogi informasi dan komunikasi. Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat seperti Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Metodologi Penyusunan Roadmap TIK Kabupaten Nganjuk

Metodologi penyusunan dan pengembangan roadmap TIK mengacu pada usulan cetak birupengembangan yaitu :

1. Cetak biru Sumber Daya Manusia
2. Cetak biru Infrastruktur Jaringan
3. Cetak biru Infrastruktur sistem Aplikasi
4. Cetak Biru Infrastruktur Informasi
5. Cetak Biru Tata Kelola TIK dan GCIO
6. Cetak Biru Kebijakan dan prosedur

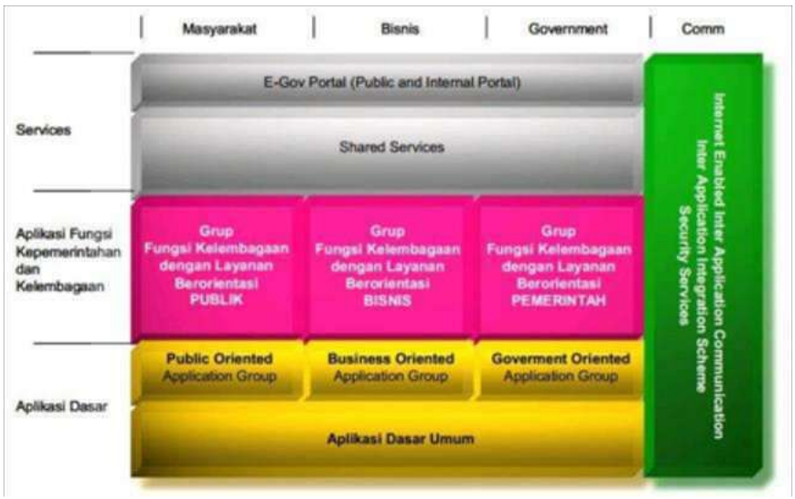
2. ARSITEKTUR SPBE

Saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memiliki peraturan atau pedoman yang mendasari dalam pengelolaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disebut dengan Arsitektur SPBE. Sehingga selanjutnya dalam Arsitektur SPBE Kabupaten Nganjuk memiliki dokumen yang meliputi:

1. Arsitektur Proses Bisnis,
2. Arsitektur Data dan Informasi,
3. Arsitektur Infrastruktur SPBE,
4. Arsitektur Aplikasi SPBE,
5. Arsitektur Keamanan SPBE,
6. Arsitektur Layanan SPBE, serta
7. Peta Rencana SPBE



Gambar 2.9 Arsitektur Pengembangan SPBE



Gambar 2.10 Arsitektur Pengelolaan SPBE

Di sisi lain, arsitektur diatas dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut di atas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, maka sistem tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen selanjutnya disebut sebagai Arsitektur Pengembangan SPBE dan Arsitektur Pengelolaan SPBE. Dalam Arsitektur Pengelolaan SPBE, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut :

a. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office)
b. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberika bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office).
c. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office. Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut :
d. Kelompok arsitektur sistem aplikasi E-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C : Government To Citizen)
    a) Kelompok arsitektur sistem aplikasi E-Government yang

orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B : Government To Business)

b) Kelompok arsitektur aplikasi E-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G : Government To Government).

e. Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah keamanan aplikasi, dan lain-lain

3. PETA RENCANA SPBE

4. RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

Rencana dan anggaran SPBE mengacu pada Program prioritas yang terdapat pada dokumen roadmap TIK Kabupaten Nganjuk.

4.1 PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan identifikasi permasalahan, strategi dan perencanaan program, diperlukan penetapan program prioritas sesuai dengan kesiapan sumberdaya dan kebutuhan kelembagaan yang tercermin dari analisis kondisi terkini. Secara garis besar terdapat 5 program prioritas yang akan diselesaikan yaitu:

1. Program regulasi dalam bentuk pengesahan kebijakan implementasi SPBE yang terintegrasi di seluruh OPD dan kecamatan, standarisasi pelayanan, monitoring danevaluasi pelayanan berbasis aplikasi SPBE.
2. Program pengembangan organisasi struktural dan fungsional di lingkungan OPD Kabupaten Nganjuk sesuai jenjang karirbidang TIK termasuk bagian dalam program ini.
3. Program pengembangan sumberdaya manusia, didalam program ini mencakup rekrutmen staff baru, pembinaan sampai pengusulan pengangkatan menjadi PNS, pengiriman staff mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi pemrograman, jaringan komputer dan kemananan infornasi, pemetaan kompetensi SDM dalam pengelolaan sumberdaya infrastruktur dan sistem informasi.
4. Program peningkatan infrastruktur teknologi informasi, di dalam program ini mencakup pengadaan barang dan jasa untuk pengembangan LAN, perangkat komputer dan server, website OPD dan kecamatan, serta infrastruktur command center.
5. Program pembuatan aplikasi dan sistem informasi, di dalam program

ini mencakup pembuatan aplikasi terintegrasi G2G, G2B dan G2C SPBE yang diklasifikasikan

4.2 RENCANA ANGGARAN SPBE

Penyusunan program serta anggaran yang berkaitan denga TIK. Klasifikasi sistem G2G, G2B dan G2C SPBE mencakup :

1) Kelompok sistem aplikasi SPBE yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen).
2) Kelompok sistem aplikasi SPBE yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business).
3) Kelompok sistem aplikasi SPBE yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government).

Tahapan implementasi SPBE yang mencakup :

1. Dimensi Kebijakan meliputi : pengembangan organisasi struktural dan fungsional serta regulasi E- Government, diseminasi struktural dan fungsional serta regulasi SPBE, persiapan penyusunan SPBE jangka panjang 10 tahun dan penyusunan & Pengesahan SPBE jangka panjang 10 tahun. Keseluruhan kegiatan membutuhkan waktu selama 5 tahun.
2. Dimensi sumberdaya manusia, meliputi : seleksi dan rekrutmen staff dengan latar belakang pendidikan TIK, pengiriman SDM TI Dinas Kominfo untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang TIK, penyelenggraan pelatihan pemeliharaan jaringan bagi SDM TI di OPD dan kecamatan, pemetaan kompetensi sistem informasi bagi SDM TI di OPD dan kecamatan. Keseluruhan kegiatan membutuhkan waktu selama 5 tahun.
3. Dimensi Infrastruktur Teknologi Informasi meliputi : pengadaan infrastruktur LAN komputer desktop dan laptop, pengadaan website untuk seluruh OPD dan kecamatan, pengadaan infrastruktur Command Center, menyusun kebijakan, standar dan SOP infrastruktur jaringan komputer, keamanan informasi, manajemen jaringan. Keseluruhan kegiatan membutuhkan waktu selama 5 tahun.
4. Dimensi Aplikasi dan Sistem Informasi, meliputi : pembuatan aplikasi Government Data Center (GDC), diseminasi penggunaan aplikasi Government Data Center (GDC), pembuatan aplikasi Strategis di OPD dan sinkronisasi Roadmap TIK dan Rencara Strategis di kecamatan. Keseluruhan kegiatan membutuhkan waktu selama 2 tahun.
5. Dimensi Sumber daya manusia, meliputi : Seleksi karyawan yang

berlatang belakang TIK, Pengiriman SDM TI Dinas Kominfo untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang TIK

5. PROSES BISNIS

Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada masyarakat. Arsitektur Proses Bisnis digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenisdari sebuah proses bisnis yang dilakukan dalam penyelenggaraan layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, Arsitektur harus mencakup informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Arsitektur Proses Bisnis juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada baik dari pusat maupun internal daerah.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing – masing. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam rangka penyusunan proses bisnis semuaproses terkait harus terintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan proses yang berkesinambungan. Pedoman teknis penyusunan proses bisnis menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, setiap proses dikategorikan menjadi level 0 dan level 1. Proses Level 0 adalah semua proses bisnis yang memuatproses bisnis utama, proses bisnis manajerial, dan proses bisnis pendukung. Dalam penyusunannya mengacu pada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsiorganisasi, serta dokumen pendukung lainnya. Proses level 1 adalah penjabaran lebih rinci dari level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungannya antara satu proses dengan proses lainnya. Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis lebih jelasnya akan dibahas pada tahapan berikut.

5.1 Identifikasi Hasil Kesenjangan

Analisis hasil kesenjangan didapatkan dari perbedaan kondisi eksisting dengan kondisi yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis.

5.2 Persiapan dan Perencanaan

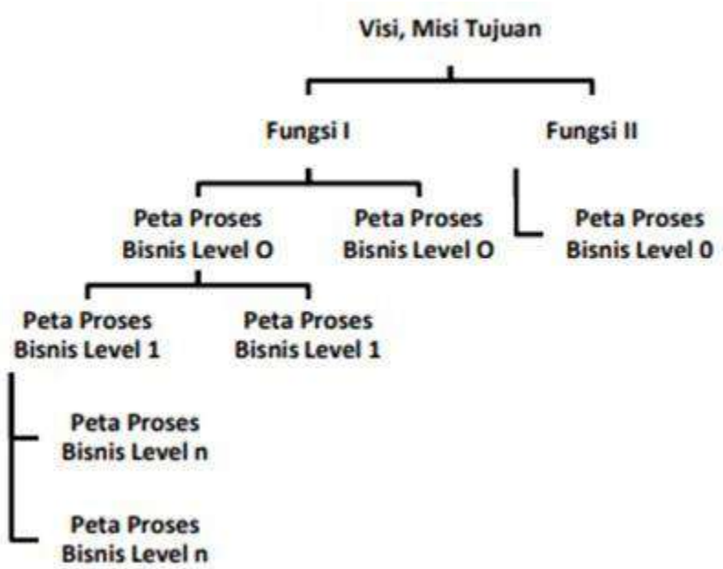
Pada tahap ini, dilakukan inventarisasi rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi

pemerintah sehingga dapat diketahui proses kerjayang diterapkan dalam instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, proses kerja atau aktivitas tersebut dikategorikan ke dalam kelompok kegiatan dengan tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu

a) Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi,
b) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan diinstansi pemerintah,
c) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

5.3 Pengembangan

Pada tahap ini dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gamabr peta yaitu peta proses bisnis, subproses, relasi, dan lintas fungsi.



Gambar 2.11 Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah, berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n. Level 0 memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang diturunkan langsung dari visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing level 0 (Buku arsitektur proses bisnis).

6. DATA DAN INFORMASI

Data adalah fakta aktual atau rincian peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang memberikan nilai khusus untuk tujuan tertentu. Data dan informasi adalah hal yang sangat vital di era digitalisasi saat ini, contohnya pada sebuah organisasi, data dan informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memberikan inovasi pada bisnis, membantu pengambilan keputusan strategis dan lain-lain.

Namun dengan semakin pentingnya peran data dan informasi muncul berbagai masalah terkait haltersebut. Seperti pengelolaan data dan informasi yang buruk dapat menyebabkan data penting hilang, informasi tidak sesuai dengan peristiwa aktual, pencurian data penting, dan lain sebagainya. Masalah utama lainnya adalah integrasi data dan informasi. Integrasi berarti suatu kegiatan untuk menghubungkan berbagai sumber sehingga setiap sumber dapat melakukan bagipakai. Pada level pemerintahan integrasi merupakan hal yang penting sama pentingnya dengan keamanan data dan informasi. Dengan adanya integrasi proses yang ada di instansi dapatberjalan lebih cepat dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai dengan mudah. Untuk melakukan integrasi data dan informasi berikut Langkah – Langkah penyusunan Arsitektur Data dan Informasi:

1. Identifikasi Kesenjangan Data Tiap PD

Analisis hasil kesenjangan didapatkan dari perbedaan kondisi eksisting dengan kondisi yang diinginkan. Kondisi yang diinginkan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Analisis kondisi existing yang berasal dari survey dan analisi dapat dilihat pada buku 1.

2. Pengembangan

Pada tahap ini akan dilakukan penggambaran peta integrasi yang memungkinkan berdasarkan hasil pemilahan data pada tahap sebelumnya.

Peta integrasi ini dibuat bertujuan untuk dapat dengan mudah dipahami bagaimana alur penggunaan data dan PD apa saja yang tergabung dalam integrasi data tersebut.

Resume Jumlah OPD yang dengan klasifikasi jenis data dan informasi dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Klasifikasi jenis data dan informasi

NO	JENIS	JUMLAH OPD	%
Jumlah OPD		**49**	
1	Rahasia	12	24,5%
2	Semi Rahasia	32	65,3%
3	Umum	5	41,7%

Tabel diatas menunjukan bahwa banyak OPD yang memiliki data dan informasi yang sifatnya semirahasia. Dari hal ini dalam pengembangan sistem pertukaran data perlu memperhatikan jenis dantada apa yang bisa di sharing secara umum baik itu ke OPD maupun ke publik.

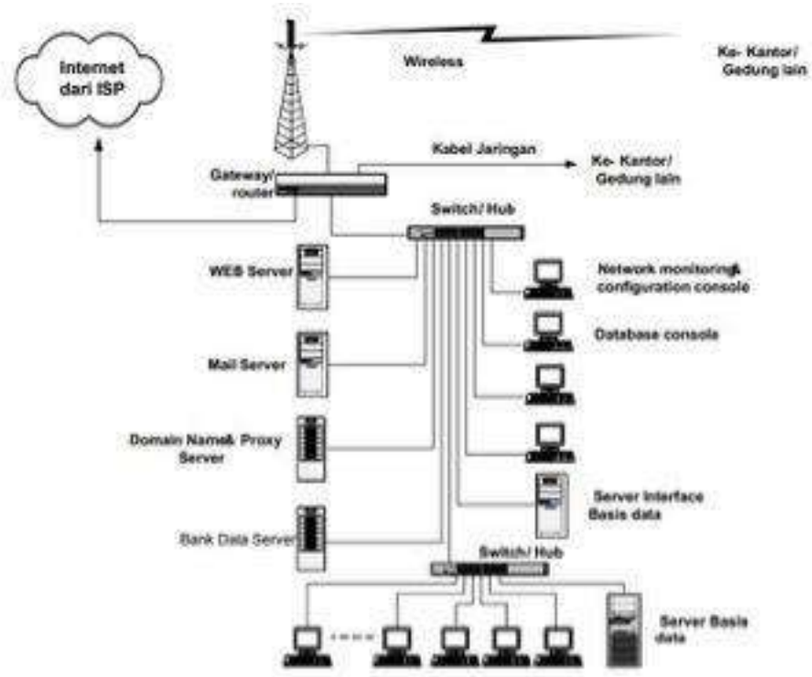
3. Command Center dan Data Center

Untuk menjamin keterhubungan serta interoperabilitas dari seluruh informasi yang tersebardi berbagai unit kerja, dibutuhkan suatu unit yang bertanggungjawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional dari jaringan intranet (NG@NJUK.Power- Net) Kabupaten Nganjuk. Kegiatan operasional tersebut antara lain untuk memfasilitasipenyimpanan/pemrosesan data dan aplikasi yang dibutuhkan dalam intranet serta menjamin fasilitas sistem keamanan yang berlapis. Unit ini disebut sebagai Pusat Manajemen Jaringan danPusat Data atau sering disebut Command Center dan Data Center Kabupaten Nganjuk.

PMDJ berfungsi sebagai fasilitator dan enabler, yang dapat dipergunakan oleh semua unit kerja.Untuk menjalankan fungsi tersebut, PMDJ bertugas untuk :

- mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur jaringan informasi E-Government;
- mengelola penyimpanan dan kelancaran lalulintas data dan informasi Kabupaten Nganjuk;
- mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja.

Pada topologi jaringan Command Center dan Data Center dibagi menjadi dua subnet jaringan, yakni subnet yang digunakan untuk mengelola keseluruhan jaringan intranet Kabupaten Nganjuk dan subnet internal (KOMINFO) yang digunakan untuk kebutuhan internal unit kerja yang menangani jaringan tersebut. Pada subnet pertama dilengkapi juga dengan beberapa server dan komputer personal digunakan oleh administrator jaringan dan administrator basis data untuk mengawasi dan merawat jaringan serta basis data resume yang digunakan oleh manajemen Kabupaten Nganjuk dalam pembuatan keputusan. Selain itu dengan adanya data center yang digunakan sebagai backup data seluruh OPD secara terpusat (backup center) akan memudahkan dalam mengkoordinasikan pendataan antar OPD yang tentunya dibarengi dengan adanya sentralisasi sistem aplikasi perangkat lunak yang berbasis opensource dan web.



Gambar 2.12 Topologi Jaringan NOC dan Data Center

Pembangunan data center haruslah memenuhi standar untuk menjamin eksitensi data yang tersimpan di dalamnya. Salah satu standar data center yang telah diakui internasional adalah TIA–942, standar ini dikeluarkan oleh Telecommunications Industry Association (TIA) bekerjasama dengan Asosiasi Industri Elektronika (EIA), suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI. (American National Standard Institute). Sebuah desain data center setidaknya memiliki 4 (empat)karakteristik untuk dapat menjadikanya

lebih murah, mudah untuk digunakan, dipelihara, dan diperluas. Karakteristik yang dimaksud adalah desain harus sederhana, desain harus memiliki ukuran yang relative, desain harus modular dan desain harus fleksibel dan mampu menunjang kebutuhan penggunaan jangka panjang. Terdapat lima proses besar yang diperlukan untukmembangun data center. Sesuai dengan standar TIA-942 tahapan tersebut adalah pemilihan lokasi, evaluasi infrastuktur bangunan, desain ruangan, pengaturan peralatan dan pelabelan.

7. INFRASTRUKTUR SPBE

Infrastruktur SPBE Kabupaten Nganjuk mecakup komponen-komponen yang digunakan dalam menjalankan SPBE di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. Perangkat Lunak Teknologi Informasi
2. Perangkat Keras Teknologi Informasi
3. Teknologi Jaringan Komputer
4. Sistem Keamanan
5. Command Center dan Data Center
6. Lokasi/Ruangan

Referensi arsitektur Infrastruktur dan Keamanan SPBE akan menggunakan standar **ISO 27001:2013** dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

a. Perangkat Lunak Teknologi Informasi

Perangkat Lunak Teknologi Informasi meliputi seluruh aplikasi yang digunakan dalam operasional di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Aplikasi-aplikasi tersebut penggunaannya tersebardiseluruh unit perangkat Daerah (Tabel 6.)

Tabel 4. Sistem Operasi tiap OPD

NO	OPD	OS					
		WIN XP	WIN 7	WIN 8	WIN 10	WIN 11	LINUX
1	Sekretariat Daerah		70	20	10		
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			4	30		
3	Inspektorat Daerah	2	6	7	1		
4	Dinas Pendidikan		15		5		
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	11	1	1			
6	Dinas Kesehatan	5	80		10		1
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	12				
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	10	4	12		
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	57		8	1	1
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1		21			
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		28				
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	24		2		
13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro		15		10		
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	2		19		17
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	8	8	8	0	0
16	Dinas Perhubungan	2		5	24		
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		12				
18	Dinas Lingkungan Hidup	1	10		20		
19	Dinas Pertanian				14		

20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		24		6		
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		24			1	
22	Satuan Polisi Pamong Praja	1			5		
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2			30		
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10	45	40	20	1	
25	Badan Pendapatan Daerah		10	13	10		
26	Badan Kepegawaian Daerah	2	14				
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1			6		
28	Kecamatan Nganjuk	1	12				
29	Kecamatan Gondang	1	12				
30	Kecamatan Jatikalen	1	12				
31	Kecamatan Kertosono	1	12				
32	Kecamatan Lengkong	1	12				
33	Kecamatan Loceret	1	12				
34	Kecamatan Ngetos	1	12				
35	Kecamatan Ngluyu	1	12				
36	Kecamatan Ngronggot	1	12				
37	Kecamatan Pace	1	12				
38	Kecamatan Patianrowo	1	12				
39	Kecamatan Prambon	1	12				
40	Kecamatan Rejoso	1	12				
41	Kecamatan Sawahan	1	12				
42	Kecamatan Sukomoro	1	12				
43	Kecamatan Tanjunganom	1	12				
44	Kecamatan Wilangan	1	12				
45	Kecamatan Bagor	1	12				
46	Kecamatan Baron	1	12				
47	Kecamatan Berbek	1	12				
48	Kesbangpol	1	5	3			
49	RSUD NGANJUK	50	30				

Sedangkan untuk system operasi yang digunakan antara lain seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 5. Sistem Operasi lainnya

NO	JENIS OS	JUMLAH	%
1	Windows XP	117	9,3%
2	Windows 7	742	59,0%
3	Windows 8	126	10,0%
4	Windows 10	250	19,9%
5	Windows Server	3	0,2%
6	Linux	19	1,5%
JUMLAH		**1257**	**100,0%**

Selanjutnya aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah untuk membantu menjalankanfungsinya terdiri dari beberapa aplikasi seperti pada table berikut ini.

Tabel 8. Penggunaan Aplikasi tiap OPD

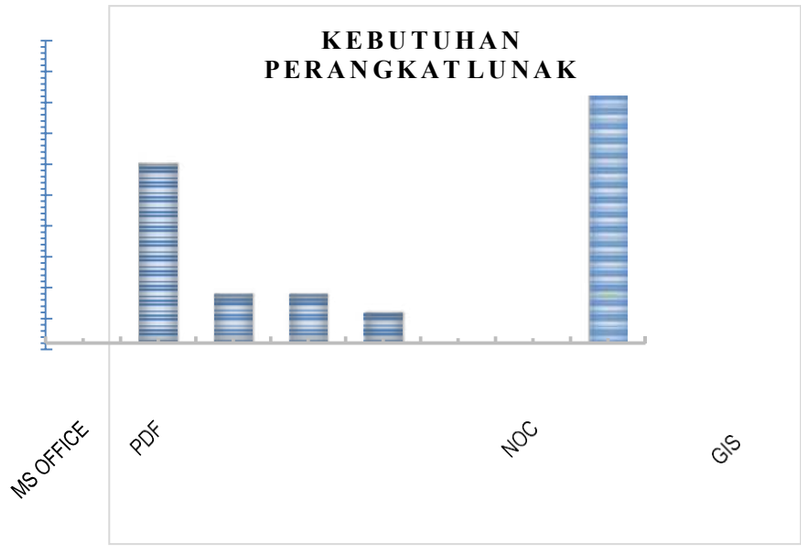
NO	OPD	MS OFFICE	PDF	PHOTOSHOP	COREL	AUTOCAD	VMWARE	NOC	GIS
1	Sekretariat Daerah	√	√						
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	√	√						
3	Inspektorat Daerah	√	√						
4	Dinas Pendidikan	√							
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	√	√	√	√				
6	Dinas Kesehatan	√							
7	Dinas Sosial Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√						
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	√	√						

NO	OPD	MS OFFICE	PDF	PHOTOSHOP	COREL	AUTOCAD	VMWARE	NOC	GIS
	Berencana								
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	√	√					
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√							
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√							
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	√		√					
13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	√							
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	√		√	√	√	√	√	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√	√	√	√			√
16	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√			√
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	√	√	√	√	√			√
18	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√			√
19	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√			√
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	√	√						√
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	√						
22	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√						√

NO	OPD	MS OFFICE	PDF	PHOTOSHOP	COREL	AUTOCAD	VMWARE	NOC	GIS
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√			√
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	√	√						√
25	Badan Pendapatan Daerah	√	√						
26	Badan Kepegawaian Daerah	√	√						
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√	√	√	√			√
28	Kecamatan Nganjuk	√	√						√
29	Kecamatan Gondang	√	√						√
30	Kecamatan Jatikalen	√	√						√
31	Kecamatan Kertosono	√	√						√
32	Kecamatan Lengkong	√	√						√
33	Kecamatan Loceret	√	√						√
34	Kecamatan Ngetos	√	√						√
35	Kecamatan Ngluyu	√	√						√
36	Kecamatan Ngronggot	√	√						√
37	Kecamatan Pace	√	√						√
38	Kecamatan Patianrowo	√	√						√

NO	OPD	MS OFFICE	PDF	PHOTOSHOP	COREL	AUTOCAD	VMWARE	NOC	GIS
39	Kecamatan Prambon	√	√						√
40	Kecamatan Rejoso	√	√						√
41	Kecamatan Sawahan	√	√						√
42	Kecamatan Sukomoro	√	√						√
43	Kecamatan Tanjunganom	√	√						√
44	Kecamatan Wilangan	√	√						√
45	Kecamatan Bagor	√	√						√
46	Kecamatan Baron	√	√						√
47	Kecamatan Berbek	√	√						√
48	Kesbangpol	√	√						
49	RSUD NGANJUK	√	√	√	√				
JUMLAH		**49**	**38**	**11**	**7**	**1**	**1**	1	**30**

Dari kondisi eksisting jika di bandingkan dengan kondisi ideal ada beberapa dinas/OPD yang harusmengistal aplikasi/perangkat lunak untuk mendukung tupoksi mereka.



Gambar 2.13 Kebutuhan Perangkat Lunak

Sistem aplikasi SPBE disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasiserta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaanPemerintah Daerah,yang diperlukan guna terselenggaranya sistem kepemerintahan daerah. Aplikasi baik yang yang telah disiapkan oleh oleh pemerintah pusat, maupun aplikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah seperti pada tabel berikut ini.

No	Nama Domain	Organisasi Perangkat Daerah	Server	Status	Model Komunikasi Data	Platform Software		
					(VPN/Publik Inet/LAN)	Pemrograman	Database	Operating System
1	2	3	4	5	6		7	
1	www.nganjukkab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	Linux Centos 7
2	ipsc.nganjukkab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	Java	Postgrees	Linux Centos 7
3	jpid.nganjukkab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
4	diskominfo.nganjukkab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	HTML/PHP	MySQL	
5	dbkesnsi.nganjukkab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
6	dpmptsp.nganjukkab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
7	dpmpt.nganjukkab.go.id	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
8	inspektorat.nganjukkab.go.id	Inspektorat Daerah	Cloud Diskominfo Jatim	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
9	eplanning.nganjukkab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	CI Framework	MySQL	
10	bkd.nganjukkab.go.id	Badan Kepegawaian Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	HTML/PHP	MySQL	
11	dinkes.nganjukkab.go.id	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
12	kesbang.nganjukkab.go.id	Kantor Kesbangpolinmas	Cloud Diskominfo Jatim	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
13	pkk.nganjukkab.go.id	Sekretariat Daerah	Cloud Diskominfo Jatim	On Progress	Public	HTML/PHP	MySQL	
14	bapenda.nganjukkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	HTML/PHP	MySQL	
15	bpkad.nganjukkab.go.id	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	HTML/PHP	MySQL	
16	bappeda.nganjukkab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	CI Framework	Postgrees	
17	ppid.nganjukkab.go.id	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	PHP Laravel	MySQL	
18	sibinja.nganjukkab.go.id	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
19	lapor.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cloud Kemenpan RB	Online	Public	Java	Postgrees	
20	simeja.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cloud Kemenkominfo	Online	Public	Java	Postgrees	
21	kinerja.nganjukkab.go.id	Badan Kepegawaian Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	CI Framework	MySQL	
22	simpeg.nganjukkab.go.id	Badan Kepegawaian Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	PHP Laravel	MySQL	
23	disdik.nganjukkab.go.id	Dinas Pendidikan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Online	Public	HTML/PHP	MySQL	
24	ftcns.nganjukkab.go.id	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	HTML/PHP	MySQL	
25	simdarin.nganjukkab.go.id	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	On Progress	Public	PHP Laravel	MySQL	

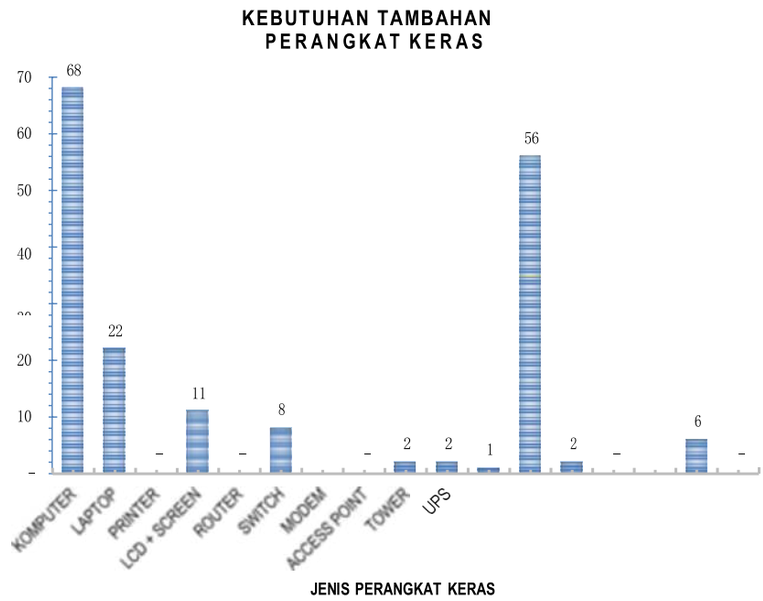
Gambar 2.14 Daftar nama domain

NO	Nama Aplikasi	Platform Pengembangan (Web/Dekstop/Mobile)	Platform Software			Status (Aktif/Non Aktif)	Database (Terdistribusi/Sharing/Lokal)	Media Komunikasi Data (VPN/Publik Inet/LAN)
			Pemrograman	Database	Sistem Operasi			
1	SIMDA	Desktop						
2	SIAK	Desktop						
3	E-BUDGETING	Web						
4	SIMBADA	Desktop						
5	ESPT	Web						
6	TASPEN	Web						
7	SIPENTOL	Web						
8	PUPNS	Web						
9	PENGARSIPAN	Web						
10	PEMINJAMAN BUKU	Desktop						
11	SPAN	Web						
12	E-KTP	Desktop						
13	SIPD	Web						
14	E-AGENDARIS	Desktop						
15	E-REGISTER SURAT TUGAS	Desktop						
16	LHP	Desktop						
17	SPM	Desktop						
18	SI TINDAK LANJUT	Desktop						
19	SMILE	Web						
20	KOMDA	Web						
21	OMSPAM	Web						
22	ELHKAPN	Web						
23	SISKUDES	Desktop						
24	TCS	Desktop						
25	E-PROPOSAL	Desktop						
26	SIMRS	Desktop						
27	FANLAB	Desktop						
28	APPLYCARE	Web						

Gambar 2.14 Daftar nama aplikasi

b. Perangkat Keras Teknologi Informasi

Secara umum perangkat keras teknologi informasi merupakan perangkat keras yangdigunakan untuk menjalankan dan mengakses kebutuhan operasional teknologi informasi di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dari seluruh jumlah OPD yang ada menunjukkan hanya sekitar 6 % OPD/kecamatan memiliki layanan komputer untuk masyarakat di kantor OPD/Kecamatan. Padahal kebutuhan komputer umum sangat penting terutama pada dinas/OPD yang merupakan dinas yang bergerak di bidang pelayanan umum seperti Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu, Dinas Penataan Ruang dll sangat membutuhkan komputer umum. Berikut ini jumlah kebutuhan perangkat keras secara umum di tiap OPD di Kabupaten Nganjuk gambar dibawah ini :



Gambar 2.15 Daftar jenis Perangkat keras

c. Teknologi Jaringan Komputer

Teknologi jaringan komputer merupakan bagian dari infrastruktur SPBE yang menyediakankoneksi antar OPD maupun pemerintah pusat serta masyarakat umum untuk saling berkomunikasidan mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Nganjuk perlu menginisiasi dan mengkoordinasi terbentuknya jaringan Wide Area Network yang menghubungkansetiap OPD dan kecamatan dalam lingkup Kabupaten untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja kabupaten. Adanya keterhubungan kabupaten melalui WAN Kabupaten Nganjuk mutlak diperlukan terutama dalam rangka memudahkan merekapitulasi data OPD/Kecamatan ataupun dalamrangka memperlancar interkoneksi dan integrasi aplikasi, interoperabilitas data dan informasi antar lembaga pemerintah, atau program nasional lainnya seperti pengentasan kemiskinan, program kesehatan, serta pendidikan. Jaringan WAN Kabupaten Nganjuk dapat terbangun jika tiap-tiap OPD/Kecamatan tersambung ke internet melalui unit Dinas KOMINFO. Jaringan WAN KabupatenNganjuk dapat dikontrol melalui ruang NOC Kabupaten Nganjuk yang terletak di Kantor KOMINFO. Diharapkan jaringan WAN tersebut dapat dipergunakan untuk pertukaran data, informasi, telponinternet atau voice over internet protokol ataupun telekonferensi. Tabel 2.9 memperlihatkan semua OPD dan 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk telah terkoneksi kecuali RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono yang belum terkoneksi, media fisik koneksi data antara kantor OPD menggunakan kabel fiber optik dan frekuensi radio (melalui tower), media fisik koneksi antara KOMINFO dengan kecamatan menggunakan frekuensi radio (melalui tower).

Transmisi dan komunikasi data antar aplikasi dilakukan melalui jaringan privat VPN (Virtual PrivateNetwork) dan jaringan publik internet dengan sebagian besar menggunakan ISP dari PT Telkom. Masing-masing OPD memiliki local area network yang dikelola internal oleh OPD dengan support teknis dari KOMINFO. Tabel dibawah ini merupakan sebaran wilayah spot area dan blank spot area di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Tabel 6. Luas Area Terkena Sinyal Antena Di Wilayah Kabupaten Nganjuk

Area	Luas (ha)	Persentase
Spot area sinyal	66,221.38	54.09
Blank spot sinyal	56,211.72	45.91
Total luas Kabupaten Nganjuk	**122,433.10**	**100.00**

Selanjutnya data Penyedia jaringan internet pada OPD yang saat ini beroperasi dapat dilihat padatabel berikut ini.

Tabel 7. Penyedia Jaringan

NO	KONEKSI INTERNET	JUMLAH	%
JUMLAH OPD		**49**	
1	INDIEHOME	32	**65,3%**
2	ASTINET	5	**10,2%**
3	LDP	1	**2,0%**
4	SPEEDY	17	**34,7%**
5	LAKSO	2	**4,1%**

Sedangkan persepsi kulitas internet dari setiap OPD terhadap penyedia jasa internet yangdigunakan disetiap OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Persepsi Kualitas Internet di OPD

NO	KUALITAS INTERNET	JUMLAH OPD	%
Jumlah OPD		**49**	
1	Cukup	38	77,6%
2	Kurang	11	22,4%

Dari data–data kualitas internet menunjukkan bahwa kualitas internet yang ada dirasa sudah mencukupi untuk pelaksanaan dan mendukung kegiatan

OPD/kecamatan, 78 % respondenmenjawab cukup dan 22 % menjawab kurang. Berdasarkan kondisi peningkatan penyediaan bandwidth disetiap OPD, maka didapatkan bahwa peningkatan kapasitas bandwidth tersebut disebagian OPD telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dibeberapa OPD masih membutuhkan peningkatan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. GAP eksisting dan ideal Bendwidt di OPD

NO	OPD	BESARAN	IDEAL	GAP
1	Sekretariat Daerah	450	175	0
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100	14	0
3	Inspektorat Daerah	10	16	**6**
4	Dinas Pendidikan	10	44,5	**34,5**
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	10	24,5	**14,5**
6	Dinas Kesehatan	30	60	**30**
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	20	**5**
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20	15,5	0
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	30	0
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	105	18	0
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	100	**98**
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	52	**42**
13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro	50	50	0
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	185	185	0
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	144	**44**
16	Dinas Perhubungan	30	41,5	**11,5**
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	31,5	**21,5**
18	Dinas Lingkungan Hidup	10	50,5	**40,5**
19	Dinas Pertanian	10	107	**97**
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	30	15	0
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	60	18	0
22	Satuan Polisi Pamong Praja	20	46,5	**26,5**
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	110	25,5	0
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	100	0
25	Badan Pendapatan Daerah	30	15,5	0

26	Badan Kepegawaian Daerah	20	100	80
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	50	**40**
28	Kecamatan Nganjuk	10	7,5	0
29	Kecamatan Gondang	10	7,5	0
30	Kecamatan Jatikalen	10	7,5	0
31	Kecamatan Kertosono	10	7,5	0
32	Kecamatan Lengkong	10	7,5	0
33	Kecamatan Loceret	10	7,5	0
34	Kecamatan Ngetos	3	7,5	**4,5**
35	Kecamatan Ngluyu	10	7,5	0
36	Kecamatan Ngronggot	10	7,5	0
37	Kecamatan Pace	10	7,5	0
38	Kecamatan Patianrowo	10	7,5	0
39	Kecamatan Prambon	10	7,5	0
40	Kecamatan Rejoso	10	7,5	0
41	Kecamatan Sawahan	10	7,5	0
42	Kecamatan Sukomoro	10	7,5	0
43	Kecamatan Tanjunganom	10	7,5	0
44	Kecamatan Wilangan	10	7,5	0
45	Kecamatan Bagor	10	7,5	0
46	Kecamatan Baron	10	7,5	0
47	Kecamatan Berbek	10	7,5	0
48	Kesbangpol	20	9	0
49	RSUD NGANJUK	45	200	**155**

Kantor KOMINFO Kabupaten Nganjuk telah mempunyai NOC dan data center seperti terlihat pada Gambar 2.12 ,untuk ke depan data center ideal berada di level 2 pada standar TIA 942 sertamemiliki data recovery center yang disediakan oleh pihak ketiga. Kondisi infrastruktur terkini Kabupaten Nganjuk secara umum sudah relatif baik. Akan tetapi perlu optimalisasi dan perencanaan baru dengan migrasi teknologi intranet/internet untuk seluruh OPD dan kecamatan dari penggunaan jaringan wireless secara berangsur-angsur digantikan dengan jaringan Fiber Optic. Hal ini bertujuan untukmeningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Selanjutnya koneksi secara internal dan eksternal pada setiap OPD, kondisinya dapat dilihat padatabel berikut ini.

Tabel 10. Jumlah Penggunaan Teknologi LAN di seluruh OPD

NO	PENGGUNA LAN	JUMLAH OPD	%

Jumlah OPD		**49**	
1	Ada	41	83,7%
2	Tidak Ada	8	16,3%

Tabel 11. Teknologi dan Jumlah koneksi antar OPD

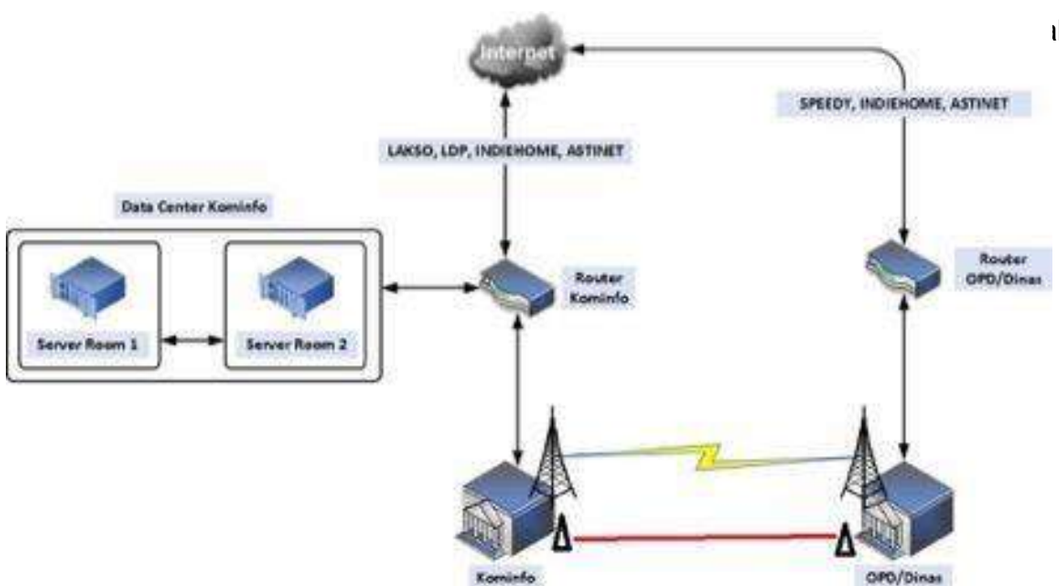
NO	KONEKSI	JUMLAH OPD	%
Jumlah OPD		**49**	
1	Ada	41	83,7%
	a. Ethernet	1	2,4%
	b. LAN	10	20,4 %
	c. WIFI	2	4,1%
	d. LAN + WIFI	26	1300,0%
	e. LAN + WIFI+ FO	2	20,0%
2	Tidak Ada	8	16,3%

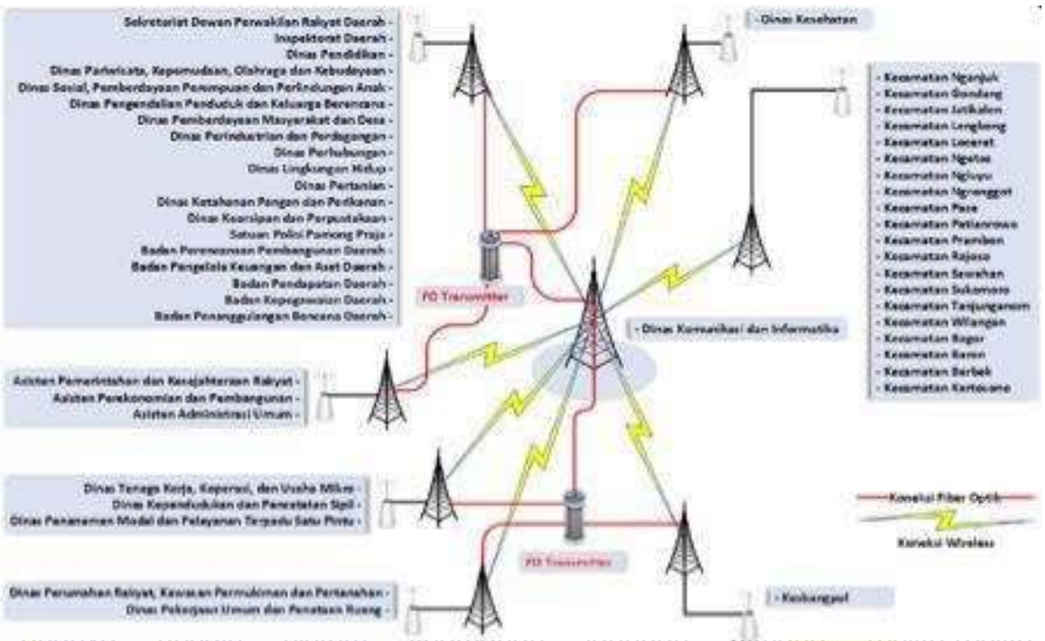
Koneksi antar OPD/kecamatan Kabupaten Nganjuk mayoritas sudah menggunakan private dan publik sebesar 82 %, OPD yang belum tidak ada konektifitasnya ada 10 %. Data-data OPD terdistribusi sebesar 81 %, terpusat sebesar 11 %, dan kombinasi terpusat dan terdistribusi sebesar 8 %.

Tabel 12.Koneksi Antar Instansi

NO	KONEKSI	JUMLAH OPD	%
Jumlah OPD		**49**	
1	Ada	44	89,8%
	a. Privat	1	2,3%
	b. Publik	3	6,1%
	c. Privat + Publik	40	81,6%
2	Tidak Ada	5	10,2%

Selanjutnya secara umum bahwa secara umum antara Dinas/OPD/Kecamatandengan KOMINFO sudah memliki koneksi internet malalui infrastruktur dari Internet Service Provider yang ada di Kabupaten





adanya desain sistem keamanan jaringan dimana resiko-resiko terhadapgangguan dari pihak luar (internet) potensinya sangat besar, terutama belum adanyaperangkat firewall sebagai pengontrol komunikasi data terdepan dengan pihak luar.Belum adanya perencanaan jaringan sistem komunikasi data secara internal (private network). Diantaranya belumadanya perencanaan penempatan server-server aplikasiyang dimilikioleh masing-masing OPD yang dapat diakses secara private namundapat dikoneksi oleh seluruh OPD dari manapun. Desain belum memperhatikan aspek sistem komunikasi data yang mengatur komunikasi kedalam dan komunikasikeluar sehingga tidak menimbulkan beban penyediaan kebutuhan bandwidth internet yang besar. Belum ada perencanaan penempatan server-server yang dimiliki oleh masing-masing OPD dan kecamatan untuk ditempatkan di NOC dan dikelola oleh Kantor KOMINFO. Dengandemikian resiko-resiko terhadap permasalahan jaringan dan serverdapat diminimalisir. Belum ada perencanaan server-server aplikasi yang ada untuk disediakan backup(Data Recovery) pada lokasi lain, mengingat resiko-resiko kerusakan atau kehilangan data dapat terjadi setiap saat.Sebagian besar OPD merasa tercukupi jumlah terminal untuk alat bantu kerjanya. Sebagian besar OPD sudah terlayani akses ke internet baik melalui layanan kantor KOMINFO ataupun pengadaan sendiri. LAN di setiap OPD sebagian diinstalasi secara mandiri dan sebagian oleh KOMINFO karena tidak semua OPD memiliki tenaga pengelola infrastruktur TIK. Belum ada yang memahami tentang keamanan informasi.

Gambar 2.16 Instalasi LAN

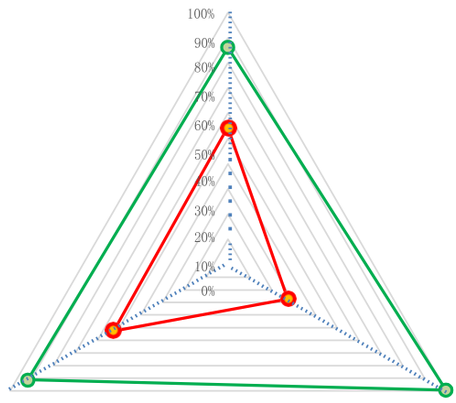
Dari hasil pembahasan Fakta dan Analisa diatas menunjukan bahwa dari 5 komponen tersebut dibandingkan antara kondisi eksisting dengan kebutuhan ideal yang menjadi target pengembangan TIK di Kabupaten nganjuk ditunjukan dengan GAP TIK.

Tabel 13. Kondisi Eksisting

NO	VARABEL	KONDISI EKSISTING	TARGET	GAP		
				%	KUANTITAS	SATUAN
1	**APLIKASI DAN MEDIA SOSIAL**	**47%**	**89%**	**42%**		
	PENGGUNAAN OS LINGKUP OPD	91%	100%	9%	117	Unit (UpgradeOS)
	PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK	21%	44%	23%	90	Unit (Aplikasi Lunak)
	PEMELIHARAAN APLIKASI	88%	100%	12%	4	OPD (PihakKetiga)
	KEPEMILIKAN WEBSITE	24%	100%	76%	37	OPD
	KEPEMILIKAN SOSMED	10%	100%	90%	44	OPD
2	**PENGELOLAAN DATA**	**28%**	**100%**	**72%**		
	PERTUKARAN DATA	29%	100%	71%	35	OPD
	FASILITAS BACKUP DATABASE	49%	100%	51%	25	OPD
	MANAJEMEN DOKUMEN	10%	100%	90%	44	OPD
	KETERSEDIAAN RUANG PUSAT DATA	22%	100%	78%	38	OPD
3	**MANAJEMEN IT**	**53%**	**92%**	**39%**		
	KEBIJAKAN PEMANFAATAN IT	63%	100%	37%	18	OPD
	DOKUMEN SOP IT	78%	100%	22%	11	OPD
	BIAYA PEMELIHARAAN APLIKASI	73%	100%	27%	13	OPD
	OPD PENGELOLA DATA	94%	100%	6%	3	OPD

	INFRASTRUKTUR DRP	2%	100%	98%	48	OPD
	KETERSEDIAAN KOMPUTER UMUM	6%	51%	45%	46	OPD
	RATA - RATA	**42%**	**94%**	**51 %**		

Dari tabel diatas Gap Infrastruktur dari masing-masing komponen memiliki kuantitas baik itu unit maupun OPD sebagai target yang harus beri penanganan. Program-program akan difokuskan pada jumlah GAP.

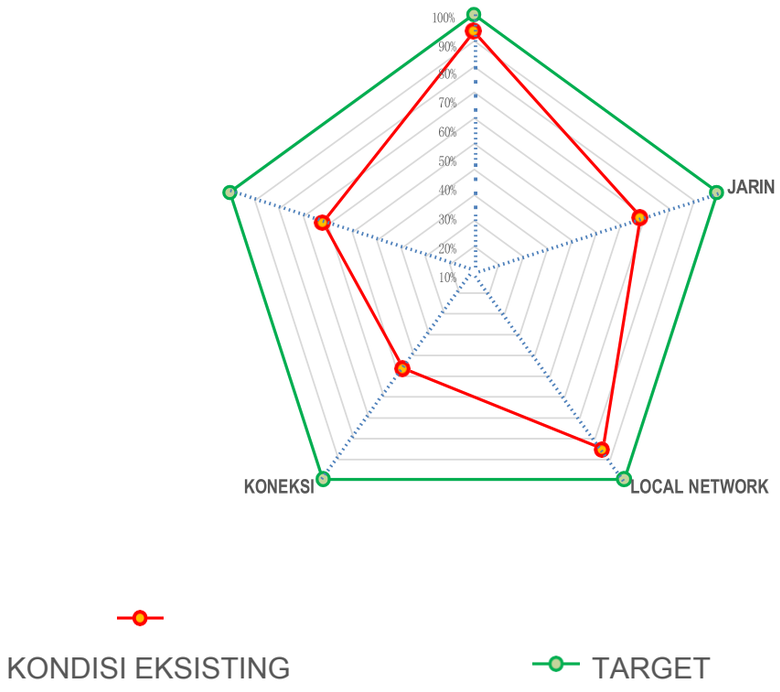


Jika dilihat pada grafik diiatas menunjukan bahwa pengelolaan data memiliki gap yang cukup besardibandingkan denganaplikasi media sosial dan manajemen IT dengan angak 72% gap yang harusdi kejar.

Tabel 13. Kondisi Eksisting Perangkat Keras

NO	VARIABEL	KONDISI EKSISTING	TARGET	GAP		
				%	KUANTITAS	SATUAN
1	**PERANGKAT KERAS YANG DIGUNAKAN**	**93%**	**100%**	**7%**		
	JENIS PERANGKAT KERAS	93%	100%	7%	178	Unit
2	**JARINGAN IT**	**68%**	**100%**	**32%**		
	BENDWIDTH BELUM STANDAR KEBUTUHAN	67%	100%	33 %	15	OPD

	PENINGKATAN BENDWIDTH/TAHUN	69%	100%	31 %	15	OPD
3	**LOCAL NETWORK**	**86%**	**100%**	**14 %**		
	PENGGUNAAN TEKNOLOGI LAN	84%	100%	16 %	8	OPD
	KONEKSI ANTAR UNIT	84%	100%	16 %	8	OPD
	KONEKSI ANTAR INSTANSI	90%	100%	10 %	5	OPD
4	**KONEKSI**	**47%**	**100%**	**53 %**		
	KONDISI KONEKSI	47%	100%	53 %	26	OPD
5	**PENGELOLA JARINGAN**	**62%**	**100%**	**38 %**		
	PNS PENGELOLA JARINGAN	84%	100%	16 %	8	OPD
	PEMELIHARAAN JARINGAN	88%	100%	12 %	6	OPD (Pihak Ketiga)
	KEWENANGAN PENGELOLA MEMBATASI PENGGUNA JARINGAN	14%	100%	86 %	42	OPD
	RATA -RATA	**71%**	**100%**	**29%**		



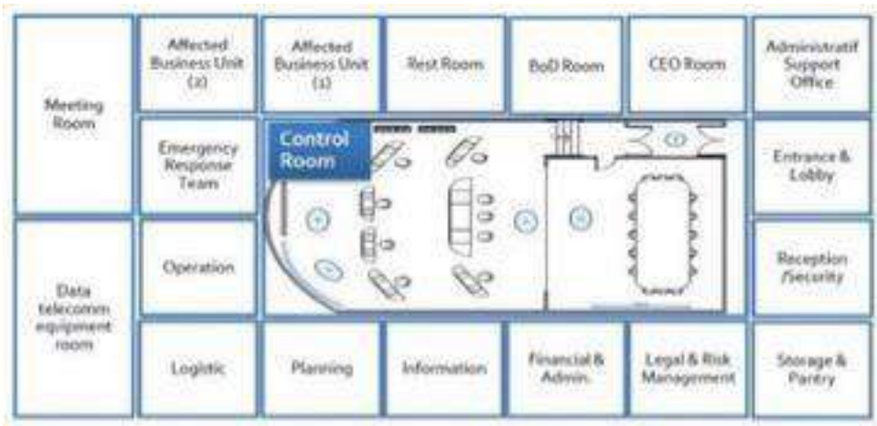
Jika dilihat pada grafik diiatas menunjukan bahwa koneksi memiliki gap yang cukup besar dibandingkan komponen yang lain yaitu GAP sebesar 53%. Artinya bahwa meskipun sudah memiliki jaringan akan tetapi kuaitas koneksi masih menjadi poblem yang menghambat kinerja lainnya.

d. Pemilihan Lokasi/Ruangan

Penentuan lokasi untuk data center mesyaratkan bahwa lokasi harus dapat dikembangkan(expandable). Sebuah data center dapat menempati satu ruangan dari sebuah bangunan, satu atau lebih lantai, atau seluruh bangunan. Pertimbangan lokasi merupakan syarat terpenting yang harus dipenuhi untuk mengangtisipasi kebutuhan IT yang selalu meningkat, terutama pertambahan perangkat keras(hardware). Dalam Standar TIA 942 disyaratkan bahwa lokasi data center harus bebas dari interferensi peralatan elektronik yang dapat menimbulkan gangguan elektromagnetis. Untuk ukuran ruangan, standar TIA 942 mensyaratkan agar ruangan data center disesuaikan dengan kebutuhan sekarang dan pengembangan (expandable).

e. Command Center

merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan Crisis Manegement atau Business Continuity Management, dapat dilihat pada gambar 6.13. Command Center adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorangPimpinan bersama-sama dengan Tim, melakukan meeting, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi organisasi. Hal terkait biasanya adalah tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaaan, dan langkah penyediaan informasi public.



Gambar 2.16 Layout Command Center

Sebagai kelengkapan dari Command Center, maka perusahaan perlu memiliki fasilitas-fasilitas emergensi yang sering sekali diperlukan untuk penanganan situasi krisis di lokasi bencana. Fasilitas – fasilitas tersebut adalah :

- Incident Command Post ditempatkan pada lokasi bencana, lengkap dengan sistem komunikasi Command Center. Fasilitas ini dapat berbentuk kendaraan, trailer, tenda atau dalam bangunan.
- Shelter/Base lengkap dengan dukungan dan akses logistik dan medis. Tempat perlindunganbagi staf perusahaan yang dievakuasi atau terjebak dalam lokasi bencana.
- Mobile Generator dan Mobile Fuel Tank difungsikan untuk kebutuhan daya listrik darurat di lokasi bencana yang diperlukan oleh Tim TanggapDarurat (ICP, Shelter/Base)

Secara topografi Kabupaten Nganjuk terdiri dari wilayah pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.300 m DPL, dan Gunung Kendeng dengan ketinggian 60 300 m DPL serta wilayah dataran

rendah dengan ketinggian 60-140 m DPL. Karakteristik kewilayahan yang sangat heterogen, menjadi kendala dalam akses dan distribusi informasi pembangunan masyarakat. Risikonya adalah belum semua wilayah kecamatan dapat terjangkau oleh akses teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.

Dinas Kominfo kabupaten Nganjuk belum mampu menyediakan akses intranet dan internet sesuai kebutuhan operasional OPD dan kecamatan, sehingga setiap OPD dan kecamatan berlangganan internet sendiri – sendiri, risikonya adalah penggunaan internet tidak terkontroldengan baik, pemanfaatan perangkat TIK kurang optimal, kurang efektif dan efisien.

Meskipun seluruh OPD sudah terhubung dengan jaringan FO dan Wireless namun demikian belum dimanfaatkan secara optimal untuk dokumentasi dan distribusi data setiap OPD. Risikonya adalah jika dibutuhkan data terbaru dan lengkap maka kesulitan diperoleh secara cepat. Dinas Kominfo belum memiliki SOP untuk melakukan manajemen infrastruktur, jaringan dan dokumentasinya secara berkala dalam rangka optimalisasi sumberdaya TIK dan kontrol pemanfaatan secara optimal. Belum pernah dilakukan audit keamanan sistem informasi sebagai upaya proteksi terhadap sumberdaya data pemerintahan.

8. APLIKASI SPBE

8.1 APLIKASI

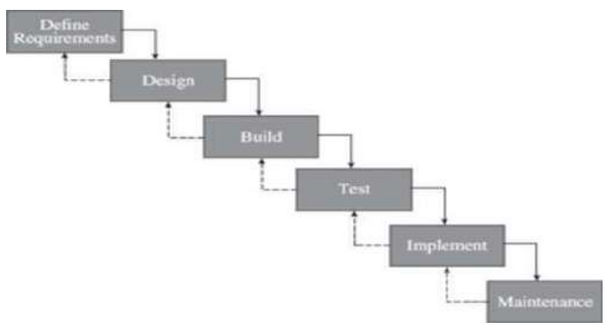
Sistem Aplikasi merupakan rangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis dalam melakukan proses terhadap informasi. Sistem aplikasi dalam hal ini berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan dalam suatu instansi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan menggunakan Referensi arsitektur Aplikasi **ISO 90003:2018** tentang ***Computer Software Guideline.*** Lebih khusus lagi, pembangunan aplikasi SPBE di Pemerintah Nganjuk menggunakan pendekatan Software Developmen Life Cycle (SDLC) yang memiliki tahapan seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.17 Tahapan Pembangunan Aplikasi dengan SDLC

Siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) adalah serangkaian fase yang memberikan pemahaman umum tentang proses pembangunan perangkat lunak. Bagaimana perangkat lunak akan direalisasikan dan dikembangkan dari pemahaman bisnis dan fase elisitasi persyaratan untuk mengubah ide dan persyaratan bisnis ini menjadi fungsi dan fitur hingga penggunaan dan pengoperasiannya untuk mencapai kebutuhan bisnis. Insinyur perangkat lunak yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara memilih model SDLC berdasarkan konteks proyek dan persyaratan bisnis. Oleh karena itu, mungkin diperlukan untuk memilih model SDLC yang tepat sesuai dengan perhatian khusus dan persyaratan proyek untuk memastikan keberhasilannya. Pendekatan SDLC yang digunakan dalam pembangunan Perangkat lunak di Kabupaten Nganjuk adalah Metode Waterfall.

Metode Waterfall adalah aliran berurutan linier dimana kemajuan terlihat mengalir terus ke bawah(seperti air terjun) melalui fase implementasi perangkat lunak. Ini berarti bahwa setiap fase dalamproses pengembangan dimulai hanya jika fase sebelumnya telah selesai. Pendekatan air terjun tidak mendefinisikan proses untuk kembali ke fase sebelumnya untuk menangani perubahan kebutuhan. Pendekatan air terjun adalah pendekatan paling awal dan paling banyak dikenal yangdigunakan untuk pengembangan perangkat lunak.



Gambar 2.18 Tahapan SDLC-Waterfall

Tahapan dalam metode waterfall sebagai berikut:

- Requirement Gathering and analysis: Semua kebutuhan yang mungkin dari sistem yang akan dikembangkan ditangkap dalam fase ini dan didokumentasikan dalam dokumen spesifikasi kebutuhan.
- System Design: Spesifikasi kebutuhan dari fase pertama dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. (Output dari langkah sebelumnya menjadi input dari langkah berikutnya). Desain Sistem akan menentukan perangkat keras dan persyaratan sistem dan juga membantu dalam menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan (1 tingkat, 2 ban atau n ban).

- Implementation: Dengan masukan dari desain sistem, sistem pertama kali dikembangkan dalam program kecil yang disebut unit, yang diintegrasikan pada fase berikutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji fungsinya yang disebut sebagai Unit Testing.
- Integration and Testing: Semua unit yang dikembangkan pada tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian setiap unit. Pasca integrasi, seluruh sistem diuji untuk setiap kesalahan dan kegagalan.
- Deployment of system: Setelah pengujian fungsional dan non fungsional selesai, produk disebarkan di lingkungan pelanggan atau dirilis ke pasar.
- Maintenance: Ada beberapa masalah yang muncul di lingkungan klien. Untuk memperbaiki masalah tersebut, tambalan dirilis. Juga untuk menyempurnakan produk, beberapa versi yang lebih baik dirilis. Pemeliharaan dilakukan untuk menghadirkan perubahan ini di lingkungan pelanggan.

Dokumen peta rencana Sistem Aplikasi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bakupengembangan E-Government hanya pada bidang sistem aplikasi E-Government dengan ruang lingkup pemerintahan daerah. Dengan adanya cetak biru sistem aplikasi E-Government ini diharapkan adanya penyeragaman perencanaan pengembangan aplikasi yang bersifat mandatori di lingkungan OPD Kabupaten Nganjuk serta adanya standarisasi fungsi sistem aplikasi E-Government. Disamping itu cetak biru sistem aplikasi ini diharapkan dapat memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi E-Government yang komprehensif, efisien dan efektifdi Kabupaten Nganjuk.

Penyedia semua layanan E-Government itu akan disediakan melalui sistem aplikasi berbasis web,baik yang sifatnya internal dilingkungan satu OPD, antar OPD (back-office), atau publik (front- office). Untuk mewujudkan E Government seperti yang telah dijabarkan diatas memerlukan banyakpersiapan. Di antaranya diperlukan persiapan-persiapan tentang peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM), perubahan pola pikir, sikap dan peningkatan kesadaran (mindset) dan juga persipan arsitektur aplikasi.

8.2 Prinsip Desain Cetak biru Aplikasi

Cetak biru aplikasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan aplikasi E-Government yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang. Untuk itu Cetak biru ini didesain dengan prinsip keseimbangan antara fleksibilitas dan standardisasi.

A. Fleksibilitas:

Cetak biru aplikasi ini memberikan panduan yang konsisten namun dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang spesifik Pemerintah KabupatenNganjuk. Selain itu cetak biru sistem aplikasi ini dapat disesuaikan dengan Visi, Misi, Rencana Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang akan mempengaruhi kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan E- Government di Kabupaten Nganjuk.

B. Standardisasi:

Cetak biru sistem aplikasi ini lebih mengedepankan deskripsi aplikasi-aplikasi E- Government di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang bersifat umum dan tipikal, disertai dengan spesifikasi umum dan generik. Dasar-dasar peraturan pemerintah secara nasional dijadikanpanduan utama dalam mendeskripsikan fungsi-fungsi kepemerintahan yang menjadi dasar desain aplikasi. Dengan mengutamakan keseimbangan fleksibilitas dan standardisasi, maka Cetak biru sistem aplikasi ini akan memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk

b. Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk.

c. Memberikan kebebasan kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mengadaptasi dan menterjemahkan cetak biru sistem aplikasi ini dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan nasional.

8.3 Pendekatan Penyusunan Cetak biru Sistem Aplikasi

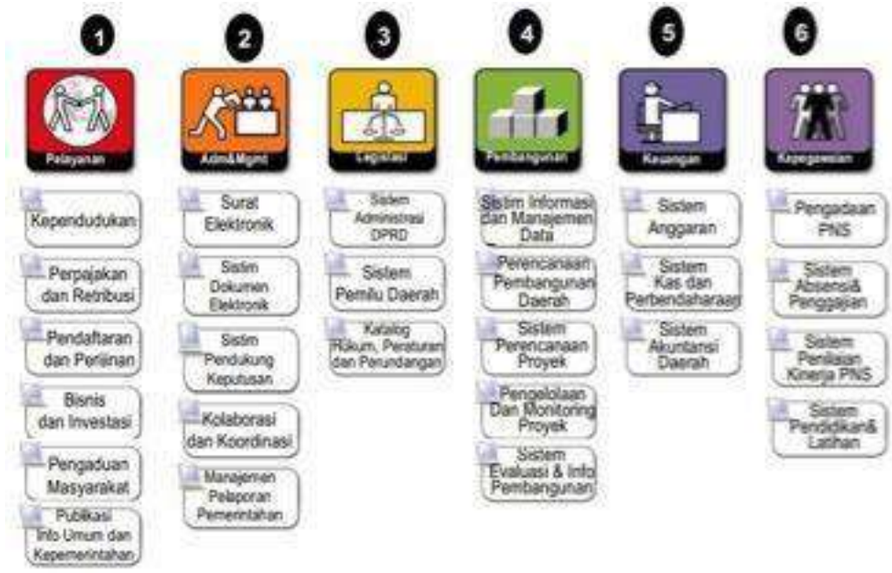
Cetak biru sistem aplikasi E-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi, serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem kepemerintahan Kabupaten Nganjuk Disisi lain, Cetak biru sistem aplikasi E-Government juga disusun berdasarkan pendekatanterhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pemerintah daerah atau untuk kebutuhan yang sifatnya

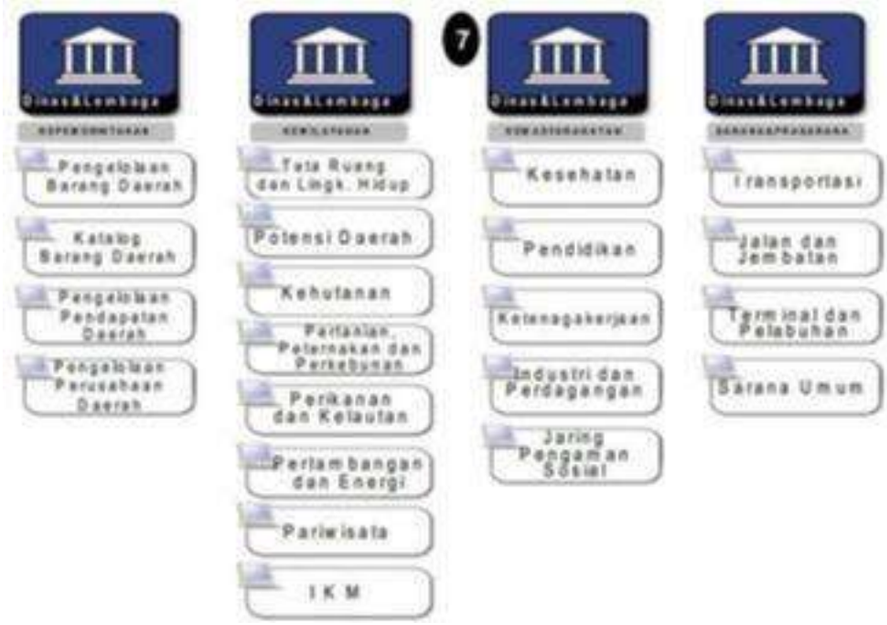
umum dan/ataumendasar.

8.4 Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan

Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen Cetak biru sistem aplikasi ini disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan yang berjumlah tujuh buah yaitu :

1) Fungsi Pelayanan
2) Fungsi Administrasi dan Manajemen
3) Fungsi Legislasi
4) Fungsi Pembangunan
5) Fungsi Keuangan
6) Fungsi Kepegawaian
7) Fungsi Dinas dan Lembaga





8.5 Peta Solusi Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menjawab kebutuhan fungsi administrasi yang didefinisikan dan dikelompokkan dalam kerangka acuan fungsional dari sistem administrasi tersebut. Mempertimbangkan pengoperasian sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi disusun dan dikelompokkan ke dalam sistem kerangka arsitektur, yang disebut sebagai peta solusi aplikasi SPBE dalam dokumen Cetak Biru aplikasi SPBE Kabupaten Nganjuk.

Sesuai dengan Arsitektur aplikasi SPBE, aplikasi diklasifikasikan berdasarkan fungsi layanan dan sifat fungsi aplikasi tersebut, sehingga menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Aplikasi front office
2. aplikasi back office
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umumnan aplikasi dasar biasanya back-office.

Selanjutnya dapat dikelompokkan berdasarkan orientasi penggunanya yaitu G2C (Government To Citizen), G2B (Government To Business) dan G2G (Government To Government).

8.6 Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi

Mengingat pengembangan E-Government lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem E-Government untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama yaitu GIF - Government Interoperability Framework.

Disamping itu, sistem E-Government lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak pihak pengembang, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan E-Government yang lebih besar dan kompleks.

Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi SPBE diperlukan standarisasi pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun pengembang sistem aplikasi.

Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi SPBE:

1. Reliable

   Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bebas bug/error.

2. Interoperable

   Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem.

3. Scalable

   Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan

kemampuan pengelolaan data yang lebihbesar.

4. User Friendly

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budayapenggunanya.

5. Integrateable

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran

8.7 Analisis Aplikasi Dan Sistem Informasi

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sudah memiliki dan memanfaatkan berbagai macam aplikasi dan sistem informasi untuk pelaksanaan pekerjaan mulai dari aplikasi sistem operasiyang terdiri dari Windows dan Linux, Microsoft Office, aplikasi desain seperti Corel Draw dan Autocad, namun demikian belum semua fitur dalam aplikasi dimanfaatkan secara optimal danmasih sebatas fitur dasar aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Belum semua OPD dan kecamatan di Kabupaten Nganjuk dapat memanfaatkan aplikasi dansistem informasi karena belum tersedinya infrastruktur untuk interkoneksi dan distribusi data, atau infrstruktur sudah tersedia namun kapasitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan, atau infrastruktur untuk interkoneksi dan distribusi data dalam keadaan rusak dantidak dapat berfungsi.
3. OPD dan kecamatan di Kabupaten Nganjuk belum memperoleh sosialisasi secara luaspemanfaatan aplikasi dan sistem informasi secara optimal dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk membutuhkan sistem dan teknologi data centre, namun demikian fasilitas ini belum tersedia sehingga membawa resiko :
    a. Data masih tersebar disemua OPD dan kecamatan, belum dilakukan inventarisasi keberadaan data tersebut dan pemanfaatannya.
    b. Data masih belum terstandarisasi dengan baik sehingga akan berdampak dengan sulitnya penemuan data, belum dilakukan analisis data, belum ada pelaporan data, integritas dan keamanan data masih rendah serta belum ada backup recovery data.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk membutuhkan aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk mendorong pencapaian kinerja dalam bidang unggulan daerah seperti pertanian, kehutanan,

perdagangan dan pariwisata. Namun demikian saat ini belum tersedia.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk belum memiliki aplikasi dan sistem informasi untuk percepatan pencapaian Visi dan Misi daerah sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 yaitu pembangunan ekonomi Kabupaten Nganjuk dalam bidang pertanian, pengembangan kawasan pariwisata, perdagangan, jasa dan industriyang berdaya saing.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk belum memiliki aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk mendorong pengembangan produksi dan produktivitas pertanian mulai dari fase budidaya, produksi, pasca panen dan pemasaran.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk belum memiliki aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk mendorong pengembangan kawasan pariwisata dan berbagai sektor yang berkaitan dengan pariwisata seperti transportasi, restoran dan perhotelan.
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk belum memiliki aplikasi dan sistem informasi untuk bisnis, perdagangan, jasa dan industri.

8.8 Analisis Perencanaan

Dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Perda No.02 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk belum memasukkan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai komponen penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, strategis dan rencana kerja OPD

Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 belum memasukkan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai komponen penting dalam perencanaan dan pembangunan kewilayahan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk sudah secara eksplisit memasukkan Teknologi Informasi Komunikasi namun demikian belum menjadikan E-Government sebagai program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Belum ada dokumen perencanaan dan pengembangan kegiatan implementasi Teknologi Informasi Komunikasi diseluruh OPD secara berkelanjutan, pengukuran capaian dan kontrol sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk belum menyediakan standar dan kriteria minimal dalma rangka menyediakan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat berbasis Teknologi Informasi Komunikasi diseluruh OPD dan kecamatan.

9. KEAMANAN SPBE

Aspek keamanan (security) merupakan salah satu aspek yang sering dipertanyakan dalamimplementasi sebuah sistem. Apalagi sistem yang akan dikembangkan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki data-data yang sangat banyak. Untuk itu masalah keamanan perlu mendapat perhatian yang khusus. Keamanan merupakan sebuah proses, bukan sebuah produk akhir. Maksud dari pernyataan tersebut adalah tidak mungkin kita membuat sebuah sistem yang 100% aman untuk selama-lamanya. Setelah berjalan untuk suatu waktu akan ditemukan lubang keamanan yang dapat dieksploitasi. Selain ditemukan adanya lubang keamanan pada sistem yanglama, sistem informasi sering mendapat perbaikan (upgrade) dengan menambah perangkat dan teknologi baru.

Referensi Keamanan SPBE Kabupaten Nganjuk akan menggunakan standar **ISO 27001:2013** dan**Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

9.1 Aspek Keamanan

Keamanan sebuah sistem jaringan memiliki beberapa aspek keamanan, yaitu :

a. Privacy / confidentiality

b. Intergrity

c. Authentication

d. Availability

e. Non-repudiation

f. Access control

Tidak ke semua aspek tersebut harus diimplementasikan pada sebuah sistem jaringan. Umumnyaimplementasi sebuah sistem jaringan menggunakan beberapa bagian dari aspek tersebut. Aspek ini berhubungan dengan kerahasiaan data-data. Banyak data yang harus dirahasiakan seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, hobby, penyakit yang pernah diderita, data pelanggan, dan sebagainya. Untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk data-data yang dirahasiakan antara lain adalah data-data kepegawaian (untuk keperluan

internal, kenaikan pangkat, dan sejenisnya), data-data keuangan, dsb. Data-data ini hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Implementasi sistem informasi harus dapat menjamin aspek privacy atau confidentiality ini.

Serangan terhadap aspek ini antara lain adalah penyadapan data atau interception (misalnya dengan menggunakan program sniffer yang menyadap data di jaringan LAN atau Internet), virus (misalnya virus SirCam yang mengirimkan data-data dari harddisk kita ke orang lain tanpa sepengetahuan kita), trojan horse (misalnya software Back Orifice atau Subseven yang dapat mengendalikan komputer victim dari jarak jauh) atau password yang dituliskan pada secarik kertas sehingga dapat digunakan oleh orang lain.

Banyak aplikasi di jaringan yang masih menggunakan text ketika mengirimkan userid dan password. Sebagai contoh aplikasi telnet (untuk mengakses server dan router dari jarak jauh), FTP(untuk transfer file), dan POP (untuk membaca atau mendownload email) masih menggunakan pasangan userid dan password yang dapat disadap. Aplikasi-aplikasi ini sebaiknya digantikan dengan aplikasi yang menggunakan enkripsi. Sebagai contoh, telnet dapat digantikan dengan SSH(secure shell), sementara FTP dapat digantikan dengan scp (secure copy). Implementasi dari aplikasi ini dapat diperoleh dari Internet. Serangan juga dapat dilakukan secara fisik dengan cara mencuri notebook yang berisi data-data penting. Seharusnya data-data penting di notebook dienkripsi sehingga bila notebook dicuri atau hilang, maka data-data tersebut tidak dapat dibaca orang dengan mudah. Namun pada kenyataannya hal ini jarang dilakukan. Pengamanan terhadap aspek kerahasiaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi untuk mengacak data-data, menggunakan jaringan yang terpisah (dedicated line), segmentasi jaringan, penggunaan firewall, dan dengan menggunakan switch device sebagai pengganti hub di LAN. Penggunaan secure email, seperti dengan menggunakan program PGP3 (Pretty Good Privacy), juga merupakan usah untuk mengamankan kerahasiaan data. Masih banyak lagi teknik-teknik pengamanan yang dapat digunakan yang pada prinsipnya adalah mempersulit orang yang tidak berhak untuk menyadap data. Namun lagi-lagi pengamanan dengan menggunakan enkripsi sering tidak dilakukan karena menambah pekerjaan bagi pengguna dan tidak nyaman.

A. Integrity

Integrity (keutuhan) mengatakan bahwa data atau informasi tidak boleh berubah (tampered,altered, modified) tanpa ijin dari pemilik. Bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, keutuhan data ini menjadi penting misalnya pada pelaksanaan implementasi e- Government. Data-data hasil pemilutidak boleh diubah oleh orang yang tidak berhak. Serangan terhadap aspek intergrity adalah adanya virus, trojan horse, man in themiddle attack, atau masuknya orang yang tidak berhak ke sistem informasi. Tanpa ada pengaman data-data dapat diubah sehingga tidak utuh lagi. Jika hal ini terjadi maka keabsahan data dapat dipertanyakan. Pengamanan terhadap aspek ini adalah dengan menggunakan (digital) signature, checksum, hash algorithm, dan teknik-teknik lain. Pada intinya sistem pengamanan akan memberikan tanda apabila data sudah berubah. Karena seringkali serangan terhadap aspek ini dilakukan dengan menggunakan virus, maka penggunaananti virus menjadi salah satu mekanisme pengamanan yang harus dilakukan.

B. Authentication

Aspek authentication digunakan untuk meyakinkan keaslian data, sumber data, orang yangmengakses data, dan server yang digunakan. Aplikasinya di Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapatberagam. Pengiriman data dari sebuah sumber harus dapat dicek kebenaran (keaslian) sumber tersebut. Orang yang akan mengakses database Pemerintah Kabupaten Nganjuk (atau masuk ke ruangan server / Network Operation Center) harus menunjukkan identitasnya dan membuktikan bahwa dia adalah orang yang berhak mengakses database atau sistem tersebut. Hal ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan tanda pengenal, password, digital signature, dan biometrics. Untuk pelayanan kepada masyarakat, situs web Pemerintah Kabupaten Nganjuk harusdilengkapi dengan tanda bukti (certificate) bahwa dia adalah situs resmi dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan adanya tanda bukti ini maka pengguna dapat merasa aman bahwa dia memang mengakses situs Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Serangan terhadap mekanisme authentication antara lain adalah pemalsuan password, tanda pengenal, atau identitas lainnya. Sebagai contoh situs web “kilkbca.com” merupakan pemalsuan (penyaruan) situs “klikbca.com”. Situs palsu ini mengautentikisasi bahwa dia adalah situs dari Internet Banking BCA. Serangan lain adalah dengan menggunakan alamat komputer palsu (dikenal dengan istilah spoofing) atau bahkan dengan menggunakan alamat email palsu. Pengamanan dapat dilakukan dengan

menggunakan tanda pengenal, password, digital signature, dan biometrics.

C. Authentication

Aspek availability (ketersedian) menjamin bahwa data dan informasi harusdapat tersedia ketika dibutuhkan. Suatu sistem informasi akan tidak bermanfaat jika dia tidak dapat memberikan data ketika dibutuhkan. Serangan terhadap aspek ketersediaan dikenal dengan istilahDenial of Service (DoS) attack. Contoh dari DoS attack adalah membuat sistem atau server menjadi hang atau crash, jaringan dibanjiri oleh sampah (network flooding, exhaust network), atau aplikasi dibuat menjadi tidak berfungsi. Banyak software yang dapat diambil dari Internet yang dapat melakukan DoS attack tersebut. Bahkan saat ini metoda penyerangan telah meningkat dengan mendistribusikan “agen penyerang” ke beberapa (banyak) komputer sehingga ada istilah yang disebut Distributed DoS (DDoS) attack. Pada DDoS attack, target diserang oleh ratusan komputer pada saat yang bersamaan. Seringkali pemilik komputer yang digunakan untuk menyerang tidak tahu bahwa komputernya digunakan untuk menyerang orang lain. Ada juga serangan yang tidak saja dilakukan secara logika akan tetapi juga dapat dilakukan secara fisik, misalnya dengan merusak server, mencuri server, menghancurkan lokasi server, ataumemutuskan jaringan. Bencana alam (natural dissaster) seperti banjir juga dapat mengakibatkan hilangnya ketersediaan sistem informasi sehingga dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini. Demikian pula ketidaksengajaan (menghapus file penting dengan tidak sengaja), salah menggunakan program dapat juga dimasukkan dalam kelompok ini. Pengamanan dari aspek ketersediaan bervariasi dari pendeteksian adanya serangan (melalui Intrusion Detection System atau IDS), backup, audit trail, dissaster recovery, sampai kepada pembuatan mirror dari sistem ditempat lain.

D. Non-repudiation

Aspek non-repudiation mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menyangkal apabila diatelah melakukan sebuah transaksi. Contohnya adalah apabila seseorang yang mengirimkan email yang dilengkapi dengan tanda tangan digitalnya tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Implementasi dari non-repudiation adalah dengan menggunakan digital signature dan digital certificates. Pengguna menandatangani kegiatannya secara digital sehingga tidak dapat menampik bahwa dia telah melakukan kegiatan tersebut. Dalam implementasinya ada pihak ketiga yang menjadi saksi tentang keabsahan tanda tangan digital tersebut. Di samping dari segi pengamanan, harus juga ditunjang dengan peraturan- peraturan yang perlu diketahui oleh tim teknis, peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- Pembatasan kepada privacy pranata komputer, dimana Pemerintah

Kabupaten Nganjuk menganggap semua data-data pegawai yang tersimpan dalam PC atau komputer milik PemerintahKabupaten Nganjuk merupakan data-data dinas instansi dan melalui keputusan dari penanggung jawab keamanan TI di Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhak untuk melihat, membuka atau mengamankan data-data tersebut apabila dianggap mencurigakan dan dapat mengancam keamanan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Penggunaan fasilitas kerja, dimana Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan bahwa penggunaan fasilitas kerja yang disediakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk selayaknya digunakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada tim teknis TIK atau pranata komputer. Tidak dibenarkan menggunakannya sebagai sarana untuk melakukan tidakan pidana atau melakukan kegiatan atau upaya yang bertujuan mencemarkan nama baik Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

- Menyangkut pertukaran pesan dan data, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melarang tim teknis TIK atau pranata komputer untuk menyebarkan fitnah, berita yang meresahkan dan SARA melalui media apapun.
- Menyangkut pemberhentian atau Pengunduran diri sebagai tim teknis atau pranata komputer Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki prosedur dimana orang yang diberhentikan atau mengundurkan diri wajib mengembalikan ID card, kunci akses (bila memiliki) dan semua properti Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan tim teknis atau pranata komputer tersebut. Berita pemberitahuan mengenai pemberhentian atau pengunduran diri ini akan disampaikan oleh bagian kepegawaian kepada semua tim teknis atau pranata komputer, khususnya pada administrator. Untuk kemudian sistem administrator berkewajiban menghapus atau membekukan account yang dimiliki orang tersebut.

9.2 Pedoman dan Standar Infrastruktur Jaringan

Tabel 14. Pedoman dan Standar Infrastruktur jaringan

Arsitektur Jaringan	
PEDOMAN	• Buat backbone sebagai Wide Area Netwok (WAN) dari pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dapat mendukung pertukaran data lintas unit pelaksana. • Jaringan harus selalu dapat dipergunakan 7 hari dalam seminggu dan 24 jam dalam sehari. • Jaringan harus berbasiskan : umum (*common*), keterbukaan (*open*)dan protokolnya tidal dari sebuah vendor. • Akses dari pengguna sebaiknya jangan berdasarkan lokasi tetapi berdasarkan autorisasi dan autentifikasi pengguna. • Untuk unit pelaksana di bangun *Local Area Network*(LAN) dengan memikirkan perkembangan lalu lintas data dan ekspansi aplikasi di kemudian hari. • Pada server dibangun "*mission critical applications*" untuk meminimalisasi efek dari interupsi. Untuk mengatasi ketersediaan jaringan yang terus menerus harus diperhatikan kualitas perangkat keras seperti : network card, power supplies dan redundant hard disk. • Topologi di desain sebaiknya dengan menggunakan star pattern untuk mempermudah penambahan atau pengurangan perangkat komputer. • Pergunakan switch yang dapat di program (manageable).

STANDAR	• Standard dari LAN kabel adalah dengan kategori CAT 5,6,7 *Unshielded Twisted Pair* (UTP) yang dapat membawa data dengan kecepatan 10/100/1000 Mbps dan memenuhi standard IEEE. • Standard teknologi untuk protokol adalah TCP/IP yang merupakan open protokol dan menyediakan fasilitas akses ke internet • Teknologi untuk akses ke internet mempergunakan *Domain Name System* (DNS) dan IP-address.
Arsitektur Platform	
PEDOMAN	• Pakailah hardware dari vendor yang sama dengan sistem operasi yang sama pula, agar memudahkan pemeliharaan, memerlukan hanya satu orang saja untuk itu. • Pergunakan sistem operasi yang dapat menjalankan multi-tasking dan multi-threading.
STANDAR	• Pergunakan server hanya dengan teknologi 64 bit atau lebih
Arsitektur Sekuriti	
PEDOMAN	• Pelayanan infrastruktur keamanan sangatlah penting untuk sebuah organisasi agar dapat melakukan manajemen daerah secara elektronis. • Penaggalan sistem harus selalku akurat karena termasuk hal yang sangat penting untuk sistem keamanan, oleh karena itu harus dirawat dengan baik. • Jika digital signature dipergunakan, pergunakan Public Key / PrivateKey teknologi untuk autentikasi. • Autoritas dari seorang pengguna sekecil mungkin diberikan
STANDAR	• Pergunakan Public Key Certificates berbasiskan X.509. • Pergunakan untuk Web-based Application Secure Socket LayerVersion 4 (SSLV4.2.2) dengan client authentication dan sertifikat dariclient public key. • Pergunakan IP Protocol security extension (IPSec) untuk transfer data secara paket dari satu pengguna ke • pengguna lainnya.

Arsitektur Manajemen Sistem	
PEDOMAN	• Buatlah pelayanan bantuan untuk pengguna dan fungsi help desk untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum. • Buatlah bantuan online yang diterapkan pada intranet. • Inventarisasi dari spesifikasi hardware dan software harus dilaksanakan secara continue. • Implementasikan aplikasi hanya berdasarkan standard yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk • Pemakaian harddisk harus dimonitor dan diaudit setiap saat. • Backup data dilakukan secara kontinyu. • Performance suatu sistem, database atau aplikasi selalu di monitor agar dapat ditingkatkan dengan cara tuning.
STANDAR	• Pergunakan SNMP adalah suatu grup internet protokol untuk mengelola jaringan berbasis TCP/IP. • Pergunakan product Monitoring untuk memonitor aplikasi yang berjalan.

10. LAYANAN SPBE

Layanan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang membahas tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik didefinisikan sebagai keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE yang memiliki nilai manfaat. Penerapan dari layanan SPBE ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan yang ada pada instansi pemerintah dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Penyusunan arsitektur layanan SPBE dalam Buku ini, dilakukan dengan menggunakan metodologi yang telah disesuaikan dengan kondisi masa kini (eksisting) dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Tahapan penyusunan dari Arsitektur Layanan SPBE, antara lain:

10.1 Analisis Hasil Kesenjangan

Analisis hasil kesenjangan yang dilakukan berdasarkan perbedaan kondisi eksisting dengankondisi yang diinginkan. Analisis kondisi yang harus dicapai mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Analisisdidasari oleh kegiatan observasi, dokumen isian survey dan dokumen lain yang berkaitan. Hasil dari analisis kondisi eksisting terdapat pada Buku 1.

10.2 Identifikasi dan Analisis Usulan Layanan

Identifikasi layanan yang dilakukan di Buku 1 mendapatkan hasil kesenjangan layanan yang harus dipenuhi sesuai dengan PERMENPAN Nomor 59 Tahun 2020. Pada tahap ini diberikan usulan layanan yang belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Layanan yang harus dimiliki adalah Layanan Administrasi SPBE dan Layanan Publik SPBE.SPBE dan Layanan Publik SPBE. Layanan Administrasi SPBE adalah layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Layanan Administrasi SPBE yang harus dimiliki adalah:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Keuangan
4. Pengadaan Barang dan Jasa
5. Kepegawaian
6. Kearsipan
7. Pengelolaan Barang Milik Negara

8. Pengawasan
9. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
10. Kinerja Pegawai

Layanan Publik SPBE adalah layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik diPemerintah Kabupaten Nganjuk. Layanan publik SPBE yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan Layanan Publik
2. Data Terbuka
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
4. Publik Sektoral

Luaran pada tahap ini adalah usulan layanan yang masih dillakukan secara manual. Usulan ini akan direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan penerapan SPBE yang lebih baik.

11. ROADMAP PROGRAM PENGEMBANGAN TIK

Roadmap Program Pelaksanaan Pengembangan TIK untuk mendukung implemntasi SPBEdi kabupaten Nganjuk adalah disajikan sebagaimana pada table 7.1.

Tabel 15. Roadmap Pelaksanaan

Program Pembangunan SPBE

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
MISI 1 : Memperkuat Regulasi, Kebijakan dan Organisasi dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan e-gov secara optimal												
Penyusunan Regulasi, Standarisasi, Penganggaran untukmendukung pelaksanaan e- gov	Penyusunan Regulasi dan standar pelaksanaan e-Gov	27%	100%	Persiapan penyusunan SPBE jangka panjang 10 tahun	36	OPD						Diskominfo
		33%	100%	Penyusunan SK Bupati Implementasi danPengelolaan E-Gov di Seluruh OPD	33	OPD						Diskominfo

		27%	100%	Penyusunan & Pengesahan SPBE jangkapanjang 10 tahun	36	OPD						Diskominfo
		33%	100%	Penyusunan standar pelayanan implementasi SPBE pada OPD. Jumlahminimal yang dibutuhkan adalah 33 OPD (33 x 10).	33	OPD						Diskominfo

Pengangg aran untuk mendukung pelaksanaan e- gov	dan standar pelaksan aan e-Gov			(33 x 10).								
		33%	100%	Diseminasi dan pemaparan standar pelayanan implement asi E-Government pada OPD	33	OPD						Diskominfo
		27%	100%	Peningkatan standar pelayanan implementasiSPBE pada OPD	36	OPD						Diskominfo
		88%	100%	Pembuatan Peraturan untuk Sharing Data	6	OPD						Diskominfo
		63%	100%	Pembuatan Kebijakan Pemanfaatan IT	18	OPD						Diskominfo
		30%	100%	Penyusunan Dokumen Smart City	1	perbub						Diskominfo
		14%	100%	Pembuatan Peraturan terkait Kewenangan Pengelola	42	OPD						Diskominfo

				membatasi Penggunaan Jaringan								
		77%	100%	Penyusunan kebijakan, standar dan SOP implementasi E-Government terintegrasi OPD dan kecamatan. Jumlah minimal yang dibutuhkan adalah 33 OPD (33 x 10)	23%	11						Diskominfo

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
		77%	100%	Penyusunan standar dan SOP monitoring evaluasi, rencana tindak lanjut implementasi SPBE. Jumlah minimal yang dibutuhkan adalah 33 OPD (33x 10	23%	11						Diskominfo
		77%	100%	Diseminasi dan pemaparan standar dan SOPmonitoring evaluasi, rencana tindak lanjut implementasi SPBE.	23%	11						Diskominfo

	Penyusunan Kebijakan Anggaran pengembangan TIK dalam mendukung implementadi e-gov			Honor & Operasional implementasi SPBE.	23%	11						Semua OPD
		73%	100%	Pengadaan Biaya Rutin Pemeliharaan Aplikasi	13	OPD						Semua OPD
		36%	100%	Peningkatan Anggaran IT untuk OPD	35	OPD						Semua OPD
		53%	100%	Peningkatan Anggaran Peningkatan dan Pengembagan Jaringan	23	OPD						Semua OPD
		51%	100%	Peningkatan Anggaran IT dalam angaran internal OPD	24	OPD						Semua OPD
		18%	100%	Penyediaan Anggaran Untuk Peningkatankemampuan SDM IT	40	OPD						Semua OPD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengembangan e-Gov	Penyusunan Kebijakan Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan IT	26%	100%	Pengembangan organisasi struktural danfungsional di lingkungan OPD sesuai jenjang karir bidang TIK. Jumlahminimal yang dibutuhkan adalah 36 OPD (36	36	OPD						Semua OPD

				x 10)									
		26%	100%	Diseminasi dan pemaparan struktural danfungsional jenjang karir bidang TIK	36	OPD							Semua OPD

MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan Kuantitas SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menegelola e-Gov													
Peningkatan kemampuan dan penambahan Tenaga IT	Penambahan Tenaga IT di Tiap OPD Melalui rekruitmen ASN dan non-ASN	57%	100%	Seleksi dan rekrutmen staff dengan latar belakang pendidikan TIK tahap 1. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 10 orang adalah 10 org	10	OPD							Semua OPD

		84%	100%	Pengadaan Tenaga Pengelola Jaringan	8	OPD							Semua OPD
		0%	100%	1 Kelurahan 1 Tenaga IT									Kelurahan
		20%	100%	Penambahan Tenaga Fungsional bidang IT	39	OPD							Semua OPD

	Peningkatan Kompetensi Tenaga IT	0%	100%	Pengiriman SDM TI Dinas Kominfo untuk mengikuti pelatihan kompetensi bidang pemrograman dan jaringan komputer. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 10 org	10	OPD						Diskominfo

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
	melaui sertifikasi dan pelatihan	0%	100%	Pemetaan kompetensi pemeliharaan jaringan, sistem informasi dan distribusi SDM TI di OPD dan kecamatan. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 7 org	7	OPD						Diskominfo

		0%	100%	Penyelenggraan pelatihan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi bagi SDM TI diOPD dan kecamatan. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 2 adalah 7 org	7	OPD						Diskominfo
		16%	100%	Pengadaan Pelatihan IT tiap OPD	41	OPD						Semua OPD
		6%	100%	Peningkatan Jumlah Staft TI yang Bersertifikasi	46	OPD						Semua OPD

		38%	100%	Optimalisasi PNS Berpendidikan IT sebagai Tenaga IT	13	OPD							Semua OPD
Peningkatan Pemahaman SDM dalam Implementasi e-Gov	Pelaksanaan Sosialisasi e- Gov di seluruh OPD secara rutin	91%	100%	Melakukan Sosialisasi Penggunaan e-Gov tingkat OPD	4	OPD							Semua OPD
MISI 3 : Mengembangakan Imfrastruktur SPBE dalam rangka memperkuat jejaring interkoneksi antar OPD dan Kecamatan													
	Pengembangan Infrastruktur	83%	100%	Pengadaan infrastruktur LAN dan jaringan untuk koneksi antar OPD sebanyak 8 OPD	8	OPD							Seluruh OPD

Peningkatan Jaringan Pendukung e-Gov	Jaringan Pendukung e-Gov	69%	100%	Peningkatan bandwidth internet 15 OPD,biaya 15	15	OPD						Seluruh OPD
	Pemeliharaan	0%	100%	Pemeliharaan jaringan, sistem SPBE seluruh OPD	49	OPD						Seluruh OPD
		0%	100%	Pemeliharaan jaringan, sistem SPBE OPD, dan website	49	OPD						Seluruh OPD

	Jaringan Pendukung e-Gov			profil kecamatan								
		0%	100%	Pemeliharaan jaringan, sistem SPBE OPD, website profil kecamatan dan website profil desa	49	OPD						Seluruh OPD
		0%	100%	Pembayaran domain dan hosting untuk 37 website	49	OPD						Seluruh OPD
		88%	100%	Mengoptimalkan pemeliharaan Jaringan ke pihak ketiga	6	OPD						Seluruh OPD
Pengadaan Perangkat Keras		94%	100%	Pengadaan komputer desktop dan laptoptahap 1 sebanyak 23 unit.	23	komputer						Seluruh OPD

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
di tiap OPD yang Up to date untuk mengingkatkan pelayanan e- Gov	Pengembang an Perangkat Keras	10%	100%	Pengadaan printer scanner tahap 1 sebanyak 19 unit	19	Printer						Seluruh OPD
		6%	51%	Penyediaan Komputer Umum Pada Dinas diBidang Pelayanan Umum								OPD Pelayanan Umum
		97%	100%	Pengadaan Perangkat Keras								
				- LCD dan Screen	68	Unit						OPD
				- Switch	22	Unit						OPD
				- Tower	11	Unit						OPD
				- UPS	8	Unit						OPD

				- Server	1	Unit							Diskominfo
				- Drone	6	Unit							OPD (teknis perencanaan)

Meningkatkan Pengamanan Data dan Informasi	Pembangunan Ruang Data Centre	22%	100%	Pengadaan Government Data Center (GDC)untuk backup data dan manajemen dokumen di Dinas Kominfoterhubung ke OPD tahap 1, biaya 14 OPD	14	OPD							OPD
	Pembangun a n Sistem Pengamanan Data	0%	100%	Pengadaan Disaster Recovery Plan yang terhubung ke GDC tahap 1.	14	OPD							Seluruh OPD
		69%	100%	Penanganan Permasalahan Permukiman Blank Spot di :	5.095	Ha							Diskominfo
		97%	100%	- Bagor	21	Ha							Diskominfo

Membuka keterisolirasi wilayah dalam mendukung pengembangan e-Gov	Program Penanganan Blank Spot	47%	100%	- Baron	479	Ha							Diskominfo
		92%	100%	- Berbek	59	Ha							Diskominfo
		94%	100%	- Gondang	46	Ha							Diskominfo
		6%	100%	- Jatikalen	270	Ha							Diskominfo
		9%	100%	- Kertosono	813	Ha							Diskominfo
		16%	100%	- Lengkong	411	Ha							Diskominfo
		96%	100%	- Loceret	51	Ha							Diskominfo

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
		99%	100%	- Nganjuk	11	Ha						Diskominfo
		93%	100%	- Ngetos	18	Ha						Diskominfo
		0%	100%	- Ngluyu	213	Ha						Diskominfo
		26%	100%	- Ngronggot	1.076	Ha						Diskominfo
		85%	100%	- Pace	151	Ha						Diskominfo
		5%	100%	- Patianrowo	549	Ha						Diskominfo
		75%	100%	- Prambon	306	Ha						Diskominfo
		90%	100%	- Rejoso	135	Ha						Diskominfo
		73%	100%	- Sawahan	51	Ha						Diskominfo
		98%	100%	- Sukomoro	12	Ha						Diskominfo
		86%	100%	- Tanjunganom	268	Ha						Diskominfo

		64%	100%	- Wilangan	154	Ha						Diskominfo
DEVELOPMENTAL NEED												

Penyediaan fasilitas internet publik untuk keterbukaan informasi global	Pembanguna n Internet Untuk Umum	0%	100%	Wifi di area publik								
		0%	100%	- Pengadaan Wi-Fi di Taman Kecamatan	20	Taman						Diskominfo
		0%	100%	- Pengadaan Wifi untuk umum di BalaiDesa/Kelurahan Percontohan	100	Desa & Kel.						Kantor Desa & Kecamatan
		0%	100%	- Pengadan Wi-Fi untuk umum di Area Masjid percontohan dengan pembatasan waktu	100	Masjid						Diskominfo

Peningkatan Pelayanan Umum Melalui Pengintegrasian Aplikasi e-Gov	Pengembangan Arsitektur e-Gov	65%	100%	Pembuatan aplikasi terintegrasi G2G, G2Bdan G2C E- Government tahap 1 : administrasi dan manajemen umum, keuangan, pembangunan, layanan masyarakat, kepegeawaian dan legislasi	9	klaster aplikasi							Semua OPD
		0%	100%	Diseminasi dan workshop penggunaan paketaplikasi terintegrasi G2G, G2B dan G2C SPBE tahap 1	49	OPD							Semua OPD

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
		24%	100%	Pembuatan Baru Website Dinas :	41	OPD						
		24%	100%	- Pengadaan website tahap 1 sebanyak 19 website dari 37 website OPD yang ditargetkan	19	OPD						Semua OPD
		0%	100%	- Badan Pendapatan Daerah	1	Website						BPKAD
		0%	100%	- Badan Kepegawaian Daerah	1	Website						BKD

Pengembangan aplikasi dan sisteminformasi berdasarkan klasifikasi untuk pelaksana an e-gov	Pengembang an aplikasi dan sistem informasi G2G			Perbaikan Website Resmi Dinas/OPD :								
		60%	100%	- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (nganjukkab.go.id)	1	Website						Sekda
		60%	100%	- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah (dprdnganjukkab.go.id)	1	Website						Sekwan
		60%	100%	- Inspektorat Daerah (inspektorat.nganjukkab.go.id)	1	Websie						Inspektorat
		60%	100%	- Sekretariat Daerah	1	Website						Sekda
		60%	100%	- Asisten Administrasi Umum	1	Website						Sekda
				Pembuatan Aplikasi Baru :								
		29%	100%	- Pembuatan Sistem Informasi Pertukaran	35	OPD						Semua OPD

				Data									
		49%	100%	- Pembuatan Sistem Backup Database	25	OPD							Semua OPD
		10%	100%	- Pengadaaan Sitem Manajemen Dokumen	44	OPD							Semua OPD
		0%	100%	- e-Office (e-surat)	1	Aplikasi							Semua OPD
		0%	100%	- Layanan Arsip Berbasis Online	1	Aplikasi							Dinarspus
		0%	100%	- Mutasi online	1	Aplikasi							BKD
		0%	100%	- Aplikasi Monitoring Dana Desa	1	Aplikasi							Dinas Pemb.Masy. desa.
		0%	100%	- Sistem Informasi Kas Daerah	1	Aplikasi							BPKAD

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
		0%	100%	- Monitoring Pembangunan Infrastruktur Berbasis Online	1	Aplikasi						Dinas PUPR
		0%	100%	- e-musrembang	1	Aplikasi						Bappeda
		0%	100%	- e-monev	1	Aplikasi						Semua OPD
		0%	100%	Pembuatan Baru Website Dinas :								

		0%	100%	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	Website						Dinas Industri & Perdagangan

	Pengembangan aplikasi dan sistem informasi G2B											
		60%	100%	Perbaikan Website Resmi Dinas/OPD								
		60%	100%	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dpmptsp.nganjukkab.go.id)	1	Website						DPMPTSP
		60%	100%	- Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UsahaMikro (nganjukkab.go.id)	2	Website						Dinakerkop & UKM
				Pembuatan Aplikasi Baru (Developmental Need) :								

		0%	100%	- e-Commerce Produk UMKM dan ProdukLokal Nganjuk	1	Aplikasi						Dinakerkop & UKM
		0%	100%	- e-Farming	1	Aplikasi						Dinas Pertanian
		0%	100%	- e-Investasi Industry	1	Aplikasi						Dinas Industri & Perdagangan
		0%	100%	- e-Tourism	1	Aplikasi						Dinas Pariwisata
		0%	100%	- Kalender Event Pariwisata Berbasis Mobile	1	Aplikasi						Dinas pariwisata

		0%	100%	- Simtaru (Sitem Informasi Penataan Ruang)	1	Aplikasi						Bappeda
		0%	100%	- Aplikasi Bursa Kerja Online	1	Aplikasi						Dinakerkop & UKM

		0%	100%	- SIM Pangan Terpadu	1	Aplikasi						Dinas Ketahanan Pangan

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
		0%	100%	- Ijin Usaha Mikro Berbasis Online	1	Aplikasi						Dinakerkop & UKM
		10%	100%	Pembuatan Sosmed Dinas	44	OPD						Semua OPD
				Pembuatan Baru Website Dinas :								

		0%	100%	- Dinas Pendidikan	1	Website						Dinas Pendidikan
		0%	100%	- Dinas Kesehatann	1	Website						Dinkes
		0%	100%	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Website						Dinsos

	Pengembangan aplikasi dan sistem informasi G2C	0%	100%	- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Website						DP2KB
		0%	100%	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Website						Dispendukcapil
		0%	100%	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Website						Dinas Pemb. Masy. Desa
		0%	100%	- Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Website						Diskominfo
		0%	100%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	1	Website						Dinas PUPR

				Ruang								
		0%	100%	- Dinas Perhubungan	1	Website						Dinas Perhubungan
		0%	100%	- Dinas Perumahan Rakyat, KawasanPermukiman dan Pertanahan	1	Website						DPRKP & Pertanahan
		0%	100%	- Dinas Lingkungan Hidup	1	Websi te						Dinas LH
		0%	100%	- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1	Websi te						Dinas Ketahanan

												Pangan
		0%	100%	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	Websi te						DAPD
		0%	100%	- Satuan Polisi Pamong Praja	1	Websi te						Dinas SatpolPP

		0%	100%	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Website						Bappeda
		0%	100%	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	Website						BPKAD

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
		0%	100%	- 20 Kecamatan	1	Website						Kecamatan
				Perbaikan Website Resmi Dinas/OPD								

		60%	100%	- Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan (nganjukkab.go.id)	1	Website							Dinas Pariwisata
		60%	100%	- Dinas Pertanian (pertanian@nganjukkab.go.id)	1	Website							Dinas Pertanian
		60%	100%	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd_kabnganjukk.go.id)	1	Website							BPBD
		60%	100%	- Kesbangpol (kesbang.nganjukkab.go.id)	1	Website							Kesbangpol
		60%	100%	- RSUD NGANJUK (rsudnganjuk.co.id)	1	Website							RSUD
				Pembuatan Aplikasi Baru									
		16%	100%	- Pengembangan Aplikasi yang interaktif	41	OPD							Semua OPD
		12%	100%	- Pengembangan Aplikasi yang memiliki fasilitas transaksi	43	OPD							Semua OPD
		0%	100%	- Aplikasi Sistem Manajemen Administrasi	1	Aplikasi							Kelurahan/ Desa

				Kelurahan									
		0%	100%	- Aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi terpadu	1	Aplikasi							Dispendukcapil
		0%	100%	- Pengembangan Website dengan ModalGIS dan Aplikasi berbasis Web	1	Aplikasi							PUPR, Perhubungan, Bappeda
		0%	100%	- WebGIS Reklame	1	Aplikasi							Dinas LH
		0%	100%	- Pembuatan Web di Tingkat Kelurahan	1	Aplikasi							Kelurahan/ Desa
		0%	100%	- Layanan Konsultasi Kesehatann Online	1	Aplikasi							Dinas Kesehatan
		0%	100%	- Informasi Ketersediaan Tempat TidurRumah Sakit dan Puskesmas Berbasis Mobile	1	Aplikasi							Dinas Kesehatan
		0%	100%	- Interkoneksi Rujukan Pasien Puskesmas Dengan Rumah Sakit	1	Aplikasi							Dinas Kesehatan

Strategi	Arah Kebijakan	Capaian kinerja		Program Pembangunan	Kuantitas Penanganan		Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2018)	Kondisi akhir (2023)		Jumlah	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	
		0%	100%	- Pendaftaran Antrian Puskesmas Secara On Line	1	Aplikasi						Dinas Kesehatan
		0%	100%	- Layanan Perpustakaan Berbasis Online	1	Aplikasi						DAPD
		0%	100%	- Sistem Informasi Pengembangan Destinasi Budaya Berbasis Android	1	Aplikasi						Dinas Pariwisata
		0%	100%	- Penerimaan Peserta Didik Berbasis Mobile	1	Aplikasi						Dinas Pendidikan

		0%	100%	- Siaga Pemadam Kebakaran Berbasis Mobile	1	Aplikasi							BPBD
		0%	100%	- Pembayaran Pajak Online	1	Aplikasi							DPKAD
		0%	100%	- Jamkemas Online	1	Aplikasi							Dinas kesehatan

		0%	100%	- Layanan Kependudukan Online	1	Aplikasi							Dispendukcapil
		0%	100%	- Layanan Imigrasi Online	1	Aplikasi							Dispendukcapil
		0%	100%	- Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin	1	Aplikasi							Dinsos
		0%	100%	- Pembayaran PBB online	1	Aplikasi							DPKAD

Realisasi Pembangunan GDC sebagai Pusat Distribusi Informasi	Pembanguna n GDC sebagai Pusat Distribusi Informasi	**0**	**100**	Pembuatan aplikasi Government Data Center(GDC) Pemerintah Kabupaten Nganjuk bagi OPD dan kecamatan tahap 1	16	OPD						Semua OPD
Sinkronisasi Programe-Gov terhadap rencana strategis masing-masing OPD	Integrasi Master Plan TIK dengan Master Plan Smart City	0%	100%	Sinkronisasi Program Roadmap TIK denganProgram Smart City	1	Kegiatan						Diskominfo

	Sinkronisasi Program TIK	0%	30%	Sinkronisasi Roadmap TIK SPBE danRencara Strategis di OPD tahap 1	16	OPD						Diskominfo
Strategi	**Arah Kebijakan**	**Capaian kinerja**		**Program Pembangunan**	**Kuantitas Penanganan**		**Tahun Pelaksanaan**					**OPD Penanggung jawab**
		Kondisi Awal (2018)	**Kondisi akhir (2023)**		**Jumlah**	**Satuan**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
	dengan Rencana Strategis daerah	0%	30%	Sinkronisasi Roadmap TIK SPBE dan Rencara Strategis di kecamatan tahap 1	16	OPD						Diskominfo
		0%	30%	Sinkronisasi Roadmap TIK SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD)	16	OPD						Diskominfo

BAB 3 MANAJEMEN SPBE

Manajemen SPBE fokus pada peningkatan operasional, meliputi proses plan, build, run, dan monitor pada operasional sistem dan layanan yang sesuai dengan arahan para dewan direksi.Terdiri dari 8 unsur, yaitu:

1. Manajemen Risiko,
2. Manajemen Data,
3. Manajemen Aset TIK,
4. Manajemen Keamanan Informasi,
5. Manajemen Layanan,
6. Manajemen SDM SPBE,
7. Manajemen Perubahan,
8. Manajemen Pengetahuan

A. Kondisi Eksisting Manajemen SPBE Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk belum memiliki kebijakan ataupun standar khusus untuk manajemen SPBE. Kebijakan dan manajemen SPBE diperlukan untuk memastikan penerapan SPBE menjadi efektif,efisien, dan berkesinambungan, serta memiliki layanan SPBE yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, manajemen SPBE terdiri dari 8 (delapan) manajemenyang dijelaskan dibawah ini:

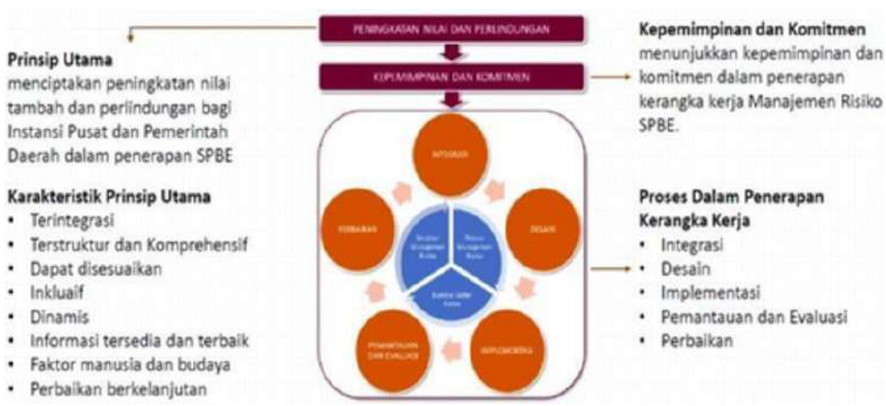
Tabel 16. Lingkup Manajemen SPBE

	Lingkup	Referensi
a.	Manajemen Risiko	PermenPANRB 05/2020, ISO 31000, 27005
b.	ManajemenKeamanan Informasi	ISO 27001, Indeks KAMI
c.	Manajemen Data	Perpres 39/2019,SNI 8799:2019, ISO 11179
d.	Manajemen Aset TIK	ISO 55001

e.	Manajemen SDM	PermenPANRB 38/2017,SFIA Framework
f.	Manajemen Pengetahuan	ISO 30401
g.	Manajemen Perubahan	COBIT 2019
h.	Manajemen Layanan	ITIL

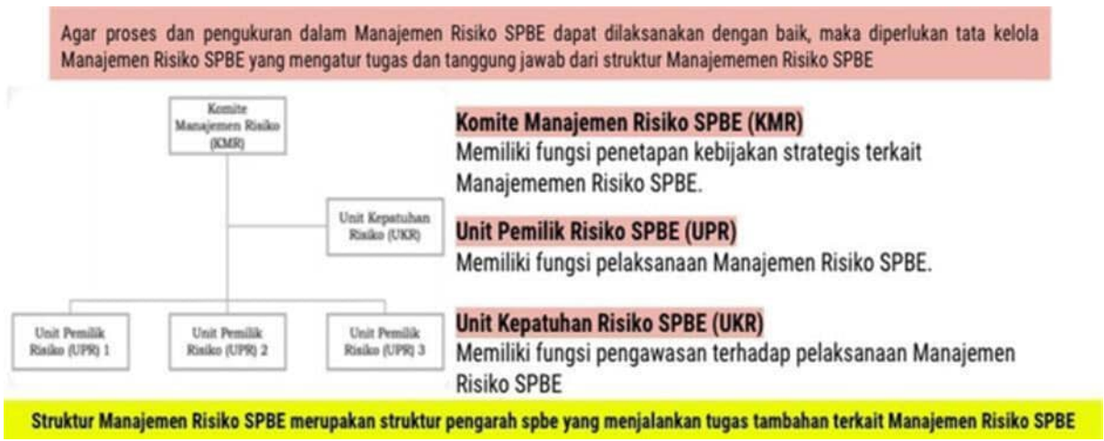
1. Manajemen risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin minimalnya risiko penyelenggaraan TIK pada Pemkab Nganjuk untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE, baik dari segi keuangan maupun operasioanal. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risikodalam SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi daerah dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan IPPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur daerah. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.



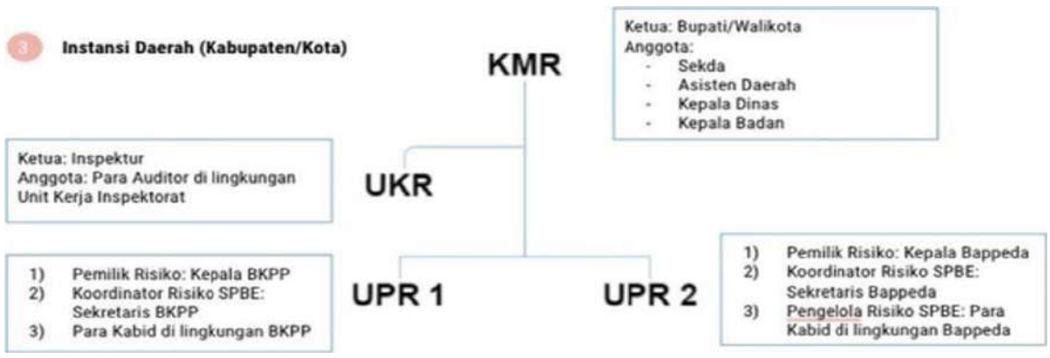
Gambar 3.1 Manajemen Risiko SPBE (sumber: paparan kemenpan-rb)

Dalam menerapkan Manajemen Risiko SPBE, Pemkab. Nganjuk perlu menyusun struktur manajemen risiko SPBE sebagaimana yang telah tertuang dalam Permenpan RB No. 05/2020 dandijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Pedoman Struktur Manajemen Risiko SPBE Daerah (sumber: paparan Kemenpan-RB)

Mengacu pada gambar diatas maka susunan untuk struktur manajemen risiko SPBE di KabupatenNganjuk dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Struktur Manajemen Risiko SPBE Kab. Nganjuk

Merujuk pada best practices yang ada dalam PermenpanRB 05/2020 terdapat beberapa aktivitasyang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya menajemen SPBE.



Gambar 3.4 Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upayamenajemen SPBE

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun Kajian dan SOP terkait manajemen risikodengan lingkup sebagai berikut.

1. SOP Manajemen Risiko SPBE oleh setiap OPD
2. Kajian Manajemen Risiko

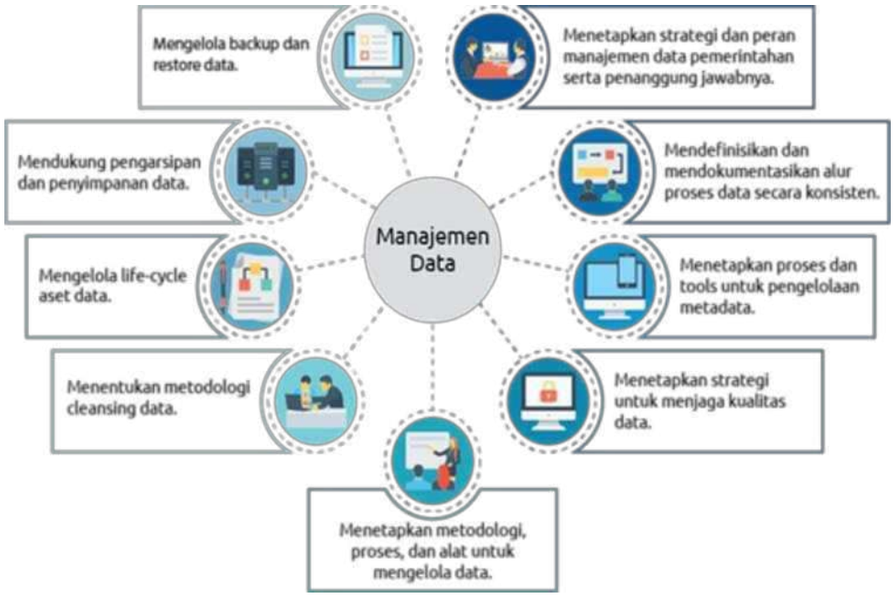
Besarnya risiko yang diterima oleh setiap penyelenggara TIK akan berdampak pada tinggi rendahnya kualitas efisiensi implementasi TIK. Berdasarkan hasil survey 48 PD, Bagian keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan secara rutin melakukan backup data untuk mengantisipasi data hilang. Kecamatan Jatikalen melakukan pergantian username dan password jika menemukan adanya publikasi pada website yang tidak sesuai fakta. Namun, proses atau kegiatan yang ada belum mengacu pada sebuah standar tertentu. Maka bisa disimpulkan bahwa seluruh PD belum menerapkan manajemen risiko berdasarkan standar/framework tertentu.

2. Manajemen Data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin kualitas data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses dan dibagai pakai antar instansi atau lembagayang membutuhkan dan dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan yaitu:

a. Proses Pengelolaan arsitektur data
b. Data Induk
c. Data Referensi
d. Basis data
e. Kualitas Data
f. Interoperabilitas data

Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE dan pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.



Gambar 3.5 Manajemen Data

1. Menetapkan strategi dan peran manajemen data pemerintahan serta penanggung jawabnya.

Membentuk pertemuan Forum Satu Data guna menetapkan cara mengelola dan meningkatkan aset berupa data-data pemerintahan yang sejalan dengan arah pemerintahan. Mengkomunikasikan strategi pengelolaan data di seluruh OPD. Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing OPD terhadap pengelolaan data untuk memastikan bahwa data pemerintahan dikelola dengan baik. Strategi manajemen data ini perlu diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Mendefinisikan dan mendokumentasikan alur proses data secara konsisten.

Membuat alur diagram untuk pemrosesan data mulai dari produksi data, *cleansing* data, persyaratan pemanfaatan data, dan pengarsipan data. Selanjutnya menyetujui dan melaksanakan alur pemanfaatan data tersebut di seluruh OPD.

3. Menetapkan proses dan tools untuk pengelolaan metadata.

Menetapkan proses dan tools untuk menentukan metadata tentang data data pemerintahan, membina dan mendukung *sharing* data, memastikan penggunaan data yang sesuai dan valid, meningkatkan adaptasi untuk perubahan bisnis proses.

4. Menetapkan strategi untuk menjaga kualitas data.

Menetapkan strategi yang terpadu untuk OPD guna mempertahankan kualitas data pemerintahan dari sisi (kompleksitas, integritas, akurasi, kelengkapan, validitas dan ketepatan waktu).

5. Menetapkan metodologi, proses, dan alat untuk mengelola data.

Menerapkan metodologi, proses, dan alat untuk

standarisasi atribut data melalui template yang dapat diterapkan di beberapa tempat penyimpanan data (*database*).

6. Menentukan metodologi *cleansing data.*

Menetapkan mekanisme proses dan metode untuk memvalidasi dan memperbaiki kualitas data yang sesuai dengan bisnis prosesnya.

7. Mengelola *life-cycle* aset data.

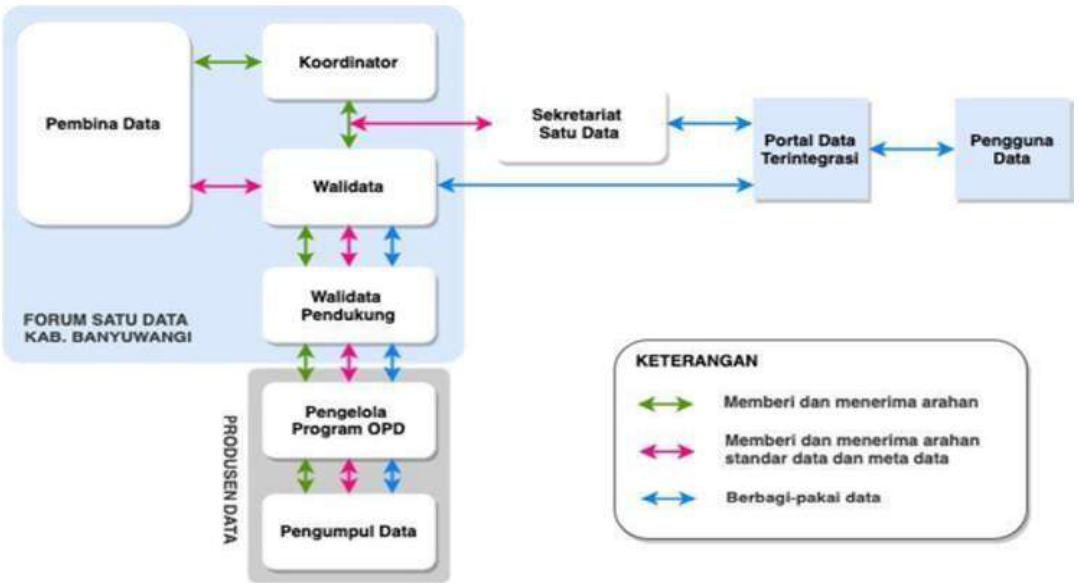
Memastikan bahwa OPD memahami, memetakan, menginventarisir, dan mengontrol aliran datanya melalui siklus proses bisnis mulai dari produksi data, akuisisi data hingga penyimpanan dan pengarsipan.

8. Mendukung pengarsipan dan penyimpanan data.

Pastikan bahwa data-data pemerintahan disimpan dengan baik dan wali data perlu menetapkan retensi atas data tersebut untuk menjamin ketersediaan data historis.

9. Mengelola *backup* dan *restore* data.

Melakukan backup secara berkala terhadap data digital dan melakukan restore ketika terjadi kerusakan data.Mengacu pada Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, dalam Penerapan Manajemen Data Kab. Nganjuk perlu menyusun struktur forum satu data seperti berikut:



Gambar 3.6 Forum Satu Data

Koordinator	Sekretaris Daerah
Pembina Data	Bappeda dan BPS
Walidata	Diskominfosandi
Walidata Pendukung	Masing-masing OPD (Bag. Program)
Produsen Data	Masing-masing OPD (Seluruh Bidang)

Tugas Pembina Data Tingkat Daerah:

1. Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah;
2. Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah;
3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas;

dan

5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Produsen Data Tingkat Daerah:

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
3. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
4. Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala Dinasmengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
5. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
6. Menyampaikan Data dan Metadata kepada produsen data.

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOPterkait manajemen data dengan lingkup sebagai berikut:

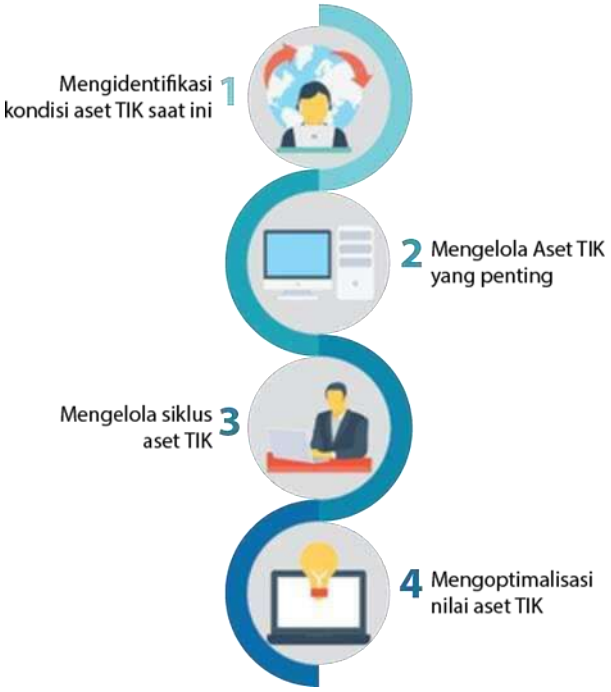
1. Arsitektur Data yang berisi kamus data dan kewenangan wali data
2. SOP Validasi dan verifikasi data sebelum masuk ke data warehouse
3. SOP Pengumpulan data
4. SOP Penyebarluasan data

5. SOP Pemanfaatan data
6. SOP Penentuan walidata dan produsen data
7. SOP Pembuatan dan perubahan kamus data metadata

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, Bagian keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan, Badan pendapatan daerah, badan pengelola keuangan dan aset daerah, danDinas komunikasi dan informasi melakukan back-up data secara berkala. Namun demikiankegiatan tersebut belum mengacu pada standar tertentu. Maka seluruh PD belum menerapkan manajemen data berdasarkan standra/framework tertentu.

3. Manajemen aset TI

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 46 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasidan komunikasi dalam SPBE Manajemen aset TI bertujuan untuk memberikan validitas terhadap inventaris TI danmendukung kualitas layanan TIK di Pemkab. Nganjuk. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan
perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.



Gambar 3.6 Manajemen Aset TIK

1. Mengidentifikasi kondisi aset TIK saat ini

Mencatat seluruh aset TIK (software & hardware) beserta kondisi dan life-time nya, untuk software berbayar pastikan lisensinya terbayar.

2. Mengelola Aset TIK yang penting

Memastikan aset TIK selalu tersedia dan dapat diandalkan untuk dapat digunakan dalam menunjang operasional SPBE.

3. Mengelola siklus aset TIK

Mengelola aset mulai dari pengadaan hingga pembuangan dalam arti ketika sudah habis masa pakainya (lifetime) perlu dilakukan pembaharuan aset. Pastikan aset digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik sampai akhir lifetime nya.

4. Mengoptimalisasi nilai aset TIK

Secara berkala meninjau aset secara menyeluruh untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk mengoptimalkan aset sejalan dengan kebutuhan

bisnis SPBE.

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen AsetTIK dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pembuatan dan perubahan pengkodean Aset TIK
2. SOP Inventarisasi & konfigurasi Aset TIK
3. SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Aset TIK
4. SOP Penghentian dan Pembuangan Aset TIK

Berdasarkan hasil survey, seluruh PD belum menerapkan manajemen aset TI berdasarkanstandar/framework tertentu.

4. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin bahwa data dan informasi yag dimiliki oleh Pemkab. Nganjuk dapat dibagi pakai sesuai kebutuhan dan tidak disalah gunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat mela,kukan konsultasi dengan Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber yaitu BSSN, Keamanan SPBE Pemkab Nganjuk akan menggunakan standar **ISO 27001:2013** dan **Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019** tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.



Gambar 3.7 Manajemen Keamanan Informasi

Dalam SPBE perlu menetapkan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (Information Security Management System / ISMS) yang menyediakan pendekatan standar, formal dan berkelanjutan untuk manajemen keamanan informasi, memungkinkan teknologi yang aman dan proses bisnis yang selaras dengan persyaratan tugas pekerjaan.



Gambar 3.8 Keamanan SPBE

Secara umum terdapat empat fokus dalam keamanan SPBE yaitu:

1. Keamanan Data / Informasi
2. Keamanan Aplikasi
3. Keamanan Jaringan
4. Keamanan Infrastruktur

Mengacu pada *best practices* dalam COBIT 2019, Berikut aktivitas- aktivitas yang perlu dilakukandalam manajemen keamanan informasi yaitu.

1. Menentukan ruang lingkup dan batas-batas manajemen keamanan informasi dalamhal karakteristik organisasi, lokasi, aset dan teknologi.
2. Menetapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan kebijakan instansi dankonteks dimana instansi beroperasi.
3. Menyelaraskan manajemen keamanan informasi dengan pendekatan organisasionalsecara keseluruhan pada manajemen keamanan.
4. Mendapatkan otorisasi dari pejabat struktural untuk menerapkan dan mengoperasikanatau mengubah manajemen keamanan informasi.
5. Mempersiapkan dan memelihara pernyataan penerapan yang menggambarkan ruang lingkup manajemen keamanan informasi.
6. Menetapkan serta mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pengelolakeamanan informasi.
7. Mengkomunikasikan pendekatan manajemen keamanan informasi.

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen keamananinformasi dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Akses Ruang Server

2. SOP Backup dan Restore Data
3. SOP Hak Akses TIK
4. SOP Penanganan Gangguan TIK
5. SOP Pengajuan Jaringan Baru
6. SOP Pengembangan Sistem Informasi
7. SOP Penitipan dan Pengembalian Server
8. SOP Evaluasi Keamanan SPBE

Berdasarkan hasil survye, sebagian besar PD telah menginstal antivirus pada komputer yang adaserta memiliki username dan password tersendiri untuk beberapa aplikasi yang digunakan. Namundemikian seluruh PD belum menerapkan manajemen keamanan informasi berdasarkan standar/framework tertentu

5. Manajemen layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 95 Tahun2018 Pasal 46 ayat (ll huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Manajemen layanan SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksudpada ayat (21) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan

dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang komunikasi dan informatika.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen layanan SBE di Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka setiap Perangkat Daerah menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang pelaksana atau membentuk tim untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligusService Desk Tier I. Dinas membentuk tim sebagai Service Desk Tter 2. Seruice Desk Tier I bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah. Dalam hal Seruice Desk Trer 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah maka Service Desk Trer I menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk Tter 2. Seruice Desk Tier 2 bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tter I. Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara ServiceDesk Tier I di masing-masing Perangkat Daerah dengan Service Desk Tiler 2 di Dinas. Dalam pelaksanaan manajemen l,ayanan SPBE, Perangftat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas. Mengacu pada best practices yang terdapat dalam pedoman ITIL v.4, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan seperti:



Gambar 3.9 Manajemen Layanan

1. Mengelola Gangguan dengan menyediakan platform helpdeskTIK disertai dengan ticketing dan monitoring SLA.
2. Melakukan Pemeliharaan Aplikasi dan Infrastruktur TIK secara berkala dan sesuaidengan prioritas risiko.
3. Berpedoman pada metodologi baku seperti ITIL.v4 terkait standar manajemenlayanan IT.

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemenperubahan dengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Pengajuan layanan (Helpdesk)
2. Audit TIK



Gambar 3.10 Lingkup Audit TIK (sumber: Paparan Kemenpan-RB)

Audit TIK merupakan Evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor teknologi terhadap aset teknologi dalam rangka memberikan nilai tambah (manfaat) kepadapihak yang diaudit atau pemilik

kepentingan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a) Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;

b) Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;

c) Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan

d) Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam audit teknologi informasi yaitu :

1. Audit infrastruktur SPBE, merujuk pada Perpres 95/2018 pasal 55 disebutkan:

♦ Infrastruktur SPBE Nasional diaudit setiap tahun oleh BPPT;

♦ Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diaudit setiap dua tahunoleh lembaga audit TIK atau perusahaan audit TIK;

♦ Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.

2. Audit Aplikasi SPBE dimana Aplikasi umum diaudit setiap tahun oleh BPPT; Aplikasikhusus diaudit setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK; Koordinasi dengan Kementerian Kominfo.

3. Audit Keamanan Informasi dimana Audit keamanan pada infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum dilakukan setiap tahun oleh BSSN; Audit keamanan pada infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemda serta Aplikasi Khusus dilakukan setiap dua tahun oleh Lembaga Audit TIK atau perusahaan audit TIK;.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Audit TIK dijabarkan sebagai berikut ini.

1. Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi.
2. Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi.
3. Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi.
4. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi.
5. Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi.
6. Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi.
7. Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi.
8. Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi.
9. Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi.
10. Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit TeknologiInformasi.
11. Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi.
12. Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi.
13. Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.
14. Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi.

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas layananPemkab. Nganjuk telah sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku ketika dipenuhimelalui sistem. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, bberapa dinas telah memilikiSOP layanan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yakni belum menyeluruh. Selain itu pengelolaan layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum mengacu pada standar tertentu. Sehingga disimpulkan bahwa seluruh PD belum menerapkan manajemen layanan

SPBE berdasarkan standar/framework tertentu.

.

6. Manajemen SDM

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 46 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen SDM bertujuan untuk menjamin kompetensi tenaga TI dan kemampuan tenaga kerja saat implementasi TIK di seluruh PD Pemkab. Nganjuk. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

Mengacu pada Permen PANRB 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan beberapa aktivitas berikut ini:

1. Perencanaan aparatur sipil negara
2. Pengadaan aparatur sipil negara
3. Pengembangan karir aparatur sipil negara
4. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara
5. Penempatan aparatur sipil negara
6. Promosi dan/atau mutasi aparatur sipil negara
7. Uji kompetensi aparatur sipil negara
8. Sistem informasi manajemen aparatur sipil negara
9. Kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil negara.



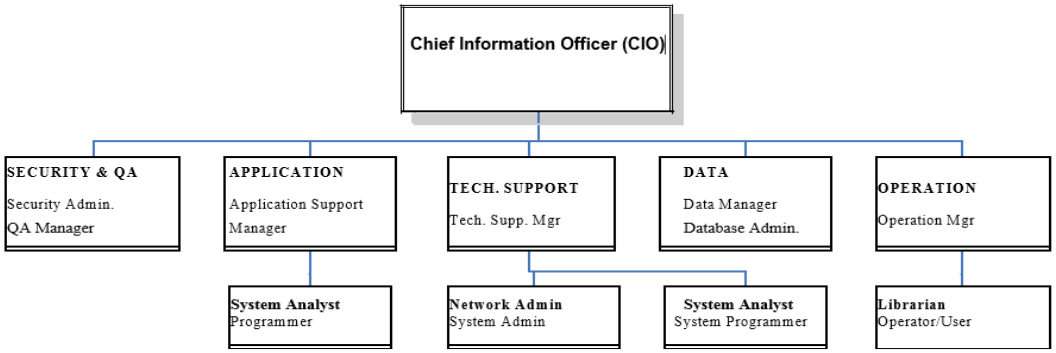
Gambar 3.11 Manajemen SDM

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen SDMdengan lingkup sebagai berikut:

1. SOP Permintaan Kebutuhan SDM TIK OPD
2. SOP Pengadaan & Pengelolaan SDM TIK non ASN
3. SOP Permintaan kebutuhan training, sertifikasi & peningkatan kompetensi SDM TIK

Berdasarkan hasil survye, Asistem Adminstrasi Umum, Bagian keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan mulai merekrut pekerja yang memiliki keahlian dibidang TI,Dinas perindustrian dan pedagangan menunjuk staf untuk bertugas menjadi user dari beberapa aplikasi umum. Namun demikian seluruh PD belum menerapkan manajemen SDM berdasarkan standar/framework tertentu. Sumber daya manusia merupakan personil yang memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, penggunaan, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi dalam instansi. Aspek-aspek yang tidak dapat dipisahkan dari institusi pemerintah adalah struktur, tugas pokok

danfungsi, serta pengembangan kompetensi dan jenjang karir sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Model Struktur Organisasi Strukur organisasi dari unit pengelola E-Government Struktur unit pengelola E-Governmentsendiri terdiri dari empat bidang, yaitu Security & QA, Application, Technical Support, Data dan Operation.



Gambar 3.12 Struktur Organsisasi Satuan Kerja Pengelola TIK

7. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 46 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas terkait.. Mengacu pada permenPAN RB 10/2011 tentang pedoman pelaksanaan program manajemen perubahan terdapat 3 tahapan yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 3.13 Manajemen Perubahan

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen perubahan berupa SOP Manajemen perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mempersiapkan para SDM yang dimiliki Pemkab. Nganjuk telah memenuhi kualifikasi minimal implementasi TIK yang sedang dan akan dikembangkan. Serta untuk menjamin kepatuhan para SDM terhadap implementasi TIK yang telah ditetapkan. Hasil survey menunjukkan bahwa seluruh PD belum menerapkan manajemen perubahan berdasarkan standar/framework tertentu.

8. Manajemen pengetahuan

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 46 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Dalam implementasi SPBE perlu melakukan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan SPBE perlu mempersiapkan serangkaian proses:

1. Sosialisasikan pentingnya manajemen pengetahuan
2. Pembentukan Pokja beberapa unit-kerja utk koordinasi implementasi manajemendipimpin oleh pimpinan pemerintah daerah.
3. Definisikan visi dan misi dalam implementasi manajemen manajemen pengetahuan.Sosialisasikan secara terus-menerus.
4. Rencanakan Quick-Win utk mengatasi keragu-raguan dan resistensi.
5. Konsolidasikan semua manfaat yang sudah tercapai, untuk mendapatkanmomentum.
6. Budayakan “sharing & re-use” sebagai cara bekerja yg efektif dan efisien.

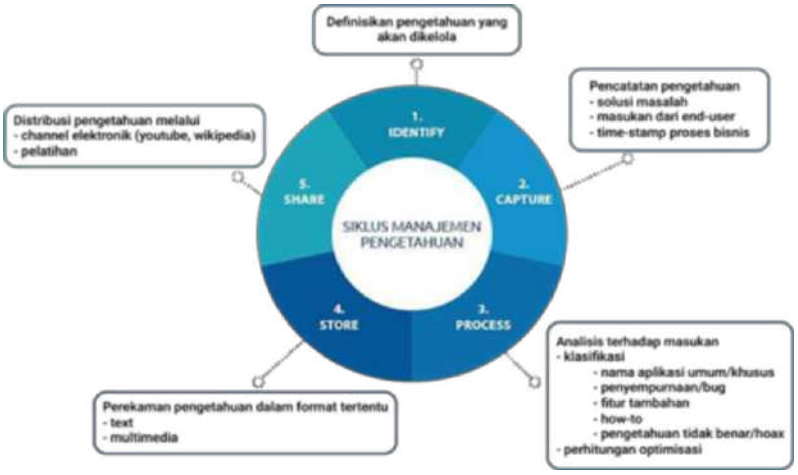


Gambar 3.14 Manajemen Pengetahuan

Adapun manfaat dari manajemen pengetahuan SPBE yakni:

1. Mengurangi duplikasi upaya untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau cara kerja
2. Mengurangi biaya dan waktu operasi layanan SPBE
3. Meningkatkan kompetensi operator
4. Memberdayakan operator, penerima manfaat SPBE, staf TIK dan analis proses bisnisMeningkatkan kualitas layanan SPBE

Dalam manajemen pengetahuan terdapat siklus hidup yang dimulai dari proses identifikasi,pencatatan, pemrosesan, penyimpanan, dan berbagi dan digambarkan sebagai berikut ini.



Gambar 3.15 Siklus Manajemen Pengetahuan

Secara teknis pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan / SOP terkait manajemen pengetahuan berupa SOP Pencatatan pengalaman & lesson learned untuk setiap OPD

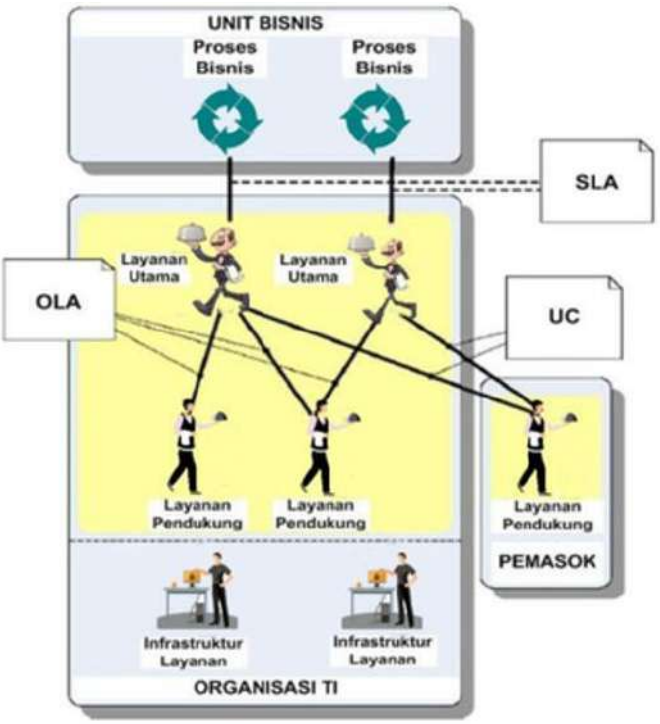
Manajemen pengetahuan bertujuan untuk memastikan kualifikasi SDM yang dimiliki oleh Pemkab. Nganjuk dapat terpenuhi seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan pengembangan TIK di Pemkab. Nganjuk. Hasil survey mennunjukkan bahwa seluruh PD belum menerapkan manajemen pengetahuan berdasarkan standar/framework tertentu.

BAB 4 LAYANAN SPBE

A. Metadata dan Tipe Layanan

Kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya manusia, ataupun sistem yang ada di lingkungan Kabupaten Nganjuk untuk keberhasilan realisasi Layanan SPBE secara digital. Kapabilitas layanan direalisasikan dalam bentuk pengembangan layanan SPBE dimana pengguna SPBE menjadi orientasinya dan memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi sehingga mutu layanan SPBE dapat terus meningkat dan berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk klasifikasi dan identifikasi layanan berdasarkan proses utama dan pendukung di Kabupaten Nganjuk untuk mendefinisikan hasil berupa kebutuhan aplikasi, fungsi aplikasi dan komponen aplikasi atau dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Target dari hasil akumulasi setiap elemen dalam tahapan peta jalan adalah dapat terwujudnya Visi, Misi SPBE, arah kebijakan SPBE, tujuan SPBE, dan sasaran SPBE sebagai acuan kapabilitas serta mempengaruhi inisiatif strategis, yang berujung pada (a) Layanan Publik dan (b) Layanan Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Cetak Biru (*Blue Print*) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kapabilitas layanan SPBE memerlukan kombinasi organisasi dan aset yang berbeda, seperti SDM, proses, dan teknologi untuk dicapai, sehingga dapat mewujudkan tujuannya. Kapabilitas SPBE yang masih abstrak kemudian direalisasikan oleh komponen teknis yang bersifat lebih konkret. Dalam konteks penyediaan layanan di Kabupaten Nganjuk, kebutuhan ini dapat didefinisikan melalui pemetaan unsur organisasi dan asetnya secara rinci dan menyeluruh dalam Daftar Pekerjaan Solusi sebagai Inisiatif Strategis Layanan SPBE. Berdasarkan pemetaan unsur organisasi secara rinci dan menyeluruh, fungsi dan proses bisnis Kabupaten Nganjuk diklasifikasikan seperti terlihat pada Gambar 4. Proses klasifikasi ini tujuannya adalah untuk menetapkan *utility* bagi penyediaan layanan, serta dukungan terhadap customer assets dan penyebaran *service assets.*



h.

Gambar 4.1 Klasifikasi Layanan Kabupaten Nganjuk

Klasifikasi layanan Kabupaten Nganjuk dapat digunakan untuk mengidentifikasi layanan yang harus disediakan untuk setiap proses bisnis di dalam setiap unit bisnis Kabupaten Nganjuk. Metode klasifikasi ini juga digunakan untuk penetapan service level agreements (SLA), operational level agreements (OLA) dan underpinning contract (UC) untuk pengelolaan tingkat layanan (*warranty*). Selanjutnya dapat dilakukan penetapan dukungan kinerjanya atau penurunan hambatannya (*utility*) melalui penetapan kategori dan sub kategori layanan, serta komponen lainnya (*service assets*). Setiap service assets berupa aplikasi, data, infrastruktur, keamanan, beserta rincian setiap komponennya akan dibahas pada Bab selanjutnya laporan ini. Penetapan metadata dan tipe layanan di lingkungan Kabupaten Nganjuk didefinisikan berdasarkan klasifikasi dalam tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat tingkat:

a. Domain Layanan, mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

b. Area Layanan, menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

c. Kategori Layanan menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD (Kabupaten Nganjuk) sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga).

d. Sub Kategori Layanan menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD (Kabupaten Nganjuk) pada tingkatan struktur ini dapat menyusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Dengan demikian, kodefikasi yang disesuaikan dengan proses bisnisnya dan referensi arsitektur layanan SPBE Nasional perlu dilakukan. Berikut merupakan rekomendasi kodefikasi layanan Kabupaten Nganjuk sebagai penamaan konfigurasi layanan SPBE. Tabel 4 menunjukkan metadata layanan Kabupaten Nganjuk berdasarkan tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE. Entitas metadata ini berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Entitas metadata arsitektur layanan SPBE Kabupaten Nganjuk berhubungan dengan arsitektur aplikasi SPBE sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut.

Tabel 20. Metadata Layanan Kabupaten Nganjuk

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependenc y)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.02.04. 01	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	Adpem	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran
NGK-DAL. 01.24.03. 01	Layanan Penggabungan SPPT PBB-P2	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.03. 02	Layanan Pemecahan SPPT PBB-P2	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan
NGK-DAL. 01.24.03. 03	Layanan Pembetulan SPPT PBB-P2	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.24.03. 04	Layanan SK NJOP PBB-P2	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan
NGK-DAL. 01.24.03. 05	Layanan BPHTB	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.24.06.01	Layanan informasi pendapatan asli daerah	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
NGK-DAL.01.24.06.02	Layanan informasi publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	Pemerintahan Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.01 Pengelolaan Keuangan daerah	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.24.06.03	Pengawasan Reguler	INPEKTORAT DAERAH	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
NGK-DAL.01.24.06.04	Pengawasan Khusus dengan Tujuan tertentu	INPEKTORAT DAERAH	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.24.06.05	Probity Audit	INPEKTORAT DAERAH	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.02 Penyelenggaraan pengawasan	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.02.05.01.01	Penyusunan keputusan Bupati	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kesekretariatan Negara	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.03 Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	RAL 02.05.01 Pemerintahan Umum
NGK-DAL.02.05.01.02	Pembuatan Raperda Inisiatif	SETDA	Kesekretariatan Negara	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.03 Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.05 Kesekretariatan Negara	RAL 02.05.01 Pemerintahan Umum

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.44.02.01	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat Daerah	Komunikasi	Publik	Elektronik	NGK.01.04 Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik
NGK-DAL.01.04.01.01	Pelayanan Regristrasi dan Verifikasi untuk E-Purchasing	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ekonomi	Publik	Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.04 Ekonomi	RAL 01.04.01 Ekonomi Makro

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.04.01.02	Registrasi dan Verifikasi SPSE	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ekonomi	Publik	Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.04 Ekonomi	RAL 01.04.01 Ekonomi Makro
NGK-DAL.02.03.02.01	Penyusunan RPJPD Kabupaten	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.03.02. 02	Penyusunan RKPD Kabupaten	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan
NGK-DAL. 02.03.02. 03	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.03.02. 04	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja)	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.05 Perekonomian dan pembangunan	RAL.02. Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan
NGK-DAL. 01.24.01. 01	Layanan Infomasi Publik	SETDA	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.24.06.06	Penyusunan RPJPD Kabupaten	BAPPEDA	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
NGK-DAL.01.24.06.07	Penerimaan Kunjungan Kerja	SETDA	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.24.01.02	Layanan Infomasi Publik	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintahan Daerah	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.06 Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat
NGK-DAL.01.43.03.01	Layanan Infomasi Publik	SETDA	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.44.02.02	Layanan Pengaduan	SETDA	Komunikasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik
NGK-DAL.01.44.02.03	Layanan Fasilitasi Penerimaan Pengaduan Masyarakat	SETDA	Komunikasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.44.03.01	Hearing /Rapat Dengar Pendapat	SETDA	Komunikasi	Publik	Non-Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.03 Sistem Komunikasi Tertentu
NGK-DAL.01.43.04.01	Layanan Pemasangan Iklan Berita Kehilangan (STNK/BPKB) di Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL) FM	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.04 penyelenggaraan penyiaran radio publik

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.02	Layanan Permohonan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Nganjuk	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.03	Layanan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SPAN-LAPOR)	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.04	Layanan Peliputan dan Publikasi Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk	DISKOMINFO	Data dan Informasi Pemerintah	Pemerintah	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.05	Layanan Command Center (Layanan Darurat)	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.06	Layanan informasi publik	BPKAD	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.07	Layanan informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.08	Layanan informasi publik Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.09	Layanan informasi publik Kecamatan Bagor	Kecamatan Bagor	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.10	Layanan informasi Layanan informasi publik Kecamatan Baron	Kecamatan Baron	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.11	Layanan informasi publik Kecamatan Berbek	Kecamatan Berbek	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.12	Layanan informasi publik Kecamatan Gondang	Kecamatan Gondang	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.13	Layanan informasi publik Kecamatan Jatikalen	Kecamatan Jatikalen	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.14	Layanan informasi publik Kecamatan Kertosono	Kecamatan Kertosono	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.15	Layanan informasi publik Kecamatan Lengkong	Kecamatan Lengkong	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.16	Layanan informasi publik Kecamatan Loceret	Kecamatan Loceret	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.17	Layanan informasi publik Kecamatan Nganjuk	Kecamatan Nganjuk	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.18	Layanan informasi publik Kecamatan Ngetos	Kecamatan Ngetos	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.19	Layanan informasi publik Kecamatan Ngluyu	Kecamatan Ngluyu	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.20	Layanan informasi publik Kecamatan Ngronggot	Kecamatan Ngronggot	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.21	Layanan informasi publik Kecamatan Pace	Kecamatan Pace	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.22	Layanan informasi publik Kecamatan Patianrowo	Kecamatan Patianrowo	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.23	Layanan informasi publik Kecamatan Prambon	Kecamatan Prambon	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.24	Layanan informasi publik Kecamatan Rejoso	Kecamatan Rejoso	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.25	Layanan informasi publik Kecamatan Sawahan	Kecamatan Sawahan	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.26	Layanan informasi publik Kecamatan Sukomoro	Kecamatan Sukomoro	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.27	Layanan informasi publik Kecamatan Tanjunganom	Kecamatan Tanjunganom	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.28	Layanan informasi publik Kecamatan Wilangan	Kecamatan Wilangan	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.29	Layanan informasi publik Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	DINSOS PPPA	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.30	Layanan informasi publik RSUD Kertosono	RSUD Kertosono	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.31	Layanan informasi publik RSUD Nganjuk	RSUD Nganjuk	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.32	Layanan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOLPP	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.33	Layanan informasi publik Sekretariat Daerah	SEKDA	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.34	Layanan informasi publik Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.43.03.35	Layanan informasi siap nikah, siap hamil	BKKBN	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi
NGK-DAL.01.43.03.36	Layanan survei kepuasan masyarakat	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.01.07 Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK01.08 Pengelolaan Aplikasi Informatika			
NGK-DAL. 02.09.06. 01	Layanan Pelayanan Data Statistik Sektoral	DISKOMINFO	Data dan Informasi Pemerintah	Pemerintah	Elektronik	NGK.01.09 Penyelenggaraan statistic sectoral	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.09.06 Statistik Sektoral

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependenc y)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.01.10 Pengelolaan Arsip			
NGK-DAL. 02.06.18. 01	Layanan Pegajuan Naskah Sambutan	SETDA	Dukungan Operasioanl Organisasi	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.11 Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kabupaten	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02. 06 Dukungan Operasioanl Organisasi	RAL 02.06.18 Dukungan Kearsipan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.09.02. 01	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	DISKOMINFO	. Data dan Informasi Pemerintah	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.11 Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kabupaten	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09. Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.09.02 Penyelenggaraan Informatika
NGK-DAL. 02.07.01. 01	Layanan Fasilitasi Sidak	SETDA	Akuntabilitas Kinerja	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.01.12 Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02. 07 Akuntabilitas Kinerja	RAL 02.07.01 Pembinaan Kegiatan Pengawasan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.01.13 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			
NGK-DAL.01.24.01.03	Layanan pendaftaran penelitian	BAKESBANGPOL	Pemerintah Daerah	Publik	Elektronik	NGK.01.14 Penelitian dan pengembangan daerah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintah Daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.02.04.02.01	Layanan Kenaikan Pangkat Reguler	BKPSM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.02.Pembinaan Jabatan Fungsional
NGK-DAL.02.04.02.02	Layanan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Struktural	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.02.Pembinaan Jabatan Fungsional

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.02.04.02.03	Layanan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.02.Pembinaan Jabatan Fungsional
NGK-DAL.02.04.01.01	Layanan Kenaikan Gaji Berkala	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.02.04.01.02	Layanan Pensiun Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN
NGK-DAL.02.04.01.03	Layanan Pensiun Janda/Duda	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependenc y)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 02.04.01. 04	Layanan Pensiun atas Permintaan Sendiri (APS)	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN
NGK-DAL. 02.04.03. 01	Layanan Ijin Belajar	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.03. Pendidikan dan Pelatihan Keahlian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.02.04.07.01	Layanan Kartu Pegawai	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi
NGK-DAL.02.04.07.02	Layanan Karis dan Karsu	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.07. Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.02.04.10.01	Layanan Satyalancana Karya satya	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.10. Pemetaan Potensi PNS
NGK-DAL.02.04.01.05	Layanan Cuti diluar tanggungan negara	BKPSDM	Aparatur Negara	Pemerintah	Non-Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01. Manajemen ASN

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.24.06.08	Layanan informasi publik Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Pemerintahan daerah	Pemerintah	Elektronik	NGK.02.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
						NGK.03.01 Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi social dan budaya			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.03.02 Peningkatan kewaspadaan nasional kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial			
NGK-DAL.01.26.01.01	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.03 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.02	Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SATPOL PP	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.03 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.03	Layanan Penanganan Kebakaran	DINAS DAMKAR	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.04	Layanan Sosial Pencegahan Bahaya Kebakaran	DINAS DAMKAR	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.05	Layanan informasi publik Dinas Pemadam Kebakaran	DINAS DAMKAR	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.06	Layanan Penanganan Sarang Tawon/Hewan Reptil	DINAS DAMKAR	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.03.04 Pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.07	Layanan Fasilitas Ijin undian gratis berhadiah (UGB)	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.01 Pemberdayaan sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.08	Layanan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.02 Rehabilitasi Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.28.02.01	Pemberian Layanan Informasi Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Hukum	Publik	Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.28 Hukum	RAL 01.28.02 Lembaga Pemasyarakatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.09	Layanan Pemberian Bantuan Transport orang terlantar dan atau kehabisan bekal	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.10	Layanan Pemberian Bantuan untuk penyandang Disabilitas	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.11	Layanan rekomendasi data terpadu kesejahteraan Sosial	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.12	Layanan Reaktifasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.02.01	Layanan Bantuan Lansia Miskin	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.04.03 Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin
NGK-DAL.01.31.01.01	Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.01.02	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL.01.31.02.01	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.02 Pendidikan Anak Usia Dini

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.03.01	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar
NGK-DAL.01.31.06.01	Layanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.06 Pendidikan non-Formal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.01.03	Layanan Pengajuan Legalisasi Ijazah	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL.01.31.01.04	Layanan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Siswa	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.01.05	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP secara online	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL.01.31.01.06	Layanan Pembelajaran Sekolah melalui Aplikasi SI-PRESTASI	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.01.07	Layanan Konfirmasi Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Aplikasi DAPODIK	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL.01.31.01.08	Layanan Kenaikan Pangkat Reguler bagi Tenaga Pendidik	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.01.09	Layanan Usulan Pensiun Tenaga Guru	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL.01.31.01.10	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.01.11	Layanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijasah dengan Satuan pendidikan yang masih berdiri/berganti Nama Lembaga Baru	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL.01.31.01.12	Layanan Pengesahan rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.01.13	Layanan bantuan operasional sekolah	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL.01.31.01.14	Layanan informasi publik Dinas Pendidikan	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL.01 Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.01.15	Layanan Pengajuan pengesahan Kurikulum Pendidikan Jenjang PAUD dan Dasar	DISPENDIK	Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.02 Pengembangan Kurikulum	RAL 01. Layanan Publik	RAL 01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NGK-DAL.01.31.08.01	Layanan Srikulasi Otomasi Perpustakaan	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.08.02	Layanan Perpustakaan Anak	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL.01.31.08.03	Layanan Dongkel Beras	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.08.04	Layanan Perpustakaan Keliling	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL.01.31.08.05	Layanan TABAMAS	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.08.06	Layanan Car Free Day	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL.01.31.08.07	Layanan Tos Keliling	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.08.08	Layanan E-Book Nganjuk	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL.01.31.08.09	Layanan Bahan Pustaka	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.08.10	Layanan Pengihan Buku	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL.01.31.08.11	Layanan Pelaksanaan Bimtek	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.31.08.12	Layanan informasi publik Dinas Arsip dan Perpustakaan	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan
NGK-DAL.01.31.08.13	Layanan Kearsipan	DINAS ARPUS	. Pendidikan	Publik	Non-Elektronik	NGK.05.03 Pembinaan Perpustakaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.08 Pembinaan Kepustakaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependenc y)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.05.04 Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan			
						NGK.05.05 Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.02.12	Rekomendasi Ijin Opersional Klinik (Utama dan Pratama)	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL.01.25.02.01	Layanan Gawat Darurat 24 Jam	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.02.02	Layanan Rawat Jalan	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL.01.25.02.03	Layanan Rawat Inap	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.02.04	Layanan Ruang Isolasi Khusus	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL.01.25.02.05	Layanan ICU	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.02.06	Layanan Bedah Sentral	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL.01.25.02.07	Layanan Hemodialisa	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.02.08	Layanan Ambulans	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL.01.25.01.01	Layanan Penunjang Medis	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.01 Farmasi dan Alat Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.02.09	Layanan Penunjang Non Medis	DINKES	. Kesehatan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL.01.25.02.10	Layanan kesehatan SMILE	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.01 Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.03.01	Penerbitan Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan
NGK-DAL.01.25.02.11	Layanan informasi publik Dinas Kesehatan	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.02 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.02.13	Rekomendasi Perijinan Apotek	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat
NGK-DAL.01.25.05.01	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.25.05.02	SLHS Jasa Boga /Rumah Makan/ Restoran/ Depo Air Minum/ TPP Tertentu	DINKES	. Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.03 Penyediaan Farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25. Kesehatan	RAL 01.25.05 Pengawasan Obat dan Makanan
NGK-DAL.01.25.03.02	Penerbitan Ijin STPT	DINKES	Kesehatan	Publik	Elektronik	NGK.06.04 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.01.01	Layanan Kartu Keluarga	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL.01.23.01.02	Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.01.03	Layanan Kartu Identitas Anak (KIA)	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL.01.23.03.01	Layanan Akta Kelahiran	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.03.02	Layanan Akta Perkawinan	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil
NGK-DAL.01.23.03.03	Layanan Akta Kematian	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.01.04	Layanan Pindah Datang Penduduk	Kecamantan	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL.01.23.01.05	Layanan Pindah Keluar Penduduk	Kecamantan	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.03.04	Layanan Akta Perceraian	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil
NGK-DAL.01.23.01.06	Layanan Pindah Tempat Antar Kecamatan	Kecamatan	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.01.07	Layanan Pindah Tempat Antar Kabupaten	Kecamatan	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL.01.23.03.05	Layanan Legalisasi Surat-Surat	Kecamatan	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.01.08	Layanan informasi publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DINAS PPKB	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.06.05 Pengendalian Penduduk	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk
NGK-DAL.01.23.04.01	Layanan Ayoman Kegagalan KB	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.04.02	Layanan Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP)	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana
NGK-DAL.01.23.04.03	Layanan Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW)	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.23.04.04	Layanan Konseling KB	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Non-Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana
NGK-DAL.01.23.04.05	Layanan informasi publik Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	DINAS PPKB	Kependudukan	Publik	Elektronik	NGK.06.06 Pembinaan Keluarga Berencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.07.01 Pengarustamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan			
NGK-DAL.01.27.02.01	Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOS PPPA	. Pemberdayaan Perempuan	Publik	Elektronik	NGK.07.02 Perlindungan Perempuan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.27. Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.27.02.02	Layanan Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	DINSOS PPPA	. Pemberdayaan Perempuan	Publik	Elektronik	NGK.07.03 Perlindungan Khusus Anak	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.27. Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak
NGK-DAL.01.07.01.01	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Usaha Tani Perternakan dan Pemasaran	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.09.02.01	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Produksi, Penyebaran, dan Pengembangan Ternak	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan
NGK-DAL.01.09.02.02	Penerbitan Recording pada Ternak	DISPERTA	Peternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.08.02 Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian			
NGK-DAL. 01.09.04. 01	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Tentang Standar Kesehatan Masyrakat Veteriner Pada PAH Obat Hewan dan Pakan Ternak	DISPERTA	Peternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.09.04.02	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISPERTA	Perternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.04 peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
NGK-DAL.01.09.02.03	Pengawasan Kesehatan Hewan, Kesmavet, Larangan Pemotongan Betina Produktif	DISPERTA	Peternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.09.05.01	Pemberantas Penyakit Hewan	DISPERTA	Peternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.03 Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Peternakan	RAL 01.09.05 penyehatan hewan
						NGK.08.04 Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.07.01.02	Perinzinan Usaha Pertanian	DISPERTA	Pertanian	Publik	Elektronik	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian
NGK-DAL.01.07.01.03	Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Perternakan	DISPERTA	Perternakan	Publik	Elektronik	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.07.01.04	Layanan Pendaftaran Ijin edar Beras	DINAS KPP	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.05 Perizinan usaha pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian
NGK-DAL.01.09.02.04	Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Produksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak	DISPERTA	Perternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Perternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.09.02. 05	Pelaksanaan Penyuluhan Kesmavet, POH dan Pakan Ternak	DISPERTA	Perternakan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.09 Perternakan	RAL 01.09.02 kebijakan peternakan
NGK-DAL. 01.07.01. 05	Layanan informasi pertanian Kab Nganjuk	Dinas Pertanian	Pertanian	Publik	Elektronik	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.07.01.06	Layanan informasi publik Dinas Pertanian	DINAS Pertanian	Pertanian	Publik	Elektronik	NGK.08.06 Penyuluhan Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian
NGK-DAL.01.10.01.01	Layanan informasi publik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Perikanan	Publik	Elektronik	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.10.01.02	Layanan Bantuan Perikanan	DINAS KPP	Perikanan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya
NGK-DAL.01.10.02.01	Layanan Pembelian Benih	DINAS KPP	Perikanan	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.07 Pengelolaan perikanan budidaya	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.02 Benih dan Bibit Perikanan Budi Daya

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.07.01.07	Pengawasan Produksi, Peredaran, Higiene dan Sanitasi PAH	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.08 Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian
NGK-DAL.01.07.01.08	Pelaksanaan Sosialisasi HACCP, Unit Pengolah, Alat Transport dan Unit Penyimpan HBAH	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.08 Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.08.09 Peningkatan Kerjasama Desa			
NGK-DAL.01.07.01.09	Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Usaha Tani Perternakan dan Pemasaran	DISPERTA	Pertanian	Publik	Non-Elektronik	NGK.08.01 Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.14.01.01	Permohonan surat keterangan sebagai pelaku usaha mikro di Kabupaten Nganjuk	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Usaha Kecil dan Menengah	Publik	Non-Elektronik	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil dan Menengah	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis
NGK-DAL.01.05.08.11	Pendaftaran Merk	DISPERINDAG	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.05.08. 12	Layanan informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL. 01.05.08. 13	Fasilitasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	DISPERINDAG	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.01 Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.05.08.14	E Redistribusi Pelyanan Publik	DISPERINDAG	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.02 Peningkatan sarana distribusi	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL.01.13.01.01	Layanan informasi publik Dinas Koperasi dan UM	DINASKOPUM	Informasi	Publik	Elektronik	NGK.09.03 Standarisasi dan perlindungan konsumen	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.05.08.01	Fasilitasi Permohonan Verifikasi Teknis	DISPERINDAG	Industri	Publik	Elektronik	NGK.09.04 Pengendalian izin usaha industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL.01.13.01.02	Layanan keuangan dan akuntansi koperasi	DINAS KOPUM	Koperasi	Publik	Elektronik	NGK.09.05 Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	RAL 01. Layanan Publik	RAL.01. 13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi dan Usaha Mikro

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependenc y)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.09.06 Pengembangan UMKM			
NGK-DAL. 01.05.08. 02	Pembuatan Kartu Pencari Kerja	DISNAKER	Industri	Publik	Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.05.03.01	Pembuatan Rekomendasi Pasport Kerja dan ID CPMI	DISNAKER	Industri	Publik	Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.03 Pajak dan Cukai
NGK-DAL.01.05.08.02	Penerbitan IjinLPK tidak berbasis Resiko	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.05.08.03	Penerbitan Tandar Daftar BKK Bursa Kerja Khusus) untuk SMA/SMK/ Universitas/LPK	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL.01.05.08.04	Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.05.08.05	Pengesahan Peraturan Perusahaan	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL.01.05.08.06	Layanan informasi publik Dinas Tenaga Kerja	DISNAKER	Industri	Publik	Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.05.08.07	Layanan informasi lowongan kerja	DISNAKER	Industri	Publik	Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL.01.05.06.01	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.06 Ketahanan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.05.08.08	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL.01.05.08.09	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.05.08.10	Pemberitahuan PHK	DISNAKER	Industri	Publik	Non-Elektronik	NGK.10.01 Hubungan Industrial	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri
NGK-DAL.01.12.03.01	Layanan Perizinan non Berusaha	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 pengembangan sektor usaha penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.12.06.01	Layanan Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA)	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal
NGK-DAL.01.12.03.02	Layanan Perizinan non Berusaha	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 pengembangan sektor usaha penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.12.06.02	Layanan Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah (PEMDA)	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal
NGK-DAL.01.12.06.03	Layanan Izin Pemakaian Sarana Olah Raga	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.12.06.04	Layanan Izin Reklame	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal
NGK-DAL.01.12.03.03	Layanan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 pengembangan sektor usaha penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.12.03.04	Layanan Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Ternak	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 pengembangan sektor usaha penanaman modal
	Layanan Izin Praktek Bidan	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.12.06.05	Layanan Izin Kerja Akunpunkturis	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal
NGK-DAL.01.12.06.06	Layanan Izin Kerja Perawat	DPMPTSP	Investasi	Publik	Elektronik	NGK.11.01 Peningkatan promosi dan iklim penanaman modal	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 pelayanan fasilitas penanaman modal

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.01	Layanan Permohonan Surat	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL.01.21.01.02	Layanan Penerimaan Tamu	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.03	Layanan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Khusus Program JATIM PUSPA	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL.01.21.01.04	Layanan Pencairan Bantuan Keuangan khusus Kabupaten kepada Pemerintah Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.05	Layanan Usulan Kegiatan video kreatif pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL.01.21.01.05	Layanan usulan kegiatan pameran kampung kreasi pemberdayaan ekonomi masyarakat	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.07	Layanan Program Pemberdayaan BUM Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL.01.21.01.08	Layanan entry data BUM Desa pada Aplikasi DDC	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.09	Layanan realisasi program pemberdayaan BUM Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL.01.21.01.10	Layanan Fasilitasi Updating Profil Desa dan Kelurahan	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.11	Layanan Penyusunan Rencana Pelatihan peningkatan kapasitas badan pemusyawaratan desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL.01.21.01.12	Layanan Fasilitasi Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD)	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.13	Layanan Fasilitas Perencanaan Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
NGK-DAL.01.21.01.14	Layanan Fasilitasi Proses Pengajuan SK PJ, PAW BPD	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.15	Layanan informasi publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Elektronik	NGK.12.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
						NGK.13.01 Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.15.01.01	Layanan informasi publik Dinas Pariwisata	DISPORABUDPAR	Pariwisata	Publik	Elektronik	NGK.13.02 Pemasaran pariwisata	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisataan
NGK-DAL.01.42.01.01	Surat Advis/Ijin Pentas	DISPORABUDPAR	Kebudayaan	Publik	Elektonik	NGK.14.01 Pengembangan Budayaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.01 kebijakan kebudayaan

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.42.02.01	Kartu Tanda Seniman	DISPORABUDPAR	Kebudayaan	Publik	Elektonik	NGK.14.02 Pengembangan Kesenian Tradisional	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.02 Perfilman dan Kesenian
						NGK.14.03 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.15.01 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
NGK-DAL.01.40.04.01	Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	DINAS PRKPP	. Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.02 Penataan Bangunan Gedung	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.40.04.04	Izin Penggunaan Ruang Terbuka Hijau	DINAS LH	. Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam
NGK-DAL.01.40.04.05	Izin Lingkungan	DINAS LH	. Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.40.04.06	Izin Penggunaan Tepi Jalan	DINAS LH	. Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.40. Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam
NGK-DAL.01.19.02.01	Layanan pengujian kendaraan bermotor	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.03 Penyelenggaraan Jalan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.17.01.01	Layanan pendaftaran kontraktor	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Elektronik	NGK.15.04 Pengembangan Jasa Konstruksi	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis
NGK-DAL.01.21.01.16	Layanan Pelimpahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk	DINAS PUPR	. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.05 Pengembangan Perumahan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.21.01.17	Layanan Rekomendasi Tapa/Siteplan Perumahan di Kabupaten Nganjuk	DINAS PUPR	. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.05 Pengembangan Perumahan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.21. Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL 01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu
						NGK.15.06 Kawasan Pemukiman			

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
						NGK.15.07 Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh			
NGK-DAL.01.19.02.02	Layanan Teknik Sarana dan Prasarana	DISHUB	Transportasi	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.08 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.19.01.01	Layanan Pemberian Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.01 Kemananan dan Keselamatan Transportasi
NGK-DAL.01.19.02.02	Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL. 01.19.02. 03	Layanan Angkutan dan Transportasi	DISHUB	Transportasi	Publik	Non-Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01. Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi
NGK-DAL. 01.19.02. 04	Layanan informasi publik Dinas Perhubungan	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.19.02.05	Layanan informasi publik Dinas Perhubungan	DISHUB	Transportasi	Publik	Elektronik	NGK.15.09 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19. Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi
NGK-DAL.01.17.01.02	Layanan Perbaikan jalan dan jembatan	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Elektronik	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.17.01.03	Layanan informasi publik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Elektronik	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis
NGK-DAL.01.17.01.04	Layanan informasi publik Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Elektronik	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.17.01.05	Rekomendasi Site Plan Pengembang Perumahan.	PUPR	Dinas Perkim dan Pertanahan	Publik	Non-Elektronik	NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis
NGK-DAL.01.17.01.06	KRK (Keterangan Rencana Tata Ruang Kota/ Kabupaten).	DINAS PUPR	Pekerjaan Umum	Publik	Non-Elektronik	DINAS PUPR NGK.16.01 Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana dan Prasarana Strategis

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.40.02.01	Layanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan	DINAS LH	Lingkungan Hidup	Publik	Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem
NGK-DAL.01.40.02.02	Layanan informasi publik Dinas Lingkungan Hidup	DINAS LH	Lingkungan Hidup	Publik	Elektronik	NGK.17.01 Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.40.02.03	Layanan Pengelolaan Pohon Tepi Jalan	DINAS LH	Lingkungan Hidup	Publik	Non-Elektronik	NGK.17.02 Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam dan Pelestarian Ekosistem
NGK-DAL.01.40.04.02	Layanan informasi limbah B3	DINAS LH	Lingkungan Hidup	Publik	Elektronik	NGK.17.03 Pengelolaan Persampahan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan dan Keamanan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.13	Layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	BPBD	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.14	Layanan Pemberian Bantuan Bencana	DINSOS PPA	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.15	Layanan Cepat Kejadian Bencana	BPBD	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.16	Layanan Inventarisasi Kerusakan Pasca Bencana	BPBD	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

ID	Nama Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	← Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)
NGK-DAL.01.26.01.17	Layanan Pemberian Bantuan kepada Korban Bencana	BPBD	Sosial	Publik	Non-Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial
NGK-DAL.01.26.01.18	Layanan informasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	Sosial	Publik	Elektronik	NGK.18.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial

BAB 5 INFRASTUKTUR SPBE

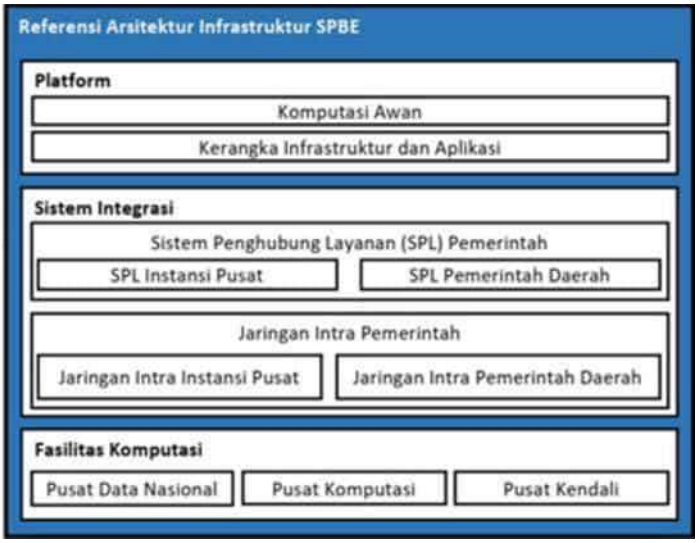
Arsitektur infrastruktur SPBE yang dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memiliki peraturan atau pedoman yang mendasari dalam pengelolaan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel xxx. Kebijakan Penyusunan Dokumen SPBE Kabupaten Nganjuk

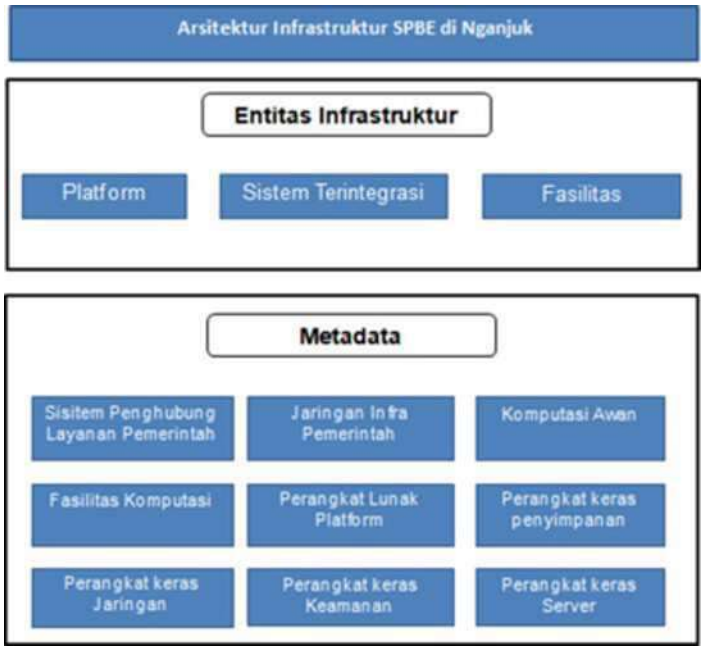
Nama Kebijakan SPBE	Nomor Kebijakan	Bentuk Kebijakan	Tanggal Penandatangan	Tanggal Berlaku
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	Nomor 132 Tahun 2022	Peraturan Presiden	20 Desember 2022	20 Desember 2022
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nomor 16 Tahun 2020	Peraturan Menteri	22 Desember 2020	22 Desember 2020
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penyelenggaraan	Nomor 53 Tahun 2021	Peraturan	7 Oktober 2021	7 Oktober 2021

Nama Kebijakan SPBE	Nomor Kebijakan	Bentuk Kebijakan	Tanggal Penandatangan	Tanggal Berlaku
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Timur				
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nganjuk	Nomor 11 Tahun 2022	Peraturan	28 Maret 2022	28 Maret 2022

Arsitektur infrastruktur tingkat nasional adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 5.1



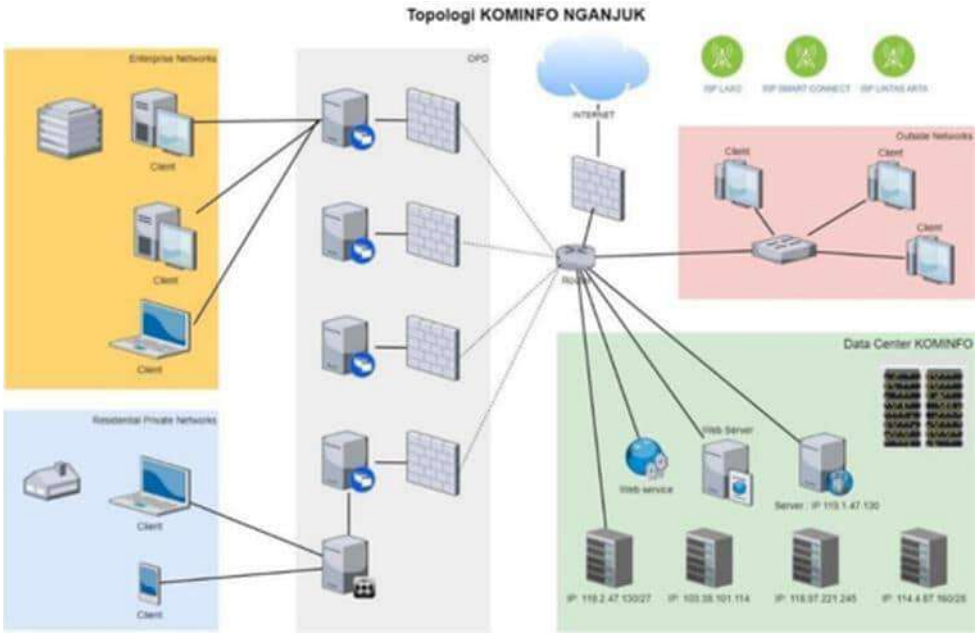
Gambar 5.1 Arsitektur infrastruktur tingkat nasional



Gambar 5.2 Arsitektur infrastruktur SPBE Kabupaten Nganjuk

Arsitektur Infrastruktur SPBE menyediakan semua fitur teknologi yang dibutuhkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi dengan dukungan arsitektur keamanan. Arsitektur Infrastruktur SPBE mendukung arsitektur layanan seperti akses layanan mandiri, Layanan bergerak, Layanan cerdas bagi masyarakat melalui aplikasi-aplikasi yang saling terhubung dalam komputasi awan. Infrastruktur SPBE dikategorikan pada platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi dengan mengacu pada kondisi infrastruktur yang ada saat ini di Kota Nganjuk.

Infrastruktur jaringan komputer yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk mencakup akses jaringan data lokal (Local Area Network) di setiap OPD, layanan internet, koneksi berbagi data dan aplikasi antar OPD, dan akses internet masyarakat (internet publik). Topologi jaringan komputer diseluruh OPD Kabupaten Ngajuk yang berada dibawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah sebagaimana pada Gambar 5.3

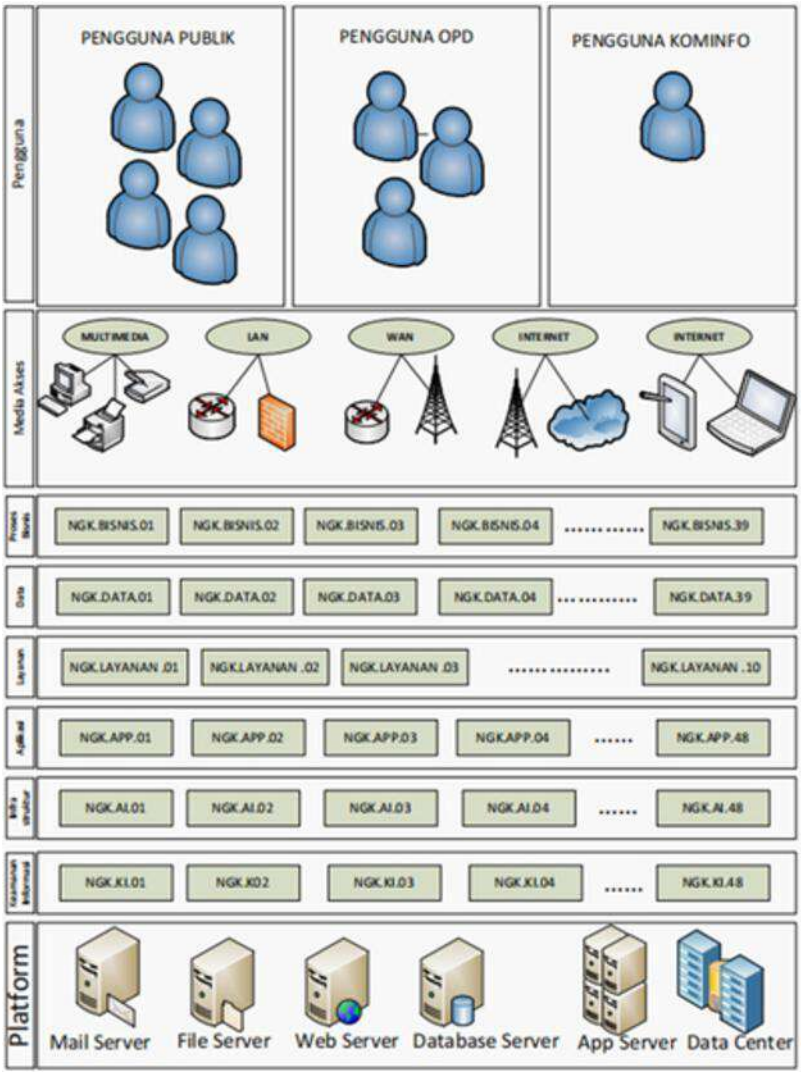


Gambar 5.3 Topologi Jaringan Komputer Kabupaten Nganjuk

Kapabilitas Infrastruktur di Kota Nganjuk merupakan kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti organisasi, orang, ataupun sistem. Kapabilitas infrastruktur SPBE dalam penerapannya dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau setiap level pemerintahan dan instansi, optimalisasi penggunaan Aplikasi SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai, dan penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas sesuai dengan Cetak Biru (*BluePrint*) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Kapabilitas infrastruktur SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi komponen infrastruktur yang terlibat dalam sejumlah layanan utama yang berjalan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif berupa struktur pendukung (rincian perangkat keras, perangkat lunak) mengacu pada kualitas yang diharapkan. Pemetaan kapabilitas infrastruktur SPBE didasarkan pada identifikasi layanan berdasarkan proses bisnis di Kota Nganjuk yang didukung dengan kebutuhan infrastruktur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Model Arsitektur integrasi merupakan kebutuhan penting dalam proses bisnis di Kota Nganjuk yang memiliki kompleksitas yang tinggi, dimana direkomendasikan untuk kebutuhan integrasi layanan layanan yang telah terdefinisi dan penggunaan sistem yang berbeda dengan harapan terdapat adanya proses kontrol. Pemodelan arsitektur ini memberikan pendekatan dan strategi untuk mengintegrasikan layanan (Sub kategori layanan), proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi secara menyeluruh. Pemodelan arsitektur integrasi ini diawali dengan mendeskripsikan konsep-konsep bisnis pada layanan untuk penetapan kebutuhan integrasi bagi setiap layanan untuk seluruh pengguna. Selanjutnya, dari setiap komponen konseptual bisnis yang telah terdefinisi, diterjemahkan ke dalam komponen-komponen yang dibutuhkan, terutama kebutuhan platform fisik untuk setiap lapisan arsitektur. Mekanisme dan pengaturan layanan pada pemodelan ini mengacu pada aktivitas proses bisnis dimana pengguna menggunakan media akses tertentu untuk berinteraksi terhadap layanan tertentu.

Arsitektur integrasi merupakan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai macam sistem yang berbeda dengan harapan memudahkan kontrol terhadap proses bisnis. Pada proses integrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja standar pada SOA (*Service Oriented Architecture*). Dengan memanfaatkan SOA diharapkan adanya solusi yang tepat untuk mendapatkan sebuah infrastruktur yang baik dengan kemampuan integrasi yang sudah terkelola, dengan memberikan kemudahan pertukaran informasi antar aplikasi, mengurangi pengaruh jika terjadi perubahan, dan adanya penekanan biaya untuk keperluan integrasi dan modifikasi aplikasi. Setiap lapisan arsitektur mendeskripsikan hubungan dari mulai lapisan pengguna sampai dengan lapisan platform atau teknologi yang digunakan.



Gambar 5.4 Arsitektur di Kabupaten Nganjuk

Standar dan kebijakan Pemetaan arsitektur keamanan terhadap metadata arsitektur keamanan di lingkungan Kabupaten Nganjuk terdiri dari dua tingkatan. Pertama domain keamanan dengan uraian standar dan atau kebijakan keamanan, penerapan keamanan serta kelaikan keamanan. Kedua area keamanan terhadap domain arsitektur lain yaitu arsitektur data dan informasi, arsitektur aplikasi SPBE, serta domain arsitektur infrastruktur.

Selama kegiatan ini, diperoleh lima kebijakan keamanan yang didapatkan dan dua standar dan referensi utama, diantaranya Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun

2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE, Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dan dari Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Roadmap Infrastruktur SPBE

No	Daftar Pekerjaan	2023	2024	2025	2026	2027	OPD Penganggung jawab
Misi: 1. Membangun tatakelola SPBE yang terpadu dan akuntabel yang menghasilkan layanan SPBE berkualitas dan Optimal							
	(Perencanaan)						
1	**Analisis Kebutuhan**						
	Penyusunan layanan pusat data memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk melakukan analisis kebutuhan layanan pusat data, baik pada saat pusat data akan dibangun maupun pada saat akan mulai menyediakan layanan kepada pihak intern maupun ekstern.	√	√				Kominfo
	Penyusunan layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ruang lingkup layanan pusat data dari sisi cakupan geografis jenis industri yang dilayani	√	√				Kominfo
	Penyusunan layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kategori layanan pusat data dan hal lain	√	√				Kominfo
	Penyusunan layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap jenis layanan yang dibutuhkan	√	√				Kominfo
	Penyusunan layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap tingkat layanan	√	√				Kominfo
	Penyusunan layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ukuran kinerja yang diacu	√	√				Kominfo
	Penyusunan layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap pelaporan	√	√				Kominfo
	Penyusunan layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan	√	√				Kominfo

No	Daftar Pekerjaan	2023	2024	2025	2026	2027	OPD Penganggung jawab
	hukum yang terkait dengan layanan pusat data						
2	**Manajemen Risiko dan Kesesuaian**						
	Penyusunan penerapan manajemen risiko dan manajemen kesesuaian yang dimiliki penyelenggara Pusat Data	√	√				Kominfo
	Penyusunan perencanaan tindakan untuk menangani risiko dan peluang beserta prioritasnya	√	√				Kominfo
3	**Gedung Pusat Data**						
	Penyusunan lokasi Gedung Pusat Data yang tidak berada pada area rentan bencana sesuai dengan peta BTMG	√	√				Kominfo
	Penyusunan Lokasi Gedung Pusat Data tidak berada pada lokasi rawan huruhara, seperti perkampungan padat atau kumuh	√	√				Kominfo
	Penyusunan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api utama lebih dari 91 m	√	√				Kominfo
	Penyusunan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data ke bandara utama dan/atau pelabuhan lebih dari 1,6 km	√	√				Kominfo
	Penyusunan area parkir antara karyawan dengan pengunjung yang dipisahkan secara fisik dengan pagar pada Gedung Pusat Data	√	√				Kominfo
	Penyusunan area parkir dan area bongkar muat yang dipisahkan secara fisik dan masing-masing memiliki akses keluar masuk yang berbeda pada Gedung Pusat Data	√	√				Kominfo
	Penyusunan area parkir pengunjung Gedung Pusat Data dengan tembok perimeter pusat data dipisahkan dengan penghalang fisik untuk mencegah kendaraan melaju lebih dekat	√	√				Kominfo
	Penyusunan cetak biru gedung Pusat Data	√	√				Kominfo

No	Daftar Pekerjaan	2023	2024	2025	2026	2027	OPD Penganggung jawab
	Penyusunan ketahanan Bangunan Pusat Data terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II	√	√				Kominfo
	Penyusunan bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi	√	√				Kominfo
	Penyusunan pembagian ruangan untuk Area Perkantoran, Area Telekomunikasi, dan Area Server pada Gedung Pusat Data	√	√				Kominfo
	Penyusunan material gedung Pusat Data memiliki ketahanan api minimal 1 jam dari dinding bantalan eksterior, dinding bantalan interior, dinding eksterior tanpa bantalan, bingkai struktural, interior dinding partisi ruangan non komputer, dinding partisi area server interior, lantai dan langit-langit, atap dan plafon,	√	√				Kominfo
	Penyusunan ketahanan pengembunan Material gedung Pusat Data sesuai yang dipersyaratkan oleh SNI 1741:2008	√	√				Kominfo
	Penyusunan fitur pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional gedung, dan pelayanan penghuni atau tamu pada sistem monitoring gedung pusat data	√	√				Kominfo
4	**Spesifikasi Sistem Jaringan Data**						
	Penyusunan Pusat Data memiliki label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	√	√				Kominfo
	Penyusunan jalur terpisah bagi penyedia layanan data komunikasi yang disediakan Pusat Data	√	√				Kominfo
5	**Spesifikasi Sistem Pemadam Kebakaran**						
	Penyusunan sistem deteksi kebakaran pada Pusat Data	√	√				Kominfo
	Penyusunan sistem sprinkler api untuk ruangan selain area server dan telekomunikasi Pusat Data	√	√				Kominfo

No	Daftar Pekerjaan	2023	2024	2025	2026	2027	OPD Penganggung jawab
6	**Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data**						
	Penyusunan Pusat Data memiliki sistem monitoring baterai untuk sistem UPS	√	√				Kominfo
	Penyusunan titik pantau di Utilitas, trafo utama, UPS, genset, sirkuit pemutus arus, panel distribusi, ATS pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	√	√				Kominfo
7	**Persyaratan Keamanan Fisik**						
	Penyusunan Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang genset	√	√				Kominfo
	Penyusunan Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang UPS, telepon, dan ruang mekanikal elektrikal	√	√				Kominfo
	(Pengembangan)						
	Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data						Kominfo
8	**Implementasi**						
	Penyusunan methode/standard pengembangan Pusat Data?	√	√				Kominfo
	Penyusunan dokumentasi pengembangan Pusat Data?	√	√				Kominfo
9	**Instalasi**	√	√				
	Penyusunan prosedur instalasi pada Pusat Data?	√	√				Kominfo
	Penyusunan Daftar SDM dalam instalasi pada Pusat Data?	√	√				Kominfo
10	**PENGUJIAN**						
	Penyusunan rencana pengujian (Test Plan) terhadap Pusat Data Nasional?	√	√				Kominfo
	Penyusunan rancangan pengujian (Test Design) terhadap Pusat Data	√	√				Kominfo

No	Daftar Pekerjaan	2023	2024	2025	2026	2027	OPD Penganggung jawab
	Nasional?						
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, kompeten dan inovatif							
	Sertifikasi terkait data center seperti Certified Data Centre Expert (CDCE)?		√	√			Kominfo
	Sertifikasi kelaikan sistem elektronik Pusat Data dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?		√	√			Kominfo
	Sertifikasi kelaikan keamanan Pusat Data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?		√	√			Kominfo
	Sertifkasi dari Lembaga nasional/internasional seperti ANSI/TIA-942, uptime institute dan lain-lain?		√	√			Kominfo
	Sertifikasi manajemen mutu seperti ISO 9001 dari lembaga terakreditasi?		√	√			Kominfo
	Sertifikasi manajemen layanan seperti ISO 20000 dari lembaga terakreditasi?		√	√			Kominfo
	Sertifikasi manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dari lembaga terakreditasi?		√	√			Kominfo
	Sertifikasi manajemen kesehatan seperti OHSAS 18001 dari lembaga terakreditasi?		√	√			Kominfo
Misi 3 : Membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi							
	Membangun menentukan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari JIP?		√	√			Kominfo
	Membangun JIP menghubungkan jaringan ke semua unit dan/atau satuan kerja di bawah Instansi?		√	√			Kominfo
	Membangun JIP menyediakan keterhubungan jaringan dengan		√	√			Kominfo

No	Daftar Pekerjaan	2023	2024	2025	2026	2027	OPD Penganggung jawab
	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Jaringan Nasional Intra Pemerintah?						
	Membangun alokasi sumber daya (manusia dan fasilitas pendukung lain) yang disediakan untuk penyelenggaraan JIP?		√	√			Kominfo
	Membangun rencana pelatihan personil yang akan mengembangkan JIP?		√	√			Kominfo
	Membangun proses/layanan yang terhubung oleh JIP?						
	Membangun persiapan yang dilakukan dalam melakukan perancangan JIP?		√	√			
	Membangun melakukan analisis dampak lingkungan dalam melakukan perancangan JIP?		√	√			
	Membangun besar cakupan dari JIP yang akan dirancang?		√	√			
	Membangun persiapan yang dilakukan dalam melakukan perancangan JIP?		√	√			
	Membangun melakukan analisis dampak lingkungan dalam melakukan perancangan JIP?		√	√			
	Membangun Seberapa besar cakupan dari JIP yang akan dirancang?		√	√			
	Membangun prosedur akses secara jaringan intra pemerintah ke pusat data?		√	√			
	Membangun rencana keberlangsungan kegiatan (*Business Continuity Plan*) kondisi mendapatkan gangguan atau bencana?		√	√			
Misi 4 : Mengembangkan Sistem Integrasi Data Sebagai Perwujutan Layanan G2G, G2B, G2C							
	Memfasilitasi Sistem Penghubung sudah memenuhi standar interoperabiltas data yang disyaratkan?				√	√	Kominfo
	Memfasilitasi alur penyelenggaraan untuk pengguna layanan interoperabilitas data dilakukan setelah terhubung Katalog Nasional LID?				√	√	Kominfo

BAB 6 APLIKASI SPBE

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE ditunjukkan pada Gambar 1.1



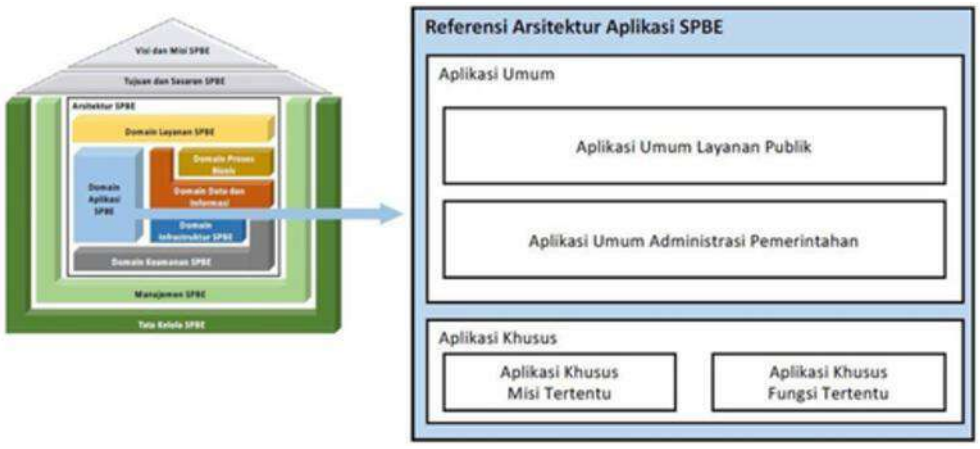
Gambar 6.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (Perpres 132 Tahun 2022)

Guna mendukung arah kebijakan nasional, maka arsitektur aplikasi pada SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi

SPBE, yaitu (Perpres 132 Tahun 2022):

a. Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
b. Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
c. Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat
d. dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
e. Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat men5rusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Berdasarkan Struktur Referensi di atas, Referensi Arsitektur Aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada pada Tingkat 3 dan Tingkat 4, yaitu Kategori Aplikasi dan Sub Kategori Aplikasi. Sebagai ilustrasi Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE dapat diturunkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2



Gambar 6.2 Ilustrasi Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (Perpres 132 Tahun 2022)

Secara deskriptif, penjelasan pada setiap komponen dalam referensi arsitektur aplikasi SPBE adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi Umum Layanan Publik

   Lapisan Aplikasi Umum layanan publik (RAA 01.01) merupakan lapisan Aplikasi Umum yang mendukung layanan publik, secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama {shared seruicesl. Lapisan ini merupakan lapisan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung dengan melayani publik sesuai bidang dan memiliki hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tidak lanjut dan sebagai presentasi ke publik dari hasil tindak lanjut. Dengan demikian, lapisan ini berhubungan dengan lapisan di bawahnya, baik lapisan aplikasi khusus maupun lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan.

b. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

   Lapisan Aplikasi Umum administrasi pemerintahan (RAA 01.02) memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara berbagi pakai. Aplikasi ini dapat berupa modul fungsi

aplikasi yang dipakai bersama (shared seruicesl. Dalam lapisan ini, pengelompokan bidang administrasi pemerintahan digunakan untuk mendukung atau menjadi dasar operasional dari lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi dapat digunakan untuk mendukung aplikasi pada lapisan di atasnya.

c. Aplikasi Khusus Misi Tertentu

Lapisan aplikasi khusus misi tertentu (RAA A2.0l) mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi khusus hanya dikembangkan dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

d. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

Aplikasi khusus fungsi tertentu (RAA 02.02) ini hanya dikembangkan dan digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

Sesuai dengan pembagian jenis aplikasi pada dokumen Rencana Perpres tentang SPBE Nasional, maka aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus diidentifikasi jenis sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Pemetaan aplikasi umum di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada Tabel 21 dan pemetaan aplikasi khusus ditunjukkan pada tabel 22.

Tabel 21. Pemetaan Aplikasi Umum Eksisting di Kabupaten Nganjuk

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
Perencanaan dan Penganggaran	NGK.APP.49	E-BUDGETING	Web	Pemerintah	Sistem Informasi Penganggaran
	NGK.APP.50	SISKUDES	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi Keuangan Desa
	NGK.APP.51	E-PROPOSAL	Desktop	Pemerintah	Proposal online
	NGK.APP.52	OMSPAM	Web	Pemerintah	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Keuangan	NGK.APP.53	SIMPatda	Web	Publik	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah
	NGK.APP.26	e-SPTPD	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.29	E-BPHTB	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.31	e-KSWP	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
					Terpadu
	NGK.APP.32	e-Setoran	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.30	e-Dashboard	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.28	E-SPPT	Web	Publik	Pajak Online Nganjuk dan Sistem Retribusi Terpadu
	NGK.APP.15	SIMDA	Desktop	Pemerintah	sistem informasi keuangan daerah
	NGK.APP.33	SIM PBB P2	Desktop	Pemerintah	Memudahkan manajemen pendapatan asli daerah
	NGK.APP.39	Internet Banking	Web	Pemerintah	transaksi keuangan
	NGK.APP.44	SIM DTH	Web	Pemerintah	Pelaporan daftar transaksi harian
	NGK.APP.47	SIMGaji	Desktop	Pemerintah	Sebagai Sistem informasi Penggajian ASN di Kabupaten Nganjuk
Pengadaan Barang dan Jasa	NGK.APP.14	LPSE	Web	Publik	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
	NGK.APP.05	Sirup	Web	Pemerintah	Pengadaan Barang/Jasa
	NGK.APP.09	Aplikasi P3DN	Web	Pemerintah	pengawasan TKDN
	NGK.APP.13	E-Katalog	Web	Pemerintah	sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
	NGK.APP.34	Si Omah	Web	Pemerintah	Penerbitan rekomendasi site plan dan penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang/developer kepada Pemda
Kepegawaian	NGK.APP.54	PUPNS	Web	Pemerintah	Pendataan Ulang PNS
	NGK.APP.55	SIM Kepegawaian	Web	Pemerintah	Sistem Informasi Kepegawaian
	NGK.APP.06	Simas	Web	Pemerintah	Aplikasi kepegawaian dan database kepegawaian ASN

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
					kab.Nganjuk
	NGK.APP.07	Simbak	Web	Pemerintah	Penilaian Kinerja ASN
	NGK.APP.08	Aplikasi Presensi	Web	Pemerintah	Untuk Mengelola Kehadiran Pegawai
	NGK.APP.35	SIASN	Web	Pemerintah	usulan pelayanan kepegawaian
	NGK.APP.37	E-Mutasi	Web	Pemerintah	Usulan mutasi ASN
	NGK.APP.38	SIAPP	Web	Pemerintah	usulan pangkat pensiun, jabatan fungsional untuk golongan utama
	NGK.APP.41	E-FORMASI	Web	Pemerintah	Usulan Pengdaan ASN
	NGK.APP.42	SSCASN	Web	Pemerintah	Portal pengadaan pendaftaran ASN
	NGK.APP.45	SIM SKPP	Web	Pemerintah	Penerbitan Suket pembayaran gaji sementara
	NGK.APP.46	Sitara	Web	Pemerintah	Menonaktifkan pegawai pensiun
Kearsipan	NGK.APP.40	PPID	Web	Pemerintah	Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
	NGK.APP.56	JDIH	Web	Publik	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
	NGK.APP.04	Srikandi	Web	Pemerintah	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
					Terintegrasi
	NGK.APP.57	E-Agendaris	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi Pengagendaan
	NGK.APP.58	E-Register Surat Tugas	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi Surat Tugas
	NGK.APP.01	Aplikasi Manajemen Surat (AMS)	Web	Pemerintah	Pencatatan surat masuk dan keluar
	NGK.APP.24	SIKN	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi kearsipan
Pengelolaan barang Milik Daerah	NGK.APP.10	SIMAset	Web	Pemerintah	Sistem Informasi Manajemen Aset
Pengawasan dan akuntabilitas kinerja	NGK.APP.18	e-LHKPN	Web	Pemerintah	e-Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara
	NGK.APP.12	SIPD	Desktop	Pemerintah	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
	NGK.APP.59	LHP	Desktop	Pemerintah	Laporan Hasil Pemeriksaan
	NGK.APP.60	SPM	Desktop	Pemerintah	Standar Pelayanan Minimal
	NGK.APP.61	SKM	Web	Publik	Survei Kepuasan Masyarakat
	NGK.APP.36	SIJAPTI	Web	Pemerintah	usulan rotasi mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
Layanan	NGK.APP.62	PING	Web	Publik	Portal Informasi Nganjuk
	NGK.APP.63	PIP	Web	Publik	Pendidikan
	NGK.APP.64	Pendaftaran Rawat Jalan	Web	Publik	Kesehatan
	NGK.APP.65	Cek Ketersediaan Kamar	Web	Publik	Kesehatan
	NGK.APP.02	SIMRS,	Desktop	Pemerintah	Kesehatan
	NGK.APP.66	FANLAB,	Desktop	Pemerintah	Kesehatan
		APPLYCARE	Web	Pemerintah	Kesehatan
	NGK.APP.68	Bansos	web	Publik	Sosial
	NGK.APP.69	Daftar Mandiri DTKS	web	Publik	Sosial
	NGK.APP.70	Layanan Data Kesehatan	web	Publik	Sosial
	NGK.APP.71	SIPentol	web	Publik	Perizinan
	NGK.APP.72	Simpelmanjar	web	Publik	Penelitian
	NGK.APP.16	Sedudo	web	Publik	Kependudukan
	NGK.APP.22	SIAK	Desktop	Pemerintah	Kependudukan
	NGK.AP	e-KTP	Desktop	Pemerintah	Kependudukan

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
	P.73				
	NGK.AP P.73	Peminjaman Buku	Desktop	Pemerintah	Perpustakaan
	NGK.AP P.74	WadulBupati	Web	Publik	Pengaduan Masyarakat
	NGK.AP P.75	Dumas	Web	Publik	Pengaduan Masyarakat
	NGK.AP P.17	SPAN	Web	Publik	Pengaduan Masyarakat
	NGK.AP P.76	SI Tindak Lanjut	Desktop	Pemerintah	Pengaduan Masyarakat
	NGK.AP P.77	SMILE	Web	Pemerintah	Sistem Management Informasi dan Pelaporan Elektronik
	NGK.AP P.78	Brambang	Web	Publik	Pertanian
	NGK.AP P.79	SIPertan	Web	Publik	Pertanian
	NGK.AP P.03	SI-Mergawe	Web	Pemerintah	Pencatatan surat masuk dan keluar
	NGK.AP P.11	Sukma E-Jatim	Web	Publik	sistem untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
	NGK.AP	Epusda	Desktop	Publik	Layanan

Kelompok Aplikasi SPBE	ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Platform	Pengguna	Deskripsi
	P.25	Nganjuk			perpustakaan secara online
	NGK.APP.40	PPID	Web	Pemerintah	PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik
	NGK.APP.43	DJP Online	Web	Publik	pelaporan pajak
	NGK.APP.48	Simbal	Web	Pemerintah	Sebagai Sistem informasi Kendaraan dinas di Kab. Nganjuk

Tabel 22. Pemetaan Aplikasi Khusus Eksisting di Kabupaten Nganjuk

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
SEKRETARIAT DAN INSPEKTORAT	1	NGK.APP.80	Sekretariat Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/setda
	2	NGK.APP.81	Sekretariat DPRD	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/setwan
	3	NGK.APP.8	Inspektorat Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/inspektorat

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
		2		
DINAS	1	NGK.APP.83	Dinas Pendidikan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/pendidikan
	2	NGK.APP.84	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan ; dan Pariwisata	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dispar
	3	NGK.APP.85	Dinas Kesehatan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dinkes
	4	NGK.APP.86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dinsos
	5	NGK.APP.87	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/ppkb
	6	NGK.APP.88	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dukcapil
	7	NGK.APP.89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/pmd
	8	NGK.APP.90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dpmptsp
	9	NGK.APP.91	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/disperindag
	10	NGK.APP.92	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/koperasi

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
	11	NGK.APP.93	Dinas Tenaga Kerja	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/disnaker
	12	NGK.APP.94	Dinas Komunikasi dan Informatika	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/diskominfo
	13	NGK.APP.95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/pupr
	14	NGK.APP.96	Dinas Perhubungan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dishub
	15	NGK.APP.97	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/prkpp
	16	NGK.APP.98	Dinas Lingkungan Hidup	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/dinaslh
	17	NGK.APP.99	Dinas Pertanian	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/pertanian
	18	NGK.APP.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kpp
	19	NGK.APP.101	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/arpus
	20	NGK.APP.102	Satuan Polisi Pamong Praja	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/polpp
	21	NGK.APP.1	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/damkar

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
		03		
BADAN	1	NGK.APP.104	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bappeda
	2	NGK.APP.105	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bpkad
	3	NGK.APP.106	Badan Pendapatan Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bapenda
	4	NGK.APP.107	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bkpsdm
	5	NGK.APP.108	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kesbangpol
	6	NGK.APP.109	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/bpbd
KECAMATAN	1	NGK.APP.110	Kecamatan Bagor	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecbagor
	2	NGK.APP.111	Kecamatan Baron	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecbaron
	3	NGK.APP.112	Kecamatan Berbek	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecberbek
	4	NGK.APP.1	Kecamatan Gondang	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecgondan

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
		13		g
	5	NGK.APP.114	Kecamatan Jatikalen	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecjatikalen
	6	NGK.APP.115	Kecamatan Kertosono	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/keckertosono
	7	NGK.APP.116	Kecamatan Lengkong	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/keclengkong
	8	NGK.APP.117	Kecamatan Loceret	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecloceret
	9	NGK.APP.118	Kecamatan Nganjuk	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecnganjuk
	10	NGK.APP.119	Kecamatan Ngetos	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecngetos
	11	NGK.APP.120	Kecamatan Ngluyu	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecngluyu
	12	NGK.APP.121	Kecamatan Ngronggot	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecngronggot
	13	NGK.APP.122	Kecamatan Pace	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecpace
	14	NGK.APP.123	Kecamatan Patianrowo	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecpatianrowo
	1	NGK.	Kecamatan Prambon	https://ppid.nganjukkab.g

KELOMPOK	NO	ID Aplikasi	PERANGKAT DAERAH	ALAMAT WEBSITE
	5	APP.124		o.id/page/opd/kecprambon
	16	NGK.APP.125	Kecamatan Rejoso	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecrejoso
	17	NGK.APP.126	Kecamatan Sawahan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecsawahan
	18	NGK.APP.127	Kecamatan Sukomoro	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecsukomoro
	19	NGK.APP.128	Kecamatan Tanjunganom	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kectanjunganom
	20	NGK.APP.129	Kecamatan Wilangan	https://ppid.nganjukkab.go.id/page/opd/kecwilangan

Roadmap SPBE Kabupaten Nganjuk

Tabel 23. Roadmap Kabupaten Nganjuk

Kebijakan	Strategi	Program Pembangunan	Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab	Fase dalam Framework TOGAF
			2023	2024	2025	2026	2027		
Misi: 1. *Membangun tatakelola SPBE yang terpadu dan akuntabel yang menghasilkan layanan SPBE berkualitas dan Optimal*									
Penyusunan Regulasi, Standarisasi, Pengintegrasian Aplikasi SPBE	Penyusunan Regulasi dan standarisasi Pengintegrasian Aplikasi SPBE	Penyusunan SK Bupati Implementasi dan Pengelolaan Integrasi Aplikasi SPBE di Seluruh OPD	*v*						**Fase A – Fase D**
		Penyusunan Pedoman Pengintegrasian Aplikasi	*v*					Diskominfo	
		Pembuatan prosedur dan dokumentasi tentang integrasi Aplikasi: • Aplikasi e-Office Kabupaten Nganjuk • Aplikasi Aset Daerah • Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa • Aplikasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja • Aplikasi e-Services Kabupaten Nganjuk	*v*						
		Dokumentasi Pelaksanaan integrasi aplikasi SPBE	*v*						**Fase E – Fase F**
		Pelaksanaan review, evaluasi, dan tindak lanjut setiap tahun mengenai regulasi dan standarisasi pengintegrasian aplikasi SPBE		*v*	*v*	*v*	*v*		

Kebijakan	Strategi	Program Pembangunan	Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab	Fase dalam Framework TOGAF
			2023	2024	2025	2026	2027		
Misi 2 : ***Membangun Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, kompeten dan inovatif***									
Peningkatan kemampuan dan penambahan Tenaga IT yang pakar dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharan aplikasi/sistem informasi	Penambahan Tenaga IT (Bidang keahlian: Software Engineering) di Tiap OPD melalui rekruitmen ASN dan non-ASN	Seleksi dan rekrutmen staff dengan latar belakang pendidikan TIK (Bidang keahlian: Software Engineering). Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 5 orang	*v*	*v*	*v*	*v*		Semua OPD	**Fase G**
		Pengadaan Tenaga Pengelola Aplikasi/Sistem Informasi	*v*	*v*				Semua OPD	
		Penambahan Tenaga Fungsional bidang IT (Bidang keahlian: Software Engineering).	*v*	*v*				Semua OPD	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga IT pada bidang keahlian perencanaan, implementasi, dan pemeliharan aplikasi/sistem informasi melaui sertifikasi dan pelatihan	Pengiriman SDM TI Dinas Kominfo untuk mengikuti pelatihan kompetensi bidang pemrograman/ software engineering. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 5 orang	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	Diskominfo	
		Pemetaan kompetensi pemeliharaan sistem informasi dan distribusi SDM TI di OPD dan kecamatan. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 1 adalah 3 org	*v*					Diskominfo	
		Penyelenggraan pelatihan pemeliharaan sistem informasi bagi SDM TI di OPD dan kecamatan. Jumlah minimal yang direncanakan pada tahun ke 2 adalah 3 org		*v*	*v*	*v*	*v*	Diskominfo	
		Pengadaan Pelatihan IT tiap OPD	*v*	*v*				Semua OPD	

		Peningkatan Jumlah Staft TI yang Bersertifikasi	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	Semua OPD	
		Optimalisasi PNS Berpendidikan IT sebagai Tenaga IT	*v*	*v*				Semua OPD	
		Pelaksanaan review, evaluasi, dan tindak lanjut setiap tahun mengenai Peningkatan kemampuan dan penambahan Tenaga IT yang pakar dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharan aplikasi/sistem informasi		*v*	*v*	*v*	*v*	Semua OPD	
Peningkatan Pemahaman SDM dalam Implementasi Aplikasi SPBE	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SPBE di seluruh OPDsecara rutin	Melakukan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi/Sistem Informasi SPBE tingkat OPD	*v*	*v*	*v*	*v*	*v*	Semua OPD	

Kebijakan	Strategi	Program Pembangunan	Tahun Pelaksanaan					OPD Penanggung jawab	Fase dalam Framework TOGAF
			2023	2024	2025	2026	2027		
Misi 3 : ***Membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi*** **Misi 4 :** ***Mengembangkan Sistem Integrasi Data Sebagai Perwujutan Layanan G2G, G2B, G2C***									
Integrasi Aplikasi berdasarkan masing-masing domain	Pembangunan Platform Integrasi Aplikasi	Perancangan arsitektur service sebagai platform integrasi aplikasi	*v*	*v*				Diskominfo	**Fase H**
		Pembangunan Data Center sebagai database terintegrasi	*v*	*v*				Diskominfo	

		Pembangunan platform backend sebagai penyedia services	*v*	*v*				Diskominfo	
	Pembangunan Aplikasi Terintegrasi	Pembangunan aplikasi masing-masing domain:							
		• Kelompok Aplikasi e-Office Kabupaten Nganjuk			*v*	*v*	*v*	Diskominfo	
		• Kelompok Aplikasi Aset Daerah			*v*	*v*	*v*	Diskominfo	
		• Kelompok Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa			*v*	*v*	*v*	Diskominfo	
		• Kelompok Aplikasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja			*v*	*v*	*v*	Diskominfo	
		• Kelompok Aplikasi e-Services Kabupaten Nganjuk			*v*	*v*	*v*	Diskominfo	

BAB 7 KEAMANAN SPBE

Selama kegiatan ini, diperoleh lima kebijakan keamanan yang didapatkan dan dua standar dan referensi utama, diantaranya Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan SPBE, Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE dan dari Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Kebijakan atau regulasi kemanan yang sudah ada pada lingkup Kab Nganjuk tercantum dalam Tabel 24.

Tabel 24. Daftar Semua Regulasi Keamanan Kab. Nganjuk

No	Kebijakan
1	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/429/K/411.013/2022 Pembentukan Tim Teknis Auditor Dan Tim Teknis Auditee Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Nganjuk
3	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 tahun 2020 Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
4	Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/170/411.012/2018 Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dikabupaten Nganjuk
5	Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/238/K/411.013/2022 Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nganjuk
6	Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/236/K/411.013/2022 Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik Kabupaten Nganjuk.

Tabel 25. Standar Keamanan Kabupaten Nganjuk

No	Standar Keamanan
1	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Spbe
2	Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit SPBE

Saat ini dokumen yang ditemukan untuk kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur SPBE ada pada dokumen rencana induk

teknologi informasi Kabupaten Nganjuk dan laporan evaluasi pelaksanaan SPBE yang dilakukan oleh BSSN. Dokumen ini menyatakan bahwa audit dan keamanan informasi telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan terkait keamanan aplikasi dan keamanan jaringan. Kegiatan ini tertuang dalam berita acara no 027/286/411.312/2022 pada tanggal 8 Juli 2022 terhadap uji petik sebanyak 9 Laporan Uji keamanan informasi. Metode yang digunakan adalah menggunakan OWASP ZAP, hasil pengujian seperti pada Tabel 26.

Tabel 26. Audit dan Keamanan Aplikasi

No	Kegiatan	Hasil Pengujian		
		Lolos	Low	Medium
1	Laporan Uji Keamanan Website Pemkab Nganjuk	6	1	3
2	Laporan Uji Keamanan Sistem Laporan Kinerja ASN	6	1	3
3	Laporan Uji Keamanan Sistem Layanan Darurat	6	1	3
4	Laporan Uji Keamanan Sistem Elektronik Terpadu Daerah Online	8	1	1
5	Laporan Uji Keamanan Website Pemkab Nganjuk	6	1	3
6	Laporan Uji Keamanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	6	2	2
7	Laporan Uji Keamanan Webiste Dinas Komunikasi dan Informatika	6	2	2
8	Laporan Uji Keamanan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online	7	1	2
9	Laporan Uji Keamanan Sistem Aplikasi Absensi Elektronik	6	2	2
4	Laporan Uji Keamanan Sistem Elektronik Terpadu Daerah Online	8	1	1
5	Laporan Uji Keamanan Website Pemkab Nganjuk	6	1	3
6	Laporan Uji Keamanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	6	2	2

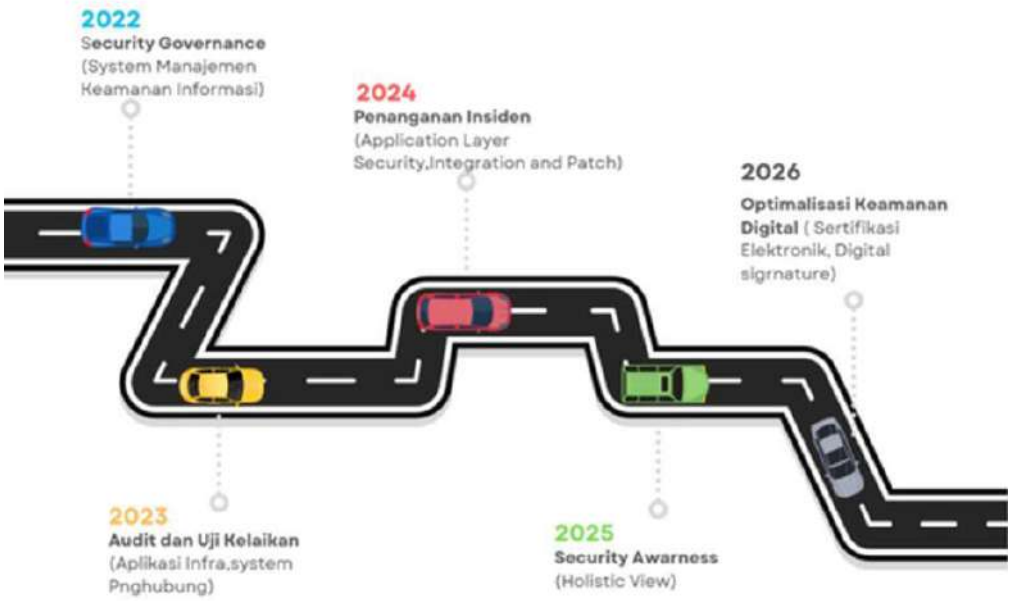
Pembangunan Sistem Keamanan Informasi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Keamanan SPBE mencakup sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE yang meliputi:

a. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
b. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
c. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

d. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanis meverifikasi dan validasi.
e. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tandatangan digital dan jaminan oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK, melalui penggunaan sertifikat digital.

Dalam menerapkan Keamanan SPBE, maka Satuan Kerja di lingkungan Kab Nganjuk berkewajiban melaporkan setiap permasalahan keamanan SPBE ke Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK untuk diselesaikan. Jika ada permasalahan terkait keamanan maka Penyelesaain permasalahan keamanan SPBE berdasarkan teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Realisasi dari kondisi yang diinginkan serta daftar pekerjaan solusi direncanakan melalui tahapan peta jalan yang dapat memandu Kota Nganjuk menjadi lebih stabil dan matang dalam hal ini pada domain arsitektur keamanan seperti Gambar 7.1



Gambar 7.1 Roadmap Arsitektur Keamanan

Sesuai Peta Rencana SPBE, program terkait tata keamanan SPBE pada Peta Jalan ini terdiriatas:

1. Sistem Manajemen Keamanan Informasi
2. Audit dan Uji Kelaikan
3. Penanganan Insiden
4. Kesadaran Keamanan Informasi
5. Optimalisasi Keamanan Siber dan Digital

Tabel 27. Peta Jalan Arsitektur Keamanan Kab. Nganjuk

No	Daftar Pekerjaan	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Sistem Manajemen Keamanan Informasi**					
	Penyusunan framework dan standar keamanan di sektor pemerintah pada Instansi Pusat maupun pemerintah daerah	√				
	Penyusunan dan Penerapan Pedoman Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Instansi Pusat dan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
	Penyusunan dan penerapan instrumen uji kelaikan secara mandiri untuk instansi pusat dan pemerin tah daerah	√	√	√	√	√
	Pemasangan honeypot pada instansi pusat dan pemerintah daerah		√	√	√	√
	Pengelolaan DMZ Nasional pada infrastruktur TIK Nasional		√	√	√	√
	Penyediaan layanan security as a services(SecaaSJ pada infrastruktur TIK dan pengguna SPBE		√	√	√	√
2	**Audit dan Uji Kelaikan**					
	Uji kelaikan keamanan aplikasi umum	√	√	√	√	√
	Uji kelaikan keamanan infrastruktur	√	√	√	√	√

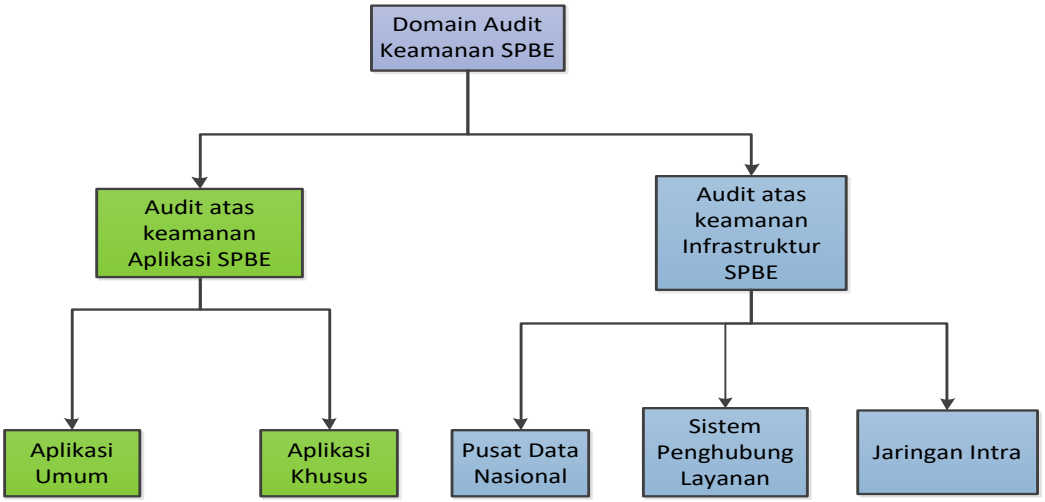
	Uji kelaikan keamanan system penghubung lavanan	√	√	√	√	√
	Uji kelaikan keamanan Jaringan intra pemerintah	√	√	√	√	√
	Pengujian aplikasi/ system dengan pentester atau audit khusus keamanan	√	√	√	√	√
3	**Penanganan Insiden**					
	Pembentukan CSIRT pada instansi pusat dan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
	Penerapan Web Application Firewall dengan standar OWASP		√	√	√	√
4	**Security Awareness / Penerapan Budaya Keamanan Informasi**					

BAB 8 AUDIT TIK

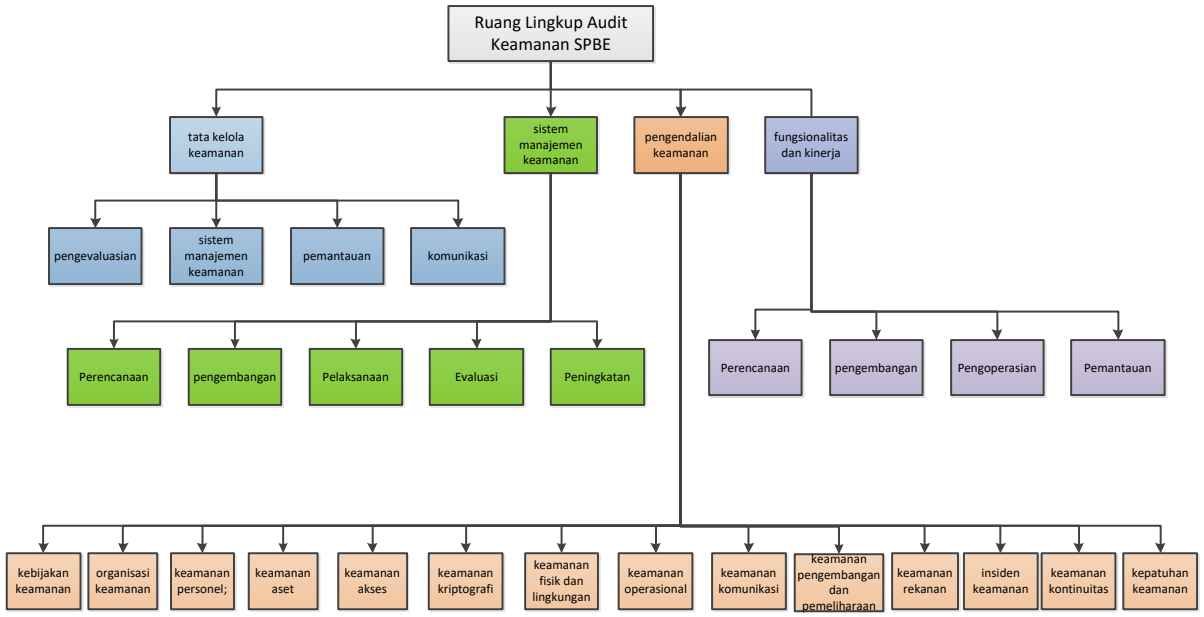
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis eletronik (SPBE) sesuai ketentuan pada peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, maka guna memastikan kesiapan tim dan instrumen audit keamanan SPBE maka Kab Nganjuk memberi landasan hukum sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati Nganjuk No 11 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Sistem pemerintah berbasis elektronik
b. Keputusan Bupati Nganjuk No 188/429/K/411.200/2022 Tentang Pembentukan Tim Teknis Auditor dan Tim Teknis Auditee Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nganjuk.
c. Surat Perintah Tugas Sekertaris Daerah Kabupaten Nganjuk Tentang Susunan Tim Teknis Auditor dan Tim Teknis Auditee Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Nganjuk.

Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit SPBE merumuskan bahwa Audit keamanan SPBE terdiri dari audit kemananan aplikasi umum, audit keamanan aplikasi khusus, audit keamanan infrastrukur SPBE nasional dan audit keamanan infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah. Pemetaan ini dapat lihat pada Gambar xxx.



Gambar 8.1 Domain Audit Keamanan SPBE



Gambar 8.2 Ruang Lingkup Audit Keamanan SPBE Kabupaten Nganjuk

Audit atas keamanan aplikasi SPBE meliputi aplikasi Umum dan Khusus. Hasil identifikasi kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi Umum

1. Sistem elektronik terpadu daerah online (SEDUDO)

   Sistem elektronik terpadu daerah online (SEDUDO) pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nganjuk, sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online. Hasil temuan dan rekomendasi seperti pada Tabel 28 Dibawah ini.

Tabel 28. Hasil Temuan dan Rekomendasi Audit Aplikasi SEDUDO

Domain	Tahapan	Aspek	Temuan	Rekomendasi
Tata kelola	Tata Kelola TIK	Pengaturan TIK	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil belum melaksanakan evaluasi eksternal menyeluruh (Audit) terkait sumber daya TIK (Aplikasi dan infrastruktur TIK)	Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil untuk melaksanakan evaluasi eksternal menyeluruh (audit) terkait sumber daya TIK (aplikasi dan infrastruktur TIK)
Manajemen	Perencanaa n TIK	Manajemen Risiko	Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil belum melakukan evaluasi risiko terkait TIK pada aplikasi SEDUDO	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melaksanakan evaluasi risiko terkait TIK pada aplikasi SEDUDO dengan berpedoman pada PERBUP 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Manajemen	Perencanaa n TIK	Manajemen Risiko utilitas/Kinerja jaringan	Belum terdapat pedoman tentang ketergunaan jaringan	Dinas pendudukan dan pencatatan sipil untuk menyusun prosedur atau pedoman tentang ketergunaan jaringan Intra Pemerintah dan jaringan cadangan sebagai jaringan yang digunakan oleh aplikasi serta penggunaan jaringan dan perangkat keras (instalasi, akses,navigasi utilitas dan

				report) dalam rangka pengoperasian jaringan.
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)	Belum terdapat peraturan tentang Pemeliharaan Perangkat Lunak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan tentang Pemeliharaan Perangkat Lunak
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)	Belum terdapat peraturan tentang Manajemen Konfigurasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan tentang Manajemen Konfigurasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum terdapat peraturan organisasi tentang Pemeliharaan Komponen dan panduan Pencatatan Pemeliharaan Peralatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan organisasi tentang Pemeliharaan Komponen dan panduan Pencatatan Pemeliharaan Peralatan tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap risiko khususnya yang berkaitan dengan aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap risiko khususnya yang berkaitan dengan aplikasi SEDUDO dengan berpedoman

				pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap risiko	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap risiko khususnya yang berkaitan dengan aplikasi SEDUDO dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen SDM	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melakukan pengembangan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM TIK khususnya terkait aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya melakukan pengembangan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM TIK khususnya terkait aplikasi SEDUDO
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Data yang dihasilkan belum memenuhi Standar Data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan) yang ditetapkan oleh Pembina Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait standar

			Hal ini disebabkan karena belum adanya standar data yang ditetapkan oleh Pembina Data	data yang harus dipedomani
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Data yang dihasilkan belum dapat diyakini telah dilengkapi oleh Metadata dengan struktur dan format yang baku dan ditetapkan oleh Pembina Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait struktur dan format yang baku Metadata
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Data yang dihasilkan belum menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum adanya pedoman mengenai kode referensi dan/atau data induk dari instansi yang berwenang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait pedoman mengenai kode referensi dan/atau data induk
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Dalam penyelenggaraan satu data Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melaksanakan Perencanaan Data yang terdiri dari Prioritas dan Rencana Aksi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkair pedoman dalam Perencanaan Data yang terdiri dari penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melaksanakan Pemeriksaan Data dan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan

			disesuaikan dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data	Informatika terkait Pemeriksaan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki dan mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi data dan ketentuan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera menyusun dan mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi data dan ketentuan Data Apabila ada kendala dalam proses penyusunan dan pengelolaan arsitektur data, supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengoperasian aplikasi SEDUDO belum memiliki, mengelola Data Induk dan Data Referensi yang sesuai struktur / format baku yang dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan serta menghindari duplikasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengoperasian aplikasi SEDUDO supaya segera menyusun, mengelola Data Induk dan Data Referensi yang sesuai struktur/format baku yang dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhri dan dapat dibagipakaikan serta menghindari duplikasi

				Apabila ada kendala dalam mengelola Data Induk dan Data Referensi yang sesuai struktur/format baku supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam operasionalisasi aplikasi SEDUDO belum memiliki dan melaksanakan Manajemen Basis Data untuk menjamin penyimpanan data yang akurat dan dapat dibagipakaikan, ketersedian data yang terus menerus dan keamanan data di Pusat Data Nasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam operasionalisasi aplikasi SEDUDO supaya melaksanakan Manajemen Basis Data untuk menjamin penyimpanan data yang akurat dan dapat dibagi pakaikan, ketersediaan data yang terus menerus dan keamanan data di Pusat Data Nasional Apabila ada kendala dalam pelaksanaannya supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam operasionalisasi aplikasi SEDUDO belum melaksanakan Manajemen Kualitas Data untuk menjamin data yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam operasionalisasi aplikasi SEDUDO supaya melaksanakan Manajemen Kualitas Data untuk menjamin data yang dihasilkan memenuhi

			Indonesia dan diperbaharui sesuai jadwal pemutakhiran data	prinsip Satu Data Indonesia dan diperbaharui sesuai jadwal pemutakhiran data Apabila ada kendala supaya melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Persyaratan Layanan (Business Requirement)	Pada operasionalisasi aplikasi SEDUDO, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum membuat perjanjian layanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada operasionalisasi aplikasi SEDUDO supaya membuat/menyusun perjanjian layanan
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Persyaratan Layanan (Business Requirement)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu (SMM), khususnya dalam operasionalisasi aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu (SMM) Khusunya dalam operasionalisasi aplikasi SEDUDO
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum merencanakan aktifitas manajemen pengetahuan aplikasi SEDUDO dalam SPBE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan segera merencanakan aktifitas manajemen pengetahuan aplikasi SEDUDO dalam SPBE Apabila ada kendala supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika

Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan yang dihasilkan dalam SPBE kedalam sistem aplikasi manajemen pengetahuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan yang dihasilkan dalam SPBE kedalam sistem aplikasi manajemen pengetahuan. Apabila ada kendala supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Manajemen	Pengetahuan TIK	Manajemen Pengetahuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mengolah pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya mengolah pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan. Apabila ada kendala untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memanfaatkan pengetahuan SPBE dan mengevaluasinya untuk meningkatkan mutu pelayanan SPBE khususnya terkait aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya memanfaatkan pengetahuan SPBE dan mengevaluasinya untuk meningkatkan mutu pelayanan SPBE khusunya terkait aplikasi SEDUDO Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan dan evaluasi pengetahuan SPBE

				mengalami kendala dan kesulitan, supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melakukan perencanaan untuk perubahan untuk aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya melakukan perencanaan untuk perubahan untuk aplikasi SEDUDO
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menganalisis semua permintaan untuk perubahan dalam menentukan dampak dan resiko yang ditimbulkan pada lingkup perubahan (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Layanan) khusunya terkait aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya menganalisis semua permintaan untuk perubahan dalam menentukan dampak dan resiko yang ditimbulkan pada lingkup perubahan (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Layanan) khususnya terkait aplikasi SEDUDO
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencaan	Persyarata Layanan (Business Requirement)	Belum terdapat mekanisme yang mengatur tentang bagaimana menerapkan setiap perubahan terhadap pembaruan solusi, dokumentasi pengguna dan prosedur-prosedur yang telah ada sebelum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera menyusun mekanisme yang mengatur tentang bagaimana menerapkan setiap perubahan terhadap pembaruan

			perubahan dilakukan, khususnya terkait aplikasi SEDUDO	solusi, dokumentasi pengguna dan prosedur-prosedur yang telah ada sebelum perubahan dilakukan, khususnya berkaitan dengan aplikasi SEDUDO
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam operasionalisasi aplikasi SEDUDO belum memantau perubahan dengan sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasikan perubahan yang ditolak dan mengkomunikasikan status yang disetujui, perubahan-perubahan yang masih dalam proses dan lengkap	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam operasionalisasi aplikasi SEDUDO supaya memantau perubahan dengan sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasi-kan perubahan yang ditolak dan mengkomunikasikan status yang disetujui, perubahan-perubahan yang masih dalam proses dan lengkap
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menentukan pihak yang terlibat dalam aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya menentukan pihak yang terlibat dalam perubahan aplikasi SEDUDO. Atas hal tersebut supaya didokumentasikan dan diadministrasikan-kan
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil suapaya

			melakukan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan pada layanan TIK, khususnya terkait aplikasi SEDUDO	melakukan evaluasi terhadap perubahan yang telah telah dilakukan pada layanan TIK, khususnya terkait aplikasi SEDUDO
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menyusun pedoman pemanfaatan dan pemliharaan aset TIK termasuk keoptimalan pemanfaatan aset, khususnya terkait aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya penyusunan pedoman pemanfaatan dan pemeliharaan aset TIK termasuk keoptimalan pemanfaatan aset, khususnya terkait aplikasi SEDUDO. Apabila ada kendala dan kesulitan dalam pelaksanaan tindak lanjut supaya berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melakukan pengawasan dan pengendalian aset TIK termasuk pengendalian resiko, pemantauan, dan/atau penertiban, khususnya terkait aplikasi SEDUDO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya melakukan pengawasan dan pengendalian aset TIK termasuk pengendalian resiko, pemantauan, dan/atau penertiban, khususnya terkait aplikasi SEDUDO.
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

			Sipil belum memilik pedoman sebagai panduan dalam mengelola lisensi perangkat lunak untuk mempertahankan jumlah lisensi yang optimal dan mendukung kebutuhan bisnis	Sipil supaya segera menyusun pedoman sebagai panduan dalam mengelola lisensi perangkat lunak untuk mempertahanka n jumlah lisensi yang optimal dan mendukung kebutuhan bisnis. Apabila ada kendala dalam penyusunan pedoman supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Manajemen	Pengemban gan TIK	Manajemen Aset	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki pedoman baku/cara untuk memastikan jumlah lisensi yang dimiliki cukup untuk mencakup perangkat lunak (software) terpasang (installed) yang digunakan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera menyusun pedoman baku/cara untuk memastikan jumlah lisensi yang dimiliki cukup untuk mencakup perangkat lunak (software) terpasang (installed) yang digunakan. Apabila mengalami kendala/kesulita n dalam penyusunan pedoman, supaya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Manajemen	Pengemban gan TIK	Manajemen Pengetahuan	Belum ada mekanisme tentang mengembangkan layanan TIK sesuai peta rencana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera menyusun mekanisme

			manajemen layanan SPBE (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi) khususnya terkait aplikasi SEDUDO	tentang mengembangkan layanan TIK sesuai peta rencana manajemen layanan SPBE (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi), khususnya terkait aplikasi SEDUDO.
Manajemen	Pengoperasian TIK	Manajemen Operasional Layanan	Belum dilakukan evaluasi layanan TIK yang dikembangkan sesuai dengan rencana manajemen mutu instansi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan penyusunan rencana manajemen instansi Selanjutnya atas rencana manajemen mutu instansi supaya dilakuakan evaluasi layanan TIK, khususnya terkait aplikasi SEDUDO Apabila ada kendala dalam pelaksanaannya untuk berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Manajemen	Pengoperasian TIK	Manajemen Operasional Layanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melakukan reviu dan evaluasi seluruh proses manajemen layanan SPBE (pengguna SPBE dan pengoperasian layanan SPBE)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya melakukan reviu dan evaluasi seluruh proses manajemen layanan SPBE (pengguna SPBE dan pengoperasian layanan SPBE)

Manajemen	Pemantauan TIK	Manajemen Sistem Pengendalian Internal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melakukan kegiatan untuk memantau, membandingkan, dan meningkatkan lingkungan kendali TIK (sesuai obyek audit) dan kerangka kerja kendali untuk memenuhi tujuannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun kerangka kerja kendali. Selanjutnya untuk melakukan kegiatan untuk memantau, membandingkan, dan meningkatkan lingkungan kendali TIK (sesuai obyek audit) dan kerangka kerja kendali untuk memenuhi tujuannya
Manajemen	Pemantauan TIK	Manajemen Sistem Pengendalian Internal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meninjau operasi kendali, termasuk pemantauan dan uji bukti, untuk memastikan bahwa kendali dalam orises bisnis beroperasi secara efektif, namun atas hal tersebut belum didokumentasikan secara lengkap	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selanjutnya supaya mendokumentasikan secara lengkap atas proses peninjauan operasi kendali, termasuk pemantauan dan uji bukti, untuk memastikan bahwa kendali dalam proses bisnis beroperasi secara efektif
Manajemen	Pemantauan TIK	Manajemen Sistem Pengendalian Internal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mendorong manajemen dan pemilik proses untuk meningkatkan kendali secara proaktif melalui program penilaian mandiri yang berkelanjutan yang mengevaluasi kelengkapan dan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mendorong manajemen dan pemilik proses untuk meningkayan kendali secara proaktif melalui program penilaian mandiri yang berkelanjutan yang mengevaluasi

			efektivitas kendali manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak. Namun atas seluruh rangkaian aktivitas tersebut belum terdokumentasikan dengan baik	kelengkapan dan efektivitas kendali manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak. Atas seluruh rangkaian aktivitas tersebut supaya didokumentasikan dengan baik
Manajemen	Pemantauan TIK	Manajemen Sistem Pengendalian Internal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mengidentifikasi kekurangan kendali dan analisis dan identifikasi akar penyebabnya. Sehingga atas belum terlaksananya hal tersebut, menyebabkan belum adanya langkah untuk meningkatkan kekurangan kendali dan melaporkan kepada para stakeholder	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan identifikasi kekurangan kendali dan analisis dan identifikasi akar penyebabnya. Selanjutnya atas hasil kegiatan tersebut supaya merumuskan, langkah untuk meningkat kekurangan kendali dan melaporkan kepada para stakeholder
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Persyaratan Layanan (Business Requirement)	Belum terdapat Peraturan atau Pedoman Pengembangan Aplikasi mengenai lisensi aplikasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya menyusun Peraturan atau Pedoman Pengembangan Aplikasi mengenai lisensi aplikasi yang di dalamnya mengatur jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan

				wilayah geografis
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)	Belum terdapat peraturan atau pedoman pengembangan aplikasi mengenai kebutuhan perangkat lunak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya menyusun peraturan atau pedoman pengembangan aplikasi mengenai kebutuhan perangkat lunak yand di dalamnya mengatur SOP Aplikasi terkait antar muka, SOP Aplikasi terkait atribut dan SOP Aplikasi terkait batasan desain.
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)	Belum terdapat peraturan yang mengatur Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan terkait Rancangan Perangkat Lunak (Software Design) yang didalamnya mengatur tentang pendeskripsian antar muka dari aplikasi, pengembangan rancangan perangkat lunak tingkat tinggi (high level software design description)
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation)	Belum terdapat peraturan atau pedoman Pengembangan Aplikasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan atau Pedoman Pengembangan Aplikasi yang di dalamnya mengatur tentang metode

				pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak dan perangkat lunak dapat digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Pengujian (Testing)	Belum terdapat peraturan terkait pengujian aplikasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan terkait pengujian aplikasi yang di dalamnya mengatur tentang perencanaan pengujian, pengujain terhadap palikasi meliputi pengujian fungsional (functional and user acceptance testing), pengujian beban (stress testing), pengujian integrasi (integration testing), dan pengujian terhadap pembaruan aplikasi.
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Instalasi/Pemasangan (Installation)	Belum terdapat peraturan terkait prosedut instalasi/pemasangan aplikasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan terkait prosedur instalasi / pemasangan yang di dalamnya mengatur tentang Standar prosedur instalasi / pemasangan (installation

				procedure) kebutuhan personil yang bertugas untuk melakukan instalasi dan Peran dan Tanggung Jawab Pelaksana Instalasi Aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)	Belum terdapat pedoman penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun pedoman penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage) yang mengatur standar perintah dalam perangkat lunak, Pemeliharaan Perangkat Lunak, Panduan Penggunaan Aplikasi dan Daftar pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum terdapat peraturan atau pedoman terkait Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan atau pedoman terkait infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak yang di dalamnya mengatur tentang Perencanaan Sumber Daya dan Peningkatan Beban, simulasi kesiapan insiden gangguan aliran daya, kecepatan penyampaian setiap gangguan aliran daya, kecepatan

				penyampaian setiap gangguan, Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center), yang didukung dengan Rencana Keberlangsungan Kegiatan (Business Continuity Plan) dan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Planning).
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Utilisasi / Kinerja Jaringan	Belum terdapat pedoman tentang Ketergunaan Jaringan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun prosedur atau pedoman tentang ketergunaan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan cadangan sebagai jaringan yang digunakan oleh aplikasi serta Penggunaan jaringan dan Perangkat Keras (instalasi, akses, navigasi, utilisasi, dan report) dalam rangka pengoperasian jaringan.
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)	Belum terdapat peraturan tentang Pemeliharaan Perangkat Lunak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan tentang Pemeliharaan Perangkat Lunak
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software	Belum terdapat peraturan tentang Manajemen Konfigurasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk

		Configuration Management)		menyusun peraturant tentang Manajemen Konfigurasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum terdapat peraturan organisasi tentang Pemeliharaan Komponen dan panduan Pencatatan Pemeliharaan Peralatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun peraturan organisasi tentang Pemeliharaan Komponen dan panduan Pencatatan Pemeliharaan Peralatan

2. SIPENTOL

SIPENTOL pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk. Hasil temuan dan rekomendasi seperti pada Tabel 29 Dibawah ini.

Tabel 29. Hasil temuan dan rekomendasi Audit Aplikasi SIPENTOL

Domain	Tahapan	Aspek	Temuan	Rekomendasi
Tata Kelola	Tata Kelola TIK	Pengaturan TIK	Tata kelola TIK masih belum dilakukan pengaturan TIK, Pengarahan Tata Kelola TIK dan Pengendalian TIK oleh OPD	Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung tata kelola TIK

Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Belum dibentuk TIM Manajemen Resiko yang melakukan pengumpulan data risiko TIK, identifikasi dan analisis risiko serta melakukan evaluasi sampai dengan pelaporan	Membentuk TIM manajemen Resiko terkait TIK yang melakukan pemngumpulan data risiko TIK, identifikasi dan analisis risiko serta melakukan evaluasi sampai dengan pelaporan terkait TIK
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen SDM	Manajemen SDM yang belum dikelola secara memadai dengan melakukan peningkatan kualitas SDM IT	Melakukan pengelolaan SDM IT mulai dari perekrutannya, pengembangan, pembinaan
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Manajemen data masih belum sesuai dengan standar data, arsitektur data, serta manajemen basis dan kualitas data yang dapat terintegrtasi dengan aplikasi yang lainnya	Memperbaiki manajemen data sesuai dengan standar data, arsitektur data, serta manajemen basis dan kualitas data yang dapat terintegrasi dengan aplikasi yang lainnya
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Perencanaan Layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum menetapkan layanan mempublikasikan dan mempertahankan layanan atas aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Online (SiPentol)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar melengkapi dokumen manajemen perencanaan layanan atas aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Online (SiPentol)

Manajemen	Pengoperasian TIK	Manajemen Operasional Layanan	Manajemen Perencanaan Layanan belum ada perjanjian layanan serta belum menetepkan dan memelihara sistem manajemen mutu	Melakukan Manajemen Perencanaan Layanan belum ada perjanjian layanan serta belum menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Manajemen Pengetahuan belum dilaksanakan dan dikelola sehingga mempermudah pengambilan keputusan	Melakukan perbaikan manajemen pengetahuan sistem aplikasi guna meningkatkan mutu pelayanan SPBE
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk belum memiliki SOP terkait pemeliharaan infrastruktur, antara lain: 1) Daftar rinci dan catatan pemeliharaan, 2) Identifikasi peralatan terkait garansi/lifetime, perjanjian pemeliharaan dan laporan kinerja peralatan, 3) catatan pemeliharaan komponen dan penggantian suku cadang sesuai standard, dan 4) Penyusunan laporan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk agar melengkapi SOP terkait pemeliharaan infrastruktur, antara lain: 1) Daftar rinci dan catatan pemeliharaan, 2) Identifikasi peralatan terkait garansi/lifetime, perjanjian pemeliharaan dan laporan kinerja peralatan, 3) catatan pemeliharaan komponen dan penggantian suku cadang sesuai standard, dan 4) Penyusunan laporan

			perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data	perencanaan dan perjadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Manajemen perubahan belum dilaksanakan dan dikelola pada lingkup perubahan (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Layanan)	Melakukan perbaikan manajemen perubahan belum dilaksanakan dan dikelola pada lingkup perubahan (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Layanan)
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Manajemen Aset belum memadai yang dilakukan mulai dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, pengawasan sampai dengan pemantauan dan penertiban.	Memperbaiki manajemen aset dan identifikasi kebutuhan pemeliharaan aplikasi, pengawasan dan penatausahaan.
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengembangan Layanan	Manajemen Pengembangan Layanan belum dilakukan dan dikelola sesuai dengan peta dan rencana manajemen layanan SPBE.	Melakukan manejemen pengembangan layanan yang disesuaikan dengan manajemen layanan SPBE.

Manajemen	Pengoperasian TIK	Manajemen Operasional Layanan	Manajemen operasional layanan belum dilakukan pemantauan, reviu dan evaluasi dan perbaikan proses manajemen layanan Aplikasi	Memperbaiki manajemen operasional layanan dengan melakukan pemantauan, reviu dan evaluasi dan perbaikan proses manajemen layanan Aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Utilisasi / Kinerja Jaringan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Nganjuk belum memiliki SOP terkait ketergunaan jaringan, antara lain: 1) Ketergunaan Jaringan Intra Pemerintah dan jaringan cadangan, 2) Pedoman penggunaan jaringan dan perangkat keras (instalasi, akses, navigasi, utilisasi, dan report) 3) Jika terjadi gangguan dan penangannya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Nganjuk agar melampirkan SOP terkait ketergunaan jaringan, antara lain: 1) Ketergunaan Jaringan Intra Pemerintah dan jaringan cadangan, 2) Pedoman penggunaan jaringan dan perangkat keras (instalasi, akses, navigasi, utilisasi, dan report), 3) Jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam pengoperasian jaringan.
Manajemen	Pemantauan TIK	Manajemen Sistem Pengendalian Internal	Manajemen Sistem Pengendalian Internal belum dilakukan dan dilaksanakan	Melakukan optimalisasi sistem pengendalian internal dengan melakukan kendali dan analisis dan identifikasi atas proses dan kebijakan yang ada.

Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memiliki SOP terikait: 1) Penelaahan insiden yang terjadi, 2) Simulasi pengujian memutuskan aliran daya, 3) Pencatatan laporan setiap pesan kesalahan dan penyelesaian permasalahan, 4) Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) . dan 5) SOP perencanaan sumber daya dan peningkatan beban selama kurun waktu tertentu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar melampirkan SOP terkait : 1) Penelaahan insiden yang terjadi seperti tempat, waktu, dampak ke layanan, cara mengatasi, dan cara menghindari insiden serupa, 2) Simulasi pengujian pemutusan aliran daya untuk membuktikan UPS dan start up generator dapat beroperasi dengan baik, 3) Pencatatan laporan setiap pesan keasalahan dan penyelesaian permasalahan untuk setiap kejadian terkait pengoperasian aplikasi pada serber pusat data, 4) Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) yang didukung dengan Rencana Keberlangsungan kegiatan (Business Continuity Plan) dan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Planning) , dan

				5) SOP perencanaan sumber daya dan peningkatan beban selama kurun waktu tertentu
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Nganjuk diketahui bahwa belum melaksanakan: 1) Penteapan ruang lingkup manajemen konfigurasi perangkat lunak, 2) Penetapan jadwal manajemen konfigurasi perangkat lunak, 3) Alokasi sumberdaya manajemen konfigruasi perangkat lunak, dan 4) Cara pengelolaan repository manajemen konfigurasi perangkat lunak.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Nganjuk agar melaksanakan dan melampirkan dokumen terkait: 1) Penetapan ruang lingkup manajemen konfigurasi perangkat lunak, 2) Penetapan jadwal manajemen konfigurasi perangkat lunak, 3) Alokasi sumberdaya manajemen konfigurasi perangkat lunak, dan 4) Cara pengelolaan repository manajemen konfigurasi perangkat lunak.
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Nganjuk belum memiliki SOP rangkaian proses pemeliharaan aplikasi beserta alokasi sumber	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Nganjuk agar melampirkan SOP rangkaian proses pemeliharaan aplikasi beserta alokasi sumber

			dayanya dan SOP perekaman dan pelacakan kinerja aplikasi Si-Pentol.	dayanya dan SOP perekaman dan pelacakan kinerja aplikasi Si-Pentol.

3. SI-PRESTASI

SI-PRESTASI pada Dinas Pendidikan kabupaten Nganjuk. Laporan hasil Audit dari badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan nomor X.700/ 492/411.200/2022.

Tabel 30. Hasil temuan dan rekomendasi Audit Aplikasi SI-PRESTASI

Domain	Tahapan	Aspek	Temuan	Rekomendasi
Tata	Tata Kelola TIK	Pengaturan TIK	Instansi belum melaksanakan evaluasi eksternal menyeluruh (audit) terkait sumber daya TIK (aplikasi dan infrastruktur TIK)	Dinas Pendidikan supaya melaksanakan evaluasi eksternal menyeluruh (audit) terkait sumber daya TIK (aplikasi dan infrastruktur TIK)
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Manajemen Risiko belum memetakan risiko TIK	Dinas Pendidikan dalam menyusun Manajemen Risiko supaya memetakan risiko TIK
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Instansi belum melakukan pelaporan terkait risiko TIK	Dinas Pendidikan supaya melakukan pelaporan terkait risiko TIK
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Instansi belum melakukan penetapan kebijakan sesuai dari hasil manajemen risiko	Dinas Pendidikan supaya melakukan penetapan kebijakan sesuai dari hasil manajemen risiko
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Instansi belum melakukan pengumpulan data risiko TIK, identifikasi dan	Dinas Pendidikan supaya melakukan pengumpulan data risiko TIK, identifikasi dan

			analisis risiko terkait TIK	analisis risiko terkait TIK
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Belum dilaksanakan pemantauan resiko atas implementasi pemanfaatan TIK di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Dinas Pendidikan supaya melaksanakan pemantauan resiko atas implementasi pemanfaatan TIK
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Dokumen MR belum memetakan risiko terkait TIK	Dinas Pendidikan Supaya Dokumen MR memetakan risiko terkait TIK
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Risiko	Instansi belum melakukan proses penilaian terhadap kinerja SDM TIK serta melakukan tindak lanjut baik pemberian reward dan punishment	Dinas Pendidikan supaya melakukan proses penilaian terhadap kinerja SDM TIK serta melakukan tindak lanjut baik berupa pemberian reward dan punishment
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen SDM	Belum terdapat data induk/kode referensi	Dinas Pendidikan supaya menyusun data induk/kode referensi
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Instansi belum melaksanakan penyebarluasan data melalui portal satu data Indonesia	Dinas Pendidikan supaya melaksanakan penyebarluasan data melalui portal satu data Indonesia
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Instansi belum memiliki dan mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi data dan ketentuan Data	Dinas Pendidikan supaya menyusun dan mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi data dan ketentuan Data
Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Data	Instansi belum memiliki dan melaksanakan Manajemen Basis Data untuk menjamin penyimpanan data yang akurat dan dapat dibagipakaikan, ketersediaan data yang terus menerus dan keamanan data di Pusat Data Nasional	Dinas Pendidikan supaya memiliki dan melaksanakan Manajemen Basis Data untuk menjamin penyimpanan data yang akurat dan dapat dibagipakaikan, ketersedian data yang terus-menerus dan keamanan data di Pusat Data Nasional

Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Perencanaan Layanan	Instansi belum menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu (SMM)	Dinas Pendidikan supaya menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu (SMM)
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Instansi belum merencakan aktifitas manajemen pengetahuan (sesuai objek audit) dalam SPBE	Dinas Pendidikan supaya menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu (SMM)
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Instansi belum mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan yang dihasilkan dalam SPBE kedalam sistem aplikasi manajemen pengetahuan	Dinas Pendidikan supaya mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan yang dihasilkan dalam SPBE kedalam sistem aplikasi manajemen pengetahuan
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Instansi belum mengolah pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan	Dinas Pendidikan supaya mengolah pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Belum terdapat dokumen pemanfaatan pengetahuan SPBE yang dilaporkan secara informal	Dinas Pendidikan supaya melaporkan dokumen pemanfaatan pengetahuan SPBE secara informal
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Instansi belum melakukan perencanaan untuk perubahan	Dinas Pendidikan supaya melakukan perencanaan untuk perubahan
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Instansi belum menganalisis semua permintaan untuk perubahan dalam menentukan dampak dan resiko yang ditimbulkan pada lingkup perubahan (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Layanan)	Dinas Pendidikan supaya menganalisis semua permintaan untuk perubahan dalam menentukan dampak dan resiko yang ditimbulkan pada lingkup perubahan (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur, Aplikasi dan Layanan)
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Instansi belum menerapkan setiap perubahan terhadap	Dinas Pendidikan selanjutnya supaya menerapkan setiap perubahan

			pembaruan solusi, dokumentasi pengguna dan prosedur-prosedur yang telah ada sebelum dilakukan	terhadap pembaruan solusi, dokumentasi pengguna dan prosedur-prosedur yang telah ada sebelum perubahan dilakukan
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Perubahan	Instansi belum memantau perubahan dengan sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasikan perubahan yang ditolak dan mengkomunikasikan status yang disetujui, perubahan-perubahan yang masih dalam proses dan lengkap	Dinas Pendidikan supaya memantau perubahan dengan sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasikan perubahan yang ditolak dan mengkomunikasikan status yang disetujui, perubahan-perubahan dalam proses dan lengkap
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	Instansi belum melaksanakan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan pada layanan TIK	Dinas Pendidikan supaya melakukan evaluasi terhadap perubahan yang terlah dilakukan pada layanan TIK
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Instansi belum melakukan penatausahaan aset TIK (pencatatan/pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) dalam rangka penilaian aset TIK yang dimiliki	Dinas Pendidikan supaya melakukan penataushaan aset TIK (pencatatan, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) dalam rangka penilaian aset TIK yang dimiliki
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Aset TIK belum dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal dan belum masuk sebagai Aset Tak Berwujud	Aset TIK supaya dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal dan dimasukan sebagai Aset Tak Berwujud
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Pengawasan dan pengendalian aset TIK termasuk pengendalian resiko, pemantauan, dan/atau penertiban belum optimal	Pengawasan dan pengendalian aset TIK termasuk pengendalian resiko, pemantauan, dan/atau penertiban supaya dilaksanakan secara optimal

Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Belum terdapat dokumen terkait pengelolaan lisensi perangkat lunak untuk mempertahankan jumlah lisensi yang optimal dan mendukung kebutuhan bisnis	Pengelolaan lisensi perangkat lunak untuk mempertahankan jumlah lisensi yang optimal dan mendukung kebutuhan bisnis supaya dilengkapi dokumen pendukung yang memadai
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Instansi belum memastikan jumlah lisensi yang dimiliki cukup untuk mencakup perangkat lunak (software) terpasang (installed) yang digunakan	Dinas Pendidikan supaya memastikan jumlah lisensi yang dimiliki cukup untuk mencakup perangkat lunak (software) terpasang (installed) yang digunakan dan didukung dengan dokumen pemastian jumlah lisensi
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Aset	Belum terdapat mekanisme/prosedur/SOP pengelolaan perubahan status aset TIK (pemindahtangan an, pemusnahan, penghapusan)	Menyusun mekanisme/prosedur/SOP pengelolaan perubahan status aset TIK (pemindahtangan an, pemusnahan, penghapusan)
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Pengembagan Layanan	Instansi belum optimal dalam mengembangkan layanan TIK sesuai peta rencana manajemen layanan SPBE (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi)	Dinas Pendidikan supaya secara optimal mengembangkan layanan TIK sesuai peta rencana manajemen layanan SPBE (proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi)
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Sistem Pengendalian Internal	Instansi belum secara berkesinambungan memantau, membandingkan, dan meningkatkan lingkungan kendali TIK (sesuai obyek audit) dan kerangka kerja	Selanjutnya secara berkesinambungan memantau, membandingkan, dan meningkatkan lingkungan kendali TIK (sesuai obyek audit) dan kerangka kerja kendali untuk

			kendali untuk memenuhi tujuannya	memenuhi tujuannya
Manajemen	Pengembangan TIK	Manajemen Sistem Pengendalian Internal	Instansi belum meninjau operasi kendali, termasuk pemantauan dan uji bukti, untuk memastikan bahwa kendali dalam proses bisnis beroperasi secara efektif	Dinas Pendidikan supaya meninjau operasi kendali,e termasuk pemantauan dan uji bukti, untuk memastikan bahwa kendali dalam proses bisnis beroperasi secara efektif
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Persyaratan Layanan (Business Requirement)	Aplikasi layanan yang diusulkan belum menguraikan ruang lingkup proyek yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional	Aplikasi layanan yang diusulkan supaya menguraikan ruang lingkup proyek yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Persyaratan Layanan (Business Requirement)	Lisensi yang digunakan pada Aplikasi masih membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis	Lisensi yang digunakan pada Aplikasi seharusnya tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)	Belum terdapat penggambaran interaksi antara komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface)	Selanjutnya supaya ada penggambaran interaksi antara komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface)
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)	Belum terdapat batasan khusus yang harus ada di dalam rancangan perangkat lunak	Selanjutnya agar ada batasan khusus di dalam rancangan perangkat lunak
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)	Sistem aplikasi dirancang belum memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan	Selanjutnya supaya sistem aplikasi dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan

Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)	Belum terdapat deskripsi rancangan detil teknis basis data dari aplikasi dan belum memiliki dokumen mengenai detil teknis basis data (detail of database engineering design)	Selanjutnya menyusun deskripsi rancangan detil teknis basis data dari aplikasi dan menyusun dokumen mengenai detil teknis basisdata (detail of database engineering design)
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)	Bentuk dan proses rancangan komponen aplikasi belum memberikan detail dan definisi dari actual logic untuk setiap komponen sistem	Menyusun diskripsi rancangan perangkat lunak tingkat rendah dan memberikan detail dan definisi dari actual logic untuk setiap komponen sistem
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)	Arsitektur aplikasi belum mengimplementasikan pola API gateway	Arsitektur aplikasi agar mengimplementasikan pola API gateway
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)	Belum ada penjelasan arsitektur microservices	Menyusun penjelasan arsitektur microservices
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Implementasi Perangkat Lunak (Sofware Implementation)	Dalam pengembangan aplikasi terdapat pengkodean hanya saja belum terdokumentasikan	Dalam pengembangan aplikasi supaya mendokumentasikan pengkodean
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation)	Sumber aplikasi belum dapat dimodifikasi/bersifat open source dan dapat dihimpun sebagai produk kompilasi kode sumber (compiled)	Supaya memodifikasi sumber aplikasi dan menghimpun sebagai produk kompilasi kode sumber (compiled)
Fungsionaltias dan Kinerja	Pengembangan	Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation)	Kode aplikasi belum bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non fungsional	Mencamtukan kode sumber pada setiap komponen aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Pengujian (Testing)	Sudah memiliki rencana pengujian (Test Plan) terhadap aplikasi namun belum terdokumentasi	Mendokumentasikan uji coba terhadap aplikasi

Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Pengujian (Testing)	Belum memiliki rancangan pengujian (Test Design) terhadap aplikasi	Selanjutnya agar merancangan pengujain (Test Design) terhadap aplikasi dan mendokumentasikannya
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Pengujian (Testing)		
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Pengujian (Testing	Belum memiliki rancangan atau rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh penguji/terster	Selanjutnya supaya memiliki rancangan atau rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh penguji/tester yang didokumentasikan
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Pengujian (Testing)	Belum memiliki prosedur-prosedur/SOP pengujian terhadap aplikasi	Selanjutnya supaya menyusun prosedur/SOP pengujian terhadap aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Pengujian (Test)	Pengujian terhadap aplikasi meliputi pengujian fungsional (functional dan user acceptance testing), pengujian beban (stress testing), pengujian integrasi (integration testing) belum terdokumentasi	Mendokumentasikan setiap pengujian terhadap palikasi meliputi pengujian fungsional (functional dan user acceptance testing), pengujian beban (stress testing), pengujian integrasi (integration testing)
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Pengujian (Testing)	Belum terdapat pengujian jika terjadi perubahan dalam aplikasi, sebelum migrasi ke lingkungan operasional yang berjalan	Selanjutnya supaya mendokumentasikan pengujian jika terjadi perubahan terhadap aplikasi, sebelum migrasi ke lingkungan operasional yang berjalan
Fungsionaltias dan Kinerja	Pengembangan	Instalasi/Pemasangan (Installation)	Belum terdapat memiliki prosedur instalasi/pemasangan untuk aplikasi	Selanjutnya supaya menyusun prosedur instalasi/pemasangan untuk aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Instalasi/Pemasangan (Installation)	Belum memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi	Selanjutnya supaya menetapkan daftar personil yang bertugas untuk melakuka instalasi/pemasangan aplikasi

Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Instalasi/Pemasangan (Installation)	Belum memiliki rencana terhadap personil yang melakukan instalasi/pemasangan aplikasi	Selanjutnya supaya merencanakan pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi/pemasangan aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Instalasi/Pemasangan (Installation)	Belum memiliki jadwal instalasi/pemasangan aplikasi	Selanjutnya supaya menyusun jadwal instalasi/pemasangan aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengembangan	Instalasi/Pemasangan	Belum memiliki daftar fasilitas yand dibutuhkan selama instalasi/pemasangan aplikasi	Selanjutnnya supaya menyusun daftar fasilitas yang dibutuhkan selama instalasi/pemasangan aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)	Respon aplikasi dalam menanggapi kesalahan dan solusi terhadap permasalahan tersebut belum terdokumentasi	Selanjutnya supaya mendokumentasikan respon aplikasi dalam menanggapi kesalahan dan solusi terhadap permasalahan tersebut
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)	Belum menyediakan fasilitas bantuan dan dokumentasi mengenai pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)	Selanjutnya menyediakan fasilitas bantuan dan dokumentasi mengenai pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum ada dokumen pendukung terkair pihak manajemen dapat menelaah setiap insiden yang terjadi seperti tempat, waktu, dampak kepada layanan, cara mengatasi, dan cara menghindari insiden serupa	Selanjutnya supaya mendokumentasikan pendukung terkait pihak manajemen dapat menelaah setiap insiden yang terjadi seperti tempat, waktu, dampak, kepada layanan, cara mengatasi, dan cara menghindari insiden serupa
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum terdapat prosedur/SOP dan dokumentasi terkait simulasi pengujian memutuskan aliran daya untuk membuktikan UPS dan start-up generator	Selanjutnya supaya menyusun prosedur/SOP dan dokumentasi terkait simulasi pengujian memutuskan aliran daya untuk membuktikan UPS dan start-up generator dapat beroperasi dengan baik

Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum ada prosedur dan dokumentasi terkait Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) yang didukung dengan Rencana Keberlangsungan Kegiatan (Business Continuity Plan) dan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Planning)	Selanjutnya supaya menyusung prosedur/SOP dan dokumentasi terkait Pusat Pemulihn Bencana (Disaster Recovery Center) yang didukung dengan Rencana Keberlangsungan Kegiatan (Business Continuity Plan) dan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Planning)
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum terdapat dokumentasi perencanaan terkait sumber daya dan peningkatan beban selama kurun waktu tertentu	Selanjutnya supaya mendokumentasikan perencanaan terkait sumber daya dan peningkatan beban selama kurun waktu tertentu
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Utilisasi / Kinerja Jaringan	Belum terdapat prosedur / SOP dan dokumentasi terkait ketergunaan Jaringan Intra Pemerintah dan jaringan cadangan sebagai jaringan yang digunakan oleh aplikasi	Selanjutnya supaya menyusun prosedur /SOP danb dokumentasi terkait ketergunaan Jaringan Intra Pemerintah dan jaringan cadangan sebagai jaringan yang digunakan oleh aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pengoperasian	Utilisasi / Kinerja Jaringan	Belum terdapat prosedur dan dokumentasi terkait pedoman penggunaan jaringan dan perangkat keras (instalasi, akses, navigasi, utilisasi, dan report) dalam rangka pengoperasian jaringan	Selanjutnya supaya menyusun prosedur/SOP dan dokumentasi terkait pedoman penggunaan jaringan dan perangkat keras (instalasi, akses, navigasi, utilisasi, dan report) dalam rangka pengoperasian jaringan
Fungsionaltias dan Kinerja	Pengoperasian	Utilisasi / Kinerja Jaringan	Belum terdapat prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penangangannya dalam rangka pengoperasian jaringan	Selanjutnya supaya menyusun prosedur/SOP dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka

				pengoperasian jaringan
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)	Belum memiliki urutan/rangkaian proses pemeliharaan aplikasi	Selanjutnya supaya menyusun urutan/rangkaian proses pemeliharaan aplikasi
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)	Belum ditentukan apa saja yang menjadi lingkup manajemen konfigurasi perangkat lunak	Selanjutnya supaya menentukan apa saja yang menjadi lingkup manajemen konfigurasi perangkat lunak
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)	Belum memiliki repositori manajemen konfigurasi perangkat lunak dan bagaimana cara mengelolanya	Selanjutnya supaya menyusun repositori manajemen konfigurasi perangkat lunak dan bagaimana cara mengelolanya
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)	Belum terdapat dokumen pendukung proses manajemen konfigurasi perangkat lunak	Selanjutnya supaya melengkapi dokumen pendukung proses manajemen konfigurasi perangkat lunak
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)	Belum ada jadwal untuk melakukan proses manajemen konfigurasi perangkat lunak	Selanjutnya supaya menyusun jadwal untuk melakukan proses manajemen konfigurasi perangkat lunak
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum terdapat prosedur dan dokumentasi yang berisi daftar rinci dan catatan pemeliharaan dengan rincian nama peralatan, tanggal pemeliharaan, hasil dan kontak personal	Selanjutnya supaya menyusun prosedur/SOP dan dokumentasi yang berisi daftar rinci dan catatan pemeliharaan dengan rincian nama peralatan, tanggal pemeliharaan, hasil dan kontak personal
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum terdapat prosedur dan dokumentasi yang berisi identifikasi peralatan (garansi/lifetime, perjanjian pemeliharaan dan	Selanjutnya supaya menyusun prosedur dan dokumentasi yang berisi identifikasi peralatan (garansi/lifetime, perjanjian pemeliharaan dan

			laporan kinerja peralatan)	laporan kinerja peralatan)
Fungsionalitas dan Kinerja	Pemeliharaan	Pemeliharaan Infrasturuktur Pendukung Perangkat Lunak	Belum terdapat prosedur/SOP dan dokumentasi terkait penyusunan laporan perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data	Selanjutnya supaya prosedur /SOP dan dokumentasi terkait penyusunan laporan perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data

4. Uji Penetration Test Sistem Informasi

Uji Penetration test pada bulan Juli 2022 untuk 11 Sistem Informasi yang dilakukan internal hasil rekapitulasi pengujian seperti berikut ini:

Tabel 31. Uji Penetration Test

Kegiatan		**Hasil Pengujian**		
		Lolos	**Low**	**Medium**
1	Laporan Uji Keamanan Website Pemkab Nganjuk	6	1	3
2	Laporan Uji Keamanan Sistem Laporan Kinerja ASN	6	1	3
3	Laporan Uji Keamanan Sistem Layanan Darurat	6	1	3
4	Laporan Uji Keamanan Sistem Elektronik Terpadu Daerah Online	8	1	1
5	Laporan Uji Keamanan Website Pemkab Nganjuk	6	1	3
6	Laporan Uji Keamanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	6	2	2
7	Laporan Uji Keamanan Webiste Dinas Komunikasi dan Informatika	6	2	2
8	Laporan Uji Keamanan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online	7	1	2
9	Laporan Uji Keamanan Sistem Aplikasi Absensi Elektronik	6	2	2

b. Aplikasi Khusus

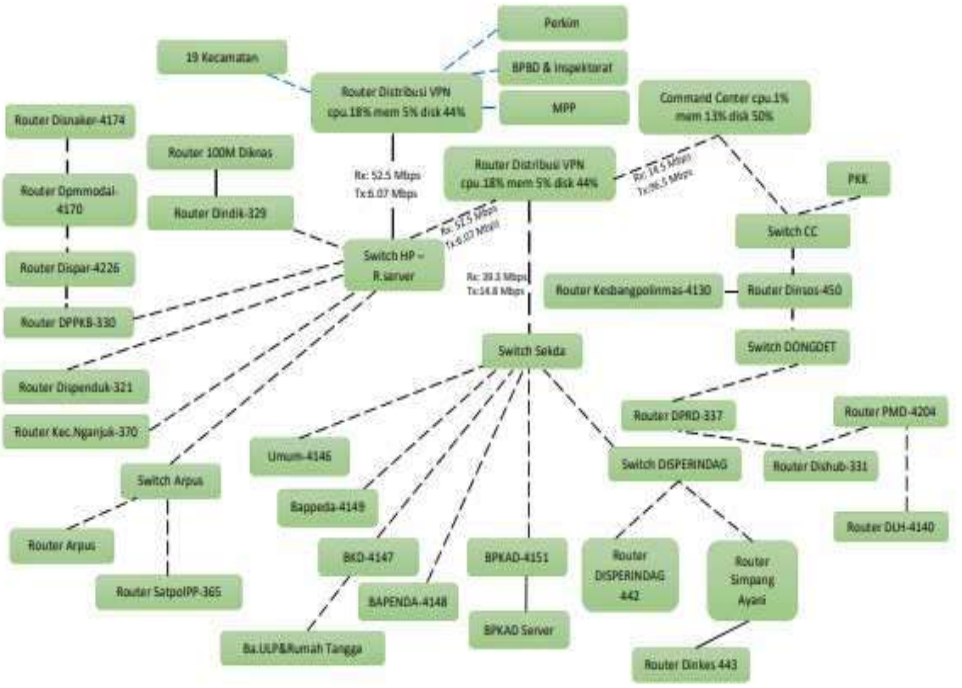
Untuk aplikasi Khusus belum dilakukan audit seperti pada Aplikasi Umun oleh lembaga audit terakreditasi.

AUDIT ATAS KEAMANAN INFRASTRUKTUR SPBE

PROSEDUR – JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		PD	Bidang APTIKA	Seksi Infrastuktur dan Teknologi	Personil DC (Staf)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengajukan surat permohonan layanan Jaringan Intra Pemerintah ke Diskominfo Kab. Nganjuk, dengan memberikan spesifikasi teknis jaringan dan data-data lainnya	1						Surat permohonan	
2	Memverifikasi dan mendisposisikan ke Seksi Infrastruktur dan Teknologi dilanjutkan kepada Tim Personil DC (data Center) untuk proses pelaksanaan		2	2		Surat permohonan	15 menit	Disposisi	
3	mengecek ketersediaan kapasitas infrastruktur (server, listrik, UPS, genset, bandwidth, tempat) kapasitas masih tersedia : a) YA, lanjutkan ke aktivitas no. 4 b) TIDAK, proses selesai	8	Tidak		3	Disposisi	1 jam	Laporan	
4	mengisi form, pengajuan Co-Location server dan hosting aplikasi	4			Ya	Surat permohonan dan disposisi	15 menit	Form ajuan	
5	persetujuan kepala Bidang Aptika dengan mengisi form, Persetujuan Co-Location server dan hosting aplikasi		5			Form pengajuan	15 menit	Form persetujuan	
6	menginformasikan ke PD pemohon bahwa permintaan Jaringan Intra Pemerintah telah disetujui				6	Form persetujuan	15 menit	laporan	
7	Memeriksa ketersediaan perangkat existing di PD Pemohon dengan spesifikasi:	7				Form pengajuan dan persetujuan	1 hari	peralatan	
8	- verifikasi kesesuaian spesifikasi kebutuhan teknis, - proses penempatan NOC PD dan proses instalasi lainnya - memberikan berita acara serah terima serta mengupdate aset register				8	Form pengajuan dan persetujuan	1 hari	Pemasangan server dan laporan hasil kerja	
9	melaporkan kepada PD Pemohon dengan tembusan kepada Kepala Bidang, bahwa instalasi Jaringan Intra Pemerintah sudah selesai dan dapat diakses	laporan	laporan		9		15 menit	Berita acara	

Gambar 8.3 Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Nganjuk



Gambar 8.4 Topologi Jaringan SPBE Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

IKK OUTPUT URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN LAYANAN APLIKASI UMUM DAN APLIKASI KHUSUS YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Aplikasi Umum			Aplikasi Khusus		
		Srikandi	SIPD	SP4N LAPOR!	SIMAS	Presensi Online	PPID
1	Sekretariat Daerah	√	√	√	√	√	√
2	Sekretariat DPRD	√	√	√	√	√	√
3	Inspektorat Daerah	√	√	√	√	√	√
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	√	√	√	√	√
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	√	√	√	√	√	√
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	√	√	√	√	√	√
7	Badan Pendapatan Daerah	√	√	√	√	√	√
8	Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	√	√	√	√	√	√
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	√	√	√	√	√	√
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan	√	√	√	√	√	√
11	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	√	√	√	√	√	√
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	√	√	√	√	√	√
13	Dinas Kesehatan	√	√	√	√	√	√
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√	√
16	Dinas Koperasi dan UM	√	√	√	√	√	√
17	Dinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√	√
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√	√	√
19	Dinas Pemadam Kebakaran	√	√	√	√	√	√
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	√	√	√	√	√	√
21	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√	√
22	Dinas Pendidikan	√	√	√	√	√	√
23	Dinas Pengandalian Penduduk dan KB	√	√	√	√	√	√
24	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	√	√	√	√	√	√
26	Dinas Pertanian	√	√	√	√	√	√
27	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	√	√	√	√	√	√
28	Dinas Sosial PPPA	√	√	√	√	√	√
29	Dinas Tenaga Kerja	√	√	√	√	√	√
30	RSUD Kertosono	√	√	√	√	√	√
31	RSUD Nganjuk	√	√	√	√	√	√
32	Satuan Polisi Pamong Praja	√	√	√	√	√	√
33	Kecamatan Bagor	√	√	√	√	√	√
34	Kecamatan Baron	√	√	√	√	√	√
35	Kecamatan Berbek	√	√	√	√	√	√

No	Nama Perangkat Daerah	Aplikasi Umum			Aplikasi Khusus		
		Srikandi	SIPD	SP4N LAPOR!	SIMAS	Presensi Online	PPID
36	Kecamatan Gondang	√	√	√	√	√	√
37	Kecamatan Jatikalen	√	√	√	√	√	√
38	Kecamatan Kertosono	√	√	√	√	√	√
39	Kecamatan Lengkong	√	√	√	√	√	√
40	Kecamatan Loceret	√	√	√	√	√	√
41	Kecamatan Nganjuk	√	√	√	√	√	√
42	Kecamatan Ngetos	√	√	√	√	√	√
43	Kecamatan Ngluyu	√	√	√	√	√	√
44	Kecamatan Ngronggot	√	√	√	√	√	√
45	Kecamatan Pace	√	√	√	√	√	√
46	Kecamatan Patianrowo	√	√	√	√	√	√
47	Kecamatan Prambon	√	√	√	√	√	√
48	Kecamatan Rejoso	√	√	√	√	√	√
49	Kecamatan Sawahan	√	√	√	√	√	√
50	Kecamatan Sukomoro	√	√	√	√	√	√
51	Kecamatan Tanjunganom	√	√	√	√	√	√
52	Kecamatan Wilangan	√	√	√	√	√	√

Rumus :

Presentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan =

$$\frac{\textit{perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\textit{Jumlah seluruh perangkat daerah}} x\ 100\%$$

$= \frac{52}{52} x\ 100\%$

$= 100\%$

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

IKK OUTPUT URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAYANAN SPBE (LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN) YANG MEMANFAATKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK TAHUN 2024

No	Website/Aplikasi	SSL
1	simas.nganjukkab.go.id	SSL
2	simbak.nganjukkab.go.id	SSL
3	absenmobile.nganjukkab.go.id	SSL
4	bkpsdm.nganjukkab.go.id	SSL
5	simpelmasjar.nganjukkab.go.id	SSL
6	kesbangpol.nganjukkab.go.id	SSL
7	bpbd.nganjukkab.go.id	SSL
8	bapenda.nganjukkab.go.id	SSL
9	SIMDA - Desktop	Tidak
10	SIM GAJI - Desktop (database online)	Tidak
11	SIM ASET - Desktop	Tidak
12	simbal.nganjukkab.go.id	SSL
13	aklap.nganjukkab.go.id/sipkd2023/	SSL
14	bpkad.nganjukkab.go.id	SSL
15	bappeda.nganjukkab.go.id	SSL
16	sidaberkat.nganjukkab.go.id	SSL
17	sikn.nganjukkab.go.id	SSL
18	siarsip.nganjukkab.go.id	SSL
19	arpus.nganjukkab.go.id	SSL
20	disporabudpar.nganjukkab.go.id	SSL
21	dekwita.nganjukkab.go.id	SSL
22	sedudo.nganjukkab.go.id	SSL
23	lasmini.nganjukkab.go.id	SSL
24	dispendukcapil.nganjukkab.go.id	SSL
25	SMILE	Tidak
26	pkm-baron.nganjukkab.go.id	SSL
27	pkm-bagor.nganjukkab.go.id	SSL
28	pkm-berbek.nganjukkab.go.id	SSL
29	pkm-gondang.nganjukkab.go.id	SSL
30	pkm-jatikalen.nganjukkab.go.id	SSL
31	pkm-kertosono.nganjukkab.go.id	SSL
32	pkm-lengkong.nganjukkab.go.id	SSL
33	pkm-loceret.nganjukkab.go.id	SSL
34	pkm-nganjuk.nganjukkab.go.id	SSL
35	pkm-ngetos.nganjukkab.go.id	SSL
36	pkm-ngluyu.nganjukkab.go.id	SSL
37	pkm-ngronggot.nganjukkab.go.id	SSL
38	pkm-pace.nganjukkab.go.id	SSL
39	pkm-patianrowo.nganjukkab.go.id	SSL
40	pkm-prambon.nganjukkab.go.id	SSL
41	pkm-rejoso.nganjukkab.go.id	SSL
42	pkm-sawahan.nganjukkab.go.id	SSL
43	pkm-sukomoro.nganjukkab.go.id	SSL
44	pkm-tanjunganom.nganjukkab.go.id	SSL
45	pkm-wilangan.nganjukkab.go.id	SSL
46	dinkes.nganjukkab.go.id	SSL
47	dkpp.nganjukkab.go.id	SSL
48	sikecap.nganjukkab.go.id	SSL
49	jurnal.nganjukkab.go.id	SSL
50	dashboard.nganjukkab.go.id	SSL
51	wadulbupati.nganjukkab.go.id	SSL
52	ppid.nganjukkab.go.id	SSL
53	www.nganjukkab.go.id	SSL
54	diskominfo.nganjukkab.go.id	SSL
55	rsalfm.nganjukkab.go.id	SSL
56	cctv.nganjukkab.go.id	SSL
57	ngantarbis.nganjukkab.go.id	SSL
58	fantasisite.nganjukkab.go.id	SSL
59	wxyz.nganjukkab.go.id	SSL
60	spbe.nganjukkab.go.id	SSL
61	Aplikasi Nganjuk Smart City	SSL
62	diskopum.nganjukkab.go.id	SSL
63	b3.nganjukkab.go.id	SSL
64	dlh.nganjukkab.go.id	SSL
65	dlhkp.nganjukkab.go.id	SSL
66	sioptimis.nganjukkab.go.id	SSL
67	jalan.nganjukkab.go.id	SSL
68	pupr.nganjukkab.go.id	SSL
69	simperev.nganjukkab.go.id	SSL
70	damkar.nganjukkab.go.id	SSL
71	SISKEUDES - Desktop	Tidak
72	pmd.nganjukkab.go.id	SSL
73	perizinan.nganjukkab.go.id	SSL
74	antrianmpp.nganjukkab.go.id	SSL
75	dpmptsp.nganjukkab.go.id	SSL
76	dispendik.nganjukkab.go.id	SSL
77	dppkb.nganjukkab.go.id	SSL
78	ekir.nganjukkab.go.id	SSL
79	simpkb.nganjukkab.go.id	SSL
80	dishub.nganjukkab.go.id	SSL
81	disperindag.nganjukkab.go.id	SSL
82	disperta.nganjukkab.go.id	SSL
83	siomah.nganjukkab.go.id	SSL

No	Website/Aplikasi	SSL
84	prkpp.nganjukkab.go.id	SSL
85	dinsospppa.nganjukkab.go.id	SSL
86	loker.nganjukkab.go.id	SSL
87	disnaker.nganjukkab.go.id	SSL
88	sipwas2.nganjukkab.go.id	SSL
89	sisultan.nganjukkab.go.id	SSL
90	inspektorat.nganjukkab.go.id	SSL
91	bagor.nganjukkab.go.id	SSL
92	baron.nganjukkab.go.id	SSL
93	berbek.nganjukkab.go.id	SSL
94	gondang.nganjukkab.go.id	SSL
95	jatikalen.nganjukkab.go.id	SSL
96	kertosono.nganjukkab.go.id	SSL
97	lengkong.nganjukkab.go.id	SSL
98	loceret.nganjukkab.go.id	SSL
99	nganjuk.nganjukkab.go.id	SSL
100	ngetos.nganjukkab.go.id	SSL
101	ngluyu.nganjukkab.go.id	SSL
102	ngronggot.nganjukkab.go.id	SSL
103	pace.nganjukkab.go.id	SSL
104	patianrowo.nganjukkab.go.id	SSL
105	prambon.nganjukkab.go.id	SSL
106	rejoso.nganjukkab.go.id	SSL
107	sawahan.nganjukkab.go.id	SSL
108	sukomoro.nganjukkab.go.id	SSL
109	tanjunganom.nganjukkab.go.id	SSL
110	wilangan.nganjukkab.go.id	SSL
111	pkk.nganjukkab.go.id	SSL

No	Website/Aplikasi	SSL
112	rsudkertosono.nganjukkab.go.id	SSL
113	rsud.nganjukkab.go.id	SSL
114	pacs.rsd.nganjukkab.go.id	SSL
115	dokter.rsd.nganjukkab.go.id	SSL
116	tiger-cepp.nganjukkab.go.id	SSL
117	polpp.nganjukkab.go.id	SSL
118	jdih.nganjukkab.go.id	SSL
119	setda.nganjukkab.go.id	SSL
120	lppd.nganjukkab.go.id	SSL
121	monev.nganjukkab.go.id	SSL
122	lpse.nganjukkab.go.id	SSL
123	sepiion.nganjukkab.go.id	SSL
124	siprasa.nganjukkab.go.id	SSL
125	jdihdprd.nganjukkab.go.id	SSL
126	pmi.nganjukkab.go.id	SSL
127	sianik.nganjukkab.go.id	SSL
128	fks.nganjukkab.go.id	SSL
129	cloud.nganjukkab.go.id	SSL
130	zi.nganjukkab.go.id	SSL
131	ckan.nganjukkab.go.id	SSL
132	nsc.nganjukkab.go.id	SSL
133	geoportal.nganjukkab.go.id	SSL
134	ruangrapat.nganjukkab.go.id	SSL
135	sipertan.nganjukkab.go.id	SSL
136	deskpemilukada.nganjukkab.go.id	SSL
137	cctv-ai.nganjukkab.go.id	SSL
138	etax.nganjukkab.go.id	SSL
139	silapbb.nganjukkab.go.id	SSL

Rumus :

Presentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik =

$$\frac{layanan\ SPBE\ (layanan\ publik\ dan\ layanan\ administrasi\ pemerintahan)\ yang\ memanfaatkan\ sertifikat\ elektronik}{Jumlah\ seluruh\ layanan}\ x\ 100\%$$

$= \frac{134}{139}\ x\ 100\%$

= 96,40%

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

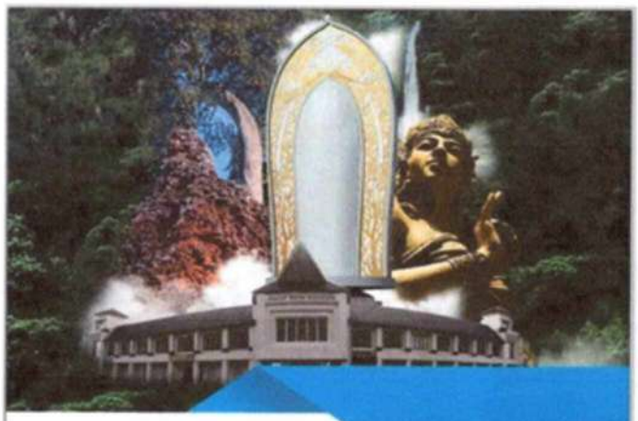
SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

IKK OUTPUT URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERANGKAT DAERAH YANG MENGIMPLEMENTASIKAN INOVASI YANG MENDUKUNG SMART CITY TAHUN 2024

No	Pemilik	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Inovasi Smart city terlampir dalam BUKU III Executive Summary Masterplan Smart City Kabupaten Nganjuk 2023-2032
2	Sekretariat DPRD	
3	Inspektorat Daerah	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
8	Dinas Pemadam Kebakaran	
9	Dinas Kesehatan	
10	Dinas Koperasi dan UM	
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
12	Dinas Pendidikan	
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
15	Dinas Sosial PPPA	
16	Badan Pendapatan Daerah	
17	Dinas Tenaga Kerja	
18	Dinas Perhubungan	
19	Dinas Lingkungan Hidup	
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	
21	Dinas Pertanian	
22	Dinas Pengandalian Penduduk dan KB	
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
25	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
28	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
30	RSD Nganjuk	
31	RSD Kertosono	
32	Satuan Polisi Pamong Praja	
33	Kecamatan Bagor	

No	Pemilik	Keterangan
34	Kecamatan Baron	Inovasi Smart city terlampir dalam BUKU III Executive Summary Masterplan Smart City Kabupaten Nganjuk 2023-2032
35	Kecamatan Berbek	
36	Kecamatan Gondang	
37	Kecamatan Jatikalen	
38	Kecamatan Kertosono	
39	Kecamatan Lengkong	
40	Kecamatan Loceret	
41	Kecamatan Nganjuk	
42	Kecamatan Ngetos	
43	Kecamatan Ngluyu	
44	Kecamatan Ngronggot	
45	Kecamatan Pace	
46	Kecamatan Patianrowo	
47	Kecamatan Prambon	
48	Kecamatan Rejoso	
49	Kecamatan Sawahan	
50	Kecamatan Sukomoro	
51	Kecamatan Tanjunganom	
52	Kecamatan Wilangan	



KOMINFO

BUKU III
EXECUTIVE SUMMARY

MASTERPLAN Smart City

Kabupaten Nganjuk
2023-2032

Tabel 3. 7 Inovasi pada Dimensi Smart City Kabupaten Nganjuk

Smart Governance	
Sub-Dimensi	**Inovasi yang dilakukan**
Layanan Publik	1. Meningkatkan layanan pemerintahan yang cepat dan efektif serta akuntabel 2. Meningkatkan pelayanan internet dengan menjalin kerjasama provider, sehingga diharapkan pelaksanaan pemerintahan dapat tersinergi dengan seluruh OPD pada kabupaten Nganjuk 3. Pelayanan Dokumen Kependudukan secara Mandiri melalui Teknologi
Birokrasi	1. Melakukan kerjasama antar lembaga pemerintahan dalam satu kabupaten Nganjuk 2. Penyelenggaraan transaksi keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk dilakukan secara on-line 3. Membangun Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan secara terpadu melalui on-line sistem (PATEN)
Perancangan Kebijakan	1. Mempersiapkan rancangan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat urgent 2. Memerlukan dasar Hukum dalam pengaturan setiap kebijakan
Smart Branding	
Sub-Dimensi	**Inovasi yang dilakukan**
Pariwisata	1. Menyelenggarakan Event berbasis Budaya Lokal tingkat nasional dan internasional setiap tahun 2. Penguatan lembaga seni dan budaya se kabupaten Nganjuk 3. Menjadikan situs budaya dan cagar budaya di Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata 4. Mengadakan pembinaan terhadap komunitas seni budaya/sanggar seni budaya serta kaderisasi seniman muda 5. Pembayaran Tiket Masuk Destinasi wisata secara Digital
Daya Saing Bisnis	1. Marketing produk UMKM secara online 2. Tersedianya fasilitas marketing pelaku ekonomi kreatif 3. Adanya Ketersediaan kawasan untuk Investor dengan dukungan Ketersediaan dan pengembangan Infrastruktur 4. Produk UMKM Kabupaten Nganjuk berlabel halal

	5. Aplikasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
Wajah (Tampilan) Kota	1. Memperkenalkan secara intens taman kota atau alun-alun untuk rekreasi dan jogging 2. Publikasi informasi kepariwisataan melalui berbagai media cetak maupun elektronik 3. Pelaksanaan event-event Pariwisata 4. Rest Area Inner Ringroad
Smart Economy	
Sub-Dimensi	**Inovasi yang dilakukan**
Ekosistem Industri	1. Pendafataran dan Seleksi Calon Peserta Pelatihan secara Online; (e-horja) 2. Tersedianya pelatihan tenaga kerja secara professional dan bersertifikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Melibatkan Usaha Mikro dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Menyelenggarakan Pasar Rakyat yang melibatkan Usaha Mikro 5. Mengirimkan Usaha Mikro dalam kegiatan Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 6. Mengirimkan Usaha Mikro dalam kegiatan Internasional yang dielenggarakan oleh negara tetangga
Kesejahteraan Masyarakat	1. Mengadakan pelatihan secara intensif dan bersertifikat kepada para calon tenaga penyuluh pertanian, perkebunan dan peternakan 2. Memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kurang mampu dan memberikan bantuan berupa bahan pokok dan pengobatan secara intensif 3. Memberikan perhatian khusus kepada kaum manula, anak-anak, dan bayi yang berkebutuhan khusus dengan memberikan makanan bergizi dan pengobatan secara intensif 4. Penggunaan Teknologi Pertanian Tepat Guna di Kabupaten Nganjuk
Ekosistem Transaksi Keuangan	1. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada para pelaku usaha terkait produk-produk perbankan yang dilakukan secara digitalisasi 2. Melibatkan bank-bank daerah dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

Smart Living	
Sub-Dimensi	**Inovasi yang dilakukan**
Harmonisasi Tata Ruang	1. Mewajibkan setiap penduduk harus mematuhi ketentuan akan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Pembangunan yang akan dilakukan pada kawasan Kabupaten Nganjuk harus mengikuti ketentuan Pemerintah Daerah
Kesehatan	1. Melakukan inventarisasi keluarga kurang mampu dan berkebutuhan khusus di wilayah Kabupaten Nganjuk 2. Membuat MOU dengan Badan Balai POM Jawa Timur untuk pemeriksaan rutin sampel air minum 3. Menempelkan stiker keluarga PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) bagi keluarga yang sudah PHBS 4. Membuat pondok/bilik merokok
Transportasi	1. Menggalakkan kepada masyarakat akan manfaat pentingnya pemakaian transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk 2. Mewajibkan setiap kendaraan umum beroda empat melakukan uji emisi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah 3. Melakukan penertiban kendaraan bermotor dan mewajibkan dalam memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh dinas Lalu Lintas dan Jalan Raya setempat
Smart Society	
Sub-Dimensi	**Inovasi yang dilakukan**
Interaksi Masyarakat	1. Aplikasi Pengaduan Kekerasan terhadap Anak, Manula dan Perempuan 2. Aplikasi Kabupaten Layak Anak
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	1. Membuat LMS Pelatihan Untuk Guru-Guru di Nganjuk 2. Memasyarakatkan penggunaan literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak sekolah 3. Melakukan MOU kepada perguruan tinggi untuk membuka program jarak jauh di kabupaten Nganjuk
Keamanan Masyarakat	1. Pelaksanaan Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan serta Penyuluhan terkait pengamanan wilayah setempat 2. Memberikan nomor telepon khusus kepada masyarakat dalam menghadapi gangguan keamanan
Smart Environment	

Sub-Dimensi	Inovasi yang dilakukan
Proteksi Lingkungan	1. Pembangunan system drainase di Kab. Nganjuk yang ramah lingkungan. 2. Adanya koordinasi secara berkala untuk mengetahui perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kabupaten Nganjuk 3. Pelatihan (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) secara online untuk masyarakat
Pengelolaan Sampah dan Limbah	1. Pelatihan secara online kepada masyarakat terkait pengolahan sampah dan manfaatnya 2. Menggiatkan masyarakat untuk ikut dalam bank sampah 3. Pemahaman kepada masyarakat akan bahaya limbah pabrik dan sampah plastik
Tata Kelola Energi	1. Penggantian lampu jalan dengan PJUTS 2. Memperbanyak rooftop dengan Solaroell

Rumus :
Presentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city=

$$\frac{Jumlah\ perangkat\ daerah\ yg\ mengimplementasikan\ inovasi\ yg\ mendukung\ smart\ city}{Jumlah\ seluruh\ perangkat\ daerah} x\ 1$$

$= \frac{52}{52} x\ 100\%$
$= 100\%$

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) 2024

LAPORAN HASIL EVALUASI TAHAP II

IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHUN 2024

KAB. NGANJUK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Smart City Tahap II Tahun 2024 untuk 191 Kabupaten/Kota

Jakarta, 25 November 2024

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-1125/DJAI/AI.01.02/09/2024 Tanggal 6 September 2024 tentang Undangan Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2024, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *masterplan* dan *quick win smart city*:

1. Dari seratus sembilan puluh satu (191) kota/kabupaten yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) periode 2017-2022 terdapat seratus enam puluh lima (165) kota/kabupaten yang mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* melalui tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan secara daring pada tanggal 29 Oktober – 20 November 2024. Sedangkan terdapat dua puluh enam (26) kota/kabupaten yang tidak mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* dan tidak menghadiri kegiatan evaluasi dimaksud (daftar terlampir);

2. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city)* pada tujuh puluh lima kota/kabupaten yang terpilih pada periode 2017-2022 dimaksud, berdasarkan lima (5) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:

    a. *Baseline* (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya;
    b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, keamanan informasi serta anggaran untuk program *smart city*;

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c. *Impact* (bobot 20%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan.

   Penghitungan dampak (*impact*) dilakukan menggunakan metode survei dilakukan terhadap lima puluh (50) responden untuk setiap program dari enam (6) dimensi smart city (*smart governance, smart economy, smart living, smart society, smart environment, dan smart branding*); 50 orang x 6 dimensi = 300 orang responden, yakni masyarakat yang sudah menggunakan layanan/program, dan merasakan dampak layanan/program dimaksud

d. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah; dan

e. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), mencakup tingkat inovasi pada program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pemerintah kota/kabupaten.

3. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city)* yang berada pada enam puluh enam (66) kota/kabupaten pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru, berdasarkan enam (6) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni: *Baseline* (bobot 10%), *Output* (bobot 20%), *Impact* (bobot 20%), *Outcome* (bobot 20%), Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 20%), dan penilaian program kolaborasi (bobot 10%). Adapun program kolaborasi, mencakup jumlah program inovasi yang dilakukan secara mandiri oleh kota/kabupaten, dan atau berkolaborasi dengan kota/kabupaten lainnya pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Ibu Kota Negara Baru

4. Hasil penilaian dari berbagai dimensi tersebut dikategorikan menjadi dua (2), yakni:
   a. Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (*performance*) merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline, Output, Outcome, Impact,* dan *Quick Win.*

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

b. Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada tiap daerah setelah mengikuti Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City)*. Indeks Peningkatan (tingkat *improvement*) diperoleh dengan menghitung selisih antara rata-rata Baseline, *Output, Outcome, Impact, dan Quick Win* terhadap nilai tahun lalu.

5. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Balai Sertifikasi Elektronik
Ditandatangani secara elektronik
DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
Hokky Situngkir

Hokky Situngkir

Tembusan Yth:
1. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran I
Nomor : B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Tanggal : 25 November 2024

Kepada Yth.

1	Bupati Badung	101	Bupati Semarang
2	Bupati Bandung	102	Bupati Siak
3	Bupati Banggai	103	Bupati Sidoarjo
4	Bupati Bangka Selatan	104	Bupati Simalungun
5	Bupati Banjar	105	Bupati Situbondo
6	Bupati Bantul	106	Bupati Sleman
7	Bupati Banyuasin	107	Bupati Solok
8	Bupati Banyumas	108	Bupati Sragen
9	Bupati Banyuwangi	109	Bupati Subang
10	Bupati Batang	110	Bupati Sukabumi
11	Bupati Bekasi	111	Bupati Sukoharjo
12	Bupati Belitung	112	Bupati Sumbawa
13	Bupati Belitung Timur	113	Bupati Sumbawa Barat
14	Bupati Bengkulu Utara	114	Bupati Sumedang
15	Bupati Blitar	115	Bupati Sumenep
16	Bupati Blora	116	Bupati Tabalong
17	Bupati Bogor	117	Bupati Tabanan
18	Bupati Bojonegoro	118	Bupati Tangerang
19	Bupati Boyolali	119	Bupati Tapanuli Selatan
20	Bupati Brebes	120	Bupati Tapanuli Utara
21	Bupati Buton	121	Bupati Temanggung
22	Bupati Cirebon	122	Bupati Toba
23	Bupati Dairi	123	Bupati Trenggalek
24	Bupati Deli Serdang	124	Bupati Tuban
25	Bupati Demak	125	Bupati Wakatobi
26	Bupati Gresik	126	Bupati Wonogiri
27	Bupati Grobogan	127	Bupati Wonosobo
28	Bupati Gunungkidul	128	Walikota Ambon
29	Bupati Halmahera Selatan	129	Walikota Balikpapan
30	Bupati Halmahera Tengah	130	Walikota Banda Aceh
31	Bupati Halmahera Timur	131	Walikota Bandar Lampung

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

32	Bupati Halmahera Utara	132	Walikota Bandung
33	Bupati Humbang Hasundutan	133	Walikota Banjarbaru
34	Bupati Indramayu	134	Walikota Banjarmasin
35	Bupati Jember	135	Walikota Batam
36	Bupati Jembrana	136	Walikota Batu
37	Bupati Jepara	137	Walikota Bau-Bau
38	Bupati Jombang	138	Walikota Bekasi
39	Bupati Karanganyar	139	Walikota Binjai
40	Bupati Karawang	140	Walikota Bitung
41	Bupati Karo	141	Walikota Bogor
42	Bupati Katingan	142	Walikota Bontang
43	Bupati Kebumen	143	Walikota Bukittinggi
44	Bupati Kendal	144	Walikota Cilegon
45	Bupati Klaten	145	Walikota Cimahi
46	Bupati Klungkung	146	Walikota Cirebon
47	Bupati Konawe Selatan	147	Walikota Denpasar
48	Bupati Kotawaringin Timur	148	Walikota Depok
49	Bupati Kudus	149	Walikota Dumai
50	Bupati Kulonprogo	150	Walikota Jambi
51	Bupati Kuningan	151	Walikota Jayapura
52	Bupati Kutai Barat	152	Walikota Kediri
53	Bupati Kutai Kartanegara	153	Walikota Kupang
54	Bupati Kutai Timur	154	Walikota Madiun
55	Bupati Lamongan	155	Walikota Magelang
56	Bupati Langkat	156	Walikota Makassar
57	Bupati Lima Puluh Kota	157	Walikota Malang
58	Bupati Lombok Barat	158	Walikota Manado
59	Bupati Lombok Tengah	159	Walikota Mataram
60	Bupati Lombok Timur	160	Walikota Medan
61	Bupati Lombok Utara	161	Walikota Mojokerto
62	Bupati Luwu Timur	162	Walikota Padang
63	Bupati Luwu Utara	163	Walikota Padang Panjang
64	Bupati Magelang	164	Walikota Palembang
65	Bupati Magetan	165	Walikota Palopo
66	Bupati Majalengka	166	Walikota Pangkal Pinang
67	Bupati Malang	167	Walikota Pariaman
68	Bupati Manggarai	168	Walikota Pasuruan

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

69 Bupati Manggarai Barat
70 Bupati Manggarai Timur
71 Bupati Maros
72 Bupati Mimika
73 Bupati Minahasa
74 Bupati Minahasa Utara
75 Bupati Mojokerto
76 Bupati Morowali
77 Bupati Muara Enim
78 Bupati Musi Banyuasin
79 Bupati Musi Rawas
80 Bupati Ngada
81 Bupati Nganjuk
82 Bupati Ngawi
83 Bupati Ogan Komering Ilir
84 Bupati Pacitan
85 Bupati Padang Pariaman
86 Bupati Pakpak Bharat
87 Bupati Paser
88 Bupati Pasuruan
89 Bupati Pati
90 Bupati Pelalawan
91 Bupati Pemalang
92 Bupati Penajam Paser Utara
93 Bupati Ponorogo
94 Bupati Probolinggo
95 Bupati Pulau Morotai
96 Bupati Purwakarta
97 Bupati Purworejo
98 Bupati Raja Ampat
99 Bupati Rembang
100 Bupati Samosir

169 Walikota Payakumbuh
170 Walikota Pekalongan
171 Walikota Pekanbaru
172 Walikota Pontianak
173 Walikota Probolinggo
174 Walikota Samarinda
175 Walikota Semarang
176 Walikota Serang
177 Walikota Sibolga
178 Walikota Singkawang
179 Walikota Sukabumi
180 Walikota Surabaya
181 Walikota Surakarta
182 Walikota Tangerang
183 Walikota Tangerang Selatan
184 Walikota Tanjung Balai
185 Walikota Tanjungpinang
186 Walikota Tasikmalaya
187 Walikota Tebing Tinggi
188 Walikota Tegal
189 Walikota Ternate
190 Walikota Tomohon
191 Walikota Yogyakarta

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran II
Nomor: B-1478/DJAI/AI.01.02/11/2024
Tanggal: 25 November 2024

HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY) TAHAP II TAHUN 2024
PADA 191 KOTA/KABUPATEN
PROGRAM GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (SMART CITY) PERIODE TAHUN 2017-2022

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
1	KAB. BADUNG	3,56	2,73	3,27	3,18	2,8		**3,08**	0,11	REGULER
2	KAB. BANDUNG	2,72	2,69	3,24	2,85	3,28		**3,01**	0	REGULER
3	KAB. BANGGAI	3,76	2,49	3,3	2,97	3,05		**3,07**	-0,07	REGULER
4	KAB. BANGKA SELATAN	2,24	2,29	2,01	1,52	1,88		**1,97**	-0,29	REGULER
5	KAB. BANJAR	2,72	2,02	2,65	2,44	2,17		**2,39**	-0,03	REGULER
6	KAB. BANTUL	3,96	3,64	3,78	3,26	3,97	3,97	**3,72**	0,16	KPPN IKN
7	KAB. BANYUASIN	3,8	3,25	3,08	3,44	3,35		**3,31**	0,44	REGULER
8	KAB. BANYUMAS	3,68	3,64	3,41	3,04	3,78		**3,48**	0,06	REGULER
9	KAB. BANYUWANGI	4	3,78	3,75	3,79	2,97		**3,63**	0,33	REGULER
10	KAB. BATANG	3,84	3,35	3,59	3,6	3,67		**3,59**	0,19	REGULER
11	KAB. BEKASI	3,6	3,05	3,3	3,04	3,33		**3,23**	0,42	REGULER
12	KAB. BELITUNG	3,52	2,96	2,87	3,19	2,87	1,67	**2,9**	0,06	KPPN IKN
13	KAB. BELITUNG TIMUR	2,28	2,2	2,34	2,13	1,53	2,17	**2,09**	0,63	KPPN IKN
14	KAB. BENGKULU UTARA	2,76	2,2	2,76	2,69	2,52		**2,59**	0,8	REGULER
15	KAB. BLITAR	3,52	3,2	3,26	3	3,1		**3,19**	-0,1	REGULER
16	KAB. BLORA	2,6	1,76	2,39	2,9	1,28		**2,17**	0,02	REGULER
17	KAB. BOGOR	3,96	3,15	3,22	3,04	2,85		**3,17**	0,07	REGULER
18	KAB. BOJONEGORO	3,32	3,15	3,45	3,11	3,77		**3,37**	0,3	REGULER
19	KAB. BOYOLALI	3,76	3,49	3,61	3,82	3,53	3,53	**3,62**	0,32	KPPN IKN
20	KAB. BREBES	1,72	1,98	2,48	2,49	1,58		**2,13**	0,49	REGULER
21	KAB. CIREBON	2,96	2,76	3,19	2,98	2,55		**2,91**	-0,04	REGULER
22	KAB. DELI SERDANG	3,64	2,98	3,32	3,35	3,78		**3,38**	0,15	REGULER
23	KAB. DEMAK	4	3,8	3,65	3,73	3,92	3,8	**3,8**	0,17	KPPN IKN
24	KAB. GRESIK	3,88	3,04	3,38	3,27	3,55		**3,37**	0,24	REGULER
25	KAB. GROBOGAN	3,8	3,33	3,13	3,63	3,87		**3,49**	0,32	REGULER
26	KAB. GUNUNGKIDUL	3,96	3,76	3,52	4	3,9	3,8	**3,81**	0,15	KPPN IKN
27	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	2,16	1,8	1,97	2,85	1,58	-	**1,86**	-0,27	KPPN IKN
28	KAB. INDRAMAYU	3,36	2,8	3,15	2,8	3,05		**3,01**	0,24	REGULER
29	KAB. JEMBER	3,6	2,84	2,88	2,84	3,17		**2,99**	0,3	REGULER
30	KAB. JEMBRANA	3,36	2,76	3,28	2,8	2,32		**2,9**	0,18	REGULER
31	KAB. JEPARA	3,6	2,82	2,88	2,9	2,48	1,1	**2,69**	-0,51	KPPN IKN
32	KAB. JOMBANG	3,8	2,84	2,85	3,24	2,87		**3,03**	-0,37	REGULER
33	KAB. KARANGANYAR	2,92	2,62	2,93	3,03	2,55	1,53	**2,67**	0,21	KPPN IKN
34	KAB. KARAWANG	2,8	2,89	2,79	2,03	3,45		**2,79**	0,21	REGULER
35	KAB. KARO	2,8	2,24	2,72	2,8	2,12	-	**2,26**	0,1	KPPN IKN
36	KAB. KATINGAN	3,2	3	2,78	2,96	2,88		**2,92**	0,17	REGULER
37	KAB. KEBUMEN	3,8	3,09	3,59	3,34	2,97		**3,34**	-0,03	REGULER
38	KAB. KENDAL	3,96	3,44	3,58	3,44	3,82	2,93	**3,55**	0,1	KPPN IKN
39	KAB. KLATEN	3,8	3,35	3,18	3,27	2,83	1,87	**3,09**	-0,08	KPPN IKN
40	KAB. KLUNGKUNG	3,52	2,49	3,09	3,07	2,95		**2,98**	0,44	REGULER
41	KAB. KONAWE SELATAN	3,64	2,69	2,96	2,33	2,55	3,2	**2,79**	0,47	KPPN IKN
42	KAB. KUDUS	3,68	3,25	3,61	3,23	3,57	3,2	**3,42**	0,11	KPPN IKN
43	KAB. KULON PROGO	3,68	3,16	3,22	3,27	3,35	3,73	**3,34**	0,02	KPPN IKN
44	KAB. KUNINGAN	2,52	2,44	2,7	2,65	3,28		**2,74**	0,24	REGULER
45	KAB. KUTAI BARAT	1,72	2,05	2,46	2,47	1,95	1,7	**2,13**	0,9	KPPN IKN
46	KAB. KUTAI KARTANEGARA	2,2	2,42	2,85	1,37	2,63	1,7	**2,24**	-0,58	KPPN IKN
47	KAB. KUTAI TIMUR	2,64	2,65	2,27	3,14	2,45		**2,59**	-0,37	REGULER
48	KAB. LAMONGAN	3,16	2,62	2,92	3,14	2,77		**2,9**	0,62	REGULER
49	KAB. LANGKAT	3,24	2,6	2,92	2,89	3,35		**2,97**	-0,03	REGULER
50	KAB. LIMA PULUH KOTA	2,56	2,38	2,55	3,01	2,52		**2,6**	1,05	REGULER
51	KAB. LOMBOK BARAT	3,84	3,64	3,5	3,34	3,85	2,77	**3,53**	0,61	KPPN IKN
52	KAB. LOMBOK TIMUR	3,08	1,85	2,33	2,51	2,13	1	**2,17**	0,31	KPPN IKN
53	KAB. LOMBOK UTARA	3,84	3,22	3,11	3,06	3,13	-	**2,89**	0,19	KPPN IKN
54	KAB. MAGELANG	3,76	3,51	3,51	3,07	3,08	3,77	**3,39**	0,58	KPPN IKN
55	KAB. MAGETAN	3,88	2,76	3,44	2,74	2,63		**3,05**	-0,2	REGULER
56	KAB. MAJALENGKA	2,28	2,49	2,95	1,4	1,48		**2,19**	-0,19	REGULER
57	KAB. MALANG	3,56	2,89	3,35	3,07	3	2,43	**3,06**	0,12	KPPN IKN
58	KAB. MANGGARAI	3,56	2,36	2,65	2,49	2,7	1,83	**2,58**	-0,09	KPPN IKN
59	KAB. MANGGARAI BARAT	2,44	2,45	2,92	3,16	2,62	2,04	**2,68**	0,01	KPPN IKN
60	KAB. MANGGARAI TIMUR	2,08	1,56	2,15	2,46	1,38	-	**1,72**	-0,49	KPPN IKN
61	KAB. MIMIKA	1,92	1,58	2,07	2,4	1,47		**1,9**	-0,57	REGULER
62	KAB. MINAHASA UTARA	1,2	1,15	1,83	1,22	1,28	1	**1,32**	-0,42	KPPN IKN
63	KAB. MOJOKERTO	3,88	3,51	3,34	3,28	2,73		**3,29**	-0,04	REGULER
64	KAB. MUARA ENIM	1,84	2,89	2,33	2,69	2,22		**2,44**	-0,24	REGULER
65	KAB. MUSI RAWAS	2,24	1,6	2,59	2,03	1,58		**2,04**	-0,01	REGULER

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
66	KAB. NGANJUK	3,24	3	3,47	3,4	3,6		**3,37**	-0,01	REGULER
67	KAB. NGAWI	3,92	3,04	3,56	3,33	3,1		**3,35**	0,26	REGULER
68	KAB. PADANG PARIAMAN	3,76	2,89	3	3,11	3,43		**3,16**	-0,04	REGULER
69	KAB. PAKPAK BHARAT	3,48	2,25	2,78	3,14	2,48	1,1	**2,59**	0,33	KPPN IKN
70	KAB. PASER	3,84	3,18	3	3,03	2,8	2,53	**3,04**	0,2	KPPN IKN
71	KAB. PATI	3,2	2,55	2,9	3,22	2,47		**2,84**	0	REGULER
72	KAB. PELALAWAN	1,72	1,8	2,15	1,39	1,2		**1,7**	-0,33	REGULER
73	KAB. PEMALANG	2,4	1,89	2,67	3,1	1,78		**2,4**	-0,06	REGULER
74	KAB. PENAJAM PASER UTARA	2,44	2	2,61	2,96	2,07		**2,43**	0,79	REGULER
75	KAB. PONOROGO	2	1,6	1,66	1,21	1,6		**1,58**	-0,95	REGULER
76	KAB. PROBOLINGGO	3,28	3,02	3,2	3,19	2,12	2,35	**2,87**	0,41	KPPN IKN
77	KAB. PULAU MOROTAI	2,64	1,65	2,4	3,19	2,45	1,37	**2,34**	0,07	KPPN IKN
78	KAB. PURWAKARTA	3,48	2,69	3,12	3,4	2,77		**3,06**	0,1	REGULER
79	KAB. PURWOREJO	2,52	2,53	2,93	3,04	2,42	2,17	**2,65**	0,4	KPPN IKN
80	KAB. REMBANG	2,8	2,24	2,67	3,04	2,17		**2,57**	0,23	REGULER
81	KAB. SEMARANG	2,92	2,47	2,62	2,76	2,85	2,03	**2,64**	0,13	KPPN IKN
82	KAB. SIAK	2,72	2,35	2,78	2,83	3,58		**2,86**	0,05	REGULER
83	KAB. SIDOARJO	3,28	3,15	3,55	3,48	3,23		**3,37**	0,36	REGULER
84	KAB. SIMALUNGUN	2,08	1,71	2,15	2,19	1,43	1	**1,8**	0,32	KPPN IKN
85	KAB. SITUBONDO	3,64	2,76	2,85	3,3	3,48		**3,13**	0,06	REGULER
86	KAB. SLEMAN	2,92	2,98	3,12	3,24	2,8	2,67	**2,99**	-0,05	KPPN IKN
87	KAB. SRAGEN	3,96	3,49	3,33	3,47	3,45	3,67	**3,51**	0,14	KPPN IKN
88	KAB. SUBANG	2,76	2,93	2,95	2,55	2,83		**2,82**	0,14	REGULER
89	KAB. SUKABUMI	2,88	2,55	2,73	1	2,7		**2,36**	0,51	REGULER
90	KAB. SUKOHARJO	3,92	3,42	3,59	3,74	3,83	3,83	**3,69**	0,24	KPPN IKN
91	KAB. SUMBAWA	3,56	1,64	2,87	2,7	2,8		**2,65**	-0,3	REGULER
92	KAB. SUMBAWA BARAT	2,72	2,64	3	3,53	2,75		**2,96**	0,2	REGULER
93	KAB. SUMENEP	2,24	2,31	3,2	2,75	2		**2,6**	-0,44	REGULER
94	KAB. TABALONG	3,8	3,55	3,45	3,78	3,33		**3,55**	0,17	REGULER
95	KAB. TABANAN	3,88	2,96	3,19	3,14	2,93		**3,15**	0,76	REGULER
96	KAB. TANGERANG	3,8	3,38	3,36	3,11	3,35		**3,36**	0,01	REGULER
97	KAB. TAPANULI SELATAN	2,08	1,8	2,41	1,95	2,02		**2,09**	0,19	REGULER
98	KAB. TAPANULI UTARA	2,6	1,58	2,41	2,99	2,15	1	**2,19**	-0,14	KPPN IKN
99	KAB. TEMANGGUNG	3,92	3,64	3,5	3,91	3,72	3,5	**3,7**	0,53	KPPN IKN
100	KAB. TOBA	2,96	2,36	2,68	2,96	2,08	-	**2,31**	0,14	KPPN IKN
101	KAB. TRENGGALEK	3,92	3,31	3,7	3,23	3,82		**3,57**	0,15	REGULER
102	KAB. TUBAN	3,8	2,82	3,29	3,77	3,18		**3,32**	0,59	REGULER
103	KAB. WAKATOBI	1	1	1,18	1	1	-	**0,94**	-0,67	KPPN IKN
104	KAB. WONOGIRI	3,96	3,24	3,56	3,44	3,93	3,9	**3,62**	0,1	KPPN IKN
105	KAB. WONOSOBO	3,36	2,71	3,09	3,1	2,85	1,6	**2,85**	0,08	KPPN IKN
106	KOTA AMBON	3,8	2,8	2,99	3,3	3,03		**3,1**	0,23	REGULER
107	KOTA BALIKPAPAN	3,6	3,64	3,21	3,16	3,67	4	**3,5**	0,09	KPPN IKN
108	KOTA BANDA ACEH	3,36	3,02	3,18	2,89	2,67		**3,01**	0,61	REGULER
109	KOTA BANDAR LAMPUNG	2,16	1,93	2,5	2,71	2,15		**2,32**	-0,14	REGULER
110	KOTA BANDUNG	3,92	3,8	3,94	4	3,97		**3,93**	0,1	REGULER
111	KOTA BANJARBARU	1,92	2,11	2,28	1,2	2,22		**1,98**	-0,25	REGULER
112	KOTA BANJARMASIN	3,8	3,58	3,5	3,3	3,8		**3,57**	0,26	REGULER
113	KOTA BATAM	3,88	3,2	3,23	3,04	3,55		**3,32**	0,97	REGULER
114	KOTA BATU	3,24	2,55	3,04	2,98	2,02	3	**2,74**	0,47	KPPN IKN
115	KOTA BEKASI	4	3,45	3,56	3,57	3,65		**3,6**	0,39	REGULER
116	KOTA BINJAI	3	2,51	3,32	2,4	1,93		**2,66**	0,11	REGULER
117	KOTA BITUNG	3,36	2,98	2,82	2,76	2,52		**2,83**	-0,07	REGULER
118	KOTA BOGOR	3,76	3,47	3,35	3,49	3,97		**3,57**	0,22	REGULER
119	KOTA BUKITTINGGI	2,28	2,22	2,06	1,01	2,12		**1,92**	-0,03	REGULER
120	KOTA CILEGON	1,72	2,18	2,36	2,71	1,73		**2,2**	-0,11	REGULER
121	KOTA CIMAHI	3,88	3,24	3,53	3,79	3,88		**3,63**	0,12	REGULER
122	KOTA CIREBON	4	3,05	3,31	3,23	3,32		**3,31**	0,36	REGULER
123	KOTA DENPASAR	2,84	2,65	3,53	3,77	3,63		**3,35**	-0,08	REGULER
124	KOTA DEPOK	3,92	3,31	3,49	3,01	3,73		**3,45**	0,04	REGULER
125	KOTA DUMAI	3,8	2,76	2,99	3,11	3,82		**3,22**	0,29	REGULER
126	KOTA JAMBI	3,84	3,18	3,53	3,63	3,35		**3,48**	0	REGULER
127	KOTA JAYAPURA	1,64	1,49	1,78	2,64	1,63		**1,85**	0,22	REGULER
128	KOTA KEDIRI	4	3,2	3,27	3,34	3,47		**3,38**	0,18	REGULER
129	KOTA KUPANG	2,4	2,11	2,73	2,82	1,87		**2,42**	-0,11	REGULER
130	KOTA MADIUN	4	3,51	3,78	3,97	3,87		**3,8**	0,09	REGULER
131	KOTA MAGELANG	3,72	3,16	3,41	3,29	3,33	3,1	**3,32**	0,69	KPPN IKN
132	KOTA MAKASSAR	3,72	3,31	3,67	3,59	3,95		**3,64**	0,5	REGULER
133	KOTA MALANG	3,76	3,29	3,61	2,7	3,67	2,37	**3,27**	0,34	KPPN IKN
134	KOTA MANADO	3	2,38	3,03	2,95	2,3		**2,74**	-0,28	REGULER
135	KOTA MATARAM	3,92	3,38	3,42	3,37	3,53	3,4	**3,47**	0,26	KPPN IKN
136	KOTA MEDAN	1,56	2,04	2,85	2,76	1,98		**2,37**	0,6	REGULER
137	KOTA MOJOKERTO	4	3,4	3,65	3,25	3,87		**3,6**	0,02	REGULER
138	KOTA PADANG	3,56	2,95	3,39	2,81	3,18		**3,16**	0,09	REGULER
139	KOTA PADANG PANJANG	3,72	2,73	3,15	2,99	2,62		**2,99**	0,58	REGULER
140	KOTA PALEMBANG	2,2	2,27	3,01	3,1	2,73		**2,74**	-0,21	REGULER

NO	KAB/KOTA	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	TINGKAT IMPROVEMENT	KET
141	KOTA PALOPO	2,52	2,09	2,98	3	2,73		**2,71**	0,19	REGULER
142	KOTA PANGKAL PINANG	3,6	2,95	3,22	2,7	2,85		**3,03**	1,4	REGULER
143	KOTA PARIAMAN	2,88	2	2,9	3,1	2,72		**2,72**	0,09	REGULER
144	KOTA PASURUAN	3,88	2,95	3,47	2,94	3,08	3,53	**3,23**	0,07	KPPN IKN
145	KOTA PAYAKUMBUH	2,4	2,16	2,82	2,81	2,37		**2,55**	0,18	REGULER
146	KOTA PEKALONGAN	3,8	3,04	3,24	2,5	3,92		**3,24**	3,24	REGULER
147	KOTA PONTIANAK	3,64	3,36	3,4	2,99	3,52		**3,36**	0,02	REGULER
148	KOTA PROBOLINGGO	3,68	3,36	3,42	3,61	3,58	2,77	**3,44**	0,76	KPPN IKN
149	KOTA SAMARINDA	3,84	3,33	3,25	2,98	3,53	2,67	**3,27**	0,17	KPPN IKN
150	KOTA SEMARANG	3,84	3,56	3,84	3,79	3,92	3,7	**3,78**	0,14	KPPN IKN
151	KOTA SERANG	2,76	2,24	2,84	3,03	3,25		**2,83**	-0,21	REGULER
152	KOTA SIBOLGA	2,24	1,47	2,08	2,41	1,55		**1,93**	-0,18	REGULER
153	KOTA SINGKAWANG	3,52	3,31	3,12	1,43	3,18		**2,87**	0,35	REGULER
154	KOTA SUKABUMI	3,48	2,87	3,27	2,85	3,27		**3,13**	3,13	REGULER
155	KOTA SURABAYA	4	3,64	3,83	3,99	3,72		**3,82**	0,17	REGULER
156	KOTA SURAKARTA	3,92	3,84	3,73	3,8	3,78	3,9	**3,81**	-0,03	KPPN IKN
157	KOTA TANGERANG	3,8	3,24	3,64	3,05	3,57		**3,44**	0,34	REGULER
158	KOTA TANGERANG SELATAN	2,52	2,56	3,49	2,77	2,17		**2,8**	-0,18	REGULER
159	KOTA TANJUNG BALAI	3,28	2,89	2,53	2,79	2,85		**2,79**	0,32	REGULER
160	KOTA TASIKMALAYA	3,84	2,84	3,2	3,03	3,03		**3,12**	0,11	REGULER
161	KOTA TEBING TINGGI	2,8	2,15	2,49	2,71	1,83		**2,37**	-0,38	REGULER
162	KOTA TEGAL	3,4	2,62	3,22	3,1	3,17		**3,08**	0,84	REGULER
163	KOTA TERNATE	1,92	1,38	2,65	1,2	1,3		**1,76**	-0,41	REGULER
164	KOTA TOMOHON	3	2,22	2,21	2,5	1,53		**2,21**	-0,5	REGULER
165	KOTA YOGYAKARTA	3,84	3,22	3,54	3,27	3,58	3,13	**3,42**	-0,16	KPPN IKN

DAFTAR KAB/KOTA YANG TIDAK MENGIKUTI EVALUASI SMART CITY TAHAP II TAHUN 2024

NO	WILAYAH	BASELINE	OUTPUT	OUTCOME	IMPACT	QUICK WINS	PROGRAM KOLABORASI	NILAI FINAL	KETERANGAN
1	KAB. BUTON	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
2	KAB. DAIRI	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
3	KAB. HALMAHERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
4	KAB. HALMAHERA TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
5	KAB. HALMAHERA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
6	KAB. HALMAHERA UTARA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
7	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
8	KAB. LOMBOK TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
9	KAB. LUWU TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
10	KAB. LUWU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
11	KAB. MAROS	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
12	KAB. MINAHASA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
13	KAB. MOROWALI	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
14	KAB. MUSI BANYUASIN	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
15	KAB. NGADA	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
16	KAB. OGAN KOMERING ILIR	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
17	KAB. PACITAN	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
18	KAB. PASURUAN	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
19	KAB. RAJA AMPAT	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
20	KAB. SAMOSIR	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
21	KAB. SOLOK	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
22	KAB. SUMEDANG	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
23	KOTA BAU BAU	0	0	0	0	0	0	0	KPPN IKN
24	KOTA BONTANG	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
25	KOTA PEKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	REGULER
26	KOTA TANJUNG PINANG	0	0	0	0	0	0	0	REGULER

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahap II Tahun 2024 Pada 125 Kota/Kabupaten Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Periode Tahun 2017-2022

Gambaran Umum

Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan program bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembagunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kantor Staf Presiden, sebagai inisiatif dari pemerintah pusat untuk mendorong implementasi program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota.

Pada bulan Juni tahun 2024 Kementerian Komdigi telah memfasilitasi kegiatan evaluasi tahap I yang bersifat konsultatif kepada kabupaten/kota yang tergabung pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) agar kabupaten/kota dapat berkonsultasi dengan praktisi *smart city* dan perwakilan Kementerian lain untuk membahas berbagai tantangan dalam mengimplementasikan program kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kotanya, mendapatkan arahan tentang inovasi pada program percepatan (*quick win*) yang akan atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai hal lainnya terkait implementasi program kota cerdas (*smart city*).

Selanjutnya, evaluasi tahap I dimaksud dilanjutkan dengan evaluasi tahap II untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dan progress implementasi program kota cerdas (*smart city*) di setiap kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan tidak hanya mengukur tingkat keberhasilan dan mengidentifikasi adanya masalah dalam pelaksanaan, namun juga untuk dapat memberikan masukan serta saran kepada pemerintah kota dan kabupaten tentang bagaimana sepatutnya proses pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dilaksanakan. Dengan demikian, secara umum hasil evaluasi mencakup penilaian kemajuan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) berdasarkan berdasarkan 5 (lima) dimensi, pengenalan kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Masterplan Kota Cerdas (Smart City), dan saran untuk perbaikan untuk pemerintah kabupaten atau kota.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Evaluasi implementasi Kota Cerdas (Smart City) dilakukan untuk:

1. mengawasi program integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan akselerasi dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) dan RPJMD;
3. memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah; dan
4. memantau, mengevaluasi, dan konsultasi atas pelaksanaan dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City) di tingkat pusat dan daerah.

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), serta kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*).

Adapun ruang lingkup evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah gambaran Kondisi awal program Kota Cerdas (baseline), keluaran yang dicapai (*output*), hasil yang diperoleh (*outcome*), dampak yang dirasakan oleh masyarakat (*impact*), kelangsungan program percepatan Inovasi (*quick win*), serta keterlaksanaan program kolaborasi antar daerah pada sebuah Kawasan.

Metodologi Evaluasi

Objek evaluasi implementasi Masterplan Kota Cerdas (Smart City) adalah pelaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) di daerah yang dinilai berdasarkan *progress* serta hasil yang dicapainya. Adapun metode evaluasi yang dilakukan yakni dengan pengisian form penilaian mandiri (self-assessment) yang kemudian dikonfirmasi kevalidan data dan informasinya dengan metode wawancara oleh para praktisi dan akademisi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang pengembangan Kota Cerdas *(Smart City).*

Dimensi dan elemen evaluasi pada tiap-tiap dimensi dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Dimensi	Bobot Penilaian	Elemen	Keterangan
Kondisi awal program Kota Cerdas (Smart City) (Baseline)	10%	Perencanaan	Ketersedian dokumen legal perencanaan Kota Cerdas (Smart City)
		Realisasi	Sinkronisasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dengan RPJMD dan aktivitas kelembagaan Smart City
Keluaran program Kota Cerdas (Smart City) (Output)	20%	Kebijakan	Ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Kelembagaan	Keberadaan dan aktivitas Lembaga pengelola Kota Cerdas (Smart City) (Dewan Kota Cerdas (Smart City) dan Tim Pelaksana Kota Cerdas (Smart City))
		Anggaran	Kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City)
		Keamanan Informasi	Ketersediaan kebijakan/peraturan di daerah terkait pelaksanaan keamanan informasi, dan insiatif pemerintah daerah dalam menjadi keamanan informasi terhadap infrastruktur, dan aplikasi
Hasil program Kota Cerdas (Smart City) (Outcome)	30%	Pelaksanaan program/kegiatan/inovasi per dimensi Kota Cerdas (Smart City)	Keterlaksanaan program pembangunan Kota Cerdas (Smart City) pada tiap dimensi di tahun berjalan dibandingkan dengan program yang tertuang pada dokumen Masterplan Kota Cerdas (Smart City)
		Pelaksanaan Rencana Aksi	Pelaksanaan rencana aksi yang terkait peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, pengembangan perangkat lunak dan peningkatan literasi
Dampak program Kota Cerdas (Smart City) (Impact)	20%	Hasil Survei	Pengukuran dampak implementasi program pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City) melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi.
Program Quick Win	20%	Pelaksanaan	Perumusan, pelaksanan dan keberlanjutan Quick Win
		Manajemen Risiko	Identifikasi dan mitigasi risiko terhadap Quick Win

Evaluasi juga dilakukan dengan meninjau beberapa capaian pada aspek berikut ini:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah sejalan dengan konteks pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang peta jalan (*road map*) pelaksanaan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) yang efektif untuk mendukung implementasi pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Road map program/kegiatan pembangunan Kota Cerdas (Smart City) dan rencana aksinya yang sejalan dengan RPJMD;
- Komitmen anggaran pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) pada keenam dimensi Kota Cerdas (Smart City); Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment;
- Wujud/hasil nyata pembangunan Kota Cerdas (Smart City);
- Dampak pembangunan Kota Cerdas (Smart City) terhadap birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diukur melalui metode survei terhadap masyarakat pengguna layanan/penerima manfaat inovasi;

Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2024

BASELINE

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Perencanaan	Master Plan Smart City yang sudah memiliki payung hukum	1. Apakah Master Plan Smart City Daerah Anda sudah memiliki payung hukum?	3
	Aktivitas Dewan Smart City	2. Apakah Dewan Smart City melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini?	3
	Aktivitas Lembaga Pengelola Smart City	3. Apakah Pengelola Smart city Daerah Anda melaksanakan rapat minimal satu kali dalam tahun ini bersama OPD terkait smart city?	3
Realisasi	Realisasi Program Smart City Tahun sebelumnya	4. Berapa jumlah program smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	3.6
	Realisasi Rencana Aksi Smart City tahun sebelumnya	5. Berapa jumlah kegiatan rencana aksi smart city yang berjalan di tahun sebelumnya?	3.6
		Rata-Rata	**3.24**

OUTPUT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Kebijakan Smart city	Ketersediaan Peraturan Smart city	6. Apakah sudah terdapat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang smart city sudah	4

		tersedia setelah Daerah Anda menjalani Program Gerakan Menuju 100 Smart city?	
Kelembagaan Smart city	Keberlangsungan Fungsi Dewan Smart city	7. Apakah fungsi Dewan Smart city berjalan saat ini?	3
	Keberlangsungan Fungsi Tim Pelaksana Smart city	8. Apakah fungsi Tim Pelaksana Smart city sudah berjalan saat ini?	3
	Keterlibatan OPD dalam Program Smart city	9. Apakah OPD-OPD lain sudah terlibat secara aktif dalam pelaksanaan smart city yang dapat dilihat di dalam program dan kegiatan di dalam Rencana Strategis (Renstra) setiap OPD?	3.6
	Keberlangsungan Fungsi Forum Smart city Daerah	10. Apakah Forum Smart city Daerah sudah berjalan dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan smart city di daerah?	3
Anggaran Smart city	Ketersediaan Anggaran dari APBD untuk Program Smart city	11. Berapa persen nilai anggaran smart city dari APBD?	1
	Ketersediaan Anggaran dari Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Program Smart city	12. Sejauh mana pembiayaan alternatif (non-APBD) tersedia untuk membiayai implementasi smart city?	1
Keamanan Informasi	Ketersediaan Kebijakan Keamanan Informasi	13. Apakah tersedia kebijakan mengenai keamanan informasi? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.6
	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Data dan Informasi	14. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan data dan informasi?(mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.6
	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Aplikasi	15. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan seluruh aplikasi berbasis web dan mobile yang dikembangkan dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.6

Keamanan Informasi	Pelaksanaan Keamaan Informasi Pada Infrastruktur	16. Sejauh mana usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan keamaan infrastruktur? (mengacu kepada Perban BSSN No. 4 Tahun 2021)	3.6
		Rata-Rata	**3**

OUTCOME

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Program	Program Smart Governance di tahun berjalan	17. Sejauh mana program smart governance sudah berjalan di tahun ini?	4
	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	18. Sejauh mana kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (Laporan Keuangan Daerah BPK)?	4
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD Kemendagri)?	4
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	20. Berapa nilai SPBE KemanPANRB?	3
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	21. Sejauh mana tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)?	3
	Inovasi Pelayanan Publik	22. Sejauh mana daerah Anda sudah pernah masuk ke dalam peringkat SINOVIK?	1.6
	Program Smart Branding di tahun berjalan	23. Sejauh mana program smart branding sudah berjalan di tahun ini?	3.8
	Kemudahan Berusaha	24. Sejauh mana tingkat kemudahan berusaha daerah Anda?	4
	Kemudahan Berusaha	25. Sejauh mana realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir? (data pertumbuhan realisasi investasi di kota/kabupaten selama 2 tahun terakhir)	4
	Wajah Kota	26. Sejauh mana visualisasi identitas kota/kabupaten (logo/slogan/maskot) telah ditetapkan dan digunakan?	2

Program	Program Smart Economy di tahun berjalan	27. Sejauh mana program smart economy sudah berjalan di tahun ini?	3.8
	Kesejahteraan Masyarakat	28. Sejauh mana persentase penduduk miskin? (Tahun Terakhir)	3
	Kesejahteraan Masyarakat	29. Sejauh mana IPM di daerah Anda? (tahun terakhir)	3
	Program Smart Living di tahun berjalan	30. Sejauh mana program smart living sudah berjalan di tahun ini?	3.8
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	31. Sejauh mana persentase Baduta Stunting yang sudah tertangani 1 tahun terakhir?	3.8
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	32. Sejauh mana persentase Balita sudah mendapatkan Imunisasi lengkap dalam 1 tahun terakhir?	3
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	33. Sejauh mana cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan dalam 1 tahun terakhir?	3
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	34. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (banyaknya rumah tangga dengan aksses sumber air minum layak/jumlah rumah tangga)?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	35. Sejauh mana Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak/jumlah rumah tangga)?	4
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur	36. Sejauh mana Persentase Jalan (kota/kab) Kondisi Mantap (panjang jalan kondisi mantap/total panjang jalan)?	4
	Program Smart Society di tahun berjalan	37. Ssejauh mana program smart society sudah berjalan di tahun ini?	3
	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	38. Sejauh mana Peta Mutu Pendidikan di kota/kabupaten Anda? (rasio penduduk usia wajib belajar 9 tahun banding daya tampung)	4

Program	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	39. Sejauh mana Angka Partisipasi Murni wajib belajar 9 tahun di kota/kabupaten Anda? (rasio murid wajib belajar 9 tahun dibanding jumlah penduduk usia wajib belajar)	4
	Kebencanaan	40. Sejauh mana pemerintah memiliki program mitigasi (sebelum terjadi) bencana?	4
	Kebencanaan	41. Sejauh mana pemerintah memiliki program penanganan saat bencana?	3.8
	Kebencanaan	42. Sejauh mana pemerintah memiliki program pemulihan setelah bencana?	3.8
	Program Smart Environment di tahun berjalan	43. Sejauh mana program smart environment sudah berjalan di tahun ini?	3
	Pengelolaan Sampah	44. Sejauh mana inovasi pembatasan sampah?	3
	Pengelolaan Sampah	45. Sejauh mana inovasi dalam pengelolaan daur ulang dan guna ulang sampah	2.8
Rencana Aksi	Pelaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas SDM	46. Sejauh mana rencana aksi pengembangan kapasitas SDM sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3.4
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart city	47. Sejauh mana rencana aksi pengembangan infrastruktur sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3.6
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Aplikasi Pendukung Smart city	48. Sejauh mana rencana aksi pengembangan aplikasi pendukung smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3.6
	Pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Literasi Smart city	49. Sejauh mana rencana aksi pengembangan literasi smart city sudah dijalankan sesuai dengan Masterplan Smart city?	3.8
		Rata-Rata	**3.47**

IMPACT

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Smart Governance	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	50. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dapat diakses secara daring/online?	3
	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	51. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan/program dilaksanakan secara transparan dan prosedur yang jelas?	4
	I. Sub Dimensi: Layanan Publik (layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	52. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kualitas layanan/program menjadi lebih cepat dan murah?	4
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	53. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/program?	3.2
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	54. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas/mekanisme/kanal/ruang untuk memberikan masukan guna perbaikan kebijakan/layanan/program sudah tersedia?	4
	II. Sub Dimensi: Kebijakan Publik (diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah)	55. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai masukan dari masyarakat terkait kebijakan/layanan/program telah direspon sesuai standar waktu yang ditentukan?	4
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	56. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat keterbukaan informasi tentang program dan	3

		seluruh aktivitas pemerintah daerah?	
Smart Governance	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	57. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan data pemerintah daerah dapat diakses melalui satu kanal yang sudah terintegrasi?	4
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Birokrasi	58. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha/akademisi/komunitas lainnya?	4
Smart Branding	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	59. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai kota/kabupaten saya memiliki destinasi/atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana prasarana yang memadai bagi pengunjung?	3
	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	60. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi dan promosi destinasi/atraksi pariwisata secara daring sudah tersedia?	4
	I. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	61. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan rekreasi dan fasilitas budaya dapat dipesan secara daring?	4
	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	62. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai profil dan potensi investasi daerah yang terpadu secara online/daring sudah tersedia?	3.2
	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan	63. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	4

	Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	rata nilai Pemerintah Daerah menyediakan berbagai program insentif untuk kemudahan berusaha/peningkatan iklim investasi?	
Smart Branding	II. Sub Dimensi: Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	64. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai komunitas/kegiatan kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal sudah tersedia?	4
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	65. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah melakukan revitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, taman, koridor jalan utama,dsb) dengan ciri khas daerah?	3
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	66. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai Pemerintah Daerah memiliki visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah?	4
	III. Sub Dimensi: Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)	67. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) kota/kabupaten saya telah dikenal oleh masyarakat di luar kota/kabupaten?	4
Smart Economy	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	68. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	4
	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	69. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri?	3

Smart Economy	I. Sub Dimensi: Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (Industry)	70. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pemerintah daerah telah memberikan insentif/pendampingan/program untuk pengembangan industri?	3
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	71. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai bursa tenaga kerja lokal yang dapat diakses secara daring/online sudah tersedia?	3
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	72. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran sudah tersedia?	3.8
	II. Sub Dimensi: Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	73. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai program literasi UMKM Digital sudah tersedia?	3
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	74. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring/online sudah tersedia?	3
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	75. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai mekanisme pembayaran non-tunai (QRIS, dompet digital, dsb) sudah tersedia?	3
	III. Sub Dimensi: Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)	76. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai literasi terkait laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan sudah tersedia?	4
Smart Living	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata	77. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	3

	Ruang Wilayah (Harmony)	rata nilai terdapat informasi peruntukan tata ruang yang dapat diakses secara daring/online?	
Smart Living	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	78. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tempat tinggal saya sudah layak huni (terdapat akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas longsor, dsb)?	4
	I. Sub Dimensi: Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	79. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai sudah tersedia?	4
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	80. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pendaftaran dan informasi layanan kesehatan secara daring/online sudah tersedia?	3
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	81. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai informasi riwayat kesehatan saya dapat saya akses secara daring/online?	3
	II. Sub Dimensi: Prasarana Kesehatan (Health)	82. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai layanan telemedicine atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah sudah tersedia?	3
	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	83. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai seluruh wilayah kabupaten/kota saya memiliki akses internet dan telekomunikasi yang memadai?	3
	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana	84. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-	3

	Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	rata nilai infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/Penerangan Jalan Umum yang pintar/peta jalan/smart parking, KIR elektronik, dsb) sudah tersedia?	
Smart Living	III. Sub Dimensi: Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)	85. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota/kabupaten sudah tersedia?	3
Smart Society	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	86. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat berbagai komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang?	3
	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	87. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas terbuka publik untuk masyarakat dapat saling berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun dsb?	3
	I. Sub Dimensi: Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Komunitas)	88. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan, dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis?	3
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	89. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat terbuka/transparan?	3
	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar	90. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden	3

	Yang Efisien (Pendidikan)	pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk tempat belajar masyarakat?	
Smart Society	II. Sub Dimensi: Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)	91. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan ketrampilan tertentu?	3
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	92. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat CCTV ditempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif?	3
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	93. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif?	3
	III. Sub Dimensi: Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)	94. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan terselesaikan dengan cepat?	3
Smart Environment	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	95. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai alat pemantauan dan pengendalian kualitas udara/air/tanah/hutan sudah tersedia?	3
	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	96. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat upaya pengurangan pencemaran	3

		udara/air/tanah/hutan yang dikelola secara terpadu?	
Smart Environment	I. Sub Dimensi: Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)	97. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai telah terjadi perbaikan kualitas udara/air/tanah/hutan?	4
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	98. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah secara terpadu sudah tersedia?	4
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	99. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai pelaksanaan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi antara bank sampah dengan pihak swasta telah berjalan?	3
	II. Sub Dimensi: Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)	100. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW dst?	3
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	101. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW saya telah terpenuhi dan kejadian padam listrik di lingkungan RT/RW saya tidak pernah/semakin berkurang?	4
	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	102. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat program penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel tenaga surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro)?	3.2

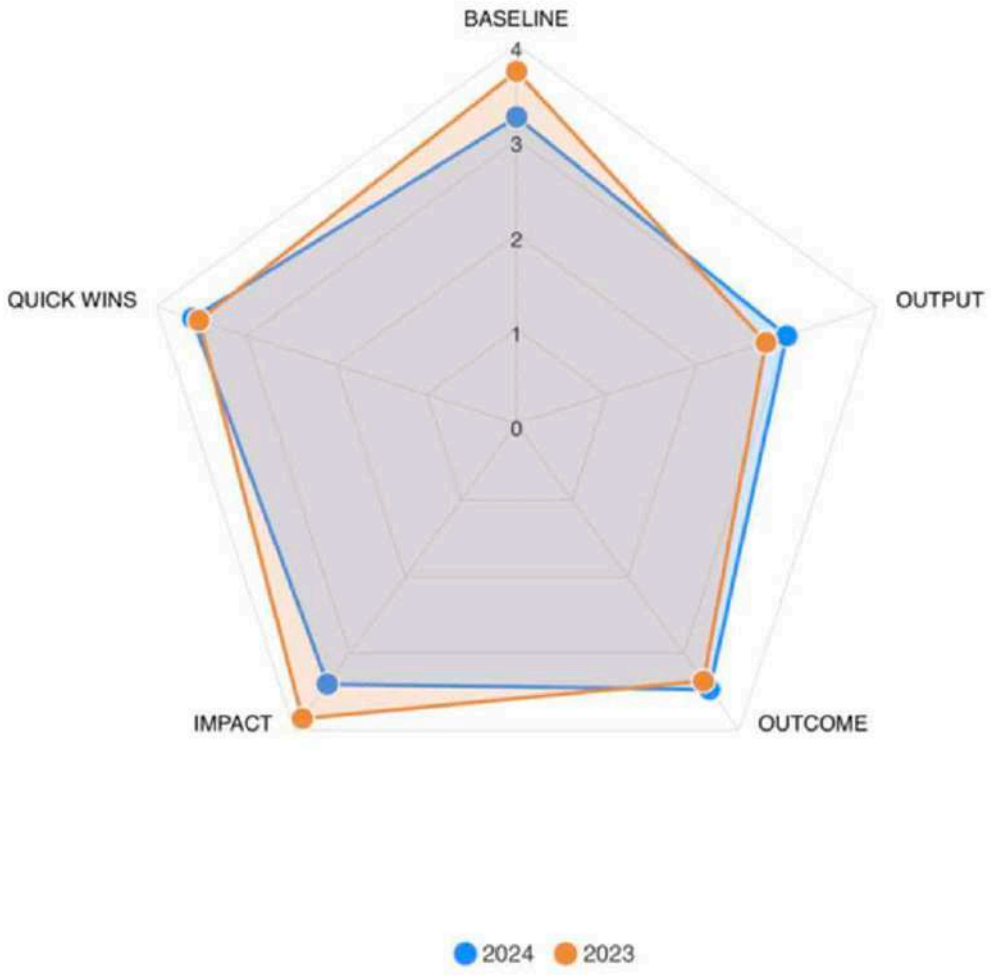
Smart Environment	III. Sub Dimensi: Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (Energi)	103. Berdasarkan hasil survey terhadap 50 responden pengguna layanan, berapa rata-rata nilai terdapat sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/limbah?	4
		Rata-Rata	**3.4**

QUICK WINS

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Penilaian
Perumusan inovasi	Perumusan inovasi	104. Apakah inovasi quick wins dirancang dengan melibatkan seluruh pihak terkait smart city dan telah memperhatikan permasalahan strategis daerah? (permasalahan strategis daerah terdapat di dalam RPJMD)	3
Daya tarik inovasi	Daya tarik inovasi	105. Apakah inovasi quick wins yang dirancang memiliki daya tarik, baik untuk kalangan internal (warga lokal dan pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat luar daerah)?	4
Manfaat inovasi	Manfaat inovasi	106. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?	3.8
Keunikan inovasi	Keunikan inovasi	107. Apakah Inovasi quick wins yang dirancang mengandung keunikan atau ada unsur kreativitas di dalamnya?	3
Peluang kemitraan	Peluang kemitraan	108. Sejauh mana inovasi quick wins yang dirancang dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal?	3.6
Potensi pengembangan	Potensi pengembangan	109. Sejauh mana inovasi quick wins memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan?	3.6
Keberlangsungan	Keberlangsungan	110. Apakah pemerintah daerah sudah memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungan berjalannya inovasi quick wins?	4
Sumber daya	Sumber daya	111. Apakah sumber daya untuk mengembangkan dan	4

		menjalankan inovasi quick wins tersedia?	
Manajemen Risiko	Identifikasi risiko	112. Sejauh mana pemerintah daerah sudah melakukan identifikasi risiko?	4
Manajemen Risiko	Mitigasi risiko	113. Sejauh mana pemerintah daerah menyusun rencana mitigasi risiko?	4
Keberlanjutan	Keberlanjutan	114. Sejauh mana program quick wins smart city tahun lalu masih terus berjalan di tahun ini?	3.8
Keberlanjutan	Keberlanjutan	115. Berapa banyak program quick wins smart city yang baru untuk tahun ini?	2.4
		Rata-Rata	**3.6**

Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023 dan 2024



Kekuatan

1) **Dana Indra Sensuse (Universitas Indonesia)**
   a. Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City sudah ditetapkan.
   b. Program Smart City dan Rencana Aksi sudah berjalan, meskipun terdapat beberapa program dam rencana aksi yang belum berjalan.
   c. Pada Smart Governance, capaian untuk peringkat SINOVIK masih rendah.
   d. Pada Smart Branding, capaian untuk visualisasi identitas kota/kabupaten (logo/slogan/maskot) masih belum ditetapkan.
   e. Kolaborasi antara Perangkat Daerah sudah berjalan baik dan inovasi sering muncul dari hasil kolaborasi tersebut.
   f. Penerapan keamanan informasi sudah baik.
2) **Heri Sutrisno (LSP Teknologi Informasi Indonesia)**
   a. Sudah ada kegiatan dewa smart city
   b. Program smart city dilaksanan lebih dari 75%
   c. Sudah ada dukungan peraturan untuk smart city.
3) **Irwan Sembiring (Universitas Kristen Satya Wacana)**
   a. Kabupaten Nganjuk sudah mendapat sertifikasi ISO 27001:2022 terkait keamanan sistem informasi.
   b. Kolaborasi antar Perangkat Daerah sudah berjalan baik dan efektif.
   c. Jaminan keberlanjutan quick wins.
4) **Rosikin (Kemenpan RB)**
   a. Kabupaten Nganjuk menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam implementasi Smart City dengan kinerja pemerintahan yang sangat baik, dibuktikan dengan nilai SPBE yang tergolong "Sangat Baik" (3.62), status kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang "Sangat Tinggi", dan opini WTP dari BPK. Hal ini menunjukkan fondasi tata kelola yang solid untuk pengembangan Smart City.
   b. Tingkat partisipasi dan keterlibatan Perangkat Daerah dalam program Smart City sangat tinggi, mencapai 76-100% Perangkat Daerah yang berpartisipasi aktif.
   c. Tim Pelaksana dan Dewan Smart City juga menunjukkan kinerja yang baik dengan pelaksanaan rapat koordinasi rutin dan tingkat kehadiran yang tinggi, menunjukkan komitmen institusional yang kuat.
   d. Implementasi program Smart City menunjukkan capaian yang sangat baik di berbagai dimensi, dengan tingkat realisasi program di atas 75% untuk Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, dan Smart Living.
   e. Keberhasilan ini didukung oleh kebijakan keamanan informasi yang kuat, dibuktikan dengan perolehan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022.
   f. Pengelolaan pelayanan dasar publik menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian di atas 75% untuk akses air minum layak, sanitasi layak, dan kondisi jalan mantap.
   g. Program kebencanaan juga telah berjalan dengan baik, mencakup mitigasi, penanganan, dan pemulihan yang telah teruji.
5) **Tunjung Laksono (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)**
   a. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah memiliki banyak regulasi terkait implementasi Smart City, antara lain :
      - Peraturan Bupati Nomor 11/2022 tentang Penyelenggaraan SPBE;
      - Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/234/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Komite Kota Cerdas Kabupaten Nganjuk;
      - Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/235/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kota Cerdas Kabupaten Nganjuk;

- Masterplan Smart City Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 - 2032;
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE;
- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/287/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aplikasi Nganjuk Smart City;
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Talenta Digital Melalui Layanan Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang;
- Keputusan Bupati Nomor 188/211/K/411.013/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Rumah Talenta Digital Anjuk Ladang (Omah Tandang); Dsb.

b. Ketersediaan regulasi di tingkat daerah tersebut menunjukkan tingginya komitmen pemerintah daerah dalam implementasi smart city.
c. Ketersediaan regulasi tersebut juga akan memudahkan implementasi smart city maupun memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan smart city di daerah.
d. Kolaborasi antar Perangkat Daerah cukup kuat sehingga banyak inovasi yang bisa dilahirkan dari kolaborasi tersebut

Kelemahan

1) Dana Indra Sensuse (Universitas Indonesia)

a. Kabupaten ini belum memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Bupati untuk implementasi Master Plan Smart City, dan masih dalam bentuk draft.
b. Tidak semua anggota Tim Pelaksana dan Dewan Smart City aktif dalam kegiataan Smart City.
c. Forum Smart City masih belum optimal.
d. Anggaran Smart City yang berasal dari APBD termasuk kecil, dan begitu juga pembiayaan alternatif diluar APBD juga masih kecil.
e. Kabupaten ini bergantung pada Dana Alokasi Umum dari Pemerintahan Pusat.
f. Integrasi aplikasi terutama untuk Smart Governance masih lemah.
g. Kinerja layanan publik ke masyarakat masih lambat, dan sementara itu kebutuhan masyarakat sangat dinamis.

2) Heri Sutrisno (LSP Teknologi Informasi Indonesia)

a. Masterplan belum ada dukungan peraturan Daerah.
b. Tidak ada perbedaan kegiatan dewan dan tim pelaksana smart city.
c. Tidak ada data dukung jumlah rencana aksi dan yang telah dijalankan

3) Irwan Sembiring (Universitas Kristen Satya Wacana)

a. Payung hukum belum dalam Perbup kabupaten Nganjuk.
b. Kebutuhan masyarakat yang dinamis belum bisa terpenuhi dengan cepat
c. Anggaran pihak ketiga, eksternal dan swasta belum maksimal

4) Rosikin (Kemenpan RB)

a. Meskipun memiliki Masterplan Smart City, dokumen ini belum memiliki payung hukum yang kuat karena masih dalam bentuk rancangan peraturan.
b. Hal ini dapat menghambat implementasi dan keberlanjutan program Smart City dalam jangka panjang.
c. Alokasi anggaran untuk program Smart City masih sangat terbatas, yaitu hanya 0-10% dari APBD, dengan minimnya sumber pembiayaan alternatif. Keterbatasan anggaran ini dapat menjadi kendala serius dalam pengembangan infrastruktur dan program Smart City.
d. Beberapa aspek layanan publik masih menunjukkan nilai kepuasan masyarakat yang relatif rendah (2.50-3.49), terutama dalam hal akses layanan daring, keterbukaan informasi, dan pelayanan transportasi publik. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas layanan publik berbasis

digital.Identitas dan branding kota belum optimal, dengan visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) yang belum ditetapkan secara resmi.

e. Program Smart Society juga masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek literasi digital dan pemberdayaan. komunitas.

5) Tunjung Laksono (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

a. Persentase nilai anggaran smart city dari APBD masih kecil
b. Persentase pembiayaan alternatif (non-APBD) yang tersedia untuk membiayai implementasi smart city masih kecil
c. Visualisasi identitas kota/kabupaten (logo/slogan/maskot) belum optimal.
d. Presentasi yang dipaparkan pada waktu evaluasi kurang komprehensif sehingga banyak hal penting terkait smart city yang belum sempat di-hilite

Rekomendasi

1) Dana Indra Sensuse (Universitas Indonesia)

a. Pemerintah kabupaten ini perlu memprioritaskan penyelesaian Peraturan Bupati yang mengatur tentang Master Plan Smart City.
b. Payung hukum yang jelas akan memberikan dasar yang kuat bagi implementasi program Smart City dan membantu mengarahkan kebijakan serta alokasi sumber daya.
c. Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City perlu lebih aktif lagi dengan cara mengadakan pertemuan rutin dengan target dan tujuan yang jelas agar semua anggota dapat berperan aktif dan terlibat dalam kegiatan.
d. Forum Smart City harus difungsikan sebagai sarana diskusi untuk menampung ide, kendala, dan solusi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat.
e. Pemerintah Kabupaten ini perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti hibah pemerintah pusat, dana CSR, atau kerjasama dengan pihak swasta, dan perlu melakukan prioritas anggaran untuk inisiatif yang memberikan dampak terbesar dan berfokus pada aspek dasar seperti infrastruktur TIK.
f. Pelatihan rutin bagi SDM yang ada, terutama dalam keterampilan teknologi informasi dasar perlu dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan untuk menyediakan program magang atau sertifikasi bagi SDM lokal, sehingga layanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi.

2) Heri Sutrisno (LSP Teknologi Informasi Indonesia)

a. Membuat jumlah rencana aksi yang telah berjalan dan belum berjalan
b. Membuat relasi inovasi dnegan permasalahan strategis
c. Membedakan kegiatan dewan smart city dengan tim pelaksana smart city

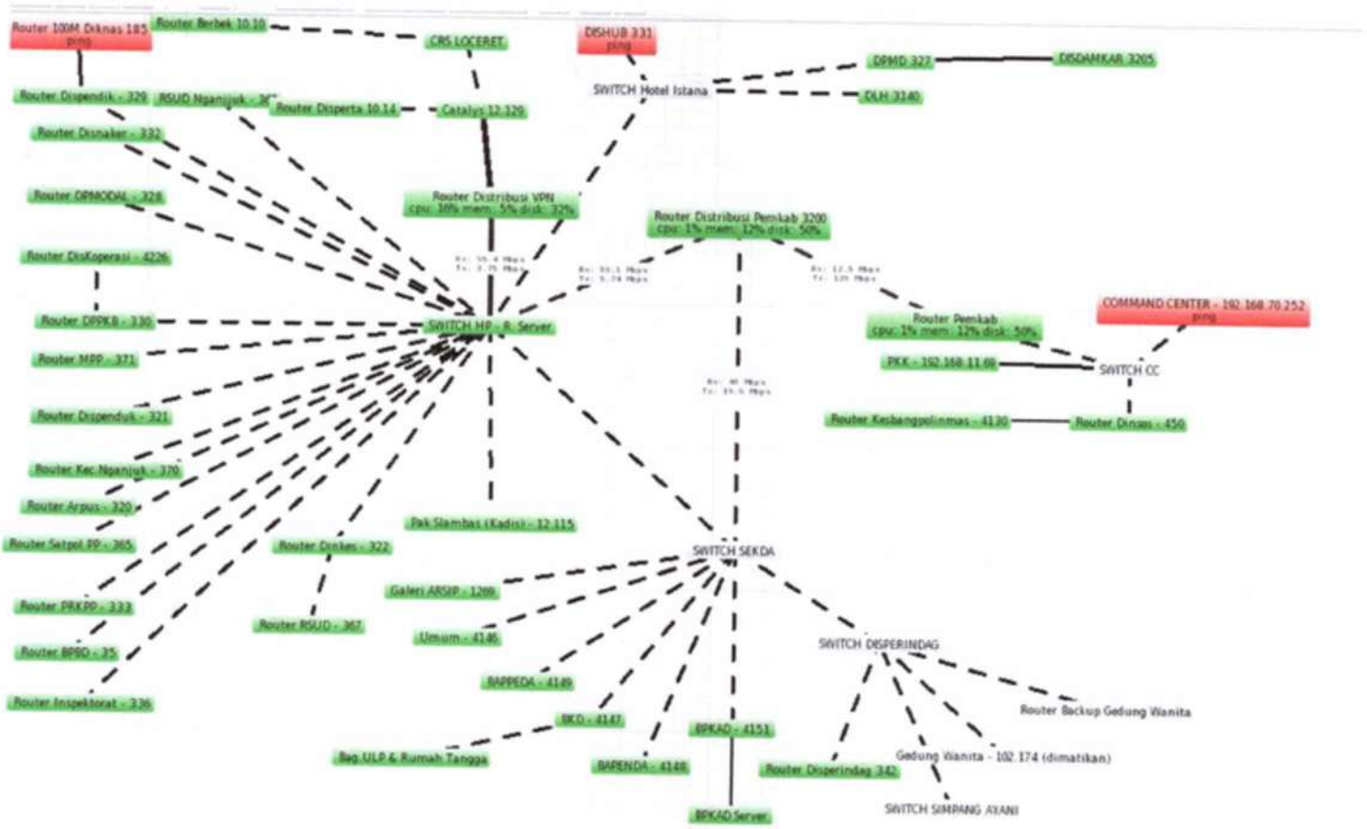
3) Irwan Sembiring (Universitas Kristen Satya Wacana)

a. Perlu ada intervensi yang intens untuk mempercepat payung hukum smart city menjasi Peraturan bupati masterplan smart city Kabupaten Nganjuk.
b. Perlu adanya ketetapan terkait logo atau wajah kota
c. Perlu kebih intens menjalin kerjasama dengan pihak terkait termasuk perguruan tinggi dalam melakukan kajian terkait efektivitas smart city di Kabupaten Nganjuk
d. Perlu melakukan kerjasama yang lebih intens dengan pihak ketiga untuk sumber pendanaan non. APBD.

4) **Rosikin (Kemenpan RB)**
   a. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu segera menyelesaikan proses legalisasi Masterplan Smart City menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi implementasi program.
   b. Bersamaan dengan itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan melalui penetapan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk setiap program Smart City.Diperlukan strategi peningkatan pendanaan melalui diversifikasi sumber pembiayaan, seperti kerjasama dengan sektor swasta (Public Private Partnership), pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), atau pengajuan hibah ke pemerintah pusat.
   c. Optimalisasi pendapatan asli daerah juga perlu dilakukan untuk mendukung keberlangsungan program.
   d. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital perlu diprioritaskan melalui pengembangan aplikasi yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur digital, dan penguatan kapasitas SDM.
   e. Program literasi digital untuk masyarakat juga perlu diperkuat untuk meningkatkan adopsi layanan digital.
   f. Pengembangan identitas dan branding kota perlu dipercepat melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
   g. Program Smart Society perlu diperkuat melalui pemberdayaan komunitas, pengembangan ruang publik kreatif, dan program pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi Smart City.
5) **Tunjung Laksono (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)**
   a. Perlunya meningkatkan sumber pembiayaan alternatif dari non-APBD dengan menggandeng pihak-pihak swasta yang relevan.
   b. Visualisasi identitas kabupaten perlu dioptimalkan misalnya dengan menggandeng berbagai komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk sehingga lebih optimal dalam membranding Kabupaten Nganjuk.
   c. Presentasi perlu mengacu pada point-point pertanyaan dalam evaluasi sehingga lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
   d. Optimalisasi edukasi pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

IKK OUTCOME URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024



NO	OPD	Konektifitas Intranet OPD	Sebaran Bandwith
1	Badan Kepegawaian Daerah	FO	500 Mb
2	Badan Penanggulangan Bencan Daerah	FO	500 Mb
3	Badan Pendapatan Daerah	FO	500 Mb
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	FO	500 Mb
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	FO	500 Mb
6	DAMKAR	FO	500 Mb
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	FO	500 Mb
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	FO	500 Mb
9	Dinas Kesehatan	FO	500 Mb
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	FO	500 Mb
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	FO	500 Mb
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	FO	500 Mb
13	Dinas Lingkungan Hidup	FO	500 Mb
14	Dinas Pariwisata	FO	500 Mb
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	FO	500 Mb

NO	OPD	Konektifitas Intranet OPD	Sebaran Bandwith
16	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	FO	500 Mb
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	FO	500 Mb
18	Dinas Pendidikan	FO	500 Mb
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	FO	500 Mb
20	Dinas Perhubungan	FO	500 Mb
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	FO	500 Mb
22	Dinas Pertanian	FO	500 Mb
23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	FO	500 Mb
24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindukan Anak	FO	500 Mb
25	Dinas Tenaga Kerja	FO	500 Mb
26	Inspektorat Daerah	FO	500 Mb
27	Sekretariat Daerah	FO	500 Mb
28	Sekretariat DPRD	FO	500 Mb
29	Kesatuan Bangsa dan Politik	FO	500 Mb
30	Satuan Polisi Pamong Praja	FO	500 Mb
31	RSUD NGANJUK	FO	500 Mb
32	RSUD KERTOSONO	FO	500 Mb
33	Kec. Bagor	FO	500 Mb
34	Kec. Baron	FO	500 Mb
35	Kec. Berbek	FO	500 Mb
36	Kec. Gondang	FO	500 Mb
37	Kec. Jatikalen	FO	500 Mb
38	Kec. Kertosono	FO	500 Mb
39	Kec. Lengkong	FO	500 Mb
40	Kec. Loceret	FO	500 Mb
41	Kec. Nganjuk	FO	500 Mb
42	Kec. Ngetos	FO	500 Mb
43	Kec. Ngluyu	FO	500 Mb
44	Kec. Ngronggot	FO	500 Mb
45	Kec. Pace	FO	500 Mb
46	Kec. Patianrowo	FO	500 Mb
47	Kec. Prambon	FO	500 Mb
48	Kec. Rejoso	FO	500 Mb
49	Kec. Sawahan	FO	500 Mb
50	Kec. Sukomoro	FO	500 Mb
51	Kec. Tanjunganom	FO	500 Mb
52	Kec. Wilangan	FO	500 Mb

Rumus :

Presentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas komunikasi dan informatika =

$$\frac{Jumlah\ Perangkat\ daerah\ yg\ terhubung\ dg\ akses\ internet\ yg\ disediakan\ oleh\ dinas\ kominfo}{Jumlah\ seluruh\ perangkat\ daerah} x\ 100\%$$

$$= \frac{52}{52} x\ 100\%$$

= 100%

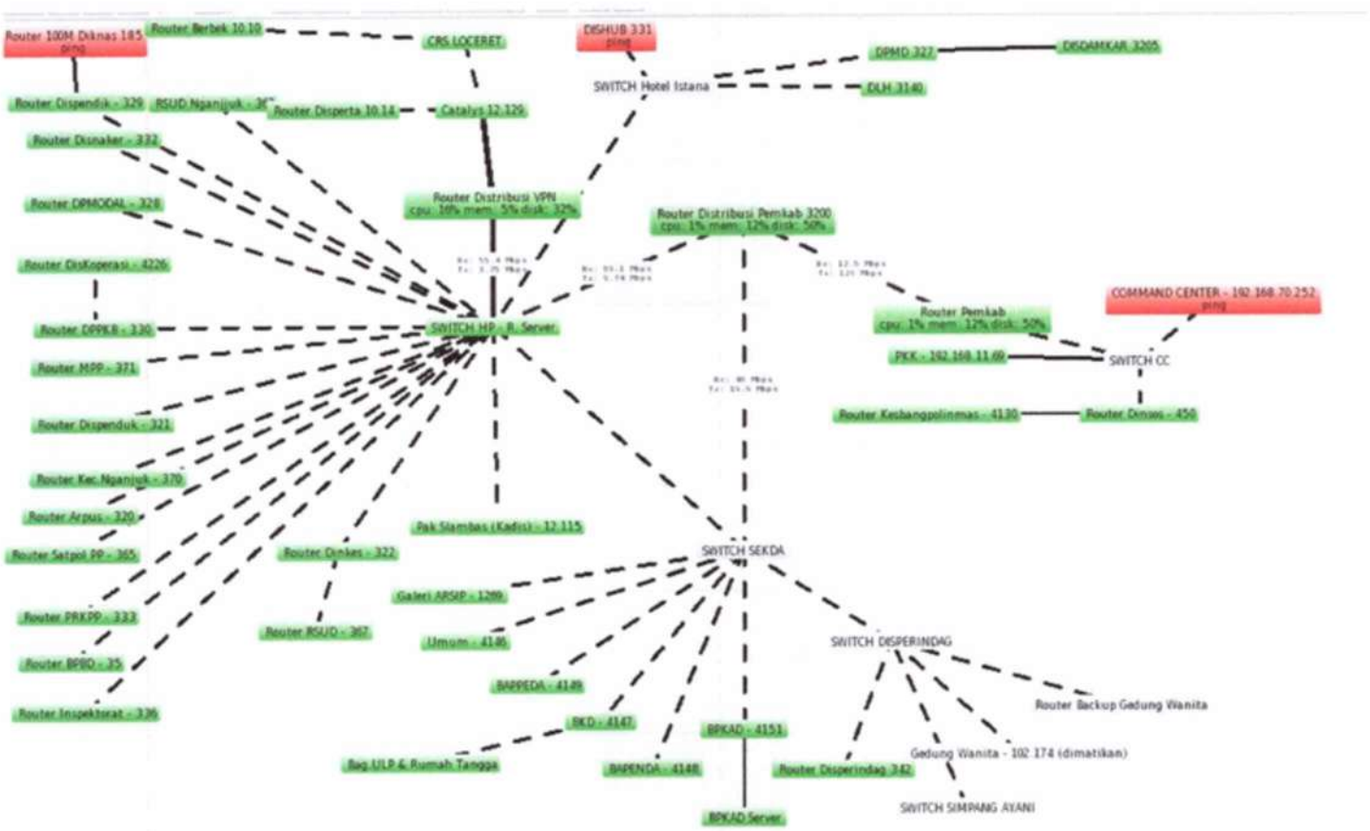
- Menggunakan Internet Dedicated dengan metode Bandwidth Sharing

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

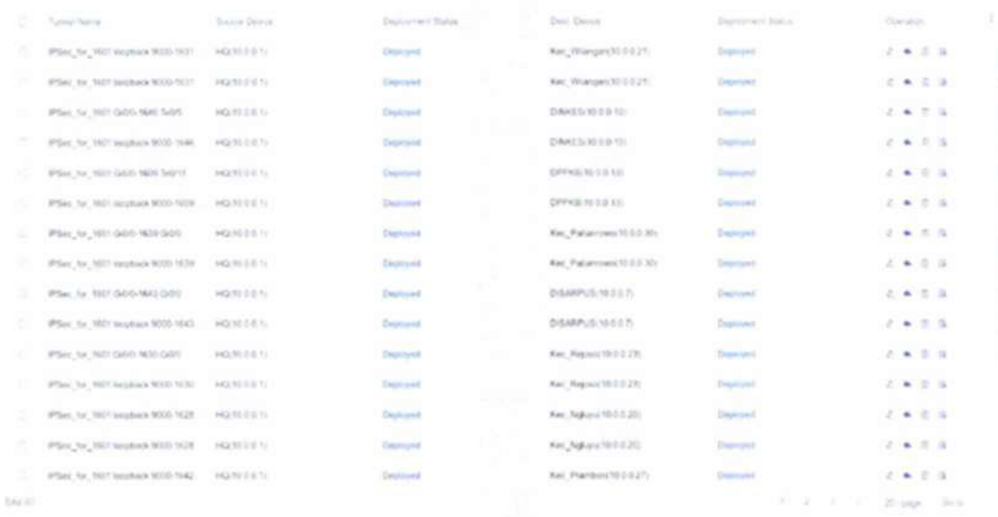
IKK OUTPUT URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERANGKAT DAERAH YANG TERKONEKSI DI JARINGAN INTRA PEMERINTAH ATAU MENGGUNAKAN AKSES INTERNET YANG DIAMANKAN YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO TAHUN 2024



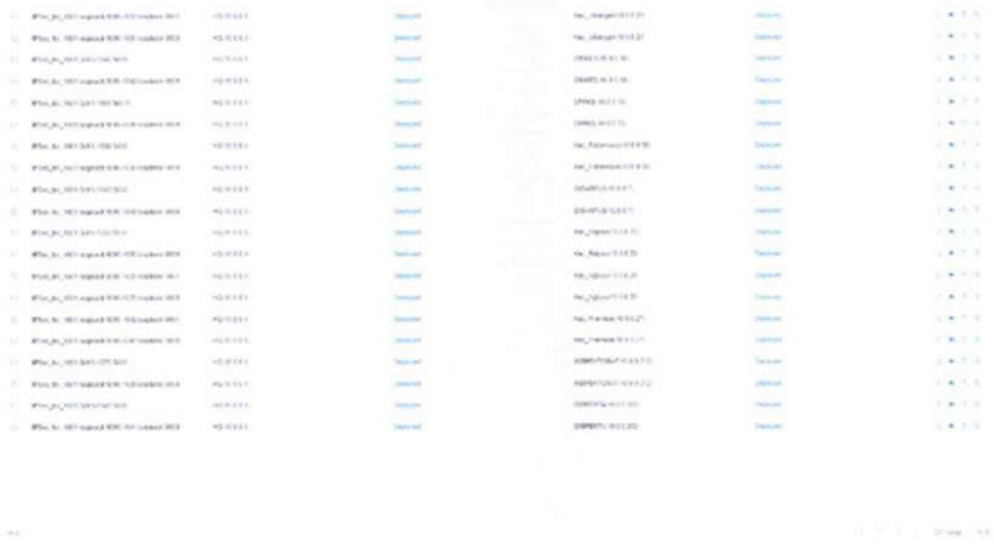
NO	OPD	Konektifitas Intranet OPD	Jenis Pengamanan
1	Badan Kepegawaian Daerah	FO	IP Sec Tunnel
2	Badan Penanggulangan Bencan Daerah	FO	IP Sec Tunnel
3	Badan Pendapatan Daerah	FO	IP Sec Tunnel
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	FO	IP Sec Tunnel
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	FO	IP Sec Tunnel
6	DAMKAR	FO	IP Sec Tunnel
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	FO	IP Sec Tunnel
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	FO	IP Sec Tunnel
9	Dinas Kesehatan	FO	IP Sec Tunnel

NO	OPD	Konektifitas Intranet OPD	Jenis Pengamanan
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	FO	IP Sec Tunnel
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	FO	IP Sec Tunnel
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	FO	IP Sec Tunnel
13	Dinas Lingkungan Hidup	FO	IP Sec Tunnel
14	Dinas Pariwisata	FO	IP Sec Tunnel
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	FO	IP Sec Tunnel
16	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	FO	IP Sec Tunnel
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	FO	IP Sec Tunnel
18	Dinas Pendidikan	FO	IP Sec Tunnel
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	FO	IP Sec Tunnel
20	Dinas Perhubungan	FO	IP Sec Tunnel
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	FO	IP Sec Tunnel
22	Dinas Pertanian	FO	IP Sec Tunnel
23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	FO	IP Sec Tunnel
24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindukan Anak	FO	IP Sec Tunnel
25	Dinas Tenaga Kerja	FO	IP Sec Tunnel
26	Inspektorat Daerah	FO	IP Sec Tunnel
27	Sekretariat Daerah	FO	IP Sec Tunnel
28	Sekretariat DPRD	FO	IP Sec Tunnel
29	Kesatuan Bangsa dan Politik	FO	IP Sec Tunnel
30	Satuan Polisi Pamong Praja	FO	IP Sec Tunnel
31	RSUD NGANJUK	FO	IP Sec Tunnel
32	RSUD KERTOSONO	FO	IP Sec Tunnel
33	Kec. Bagor	FO	IP Sec Tunnel
34	Kec. Baron	FO	IP Sec Tunnel
35	Kec. Berbek	FO	IP Sec Tunnel
36	Kec. Gondang	FO	IP Sec Tunnel
37	Kec. Jatikalen	FO	IP Sec Tunnel
38	Kec. Kertosono	FO	IP Sec Tunnel
39	Kec. Lengkong	FO	IP Sec Tunnel

NO	OPD	Konektifitas Intranet OPD	Jenis Pengamanan
40	Kec. Loceret	FO	IP Sec Tunnel
41	Kec. Nganjuk	FO	IP Sec Tunnel
42	Kec. Ngetos	FO	IP Sec Tunnel
43	Kec. Ngluyu	FO	IP Sec Tunnel
44	Kec. Ngronggot	FO	IP Sec Tunnel
45	Kec. Pace	FO	IP Sec Tunnel
46	Kec. Patianrowo	FO	IP Sec Tunnel
47	Kec. Prambon	FO	IP Sec Tunnel
48	Kec. Rejoso	FO	IP Sec Tunnel
49	Kec. Sawahan	FO	IP Sec Tunnel
50	Kec. Sukomoro	FO	IP Sec Tunnel
51	Kec. Tanjunganom	FO	IP Sec Tunnel
52	Kec. Wilangan	FO	IP Sec Tunnel



Gambar 1. Tangkapan layar konfigurasi IPSec Tunnel pada jaringan internet yang disediakan Kominfo



Gambar 2. Tangkapan layar konfigurasi IPSec Tunnel pada jaringan internet yang disediakan Kominfo



Gambar 3. Tangkapan layar konfigurasi IPSec Tunnel pada jaringan internet yang disediakan Kominfo



Gambar 4. Tangkapan layar konfigurasi IPSec Tunnel pada jaringan internet yang disediakan Kominfo

Rumus :

Presentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo =

$$\frac{\textit{Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disedia}}{\textit{Jumlah seluruh perangkat daerah}}$$

$= \frac{52}{52} x\ 100\%$

= 100%

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

LAMPIRAN VII

Dokumen Pendukung Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

IKK OUTPUT URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SISTEM ELEKTRONIK YANG TELAH MENERAPKAN PRINSIP SISTEM MANAJEMEN YANG TELAH MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI (SMKI) DAN ATAU APLIKASI PERSANDIAN DIBANDING JUMLAH SISTEM ELEKTRONIK YANG ADA PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

No	Website/Aplikasi	SSL
1	simas.nganjukkab.go.id	SSL
2	simbak.nganjukkab.go.id	SSL
3	absenmobile.nganjukkab.go.id	SSL
4	bkpsdm.nganjukkab.go.id	SSL
5	simpelmasjar.nganjukkab.go.id	SSL
6	kesbangpol.nganjukkab.go.id	SSL
7	bpbd.nganjukkab.go.id	SSL
8	bapenda.nganjukkab.go.id	SSL
9	SIMDA - Desktop	Tidak
10	SIM GAJI - Desktop (database online)	Tidak
11	SIM ASET - Desktop	Tidak
12	simbal.nganjukkab.go.id	SSL
13	aklap.nganjukkab.go.id/sipkd2023/	SSL
14	bpkad.nganjukkab.go.id	SSL
15	bappeda.nganjukkab.go.id	SSL
16	sidaberkat.nganjukkab.go.id	SSL
17	sikn.nganjukkab.go.id	SSL
18	siarsip.nganjukkab.go.id	SSL
19	arpus.nganjukkab.go.id	SSL
20	disporabudpar.nganjukkab.go.id	SSL
21	dekwita.nganjukkab.go.id	SSL
22	sedudo.nganjukkab.go.id	SSL
23	lasmini.nganjukkab.go.id	SSL
24	dispendukcapil.nganjukkab.go.id	SSL
25	SMILE	Tidak
26	pkm-baron.nganjukkab.go.id	SSL
27	pkm-bagor.nganjukkab.go.id	SSL
28	pkm-berbek.nganjukkab.go.id	SSL
29	pkm-gondang.nganjukkab.go.id	SSL
30	pkm-jatikalen.nganjukkab.go.id	SSL
31	pkm-kertosono.nganjukkab.go.id	SSL
32	pkm-lengkong.nganjukkab.go.id	SSL
33	pkm-loceret.nganjukkab.go.id	SSL
34	pkm-nganjuk.nganjukkab.go.id	SSL
35	pkm-ngetos.nganjukkab.go.id	SSL
36	pkm-ngluyu.nganjukkab.go.id	SSL
37	pkm-ngronggot.nganjukkab.go.id	SSL
38	pkm-pace.nganjukkab.go.id	SSL
39	pkm-patianrowo.nganjukkab.go.id	SSL
40	pkm-prambon.nganjukkab.go.id	SSL
41	pkm-rejoso.nganjukkab.go.id	SSL
42	pkm-sawahan.nganjukkab.go.id	SSL
43	pkm-sukomoro.nganjukkab.go.id	SSL
44	pkm-tanjunganom.nganjukkab.go.id	SSL
45	pkm-wilangan.nganjukkab.go.id	SSL
46	dinkes.nganjukkab.go.id	SSL
47	dkpp.nganjukkab.go.id	SSL
48	sikecap.nganjukkab.go.id	SSL
49	jurnal.nganjukkab.go.id	SSL
50	dashboard.nganjukkab.go.id	SSL
51	wadulbupati.nganjukkab.go.id	SSL
52	ppid.nganjukkab.go.id	SSL
53	www.nganjukkab.go.id	SSL
54	diskominfo.nganjukkab.go.id	SSL
55	rsalfm.nganjukkab.go.id	SSL
56	cctv.nganjukkab.go.id	SSL
57	ngantarbis.nganjukkab.go.id	SSL
58	fantasisite.nganjukkab.go.id	SSL
59	wxyz.nganjukkab.go.id	SSL
60	spbe.nganjukkab.go.id	SSL
61	Aplikasi Nganjuk Smart City	SSL
62	diskopum.nganjukkab.go.id	SSL
63	b3.nganjukkab.go.id	SSL
64	dlh.nganjukkab.go.id	SSL
65	dlhkp.nganjukkab.go.id	SSL
66	sioptimis.nganjukkab.go.id	SSL
67	jalan.nganjukkab.go.id	SSL
68	pupr.nganjukkab.go.id	SSL
69	simperev.nganjukkab.go.id	SSL
70	damkar.nganjukkab.go.id	SSL
71	SISKEUDES - Desktop	Tidak
72	pmd.nganjukkab.go.id	SSL
73	perizinan.nganjukkab.go.id	SSL
74	antrianmpp.nganjukkab.go.id	SSL
75	dpmptsp.nganjukkab.go.id	SSL
76	dispendik.nganjukkab.go.id	SSL
77	dppkb.nganjukkab.go.id	SSL
78	ekir.nganjukkab.go.id	SSL
79	simpkb.nganjukkab.go.id	SSL

No	Website/Aplikasi	SSL
80	dishub.nganjukkab.go.id	SSL
81	disperindag.nganjukkab.go.id	SSL
82	disperta.nganjukkab.go.id	SSL
83	siomah.nganjukkab.go.id	SSL
84	prkpp.nganjukkab.go.id	SSL
85	dinsospppa.nganjukkab.go.id	SSL
86	loker.nganjukkab.go.id	SSL
87	disnaker.nganjukkab.go.id	SSL
88	sipwas2.nganjukkab.go.id	SSL
89	sisultan.nganjukkab.go.id	SSL
90	inspektorat.nganjukkab.go.id	SSL
91	bagor.nganjukkab.go.id	SSL
92	baron.nganjukkab.go.id	SSL
93	berbek.nganjukkab.go.id	SSL
94	gondang.nganjukkab.go.id	SSL
95	jatikalen.nganjukkab.go.id	SSL
96	kertosono.nganjukkab.go.id	SSL
97	lengkong.nganjukkab.go.id	SSL
98	loceret.nganjukkab.go.id	SSL
99	nganjuk.nganjukkab.go.id	SSL
100	ngetos.nganjukkab.go.id	SSL
101	ngluyu.nganjukkab.go.id	SSL
102	ngronggot.nganjukkab.go.id	SSL
103	pace.nganjukkab.go.id	SSL
104	patianrowo.nganjukkab.go.id	SSL
105	prambon.nganjukkab.go.id	SSL
106	rejoso.nganjukkab.go.id	SSL
107	sawahan.nganjukkab.go.id	SSL
108	sukomoro.nganjukkab.go.id	SSL
109	tanjunganom.nganjukkab.go.id	SSL

No	Website/Aplikasi	SSL
110	wilangan.nganjukkab.go.id	SSL
111	pkk.nganjukkab.go.id	SSL
112	rsudkertosono.nganjukkab.go.id	SSL
113	rsud.nganjukkab.go.id	SSL
114	pacs.rsd.nganjukkab.go.id	SSL
115	dokter.rsd.nganjukkab.go.id	SSL
116	tiger-cepp.nganjukkab.go.id	SSL
117	polpp.nganjukkab.go.id	SSL
118	jdih.nganjukkab.go.id	SSL
119	setda.nganjukkab.go.id	SSL
120	lppd.nganjukkab.go.id	SSL
121	monev.nganjukkab.go.id	SSL
122	lpse.nganjukkab.go.id	SSL
123	sepiion.nganjukkab.go.id	SSL
124	siprasa.nganjukkab.go.id	SSL
125	jdihdprd.nganjukkab.go.id	SSL
126	pmi.nganjukkab.go.id	SSL
127	sianik.nganjukkab.go.id	SSL
128	fks.nganjukkab.go.id	SSL
129	cloud.nganjukkab.go.id	SSL
130	zi.nganjukkab.go.id	SSL
131	ckan.nganjukkab.go.id	SSL
132	nsc.nganjukkab.go.id	SSL
133	geoportal.nganjukkab.go.id	SSL
134	ruangrapat.nganjukkab.go.id	SSL
135	sipertan.nganjukkab.go.id	SSL
136	deskpemilukada.nganjukkab.go.id	SSL
137	cctv-ai.nganjukkab.go.id	SSL
138	etax.nganjukkab.go.id	SSL
139	silapbb.nganjukkab.go.id	SSL

Rumus :

Presentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah =

$$\frac{\textit{Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip}-\textit{prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian}}{\textit{Jumlah SE yg ada}} \; x\ 100\%$$

$= \frac{134}{139} x\ 100\%$

$= 96{,}40\%$

Nganjuk 13 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013

PROSEDUR AKUISISI, PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN SISTEM

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

Versi	1.0
Nomor Dokumen	022 /PROSEDUR/DISKOMINFO-NGK/SMKI/2024
Klasifikasi Dokumen	Internal
Pemilik Dokumen	Tim SMKI
Tanggal Berlaku Efektif	7 Agustus 2024

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Tim SMKI	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas
SURYATA AGUST. A NIP. 198608072019031007	SUJONO , S.KOM NIP. 197611282006041013	SLAMET BASUKI , A.P NIP. 197503111993111001

Daftar Perubahan Dokumen

No Versi	Tanggal	Isi Perubahan	Bagian
1.0	7 Agustus 2024	• Pembuatan Awal	All

1. Sasaran

Sasaran dari kebijakan dan prosedur ini yaitu:

1. Memastikan keamanan informasi merupakan bagian integral dari sistem informasi dari keseluruhan daur hidup.
2. Memastikan keamanan informasi yang dirancang dan ditetapkan dalam daur hidup pengembangan sistem informasi.
3. Memastikan perlindungan terhadap data yang digunakan untuk pengujian.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kebijakan dan prosedur ini harus dilaksanakan pada sistem terkait pada proses bisnis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

3. Peran dan Tanggung Jawab

A. CISO bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses dan aktivitas yang dijabarkan dalam kebijakan ini, termasuk pemeliharaan dari catatan (*records*) hasil proses dan aktivitas tersebut.

B. Divisi IT bertanggung jawab atas pelaksanaan dari keseluruhan proses dan aktivitas yang dijabarkan dalam kebijakan ini.

C. Manajemen Puncak SMKI bertanggung jawab penuh (*accountable*) atas pelaksanaan dari keseluruhan proses dan aktivitas yang dijabarkan dalam kebijakan ini.

D. Koordinator Pengendalian Dokumen bertanggung jawab atas proses peninjauan dan pemeliharaan dari kebijakan ini.

4. Referensi

A. ISO/IEC 27001:2022, A.5.8 – Keamanan Informasi dalam Manajemen Proyek

B. ISO/IEC 27001:2022, A.8.25 – Siklus Pengembangan Aman

C. ISO/IEC 27001:2022, A.8.26 – Persyaratan Sistem Keamanan Informasi

D. ISO/IEC 27001:2022, A.8.27 – Arsitektur Sistem yang Aman dan Prinsip-Prinsip Rekayasa

E. ISO/IEC 27001:2022, A.8.29 – Pengujian Keamanan dalam Pengembangan dan Penerimaan

F. ISO/IEC 27001:2022, A.8.31 – Pemisahan Lingkungan Pengembangan, Pengujian dan Operasional
G. ISO/IEC 27001:2022, A.8.32 – Manajemen Perubahan
H. ISO/IEC 27001:2022, A.8.33 – Informasi Pengujian

5. Dokumen Terkait

A. Form *Development Test Case*

6. Kebijakan Umum

Prosedur akuisisi, pengembangan, dan perawatan sistem ini harus dilaksanakan pada sistem yang terkait dengan proses bisnis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

6.1 Persyaratan Keamanan Sistem Informasi

1. Semua sistem informasi baru atau pengembangan sistem informasi harus memuat persyaratan mengenai keamanan informasi.
2. Sistem informasi baru atau sistem informasi yang dikembangkan harus memuat persyaratan mengenai otentikasi pengguna untuk memastikan identitas pengguna yang memiliki akses terhadap sistem.
3. Setiap pengguna yang akan mengakses sistem harus melewati proses otorisasi.
4. Setiap pengguna harus memahami tugas dan tanggung jawabnya terkait keamanan informasi.
5. Sistem informasi baru atau sistem informasi yang ada pada sistem tersebut terkait dengan ketersediaan, kerahasiaan dan integritasnya.
6. Sistem informasi baru atau sistem informasi yang dikembangkan harus mencatat log transaksi dan aktivitas pengguna sehingga sistem bersifat *non-repudiation* (pengguna tidak dapat menyangkal aktivitas dan transaksi yang dilakukannya).
7. Informasi yang terdapat dalam layanan aplikasi yang melewati jaringan publik harus dilindungi dari aktivitas yang bersifat menipu, perselisihan kontrak dan pembukaan rahasia serta modifikasi secara tidak sah.

6.2 Keamanan dalam Pengembangan dan Dukungan

1. Keamanan informasi dirancang dan diterapkan dalam daur hidup pengembangan sistem informasi yang dilakukan secara internal maupun oleh rekanan.
2. Manajemen harus memastikan bahwa proses pengembangan yang dilakukan baik secara internal maupun oleh rekanan dikerjakan di lingkungan yang aman, yang berbeda dengan lingkungan test dan lingkungan produksi.
3. Manajemen harus memastikan bahwa proses pengembangan yang dilakukan baik secara internal maupun oleh rekanan menerapkan *secure coding guidelines* sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan.
4. Setiap *milestone* memiliki *security checkpoint*.
5. Pengembangan dilakukan menggunakan *repository* yang aman dengan akses dikendalikan sesuai dengan prosedur pengaturan hak akses.
6. Pengembangan dilakukan oleh developer internal atau rekanan yang memiliki pengetahuan dalam menghindari, menemukan dan memperbaiki kerentanan sistem.
7. Organisasi harus mengawasi dan memantau aktivitas pengembangan sistem yang dialihdayakan.
8. Program pengujian penerimaan dan kriteria terkait harus ditetapkan untuk sistem informasi baru dan peningkatan versi baru.
9. Proses pengembangan *(development)* hanya dilakukan oleh Super Admin.
10. Hal-hal berikut harus dipatuhi dalam melakukan perubahan:
    a. Menjaga catatan/rekaman tentang tingkat otorisasi yang disepakati.
    b. Mereviu kontrol dan prosedur sehingga perubahan tidak akan mengganggu kontrol dan prosedur.
    c. Mengidentifikasi perangkat lunak, informasi, *database* dan perangkat keras yang memerlukan perubahan.
    d. Mengidentifikasi *security critical code* untuk meminimalisasi kemungkinan diketahuinya kelemahan.
    e. Mendapat persetujuan formal sebelum pekerjaan dimulai dengan mencantumkan catatan/rekaman.
    f. Memastikan bahwa dokumentasi operasional dan prosedur pengguna tetap valid dan ter-*update*.

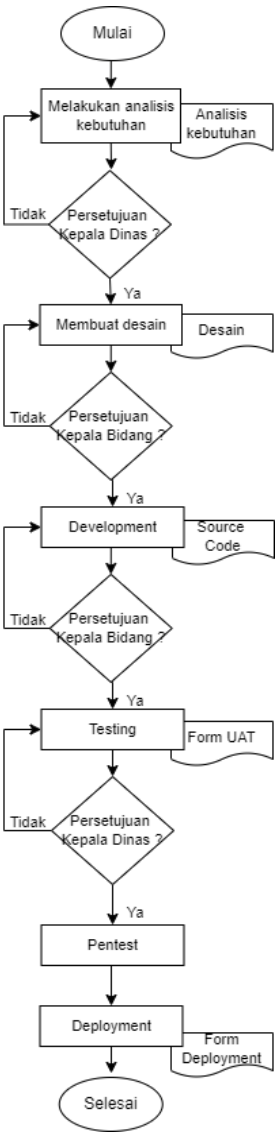
6.3 Perlindungan Penyembunyian Data (Data *Masking*)

a. Pelaksanaan data masking dapat dilakukan dengan beberapa teknik berikut:
    1. *Pseudonymization* : menyamarkan hanya mengacak sebagian nilai dan umumnya menyisakan beberapa digit yang terlihat;
    2. *Data Encryption* : mengharuskan pengguna yang berwenang memiliki kunci.
b. Pemantauan harus dilaksanakan berkala 3 bulan sekali dengan metode sampling, yang memastikan data tidak dapat diidentifikasi oleh viewer.

6.4 Data Uji

Data yang digunakan dalam pengujian ini adalah bukan data sebenarnya, melainkan data *dummy.*

7. Flowchart


Mulai
Melakukan analisis kebutuhan
Analisis kebutuhan
Tidak
Persetujuan Kepala Dinas ?
Ya
Membuat desain
Desain
Tidak
Persetujuan Kepala Bidang ?
Ya
Development
Source Code
Tidak
Persetujuan Kepala Bidang ?
Ya
Testing
Form UAT
Tidak
Persetujuan Kepala Dinas ?
Ya
Pentest
Deployment
Form Deployment
Selesai

LAMPIRAN VIII

Dokumen Pendukung Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2024

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik di Jawa Timur terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa penilaian berdasarkan sejauh mana badan publik di Jawa Timur dalam mengimplementasikan dan mematuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

c. bahwa monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan kepada Badan publik yang mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;

d. bahwa monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu: Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi;

e. bahwa Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 60% (enam puluh persen) dari nilai SAQ, 15% (lima belas persen) dari nilai verifikasi faktual/visitasi, dan 15% (lima belas persen) dari nilai wawancara/presentasi serta penilaian laporan tahunan badan publik yaitu 10% (sepuluh persen);

f. bahwa disepakati …

f. bahwa disepakati dan ditetapkan nilai monitoring dan evaluasi Tahun 2024 pada badan publik Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;

g. bahwa disepakati dan ditetapkan badan publik di Jawa Timur kategori Informatif, Menuju informatif, Cukup informatif, Kurang informatif dan Tidak informatif sebagaimana terlampir;

h. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a,b,c,d,e,f dan g perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09 /BA/ KI-Prov.Jatim/X/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan nilai monitoring dan evaluasi di Jawa Timur Tahun 2024 pada badan publik Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, serta KPU Kabupaten/Kota dan BAWSLU Kabupaten/Kota;sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA …

KEDUA : Menetapkan badan publik kategori Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, serta Pemerintah Desa (kategori mandiri) di Jawa Timur, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan BAWSLU Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk kategori Informatif, Menuju informatif, Cukup informatif, Kurang informatif dan Tidak informatif. Adapun badan publik dimaksud tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR
KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

LAMPIRAN:
SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / XI / 2024
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2024

NILAI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024

KATEGORI OPD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	RSUD DR SOETOMO	95	95	95	100	**95,50**	INFORMATIF
2	RSUD DR SAIFUL ANWAR	94.65	93.6	96.33	100	**95,28**	INFORMATIF
3	RSUD KARSA HUSADA	89.2	98.4	93.33	100	**92,28**	INFORMATIF
4	RSUD DR SOEDONO	83.5	97.5	95	100	**88,98**	MENUJU INFORMATIF
5	RS PARU MANGUHARJO	84.05	95.5	90	100	**88,26**	MENUJU INFORMATIF
6	RSUD DUNGUS	83.5	90.3	96.67	100	**88,15**	MENUJU INFORMATIF
7	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR	84.1	87.6	94.67	100	**87,80**	MENUJU INFORMATIF
8	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	83.25	92.2	92.67	100	**87,68**	MENUJU INFORMATIF
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	85	81.6	94.33	100	**87,39**	MENUJU INFORMATIF
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	84.5	79.3	94.67	100	**86,80**	MENUJU INFORMATIF
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR	84.5	88.4	85	100	**86,71**	MENUJU INFORMATIF
12	RUMAH SAKIT JIWA MENUR	84.8	50	91.67	100	**82,13**	MENUJU INFORMATIF
13	RSUD SUMBERGLAGAH	83	51.1	92.67	100	**81,37**	MENUJU INFORMATIF
14	DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR	83.2	74.7	65	100	**80,88**	MENUJU INFORMATIF
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR	80.2	27.6	93.33	100	**76.26**	CUKUP INFORMATIF
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR	78.7	0	0	100	**57.22**	KURANG INFORMATIF
17	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI	77.2	0	0	100	**56.32**	KURANG INFORMATIF
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR	75.35	0	0	100	**55.21**	KURANG INFORMATIF
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	73.4	0	0	100	**54.04**	KURANG INFORMATIF
20	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR	72.3	0	0	100	**53.38**	KURANG INFORMATIF
21	BAKORWIL BOJONEGORO	70.6	0	0	100	**52.36**	KURANG INFORMATIF
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR	68.4	0	0	100	**51.04**	KURANG INFORMATIF
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR	66.35	0	0	100	**49.81**	KURANG INFORMATIF

24	RS PARU JEMBER	65.95	0	0	100	**49.57**	KURANG INFORMATIF
25	BAKORWIL MADIUN	60.6	0	0	100	**46.36**	KURANG INFORMATIF
26	RSUD DAHA HUSADA	60.05	0	0	100	**46.03**	KURANG INFORMATIF
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	58.6	0	0	100	**45.16**	KURANG INFORMATIF
28	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR	58.3	0	0	100	**44.98**	KURANG INFORMATIF
29	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR	57.75	0	0	100	**44.65**	KURANG INFORMATIF
30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR	57.2	0	0	100	**44.32**	KURANG INFORMATIF
31	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR	55.25	0	0	100	**43.15**	KURANG INFORMATIF
32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR	53.65	0	0	100	**42.19**	KURANG INFORMATIF
33	RS MATA MASYARAKAT	51	0	0	100	**40.6**	KURANG INFORMATIF
34	DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR	50.75	0	0	100	**40.45**	KURANG INFORMATIF
35	RSUD HUSADA PRIMA	48.4	0	0	100	**39.04**	TIDAK INFORMATIF
36	BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	46	0	0	100	**37.6**	TIDAK INFORMATIF
37	BAKORWIL JEMBER	41.85	0	0	100	**35.11**	TIDAK INFORMATIF
38	BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	41.45	0	0	100	**34.87**	TIDAK INFORMATIF
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR	40.6	0	0	100	**34.36**	TIDAK INFORMATIF
40	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	39.4	0	0	100	**33.64**	TIDAK INFORMATIF
41	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	32.75	0	0	100	**29.65**	TIDAK INFORMATIF
42	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR	31	0	0	100	**28.6**	TIDAK INFORMATIF
43	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	28.4	0	0	100	**27.04**	TIDAK INFORMATIF
44	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	28.1	0	0	100	**26.86**	TIDAK INFORMATIF
45	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR	26.45	0	0	100	**25.87**	TIDAK INFORMATIF
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR	26.3	0	0	100	**25.78**	TIDAK INFORMATIF
47	BAKORWIL PAMEKASAN	25.9	0	0	100	**25.54**	TIDAK INFORMATIF
48	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	25	0	0	100	**25**	TIDAK INFORMATIF
49	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	24.6	0	0	100	**24.76**	TIDAK INFORMATIF

50	BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR	21.55	0	0	100	**22.93**	TIDAK INFORMATIF
51	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR	21.4	0	0	100	**22.84**	TIDAK INFORMATIF
52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	20.6	0	0	100	**22.36**	TIDAK INFORMATIF
53	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR	19.8	0	0	100	**21.88**	TIDAK INFORMATIF
54	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	16.7	0	0	100	**20.02**	TIDAK INFORMATIF
55	RSUD MOHAMMAD NOER	15.55	0	0	100	**19.33**	TIDAK INFORMATIF
56	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR	30.55	0	0	0	**18.33**	TIDAK INFORMATIF
57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	13.8	0	0	100	**18.28**	TIDAK INFORMATIF
58	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	10.85	0	0	100	**16.51**	TIDAK INFORMATIF
59	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	9.55	0	0	100	**15.73**	TIDAK INFORMATIF
60	BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	6.7	0	0	100	**14.02**	TIDAK INFORMATIF
61	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	6.6	0	0	100	**13.96**	TIDAK INFORMATIF
62	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	3.1	0	0	100	**11.86**	TIDAK INFORMATIF
63	BAKORWIL MALANG	0	0	0	100	**10**	TIDAK INFORMATIF
64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR	9.15	0	0	0	**5.49**	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO	98.6	98	98	100	**98,56**	INFORMATIF
2	PEMERINTAH KOTA BLITAR	99.2	98.9	90	100	**97, 86**	INFORMATIF
3	PEMERINTAH KOTA MADIUN	96.6	99.7	96.67	100	**97,42**	INFORMATIF
4	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	96.2	98.4	91.67	100	**96,23**	INFORMATIF
5	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	97.7	91.6	91	100	**96,01**	INFORMATIF
6	PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	95.35	97	94.33	100	**95,91**	INFORMATIF
7	PEMERINTAH KOTA PASURUAN	95.3	90.4	93.33	100	**94,74**	INFORMATIF
8	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	93.2	92.4	94.67	100	**93,98**	INFORMATIF
9	PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO	93.3	95.1	90	100	**93,75**	INFORMATIF
10	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI	93.1	92.5	93.33	100	**93,73**	INFORMATIF
11	PEMERINTAH KOTA SURABAYA	91.6	95.2	95	100	**93,49**	INFORMATIF
12	PEMERINTAH KOTA BATU	90.7	96.9	89.67	100	**92,40**	INFORMATIF
13	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR	93.5	82.1	91	100	**92,07**	INFORMATIF
14	PEMERINTAH KOTA MALANG	88.05	97	93.33	100	**91,38**	INFORMATIF
15	PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	90.1	83.35	90	100	**90,06**	INFORMATIF
16	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO	91.65	73.25	89.33	100	**89,38**	MENUJU INFORMATIF
17	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO	83.1	92.7	90	100	**87,27**	MENUJU INFORMATIF
18	PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK	80.7	94.8	96.33	100	**87,09**	MENUJU INFORMATIF
19	PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP	81.5	90	88.33	100	**85,65**	MENUJU INFORMATIF
20	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN	81.8	80.5	92	100	**84,96**	MENUJU INFORMATIF
21	PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO	78.7	0	0	100	**57.22**	KURANG INFORMATIF
22	PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	77.8	0	0	100	**56.68**	KURANG INFORMATIF
23	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN	75.6	0	0	100	**55.36**	KURANG INFORMATIF
24	PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI	73.6	0	0	100	**54.16**	KURANG INFORMATIF
25	PEMERINTAH KOTA KEDIRI	64.65	0	0	100	**48.79**	KURANG INFORMATIF
26	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK	64.6	0	0	100	**48.76**	KURANG INFORMATIF
27	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	63.4	0	0	100	**48.04**	KURANG INFORMATIF
28	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG	62	0	0	100	**47.2**	KURANG INFORMATIF
29	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN	59.9	0	0	100	**45.94**	KURANG INFORMATIF

30	PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN	53	0	0	100	**41.8**	KURANG INFORMATIF
31	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN	52.15	0	0	100	**41.29**	KURANG INFORMATIF
32	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	50.75	0	0	100	**40.45**	KURANG INFORMATIF
33	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	42.95	0	0	100	**35.77**	TIDAK INFORMATIF
34	PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO	31.15	0	0	100	**28.69**	TIDAK INFORMATIF
35	PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG	24.55	0	0	100	**24.73**	TIDAK INFORMATIF
36	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	18.4	0	0	100	**21.04**	TIDAK INFORMATIF
37	PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO	12.05	0	0	100	**17.23**	TIDAK INFORMATIF
38	PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG	7.7	0	0	100	**14.62**	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI INSTANSI/LEMBAGA VERTIKAL DI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR	98.5	98.5	96.33	100	**98,32**	INFORMATIF
2	BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR	81.45	98.6	94.67	100	**87,86**	MENUJU INFORMATIF
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM DI SURABAYA)	97.8	68.4	93.33	0	**82,94**	MENUJU INFORMATIF
4	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR	76.6	0	0	0	**45.96**	KURANG INFORMATIF
5	KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR	28.9	0	0	100	**27.34**	TIDAK INFORMATIF
6	KANTOR SAR KELAS A SURABAYA	40.7	0	0	0	**24.42**	TIDAK INFORMATIF
7	BMKG STASIUN KLIMATOLOGI JAWA TIMUR	22.6	0	0	100	**23.56**	TIDAK INFORMATIF
8	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	36.65	0	0	0	**21.99**	TIDAK INFORMATIF
9	KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR	7.4	0	0	100	**14.44**	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR

KETUA

EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI PEMERINTAH DESA (MANDIRI) DI JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1	PEMERINTAH DESA LERAN KEC. MANYAR KABUPATEN GRESIK	99.5	100	95	**98,70**	INFORMATIF
2	PEMERINTAH DESA SIDOREJO KEC. ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG	98.5	99	94.33	**97,77**	INFORMATIF
3	PEMERINTAH DESA TEMPELWETAN KEC. LOCERET KABUPATEN NGANJUK	98.25	98.25	91.67	**96,93**	INFORMATIF
4	PEMERINTAH DESA KERKEP KEC. GURAH KABUPATEN KEDIRI	92.25	96.25	94.33	**93,47**	INFORMATIF
5	PEMERINTAH DESA KERTAGENA TENGAH KEC. KADUR KABUPATEN PAMEKASAN	90.75	99.5	88.33	**92,02**	INFORMATIF
6	PEMERINTAH DESA REK KERREK KEC. PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN	84.4	99.25	91.33	**88,76**	MENUJU INFORMATIF
7	PEMERINTAHAN DESA KUNCIR KEC. NGETOS KABUPATEN NGANJUK	83.15	95.5	93	**87,59**	MENUJU INFORMATIF
8	PEMERINTAH DESA MERKAWANG KEC. TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN	84	92.25	91.67	**87,18**	MENUJU INFORMATIF
9	PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KEC. SILO KABUPATEN JEMBER	71.4	0	0	**42.84**	KURANG INFORMATIF
10	PEMERINTAHAN DESA BINANGUN KEC. SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN	66.8	0	0	**40.08**	KURANG INFORMATIF
11	PEMERINTAH DESA NGABAR KEC. JETIS KABUPATEN MOJOKERTO	65.55	0	0	**39.33**	TIDAK INFORMATIF
12	PEMERINTAH DESA KLATAKAN KEC. KENDIT KABUPATEN SITUBONDO	63.45	0	0	**38.07**	TIDAK INFORMATIF
13	PEMERINTAH DESA KEMIRIGEDE KEC. KESAMBEN KABUPATEN BLITAR	60.5	0	0	**36.3**	TIDAK INFORMATIF
14	PEMERINTAH DESA KUMITIR KEC. JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO	59	0	0	**35.4**	TIDAK INFORMATIF
15	PEMDES TUKUM KEC. TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG	44.3	0	0	**26.58**	TIDAK INFORMATIF
16	PEMERINTAH DESA PONTANG KEC. AMBULU KABUPATEN JEMBER	36.5	0	0	**21.9**	TIDAK INFORMATIF
17	PEMERINTAH DESA JAMBEARJO KEC. TAJINAN KABUPATEN MALANG	35.1	0	0	**21.06**	TIDAK INFORMATIF
18	PEMERINTAH DESA SUKOJATI KEC. BLIMBINGSARI BANYUWANGI	32.65	0	0	**19.59**	TIDAK INFORMATIF
19	PEMERINTAH DESA WONOREJO KEC. PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG	24.85	0	0	**14.91**	TIDAK INFORMATIF
20	PEMERINTAH DESA NGEMBOH KEC. UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK	21.7	0	0	**13.02**	TIDAK INFORMATIF
21	PEMERINTAH DESA GIRIPURNO KEC. BUMIAJI KOTA BATU	13.2	0	0	**7.92**	TIDAK INFORMATIF
22	PEMERINTAH DESA SUMBERSUKO KEC. GEMPOL KABUPATEN PASURUAN	10.6	0	0	**6.36**	TIDAK INFORMATIF
23	PEMERINTAH DESA TANAH MERAH LAOK KEC. TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN	1.5	0	0	**0.90**	TIDAK INFORMATIF
24	PEMERINTAH DESA KEJAPANAN KEC. GEMPOL KAB PASURUAN	1.25	0	0	**0.75**	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR

KETUA

EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) JAWA TIMUR

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	TOTAL	KETERANGAN
1	PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (SIER)	96.5	75	95	**91.9**	INFORMATIF
2	PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR	33.5	0	0	**20.1**	TIDAK INFORMATIF
3	PT JATIM GRHA UTAMA	25	0	0	**15**	TIDAK INFORMATIF
4	PT JAMKRIDA JATIM (PERSERODA)	20.5	0	0	**12.3**	TIDAK INFORMATIF
5	PT AIR BERSIH JATIM (PERSERODA)	13.5	0	0	**8.1**	TIDAK INFORMATIF
6	PT. KARET NGAGEL SURABAYA WIRA JATIM	3	0	0	**1.8**	TIDAK INFORMATIF
7	PT. GEDUNG EXPO WIRA JATIM	3	0	0	**1.8**	TIDAK INFORMATIF
8	PT CARMA WIRA JATIM	1.5	0	0	**0.9**	TIDAK INFORMATIF
9	PT MOYA KASRI WIRA JATIM	1.5	0	0	**0.9**	TIDAK INFORMATIF
10	PT LOKA REFRACTORIES WIRA JATIM	0	0	0	**0**	TIDAK INFORMATIF
11	PT ADI GRAHA WIRA JATIM	0	0	0	**0**	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR

KETUA

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	KPU KAB. JOMBANG	99	99	88.33	100	**97.50**	INFORMATIF
2	KPU KAB. TRENGGALEK	81.5	13.8	80	100	**72.97**	CUKUP INFORMATIF
3	KPU KOTA BLITAR	66.5	0	0	100	**49.9**	KURANG INFORMATIF
4	KPU KAB. JEMBER	61.3	0	0	100	**46.78**	KURANG INFORMATIF
5	KPU KOTA MOJOKERTO	55.7	0	0	100	**43.42**	KURANG INFORMATIF
6	KPU KAB. KEDIRI	54.7	0	0	100	**42.82**	KURANG INFORMATIF
7	KPU KAB. GRESIK	36.9	0	0	100	**32.14**	TIDAK INFORMATIF
8	KPU KOTA BATU	36.1	0	0	100	**31.66**	TIDAK INFORMATIF
9	KPU KOTA PASURUAN	32.7	0	0	100	**29.62**	TIDAK INFORMATIF
10	KPU KAB. BOJONEGORO	30	0	0	100	**28**	TIDAK INFORMATIF
11	KPU KAB. BONDOWOSO	28	0	0	100	**26.8**	TIDAK INFORMATIF
12	KPU KAB. TULUNGAGUNG	26.1	0	0	100	**25.66**	TIDAK INFORMATIF
13	KPU KAB. LUMAJANG	24.9	0	0	100	**24.94**	TIDAK INFORMATIF
14	KPU KAB. TUBAN	24.3	0	0	100	**24.58**	TIDAK INFORMATIF
15	KPU KAB. NGANJUK	22.5	0	0	100	**23.5**	TIDAK INFORMATIF
16	KPU KAB. LAMONGAN	21.4	0	0	100	**22.84**	TIDAK INFORMATIF
17	KPU KOTA KEDIRI	18.6	0	0	100	**21.16**	TIDAK INFORMATIF
18	KPU PROVINSI JAWA TIMUR	18.3	0	0	100	**20.98**	TIDAK INFORMATIF
19	KPU KAB. MOJOKERTO	11.95	0	0	100	**17.17**	TIDAK INFORMATIF
20	KPU KAB. MALANG	6.9	0	0	100	**14.14**	TIDAK INFORMATIF
21	KPU KAB. PAMEKASAN	6.5	0	0	100	**13.9**	TIDAK INFORMATIF
22	KPU KAB. SAMPANG	0.8	0	0	100	**10.48**	TIDAK INFORMATIF
23	KPU KAB. BANYUWANGI	0	0	0	100	**10**	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR
KETUA

EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

KATEGORI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ	NILAI VISITASI	NILAI WAWANCARA	NILAI LAPORAN TAHUNAN (10%)	TOTAL	KETERANGAN
1	BAWASLU KABUPATEN TUBAN	81.8	80.7	88.33	100	**84.43**	MENUJU INFORMATIF
2	BAWASLU KABUPATEN JEMBER	80.6	52.2	80	100	**78.19**	CUKUP INFORMATIF
3	BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO	78.65	0	0	100	**57.19**	KURANG INFORMATIF
4	BAWASLU KABUPATEN SITUBONDO	76.05	0	0	100	**55.63**	KURANG INFORMATIF
5	BAWASLU KOTA MADIUN	75.9	0	0	100	**55.54**	KURANG INFORMATIF
6	BAWASLU KABUPATEN SAMPANG	71.4	0	0	100	**52.84**	KURANG INFORMATIF
7	BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI	71.2	0	0	100	**52.72**	KURANG INFORMATIF
8	BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN	70.15	0	0	100	**52.09**	KURANG INFORMATIF
9	BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	69.6	0	0	100	**51.76**	KURANG INFORMATIF
10	BAWASLU KABUPATEN MOJOKERTO	69.55	0	0	100	**51.73**	KURANG INFORMATIF
11	BAWASLU KABUPATEN MALANG	69.1	0	0	100	**51.46**	KURANG INFORMATIF
12	BAWASLU KABUPATEN GRESIK	67.6	0	0	100	**50.56**	KURANG INFORMATIF
13	BAWASLU KOTA BATU	62.3	0	0	100	**47.38**	KURANG INFORMATIF
14	BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN	61.9	0	0	100	**47.14**	KURANG INFORMATIF
15	BAWASLU KABUPATEN JOMBANG	59.55	0	0	100	**45.73**	KURANG INFORMATIF
16	BAWASLU KABUPATEN KEDIRI	58.4	0	0	100	**45.04**	KURANG INFORMATIF
17	BAWASLU KABUPATEN PONOROGO	57.55	0	0	100	**44.53**	KURANG INFORMATIF
18	BAWASLU KOTA PASURUAN	55.3	0	0	100	**43.18**	KURANG INFORMATIF
19	BAWASLU KOTA SURABAYA	55	0	0	100	**43**	KURANG INFORMATIF
20	BAWASLU KABUPATEN MADIUN	53.75	0	0	100	**42.25**	KURANG INFORMATIF
21	BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG	52.7	0	0	100	**41.62**	KURANG INFORMATIF
22	BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO	52	0	0	100	**41.2**	KURANG INFORMATIF

23	BAWASLU KABUPATEN PASURUAN	51.9	0	0	100	**41.14**	KURANG INFORMATIF
24	BAWASLU KOTA KEDIRI	51.7	0	0	100	**41.02**	KURANG INFORMATIF
25	BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN	51.4	0	0	100	**40.84**	KURANG INFORMATIF
26	BAWASLU KABUPATEN MAGETAN	50.8	0	0	100	**40.48**	KURANG INFORMATIF
27	BAWASLU KOTA MALANG	49.95	0	0	100	**39.97**	TIDAK INFORMATIF
28	BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO	47.6	0	0	100	**38.56**	TIDAK INFORMATIF
29	BAWASLU KABUPATEN BLITAR	43.7	0	0	100	**36.22**	TIDAK INFORMATIF
30	BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG	41.6	0	0	100	**34.96**	TIDAK INFORMATIF
31	BAWASLU KABUPATEN SUMENEP	38.1	0	0	100	**32.86**	TIDAK INFORMATIF
32	BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK	37.8	0	0	100	**32.68**	TIDAK INFORMATIF
33	BAWASLU KABUPATEN NGAWI	36.8	0	0	100	**32.08**	TIDAK INFORMATIF
34	BAWASLU KOTA BLITAR	36.7	0	0	100	**32.02**	TIDAK INFORMATIF
35	BAWASLU KABUPATEN PACITAN	34.5	0	0	100	**30.7**	TIDAK INFORMATIF
36	BAWASLU KABUPATEN NGANJUK	28.95	0	0	100	**27.37**	TIDAK INFORMATIF
37	BAWASLU KOTA MOJOKERTO	22.55	0	0	100	**23.53**	TIDAK INFORMATIF
38	BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO	16.7	0	0	100	**20.02**	TIDAK INFORMATIF
39	BAWASLU KOTA PROBOLINGGO	15.6	0	0	100	**19.36**	TIDAK INFORMATIF

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR

KETUA



EDI PURWANTO, S.Psi., M.Si

Laporan

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2024

magna nec quis, lorem
nunc.

2024

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk

LAPORAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024

A. PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Pengelolaan Layanan Pengaduan SP4N-LAPOR!

a) Rekapitulasi Kinerja

Belum Ter-verifikasi	Belum Ditindak lanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (tanpa Arsip dan Tunda)	% TL	RTL
0	0	12	258	0	18	270	100	1,9

Keterangan :
% TL : Prosentase Tindak Lanjut
RTL : Rata-rata Tindaklanjut (dalam satuan Hari)

b) Jumlah pelapor berdasarkan Klasifikasi Laporan

Klasifikasi Laporan					Jumlah
Aspirasi	Permintaan Informasi	Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan	Pengaduan Berkadar Pengawasan	Lainnya	
11	12	171	23	53	270

c) Jumlah Pelapor berdasarkan Rentang Usia

Usia						Jumlah Pelapor
< 20 Tahun	20 – 34 Tahun	35 – 49 Tahun	50 – 64 Tahun	> 64 Tahun	Belum mengisi usia	
24	76	46	88	0	54	288

d) Jumlah Pelapor berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin			Jumlah
Laki-laki	Perempuan	Tidak mengisi Jenis Kelamin	
194	45	49	288

e) Jumlah Pelapor berdasarkan Sumber Laporan

Sumber Laporan					
Android	Surat	Tatap muka	website	Whatsapp	Telp
119	3	6	171	26	5

f) Rekapitulasi Kinerja Perangkat Daerah Terlapor Tahun 2024

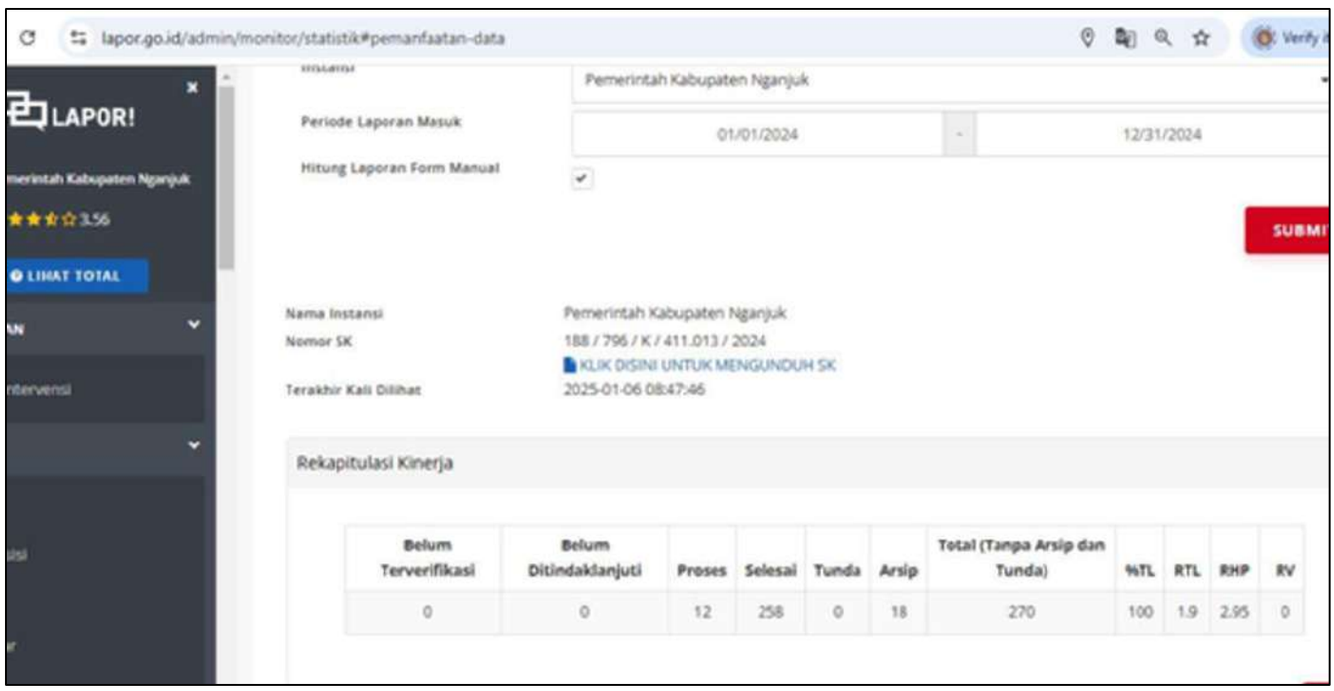
No.	Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Total	%TL	RTL	RHP
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	6	43	49	100	1	2
2	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	39	39	100	1	0
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	2	16	18	100	2	5
4	RSUD Nganjuk	-	-	1	16	17	100	1	5
5	Dinas Pendidikan	-	-	-	16	16	100	1	1
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	15	15	100	1	5
7	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	2	9	11	100	5	1
8	Inspektorat Daerah	-	-	1	9	10	100	4	3

No.	Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Total	%TL	RTL	RHP
9	Sekretariat Daerah	-	-	1	9	10	100	5	0
10	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	9	100	2	1
11	Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil	-	-	4	4	8	100	2	1
12	RSUD Kertosono	-	-	-	8	8	100	2	5
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	6	6	100	2	5
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	6	6	100	1	0
15	pdam nganjuk	-	-	-	6	6	100	1	2
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	2	2	4	100	2	0
17	Badan Pendapatan Daerah	-	-	1	2	3	100	5	0
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	3	3	100	1	0
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	3	3	100	4	5
20	Dinas Kesehatan	-	-	-	3	3	100	2	5
21	Kecamatan Ngronggot	-	-	-	3	3	100	2	0
22	Kecamatan Rejoso	-	-	-	3	3	100	12	5
23	Sekretariat DPRD	-	-	-	3	3	100	2	0
24	Dinas Pertanian	-	-	-	2	2	100	1	0
25	Kecamatan Kertosono	-	-	1	1	2	100	5	0
26	Kecamatan Lengkong	-	-	-	2	2	100	4	0
27	Asisten Pemerintahan dan Kesra	-	-	-	1	1	100		0
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	1	1	100	2	0
29	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	1	1	100	1	0
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	-	1	1	100		0
31	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	1	1	100	14	0
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	1	1	100	6	0
33	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	1	1	100	1	0
34	Kecamatan Bagor	-	-	-	1	1	100	1	0
35	Kecamatan Ngluyu	-	-	-	1	1	100	1	0
36	Kecamatan Sukomoro	-	-	-	1	1	100	1	5

2. Pengelolaan Layanan Pengaduan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dari layanan WADUL BUPATI dan COMMAND CENTER Tahun 2024

No	OPD Terlapor	Jumlah Laporan berdasarkan Media Laporan			Status Laporan			Keterangan
		Telp	Web	Datang Langsung	Selesai	Proses	Belum	
1	Dinas Kesehatan	1	10	-	6	3	2	
2	Dinas Perhubungan	18	18	-	15	6	15	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	20	-	6	10	21	
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	9	-	1	5	3	
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14	-	-	7	-	7	

No	OPD Terlapor	Jumlah Laporan berdasarkan Media Laporan			Status Laporan			Keterangan
		Telp	Web	Datang Langsung	Selesai	Proses	Belum	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3	7	-	4	4	2	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	-	1	-	2	
8	Dinas LH	11	4	-	10	2	3	
9	Dispendukcapil	1	2	-	3	-	-	
10	Diskominfo	1	-	-	1	-	-	
11	PLN	15	-	-	15	-	-	
12	PDAM	1	2	-	3	-	-	



Gambar Statistik Pengelolaan SP4N-LAPOR Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Jangka Waktu Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, tindak lanjut dilakukan dengan cermat, cepat, dan tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sejak pengaduan diterima oleh pejabat penghubung, yakni;

1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat–lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat–lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

Dari hasil statistik pengelolaan layanan pengaduan SP4N-LAPOR Pemerintah Kabupaten Nganjuk di atas, terlihat RTL (rata-rata tindaklanjut) pengaduan yakni 1,9 hari (dibawah batas waktu maksimal ketentuan dari Kemenpan RB). Hal ini menunjukkan bahwa pengaduan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

3. Capaian Kinerja Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Skor Tribulan			
		I	II	III	IV
1	Sekretariat Daerah	8	10	10	8
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	10	10	10	10
3	Inspektorat Daerah	10	10	10	10
4	Dinas Pendidikan	10	10	10	10
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	10	10	10	10
6	Dinas Kesehatan	10	10	10	10
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	10	10	10
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	10	10	10
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	10	10	10
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	2	10	10
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	10	10	10
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	10	10	10
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	10	10	10	10
14	Dinas Tenaga Kerja	10	10	10	10
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	10	10	10
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10	10	10
17	Dinas Perhubungan	10	10	10	10
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10	10	10	10
19	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	10
20	Dinas Pertanian	10	8	10	10
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10	10	10	10
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10	10	10	10
23	Satuan Polisi Pamong Praja	10	10	10	10
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10	5	10	10
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	10	10	10
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10	10	10	10
27	Badan Pendapatan Daerah	10	10	10	10
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	10	10	10
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	10	10	10
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	10
31	Kecamatan Bagor	10	10	10	10
32	Kecamatan Baron	10	10	10	10
33	Kecamatan Berbek	10	10	10	10

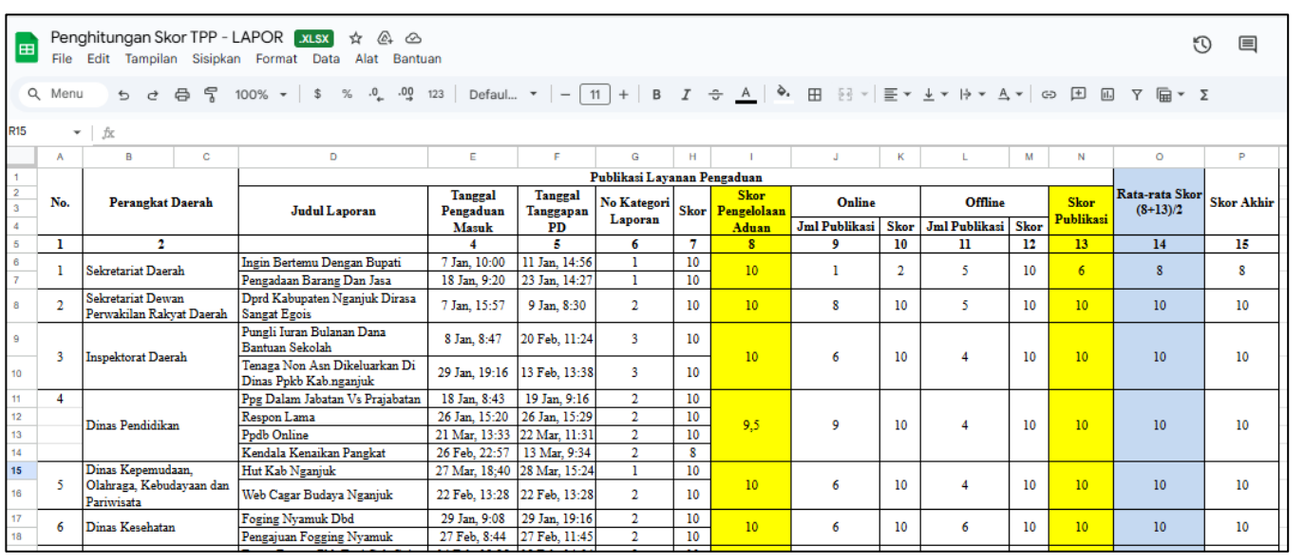
No	Perangkat Daerah	Skor Tribulan			
		I	II	III	IV
34	Kecamatan Gondang	10	10	10	10
35	Kecamatan Jatikalen	10	8	10	10
36	Kecamatan Kertosono	10	10	10	10
37	Kecamatan Lengkong	10	10	10	10
38	Kecamatan Loceret	10	10	10	10
39	Kecamatan Nganjuk	10	10	10	10
40	Kecamatan Ngetos	10	10	10	10
41	Kecamatan Ngluyu	10	10	10	10
42	Kecamatan Ngronggot	10	10	10	10
43	Kecamatan Pace	10	10	10	10
44	Kecamatan Patianrowo	10	10	10	10
45	Kecamatan Prambon	10	10	10	10
46	Kecamatan Rejoso	8	10	5	8
47	Kecamatan Sawahan	10	10	10	10
48	Kecamatan Sukomoro	10	10	10	10
49	Kecamatan Tanjunganom	10	10	10	10
50	Kecamatan Wilangan	10	10	10	10
51	Rumah Sakit Daerah Nganjuk	8	5	10	8
52	Rumah Sakit Daerah Kertosono	8	5	10	8

Keterangan :

Capaian	Skor
Sangat Baik	10
Baik	8
Cukup	5
Kurang	2
Sangat Kurang	0

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pasal 11 ayat (4) hal Skoring Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Pengelolaan Pengaduan Masyarakat)

Penilaian kinerja pengelolaan layanan pengaduan SP4N-LAPOR! diukur berdasarkan kinerja pengelolaan pengaduan dari Perangkat Daerah (rata-rata waktu tindaklanjut) ditambah dengan kuantitas publikasi (online dan offline) keberadaan layanan pengaduan SP4N-LAPOR!, sebagaimana gambar di bawah ini :



Penghitungan Skor TPP - LAPOR .XLSX

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan

No.	Perangkat Daerah	Publikasi Layanan Pengaduan													
		Judul Laporan	Tanggal Pengaduan Masuk	Tanggal Tanggapan PD	No Kategori Laporan	Skor	Skor Pengelolaan Aduan	Online		Offline		Skor Publikasi	Rata-rata Skor (8+13)/2	Skor Akhir
								Jml Publikasi	Skor	Jml Publikasi	Skor			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sekretariat Daerah	Ingin Bertemu Dengan Bupati	7 Jan, 10:00	11 Jan, 14:56	1	10	10	1	2	5	10	6	8	8
		Pengadaan Barang Dan Jasa	18 Jan, 9:20	23 Jan, 14:27	1	10								
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dprd Kabupaten Nganjuk Dirasa Sangat Egois	7 Jan, 15:57	9 Jan, 8:30	2	10	10	8	10	5	10	10	10	10
3	Inspektorat Daerah	Pungli Iuran Bulanan Dana Bantuan Sekolah	8 Jan, 8:47	20 Feb, 11:24	3	10	10	6	10	4	10	10	10	10
		Tenaga Non Asn Dikeluarkan Di Dinas Ppkb Kab.nganjuk	29 Jan, 19:16	13 Feb, 13:38	3	10								
4	Dinas Pendidikan	Ppg Dalam Jabatan Vs Prajabatan	18 Jan, 8:43	19 Jan, 9:16	2	10	9,5	9	10	4	10	10	10	10
		Respon Lama	26 Jan, 15:20	26 Jan, 15:29	2	10								
		Ppdb Online	21 Mar, 13:33	22 Mar, 11:31	2	10								
		Kendala Kenaikan Pangkat	26 Feb, 22:57	13 Mar, 9:34	2	8								
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Hut Kab Nganjuk	27 Mar, 18:40	28 Mar, 15:24	1	10	10	6	10	4	10	10	10	10
		Web Cagar Budaya Nganjuk	22 Feb, 13:28	22 Feb, 13:28	2	10								
6	Dinas Kesehatan	Foging Nyamuk Dbd	29 Jan, 9:08	29 Jan, 19:16	2	10	10	6	10	6	10	10	10	10
		Pengajuan Fogging Nyamuk	27 Feb, 8:44	27 Feb, 11:45	2	10								

B. PENGELOLAAN PPID

1) Data Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik pada Tahun 2024

a. Permohonan Informasi secara online melalui website PPID Kabupaten Nganjuk

No.	Badan Publik Termohon	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah			Alasan Penolakan
			Selesai	Diproses	Belum ditindak-lanjuti	
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	3	-	-	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	-	-	
3	Badan Pendapatan Daerah	2	-	1	-	nama pemohon tidak sesuai ktp yang terlampir, pertanyaan yang ditanyakan tempat kerja atau setatus kerja ditujukan untuk siapa tidak jelas
4	Dinas PPKB	1	1	-	-	
5	Sekretariat Daerah	1	1	-	-	
6	Dinas Kesehatan	3	3	-	-	
7	Kecamatan Nganjuk	1	-	1	-	
8	Kecamatan Tanjunganom	2	-	2	-	
9	Dinas Lingkungan Hidup	2	1	1	-	
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	2	-	-	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	-	1	-	
12	Dispendukcapil	1	1	-	-	
13	Dinas Tenaga Kerja	2	2	-	-	
14	Dinkop UM	2	2	-	-	
15	Dinas Pendidikan	2	2	-	-	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	-	-	
17	BKPSDM	1	1	-	-	

b. Permohonan Informasi secara offline melalui PPID Kabupaten Nganjuk

No.	Badan Publik Termohon	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah			Alasan Penolakan
			Selesai	Diproses	Belum ditindak-lanjuti	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	-	-	

c. Permohonan Keberatan melalui PPID Kabupaten Nganjuk

No.	Badan Publik Termohon	Jumlah Permohonan Keberatan	Jumlah		
			Selesai	Diproses	Belum ditindak-lanjuti
1	-	-	-	-	-

d. Sengketa Informasi

No.	Badan Publik Termohon	Jumlah Sengketa Informasi	Status	
			Selesai	Diproses
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	-

2) Rekapitulasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Permohonan Informasi		Permohonan Keberatan	Sengketa Informasi
Online	Offline		
28	1	-	1

3) Capaian kategori Keterbukaan Informasi Publik

Capaian kategori Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik (Perangkat Daerah) pada Tahun 2024 :

No	Perangkat Daerah	SAQ		Skor
		Nilai	Kategori	
1	Sekretariat Daerah	96	Informatif	10
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	98	Informatif	10
3	Inspektorat Daerah	95	Informatif	10
4	Dinas Pendidikan	93	Informatif	10
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	93	Informatif	10
6	Dinas Kesehatan	91	Informatif	10
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	91	Informatif	10
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93	Informatif	10
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94	Informatif	10
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	91	Informatif	10
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92	Informatif	10
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	93	Informatif	10
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	94	Informatif	10
14	Dinas Tenaga Kerja	92	Informatif	10
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	95	Informatif	10
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96	Informatif	10
17	Dinas Perhubungan	93	Informatif	10
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	92	Informatif	10
19	Dinas Lingkungan Hidup	92	Informatif	10
20	Dinas Pertanian	81	Menuju Informatif	8
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	97	Informatif	10
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	96	Informatif	10
23	Satuan Polisi Pamong Praja	92	Informatif	10
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	66	Cukup Informatif	5
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90	Informatif	10
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90	Informatif	10
27	Badan Pendapatan Daerah	95	Informatif	10
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95	Informatif	10
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95	Informatif	10
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90	Informatif	10
31	Kecamatan Bagor	91	Informatif	10
32	Kecamatan Baron	91	Informatif	10
33	Kecamatan Berbek	96	Informatif	10
34	Kecamatan Gondang	94	Informatif	10
35	Kecamatan Jatikalen	83	Menuju Informatif	8

No	Perangkat Daerah	SAQ		Skor
		Nilai	Kategori	
36	Kecamatan Kertosono	92	Informatif	10
37	Kecamatan Lengkong	93	Informatif	10
38	Kecamatan Loceret	90	Informatif	10
39	Kecamatan Nganjuk	92	Informatif	10
40	Kecamatan Ngetos	91	Informatif	10
41	Kecamatan Ngluyu	96	Informatif	10
42	Kecamatan Ngronggot	90	Informatif	10
43	Kecamatan Pace	87	Menuju Informatif	8
44	Kecamatan Patianrowo	92	Informatif	10
45	Kecamatan Prambon	93	Informatif	10
46	Kecamatan Rejoso	90	Informatif	10
47	Kecamatan Sawahan	97	Informatif	10
48	Kecamatan Sukomoro	92	Informatif	10
49	Kecamatan Tanjunganom	91	Informatif	10
50	Kecamatan Wilangan	91	Informatif	10
51	Rumah Sakit Daerah Nganjuk	56	Kurang Informatif	2
52	Rumah Sakit Daerah Kertosono	51	Kurang Informatif	2

Keterangan :

Capaian	Skor
Informatif	10
Menuju Informatif	8
Cukup Informatif	5
Kurang Informatif	2
Tidak Informatif	0

Kategori	Jumlah
Informatif	46
Menuju Informatif	3
Cukup Informatif	1
Kurang Informatif	2
Tidak Informatif	0

Kategori tingkat Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik (Perangkat Daerah) ditentukan berdasarkan penghitungan nilai SAQ (Self Assessment Questionnaire) Online PPID Perangkat Daerah, dengan range penilaian sebagai berikut :

Range Nilai SAQ	Kategori	Skor TPP
90 – 100	Informatif	10
80 - 89,9	Menuju Informatif	8
60 - 79,9	Cukup Informatif	5
40 - 59,9	Kurang Informatif	2
0 - 39,9	Tidak Informatif	0

Kategori dan Skor TPP tersebut di atas berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pasal 11 ayat (4) hal Skoring Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi).

Nganjuk, 7 Januari 2024

Mengetahui, Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Pelapor Pranata Humas Ahli Muda
HARI PURWANTO, ST. Pembina NIP. 19681211 199901 1 001	**ARIF WAHYUDI WICAKSANA, S.Kom** NIP. 19830620 201504 1 001

DAFTAR KIM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	KIM	NOMOR SK	PERIODE	TANGGAL SK
1	Kecamatan Bagor	Bagorkulon	Warta Smar	188/16/K/411.502.07/2022	2022-2026	21 September 2022
2		Gandu	Warta Utama	188/14/411.501.12/2022	2022-2026	22 September 2022
3		Pesudukuh	Pesudukuh Lestari	188/33/K/411.501.03/2022	2022-2026	21 September 2022
4		Petak	Petak Damai Berseri	140/241/411.501.08/2022	2022-2026	10 September 2022
5		Sekarputih	Sekarputih	188/18/K/411.501.04.2020	2020-2025	6 Januari 2020
6	Kecamatan Berbek	Balongrejo	Balongrejo Bebek Bersatu	188/21/K/411.503.018/2022	2022-2026	14 September 2022
7		Bendungrejo	Bendungrejo Joyo	188/27/K/411.503.2007/2022	2022-2026	14 September 2022
8		Berbek	Berbek Smart	188/16/K/411.503.05/2022	2022-2026	12 Oktober 2022
9		Bulu	Bulu Kinasih	188/30/K/411.503.2015/2022	2022-2026	12 September 2022
10		Cempoko	Cempaka Rahayu	188/35/K/411.503.2002/2022	2022-2026	12 September 2022
11		Kacangan	Kacangan Jaya	188/28/K/411.503.11/2022	2022-2026	13 September 2022
12		Maguwan	Reterewe.Net	188/28/K/411.503.2003/2022	2022-2026	13 September 2022
13		Mlilir	Mlilir Informasi	188/19/K/411.503.006/2022	2022-2026	13 September 2022
14		Ngrawan	Purpindes Ngrawan	188/17/K/411.503.009/2022	2022-2026	15 September 2022
15		Patranrejo	Potro Swara Tani	188/12/K/411.503.2013/2020	2022-2026	13 September 2022
16		Salamrojo	Salamrojo Bersatu	22 Tahun 2022	2022-2026	12 September 2022
17		Semare	Semare Trebuka	188/22/411.503.2004/2022	2022-2026	14 September 2022
18		Sendangbumen	Sendang Jaya	188/21/K/411.503.010/2022	2022-2026	12 September 2022
19		Sengkut	Sengkut Makmur	188/K/30/411.503.2008/2022	2022-2026	13 September 2022
20		Senopatik	Soppaja Squad	188/34/411.503.19/2022	2022-2026	15 September 2022
21		Sumberurip	Tani Makmur	188/34/K/411.503.2014/2022	2022-2026	13 September 2022
22		Sumberwindu	Sumber Tani	188/35/K/411.503.010/2022	2022-2026	12 September 2022
23		Tiripan	Tiripan Unggul	22 Tahun 2022	2022-2026	12 September 2022
24	Kecamatan Jatikalen	Begandeng	Begandeng Bangkit	471/12/411.505.2005/2022	2022-2026	14 September 2022
25		Dawuhan	Indah Jaya	188/19/411.505.07/2022	2022-2026	14 September 2022
26		Dlururejo	Sendiko Dawuh	9 Tahun 2022	2022-2026	14 September 2022
27		Gondangwetan	Langgeng Makmur	25/411.505.2003/2022	2022-2026	14 September 2022
28		Jatikalen	Parama	17 Tahun 2022	2022-2026	14 September 2022
29		Munung	Munung Jaya	33 Tahun 2022	2022-2026	14 September 2022
30		Ngasem	Mekar Jaya	188/9/K/411.505.2002/2022	2022-2026	14 September 2022
31		Perning	Permai	2/411.520.2001/IX/2026	2022-2026	14 September 2022
32		Pule	Info Pule	10 Tahun 2022	2022-2026	20 September 2022
33		Pulowetan	Bhakti Mulya	18 Tahun 2022	2022-2026	14 September 2022
34	Kecamatan Kertosono	Kepuh	Kepuh Bersinergi	188/19/K/411.506.07/2022	2022-2026	15 September 2022
35		Banaran	Banaran	470/62/411.506.11/2022	2022-2026	19 September 2022
36	Kecamatan Lengkong	Lengkong	Koin Mas	188/34/K/411.507.2002/2022	2022-2026	14 September 2022
37	Kecamatan Loceret	Bajulan	Roro Kuning	188/25/K/411.508.022/2022	2022-2026	14 September 2022
38		Candirejo	Jendela Informasi	188/8A/K411.508.15/2022	2022-2026	11 Januari 2022
39		Gejagan	Solid	188/21/K/411.508.09/2022	2022-2026	7 Januari 2022
40		Genjeng	Genjeng Sejahtera	188/17/411.508.016/2022	2022-2026	3 Oktober 2022
41		Loceret	Trengginas	188/25/K/411.508.09/2029	2020-2025	27 Desember 2019
42		Sombron	Kompak	188/21/K/411.508.02/2022	2022-2026	4 Oktober 2022
43		Sukorejo	Caesar	188/17/K/411.508.016/2022	2022-2026	15 September 2022
44		Tempelwetan	Sekarjaya	188/22/K/411.508.11/2022	2022-2026	10 Januari 2022
45		Patihan	Patih	29 tahun 2024	2024-2027	04 November 2024
46	Kecamatan Nganjuk	Kedungdowo	Kedungdowo Maju Bersam	188/41/K/411.509.14/2022	2022-2026	13 September 2022
47		Begadung	Sekar Wangi	188/11/411.509/2022	2022-2026	16 September 2022
48		Bogo	Bogo Bersinar	188/06/411.509/2022	2022-2026	16 September 2022
49		Cangkringan	Cangkringan Ceria	188/04/K/411.509/2022	2022-2026	14 September 2022
50		Ganungkidul	Ganungkidul Berseri	188/01/K/411.509/2022	2022-2026	14 September 2022
51		Jatirejo	Peduli Informasi	188/08/411.509/2022	2022-2026	16 September 2022
52		Kartoharjo	Karto Dinamis	188/07/411.509/2022	2022-2026	16 September 2022
53		Kauman	Kauman Bisa	188/10/411.509/2022	2022-2026	16 September 2022
54		Kramat	Hoa	188/12/411.509/2022	2022-2026	28 September 2022
55		Mangundikaran	Mandiri	188/03/K/411.509/2022	2022-2026	14 September 2022
56		Payaman	Payaman Bersinar	188/05/411.509/2022	2022-2026	16 September 2022
57		Ploso	Ploso Gemilang	188/09/411.509/2022	2022-2026	19 September 2022
58		Ringinanom	Tunas Beringin	188/02/411.509/2022	2022-2026	14 September 2022
59		Werungotok	Siap Sedia	188/01/411.509/2023	2023-2027	11 Desember 2023
60	Kecamatan Ngetos	Blongko	Nyoto	188/K/81/411.510.08/2022	2022-2026	13 September 2022
61	Kecamatan Ngluyu	Bajang	Karya Muda	33 Tahun 2022	2022-2026	14 September 2022
62		Gampeng	Dirgantara	45 Tahun 2022	2022-2026	28 September 2022
63		Lengkonglor	Tirto Njalu	188/15/411.511.04/2022	2022-2026	14 September 2022
64		Sugihwaras	Argo Mulyo	25 Tahun 2022	2022-2026	14 September 2022
65	Kecamatan Ngronggot	Banjarsari	Banjar Terang	188/5/411.512.109/2022	2022-2026	28 September 2022
66		Betet	Betet Bersinar	188/09/411.512.107/2022	2022-2026	7 Februari 2022
67		Cengkok	Asri	188/17/411.512.101/2022	2022-2026	28 September 2022
68		Dadapan	Mekar Dadapan	188/16/K/411.512.110/2022	2022-2026	29 September 2022
69		Juwet	Mekar Asih	188/17/K/411.512/103/2022	2022-2026	26 September 2022
70		Kalianyar	Kawarta	188/25/SK/411.512.112/2022	2022-2026	27 September 2022
71		Kaloran	Kaloran Inka	188/24/K/411.512.108/2022	2022-2026	26 September 2022
72		Kelutan	Kelutan Maju	188/18/SK/411.512.104/2022	2022-2026	28 September 2022
73		Klurahan	Berjaya	188/10/K/411.512.113/2022	2022-2026	29 September 2022
74		Mojokendil	Mojokendil Makmur	188/12/SK/411.512.109/2022	2022-2026	29 September 2022
75		Ngronggot	Ngronggot Tunas Harapan	188/27/K/411.512.105/2022	2022-2026	27 September 2022
76		Tanjungkalang	Tanjung Harapan	7 Tahun 2022	2022-2026	27 September 2022
77		Trayang	Trayang	188/25/SK/411.512.111/2022	2022-2026	29 September 2022
78	Kecamatan Pace	Banaran	Banaran Jaya	188/9/K/411.513.117/2022	2022-2026	12 September 2022
79		Jampes	Jampes Jaya	188/22/K/411.513.101/2022	2022-2026	28 September 2022

NO.	KECAMATAN	DESA	KIM	NOMOR SK	PERIODE	TANGGAL SK
80		Joho	Joho Guyub Rukun	188/15/K/411.513.105/2022	2022-2026	3 Oktober 2022
81		Plosoharjo	Plosoharjo Bersatu	188/11/K/411.513.117/2022	2022-2026	12 September 2022
82		Cerme	Cerme Ceria	188/15/K/411.513.108/2022	2022-2026	28 September 2022
83	Kecamatan Patianrowo	Lestari	UMKM Guyub Rukun	188/11/K/411.514.05/2022	2022-2026	22 September 2022
84		Pakuncen	Pakunce Mukti	188/28/K/411.514.08/2022	2022-2026	21 September 2022
85		Patianrowo	Rowo Makmur	188/14/K/411.514.07/2022	2022-2026	20 September 2022
86		Pisang	Pisang Terang	188/21/K/411.514.04/2022	2022-2026	21 September 2022
87	Kecamatan Prambon	Gondang Legi	Maju Jaya	188/411.515.01/2022	2022-2026	5 Oktober 2022
88		Sugihwaras	Sugihwaras	188/25/K/411.515.11/2022	2022-2026	19 September 2022
89	Kecamatan Rejoso	Sidokare	Smart	188/16/K/411.516.2005/2019	2020 – 2025	27 Desember 2019
90	Kecamatan Sawahan	Bareng	Ganesha	141/7/411.517.04/2022	2022-2026	15 September 2022
91		Bendolo	Laskar Wilis	188/23/K/411.517.01/2022	2022-2026	14 September 2022
92		Duren	Teleskop	188/17/K/411.517.06/2022	2022-2026	15 September 2022
93		Kebonagung	Mugo Pinter	188/18/K/411.517.90/2022	2022-2026	14 September 2022
94		Margopatut	Lestari	188/31/K/411.517.08/2022	2022-2026	15 September 2022
95		Ngliman	Mugo Mudeng	188/06/K/411.517.03/2022	2022-2026	13 September 2022
96		Sawahan	Wong Sawahan	188/28/K/411.517.02/2022	2022-2026	14 September 2022
97		Sidorejo	Siderejo Makmur	188/24/K/411.517.05/2022	2022-2026	13 September 2022
98		Siwalan	Infes	188/37/K/411.517.07/2022	2022-2026	15 September 2022
99	Kecamatan Sukomoro	Ngrengket	Ngrengket Jaya	378/411.518.12/IX/2022	2022-2026	4 Oktober 2022
100	Kecamatan Tanjunganom	Demangan	Kejora Kreatif	188/25/K/411.519.16/2022	2022-2026	27 September 2022
101		Jogomerto	Jogomerto Sejahtera	34 Tahun 2022	2022-2026	14 September 2022
102		Kedungombo	Kedung Mulyo	188/22/K/411.519.01/2022	2022-2026	14 September 2022
103		Malangsari	Joyo Sari	25 Tahun 2022	2022-2026	14 September 2022
104		Sambirejo	Guyub Rukun	188/07/K/411.519.15/2022	2022-2026	13 September 2022
105		Sonobekel	Sonobekel Mandiri	145/12/411.519.07/2022	2022-2026	12 Februari 2022
106	Kecamatan Wilangan	Mancon	Info Mancon	188/17/411.520.004/2022	2022-2027	13 September 2022

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

SUSANTO, S.Kom
Pembina
NIP 19761128 200604 1 013

DATA KIM AKTIF 2024

KIM yang selalu aktif melaksanakan publikasi sepanjang tahun 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KIM	ALAMAT SEKRETARIAT	KODE POS	NO. TELP.	Alamat Web	Link Website	Link Media Sosial
1	Loceret	Desa Loceret	Trengginas	Jl. P. Tandean No. 08 Ds. Loceret	64471	0821396625917	trengginas.kim.id	https://trengginas.kim.id/berita/read/sosialisasi-program-smart-village-d21822-351804201001/0	https://www.instagram.com/kim_trengginas/p/DBslmtpSQ2q/?img_index=1
								https://trengginas.kim.id/berita/read/pelatihan-jurnalistik-di-desa-locer21824-351804201001/0	https://www.instagram.com/kim_trengginas/p/DBsqymmSEDB/?img_index=1
								https://trengginas.kim.id/berita/read/pelatihan-konten-kreator-videografi21827-351804201001/0	https://www.instagram.com/kim_trengginas/p/DCGNx-cymFb/
								https://trengginas.kim.id/berita/read/desa-loceret-berikan-usg-gratis-unt19507-351804201001	https://www.instagram.com/kim_trengginas/p/DCGOAy-SQ0l/?img_index=1
								https://trengginas.kim.id/berita/read/posyandu-balita-remaja-dan-lansia-d19508-351804201001	https://www.instagram.com/kim_trengginas/p/DCmTXnlz9bk/?img_index=1
								https://trengginas.kim.id/berita/read/kim-trengginas-juara-2-lcck-tingkat20212-351804201001	https://www.instagram.com/kim_trengginas/reel/DCqtQ9bP7Od/
									https://www.instagram.com/kim_trengginas/reel/DDExb8BBPAQ/
2	Ngronggot	Desa Juwet	MEKAR ASIH	Kantor Desa Juwet	64395	081391227783	mekar-asih.kim.id	https://mekar-asih.kim.id/berita/read/data-stock-darah-udd-pmi-kabupaten-7482-351807200301/0	
								https://mekar-asih.kim.id/berita/read/daftar-harga-bahan-pokok-kabupaten-7480-351807200301	
								https://mekar-asih.kim.id/berita/read/hari-kesaktian-pancasila17752-351807200301	
								https://mekar-asih.kim.id/berita/read/hari-batik-nasional17881-351807200301	
3	Ngronggot	Desa Kelutan	KELUTAN MAJU	Ds. Kelutan, kec. Ngronggot	64395	083851399336	kelutan-maju.kim.id	https://kelutan-maju.kim.id/berita/read/rt-rw-di-desa-kelutan19711-351807200401	https://www.instagram.com/p/DBpokYpzwtu/
								https://kelutan-maju.kim.id/berita/read/tempat-ibadah-di-desa-kelutan19010-351807200401	https://www.instagram.com/pemdes_juwet2331/reel/DAj7jTIyj_f/
								https://kepuh-bersinergi.kim.id/berita/read/pelantikan-kelompok-penyelenggaran-7862-351808200701	https://www.instagram.com/pemdes_juwet2331/p/DAmqToiTaCV/
4	Kertosono	Desa Kepuh	Kepuh Bersinergi	Jl. Puntodewo 48 Desa Kepuh	64351	082228977771	kepuh-bersinergi.kim.id	https://kepuh-bersinergi.kim.id/berita/read/pelantikan-kelompok-penyelenggaran-7862-351808200701	https://www.instagram.com/p/DD1-6rEhWGP/?img_index=1
								https://kepuh-bersinergi.kim.id/berita/read/kpps-desa-kepuh-lakukan-kegiatan-pe7966-351808200701	https://www.instagram.com/kim.kepuhbersinergi/p/DEMLHLLBWUx/?img_index=1
								https://kepuh-bersinergi.kim.id/berita/read/dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-d9100-351808200701	https://www.instagram.com/kim.kepuhbersinergi/p/DD9CmpNhonW/?img_index=1
									https://www.instagram.com/kim.kepuhbersinergi/p/DD8-8rEht1a/?img_index=1
									https://www.instagram.com/kim.kepuhbersinergi/p/DD4XglXBp-e/?img_index=1
5	Nganjuk	Kelurahan Mangundikaran	Mandiri	Jl. Brantas No.01	64412	082234984727	mandiri.kim.id	https://mandiri.kim.id/berita/read/bimbingan-pembuatan-konten-publikas6047-351813100701/0	https://www.instagram.com/kimmandirimangun/reel/C7BEp4vvea3/
								https://mandiri.kim.id/berita/read/sosialisasi-spp-irt3835-351813100701/0	https://www.instagram.com/kimmandirimangun/reel/C7OnWoCv4nP/
								https://mandiri.kim.id/berita/read/pelatihan-talenta-digital-anjuk-lad19296-351813100701/0	https://www.instagram.com/kimmandirimangun/reel/C8kDWFHSkcl/
								https://mandiri.kim.id/berita/read/remang-bersinar-remaja-mangundikara19299-351813100701/0	https://www.instagram.com/kimmandirimangun/reel/C_OFgO2yl71/
								https://mandiri.kim.id/berita/read/giat-hut-ke-65-pepabri19302-351813100701/0	https://www.instagram.com/dinaskominfo_nganjuk/reel/DClrqZOSvev/

								https://mandiri.kim.id/berita/read/baksos-karang-taruna-tunas-bhakti19303-351813100701/0	https://www.youtube.com/watch?v=vAa9RtHYL3s&ab_channel=KIMMANDIRIMANGUNDIKARAN
								https://mandiri.kim.id/berita/read/program-prioritas-pangan-terpadu19369-351813100701/0	https://www.youtube.com/watch?v=l6FP29RsCB4&ab_channel=KIMMANDIRIMANGUNDIKARAN
									https://www.youtube.com/watch?v=TARW5I7bO3M&ab_channel=KIMMANDIRIMANGUNDIKARAN
6	Rejoso	Desa Sidokare	SMART				smart.kim.id	https://smart.kim.id/berita/read/pemdes-sidokare-lakukan-fogging-unt10182-351816200501/2	
								https://smart.kim.id/berita/read/pps-sidokare-lantik-dan-beri-bimbin11939-351816200501/2	
								https://smart.kim.id/berita/read/pembinaan-lanjutan-desa-cantik-oleh18363-351816200501/0	
								https://smart.kim.id/berita/read/pps-desa-sidokare-lantik-35-orang-k19489-351816200501/0	
								https://smart.kim.id/berita/read/rapat-koordinasi-persiapan-identifi15344-351816200501/0	
								https://smart.kim.id/berita/read/pps-desa-sidokare-bersama-pantarlih13296-351816200501/0	
7	Berbek	Bendungrejo	Bendungrejo Joyo				bendungrejo-joyo.kim.id	https://bendungrejo-joyo.kim.id/berita/read/pentingnya-identitas-kependudukan-d7376-351803200701/0	https://www.instagram.com/bendungrejo.desaku/
								https://bendungrejo-joyo.kim.id/berita/read/sub-pekan-imunisasi-nasional-sub-pi7431-351803200701/0	https://www.tiktok.com/@bendungrejodesaku/video/7413060832562515218?is_from_webapp=1
								https://bendungrejo-joyo.kim.id/berita/read/musrenbang-rkpd-20258065-351803200701/0	https://www.tiktok.com/@bendungrejodesaku/video/7407123050614820103?is_from_webapp=1
								https://bendungrejo-joyo.kim.id/berita/read/monev-inspektorat-apbdes-tahun-20238066-351803200701/0	https://www.tiktok.com/@bendungrejodesaku/video/7378761568126815494?is_from_webapp=1
								https://bendungrejo-joyo.kim.id/berita/read/pembagian-blt-dd-tahun-202410695-351803200701/0	https://www.tiktok.com/@bendungrejodesaku/video/7376470300214447365?is_from_webapp=1
								https://bendungrejo-joyo.kim.id/berita/read/siraman-sedudo-tahun-202413774-351803200701/0	https://www.tiktok.com/@bendungrejodesaku/video/7374639302501747969?is_from_webapp=1

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

[illegible], S.Kom
Pembina
NIP 19761128 200604 1 013

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota

10 Perangkat Daerah dengan media komunikasi yang aktif

1	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata	
	Website	https://disporabudpar.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/dinasporabudpar_nganjuk
2	Rumah Sakit Daerah Nganjuk	
	Website	https://home.rsdngk.my.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/rsdnganjuk
3	Kecamatan Wilangan	
	Website	https://wilangan.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/kec.wilangan
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Nganjuk	
	Website	https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/dukcapil.nganjuk/
5	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Website	https://dppkb.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/dppkbnganjuk
6	Dinas Pertanian	
	Website	https://disperta.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/diperta_nganjuk/
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	
	Website	https://dkpp.nganjukkab.go.id
	Media Sosial	https://instagram.com/dinaskppnganjuk
8	Kecamatan Tanjunganom	
	Website	https://tanjunganom.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/kec.tanjunganom
9	Kecamatan Prambon	
	Website	https://prambon.nganjukkab.go.id
	Media Sosial	https://www.instagram.com/kecamatanprambon/
10	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	
	Website	https://disperindag.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/disperindagnganjuk/
11	Bappeda Kab.Nganjuk	
	Website	https://bappeda.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/bappeda.ngk/
12	Dinas Tenaga Kerja	
	Website	https://disnaker.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/disnaker_nganjuk
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	Website	https://pupr.nganjukkab.go.id/
	Media Sosial	https://www.instagram.com/puprnganjuk/

Mengetahui,

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

[redacted], S.Kom
Pembina
NIP 19761128 200604 1 013

LAPORAN

PENGELOLAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024

Laporan ini Disusun Sebagai Bentuk
Tanggung Jawab dan Pengukuran Kinerja
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan atas pelayanan publik.

Pengelolaan media komunikasi publik menjadi semakin penting di era informasi yang berkembang pesat saat ini. Hal ini dikarenakan citra organisasi dapat mudah terpengaruh oleh konten yang tersebar di media sosial dan media lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan media komunikasi publik yang baik dapat membantu organisasi memperbaiki citra mereka dan meminimalkan dampak negatif dari konten yang tidak diinginkan. Selain itu, pengelolaan media komunikasi publik juga dapat membantu organisasi dalam meningkatkan hubungan mereka dengan publik dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan publik.

Pengelolaan media komunikasi publik yang efektif dapat membantu organisasi dalam mengkomunikasikan pesan mereka secara efektif dan memastikan bahwa pesan mereka tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh publik. Dengan memanfaatkan media sosial dan media lainnya, organisasi dapat memperluas jangkauan mereka dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari publik. Terakhir, informasi yang diperoleh dari media komunikasi publik dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan media komunikasi publik sangat penting bagi organisasi untuk memperbaiki citra mereka, memperkuat hubungan dengan publik, meningkatkan efektivitas komunikasi, meningkatkan keterlibatan publik, dan meningkatkan pengambilan keputusan.

Begitu juga dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan mitra strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk, sebagai mitra penyebarluasan informasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai agen informasi. Keberadaan KIM di desa/kelurahan menjadikan, mitra kerja yang efektif bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menyampaikan dan menerma informasi dari masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pengelolaan Media Komunikasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola Media Komunikasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

Adapun tujuan penyusunan Laporan ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak konten informasi yang telah diproduksi dan jangkauannya serta media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi.

C. Kepengurusan KIM di Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk memiliki 103 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dan telah memiliki akun website dari Kementerian Kominfo dengan domain kim.id. Koordinasi dengan selurh anggota KIM dengan Finas Kominfo selaku pembina terjalin melalui Whatsapp Group KIM Nganjuk.

Melalui tatap muka secara langsung, pada 29 Oktober 2024, Dinas Kominfo telah mengadakan Bimbingan teknis bagi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang dihadiri oleh 104 KIM di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2024, terdapat KIM baru dari Kelurahan Werungotok Kecamatan Nganjuk.



Dari 104 KIM yang hadir diberikan pemahaman tentang pentingnya publikasi di daerah, serta peran serta KIM sebagi filter informasi di masyarakat.



D. Aktifitas KIM Untuk Penyebarluasan Informasi

Dinas Kominfo selaku pembina KIM di daerah, selain memberikan pengetahuan tentang publikasi dan jurnalistik, juga memantau aktiftas KIM dalam penyebarluasan informasi. Pemantauan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2024, melaui website maupun media sosial yang dikelola oleh KIM.

Hasil pemantauan diketahui bahwa sebanyak 6 KIM telah aktif melaksanakan penyebarluasan informasi, yaitu :

1. KIM Bendungrejo Joyo, Desa Bendungrejo Kecamatan Berbek
2. KIM Tani Makmur, Desa Sumberurip Kecamatan Berbek
3. KIM Mekar Asih, Desa Juwet Kecamatan Ngronggot
4. KIM Kelutan Maju. Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot
5. KIM Mandiri, Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk
6. KIM Smart, Desa Sidokare Kecamatan Rejoso
7. KIM Trengginas, Desa Loceret Kecamatan Loceret
8. KIM Kepuh Bersinergi, Desa Kepuh Kecamatan Kertosono

E. Peningkatan Kapasitas Anggota KIM

Dari pendampingan anggota KIM oleh Dinas Kominfo, bahwa KIM yang aktif dalam penyebarluasan informasi dilaksanakan lomba sebagai pemicu semangat anggota KIM untuk lebih aktif dan berdaya. Dari seleksi berdasarkan aktifitas anggota KIM dalam penyebarluasan informasi, KIM Trengginas, Desa Loceret Kecamatan Loceret, KIM Mandiri, Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk, dan KIM Kepuh Bersinergi, Desa Kepuh Kecamatan Kertosono berhasil maju dalam Lomba Cerdik Cermat Komunikatif.





Dari LCCK yang telah dilaksanakan, Juara I dimenangkan oleh Tim KIM Kepuh Bersinergi dari Desa Kepuh, Kertosono, Juara II Tim KIM Trengginas dari Desa Loceret dan Juara III Tim KIM Mandiri dari Kelurahan Mangundikaran, Nganjuk

E. Penutup

Laporan Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat, Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Tim Pengelola Media Komunikasi Publik yang akan datang.

Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 31 Desember 2024

Mengetahui Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Penyusun, Pranata Humas / Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
HARI PURWANTO, ST. Pembina NIP. 19681211 199901 1 001	**HANIS ARY WIBISONO, S.E** Penata NIP. 19760918 201408 1 001

LAPORAN

PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2024

Laporan ini Disusun Sebagai Bentuk
Tanggung Jawab dan Pengukuran Kinerja
Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan atas pelayanan publik.

Pengelolaan media komunikasi publik menjadi semakin penting di era informasi yang berkembang pesat saat ini. Hal ini dikarenakan citra organisasi dapat mudah terpengaruh oleh konten yang tersebar di media sosial dan media lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan media komunikasi publik yang baik dapat membantu organisasi memperbaiki citra mereka dan meminimalkan dampak negatif dari konten yang tidak diinginkan. Selain itu, pengelolaan media komunikasi publik juga dapat membantu organisasi dalam meningkatkan hubungan mereka dengan publik dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan publik.

Pengelolaan media komunikasi publik yang efektif dapat membantu organisasi dalam mengkomunikasikan pesan mereka secara efektif dan memastikan bahwa pesan mereka tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik oleh publik. Dengan memanfaatkan media sosial dan media lainnya, organisasi dapat memperluas jangkauan mereka dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari publik. Terakhir, informasi yang diperoleh dari media komunikasi publik dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan media komunikasi publik sangat penting bagi organisasi untuk memperbaiki citra mereka, memperkuat hubungan dengan publik, meningkatkan efektivitas komunikasi, meningkatkan keterlibatan publik, dan meningkatkan pengambilan keputusan.

B. Maksud dan Tujuan

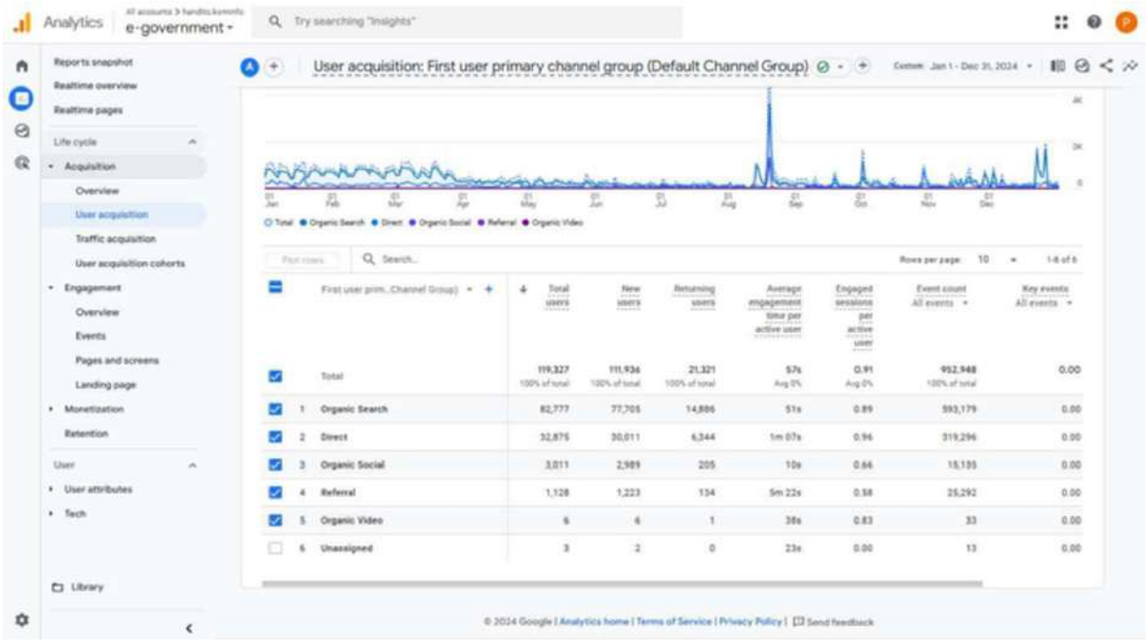
Penyusunan Laporan Pengelolaan Media Komunikasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola Media Komunikasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

Adapun tujuan penyusunan Laporan ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak konten informasi yang telah diproduksi dan jangkauannya serta media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi.

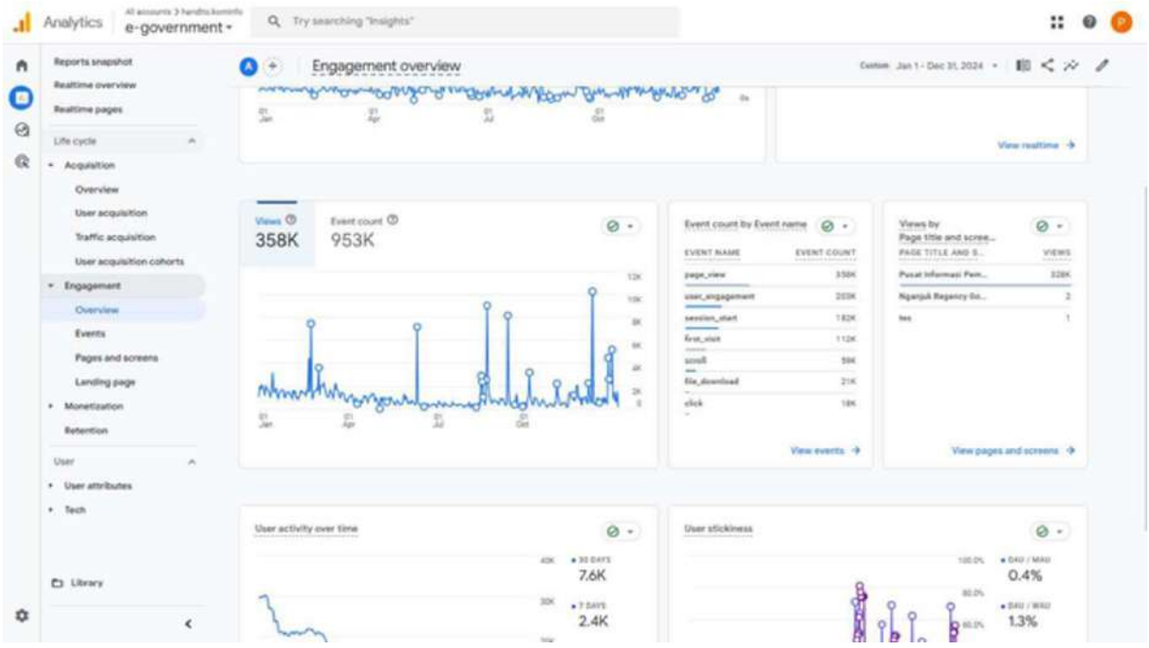
C. Laporan Media Daring

1. nganjukkab.go.id

Media website yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah Portal Informasi Pemkab Nganjuk atau yang biasa disebut dengan PING dengan domain nganjukkab.go.id. Sepanjang tahun 2024 telah telah memuat artikel sejumlah 495, berita foto sebanyak 365, berita video sejumlah 172, dengan jumlah pengguna (*user*) 119.327.



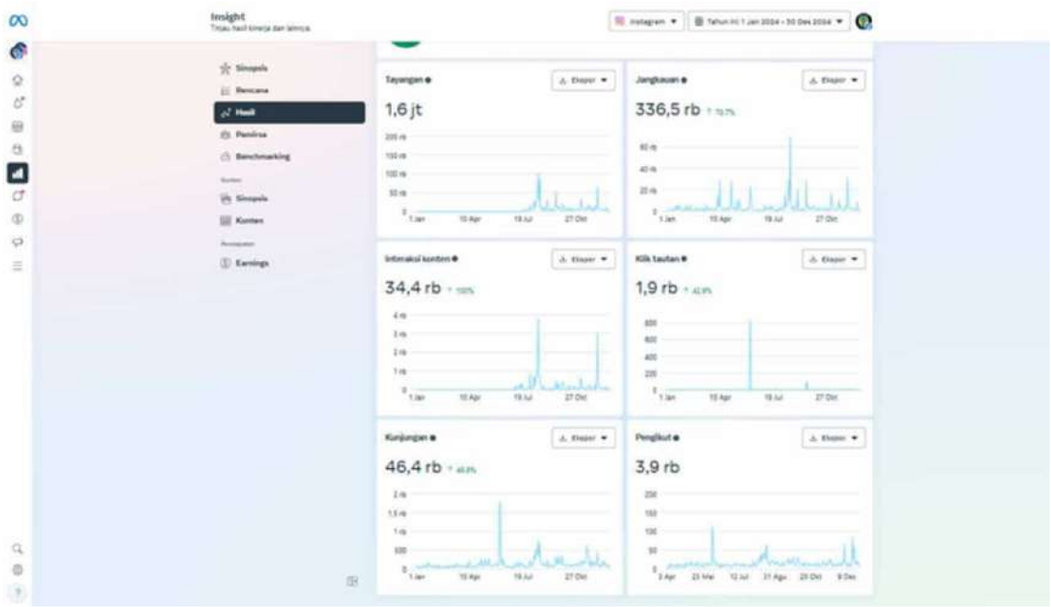
Pada website juga diketahui jumlah pengunjung (*view*) sebanyak 358.000 orang.



D. Laporan Media Sosial

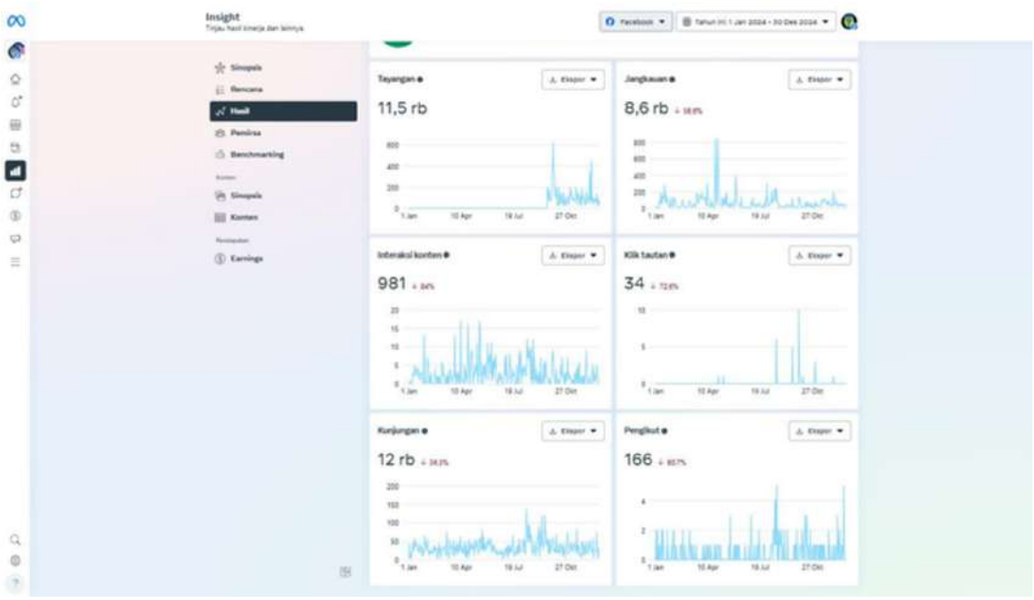
1. Instagram (https://www.instagram.com/dinaskominfo_nganjuk/)

Media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nnganjuk, sebagai media penyebarluasan informasi adalag instagram, facebook, dan tiktok. Sepanjang 2024 instagran Diskominfo memiliki tayangan sejumlah 1.616.788 dengan jangkuan yang bisa meraih 336.505, interaksi konten 34.356. Instagram Diskominfo juga berhasil meraih 1.896 klik tautan dan 46.445 kunjungan, dan berhasil menambah pengikut (*follower*) sebanyak 3.896, sehingga sekarang meraih 19.700 pengikut



2. Facebook Fanpage (https://www.facebook.com/dinaskominfo.kabnganjuk/)

Facebook Dinas Kominfo pada 2024 ini berhasil menabah 11.531 tayangan, dengan 8.627 jangkauan. Interaksi konten meraih 981, dengan 34 klik tautan. Dengan kinjungan 11.937, facebook Diskominfo berhasil menambah pengikut sebanyak 166 *follower*, sehingga sekarang mempunyai pengikut sebanyak 5.900 pengikut.



3. Tiktok

Pada 2024, Dinas Kominfo menambah 1 media sosial yaitu tiktok. Maksud dari penggunaan akun media sosial tiktok ini yaitu maraih pengguna sosial usia muda. Belum genap setahun, tiktok Diskominfo berhasil meraih 3.057.485 tayangan, dengan jangkauan sebesar 55.719.



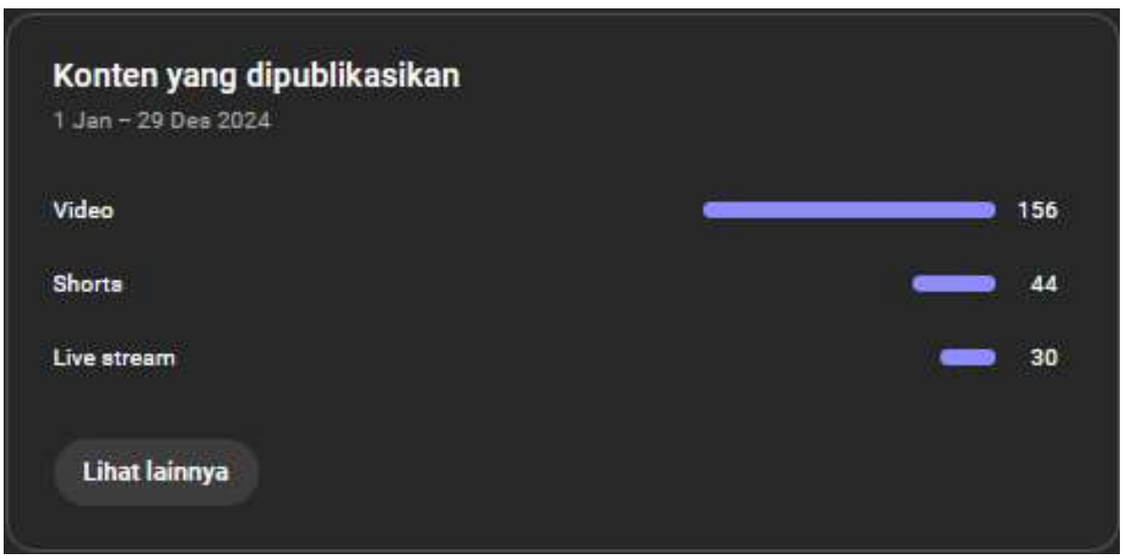




4. Youtube (https://www.youtube.com/DiskominfoKabNganjuk)

Channel Youtbe sepanjang 2024 berhasil menambah tayangan sejumlah 92.300, dengan tambahan subscriber sebanyak 546. Dalam channel ini berhasil menambah jumlah konten video sejumlah 156 video dan 44 short video. Diskominfo juga telah melaksnakan livestream sebanyak 30 kali sepanjang 2024 ini.





E. Penutup

Laporan pengelolaan media komunikasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Tim Pengelola Media Komunikasi Publik yang akan datang.

Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Nganjuk, 31 Desember 2024

Mengetahui Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Penyusun, Pranata Humas / Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media
HARI PURWANTO, ST. Pembina NIP. 19681211 199901 1 001	**HANIS ARY WIBISONO, S.E** Penata NIP. 19760918 201408 1 001

LAMPIRAN IX

Dokumen Pendukung Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Mangundikaran Nganjuk, Jawa Timur 64412
Telepon/Fax (0358) 3550320 Email: diskominfo@nganjukkab.go.id
Website: https://diskominfo.nganjukkab.go.id

DOKUMEN PROFIL DAERAH



Nganjuk, 13 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NGANJUK

[redacted], S.Kom
Pembina
NIP 19761128 200604 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550321
email : diskominfo@nganjukkab.go.id

PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMPERBAHARUI DATANYA SESUAI SIKLUS JENIS DATA (SESUAI KEPUTUSAN DAFTAR DATA PRIORITAS KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024) TAHUN 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral	Jumlah Data Sektoral yang terupdate	Prosentase Data Terupdate
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	5	5	100%
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7	7	100%
3	Inspektorat Daerah	3	3	100%
4	Dinas Pendidikan	24	24	100%
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	11	11	100%
6	Dinas Kesehatan	33	33	100%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21	21	100%
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	100%
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	10	100%
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	8	100%
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	100%
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	9	100%
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	7	7	100%
14	Dinas Tenaga Kerja	4	4	100%
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	100%
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	21	100%
17	Dinas Perhubungan	1	1	100%
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	16	16	100%
19	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	100%
20	Dinas Pertanian	4	4	100%
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8	8	100%
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	7	100%
23	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	100%
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	100%
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5	100%
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	2	100%

27	Badan Pendapatan Daerah	2	2	100%
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	6	100%
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	100%
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	7	100%
31	Kecamatan Bagor	3	3	100%
32	Kecamatan Baron	3	3	100%
33	Kecamatan Berbek	3	3	100%
34	Kecamatan Gondang	3	3	100%
35	Kecamatan Jatikalen	3	3	100%
36	Kecamatan Kertosono	3	3	100%
37	Kecamatan Lengkong	3	3	100%
38	Kecamatan Loceret	3	3	100%
39	Kecamatan Nganjuk	3	3	100%
40	Kecamatan Ngetos	3	3	100%
41	Kecamatan Ngluyu	3	3	100%
42	Kecamatan Ngronggot	3	3	100%
43	Kecamatan Pace	3	3	100%
44	Kecamatan Patianrowo	3	3	100%
45	Kecamatan Prambon	3	3	100%
46	Kecamatan Rejoso	3	3	100%
47	Kecamatan Sawahan	3	3	100%
48	Kecamatan Sukomoro	3	3	100%
49	Kecamatan Tanjunganom	3	3	100%
50	Kecamatan Wilangan	3	3	100%
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	4	4	100%
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	5	5	100%
	JUMLAH	**318**	**318**	**100%**

Rumus :

Presentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai Keputusan Daftar Data Prioritas Kabupaten Nganjuk Tahun 2024)=

$$\frac{perangkat\ daerah\ yang\ memperbaharui\ datanya\ sesuai\ siklus\ jenis\ data\ (sesuai\ renstra\ kominfo)}{jumlah\ perangkat\ daerah} x\ 100\%$$

$= \frac{52}{52} x\ 100\%$

$= 100\%$

Nganjuk, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Nganjuk

SUJONO, S.Kom
Pembina
NIP. 19761128 200604 1 013